



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188 / 52 /KEP/412.013/2026**

TENTANG

**ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 - 2029**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro, dengan melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/300/KEP/412.013/2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setiap tahun, salah satu dasar perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan karena adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perubahan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dilakukan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 – 2029.
- KEDUA : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini terdiri dari :
1. Lampiran 1 – Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 2. Lampiran 2 – Buku 2 Kondisi Target Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
 3. Lampiran 3 – Buku 3 Peta Rencana Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro wajib mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 – 2029.
- KEEMPAT : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
- KELIMA : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan reviu paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan berdasarkan :
- a. Perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Perubahan pada unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); dan
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan reviu pada paruh waktu tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan berdasarkan :

- a. Perubahan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah; dan
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Pemantauan dan Reviu terhadap Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/300/KEP/412.013/2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 18 Februari 2026





BUKU 1 **KONDISI EKSISTING** **ARSITEKTUR SISTEM** **PEMERINTAHAN** **BERBASIS ELEKTRONIK** **(SPBE)**

PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO

2026

Lembar Pengesahan

DOKUMEN ARSITEKTUR & PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPBE
DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang tertuang pada Perpres nomor 95 tahun 2018. Secara umum, SPBE merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dengan melakukan digitalisasi pada layanan administrasi internal dan layanan publik. SPBE juga ditujukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. Dimana dalam penerapan SPBE dimulai dari tahap: perencanaan, implementasi dan evaluasi.



Dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi internal maupun publik perlu dilakukan transformasi digital dimana pengguna harus menggunakan banyak aplikasi untuk mendapatkan berbagai layanan yang ada.

Oleh sebab itu, perlu dikaji kembali peluang untuk perbaikan yang berkelanjutan dengan menginisiasi platform portal layanan publik (super app) yang memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan hanya dalam sebuah platform. Hal ini tentunya dapat diwujudkan dengan memetakan kebutuhan integrasi antar aplikasi yang saat ini masih silo. Selanjutnya bisa dengan menginisiasi pemanfaatan platform Big Data sebagai platform pendukung dalam pengambilan keputusan strategis dan juga dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni dengan menyusun dokumen Arsitektur SPBE secara berkala setiap tahunnya. Tujuan dari disusunnya dokumen perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu, dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini berpedoman pada Perpres 95/2018 dan Arsitektur SPBE Nasional serta visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD. Selain itu, dalam menyusun Arsitektur SPBE ini berpedoman pada Permenpan-RB nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara tauval SPBE yang memuat penjelasan mendetail terkait 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam dokumen ini dalam rangka untuk peningkatan indeks SPBE dan mewujudkan SPBE yang berdampak bagi peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Secara umum, Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi. Arsitektur SPBE digunakan sebagai pedoman untuk lima tahun kedepan dalam rangka untuk menghadirkan transformasi digital dalam layanan administrasi pemerintah maupun publik.

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	11
1.3. Landasan Hukum	12
1.4. Landasan Teori	13
1.4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi	13
1.4.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	18
1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	21
1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional	24
Bab II Visi dan Misi Strategi SPBE	46
2.1. Visi	47
2.2. Strategi Peningkatan SPBE	49
2.3. Inisiatif Strategis SPBE	51
Bab III Analisa Kondisi as-is SPBE	53
3.1. Kebijakan & Manajemen	54
3.1.1. Kebijakan	54
3.1.2. Manajemen	54
3.2. Arsitektur SPBE	55
3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis	55
3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis	56
3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis	81
3.2.2. Arsitektur Data dan Informasi	84
3.2.2.1. Katalog Data dan Informasi	84
3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi	209
3.2.3. Arsitektur Layanan SPBE	212
3.2.3.1. Katalog Layanan	212
3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan	304
3.2.4. Arsitektur Aplikasi	307
3.2.4.1. Katalog Aplikasi	307
3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi	386
3.2.5. Arsitektur Infrastruktur SPBE	390
3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)	390
3.2.5.2. Sistem Integrasi	404
3.2.5.3. Platform	409
3.2.6. Arsitektur Keamanan	459
3.2.6.1. Standar Keamanan	461
3.2.6.2. Penerapan Keamanan	462

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 230.706 Ha. Secara astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak di antara 112°25'-112°09' Bujur Timur dan 6°59'-7°37' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Bojonegoro secara administratif terdiri dari 28 Kecamatan dan 430 Desa. Berdasarkan dokumen RPJMD, visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

"Terwujudnya Bojonegoro Makmur Dan Membanggakan"

Pertimbangan dari adanya visi diatas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan transformasi digital untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik khususnya pada sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan.



Gambar 1.1.1. Kerangka Visi Indonesia Digital 2045

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dari Visi Misi menuju Indonesia Emas 2045 perlu didukung dengan adanya penekanan fokus arah kebijakan pada upaya nasional untuk meraih kapasitas dan penguasaan teknologi digital ke depan yang dituangkan ke dalam Visi Indonesia Digital 2045 sebagai berikut.

"Mewujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kolaboratif Berbasis Inovasi, untuk Mendukung Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan"

Berangkat dari Visi Indonesia Digital 2045, maka didapatkan poin-poin misi yang menjadi tujuan bagi arah Indonesia Digital ke depan. Berikut adalah misi-misi tersebut:

- Mempercepat transformasi digital nasional sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan dan keamanan nasional;
- Mengembangkan dan memperkuat ekosistem digital nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, bisnis dan industri, asosiasi, akademisi, dan masyarakat sebagai co-creator dari ekosistem digital;
- Membuat regulasi-regulasi yang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan teknologi digital; dan
- Mendorong penguatan institusi sosial kemasyarakatan (lembaga pendidikan, keagamaan, masyarakat/keluarga) sebagai upaya masif peningkatan pemahaman digital untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital dan meminimalisir dampak negatifnya.

Sebagaimana tertuang dalam kerangka Visi Indonesia Digital 2045 diperlukan persiapan dan perencanaan di berbagai sektor secara matang, serta orkestrasi seluruh komponen pembangunan digital yang didukung dengan adanya 3 pilar, yakni sebagai berikut.

- Pemerintahan digital yang modern dan responsi;
- Ekonomi digital untuk menciptakan ekonomi inovatif berbasis teknologi digital; dan
- Masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, ditentukan sasaran yang menjadi target pencapaian Indonesia Digital 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu dibangun pondasi utama dari pembangunan digital, yaitu infrastruktur digital, dan dikembangkan ekosistem digital nasional yang terdiri dari Regulasi dan Kebijakan, SDM Digital, Riset dan Inovasi Digital, serta Keamanan dan Data. Dengan pondasi dan ekosistem digital yang kuat, perkembangan teknologi masa depan akan dapat dikendalikan dan dimanfaatkan dengan baik, artinya kebermanfaatan sosial dan ekonomi dapat diraih, dan potensi ancaman dapat diminimalisir.

Langkah selanjutnya sebagai bentuk upaya mewujudkan visi tersebut di era Revolusi Industri 4.0 saat ini tentunya dalam bertransformasi dapat didukung dengan adanya penerapan teknologi pada berbagai sendi pemerintahan, seperti: penetrasi teknologi yang serba disruptif, serta adanya perkembangan *Internet of Things* (IoT) yang menjadikan proses bisnis semakin cepat dan mudah dijalankan. Lebih jauh, pelayanan administrasi pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai jalur untuk pengelolaan data dan aplikasi (*cloud computing*), hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). IoT telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor dengan menghubungkan perangkat mesin ke internet. IoT memungkinkan pengumpulan data secara *realtime*, otomatisasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Namun dalam penerapan transformasi digital

tentunya terdapat beberapa tantangan seperti: perlunya dukungan regulasi, infrastruktur dan konektivitas, SDM Digital dan tidak kalah penting di sisi kebutuhan pendanaan yang besar.

Menjawab tantangan transformasi digital, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan mandat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Instruksi nasional ini menjadi payung hukum yang kuat dalam mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut telah dijelaskan mengenai misi SPBE Nasional sebagai berikut.

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."

Pertimbangan dari adanya misi nasional diatas bagi pemerintah daerah yaitu untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh khususnya kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai langkah peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan yang fokus pada orientasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK karena faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Sejalan dengan fakta diatas, pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) telah lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat hanya saja masih terdapat keterbatasan yang perlu disempurnakan diantaranya: standarisasi TIK dan *Service Level Agreement* (SLA), pengembangan aplikasi yang masih belum seragam, kemudian adanya duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK yang mengurangi tingkat keamanan informasi dalam proses pemeliharaan. Penerapan SPBE tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi administratif melalui pengurangan metode manual, melainkan juga membuka peluang untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi. Selain itu, juga memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan global. Penerapan transformasi digital ini juga berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan saluran interaksi yang responsif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SPBE dapat dipandang sebagai kunci utama dalam membentuk pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital ini.



Gambar 1.1.2. Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Sejauh ini di tahun 2023, dalam rangka mendukung keterpaduan layanan digital nasional di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Presiden telah menetapkan peraturan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diharapkan dengan adanya payung hukum ini dapat mencapai misi SPBE nasional. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Berikut adalah daftar 9 (sembilan) layanan prioritas yang menjadi fokus nasional dalam rangka mempercepat laju transformasi digital pemerintahan.



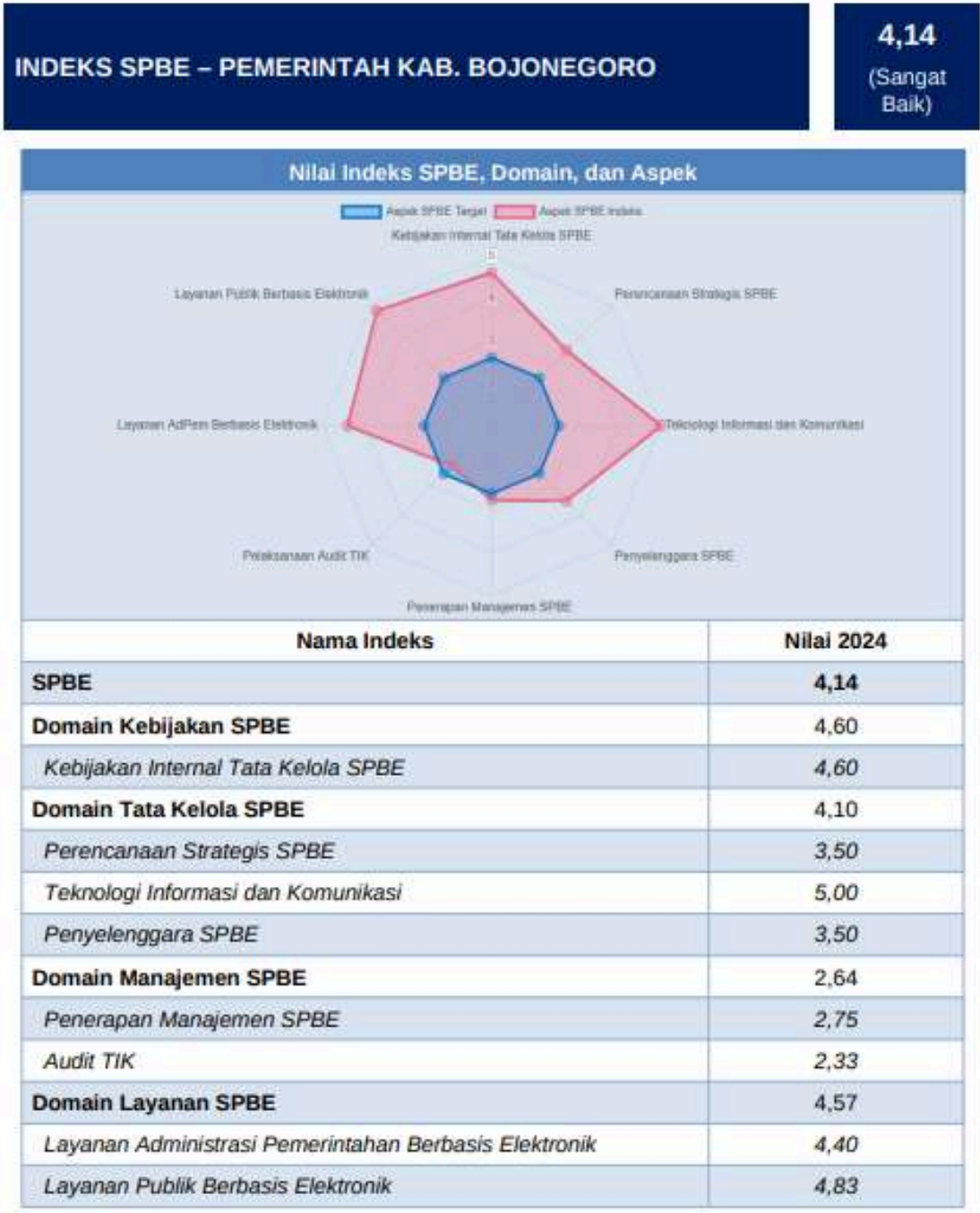
Gambar 1.1.3. Fokus Utama 9 (Sembilan) Layanan Prioritas Pemerintah

Dalam rangka mempercepat proses transformasi digital pemerintahan, perlu adanya dukungan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap beberapa hal sebagai berikut.

1. Menyatukan 9 layanan prioritas diatas kedalam 1 portal publik dan 1 portal aparatur;
2. Mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas seperti penggunaan *Digital ID, Data Exchange, Digital Payment*, Portal Nasional dan Layanan Dasar; dan
3. Fokus pada kemudahan layanan dengan mengevaluasi setiap pengembangan aplikasi yang ada berdasarkan testimoni langsung penggunanya.

Keterpaduan layanan digital nasional dapat diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Arsitektur SPBE yang sejalan dengan arahan nasional. Dimana penerapan SPBE ini juga dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiatif untuk menyusun dokumen perencanaan ini yang bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi.

Komitmen kepala daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kunci dalam menciptakan budaya digital dalam sistem pemerintahannya. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih indeks SPBE untuk kategori kabupaten/kota dengan perolehan nilai 4.14 (Sangat Baik). Sehingga dalam hal ini, dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara bertahap.



Gambar 1.1.1. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024
(Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Bojonegoro, 2024)

Secara umum, hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menjadi *baseline* dalam penyusunan Arsitektur SPBE. Dokumen ini disusun untuk menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lima tahun mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya digitalisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu:

1. Referensi Arsitektur SPBE, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
2. Domain Arsitektur SPBE, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.

Diharapkan dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebagai langkah optimalisasi SPBE, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penyusunan dan pembaharuan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Harapannya dengan adanya dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan SPBE yang lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2026-2029 yaitu:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan SPBE;
2. Memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting arsitektur proses bisnis, data, layanan, aplikasi, teknologi/ infrastruktur dan keamanan informasi;
3. Menyusun target arsitektur SPBE ke depan sesuai dengan arahan referensi, kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan layanan SPBE yang terbaik sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Daerah;
4. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terintegrasi antar pemangku kepentingan; dan
5. Terwujudnya implementasi SPBE yang terarah dan komprehensif.

Adapun tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2026-2029 sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Menyusun Arsitektur SPBE yang selaras dengan visi, misi dan tujuan serta rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna mendukung pencapaian kesesuaian dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE sehingga dapat menjadi yang menjadi acuan bagi pengembangan SPBE ke depan;
3. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan

4. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2029 guna optimalisasi layanan masyarakat yang semakin baik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
21. Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
24. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
25. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bojonegoro; dan
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, dan tentunya yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah

daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 47.992 struktur pada 95 kementerian/lembaga yang telah disederhanakan, 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah serta 44.870 Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional pada 91 kementerian/lembaga, disusul dengan 31 provinsi, 371 kabupaten dan 86 kota yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

2. Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang Tidak Efektif

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Tercatat 37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai.

3. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 159 Instansi Pemerintah yang memiliki tingkat kematangan SPBE “baik”. Kualitas digital birokrasi semakin positif, tercermin pada indeks *E- Government Development Index* Bojonegoro (EGDI) yang dikeluarkan oleh United Nations. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-88 atau naik 19 level dari tahun 2018.

4. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp 112 Triliun.

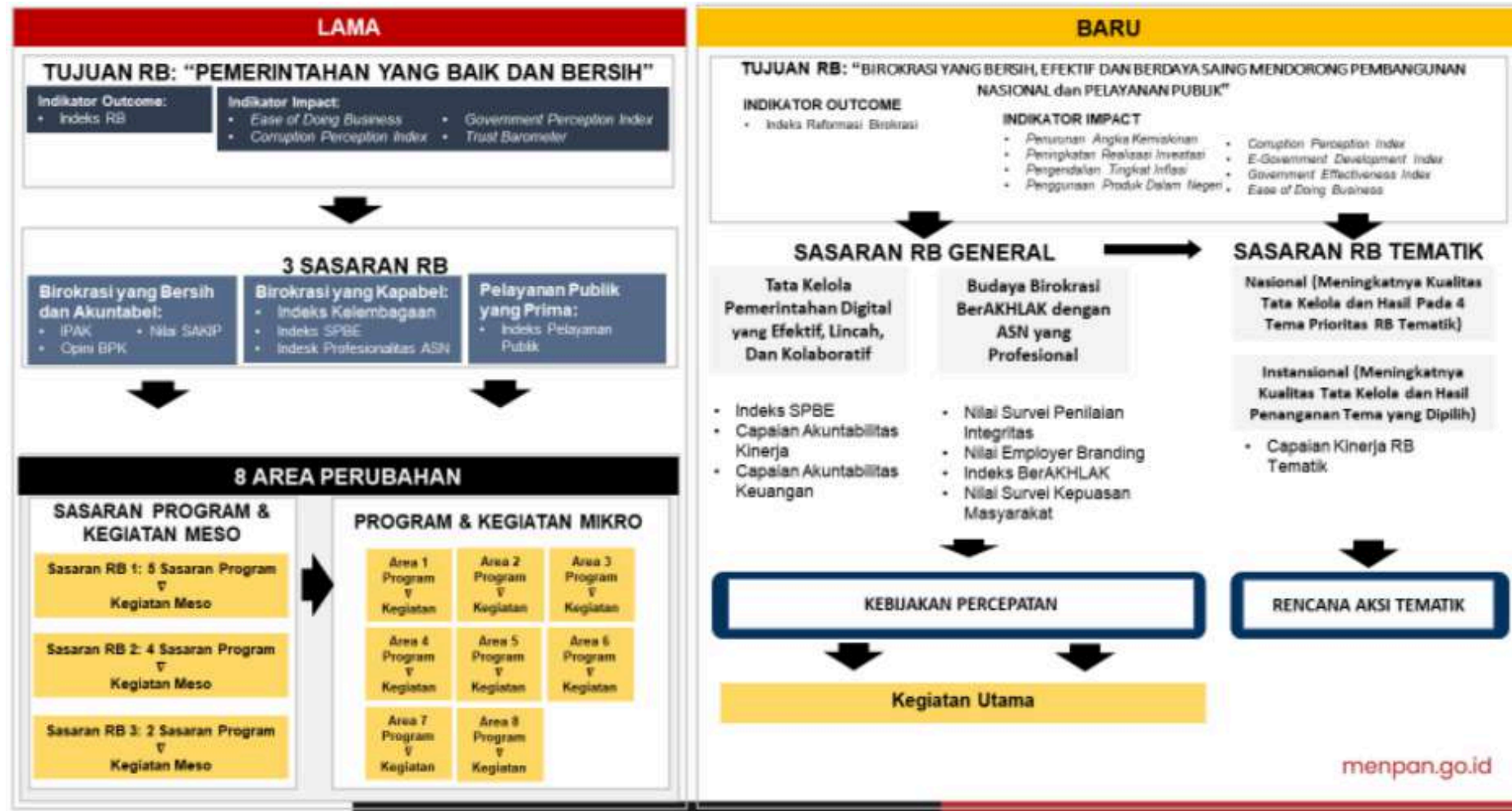
5. Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 1.937 unit kerja WBK dan 225 unit kerja WBBM.

6. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2021, terdapat 56 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

A. Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi



Gambar 1.4.1.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

Gambaran Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman.

1. Tujuan RB

Tujuan pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman yaitu “Pemerintahan yang baik dan bersih”, menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang. Isu tersebut terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran Strategis RB

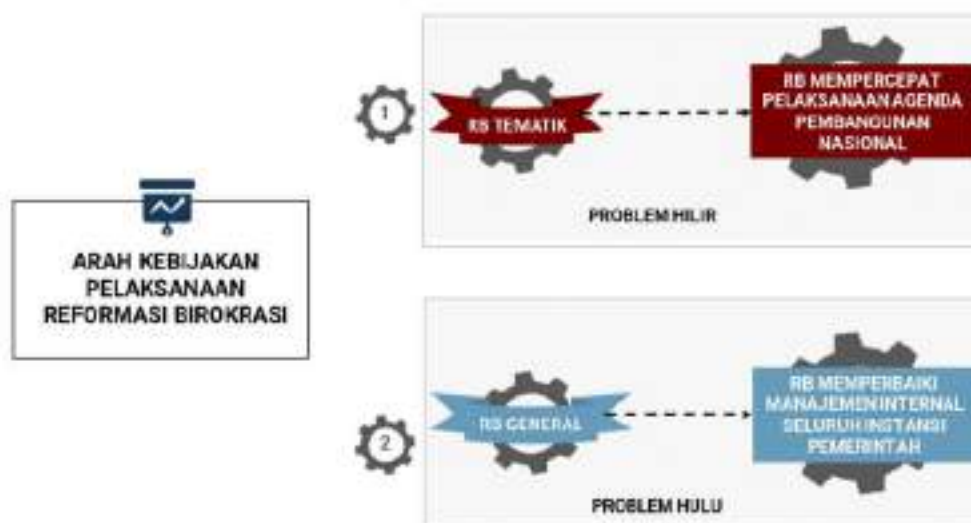
Sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, hard element terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek soft element yaitu terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Kegiatan RB tidak dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi atas pelaksanaan RB yaitu mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat serta menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar tersebut, setelah penajaman pelaksanaan RB mengarah ke dalam dua fokus “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir RB Tematik.



Gambar 1.4.1.2. Double Track Fokus Pelaksanaan RB

5. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Guna mendapatkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan untuk menunjukkan efektivitas RB, maka ditentukan indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat intermediate outcomes dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

1.4.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah sehingga SPBE menjadi terpadu dan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh dapat menghasilkan proses birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

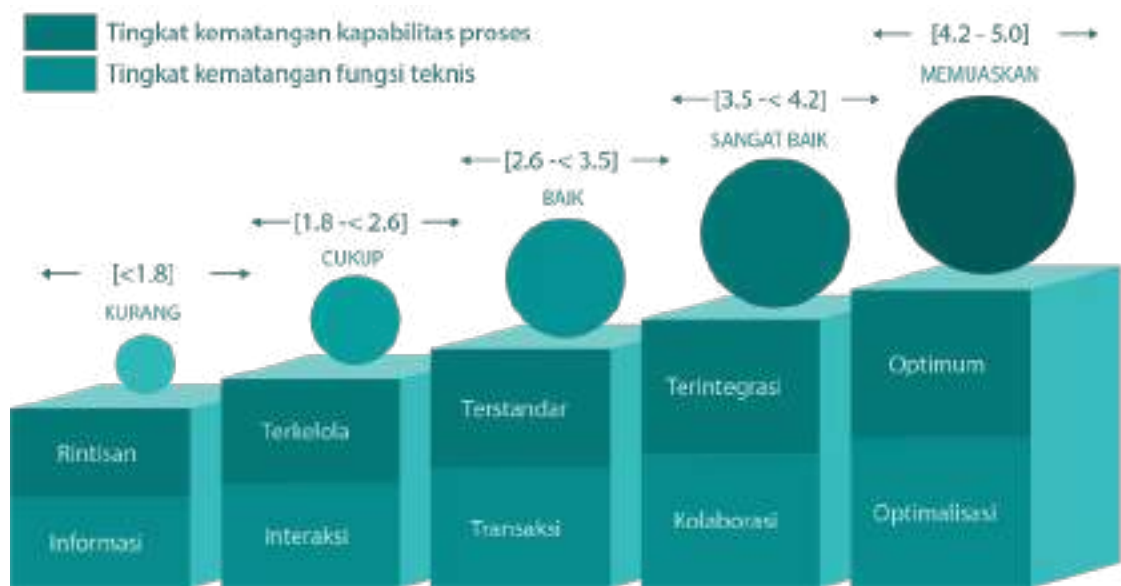


Gambar 1.4.3.1. Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Secara umum implementasi SPBE terdapat tiga tahapan penting dalam kesuksesan SPBE, yaitu:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak;
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi); dan
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progres penerapan Arsitektur SPBE khususnya *Roadmap*, Kondisi permasalahan eksisting SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Saat ini, kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE untuk mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarah pada pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 1.4.3.2. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

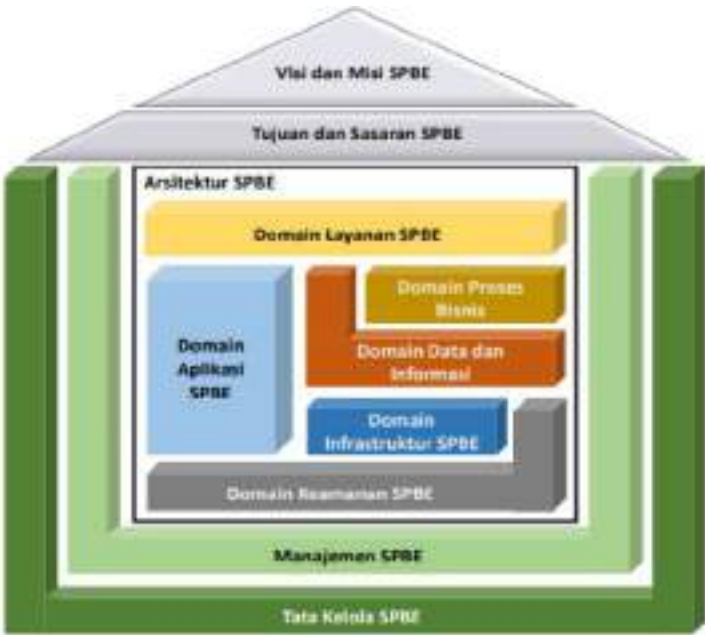
Adapun kondisi tingkat kematangan penerapan yang terdapat pada SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.3.1. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat		Karakteristik
1	Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
	Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah.
2	Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
	Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk dua arah.
3	Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4	Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.
5	Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

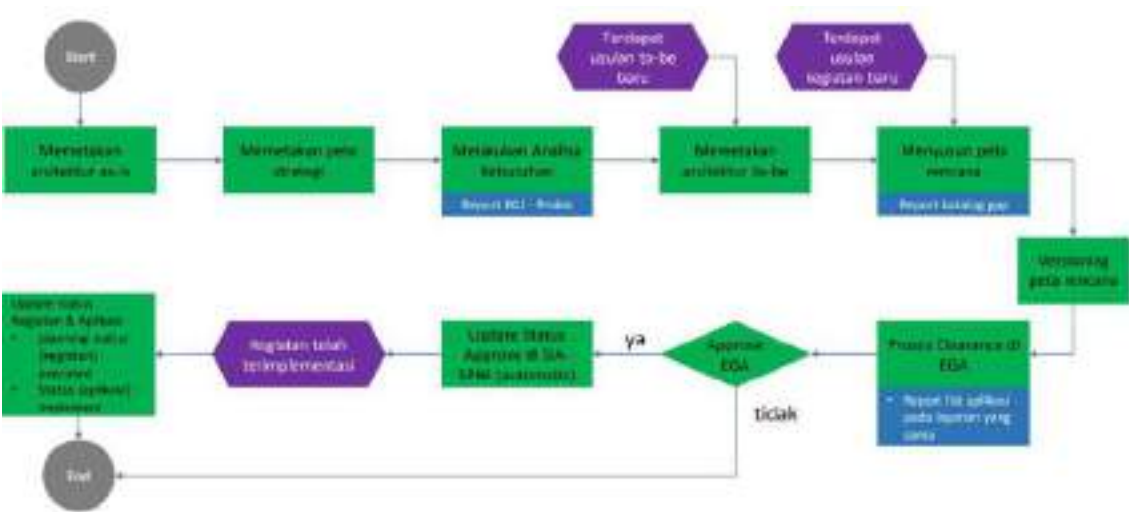
1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Keberhasilan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan alur pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur SPBE yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE oleh seluruh stakeholder. Gambaran mengenai cakupan arsitektur SPBE Nasional yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.3.1. Domain Arsitektur SPBE Nasional

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Setiap layer arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang selanjutnya saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain lainnya.



Gambar 1.4.3.2. Alur Proses Implementasi Arsitektur SPBE

Langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan dapat dilihat berdasarkan gambar diatas.

1. Memetakan arsitektur as-is

Tahap pertama dalam proses implementasi arsitektur SPBE adalah memetakan kondisi arsitektur eksisting (*as-is*) SPBE pemerintah daerah terkait yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi saat ini berdasarkan domain proses bisnis, layanan, data, aplikasi, keamanan, dan infrastruktur.

2. Memetakan peta strategi

Langkah selanjutnya adalah memetakan peta strategi yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai panduan dalam perencanaan transformasi digital di sektor pemerintahan dan memastikan setiap langkah yang diambil terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Melakukan analisa kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan berdasarkan hasil pemetaan peta strategi dan arsitektur *as-is*.

4. Memetakan arsitektur to-be

Bilamana terdapat usulan baru dari perangkat daerah pemerintah terkait yang berdasarkan analisa kebutuhan diatas, tahap berikutnya adalah memetakan arsitektur target (*to-be*) yang pelaksanaannya direncanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

5. Menyusun peta rencana

Berdasarkan pemetaan arsitektur *to-be*, perlu dilakukan penyusunan peta rencana, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk hasil analisis katalog gap yang berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi arsitektur saat ini (*as-is*) dan kondisi target (*to-be*).

6. *Versioning* peta rencana

Pada tahap ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan *versioning* atau pengelolaan versi dari peta rencana yang telah disusun sebelumnya. *Versioning* penting untuk melacak perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

7. Proses *Clearance* di EGA

Dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran menjadi salah satu elemen krusial untuk memastikan setiap inisiatif teknologi dan digitalisasi berjalan optimal. Proses penganggaran SPBE yang efektif melibatkan beberapa tahapan mulai dari perencanaan awal, pengajuan, hingga evaluasi dan clearance melalui aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE yang dapat diakses pada: <https://ega-spbe.layanan.go.id/>.

Pada tahap ini, setiap perangkat daerah diharapkan melakukan pelaporan secara akurat dan tepat waktu, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

8. *Update Status Approve* di SIA-SPBE (*automatic*)

Bilamana proses *clearance* telah disetujui, status persetujuan secara otomatis akan di update pada aplikasi SIA-SPBE (Sistem Informasi Administrasi SPBE).

9. *Kegiatan* telah terimplementasi

Kegiatan yang direncanakan kini telah terimplementasi sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya.

10. *Update status kegiatan & aplikasi*

Status kegiatan dan aplikasi selanjutnya perlu diperbarui secara manual pada aplikasi SIA-SPBE dengan ketentuan *update status kegiatan* menjadi "*executed*" (terlaksana), sedangkan status aplikasi menjadi "*implement*" (telah diterapkan).

Sesuai pada gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui proses yang terstruktur, penggunaan anggaran SPBE dapat dipantau secara efisien, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE memainkan peran penting dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap pengeluaran SPBE dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Langkah awal proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE yang harus disusun terlebih dahulu dengan mendefinisikan tata kelola. Tata kelola adalah serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Penerapan tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi SPBE dan jadwal kegiatan, menetapkan kebijakan SPBE, dan menyusun rencana dan anggaran SPBE.

Langkah kedua dalam proses penyusunan arsitektur SPBE yaitu dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di perangkat daerah. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan seluruh *stakeholder* untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) proses penentuan manajemen, yaitu:

- Manajemen Resiko	- Manajemen Data
- Manajemen Keamanan Informasi	- Manajemen Layanan
- Manajemen SDM	- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Pengetahuan	- Manajemen Perubahan

Arsitektur proses bisnis menjadi hal pertama yang perlu dikelola. Proses bisnis perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan yang efektif dan efisien. Arsitektur proses bisnis selanjutnya menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain, yaitu:

- Portal layanan administrasi pemerintah;
- Portal layanan publik;
- Portal pusat layanan; dan

- Integrasi kanal layanan.

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

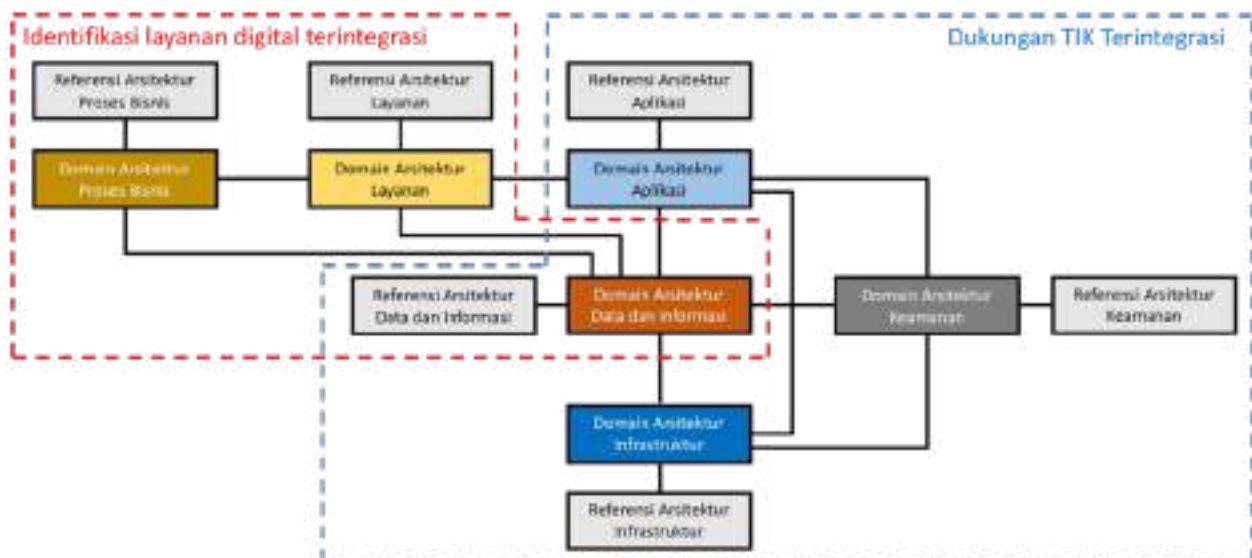
- Aplikasi umum nasional;
- Aplikasi khusus instansi pemda.

Pembangunan aplikasi mengacu pada data yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain itu, pada arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dengan portal data nasional. Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur. Arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan. Arsitektur infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada perangkat daerah termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemerintah daerah dan jaringan pita lebar. Sedangkan untuk infrastruktur pusat data daerah didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini, meliputi: privasi/kerahasiaan yang menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali untuk pihak yang memiliki kewenangan. Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survei penggunaan aplikasi SPBE. Secara umum, arsitektur SPBE Nasional terdiri dari enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional.

1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional

Referensi Arsitektur SPBE Nasional merupakan taksonomi dalam SPBE yang terdiri dari Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB-01), Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD-02), Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL-03), dan Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RA-04), Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI-05), Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK-06). Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) merupakan arsitektur yang berfokus pada desain layanan yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi untuk melakukan tugas yang sama. Setiap layanan yang ada memungkinkan aplikasi untuk saling berbagi informasi dan membangun integrasi.



Gambar 3.1.1. Keterkaitan Antar Domain Arsitektur SPBE

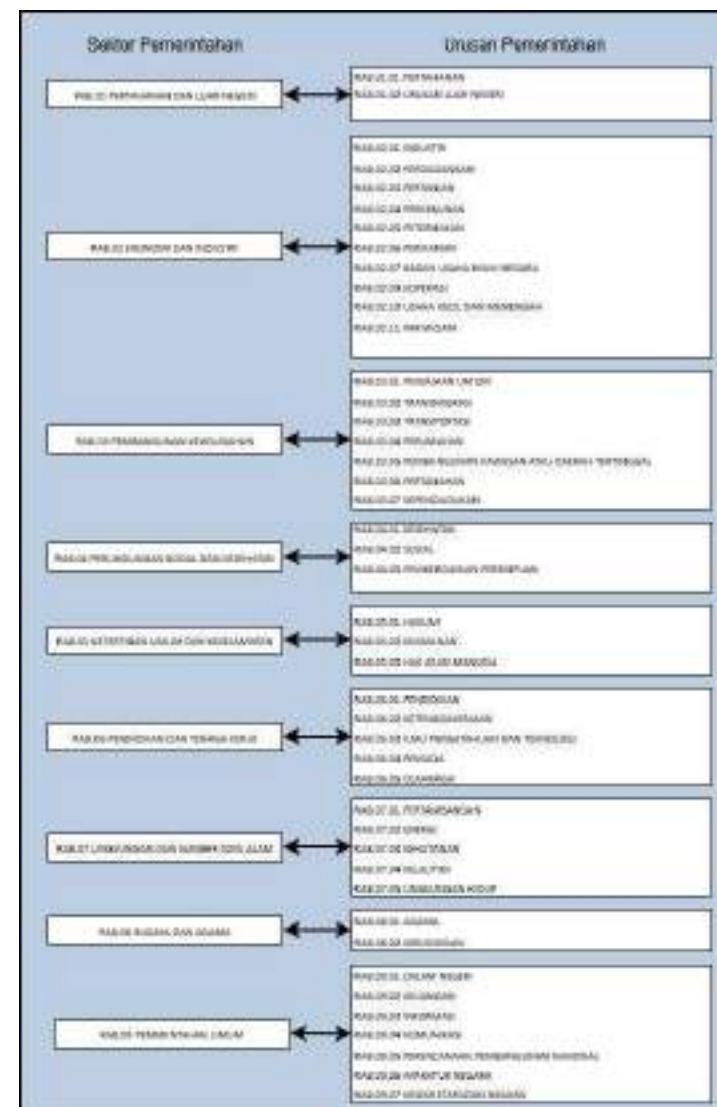
Adapun kondisi tingkat kematangan yang terdapat pada RAL Level 1 SPBE dapat dilihat pada tabel berikut.

A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Sektor pemerintahan: mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Urusan pemerintahan: menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- Sub fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun penjelasan mengenai referensi arsitektur proses bisnis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.4.1. Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Berikut Tabel 1.4.5.1 adalah referensi tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua)

No	Kode	Sektor Pemerintahan	Kode	Urusan Pemerintahan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
1	RAB 01	Pertahanan dan Luar Negeri	RAB 01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara
2	RAB 01	Pertahanan dan Luar Negeri	RAB 01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
3	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
4	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan
5	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian
6	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan
7	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan
8	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan
9	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
10	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal
11	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi
12	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
13	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan
14	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum
15	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi
16	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi

No	Kode	Sektor Pemerintahan	Kode	Urusan Pemerintahan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
17	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan
18	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
19	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan
20	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan
21	RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan
22	RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial
23	RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan
24	RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum
25	RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan
26	RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia
27	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
28	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan
29	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
30	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
31	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05	Olah Raga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan
32	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan
33	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi
34	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan

No	Kode	Sektor Pemerintahan	Kode	Urusan Pemerintahan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
35	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan
36	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup
37	RAB 08	Budaya dan Agama	RAB 08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama
38	RAB 08	Budaya dan Agama	RAB 08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan
39	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri
40	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.02	Kuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara
41	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi
42	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi
43	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
44	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara
45	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara

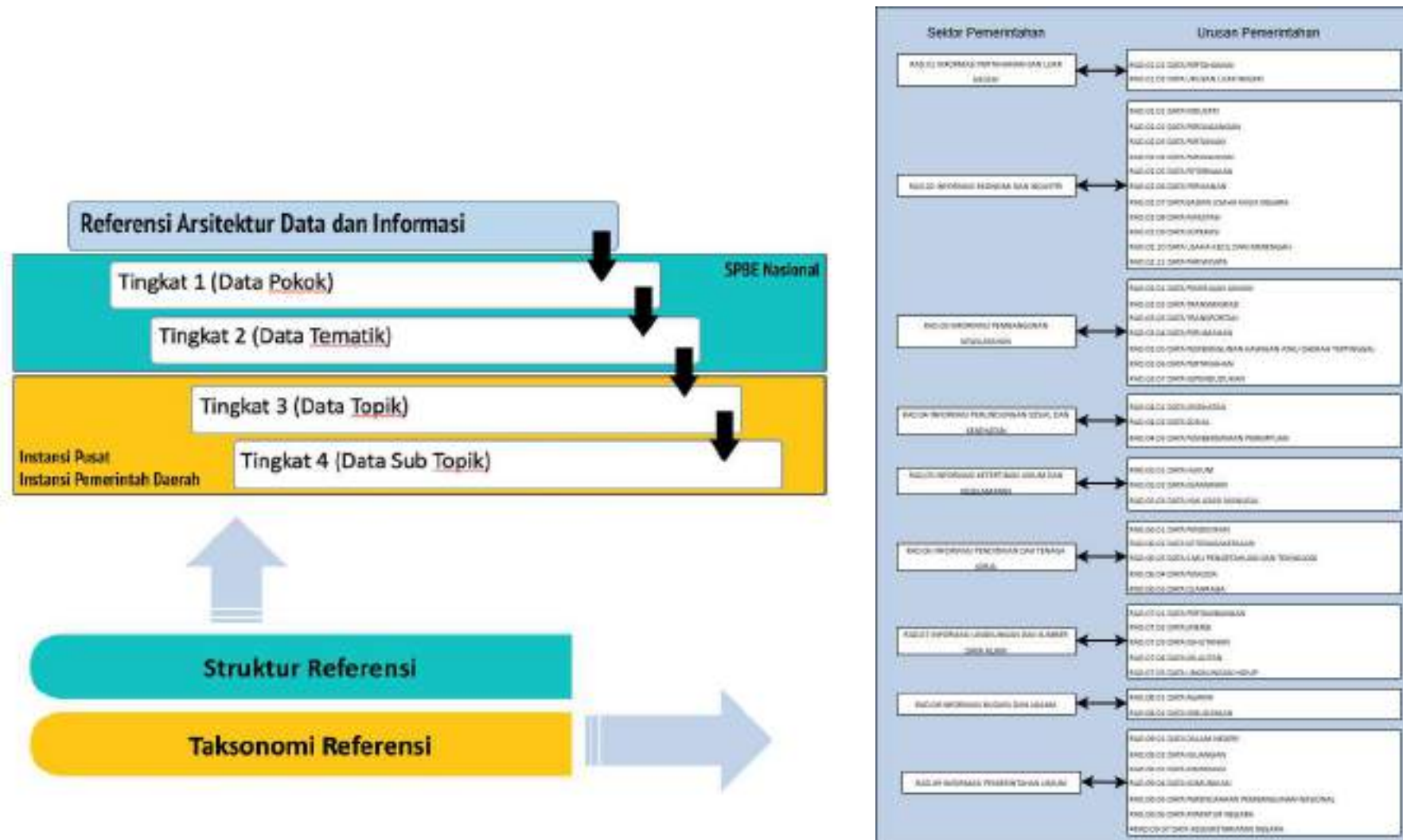
B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Data pokok: mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data tematik: menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data topik: menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan

- d. Data sub topik: menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur data dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.4.2. Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

Berikut tabel 1.4.5.2 adalah referensi Arsitektur Data dan Informasi tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.2 Referensi Arsitektur Data Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua)

No	Kode	Data Pokok	Kode	Data Tematik	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
1	RAD 01	Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD 01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara
2	RAD 01	Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD 01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri
3	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri
4	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.02	Data Perdagangan	Data yang mempresentasikan bidang perdagangan
5	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian
6	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan
7	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan
8	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan
9	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara
10	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal
11	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi
12	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
13	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang kepariwisataan
14	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum
15	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi
16	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
17	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
18	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
19	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan
20	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
21	RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
22	RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial
23	RAD 04	Informasi Perlindungan	RAD 04.03	Data Pemberdayaan	Data yang merepresentasikan

No	Kode	Data Pokok	Kode	Data Tematik	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
		Sosial dan Kesehatan		Perempuan	bidang pemberdayaan perempuan
24	RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum
25	RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
26	RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia
27	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
28	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan
29	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
30	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
31	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.05	Data Olahraga	Data yang mempresentasikan bidang keolahragaan.
32	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.01	Data Pertambangan	Data yang mempresentasikan bidang pertambangan.
33	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.02	Data Energi	Data yang mempresentasikan bidang energi
34	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.03	Data Kehutanan	Data yang mempresentasikan bidang kehutanan
35	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.04	Data Kelautan	Data yang mempresentasikan bidang kelautan
36	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang mempresentasikan bidang lingkungan hidup
37	RAD 08	Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.01	Data Agama	Data yang mempresentasikan bidang agama
38	RAD 08	Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.02	Data Kebudayaan	Data yang mempresentasikan bidang kebudayaan
39	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.01	Data Dalam Negeri	Data yang mempresentasikan bidang dalam negeri
40	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02	Data Keuangan	Data yang mempresentasikan bidang keuangan negara
41	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03	Data Informasi	Data yang mempresentasikan bidang informasi
42	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.04	Data Komunikasi	Data yang mempresentasikan bidang komunikasi
43	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang mempresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional
44	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06	Data Aparatur Negara	Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara
45	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang mempresentasikan bidang kesekretariatan negara
46	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.01	Kebijakan Pemerintah	Data yang mempresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah
47	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang mempresentasikan informasi terkait manajemen

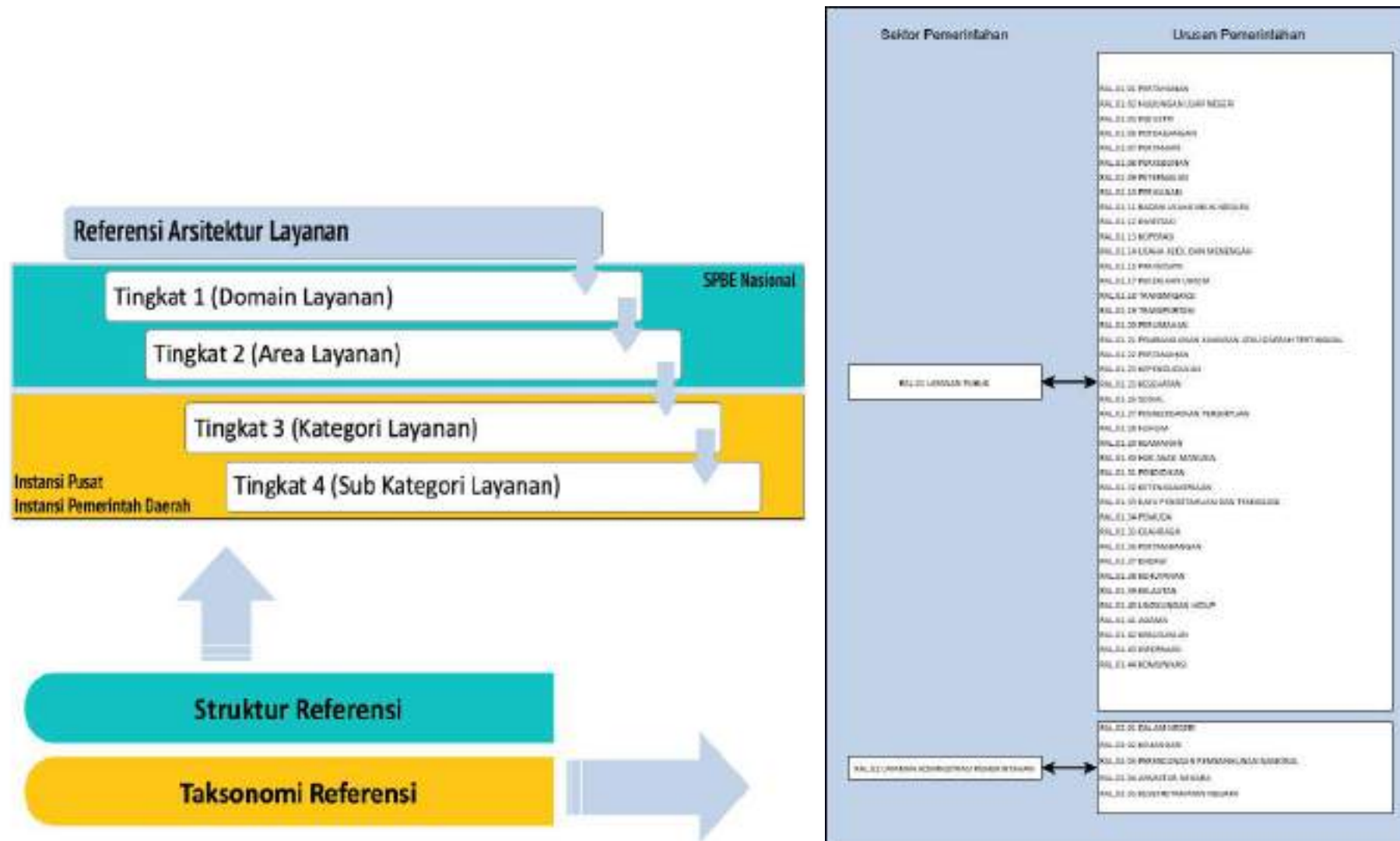
No	Kode	Data Pokok	Kode	Data Tematik	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
					kegiatan pemerintahan
48	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.03	Data Kewilayahan	Data yang mempresentasikan informasi kewilayahan
49	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang mempresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya

C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Domain arsitektur layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat struktur, yaitu:

- a. Domain layanan: mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area layanan: menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori layanan: menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub kategori layanan: menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.4.3. Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

Berikut tabel 1.4.5.3 adalah referensi Arsitektur Layanan tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.3 Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua)

No	Kode	Domain Layanan	Kode	Area Layanan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
1	RAL 01	Layanan Publik	01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara
2	RAL 01	Layanan Publik	01.02	Urusan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang urusan luar negeri
5	RAL 01	Layanan Publik	01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri
6	RAL 01	Layanan Publik	01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan
7	RAL 01	Layanan Publik	01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian
8	RAL 01	Layanan Publik	01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan
9	RAL 01	Layanan Publik	01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan
10	RAL 01	Layanan Publik	01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan
11	RAL 01	Layanan Publik	01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara
12	RAL 01	Layanan Publik	01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan penanaman modal
13	RAL 01	Layanan Publik	01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi
14	RAL 01	Layanan Publik	01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
15	RAL 01	Layanan Publik	01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan
16	RAL 01	Layanan Publik	01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi
17	RAL 01	Layanan Publik	01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
18	RAL 01	Layanan Publik	01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
19	RAL 01	Layanan Publik	01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
20	RAL 01	Layanan Publik	01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan
21	RAL 01	Layanan Publik	01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
22	RAL 01	Layanan Publik	01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
23	RAL 01	Layanan Publik	01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan

No	Kode	Domain Layanan	Kode	Area Layanan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
24	RAL 01	Layanan Publik	01.24	Pemerintah Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum
25	RAL 01	Layanan Publik	01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan
26	RAL 01	Layanan Publik	01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial
27	RAL 01	Layanan Publik	01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan
28	RAL 01	Layanan Publik	01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum
29	RAL 01	Layanan Publik	01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan
30	RAL 01	Layanan Publik	01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia
31	RAL 01	Layanan Publik	01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan
32	RAL 01	Layanan Publik	01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan
33	RAL 01	Layanan Publik	01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
34	RAL 01	Layanan Publik	01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
35	RAL 01	Layanan Publik	01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan
36	RAL 01	Layanan Publik	01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan
37	RAL 01	Layanan Publik	01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi
38	RAL 01	Layanan Publik	01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan
39	RAL 01	Layanan Publik	01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan
40	RAL 01	Layanan Publik	01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
41	RAL 01	Layanan Publik	01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama
42	RAL 01	Layanan Publik	01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan
43	RAL 01	Layanan Publik	01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi
44	RAL 01	Layanan Publik	01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi
45	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri
46	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan
47	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
48	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara
49	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariat negara

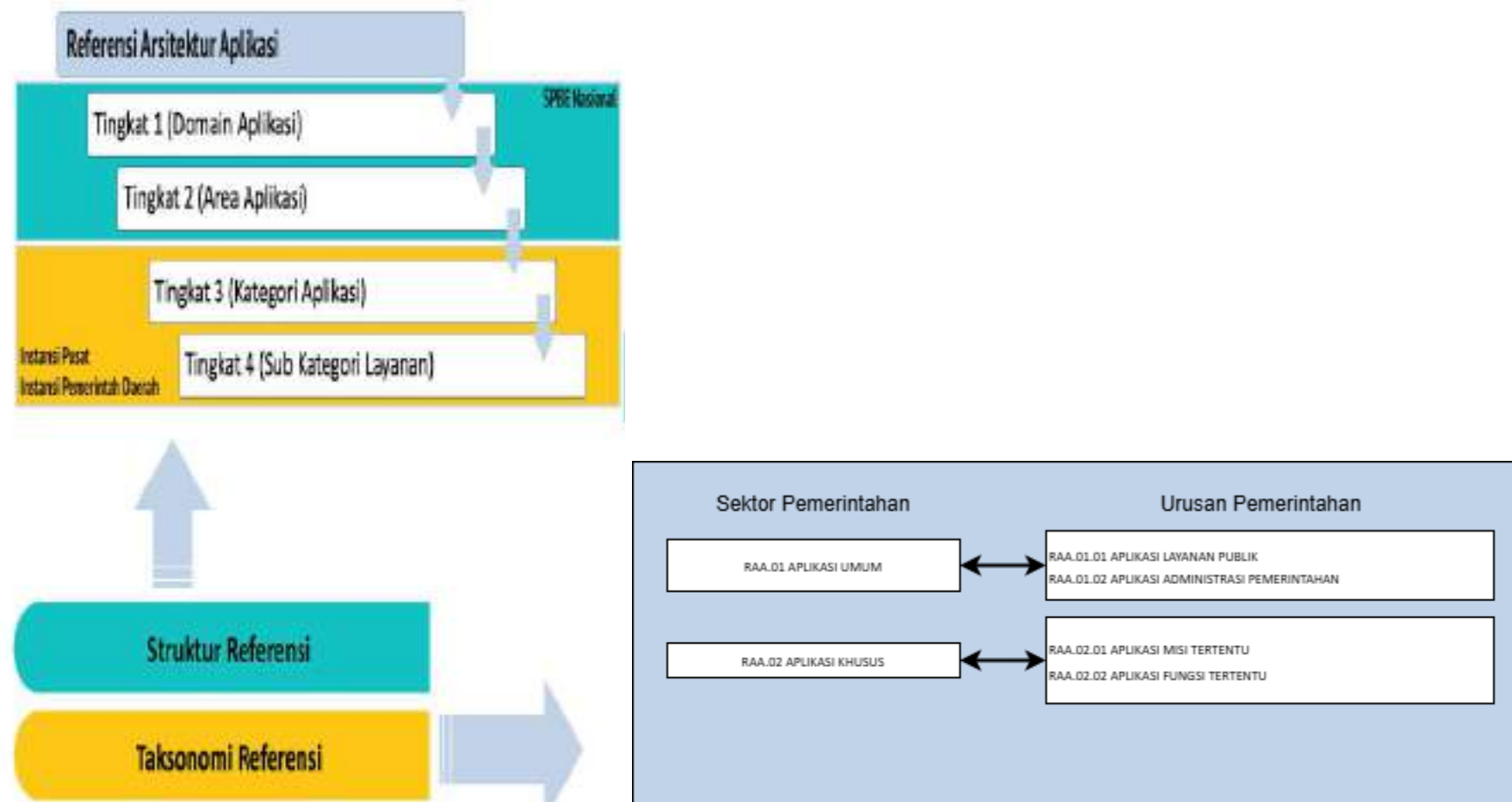
No	Kode	Domain Layanan	Kode	Area Layanan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
50	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi
51	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
52	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
53	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan

D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain aplikasi: mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area aplikasi: menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori aplikasi: menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub kategori aplikasi: menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1.4.4.4. Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Berikut Tabel 1.4.5.4 adalah referensi Arsitektur Aplikasi tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.4 Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua).

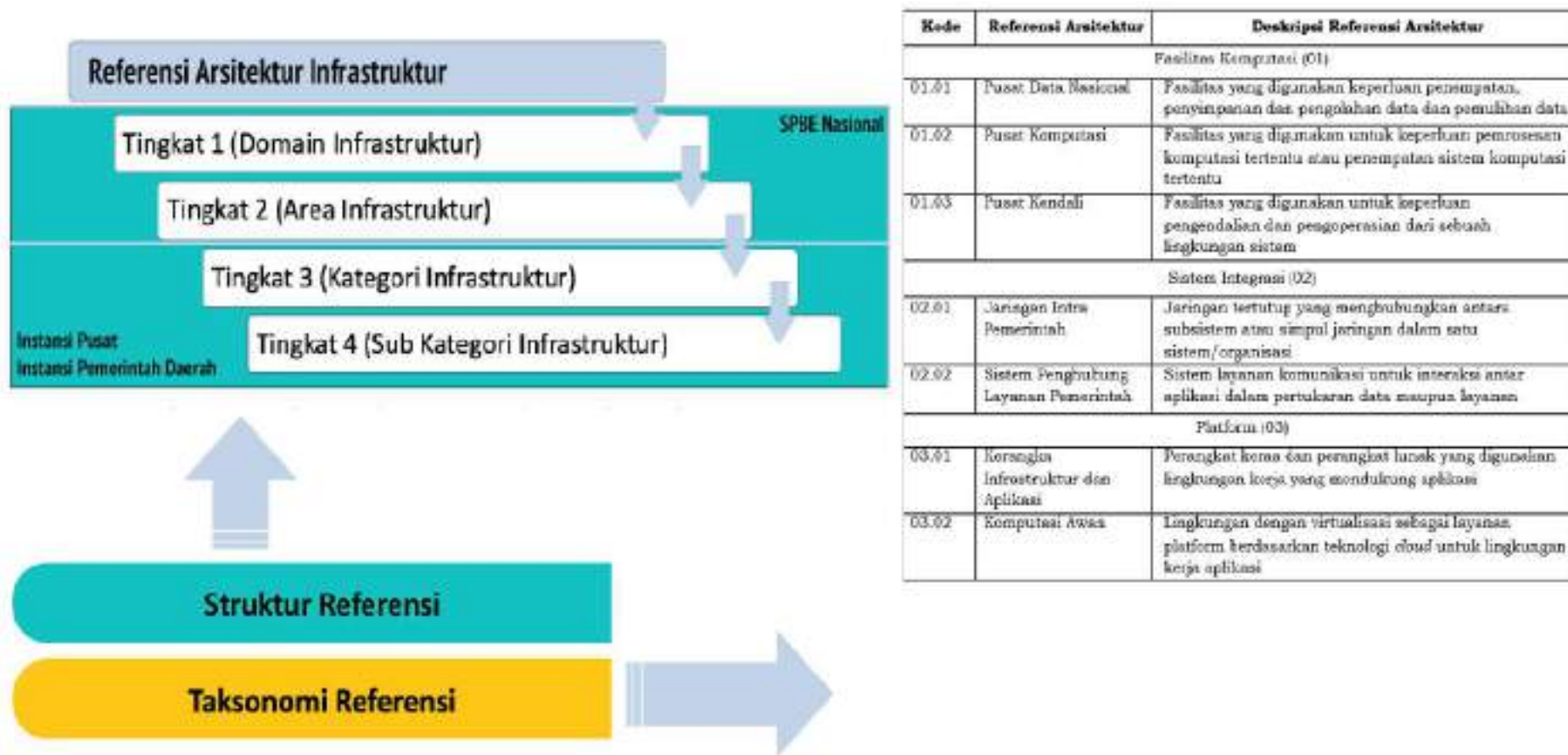
No	Kode	Domain Aplikasi	Kode	Area Aplikasi	Deskripsi (perpres 132, 2022)
1	RAA 01	Aplikasi Umum	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
2	RAA 01	Aplikasi Umum	RAA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
3	RAA 02	Aplikasi Khusus	RAA 02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pr.rsat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
4	RAA 02	Aplikasi Khusus	RAA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Domain arsitektur infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area infrastruktur, menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi, data dan informasi yang kemudian dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua) dan menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- c. Kategori infrastruktur, menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga) yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1.4.4.5. Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Berikut tabel 1.4.5.5 adalah referensi Arsitektur Infrastruktur tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.5 Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua).

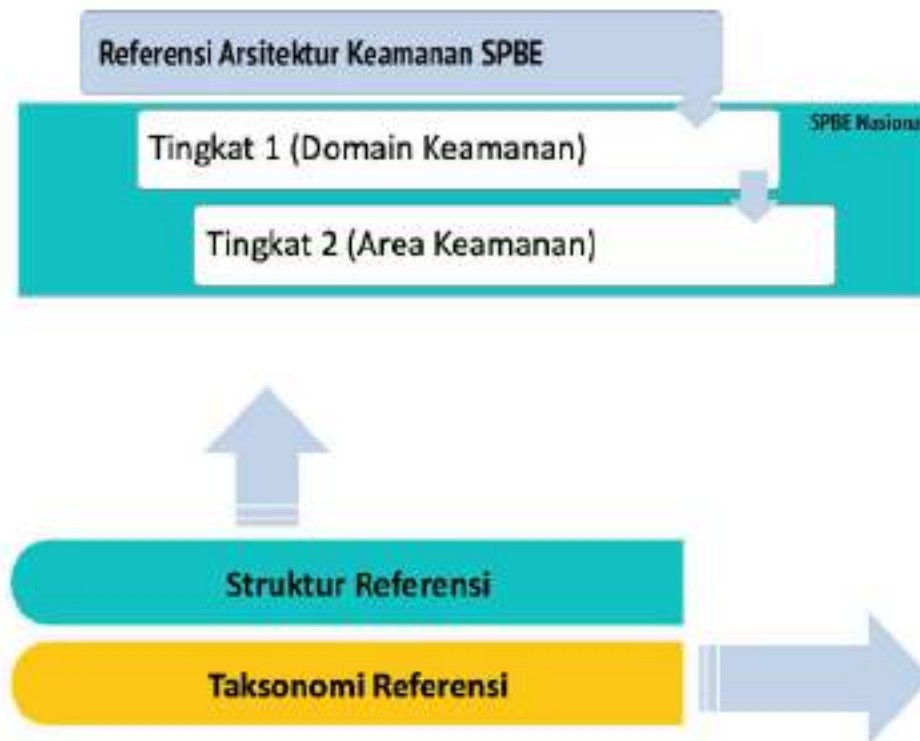
No	Kode	Domain Infrastruktur	Kode	Area Infrastruktur	Deskripsi (perpres 132, 2022)
1	RAI 01	Fasilitasi Komputasi	RAI 01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
2	RAI 01	Fasilitasi Komputasi	RAI 01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu
3	RAI 01	Fasilitasi Komputasi	RAI 01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
4	RAI 02	Sistem Integrasi	RAI 02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi.
5	RAI 02	Sistem Integrasi	RAI 02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
6	RAI 03	Platform	RAI 03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
7	RAI 03	Platform	RAI 03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional yang selanjutnya merupakan substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- b. Area keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknik dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknik dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Prinsip Keamanan (02)		
02.01	Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggapi, menelusuri dan menanggapi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelaikan keamanan terhadap infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Gambar 1.4.4.6. Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)

Berikut tabel 1.4.5.6 adalah referensi Arsitektur Keamanan tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.6 Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua).

No	Kode	Domain Keamanan	Kode	Area Keamanan	Deskripsi (perpres 132, 2022)
1	RAK 01	Standar Keamanan	RAK 01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2	RAK 01	Standar Keamanan	RAK 01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
3	RAK 01	Standar Keamanan	RAK 01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
4	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE
5	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
6	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE
7	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
7	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
8	RAK 03	Kelaikan Keamanan	RAK 03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan keamanan.
9	RAK 03	Kelaikan Keamanan	RAK 03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di

No	Kode	Domain Keamanan	Kode	Area Keamanan	Deskripsi (perpres 132, 2022)
					Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Bab II Visi dan Misi

Strategi SPBE

2.1. Visi

Secara umum, arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga harus mengacu pada visi SPBE Nasional yaitu:

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."

Berdasarkan hal tersebut, visi SPBE Nasional ini perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna mendefinisikan arsitektur dan peta rencana SPBE yang sesuai. Adapun Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 :

"Terwujudnya Bojonegoro Makmur Dan Membanggakan"

Mengacu pada dua hal tersebut pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2029. Lebih jauh, visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Berbagai upaya pencapaian visi SPBE dan strategi pencapaian implementasi SPBE yang dapat digunakan antara lain, yaitu:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal, dan;
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, merujuk pada visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro antara lain, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sebagai turunan dari visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

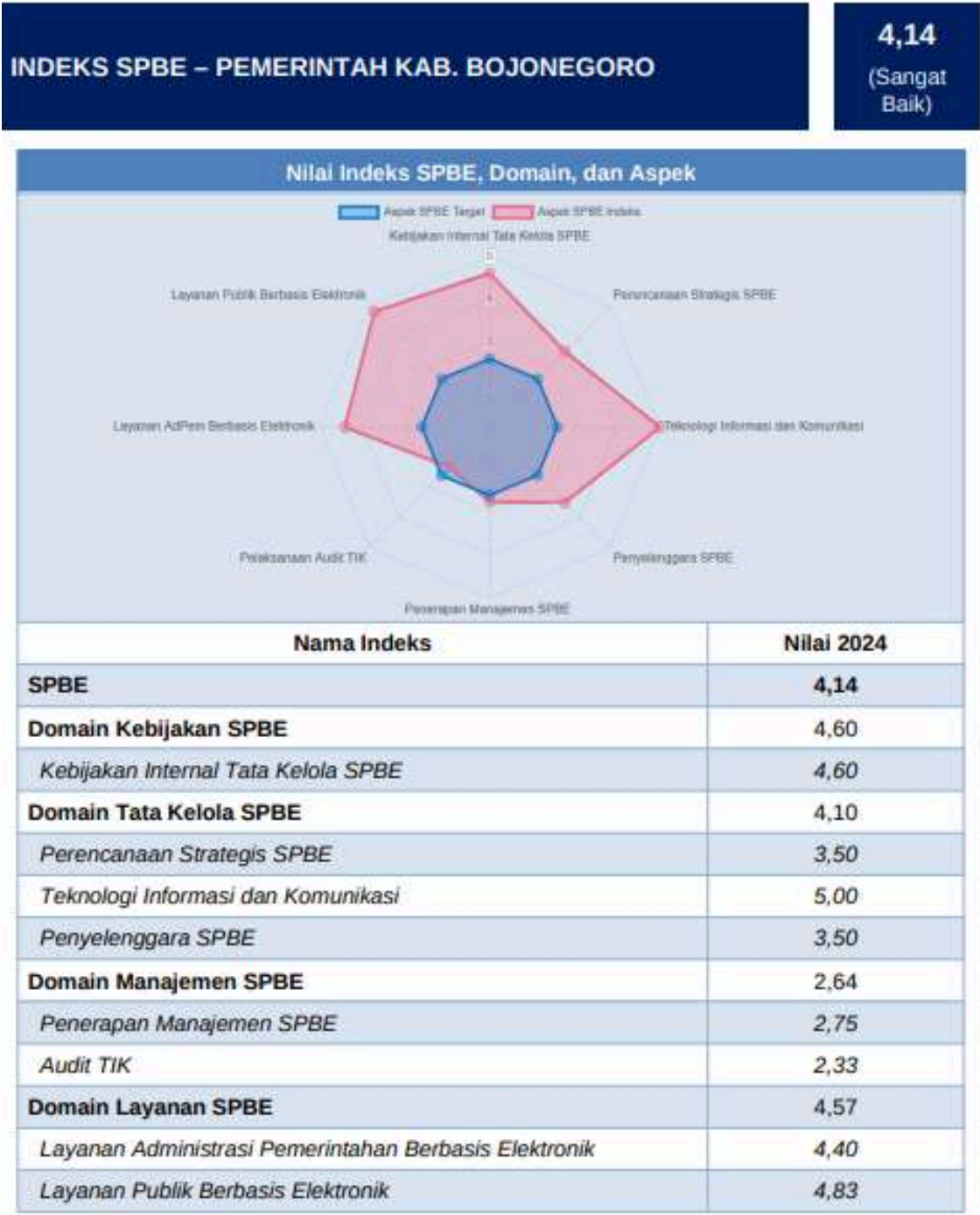
- 1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
- 2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- 3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- 4. Meningkatkan kapasitas SDM TIK.

Berdasarkan sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut perlu dimasukkan kedalam unsur-unsur yang ada di dalam SPBE, guna mencapai SPBE yang selaras dengan arah digitalisasi Nasional. Adapun unsur-unsur dalam SPBE dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.1.1. Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE



Gambar 2.2.1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
(Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Bojonegoro, 2024)

Merujuk pada Gambar 2.2.1. dapat disimpulkan bahwa anggota dalam Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya aktif berkolaborasi dalam penerapan tata kelola dan manajemen SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices* yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	1. Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE. 2. Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. 3. Melakukan revisi / perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat.	Tim Koordinasi SPBE
2	Indikator 11-13 terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Rencana Anggaran SPBE	1. Membuat Dokumen Perencanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2. Monitoring dan Evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Kebijakan yang ada pada pusat . 3. Menuangkan substansi Peta Rencana SPBE ke dalam RKPd.	Tim Koordinasi SPBE
3	Indikator 14 terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE	1. Membuat Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah 2. Membuat BPMN Proses Bisnis Pemerintah Daerah 3. Evaluasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
4	Indikator 15 terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Membuat Standarisasi Pengembangan Aplikasi 2. Membuat Dokumentasi Pengembangan Aplikasi 3. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	1. Melakukan migrasi seluruh aplikasi internal ke Pusat Data / Server yang terpusat milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Diskominfo. 2. Server Pemerintah Daerah terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional. 3. Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Indikator 17 terkait Jaringan Intra Pemerintah	1. Mengembangkan konektivitas ke seluruh SKPD (Metro Area Network) yang terpusat di Diskominfo sebagai NOC nya. 2. Memasang MRTG pada jaringan MAN Pemerintah Daerah. 3. Memastikan seluruh ruangan SKPD tercover radius Access Point. 4. Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Indikator 18 terkait Sistem Penghubung layanan Pemerintah	1. Mengembangkan SPL yang menjadi portal layanan data 2. Mengevaluasi pengembangan dan pelaksanaan SPL 3.	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	1. Mendefinisikan tugas dan fungsi, Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai yang tertuang dalam peta rencana. 2. Melakukan pembaharuan tugas dan fungsi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai kondisi yang akan datang.	Tim Koordinasi SPBE
9	Indikator 20 terkait Kolaborasi	1. Melakukan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE dengan melibatkan seluruh perangkat daerah Pemerintah	Tim Koordinasi SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
	Penerapan SPBE	Daerah. 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE	
10	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	1. Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan. 2. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan. 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE.	Tim Koordinasi SPBE
11	Indikator 29 - 31 terkait Audit TIK	1. Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan tertuang pada Peta Rencana SPBE 2. Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (BRIN) 3. Muatan pemeriksaan Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan: 4. Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan SPBE IPPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan BRIN.	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat
12	Indikator 32 - 47 terkait Layanan SPBE	1. Mengidentifikasi 14 Aplikasi Layanan SPBE. 2. Melakukan Integrasi Aplikasi Layanan SPBE dengan Aplikasi Pusat maupun aplikasi daerah. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Layanan SPBE setiap tahunnya.	Perangkat Daerah Terkait 14 Layanan SPBE

2.3. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi SPBE Nasional dan visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta analisis hasil evaluasi SPBE terakhir diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Reviu kebijakan terkait SPBE secara berkelanjutan;
2. Melakukan efisiensi proses bisnis dengan melakukan digitalisasi pada proses bisnis yang kompleks guna memberikan pelayanan administrasi internal maupun publik yang lebih prima;
3. Pengembangan aplikasi khusus guna mendukung implementasi layanan tematik SPBE, aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro setidaknya harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana aplikasi khusus harus dapat terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh instansi lain;
4. Pengembangan *platform* integrasi layanan elektronik yang sudah berjalan dengan menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh perangkat daerah, seperti: optimalisasi berbagai SOP yang sudah ada terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga dan pelaksanaan berkelanjutan;

5. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah) untuk optimalisasi layanan elektronik di internal Pemerintah Kabupaten yang berkelanjutan;
6. Penyesuaian tim Koordinasi SPBE (terutama pembentukan delapan pokja);
7. Optimalisasi forum kolaborasi penerapan SPBE baik dengan internal maupun dengan instansi pusat;
8. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
9. Menyusun pedoman, penerapan & optimalisasi delapan manajemen SPBE; dan
10. Melakukan audit atas operasional SPBE yang meliputi audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan secara berkala.

Bab III Analisa Kondisi *as-is* SPBE

3.1. Kebijakan & Manajemen

3.1.1. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan beberapa layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik. Pengembangan layanan SPBE telah didukung oleh kebijakan internal SPBE yang terlihat pada hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, dimana domain kebijakan memperoleh nilai 4,60 (penilaian kebijakan dasar untuk penerapan SPBE dinilai sudah optimal). Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan internal SPBE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1 Mandatori Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah Ada
2.	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah Ada
3.	Kebijakan Manajemen Data	Sudah Ada
4.	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah Ada
5.	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah Ada
6.	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sudah Ada
7.	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sudah Ada
8.	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah Ada
9.	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah Ada
10.	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Sudah Ada

Berdasarkan 10 (sepuluh) mandatori kebijakan internal SPBE, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyusun 10 (sepuluh) mandatori kebijakan internal SPBE.

3.1.2. Manajemen

Pengembangan dan penerapan SPBE tentu harus diimbangi dengan penerapan manajemen guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 khususnya pada domain manajemen SPBE memperoleh nilai 2.64. Layanan SPBE tanpa didukung dengan penerapan manajemen yang optimal dapat berimplikasi pada pelayanan yang kurang baik. Terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE, yakni: SDM (*people*) →Manajemen (*process*) →Layanan IT (*technology*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1. Mandatori Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Sudah diterapkan
2.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Sudah diterapkan
3.	Penerapan Manajemen Data	Sudah diterapkan
4.	Penerapan Manajemen Aset TIK	Sudah diterapkan
5.	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum diterapkan
6.	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum diterapkan
7.	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum diterapkan
8.	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Sudah diterapkan

Berdasarkan dari 8 (Delapan) mandatori Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan 5 (Lima) mandatori manajemen SPBE. Kedepannya perlu adanya peningkatan penerapan manajemen SPBE secara optimal dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menghilangkan duplikasi data, membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kompleksitas birokrasi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

3.2. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan SPBE yang optimal. Selain itu, Arsitektur SPBE ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan dimana Level 1,2, dan 3 mengacu pada Referensi Arsitektur Bisnis (RAB) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog proses bisnis yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Probis.**

Tabel 3.2.1.1.1. Cuplikan Katalog Proses Bisnis Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 01.01.03.01	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	RAB.01 PERTAHANAN DAN LUAR NEGERI	RAB.01.01 PERTAHANAN	RAB.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 02.01.01.01	Rencana Pembangunan Industri	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 02.01.01.02	Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 02.01.01.03	Penyediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 02.01.01.04	Produktivitas Hasil Usaha Potensi Lokal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.01.07.01	Peningkatan Pelaku Industri Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.01.07.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.02.01.01	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 02.02.01.02	Peningkatan Pendapatan Perkapita	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.03	Stabilisasi Harga Pasar	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.04	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.05	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.06	Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.07	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.08	Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.09	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.01.10	Penyelenggaraan Promosi Dagang	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.03.01	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.02.03.02	Pelaksanaan Metrologi Legal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.03.03.01	Penanggulangan Bencana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				HORTIKULTURA	
BJN-DAB 02.03.05.01	Pengolahan Hasil Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.08.01	Penyuluhan Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.15.01	Peningkatan Sarpras Penyediaan Air Baku Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.15.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.16.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.19.01	Pengelolaan Cadangan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.19.02	Penyediaan Pangan Pokok/Pangan Lainnya	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.21.01	Peningkatan Ketersediaan dan Kerentanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.21.02	Pembentukan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.21.03	Penanganan Kerawanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.03.22.01	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.05.01.01	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.05.01.02	Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.05.01.03	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN	Dinas Peternakan dan Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Hijauan Pakan Ternak			BENIH/ BIBIT TERNAK	
BJN-DAB 02.05.01.04	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.05.04.01	Penjaminan Kesehatan Hewan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.05.04.02	Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.05.05.01	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.05.05.02	Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.06.01.01	Pemberdayaan Nelayan Kecil	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.06.02.01	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.06.03.01	Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAB 02.08.01.01	Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.08.01.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.08.01.03	Penciptaan Iklim Usaha	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.08.03.01	Promosi Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.08.04.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.08.06.01	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 02.08.06.02	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.09.01.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.09.02.01	Fasilitasi Permodalan dan Pemasaran Koperasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.09.03.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.09.04.01	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.10.01.01	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.10.01.02	Fasilitasi Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.10.01.03	Pemberdayaan Usaha Mikro	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.10.02.01	Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.11.01.01	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.11.01.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.11.02.01	Peningkatan Sarpras Destinasi Pariwisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.11.02.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.11.02.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.11.02.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 02.11.04.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.04 PEMASARAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Luar Negeri			PARIWISATA	
BJN-DAB 03.01.01.01	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.01.01.02	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.01.01.03	Pengelolaan Sistem Air Limbah	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.01.01.04	Pengelolaan Sistem Drainase	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.01.03.01	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.01.03.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.01.03.03	Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.01.05.01	Peningkatan Panjang Jalan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.01.05.02	Peningkatan Penampungan Air	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAB 03.01.05.03	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAB 03.01.05.04	Pengelolaan Sistem Irigasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				DAERAH BIDANG PUPR	
BJN-DAB 03.03.01.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.01.02	Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.02.01	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.02.02	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.02.03	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.03.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.03.02	Perizinan Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.03.03	Penerbitan Perizinan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.04.01	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.04.01.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.01.02	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.02.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.02.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 03.04.03.01	Penyediaan Prasarana Air Bersih	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.03.02	Peningkatan Sanitasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.03.03	Penyelenggaraan PSU Perumahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.03.04	Pengelolaan Drainase dan Jalan Lingkungan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.04.01	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.04.02	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.05.01.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 03.05.01.02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 03.05.01.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAB 03.05.02.01	Peningkatan Sarpras Ekonomi Pedesaan dan Agropolitan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 03.05.02.02	Pemberdayaan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAB 03.05.02.03	Pemberdayaan Kelurahan	RAB.03 PEMBANGUNAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN	RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN	Kecamatan Bojonegoro

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		KEWILAYAHAN	KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAB 03.05.04.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 03.05.04.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAB 03.05.06.01	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 03.06.01.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.06.01.02	Pemanfaatan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.06.01.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.06.09.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.07.01.01	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 03.07.02.01	Pengendalian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 03.07.02.02	Pelaksanaan Pelayanan KB	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 03.07.02.03	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 03.07.02.04	KIE Pengendalian Penduduk dan KB	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 03.07.03.01	Pembangunan Keluarga	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 03.07.03.02	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan KS	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.01.01.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.01.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.01.03	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.01.04	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.02.01	Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.03.01	Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 04.01.04.01	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.02	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.03	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.04	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.05	Penerbitan Izin Rumah Sakit	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.06	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.07	Peningkatan Pelayanan BLUD	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAB 04.01.06.01	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.06.02	Pemberdayaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.06.03	Pelaksanaan Sehat Promotif Preventif	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.06.04	Pengembangan UKBM	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.08.01	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.08.02	Penerbitan Stiker Pembinaan Sentra Makanan Jajanan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.08.03	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.02.01.01	Rehabilitasi Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAB 04.02.03.01	Perlindungan Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 04.02.03.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAB 04.02.04.01	Pemberdayaan Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAB 04.02.04.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAB 04.02.06.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial
BJN-DAB 04.02.06.02	Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial
BJN-DAB 04.02.06.03	Peningkatan Upaya Tanggap Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAB 04.02.06.04	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAB 04.02.06.05	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAB 04.02.06.06	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAB 04.02.06.07	Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAB 04.03.01.01	Peningkatan Pengarusutamaan Gender	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.01.02	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.01.03	Kesetaraan Gender dan Hak Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.01.04	Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.02.01	Pelebagaan PHA	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN	RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		DAN KESEHATAN	PEREMPUAN	ANAK	Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.03.01	Pemberdayaan Perempuan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.03.02	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.03.03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.03.04	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.04.01	Pemberdayaan Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.04.02	Penyediaan Layanan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.05.01	Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAB 04.03.05.02	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 05.01.01.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 05.01.02.01	Fasilitasi Hukum	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
BJN-DAB 05.02.01.01	Pengelolaan Kondusifitas Daerah Rawan Konflik	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 05.02.01.02	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAB 05.02.01.03	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 05.02.01.04	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 05.02.01.05	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 05.02.01.06	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAB 05.02.02.01	Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Bagian Hukum
BJN-DAB 05.02.02.02	Pemberdayaan Masyarakat Pemeliharaan Keamanan	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Bagian Hukum
BJN-DAB 05.02.02.03	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAB 05.02.02.04	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAB 05.02.02.05	Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Kecamatan Bojonegoro

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 05.02.03.01	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAB 05.02.03.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAB 05.02.03.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAB 05.02.03.04	Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAB 05.02.03.05	Operasi Pertolongan Kondisi Membahayakan Manusia	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAB 06.01.01.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.01.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.01.02.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.01.02.04	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 06.01.03.01	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.01.05.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.01.06.01	Peningkatan Standar Nasional Pendidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAB 06.02.01.01	Peningkatan Mutu Calon Pekerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.01.02	Peningkatan Kemampuan Teknis Pekerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.01.03	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.01.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.01.05	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.01.06	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.02.01	Pembentukan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.02.02	Pelayanan Antar Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.02.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
		KERJA		PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Kerja
BJN-DAB 06.02.02.04	Peningkatan Lapangan Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.03.01	Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.03.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.02.05.01	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.03.02.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 06.04.01.01	Pemberdayaan Pemuda Pelopor	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.04.01.02	Pemberdayaan Wirausaha Muda Pemula	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.04.01.03	Pemberdayaan Pemuda Kader	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.04.02.01	Penyadaran Pemuda dan Kepemudaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.04.02.02	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.04.02.03	Pengembangan Organisasi Kepramukaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.05.01.01	Pembinaan Olahraga Rekreasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 06.05.02.01	Peningkatan Sumberdaya Atlet Berprestasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Pendidikan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 06.05.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 07.05.01.01	Pengembangan Konservasi Mata Air Masyarakat	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.01.02	Pengelolaan Kualitas Tutupan Lahan	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.01.03	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat (RPPLH)	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.01.04	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.01.05	Pengawasan Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan izin PPLH	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.01.06	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat PPLH	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.02.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.02.02	Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.03.01	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.03.02	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.03.03	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 07.05.04.01	Pengelolaan Persampahan	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 07.05.04.02	Pengelolaan Sampah	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.05.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.06.01	Peningkatan Kualitas Air	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.06 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.06.02	Peningkatan Kualitas Udara	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.06 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 07.05.07.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAB 08.01.01.01	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Beragama	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.01 AGAMA	RAB.08.01.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN	Bagian Hukum
BJN-DAB 08.02.01.01	Pengelolaan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 08.02.01.02	Pelestarian Kesenian Tradisional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 08.02.01.03	Pembinaan Sejarah	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 08.02.01.04	Pengelolaan Cagar Budaya	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 08.02.01.05	Pengelolaan Museum	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAB 08.02.02.01	Pembudayaan Gemar Membaca	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAB 08.02.06.01	Pengelolaan Perpustakaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAB 09.01.01.01	Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Masyarakat	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 09.01.01.02	Peningkatan Peran Partai Politik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				PEMERINTAHAN UMUM	
BJN-DAB 09.01.01.03	Peningkatan Kapasitas DPRD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 09.01.01.04	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 09.01.01.05	Fasilitasi Tugas DPRD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 09.01.01.06	Pelaksanaan Pemerintahan Dilimpahkan Camat	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAB 09.01.02.01	Pembahasan Kerja Sama Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 09.01.04.01	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 09.01.04.02	Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan Pemerintahan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAB 09.01.05.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan
BJN-DAB 09.01.05.02	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAB 09.01.06.01	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAB 09.01.07.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.04	Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.05	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN	Dinas Kependudukan dan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				PENCATATAN SIPIL	Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.06	Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.07	Pengumpulan Data Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.08	Penyajian Database Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.09	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.02.01.01	Perencanaan Anggaran Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.01.02	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.01.03	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Keuangan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.01.04	Pembahasan Kebijakan Anggaran	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 09.02.02.01	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.03.01	Peningkatan Pendirian BUMD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAB 09.02.03.02	Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAB 09.02.06.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.08.01	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.08.02	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.11.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 09.03.01.01	Peningkatan Implementasi Tata Kelola SPBE	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.01.02	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.01.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.02.01	Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.02.02	Pengelolaan e-Government	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.02.03	Pengembangan Aplikasi dan Probis Pemerintahan Elektronik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.02.04	Peningkatan Sistem Pemutakhiran Peraturan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.04.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.08.01	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.04.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.04 KOMUNIKASI	RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.05.01.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.01.02	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.01.03	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.01.04	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.01.05	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN	RAB.09.05.01 PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Kewilayahan		PEMBANGUNAN NASIONAL	PEMBANGUNAN	Daerah
BJN-DAB 09.05.01.06	Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.01.07	Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.02.01	Perencanaan dan Pendanaan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.05.03.01	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.06.01.01	Fasilitasi Kerumahtanggaan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Umum
BJN-DAB 09.06.01.02	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAB 09.06.01.03	Administrasi Tata Pemerintahan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAB 09.06.02.01	Penataan Organisasi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAB 09.06.03.01	Peningkatan Keahlian Aparat	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAB 09.06.03.02	Peningkatan Kinerja ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.03	Pengelolaan Disiplin ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.04	Pengelolaan Kompetensi ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.05	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.06	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.07	Mutasi dan Promosi ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.08	Pengembangan Kompetensi ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 09.06.03.09	Pengembangan Kompetensi Teknis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.10	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.11	Pemberian Reward dan Punishment ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.04.01	Peningkatan Komitmen Pimpinan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Organisasi
BJN-DAB 09.06.04.02	Penilaian Kinerja Aparatur	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.04.03	Pengawasan Internal	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAB 09.06.04.04	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAB 09.06.04.05	Pembentukan Kebijakan Teknis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAB 09.06.04.06	Pendampingan dan Asistensi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAB 09.06.04.07	Pengawasan Pemerintahan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretaris DPRD

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 09.06.04.08	Pelaksanaan Kode Etik DPRD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretaris DPRD
BJN-DAB 09.06.05.01	Kualitas Pelayanan Publik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
BJN-DAB 09.06.06.01	Pengelolaan Arsip Dinamis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAB 09.06.06.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAB 09.06.06.03	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAB 09.07.11.01	Peningkatan Kesadaran Bertoleransi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA	RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAB 09.07.11.02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA	RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis

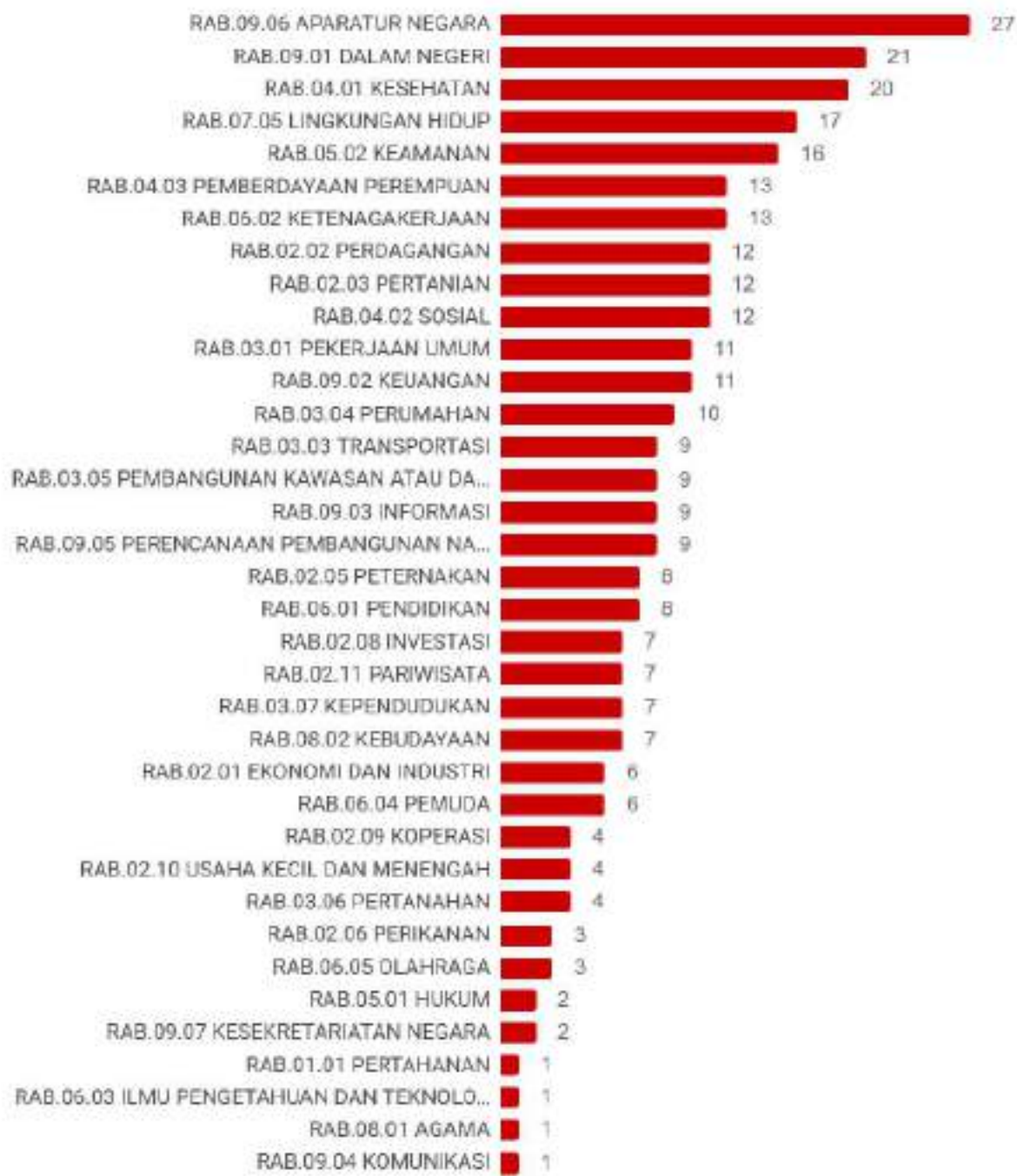
Merujuk pada hasil pemetaan proses bisnis pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis pengelompokan Level 1 RAB Nasional sebagai berikut:



Grafik 3.2.1.2.1. Grafik Jumlah Proses Bisnis RAB berdasarkan Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

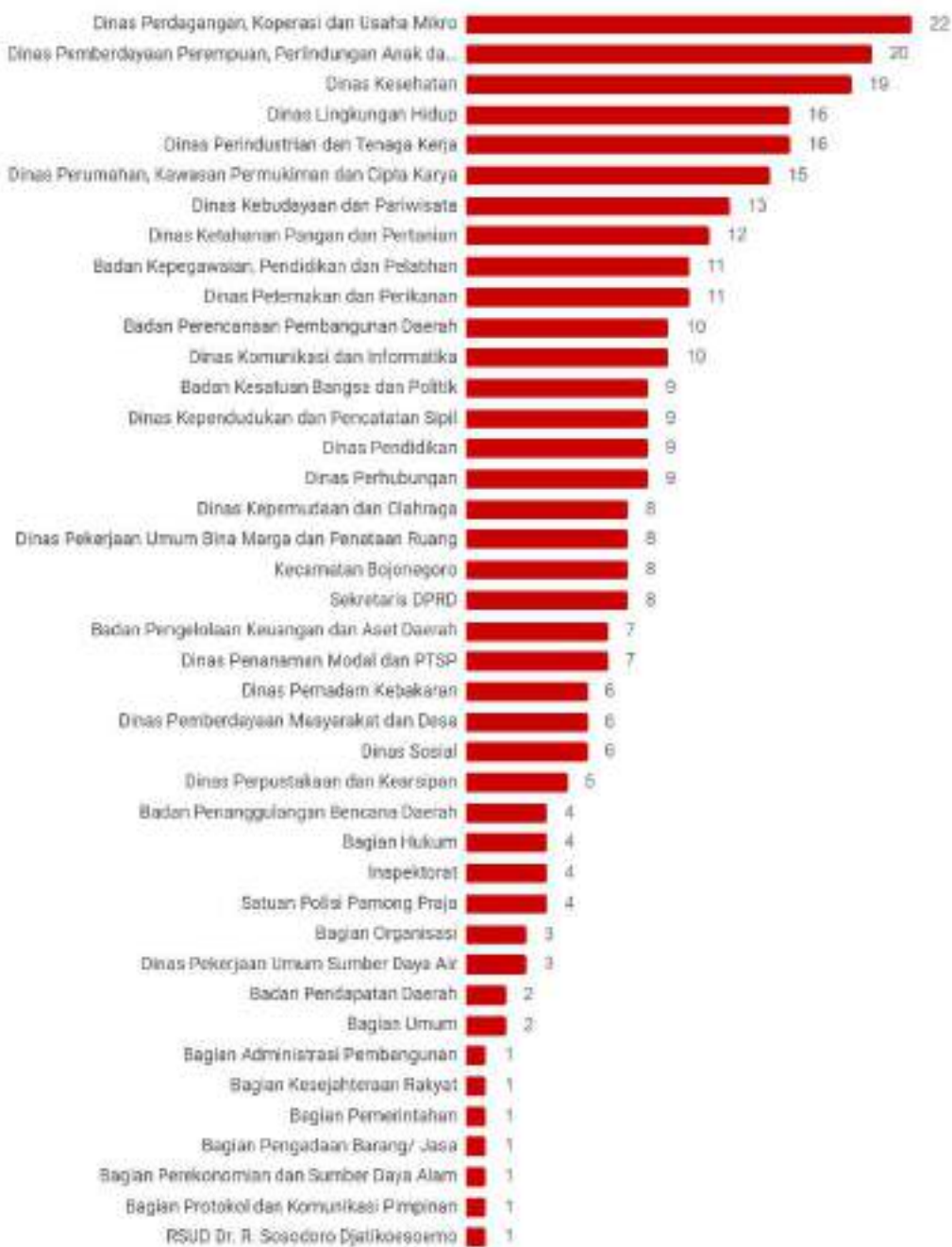
Berdasarkan Level 1 RAB Nasional, sebagian besar proses bisnis masuk dalam RAB.09 Pemerintahan Umum dan RAB.02 Ekonomi dan Industri. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

RAB Level 2



Grafik 3.2.1.2.2. Grafik Jumlah Proses Bisnis berdasarkan RAB Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan level 2 RAB nasional, kategori terbanyak terdapat pada RAB.09.06 Aparatur Negara sejumlah 27 proses bisnis, RAB.09.01 Dalam Negeri sejumlah 21 proses bisnis dan RAB.04.01 Kesehatan dengan jumlah 20 proses bisnis. Urusan proses bisnis dengan jumlah paling sedikit terdapat pada RAB.01.01 Pertahanan, RAB.06.03 Ilmu Pengetahuan Teknologi, RAB.08.01 Agama, dan RAB.09.04 Komunikasi dengan jumlah 1 proses bisnis. Tentunya varietas jumlah proses bisnis tergantung pada tipe perangkat daerah. Kondisi ini dapat berubah sesuai perkembangan dan inovasi daftar metadata probis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Grafik 3.2.1.2.3. Grafik Jumlah Proses Bisnis pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.1.2.3. Kepemilikan proses bisnis didominasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sejumlah 22 Proses Bisnis dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sejumlah 20 proses bisnis. Sedangkan Unit Kerja yang memiliki proses bisnis paling sedikit terletak pada RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo yang memiliki 1 proses bisnis. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan proses bisnis pada perangkat daerah sangat beragam dan tergantung pada karakteristik serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2.2. **Arsitektur Data dan Informasi**

Arsitektur data memberikan gambaran mengenai daftar data pokok yang dimiliki seluruh perangkat daerah. Daftar data ini perlu dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disajikan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah, aman, dan terintegrasi secara efektif di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

3.2.2.1. **Katalog Data dan Informasi**

Data dan Informasi dalam Arsitektur SPBE merupakan suatu kumpulan data pokok (*by name, by address*) hasil *output* dari pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola berupa data yang bersifat publik, terbatas, dan rahasia berdasarkan dari hasil survei terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Data (RAD) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur data SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog data yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Data.**

Tabel 3.2.2.1.1. Cuplikan Katalog Data dan Informasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.01.01.01	Data Pemohon Legalitas Merk	DJKI	Terbatas	Realtime	"Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI"	Layanan Fasilitas Legalitas Merk	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 02.01.01.02	Data Pemenuhan Persyaratan Izin Terverifikasi	SIINas	Tertutup	Realtime	"Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI"	Layanan Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan Siap Beroperasi, Layanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Pengawasan dan Pengendalian Teknis dan Surat Keputusan Siap Beroperasi				
BJN-DAD 02.01.01.03	Data Pelatihan		Terbuka	Realtime	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Layanan Kegiatan Pelatihan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 02.01.07.01	Data Sertifikat BNSP Pelaku Ekonomi Kreatif		Terbatas	Tahunan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Layanan Bimbingan Sertifikasi BNSP Pelaku Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.01.07.02	Data Pelaku Ekonomi Kreatif		Terbatas	Tahunan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Layanan Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.01.07.03	Data Produk Ekonomi Kreatif		Terbatas	Tahunan	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Layanan Promosi Produk Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.02.01.01	Data Sewa Lapak	SIMPD	Tertutup	Bulanan	Peningkatan Pendapatan Perkapita	Layanan Pengelolaan PAD Pasar Daerah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.02.01.02	Data Harga Bahan Pokok	Siska Perbapo, SP2KP, Disdag Online	Terbuka	Harian	Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	Layanan Manajemen Data Harga Bahan Pokok	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.02.01.03	Data Pengajuan Merk Dagang		Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Promosi Dagang	Layanan Fasilitas Merk Dagang	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.02.01.04	Data Ijin Skala Tertentu		Terbatas	Tiga Bulanan	Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Pemberian Rekomendasi Ijin Skala Tertentu	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.02.01.05	Data Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan	OSS RBA	Terbatas	Realtime	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Layanan Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.02.03.01	Data Tera Ulang Alat Ukur	SIMPEL	Terbatas	Bulanan	Pelaksanaan Metrologi Legal	"Layanan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan"	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.02.03.02	Data Tera Ulang Alat Takar	SIMPEL	Terbatas	Bulanan	Pelaksanaan Metrologi Legal	"Layanan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan"	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.02.03.03	Data Tera Ulang Alat Timbang	SIMPEL	Terbatas	Bulanan	Pelaksanaan Metrologi Legal	"Layanan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan"	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.02.03.04	Data Tera Ulang Alat Perlengkapan	SIMPEL	Terbatas	Bulanan	Pelaksanaan Metrologi Legal	"Layanan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan"	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.03.03.01	Data Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)		Terbatas	Tahunan	Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.08.01	Data Kelompok Tani	SIMPONI	Terbuka	Tiga Tahunan	Penyuluhan Pertanian	Layanan Kelompok Tani	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.08.02	Data Penyuluhan Pertanian	EPUSLUH	Terbuka	Tahunan	Penyuluhan Pertanian	Layanan Penyuluhan Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.08.03	Data Pengelolaan Kelembagaan Kelompok tani		Terbatas	Tahunan	Penyuluhan Pertanian	Layanan Pengelolaan Kelembagaan Kelompok tani	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.09.01	Data Perpanjangan Rekomendasi Ijin Usaha Budidaya Hortikultura		Terbatas	Bulanan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Layanan Perpanjangan Rekomendasi Ijin Usaha Budidaya Hortikultura	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
BJN-DAD 02.03.15.01	Data Pemanfaatan Pekarangan		Terbuka	Tahunan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Layanan Pemanfaatan Pekarangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.16.01	Data Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian		Terbatas	Bulanan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Layanan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.16.02	Data Alat dan Mesin Pertanian		Terbuka	Tahunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Layanan Alat dan Mesin Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.16.03	Data Pengajuan Bantuan Hibah		Terbatas	Tahunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Layanan Pengajuan Bantuan Hibah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.16.04	Data Pinjam Pakai Alat Mesin Pertanian		Terbatas	Realtime	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Layanan Pinjam Pakai Alat Mesin Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.19.01	Data Pengembangan Lumbung Pangan Desa		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Cadangan Pangan	Layanan Pengembangan Lumbung Pangan Desa	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.03.19.02	Data Pengolahan Pangan		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Cadangan Pangan	Layanan Pengolahan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.20.01	Data Penyusunan Neraca Bahan Makanan		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Pangan Pokok/Pangan Lainnya	Layanan Penyusunan Neraca Bahan Makanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.20.02	Data Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok		Terbuka	Harian	Penyediaan Pangan Pokok/Pangan Lainnya	Layanan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.20.03	Data Workshop Penganekaragaman Pangan		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Pangan Pokok/Pangan Lainnya	Layanan Workshop Penganekaragaman Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.20.04	Data Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Pangan Pokok/Pangan Lainnya	Layanan Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.21.01	Data Pengumpulan, Pengolahan Data, dan Informasi Pangan		Terbatas	Bulanan	Pembentukan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	"Layanan Pengumpulan, Pengolahan Data, dan Informasi Pangan"	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.21.02	Data Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Terbatas	Tahunan	Pembentukan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Layanan Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.03.22.01	Data Pangan Segar Asal Tumbuhan		Terbatas	Harian	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Layanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.22.02	Data Penerbitan Registrasi Asal Tumbuhan Produksi Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		Terbatas	Bulanan	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Layanan Penerbitan Registrasi Asal Tumbuhan Produksi Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.03.22.03	Data Keamanan Pangan		Terbatas	Tahunan	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Layanan Keamanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.05.01.01	Data Pengelolaan Bantuan Benih Tumbuh Tanaman Sayur dan Buah		Terbatas	Tahunan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Layanan Pengelolaan Bantuan Benih Tumbuh Tanaman Sayur dan Buah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.05.02.01	Data Ternak		Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Informasi Data Ternak	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.02.02	Data Terpadu Hewan		Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Terpadu Hewan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.04.01	Data Kesehatan Hewan	ISIKHNAS, IDENTIK PKH	Terbatas	Harian	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Kesehatan Hewan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.05.04.02	Data Inseminasi Buatan	ISIKHNAS, IDENTIK PKH	Terbatas	Bulanan	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Inseminasi Buatan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.04.03	Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan		Tertutup	Realtime	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH/PH) Sertifikat Veteriner	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.04.04	Data Kelahiran Hewan Ternak	ISIKHNAS, IDENTIK PKH	Terbatas	Realtime	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Kelahiran Hewan Ternak	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.04.05	Data Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Ternak	ISIKHNAS, IDENTIK PKH	Terbatas	Realtime	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Ternak	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.04.06	Data Vaksinasi Hewan	ISIKHNAS	Terbatas	Realtime	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Vaksinasi Hewan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.07.01	Data Pemotongan Hewan		Terbatas	Harian	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Pemotongan Hewan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.05.09.01	Data Rekomendasi Ijin Usaha Ternak Unggas		Terbatas	Tahunan	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Persyaratan Teknis Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Ternak	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN	Dinas Peternakan dan Perikanan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Unggas			KOMODITAS PETERNAKAN	
BJN-DAD 02.06.01.01	Data Penangkapan Ikan		Terbatas	Bulanan	Pemberdayaan Nelayan Kecil	Layanan Penangkapan Ikan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.06.02.01	Data Budidaya Perikanan		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Layanan Budidaya Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.06.02.02	Data Pengolahan dan Pemasar Ikan		Terbatas	Bulanan	Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Layanan Pengolahan dan Pemasar Ikan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.06.03.01	Data Penyediaan Benih Ikan		Terbatas	Bulanan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Layanan Penyediaan Benih Ikan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.06.04.01	Data Izin Pengusaha Perikanan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Layanan Izin Pengusaha Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.06.04.02	Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Layanan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.06.04.03	Data Pokok Perikanan	Portal Data KKP	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Statistik Sektor	Layanan Data Pokok Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									PERIKANAN	
BJN-DAD 02.06.04.04	Data Rekomendasi BBM	BPH Migas Xstar	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Layanan Rekomendasi BBM	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAD 02.08.01.01	Data Sarana Informasi Investasi	SAMIN, Point Jatim, BKPM PIR	Terbuka	Realtime	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Layanan Sarana Informasi Investasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.01.02	Data Kegiatan Penanaman Modal	OSS RBA	Tertutup	Tiga Bulanan	Penciptaan Iklim Usaha	Layanan Kegiatan Penanaman Modal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.01	Data Perizinan Berusaha Risiko Rendah	OSS RBA	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Rendah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.02	Data Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah	OSS RBA	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.03	Data Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi	OSS RBA	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.08.06.04	Data Perizinan Berusaha Risiko Tinggi	OSS RBA	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.05	Data Perizinan Berusaha UMKU	OSS RBA	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Berusaha UMKU	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.06	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	MPP Digital	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Perizinan Tenaga Kesehatan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.07	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana	SIMBG	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.08	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana	SIMBG	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.09	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diluar Fungsi Hunian	SIMBG	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diluar Fungsi Hunian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.08.06.10	Data Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	SIMBG	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.11	Data Izin Usaha Angkutan (KPS)	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Usaha Angkutan (KPS)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.12	Data Izin Usaha Angkutan (Trayek)	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Usaha Angkutan (Trayek)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.13	Data Izin Pemakaian Tanah Stren	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Pemakaian Tanah Stren	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.14	Data Izin Reklame	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Reklame	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.15	Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.08.06.16	Data Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.17	Data Izin Paramedik Veteriner PeData Inseminator	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.18	Data Izin Reklame Insidentil	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Reklame Insidentil	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.19	Data dan Informasi Penanaman Modal	OSS RBA, Satu Data BKPM	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.20	Data Pelayanan MPP	Mal Pelayanan Publik, Pengambilan Antrian	Terbatas	Lainnya	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan MPP	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.09.02.01	Data Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Permodalan dan Pemasaran Koperasi	Layanan Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									KOPERASI	
BJN-DAD 02.09.03.01	Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	ODS	Terbatas	Realtime	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Layanan Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.09.04.01	Data Penilaian Koperasi Sehat		Terbatas	Tahunan	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Layanan Penilaian Kesehatan Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.10.01.01	Data Transaksi Penjualan Produk UMKM		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro	Layanan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.10.01.02	Data Kartu Pedagang Produktif (KPP)		Terbatas	Harian	Pemberdayaan Usaha Mikro	Layanan Kartu Pedagang Produktif (KPP)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAD 02.11.01.01	Data Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Terbuka	Bulanan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Sektor Pariwisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.11.01.02	Data Sertifikat Pelaku Usaha Pariwisata		Terbatas	Tahunan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Layanan Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.11.01.03	Data Pemandu Wisata		Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Pelatihan Pemandu Wisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									PARIWISATA	
BJN-DAD 02.11.02.01	Data Destinasi Wisata	WISATA BOJONEGORO	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Layanan Destinasi Wisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.11.04.01	Data Kunjungan Wisata	e-Ticketing	Terbatas	Bulanan	Peningkatan Sarpras Destinasi Pariwisata	Layanan Kunjungan PIG (Pusat Informasi Geologi) dan Tempat Wisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 02.11.04.02	Data Duta Wisata Kange Yune		Terbuka	Dua Tahunan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Layanan Pemilihan Duta Wisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 03.01.01.01	Data Jalan Kabupaten	SATU DATA BOJONEGORO	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Informasi Kondisi Jalan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.01.02	Data Jembatan Kabupaten	SATU DATA BOJONEGORO	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Informasi Kondisi Jembatan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.01.03	Data Pengelolaan Jalan		Terbuka	Bulanan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Pengelolaan Jalan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.01.01.04	Data Pengelolaan Jembatan		Terbuka	Bulanan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Pengelolaan Jembatan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.01.05	Data Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan	OSS RBA	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.01.06	Data Rekomendasi Siteplan		Terbatas	Realtime	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan Rekomendasi Siteplan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.01.03.01	Data Jasa Konstruksi	SIJAKOB	Terbuka	Bulanan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Layanan Jasa Konstruksi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.03.02	Data Uji Laboratorium		Terbatas	Realtime	"Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi"	Layanan Uji Laboratorium	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.03.03	Data Pemakaian Alat Berat		Terbatas	Realtime	"Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi"	Layanan Pemakaian Alat Berat	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.01.03.04	Data Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi		Terbuka	Realtime	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Layanan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.03.05	Data Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi		Terbuka	Realtime	"Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi"	Layanan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.05.01	Data Kapasitas Tampung Air		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Check Dam	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.02	Data Bangunan Infrastruktur Pengendali Banjir		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Pembangunan Tanggul Sungai	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.03	Data Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi	SIPUSDA, e-PAKSI	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Smart Monitoring dan Survey Sumber Daya Air di Bojonegoro	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.01.05.04	Data Panjang Jaringan Irigasi Permukaan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sistem Irigasi	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.05	Data Embung	SIPUSDA	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Penampungan Air	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi/Normalisasi Embung	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.06	Data Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.07	Data Stasiun Pompa Banjir		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.08	Data Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.01.05.09	Data Pembangunan/Rehabilitasi Tebing Sungai		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Tebing Sungai	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.10	Data Curah Hujan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Layanan Curah Hujan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.11	Data Usulan Pemberdayaan Hippy/Ghippa		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sistem Irigasi	Layanan Usulan Pemberdayaan Hippy/Ghippa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAD 03.01.05.12	Data Penanganan Kerusakan PJJ	SmartPJJ, Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Harian	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Layanan Pengaduan Kerusakan PJJ	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.01.05.13	Data Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Drainase dan Jalan Lingkungan	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.01.05.14	Data Pembangunan SPAM	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Fasilitas Pembangunan SPAM	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.01.05.15	Data Pemeliharaan Saluran Air	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Layanan Pemeliharaan Saluran Air	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.01.05.16	Data Pembuangan MCK	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Sanitasi	Layanan Fasilitas Pembuangan MCK	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.03.01.01	Data Parkir	Bojonegoro TIC	Terbatas	Bulanan	Perizinan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Parkir Berlangganan Layanan Pelayanan Parkir	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.01.02	Data Angkutan Pelajar Gratis	APEL GRATIS	Terbatas	Harian	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	Layanan Angkutan Pelajar Gratis	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.02.01	Data Antrian Uji Kendaraan Bermotor	SUKIRNO	Terbatas	Harian	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.03.02.02	Data Uji Kendaraan Bermotor	SIMPKB	Terbatas	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.02.03	Data Tata Cara Pengamanan Perjalanan KA		Terbuka	Realtime	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan Pengamanan Perjalanan Kereta Api Di Perlintasan Sebidang KA	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.02.04	Data Teknis Pengawasan & Pemeliharaan Pos PJL		Terbatas	Harian	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan Pengawasan Pos PJL Perlintasan Sebidang KA	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.01	Data Pengajuan Izin Parkir Insidentil		Terbuka	Realtime	Perizinan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Izin Parkir Insidentil Tepi Jalan Umum	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.02	Data Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Izin Penggunaan Jalan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.03	Data Izin Usaha dan Izin Trayek	SIMANIZ	Terbatas	Realtime	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	Layanan Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.03.03.04	Data Dokumen Persetujuan ANDALALIN		Terbatas	Realtime	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Layanan Persetujuan Hasil ANDALALIN	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.05	Data Permohonan Pembangunan Pos PJL		Terbuka	Realtime	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan Pelayanan Pengajuan Rekomendasi Pembangunan Pos PJL	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.06	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dan Perlintasan Sebidang KA		Terbatas	Realtime	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dan Perlintasan Sebidang KA	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.07	Data CCTV	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Realtime	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan CCTV	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.04.01.01	Data Bangunan Gedung		Terbuka	Realtime	Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Layanan Inspeksi Proteksi kebakaran	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAD 03.04.01.02	Data Penilaian Bangunan Gedung		Terbuka	Realtime	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Layanan Inspeksi Proteksi kebakaran	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pemadam Kebakaran

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.04.01.03	Data Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.04.01.04	Data Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.04.04.01	Data Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Layanan Fasilitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.05.01.01	Data Indeks Ketahanan Lingkungan	IDM	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Layanan Pembinaan Peningkatan Indeks Desa Membangun	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.01.02	Data Indeks Ketahanan Ekonomi	IDM	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Layanan Pembinaan Peningkatan Indeks Desa Membangun	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAD 03.05.01.03	Data Indeks Ketahanan Sosial	IDM	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Layanan Pembinaan Peningkatan Indeks Desa Membangun	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.01.04	Data Indikator Pembangunan Desa Berkelanjutan	SDGS Desa	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Penataan Desa	Layanan Pembinaan Pembangunan Desa Berkelanjutan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.05.01.05	Data Santunan Duka Terverifikasi		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Layanan Usulan Santunan Duka	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 03.05.01.06	Data Ahli Waris Tsertifikasi		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Layanan Keterangan Ahli Waris	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 03.05.01.07	Data Dispensasi Nikah		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Layanan Surat Dispensasi Nikah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN	Kecamatan Bojonegoro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAD 03.05.01.08	Data BHP/Retribusi Terlaksana		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Layanan Fasilitas Pencairan BHP/Retribusi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 03.05.02.01	Data Berkas Administrasi Penyaluran Badan Kredit Desa Balai/Kantor Desa		Terbuka	Tahunan	Peningkatan Sarpras Ekonomi Pedesaan dan Agropolitan	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa Balai/Kantor Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.02.02	Data Pencairan Anggaran Dana Desa		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Desa	Layanan Fasilitas Pencairan Ajuan ADD	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.05.02.03	Data Ajuan Dana Desa Bangunan		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Desa	Layanan Fasilitas Pencairan Ajuan DD Bangunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 03.05.02.04	Data Pencairan Proposal Desa		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Desa	Layanan Fasilitas Pengajuan Proposal Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 03.05.02.05	Data Anggaran Kelurahan	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Kelurahan	Layanan Pencairan Anggaran Kelurahan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 03.05.05.01	Data SK Kepala Desa	SIAP DESA	Terbuka	Tahunan	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.05.05.02	Data Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD (PAW)	SIAP DESA	Terbuka	Tahunan	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD (PAW)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.06.01	Data RKP Desa		Terbuka	Tahunan	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Layanan Fasilitas Pendampingan Penyusunan RKP Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.06.02	Data Proses Bisnis BUM Desa	SIBUMBO	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Layanan Fasilitas Pemberdayaan BUM Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.07.01	Data Penyaluran Dana Desa	SIAP DESA	Terbuka	Realtime	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Fasilitas Penyaluran Dana Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.07.02	Data Penyaluran Alokasi Dana Desa	SISKEUDES	Terbuka	Realtime	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Fasilitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.05.07.03	Data Berkas Persyaratan Administrasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa	SIPADES	Terbuka	Tahunan	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pengajuan Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.07.04	Data Penyaluran BKD Desa Lokasi Puncak Peringatan BBGRM dan HKG-PKK	SISKEUDES	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.07.05	Data Penyaluran BKD Honor/Insentif Ketua RT dan Ketua RW	SISKEUDES	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.07.06	Data Penyaluran BKD BUM Desa	SISKEUDES	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa BUM Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.06.01.01	Data Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	SIPETARUNG	Terbuka	Bulanan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Informasi Tata Ruang	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.06.01.02	Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha	OSS RBA	Terbuka	Realtime	Pemanfaatan Ruang	Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.06.01.03	Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	SIMANIZ	Terbuka	Realtime	Pemanfaatan Ruang	Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.07.02.01	Data Pengguna Pelayanan KB	SIGA	Terbatas	Bulanan	Pelaksanaan Pelayanan KB	Layanan Pencatatan Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.02.02	Data Pelayanan Keluarga Berencana	SIGA	Terbatas	Bulanan	Pelaksanaan Pelayanan KB	Layanan Pelayanan Keluarga Berencana	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.02.03	Data Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	SIGA	Terbatas	Bulanan	Pengendalian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Layanan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.02.04	Data Petugas P3AKB		Terbatas	Tahunan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Layanan Pendayagunaan Petugas P3AKB	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.07.03.01	Data Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB		Terbatas	Tahunan	KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Layanan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.03.02	Data Standar Pelayanan KIE		Terbuka	Tahunan	KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Layanan Standar Pelayanan KIE	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.03.03	Data Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga		Terbatas	Tahunan	Pembangunan Keluarga	Layanan Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.03.04	Data Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia	SIGA	Terbatas	Bulanan	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan KS	"Layanan Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia"	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.03.05	Data Pembentukan Kelompok PIK Remaja	SIGA	Terbuka	Tahunan	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan KS	Layanan Pembentukan Kelompok PIK Remaja	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.07.03.06	Data Kegiatan Bimtek, Workshop dan Pelatihan SDM Lembaga Penyedia Layanan Keluarga		Terbuka	Bulanan	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan KS	"Layanan Kegiatan Bimtek, Workshop dan Pelatihan SDM Lembaga Penyedia Layanan Keluarga"	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.03.07	Data Pembentukan Model Layanan Keluarga		Terbuka	Tahunan	Pembangunan Keluarga	Layanan Pembentukan Model Layanan Keluarga	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 03.07.03.08	Data Pembinaan Keluarga Sejahtera		Terbatas	Tahunan	Pembangunan Keluarga	Layanan Pembinaan Keluarga Sejahtera	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 04.01.01.01	Data Perencanaan Kebutuhan SDMK	REN BUT	Terbatas	Realtime	Perencanaan Kebutuhan dan Pendeteksi SDMK	Layanan Perencanaan Kebutuhan SDMK	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.01.02	Data SDMK Fasyankes	SISDMK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Layanan Manajemen SDMK Fasyankes	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.01.03	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	SIPATAS	Terbatas	Realtime	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.01.04	Data Sarana Konsultasi Satusehat SDM	SatuSehat SDM	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Layanan Konsultasi Satusehat SDM	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.01.05	Data Hasil Verifikasi dan Pendaftaran Praktik Mandiri Tenaga Medis Kesehatan		Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Layanan Verifikasi Praktik Mandiri Tenaga Medis Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.01.06	Data Laporan Kesehatan Pekerja	SITKO, Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Pekerja	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.01.07	Data Laporan Kesehatan Olahraga	SITKO	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Olahraga	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									MANUSIA KESEHATAN	
BJN-DAD 04.01.01.08	Data Perjalanan Dinas Dalam Kota	AKIRA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban	Layanan Pembuatan Data SPJ Perjalanan Dinas Dalam Kota	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.01.09	Data Pembelajaran Mahasiswa	HEALS	Terbatas	Realtime	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	Layanan Penerimaan dan Pembelajaran Mahasiswa Baru	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAD 04.01.01.10	Data Kinerja SMD Kesehatan	SIPENA	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	"Layanan Pelaporan Fasilitas, SDM dan Kemampuan Rumah Sakit dalam Menangani Rujukan Maternal dan Neonatal", Layanan Kinerja SDM Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAD 04.01.01.11	Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	SISDMK	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.01.12	Data Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RENBUT	Terbatas	Lainnya	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	Layanan Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.01.13	Data Fasilitas, SDM, dan Kemampuan RS Rujukan Neonatal	SIMATNEO	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	"Layanan Pelaporan Fasilitas, SDM dan Kemampuan Rumah Sakit dalam Menangani Rujukan Maternal dan Neonatal"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.01.14	Data Pegawai	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.01.15	Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	SISDMK	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.01.16	Data Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RENBUT	Terbatas	Realtime	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	Layanan Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.01.17	Data Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	E-Ukom System	Terbuka	Realtime	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	Layanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.01.18	Data Pengembangan Kompetensi ASN	Semestabangkom	Terbuka	Mingguan	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.01.19	Data Fasilitas, SDM, dan Kemampuan RS Rujukan Neonatal	SIMATNEO	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	"Layanan Pelaporan Fasilitas, SDM dan Kemampuan Rumah Sakit dalam Menangani Rujukan Maternal dan Neonatal"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.01.20	Data Asuhan Keperawatan Pasien	SI-KEP-Misterbian	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pengelolaan Data Asuhan Keperawatan Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.02.01	Data Ketersediaan Obat	Bank Data e-Logistics	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Ketersediaan Obat Indikator	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.02.02	Data Ketersediaan Vaksin	SMILE IMUNISASI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Ketersediaan Vaksin dan Logistik Vaksin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.02.03	Data Laporan Ketersediaan Obat Program ATM dan PKG	SMILE Logistik	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Ketersediaan Obat Program ATM dan PKG	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.02.04	Data RKO Obat Program dan RKO Obat Esensial	e-Monev Obat	Terbatas	Tahunan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat Program dan Obat Esensial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.02.05	Data Penggunaan Obat Program TB	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Penggunaan Obat Program TB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.02.06	Data Penggunaan Obat Program HIV	SIHA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Penggunaan Obat Program HIV	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.02.07	Data Stok Obat dan BMHP	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.02.08	Data Katalog dan Formularium Obat Nasional	e-MONEV OBAT	Terbatas	Tahunan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Monitoring & Evaluasi Katalog Obat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.03.01	Data Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	ASPAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	"Layanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.03.02	Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	ASPAK	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.03.03	Data Kronologi Kerusakan/Pemeliharaan Alat Kesehatan	SOBAT	Terbatas	Realtime	Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Layanan Pengajuan Pemeliharaan Alat Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Sumberrejo

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.01	Data Pasien TBC	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.02	Data Investigasi Kontak	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.03	Data Manajemen Laboratorium TBC	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.04	Data Manajemen Logistik TBC	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.05	Data Keuangan Pengajuan Klaim TCM	SITB	Terbatas	Tiga Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.06	Data Uji Silang Mikroskopis TBC	e-Tb12	Terbatas	Tiga Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.07	Data Pemeriksaan HIV	SIHA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.08	Data OHDIV on ARV	SIHA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.09	Data Logistik HIV	SIHA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.10	Data Tes Viraload HIV	SIHA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.11	Data Logistik Diare	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.12	Data Kasus Pengiriman Sampel	SKDR	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensi Wabah/KLB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.13	Data Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Mingguan	SKDR	Terbatas	Mingguan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensi Wabah/KLB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.14	Data Imunisasi Bayi	Web Imunisasi, Sehat Indonesiaku	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.15	Data Imunisasi Baduta	Web Imunisasi, Sehat Indonesiaku	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.16	Data Imunisasi TT Bumil dan WUS	Web Imunisasi, Sehat Indonesiaku	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.17	Data Imunisasi Anak Sekolah	Web Imunisasi, Sehat Indonesiaku	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.18	Data KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Keamanan Vaksin	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.19	Data Logistik Imunisasi	SMILE IMUNISASI	Terbatas	Mingguan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.20	Data Kelengkapan Laporan (Zero Repport)	SISMAL	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.21	Data Ketepatan PE	SISMAL	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.22	Data Pengobatan Standart Malaria	SISMAL	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.23	Data Registrasi Kasus Positif Malaria	SISMAL	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.24	Data Registrasi Pemeriksaan Malaria	SISMAL	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.25	Data Dasar Penduduk	SISMAL	Terbatas	Tahunan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.26	Data Logistik Stok	SISMAL	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.27	Data Dasar Faskes	SISMAL	Terbatas	Tahunan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.28	Data Pelapor	SISMAL	Terbatas	Tahunan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP, Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.29	Data Pemetaan Angka Bebas Jentik	SILANTOR	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Vektor	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.30	Data Registrasi Puskesmas	SILANTOR	Terbatas	Tahunan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Vektor	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.31	Data Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis	Sehat Indonesiaku	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Cek Kesehatan Gratis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.32	Data Cek Kesehatan Gratis	Sehat Indonesiaku	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Cek Kesehatan Gratis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.33	Data Kehadiran Cek Kesehatan Gratis	Sehat Indonesiaku	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Cek Kesehatan Gratis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.34	Data Kunjungan Pasien	SINTESA EMAS (RME)	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Kesehatan Primer	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.35	Data Kunjungan Pasien JKN	PCARE BPJS KESEHATAN	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pasien JKN	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.36	Data Panggilan Kegawatdaruratan Masyarakat	Emergency Button Bojonegoro	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kegawatdaruratan Medis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.37	Data Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	SIGAP PSC 119	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kegawatdaruratan Medis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.38	Data Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	SINTESA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.39	Data Rujukan Pasien Fasilitas Kesehatan	SISRUTE	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Rujukan Pasien ke Fasilitas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.40	Data Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	SIRS ONLINE,RS ONLINE	Terbatas	Realtime	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.41	Data Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Mutu Fasyankes	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.42	Data Fasyankes Tingkat Pertama	DFO	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Fasyankes Tingkat Pertama	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.43	Data IKP dan Mutu Fasyankes Tingkat Pertama	Mutu Fasyankes	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan IKP dan Mutu Fasyankes Tingkat Pertama	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.44	Data Penilaian Kinerja Puskesmas		Tertutup	Tahunan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Penilaian Kinerja Puskesmas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.45	Data Indeks Keluarga Sehat Puskesmas		Tertutup	Bulanan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Indeks Keluarga Sehat Puskesmas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.46	Data Kesehatan Tradisional	SIMPKT	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Tradisional	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.47	Data Hasil Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	SIDIK PERISA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Layanan Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.48	Data Praktik Mandiri Terdaftar	REGISTRASI FASYANKES	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Layanan Registrasi Fasyankes Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.49	Data Pencabutan Izin Praktik		Terbatas	Lainnya	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Layanan Pencabutan Izin Praktik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.50	Data Penggerakan GERMAS	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Harian	Pelaksanaan Sehat Promotif Preventif	Layanan Kampanye GERMAS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.51	Data Posyandu Siklus Hidup	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Posyandu Siklus Hidup	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.52	Data Strata Kader Posyandu	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Harian	Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	Layanan Penilaian Strata Kader Posyandu	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.53	Data Pangkalan SBH	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Saka Bakti Husada	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.54	Data Penerapan Komunikasi Antar Pribadi	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Komunikasi Antar Pribadi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.55	Data Poskestren	IKI Pesat Jatim	Terbatas	Harian	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pos Kesehatan Pesantren	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.56	Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	SISTBM	Terbatas	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.57	Data Sarana Tempat Fasilitas Umum	e-Monev Satu	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Tempat Fasilitas Umum	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.58	Data Anemia Ibu Hamil	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Ibu Hamil	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.59	Data Suplementasi Gizi Ibu Hamil	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Ibu Hamil	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.60	Data Kurang Energi Kronis Ibu Hamil	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Ibu Hamil	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.61	Data Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.62	Data Balita Underweight (BB Kurang dan Sangat Kurang)	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.63	Data Balita Overweight (Gizi Lebih dan Obesitas)	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.64	Data Bayi Usia Kurang dari 6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.65	Data Bayi Usia 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.66	Data Balita Usia 6-23 Bulan Mendapatkan MP-ASI	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.67	Data Balita Mendapatkan Kapsul Vitamin A	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.68	Data Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S)	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.69	Data Balita Ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D)	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.70	Data Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.71	Data Balita Gizi Kurang Dapat Tambahan Asupan Gizi	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.72	Data Balita BB Tidak Naik (T) Dapat Tambahan Asupan Gizi	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.73	Data Balita Berat Badan Kurang Dapat Tambahan Asupan Gizi	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.74	Data Skrining Anemia Remaja Putri	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Remaja Putri	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.75	Data Konsumsi Tablet Tambah Darah Remaja Putri	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Remaja Putri	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.76	Data Tatalaksana Anemia Remaja Putri	SIGIZIKESGA	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Remaja Putri	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.77	Data PWS Ibu Hamil	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.78	Data LB3 Maternal	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.79	Data Pemantauan Ibu Hamil Risti	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.80	Data Kematian Ibu	MPDN	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.81	Data Bayi Baru Lahir	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.82	Data Bayi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.83	Data Kematian Bayi	MPDN	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.84	Data Kematian Balita	MPDN	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.85	Data Laporan PWS Anak	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.86	Data Laporan Skrining BBL	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.87	Data Laporan SDIDTK Balita	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.88	Data Laporan LB 3 Neonatal	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.89	Data Laporan Kesehatan Remaja	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.90	Data Laporan Penjaringan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.91	Data Laporan Pasangan Usia Subur Risti dan Metode Kontrasepsinya	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Produktif	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.92	Data Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Produktif	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.93	Data Pelayanan KBPP, KB Baru, Komplikasi KB, Efek Samping	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Produktif	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.94	Data Pelayanan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Produktif	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.95	Data Profil Kesehatan		Terbuka	Tahunan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Informasi Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.96	Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien	SIMRS Pelayanan, DASI JR, SIAP RS, Eklaim BPJS Kesehatan, Vclaim BPJS Kesehatan, SIRS Online Kemenkes, ePLKK, Pelkes InHealth, HFIS BPJS, SITB, SIHA, SATU DATA, SIGIZI, e-RM, SIMATNEO, Laboratorium Information System, PACS, IRR PERNEFRI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Perawatan Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAD 04.01.04.97	Data Audit Cuci Tangan	KPPI E-Reporting	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Perawatan Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAD 04.01.04.98	Data Medical Check Up Pasien	SIMRS Pelayanan, E-RM, Laboratorium Information System, PACS	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Medical Check Up Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAD 04.01.04.99	Data Pengaduan Masyarakat	CEMARA, KESSAN BPJS KESEHATAN	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.100	Data Capaian Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit	INM RS	Terbuka	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Indikator Mutu Nasional (IMN) Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.101	Data Survey Kepuasan Masyarakat	SuKMa-e Jatim	Terbuka	Harian	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.102	Data SPM Rumah Sakit		Terbuka	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.103	Data Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	SI-DHP	Terbatas	Lainnya	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Akreditasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.104	Data Rumah Sakit	SIRS	Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.105	Data Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir	e-Kohort	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	"Layanan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.106	Data Kematian Maternal dan Perinatal	MPDN	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Kematian Maternal dan Perinatal	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.107	Data Rekam Medis Pasien	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.108	Data Penerimaan Layanan Program KB	SIGA	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Program Keluarga Berencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.109	Data Peserta BPJS Kesehatan	SIPP	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pengaduan Keluhan Peserta BPJS Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.110	Data Layanan Kesehatan Rumah Sakit	HFIS BPJS KESEHATAN	Tertutup	Lainnya	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Informasi Kesehatan Kerjasama BPJS Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.111	Data Klaim Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Penjaminan BPJS Kesehatan	VCLAIM	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.112	Data Indikator Rumah Sakit	SIRS JATIM	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.113	Data Kunjungan	SIRS JATIM	Terbatas	Bulanan	Peningkatan Sarpras Destinasi Pariwisata, Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.114	Data Insiden Keselamatan Pasien RS	IKP	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.115	Data Klaim Pasien Penjaminan Jasa Raharja	JRCARE	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan oleh Jasa Raharja	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.116	Data Rujukan Keluar dan Masuk Pasien	SISRUTE	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rujuk Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.117	Data Klaim Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Penjaminan BPJS Ketenagakerjaan	e-PLKK	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.118	Data Capaian Indikator Mutu Nasional dan HAIS	SIMAR	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Indikator Mutu Nasional dan HAIS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.119	Data Rekam Medis Pasien	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.120	Data Survey Kepuasan Masyarakat	SuKMa-e Jatim	Terbuka	Enam Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.121	Data Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	SI-DHP	Terbatas	Tahunan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Akreditasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.122	Data Hasil Radiologi Pasien	PACS	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Radiologi Diagnostik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.123	Data Rujukan Keluar dan Rujukan Masuk Pasien	SISRUTE	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rujuk Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.124	Data Pengajuan Laporan Penjaminan Asuransi / Jasa Raharja / BPJS	TACS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pengajuan Laporan Penjaminan Asuransi / Jasa Raharja / BPJS untuk Korban Laka Lantas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.125	Data Bayi Lahir	KOLAK PISANG	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pendataan Bayi Lahir	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.126	Data Rumah Sakit	SIRS	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.127	Data Hasil Laboratorium Pasien	HCLAB	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.128	Data Pemeriksaan HIV AIDs	SIHA	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan HIV AIDs	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							KESEHATAN			
BJN-DAD 04.01.04.129	Data Pemeriksaan TB	SITB	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan TB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.130	Data Pemeriksaan PPRA	SIRS	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	"Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan Biogran, Kultur, dll"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.131	Data Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir	e-Kohort	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	"Layanan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.132	Data Pelayanan KB	SIGA	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Pelaporan Pelayanan KB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.133	Data Kematian Maternal dan Perinatal	MPDN	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Kematian Maternal dan Perinatal	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.04.134	Data Dashboard Pelayanan Pasien	SIM-RS	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Pengelolaan Data Rumah Sakit Terintegrasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							KESEHATAN			
BJN-DAD 04.01.04.135	Data Pendaftaran Pasien Online	SAPA-SOULMATE	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pendaftaran Antrian Pasien Online	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.136	Data Alamat Pengguna Layanan	MAS-PIO	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pengantaran Obat Gratis ke Rumah Pengguna Layanan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.137	Data Informasi dan Pengaduan Pengguna Layanan	SI-PIPIT	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pemberian Informasi dan Pengaduan Pengguna Layanan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.138	Data Pemetaan Ibu Hamil Risiko Tinggi	SI-DEK RISTI	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.139	Data Pemeriksaan Radiologi	SIM-ONE-MisterBian	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pengelolaan Data Pelayanan Hasil Pemeriksaan Radiologi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.140	Data Telekonsultasi Gizi	SI-SEPAT	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Telekonsultasi Gizi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.141	Data Insiden Keselamatan Pasien		Terbatas	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.142	Data Indikator Mutu	SI-IMUT-Misterbian	Tertutup	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Indikator Mutu	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.04.143	Data Rekam Medis Elektronik	E-RM	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Rekam Medis Elektronik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.05.01	Data Terapi Pencegahan TBC	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.02	Data Kasus Potensi Wabah/KLB	SKDR	Terbatas	Mingguan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensi Wabah/KLB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.03	Data Deteksi Dini PTM	Sehat Indonesiaku	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian PTM	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.05.04	Data Faktor Risiko PTM	Sehat Indonesiaku	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian PTM	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.05	Data Kasus PTM	Sehat Indonesiaku	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian PTM	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.06	Data Laporan Mikrobiologi, Fisika, Kimia Air		Terbatas	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Pemeriksaan Kualitas Air	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.07	Data Pemeriksaan Mikrofilariasis		Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pemeriksaan Mikrofilariasis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.08	Data Pemeriksaan Pertusis		Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pemeriksaan Pertusis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.09	Data Uji Kualitas Udara		Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Uji Kualitas Udara	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.05.10	Data Logistik Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan	SMILE Logistik	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.11	Data Pemeriksaan Diftheria		Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pemeriksaan Dhifteria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.05.12	Data Penyakit	SIRS JATIM	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.06.01	Data Positif HIV	SIHA	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.02	Data Ibu Hamil Periksa Hepatitis B	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.03	Data Ibu Hamil Positif Hepatitis B	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Diare	KESEHATAN			
BJN-DAD 04.01.06.04	Data Bayi Positif Hepatitis B HBIG	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.05	Data Kasus Diare	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.06	Data Kasus Diare Dehidrasi	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.07	Data Obat Jiwa	SIMKESWA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.08	Data Bunuh Diri	SIMKESWA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.09	Data Pasung	SIMKESWA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.06.10	Data ODGJ	SIMKESWA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.11	Data Skrining Kesehatan Jiwa	SIMKESWA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.12	Data Laporan Kasus Tuberkulosis	e-Tb12	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Croscheck TB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.13	Data Laporan Kasus Malaria	SISMAL	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kasus Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.14	Data Laporan PME	Simultan PME	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan PME	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.15	Data Laporan Monitoring TB	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Monitoring TB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.06.16	Data Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Balita	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.17	Data Kesehatan Usia Lanjut	Komdat Ditjen Kesmas	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Usia Lanjut	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.18	Data Terduga TBC	SITB	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.06.19	Data Pasien HIV	SIHA	Terbatas	Lainnya	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Pasien HIV	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.06.20	Data Pasien TBC RSUD Kepohbaru	SITB	Terbatas	Lainnya	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Pasien TBC	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.06.21	Data Balita Gizi Buruk	SIGIZI	Terbatas	Lainnya	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Balita Gizi Buruk	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.06.22	Data Informasi Kondisi Pasien		Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Pemantauan dan Edukasi Pasien Poli	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 04.01.07.01	Data Skrining Penggunaan NAPZA	SINAPZA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian NAPZA	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAA N DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.07.02	Data Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika	SIPNAP	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAA N DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.07.03	Data Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika	SIPNAP	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pelaporan Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAA N DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.07.04	Data Penerimaan, Penggunaan dan Stok Sediaan NAPZA	SIPNAP	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan NAPZA	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAA N DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.08.01	Data Laporan Bakteri Makanan dan Minuman		Terbatas	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Pemeriksaan Bakteri Makanan dan Minuman	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.08.02	Data Laporan Bahan Tambahan Pangan		Terbatas	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Pemeriksaan Bahan Tambahan Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.08.03	Data Laporan Angka Kuman		Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pemeriksaan Angka Kuman (ALT)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.08.04	Data Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	SAJI PANGAN	Terbuka	Realtime	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.08.05	Data Pengawasan Kualitas Air Minum	SIPEKAM	Terbatas	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Pengawasan Kualitas Air Minum	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.08.06	Data Sarana Tempat Pengelolaan Pangan	e-Monev HSP	Terbatas	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Tempat Pengelolaan Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.08.07	Data Perizinan SPPIRT	SPPIRT	Terbuka	Bulanan	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Perizinan PIRT	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.02.01.01	Data Usulan Fasilitas Kelompok Rentan		Terbatas	Realtime	Perlindungan Sosial	Layanan Penanganan Khusus Kelompok Rentan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.02	Data Pemohon Adopsi		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Pengajuan Izin Adopsi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.03	Data Rumah Singgah		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Rekomendasi Rumah Singgah	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.04	Data Penerima Bimbingan Sosial Masyarakat	SIAP BANSOS, SiBantu	Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Pemberian Bimbingan Sosial Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.05	Data Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	SIAP BANSOS, SiBantu	Terbuka	Realtime	Rehabilitasi Sosial	"Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.02.01.06	Data Pemerlu Pelayanan Rehabilitasi Sosial		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.07	Data PPKS Pemerlu Sandang Kedaruratan		Terbuka	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Penyediaan Sandang	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.08	Data Penerima Makanan Shelter dan Rumah Singgah		Terbuka	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Penyediaan Makanan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.09	Data PPKS Terlantar		Terbuka	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Pemberian Penelusuran Keluarga	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.09	Data PPKS Terlantar		Terbuka	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Pemberian Penelusuran Keluarga	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.01.10	Data Rujukan ODGJ		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Rujukan Orang Gangguan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.02.01.11	Data Penerima Layanan Reunifikasi Keluarga		Terbuka	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Reunifikasi Keluarga	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.02.01	Data Kepesertaan BPJS Kesehatan	e-Dabu Pemda	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan PBI-KIS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.03.01	Data Penerima Hibah Keuangan	e-Hibah	Terbatas	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Hibah Keuangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAD 04.02.03.02	Data Penerima Santunan Duka	SANDUK	Terbuka	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Santunan Duka	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAD 04.02.03.03	Data Penerima Insentif Keagamaan	SIPIK	Terbatas	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Insentif Keagamaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAD 04.02.03.04	Data LKSA Terdaftar		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.02.03.05	Data Pemohon Hilang Kartu	SIKS-NG	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Rekomendasi KKS-BPNT	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARA AN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.03.06	Data Beda Identitas Bank	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Rekomendasi KKS-BPNT	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARA AN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.03.07	Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Leluhur		Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARA AN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.03.08	Data Penerima PKH	SIKS-NG	Terbuka	Realtime	Perlindungan Sosial	Layanan Rekomendasi 1 Desa 10 Sarjana, Layanan Surat Keterangan Penerima PKH	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARA AN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.03.09	Data Penerima Bantuan Sosial	SIAP BANSOS, SiBantu	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Pengelolaan Fakir Miskin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARA AN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.04.01	Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARA AN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.02.04.02	Data Karang Taruna se-Kabupaten		Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.04.03	Data Pekerja Sosial Masyarakat		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.04.04	Data Rekomendasi Lembaga Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.05.01	Data Keluarga Miskin Terdata DTKS	SIKS-NG	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Sosial	Layanan Rekomendasi DTKS (KIP/Beasiswa/Subsidi listrik)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.02.06.01	Data Korban Tertangani		Terbuka	Realtime	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.02.06.02	Data Informasi Rawan Bencana		Terbuka	Tahunan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Layanan Informasi Rawan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANGA N BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAD 04.02.06.03	Data Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terbuka	Bulanan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANGA N BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAD 04.02.06.04	Data Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Terbuka	Bulanan	Peningkatan Upaya Tanggap Bencana	Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANGA N BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAD 04.02.06.05	Data Kejadian Kebakaran	Sadam	Terbuka	Realtime	Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Layanan Pemadaman Kebakaran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANGA N BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAD 04.02.06.06	Data Penanganan Evakuasi dan Penyelamatan	Sadam	Terbuka	Realtime	Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Layanan Evakuasi dan Penyelamatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANGA N BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAD 04.02.06.07	Data Sarana Prasarana Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		Terbuka	Realtime	Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Layanan Fasilitas Sarana Prasarana Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANGA N BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.02.06.08	Data Korban Bencana		Tertutup	Realtime	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Layanan Penanganan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN AN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial
BJN-DAD 04.03.05.01	Data Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak		Tertutup	Realtime	Perlindungan Kekerasan Perempuan Dan Anak	Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAD 05.01.01.01	Data Peraturan PBB-P2 dan BPHTB	e-Arsip	Tertutup	Harian	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Dokumentasi Administrasi Kebijakan Pajak Daerah	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 05.01.01.02	Data Peraturan Pajak Daerah Lainnya	KIPJAK-I	Tertutup	Harian	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Dokumentasi Administrasi Kebijakan Pajak Daerah	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Badan Pendapatan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 05.01.01.03	Data Rekap Perka Perkada Tupoksi Satpol PP	Sijalinmaja	Terbatas	Lainnya	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Garuda Mas	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.01.01.04	Data Produk Hukum DPRD	JDIH DPRD	Terbuka	Realtime	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Layanan Informasi Produk Hukum DPRD	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 05.01.02.01	Data Produk Hukum Daerah	JDIH	Terbuka	Bulanan	Fasilitasi Hukum	Layanan Pengelolaan Informasi Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
BJN-DAD 05.01.05.01	Data Sertifikat HKI	e-Hakcipta	Terbuka	Bulanan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Layanan Pendataan Hak Cipta	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.05 PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 05.02.01.01	Data Organisasi Kemasyarakatan		Terbuka	Realtime	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Layanan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAD 05.02.01.02	Data Penindakan Dengan Tindakan Penertiban	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Tindakan Penertiban	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 05.02.01.03	Data Penindakan Dengan Tindakan Persuasif	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Tindakan Persuasif	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.04	Data Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Sijalinmaja	Terbatas	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.05	Data Pelanggaran Trantibum	Gatramas	Terbatas	Realtime	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Penertiban Pelanggaran Trantibum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.06	Data Penindakan Represif	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Tindakan Represif	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.07	Data Penindakan Dengan Tindakan Yustisi	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Tindakan Yustisi	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.08	Data Penindakan Dengan Non Yustisi	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Tindakan Non Yustisi	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 05.02.01.09	Data Penertiban Bangunan Liar	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Penertiban Bangunan Liar	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.10	Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Data Aset Pos Kampling	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.11	Data Aset Pos Satlinmas Kabupaten Bojonegoro	Sijalinmaja	Terbatas	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Data Aset Pos Satlinmas	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.12	Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas, Sijalinmaja	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Manajemen Anggota Satlinmas	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.13	Data Kegiatan Anggota Satlinmas	Sijalinmaja	Terbatas	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Kegiatan Anggota Satlinmas	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.14	Data Sarana dan Prasarana Trantibum	Gatramas	Terbatas	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Sarana dan Prasarana Trantibum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 05.02.02.01	Data Penegakan Perda	Sijalinmaja, Gatramas	Terbatas	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Penegakan Perda	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.03.01	Data Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Kebakaran	Sadam	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemberdayaan Masyarakat	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAD 06.01.01.01	Data Manajemen Tunjangan Guru	SIM TUNJANGAN	Tertutup	Lainnya	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Informasi Manajemen Tunjangan Guru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.01.02	Data Penilaian Kinerja Guru		Terbatas	Tahunan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Penilaian Kinerja Guru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.01.03	Data Pengajar NUPTK		Terbatas	Realtime	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pengajar NUPTK	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.01	Data Perubahan Dapodik	SILAPDIK	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Perubahan Dapodik	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									MENENGAH	
BJN-DAD 06.01.02.02	Data Pokok Pendidikan	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Data Pokok Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.03	Data RKAS	ARKAS	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.04	Data Pengajuan NPSN	SILAPDIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengajuan NPSN	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.05	Data Mutasi Siswa	DAPODIK	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Mutasi Siswa	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,	Dinas Pendidikan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
BJN-DAD 06.01.02.06	Data Verval PD	SIM TUNJANGAN	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Verval PD	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.07	Data Rekom Mutasi Siswa Luar Daerah	ARKAS	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Rekom Mutasi Siswa Luar Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.08	Data Legalisir Ijazah SD	E-SPM	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Legalisir Ijazah SD	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 06.01.02.09	Data Perpanjangan Izin Operasional SD		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Perpanjangan Izin Operasional SD	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.10	Data Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Layanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.11	Data Layanan Legalisir Ijazah SMP		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Layanan Layanan Legalisir Ijazah SMP	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.12	Data Pengajuan NISN		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Pengajuan NISN	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
BJN-DAD 06.01.02.13	Data Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan dan Kebudayaan		Tertutup	Tahunan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan dan Kebudayaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.14	Data Operasional Penyelenggara PAUD		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Layanan Operasional Penyelenggara PAUD	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.02.15	Data Penerimaan Peserta Didik Baru		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 06.01.03.01	Data Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB)		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Layanan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.05.01	Data Pengelolaan Dana BOS		Terbatas	Tiga Bulanan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Layanan Pengelolaan Dana BOS	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.01.06.01	Data Standart Pelayanan Minimal	E-SPM	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Standart Pelayanan Minimal	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAD 06.02.01.01	Data Jasa Sewa Alat Olah Kayu		Terbuka	Realtime	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Layanan Jasa Penyewaan Alat Olah Kayu	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAN	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 06.02.02.01	Data Pemohon AK1		Terbatas	Realtime	Pelayanan Antar Kerja	Layanan Penerbitan AK1 / Kartu Kuning	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 06.02.02.02	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	SiapKerja	Terbatas	Realtime	Pelayanan Antar Kerja	Layanan Rekomendasi Paspor ID CPMI	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 06.02.02.03	Data Lowongan Pekerjaan	Siti Worobejo	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Layanan Informasi Lowongan Kerja	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 06.02.03.01	Data SK Pengesahan Peraturan Perusahaan		Terbatas	Realtime	Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 06.02.03.02	Data Bukti Pencatatan PKWT		Terbatas	Realtime	Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 06.03.02.01	Data Hasil Ijin Penelitian/ Magang	Simaniz	Terbuka	Realtime	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Ijin Penelitian/KKL/KKN/Magang	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 06.03.03.01	Data Lomba Bojonegoro Innovative Award	BIA, IGA	Terbatas	Tahunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Bojonegoro Innovative Award, Layanan Innovative Government Award (IGA)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 06.03.03.02	Data Inovasi Lomba Teknologi Tepat Guna		Terbuka	Tahunan	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Fasilitasi Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna, Layanan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 06.04.01.01	Data Organisasi Pemuda		Terbuka	Realtime	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Layanan Permintaan Organisasi Pemuda	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAD 06.04.02.01	Data Diklat Kepramukaan		Terbuka	Realtime	Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAD 06.04.02.02	Data Sarana dan Prasarana Kepramukaan		Terbuka	Realtime	Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Kegiatan Kepramukaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAD 06.05.01.01	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	Terbuka	Realtime	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis, Layanan Pinjam	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Stadion, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR)				
BJN-DAD 06.05.02.01	Data Potensi Olahraga		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Layanan Pembinaan Potensi Olahraga	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA	RAD.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAD 06.05.02.02	Data Atlet		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Layanan Pengiriman Atlet ke Tingkat Provinsi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA	RAD.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAD 07.05.01.01	Data Pengawasan Industri	Sipp Dokling	Terbuka	Enam Bulanan	Pengawasan Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan izin PPLH	Layanan Pengawasan Usaha Industri	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.01.02	Data Persetujuan Teknis dan SLO		Terbuka	Lainnya	Pengawasan Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan izin PPLH	Layanan Persetujuan Teknis dan SLO	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.01.03	Data Permohonan Persetujuan Lingkungan	OSS RBA	Terbuka	Lainnya	Pengawasan Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan izin PPLH	Layanan Permohonan Persetujuan Lingkungan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 07.05.01.04	Data Rendah Karbon	AKSARA	Terbatas	Tahunan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat (RPPLH)	Layanan Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.01.05	Data Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup		Terbatas	Tahunan	Pengawasan Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan izin PPLH	Layanan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Skala Amdal	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.02.01	Data Penyediaan Bibit		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Penyediaan Bibit Pohon	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.02.02	Data Pengelolaan Kompos		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Pembuatan Kompos	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.02.03	Data Kebersihan Lingkungan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sampah	Layanan Kebersihan Lingkungan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.02.04	Data Penanaman	IKLH	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 07.05.02.05	Data Potong Pohon		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Potong Pohon	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.03.01	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	Terbatas	Tahunan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.03.02	Data Aksi Pengendalian Perubahan Iklim	SRN	Terbatas	Tahunan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	"Layanan Pengelolaan Aksi, Sumber Daya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim"	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.03.03	Data Potensi Reduksi Emisi GRK	SPECTRUM	Terbatas	Tahunan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Perhitungan Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.03.04	Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca	SIGN SMART	Terbatas	Tahunan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.04.01	Data Pengelolaan TPS 3R		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sampah	Layanan Pengelolaan TPS 3R	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 07.05.04.02	Data Sampah	SIPSN	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sampah	Layanan Pengelolaan Sampah TPA	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.04.03	Data MOU		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sampah	Layanan Permohonan MOU Pembuangan Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.04.04	Data Penerimaan Retribusi		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sampah	Layanan Penerimaan Retribusi Persampahan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.04.05	Data Bank Sampah		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sampah	Layanan Pembinaan Bank Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.05.01	Data Laporan Limbah Cair		Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Pemeriksaan Limbah Cair	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 07.05.05.02	Data Pengelolaan Limbah	SIKELIM	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Pengelolaan Limbah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 07.05.05.03	Data Surat Persetujuan Lingkungan		Terbuka	Tahunan	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Layanan Rekomendasi Teknis Limbah B3	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 07.05.05.04	Data Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair RS	SIKELIM	Terbatas	Bulanan	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Limbah Medis Rumah Sakit	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 07.05.05.05	Data Pengendalian Pencemaran Air, Udara, Limbah Domestik dan B3	SIPP DOKLING	Terbatas	Bulanan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan Monitoring Kualitas Lingkungan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 07.05.07.01	Data Sekolah Adiwiyata	SIDIA	Terbatas	Tahunan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Layanan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata dan GPBLHS	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAD 08.01.09.01	Data Pemeriksaan Jemaah Haji	SISKOHATKES	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Haji	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 08.02.01.01	Data Pelaku Seni		Terbatas	Enam Bulanan	Pelestarian Kesenian Tradisional	Layanan Pelatihan dan Workshop Pelaku Seni	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 08.02.01.02	Data Sejarah Seni Budaya		Terbuka	Tahunan	Pelestarian Kesenian Tradisional	Layanan Edukasi Sejarah Seni Budaya	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 08.02.01.03	Data Cagar Budaya		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Cagar Budaya	Layanan Edukasi Cagar Budaya	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 08.02.01.04	Data Potensi Seni Budaya		Terbuka	Tahunan	Pelestarian Kesenian Tradisional	Layanan Edukasi Potensi Seni Budaya	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 08.02.01.05	Data Peserta Ruwatan Murwakala		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Kebudayaan	Layanan Fasilitasi Ruwatan Murwakala	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 08.02.03.01	Data Nomor Induk Kesenian	ETNIK	Terbuka	Bulanan	Pelestarian Kesenian Tradisional	Layanan Pendaftaran dan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.03 PERIZINAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAD 08.02.05.01	Data Anggota Perpustakaan	INLISLite	Tertutup	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Keanggotaan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.02	Data Baca di Tempat	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Baca di Tempat	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									INFORMASI	
BJN-DAD 08.02.05.03	Data Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.04	Data Peminjaman Buku	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Sirkulasi Pustaka	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.05	Data Pengembalian Buku	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Sirkulasi Pustaka	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.06	Data Buku Rusak	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Sirkulasi Pustaka	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.07	Data e-Book	e-Maos Bojonegoro	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan e-Book	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 08.02.06.01	Data Lokus dan Jumlah Pengunjung		Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling dan Storytelling	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 09.01.01.01	Data Partai Politik DPRD		Tertutup	Realtime	Peningkatan Peran Partai Politik	Layanan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAD 09.01.01.02	Data Perijinan Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangan	Simaniz	Terbuka	Realtime	Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Masyarakat	"Layanan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas/ Perseorangan"	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAD 09.01.01.03	Data Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	"Layanan Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan"	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 09.01.01.04	Data Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Pemerintahan Dilimpahkan Camat	Layanan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAD 09.01.01.05	Data Reses		Terbatas	Realtime	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Layanan Fasilitasi Reses	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.01.01.06	Data Aspirasi Masyarakat		Terbuka	Realtime	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Layanan Aspirasi Masyarakat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.01.04.01	Data Potensi Wilayah Desa dan Kelurahan	PRODESKEL	Terbuka	Tahunan	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Profil Desa dan Kelurahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 09.01.04.02	Data Realisasi Dana Desa	OMSPAN	Terbuka	Enam Bulanan	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pelaporan Dana Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 09.01.04.03	Data Aset Desa	SIPADES	Terbuka	Lainnya	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Inventarisasi Aset Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 09.01.04.04	Data Perencanaan Pembangunan Desa	DDC, SID	Terbuka	Tiga Bulanan	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Perencanaan Pembangunan Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 09.01.05.01	Data SHS		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Layanan Pengusulan SHS	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan
BJN-DAD 09.01.05.02	Data SBU		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Layanan Pengelolaan Standar Biaya Umum	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN	Bagian Administrasi Pembangunan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									PEMBANGUNAN DAERAH	
BJN-DAD 09.01.05.03	Data Angka Inflasi	TPIN	Terbatas	Tiga Bulanan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAD 09.01.05.04	Data Program Kegiatan TPAKD	SITPAKD	Terbatas	Enam Bulanan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAD 09.01.05.05	Data RKP dan Realisasi DBHCHT	e-DBHCHT	Terbatas	Tiga Bulanan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	"Layanan Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan"	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAD 09.01.06.01	Data Pinjam Ruangan		Terbatas	Realtime	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Layanan Pinjam Ruangan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.01.06.02	Data Pinjam Kendaraan		Terbatas	Realtime	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Layanan Pinjam Kendaraan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAD 09.01.06.03	Data Persuratan Pimpinan		Tertutup	Realtime	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Layanan Persuratan Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAD 09.01.06.04	Data Fasilitas Kegiatan Pimpinan		Terbatas	Realtime	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Layanan Fasilitas Kegiatan Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAD 09.01.07.01	Data Identitas Kependudukan Digital	IKD	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Identitas Kependudukan Digital	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.02	Data Perbaikan Perangkat dan Komunikasi Data		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Monitoring Perbaikan Perangkat dan Komunikasi Data	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.03	Data Kependudukan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.01.07.04	Data Hak Akses Sistem Administrasi Kependudukan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Pengendalian Hak Akses Sistem Administrasi Kependudukan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.05	Data Anomali Administrasi Kependudukan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Penghapusan Data Anomali Administrasi Kependudukan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.06	Data KK	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan KK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.07	Data Pendaftaran Penduduk		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Legalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.08	Data KIA	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan KIA	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.09	Data KTP	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan KTP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.10	Data BID		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Pengarsipan Dokumen BID	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.01.07.11	Data Penduduk di Kecamatan		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.12	Data Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.13	Data Akta Kelahiran	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.14	Data Akta Kematian	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.15	Data Akta Pengangkatan Anak		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.16	Data Akta Pengesahan Anak		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.17	Data Akta Perceraian		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.01.07.18	Data Pencatatan Sipil Legalisasi Dokumen Kependudukan		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil Legalisasi Dokumen Kependudukan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.19	Data Akta Pengakuan Anak		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.20	Data Status Kewarganegaraan		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.02.01.01	Data Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Perencanaan Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah Berbasis Elektronik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.02.01.02	Data Kebijakan Umum APBD	SIPD-RI	Terbuka	Realtime	Perencanaan Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.02.01.03	Data Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	SIPD-RI	Terbuka	Realtime	Perencanaan Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.02.03.01	Data Objek Pajak PBB-P2	SISMIOP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Manajemen Informasi Objek Pajak PBB-P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.02	Data Pemungutan BPHTB	e-BPHTB	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.03	Data Tagihan PBB-P2	e-PBB	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan PBB - P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.04	Data Pembayaran PBB-P2	e-PBB	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan PBB - P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.05	Data Pelayanan PBB-P2	SIMPEL BAPENDA	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan PBB - P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.06	Data NPOP BPHTB	e-Arsip	Tertutup	Harian	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Dokumentasi Administrasi Kebijakan Pajak Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.02.03.07	Data Pembayaran Jenis Pajak Daerah Lainnya (PDL)	SIMPATDU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Daerah Lainnya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.08	Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu	DIJAMIN MINUL	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.09	Data Kubikasi Meteran Air	Smart Water System	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Air Tanah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.10	Data Pembayaran Pajak Daerah Lainnya	Cek Pembayaran, e-Payment	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Daerah Lainnya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.11	Data Realisasi Pajak Daerah Lainnya	SMART REPORT	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pelaporan Pembayaran Pajak Daerah Lainnya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.03.12	Data Tiket		Terbuka	Lainnya	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Perforasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.02.03.13	Data Rekonsiliasi Retribusi Daerah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Rekonsiliasi Retribusi Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.02.06.01	Data Barang Milik Daerah	e-BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.02.06.02	Data Penghapusan BMD		Terbatas	Harian	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Penghapusan BMD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.02.08.01	Data Pertanggungjawaban Keuangan	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Akuntansi dan Investasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.02.08.02	Data SP2D	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Layanan Perbendaharaan Penatausahaan Pelaksanaan APBD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.02.08.03	Data Keuangan	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.02.08.04	Data Capaian Kinerja Keuangan dan Pelayanan RSUD Sumberrejo	MISTERBIAN	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Manajemen Data Keuangan dan Non Keuangan RSUD Sumberrejo	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAD 09.02.11.01	Data Tender	SPSE	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengajuan dan Pelaksanaan Tender	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAD 09.02.11.02	Data Non Tender	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengajuan dan Pelaksanaan Tender	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAD 09.02.11.03	Data Non Tender Swakelola	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengajuan dan Pelaksanaan Tender	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAD 09.02.11.04	Data Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAD 09.02.11.05	Data Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE, e-Katalog, SIRUP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAD 09.02.11.06	Data Kinerja Penyedia	SIKAP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.03.01.01	Data Sumber Daya Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian	Jagasiber	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.01.02	Data Insiden Keamanan Informasi	Jagasiber	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Penanganan Insiden Keamanan Informasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.01.03	Data Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah		Tertutup	Tahunan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.01.04	Data Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah	Monitoring Jaringan	Tertutup	Harian	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Layanan Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.01.05	Data Infrastruktur Pusat Data	Monitoring Pusat Data	Tertutup	Harian	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Pusat Data	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.01.06	Data Manajemen Resiko SPBE		Terbatas	Tahunan	Peningkatan Implementasi Tata Kelola SPBE	Layanan Pengendalian Resiko SPBE	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									INFORMATIKA	
BJN-DAD 09.03.02.01	Data Aplikasi Pemerintah	Manajemen Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Realtime	Pengembangan Aplikasi dan Probis Pemerintahan Elektronik	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.02.02	Data Ekosistem e-Government	SIA SPBE V-2	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Implementasi Tata Kelola SPBE	Layanan Tatakelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.02.03	Data Sertifikat Elektronik	Manajemen Sertifikat Elektronik	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.02.04	Data Domain dan VM server		Tertutup	Realtime	Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain	Layanan Permintaan Domain dan VM	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.03.01	Data Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	Situs Web Pemkab	Terbuka	Harian	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pengelolaan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.03.02	Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik	SP4N LAPOR, Sapa Bupati	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	"Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.03.03.03	Data Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	PPID	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pelaksanaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.03.04	Data Aduan Kendala TIK	Helpdesk TIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Helpdesk TIK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.03.05	Data Pengajuan Teleconference		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Video Conference	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.04.01	Data Statistik dan Geospasial	GEOPORTAL	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Open Data Geospasial	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.03.04.02	Data Rekomendasi Kegiatan Statistik	ROMANTIK	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral, Layanan Rekomendasi Statistik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.04.03	Data Statistik Sektoral	INDAH, Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Lainnya	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Pembangunan Metadata Statistik Sektoral, Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.03.05.01	Data Peta Objek Pajak PBB-P2	SMART MAP, GISel	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan PBB - P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.03.05.02	Data Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	eMAP	Tertutup	Harian	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.03.05.03	Data Map	GEOPORTAL	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Open Data Geospasial	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.04.02.01	Data Keterbukaan Informasi Publik	SIMPONI	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Keterbukaan Informasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 09.05.01.01	Data Monev Jalan Poros Antar Desa	GEOPORTAL	Terbuka	Realtime	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Layanan Monitoring dan Evaluasi Jalan Poros Antar Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.02	Data Sumber Mata Air	GEOPORTAL	Terbuka	Realtime	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Layanan Sumber Mata Air	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.03	Data Perencanaan RPJMD	SIPD-RI	Tertutup	Lima Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RPJMD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.05.01.04	Data Perencanaan RPJPD	SIPD-RI	Tertutup	Lainnya	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RPJPD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.05	Data Renja	SIPD-RI	Tertutup	Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RKPD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.06	Data Pokok-Pokok Pikiran Dewan	SIPD-RI	Tertutup	Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RKPD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.07	Data Musrengbang	SIPD-RI	Tertutup	Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RKPD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.08	Data Pelaksanaan Program CSR		Terbatas	Tahunan	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Layanan Program CSR Perusahaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.09	Data Fasilitas KKN		Terbatas	Tahunan	Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	Layanan Fasilitas KKN/PKL	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.10	Data NTP		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Layanan Koordinasi Perencanaan Bidang SDA dan Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.05.01.11	Data Rencana Induk Geopark		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Layanan Koordinasi Perencanaan Bidang SDA dan Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.12	Data Masterplan Bidang Keciptakarya		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.13	Data Monitoring Penduduk Miskin	DAMISDA	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Layanan Monitoring Data Penduduk Miskin	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.14	Data Monitoring Stunting	ASTRO	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Layanan Monitoring Data Stunting	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.03.01	Data Evaluasi Kinerja Anggaran	E-MONEV	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Layanan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.03.02	Data Laporan Pertanggungjawaban	E-LKPJ	Terbatas	Tahunan	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Layanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.05.03.03	Data Pelaporan Keuangan Daerah	IPKD	Tertutup	Tahunan	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Layanan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.06.01.01	Data SK Tugas Belajar PNS		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN	Layanan Tugas Belajar bagi PNS	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.01.02	Data SK Kenaikan Pangkat	SIASN	Terbatas	Realtime	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Kenaikan Pangkat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.01.03	Data SK PMK PNS	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Penambahan Masa Kerja (PMK)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.01.04	Data SK Mutasi	SIASN	Terbatas	Realtime	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Mutasi Antar Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.01.05	Data SK Mutasi/ Promosi	I Mut	Terbatas	Realtime	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Mutasi Promosi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.01.06	Data Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	SIOLA Kemendagri	Terbatas	Realtime	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.01.07	Data Usulan Kepala Daerah dan WKDH, dan Usulan DPRD	SIPENDEKAR	Terbatas	Realtime	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAD 09.06.01.08	Data Laporan Monev Kecamatan	SINCAN	Terbatas	Tahunan	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAD 09.06.01.09	Data Laporan LPPD	SILPPD	Terbatas	Tahunan	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAD 09.06.01.10	Data Laporan SPM	SPM BANGDA	Terbatas	Tiga Bulanan	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAD 09.06.01.11	Data Batas Kelurahan dan Kecamatan		Terbatas	Realtime	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAD 09.06.01.12	Data Nama Rupabumi	SINAR BIG	Terbatas	Realtime	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAD 09.06.01.13	Data Fasilitas Kerjasama Daerah		Terbatas	Realtime	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Fasilitas Kerjasama Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.01.14	Data Keprotokolan		Terbatas	Harian	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Protokol	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAD 09.06.01.15	Data Dokumentasi Pimpinan		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Dokumentasi Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAD 09.06.01.16	Data Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAD 09.06.02.01	Data SOTK	SIASN	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Perencanaan SOTK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.02.02	Data Kelembagaan	SIMONA, e-Formasi Menpan, SIASN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAD 09.06.02.03	Data Anjab	SIMONA, e-Formasi Menpan, SIASN	Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAD 09.06.02.04	Data Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Fasilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.02.05	Data Akuntabilitas Kinerja	SAKIP Bojonegoro	Terbatas	Tiga Bulanan	Penataan Organisasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAD 09.06.03.01	Data Pensiun	SIMANTAP, SIASN	Terbatas	Bulanan	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Pensiun PNS	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.02	Data WP LHKPN	e-LHKPN	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.03	Data Cuti PNS	SIMANTAP, SIASN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Cuti	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.04	Data SK Satya Lancana Karya Satya	SIOLA	Terbatas	Tahunan	Pemberian Reward dan Punishment ASN	Layanan Satya Lancana Karya Satya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.05	Data Administrasi Kepegawaian	SIMANTAP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Administrasi Kepegawaian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.03.06	Data Nama dan NIP	SIASN	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Perbaikan Nama/ NIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.07	Data Calon ASN	SSCASN	Terbatas	Tahunan	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Pendaftaran ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.08	Data Usulan Tenaga Kesehatan	e-Formasi	Terbatas	Tahunan	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Usulan Kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.09	Data Peserta Diklat Penjenjangan PNS/PPPK		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN	Layanan Diklat Penjenjangan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.10	Data Peserta Diklat Teknis PNS		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi Teknis	Layanan Diklat Teknis	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.11	Data Peserta Diklat Fungsional PNS		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Layanan Diklat Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.03.12	Data Pertimbangan Teknis BKN	SIASN	Terbatas	Realtime	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Pencantuman Gelar	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.13	Data SKP	e Kinerja	Terbatas	Realtime	Peningkatan Kinerja ASN	Layanan Penilaian Kinerja	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.14	Data Daftar Hadir ASN	SIKEPO	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Disiplin ASN	Layanan Presensi Online	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.15	Data Usulan Kebutuhan ASN		Terbatas	Tahunan	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Usulan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.04.01	Data Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut	SIHAPSARI	Terbatas	Realtime	Pengawasan Internal	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.04.02	Data SAKIP OPD	Perisai	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kinerja ASN	Layanan Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.03	Data Kerugian Daerah	SIKAD	Terbatas	Bulanan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Layanan Pemantauan Kerugian Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.04	Data Tindak Lanjut BPK	SIPTL	Terbatas	Bulanan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Layanan Pemantauan Administrasi LHP BPK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.05	Data Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	Si-Esi	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengawasan Pemerintahan	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN,	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
BJN-DAD 09.06.04.06	Data Dukung Pembangunan Zona Integritas	Si-Ezi	Terbatas	Realtime	Pengawasan Internal	Layanan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.07	Data Manajemen Risiko Terintegrasi	Si-Pinter	Terbatas	Enam Bulanan	Pengawasan Internal	Layanan Pengendalian Risiko Terintegrasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.08	Data Area Intervensi Pencegahan Korupsi Daerah	Jaga	Terbatas	Realtime	Pendampingan dan Asistensi	Layanan Pencegahan Korupsi Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.04.09	Data Progres Pembangunan	e-Prog	Terbatas	Realtime	Pengawasan Internal	Layanan Pemantauan Progres Pembangunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.10	Data Perkembangan Reformasi Birokrasi Nasional	Portal RB	Terbatas	Tiga Bulanan	Pendampingan dan Asistensi	Layanan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.11	Data Reviu RKA	e-Reviu Kemendagri	Terbatas	Tahunan	Pengawasan Internal	Layanan Reviu RKA Elektronik Kemendagri	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.12	Data Audit Aplikasi	Audit Tools	Terbatas	Dua Tahunan	Peningkatan Implementasi Tata Kelola SPBE	Layanan Audit SPBE	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN,	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
BJN-DAD 09.06.04.13	Data Kegiatan DPRD		Terbuka	Realtime	Fasilitasi Tugas DPRD	Layanan Informasi Kegiatan DPRD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.06.04.14	Data Rapat Badan Anggaran		Terbatas	Realtime	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Layanan Fasilitasi Rapat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.06.05.01	Data Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Terbatas	Tahunan	Kualitas Pelayanan Publik	Layanan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
BJN-DAD 09.06.05.02	Data SKM	SUKMA	Terbuka	Tahunan	Kualitas Pelayanan Publik	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.05.03	Data Rapat Panitia Khusus		Terbatas	Realtime	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Layanan Fasilitas Rapat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.06.05.04	Data Rapat Paripurna DPRD		Terbatas	Realtime	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Layanan Fasilitas Rapat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.06.05.05	Data Legilasi Daerah		Terbatas	Realtime	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Layanan Legilasi Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.06.05.06	Data Rapat Kerja Komisi		Terbatas	Realtime	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Layanan Fasilitas Rapat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sekretaris DPRD
BJN-DAD 09.06.06.01	Data Arsip Surat Masuk dan Keluar	AFIFAH	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Administrasi Persuratan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.06.06.02	Data Surat Menyurat dan Kearsipan	SISAPU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Dokumentasi Surat Menyurat dan Kearsipan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 09.06.06.03	Data Arsip Dinamis	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Arsip Dinamis	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.06.04	Data Pembinaan Kearsipan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Pembinaan Kearsipan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 09.06.06.05	Data Restorasi Arsip		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Restorasi Arsip	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 09.06.06.06	Data Peminjaman Arsip		Terbatas	Tahunan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Peminjaman Arsip	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 09.07.05.01	Data Manajemen Rapat	SMART BIMA	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Kerumahtanggaan	Layanan Manajemen Rapat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.07.11.01	Data Paskibraka	BPIP	Terbuka	Realtime	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Paskibraka	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATA N NEGARA	RAD.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi

Merujuk pada hasil pemetaan data dan informasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Grafik 3.2.2.2.1. Grafik Jumlah Daftar Data dan Informasi Berdasarkan Sifat dan Interval Update

Berdasarkan grafik 3.2.2.2.1. menunjukkan bahwa terdapat 693 data pokok *eksisting* yang berada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan 461 data (66.5%) merupakan data yang bersifat terbatas, 144 Data (20.8%) merupakan data yang bersifat terbuka, 88 Data (12.7%) merupakan data yang bersifat tertutup. Merujuk grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki sifat terbatas atau dapat diartikan bahwa pemilik data hanya dapat membagikan data tersebut dengan akses data yang terbatas.

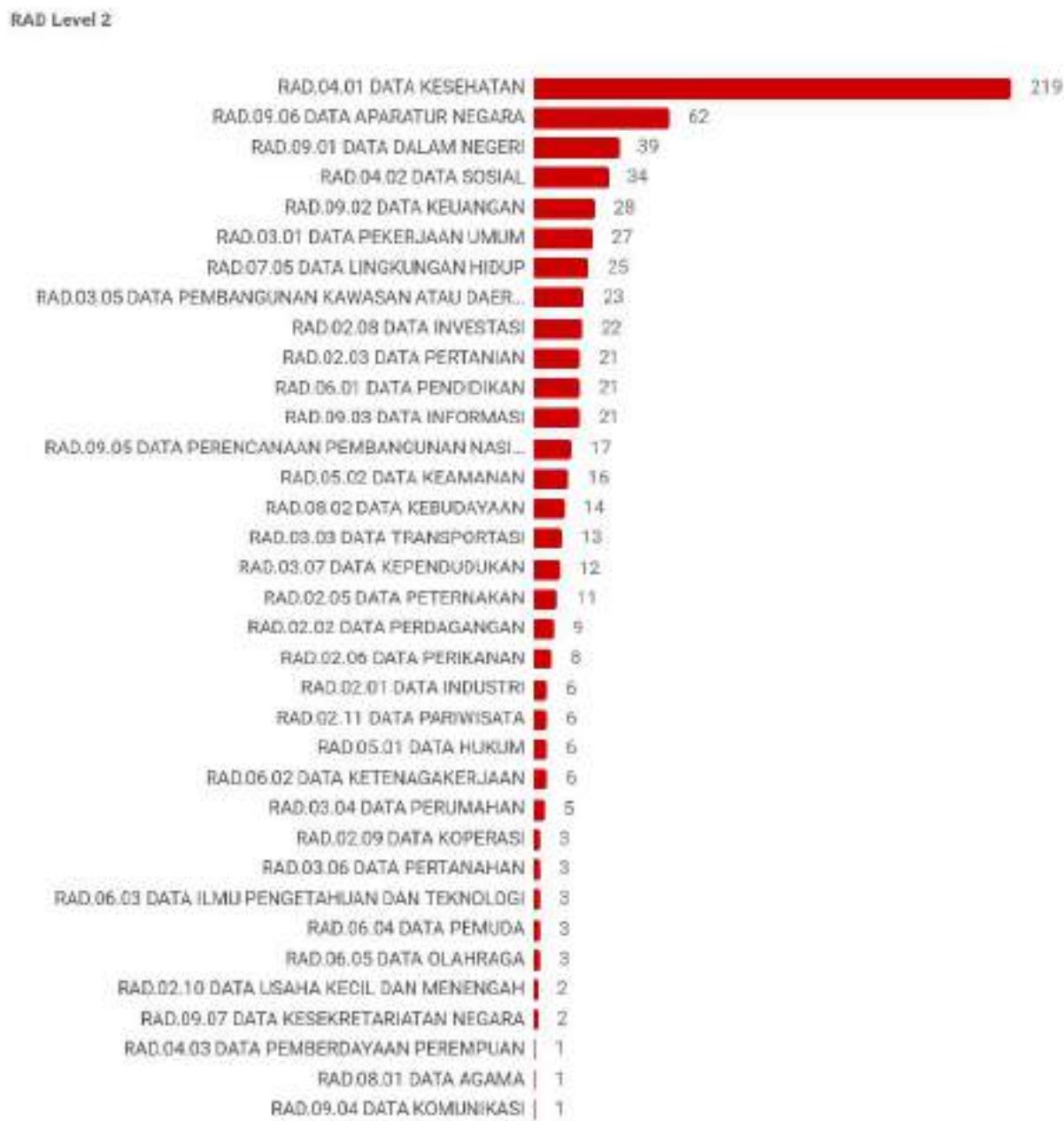
Adapun dari 693 data pokok mayoritas, sebanyak 333 data merupakan data dengan interval *update Realtime*, 137 data merupakan data dengan interval *update Tahunan*, dan 135 data merupakan data dengan interval *update Bulanan*, serta Interval *update* data terendah dengan interval *update 2 Tahunan sejumlah 1 data*. Secara umum, mayoritas data di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus di *update* secara *realtime* sehingga diperlukan digitalisasi proses bisnis untuk memudahkan pemrosesan pengolahan data.



Grafik 3.2.2.2.2. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.2. mayoritas data didominasi oleh RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan sejumlah 254 Data, RAD.09 Informasi Pemerintah Umum sejumlah 170 Data dan RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri sejumlah 88 Data. Sedangkan RAD yang paling sedikit

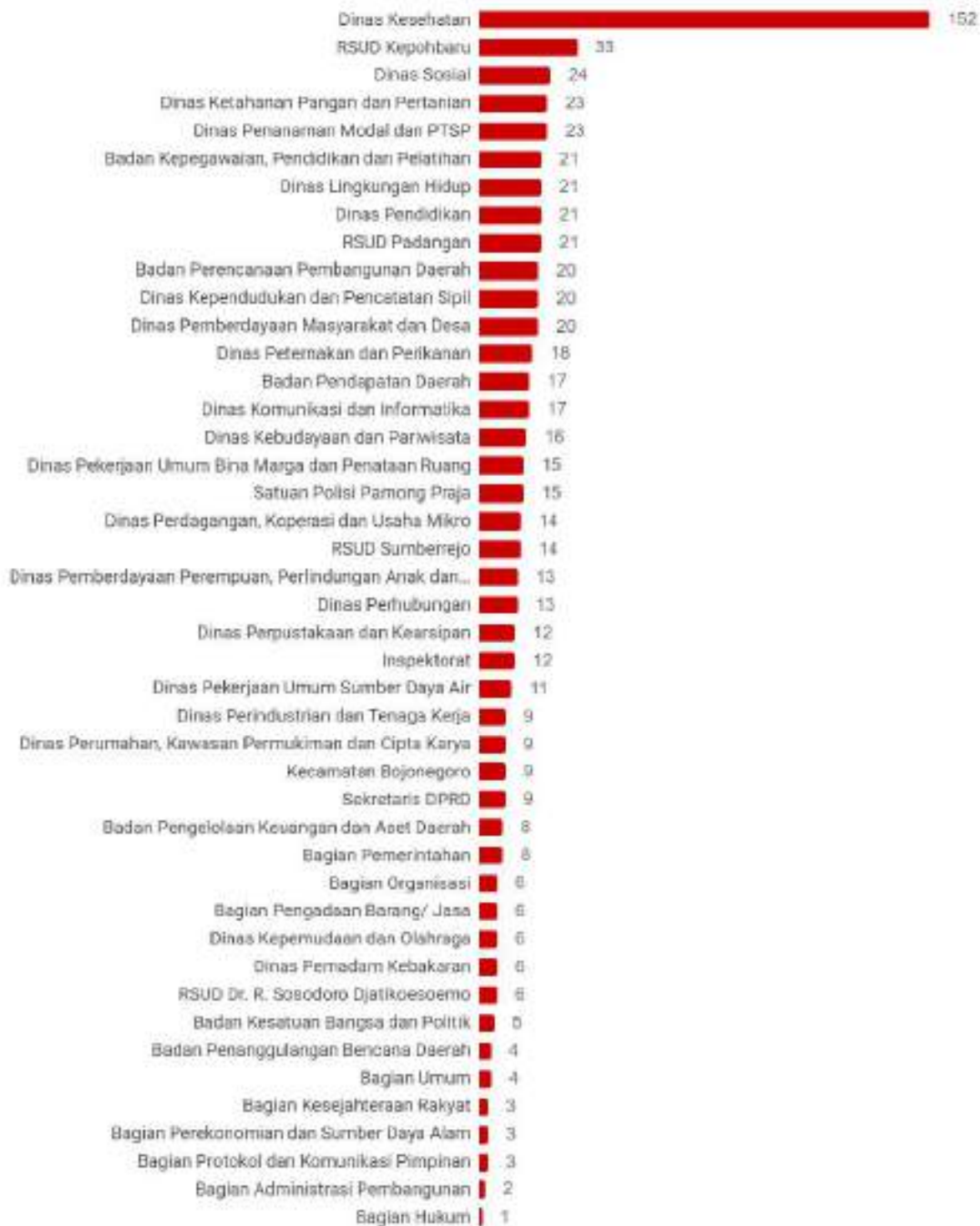
yaitu pada RAD.08 Informasi Budaya dan Agama dengan jumlah 15 Data. Kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata arsitektur data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Grafik 3.2.2.2.3. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.3. menunjukkan bahwa RAD level 2 didominasi oleh, RAD.04.01 Data Kesehatan sejumlah 219 data, RAD.09.06 Data Aparatur Negara sejumlah 62 data. Sedangkan paling sedikit, yaitu RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan, RAD.08.01 Data Agama dan RAD 09.04 Data Komunikasi sejumlah 1 data. Merujuk pada referensi arsitektur data Nasional yang berjumlah 49 referensi, referensi arsitektur data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 35 Referensi Arsitektur Data Nasional, sementara 14 referensi lainnya bukan merupakan referensi/urusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Produsen Data/Penanggung Jawab Data



Grafik 3.2.2.2.4. Grafik Jumlah Daftar Data di Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.4. menunjukkan bahwa mayoritas data terbanyak dimiliki oleh Dinas Kesehatan dengan jumlah 152 data. Data paling sedikit yaitu pada Bagian Hukum yang memiliki jumlah 1 data. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan inventarisasi data di masing-masing perangkat daerah untuk memvalidasi apakah data yang dimiliki telah sesuai.

3.2.3. **Arsitektur Layanan SPBE**

Layanan SPBE dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan. Secara umum, arsitektur layanan menggambarkan kondisi mengenai layanan yang dihadirkan pada masing-masing perangkat daerah sesuai proses bisnis utamanya.

3.2.3.1. **Katalog Layanan**

Katalog ini berisi layanan merupakan proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (*customer*), baik itu internal (perangkat daerah, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Berdasarkan hasil survei telah terinventarisir sejumlah 396 layanan dimana 233 layanan (58,84%) telah terdigitalisasi. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan (RAL) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur layanan SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog layanan yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Layanan.**

Tabel 3.2.3.1.1. Cuplikan Katalog Layanan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.05.01.01	Layanan Fasilitasi Legalitas Merk	Bisnis	Data Pemohon Legalitas Merk	DJKI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.05.01.02	Layanan Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan Siap Beroperasi	Bisnis	Data Pemenuhan Persyaratan Izin Terverifikasi	SIINas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BJN-DAL 01.05.01.03	Layanan Pengawasan dan Pengendalian Teknis dan Surat Keputusan Siap Beroperasi	Bisnis	Data Pemenuhan Persyaratan Izin Terverifikasi	SIINas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.06.01.01	Layanan Pengelolaan PAD Pasar Daerah	Bisnis	Data Sewa Lapak	SIMPD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.06.01.01	Layanan Manajemen Data Harga Bahan Pokok	Bisnis	Data Harga Bahan Pokok	Siska Perbapo, SP2KP, Disdag Online	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.06.01.01	Layanan Fasilitasi Merk Dagang	Bisnis	Data Pengajuan Merk Dagang		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.06.01.02	Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Skala Tertentu	Bisnis	Data Ijin Skala Tertentu		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.06.01.03	Layanan Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan	Bisnis	Data Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.06.03.01	Layanan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Bisnis	Data Tera Ulang Alat Ukur, Data Tera Ulang Alat Takar, Data Tera Ulang Alat Timbang, Data Tera Ulang Alat Perlengkapan	SIMPEL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

BJN-DAL 01.07.03.01	Layanan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Masyarakat	Data Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.08.01	Layanan Kelompok Tani	Masyarakat	Data Kelompok Tani	SIMPONI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.08.02	Layanan Penyuluhan Pertanian	Masyarakat	Data Penyuluhan Pertanian	EPUSLUH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.08.03	Layanan Pengelolaan Kelembagaan Kelompok tani	Masyarakat	Data Pengelolaan Kelembagaan Kelompok tani		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.09.01	Layanan Perpanjangan Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Hortikultura	Masyarakat	Data Perpanjangan Rekomendasi Ijin Usaha Budidaya Hortikultura		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.15.01	Layanan Pemanfaatan Pekarangan	Masyarakat	Data Pemanfaatan Pekarangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BJN-DAL 01.07.16.01	Layanan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Masyarakat	Data Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.16.01	Layanan Alat dan Mesin Pertanian	Masyarakat	Data Alat dan Mesin Pertanian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.16.02	Layanan Pengajuan Bantuan Hibah	Masyarakat	Data Pengajuan Bantuan Hibah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.16.03	Layanan Pinjam Pakai Alat Mesin Pertanian	Masyarakat	Data Pinjam Pakai Alat Mesin Pertanian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.19.01	Layanan Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Masyarakat	Data Pengembangan Lumbung Pangan Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.19 KETERSEDIAAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.19.02	Layanan Pengolahan Pangan	Masyarakat	Data Pengolahan Pangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.19 KETERSEDIAAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.20.01	Layanan Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Masyarakat	Data Penyusunan Neraca Bahan Makanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.20.01	Layanan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Masyarakat	Data Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BJN-DAL 01.07.20.01	Layanan Workshop Pengenekaragaman Pangan	Masyarakat	Data Workshop Pengenekaragaman Pangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.20.02	Layanan Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA	Masyarakat	Data Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.21.01	Layanan Pengumpulan, Pengolahan Data, dan Informasi Pangan	Masyarakat	"Data Pengumpulan, Pengolahan Data, dan Informasi Pangan"		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.21.01	Layanan Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Masyarakat	Data Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.22.01	Layanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Masyarakat	Data Pangan Segar Asal Tumbuhan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.22.01	Layanan Penerbitan Registrasi Asal Tumbuhan Produksi Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Masyarakat	Data Penerbitan Registrasi Asal Tumbuhan Produksi Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.07.22.01	Layanan Keamanan Pangan	Masyarakat	Data Keamanan Pangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.09.01.01	Layanan Pengelolaan Bantuan Benih Tumbuh Tanaman Sayur dan Buah	Masyarakat	Data Pengelolaan Bantuan Benih Tumbuh Tanaman Sayur dan Buah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BJN-DAL 01.09.02.01	Layanan Informasi Data Ternak	Masyarakat	Data Ternak		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.02.02	Layanan Terpadu Hewan	Masyarakat	Data Terpadu Hewan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.04.01	Layanan Kesehatan Hewan	Masyarakat	Data Kesehatan Hewan	ISIKHNAS,IDENTIK PKH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.04.02	Layanan Inseminasi Buatan	Masyarakat	Data Inseminasi Buatan	ISIKHNAS,IDENTIK PKH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.04.03	Layanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH/PH) Sertifikat Veteriner	Masyarakat	Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.04.04	Layanan Kelahiran Hewan Ternak	Masyarakat	Data Kelahiran Hewan Ternak	ISIKHNAS,IDENTIK PKH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.04.05	Layanan Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Ternak	Masyarakat	Data Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Ternak	ISIKHNAS,IDENTIK PKH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.04.06	Layanan Vaksinasi Hewan	Masyarakat	Data Vaksinasi Hewan	ISIKHNAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Peternakan dan Perikanan

BJN-DAL 01.09.07.01	Layanan Pemotongan Hewan	Masyarakat	Data Pemotongan Hewan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.09.09.01	Layanan Persyaratan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Ternak Unggas	Masyarakat	Data Rekomendasi Ijin Usaha Ternak Unggas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.01.01	Layanan Penangkapan Ikan	Masyarakat	Data Penangkapan Ikan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.02.01	Layanan Budidaya Perikanan	Masyarakat	Data Budidaya Perikanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.02.01	Layanan Pengolahan dan Pemasar Ikan	Masyarakat	Data Pengolahan dan Pemasar Ikan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.03.01	Layanan Penyediaan Benih Ikan	Masyarakat	Data Penyediaan Benih Ikan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.04.01	Layanan Izin Pengusaha Perikanan	Masyarakat	Data Izin Pengusaha Perikanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan

BJN-DAL 01.10.04.02	Layanan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Masyarakat	Data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.04.03	Layanan Data Pokok Perikanan	Masyarakat	Data Pokok Perikanan	Portal Data KKP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.10.04.04	Layanan Rekomendasi BBM	Masyarakat	Data Rekomendasi BBM	BPH Migas Xstar	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAL 01.12.01.01	Layanan Sarana Informasi Investasi	Bisnis	Data Sarana Informasi Investasi	SAMIN,Point Jatim,BKPM PIR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.01.02	Layanan Kegiatan Penanaman Modal	Bisnis	Data Kegiatan Penanaman Modal	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.01	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Rendah	Bisnis	Data Perizinan Berusaha Risiko Rendah	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.02	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah	Bisnis	Data Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BJN-DAL 01.12.06.03	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi	Bisnis	Data Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.04	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi	Bisnis	Data Perizinan Berusaha Risiko Tinggi	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.05	Layanan Perizinan Berusaha UMKU	Bisnis	Data Perizinan Berusaha UMKU	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.06	Layanan Perizinan Tenaga Kesehatan	Bisnis	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	MPP Digital	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.07	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana	Bisnis	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.08	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana	Bisnis	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.09	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diluar Fungsi Hunian	Bisnis	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diluar Fungsi Hunian	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BJN-DAL 01.12.06.10	Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Bisnis	Data Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.11	Layanan Izin Usaha Angkutan (KPS)	Bisnis	Data Izin Usaha Angkutan (KPS)	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.12	Layanan Izin Usaha Angkutan (Trayek)	Bisnis	Data Izin Usaha Angkutan (Trayek)	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.13	Layanan Izin Pemakaian Tanah Stren	Bisnis	Data Izin Pemakaian Tanah Stren	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.14	Layanan Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan	Bisnis	"Data Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan"	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.15	Layanan Izin Reklame	Bisnis	Data Izin Reklame	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.16	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	Bisnis	Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BJN-DAL 01.12.06.17	Layanan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	Bisnis	Data Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.18	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator)	Bisnis	Data Izin Paramedik Veteriner PeData Inseminator	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.19	Layanan Izin Reklame Insidentil	Bisnis	Data Izin Reklame Insidentil	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.20	Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal	Bisnis	Data dan Informasi Penanaman Modal	OSS RBA,Satu Data BKPM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.21	Layanan MPP	Bisnis	Data Pelayanan MPP	Mal Pelayanan Publik,Pengambilan Antrian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.13.02.01	Layanan Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Bisnis	Data Perubahan Anggaran Dasar Koperasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.13.03.01	Layanan Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Bisnis	Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	ODS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

BJN-DAL 01.13.04.01	Layanan Penilaian Kesehatan Koperasi	Bisnis	Data Penilaian Koperasi Sehat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.14.01.01	Layanan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran	Bisnis	Data Transaksi Penjualan Produk UMKM		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.14.01.01	Layanan Kartu Pedagang Produktif (KPP)	Bisnis	Data Kartu Pedagang Produktif (KPP)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 USAHA MIKRO	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.15.01.01	Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Sektor Pariwisata	Bisnis	Data Tanda Daftar Usaha Pariwisata		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.01.02	Layanan Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	Bisnis	Data Sertifikat Pelaku Usaha Pariwisata		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.01.03	Layanan Pelatihan Pemandu Wisata	Bisnis	Data Pemandu Wisata		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.01.04	Layanan Kunjungan PIG (Pusat Informasi Geologi) dan Tempat Wisata	Bisnis	Data Kunjungan Wisata	e-Ticketing	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.02.01	Layanan Destinasi Wisata	Bisnis	Data Destinasi Wisata	WISATA BOJONEGORO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BJN-DAL 01.15.03.01	Layanan Pendataan Hak Cipta	Bisnis	Data Sertifikat HKI	e-Hakcipta	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.03.02	Layanan Bimbingan Sertifikasi BNSP Pelaku Ekonomi Kreatif	Bisnis	Data Sertifikat BNSP Pelaku Ekonomi Kreatif		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.03.03	Layanan Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif	Bisnis	Data Pelaku Ekonomi Kreatif		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.03.04	Layanan Promosi Produk Ekonomi Kreatif	Bisnis	Data Produk Ekonomi Kreatif		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.15.03.05	Layanan Pemilihan Duta Wisata	Bisnis	Data Duta Wisata Kange Yune		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.03 INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.17.01.01	Layanan Informasi Kondisi Jalan Kabupaten	Masyarakat	Data Jalan Kabupaten	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.01.02	Layanan Informasi Kondisi Jembatan Kabupaten	Masyarakat	Data Jembatan Kabupaten	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.01.03	Layanan Pengelolaan Jalan Kabupaten	Masyarakat	Data Pengelolaan Jalan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

BJN-DAL 01.17.01.04	Layanan Pengelolaan Jembatan Kabupaten	Masyarakat	Data Pengelolaan Jembatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.01.05	Layanan Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan	Masyarakat	Data Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.01.06	Layanan Fasilitas Pembangunan SPAM	Masyarakat	Data Pembangunan SPAM	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.17.03.01	Layanan Jasa Konstruksi	Masyarakat	Data Jasa Konstruksi	SIJAKOB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.03.02	Layanan Uji Laboratorium	Masyarakat	Data Uji Laboratorium		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.03.03	Layanan Pemakaian Alat Berat	Masyarakat	Data Pemakaian Alat Berat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.03.04	Layanan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Masyarakat	Data Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

BJN-DAL 01.17.03.05	Layanan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi	Masyarakat	Data Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.05.01	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Check Dam	Masyarakat	Data Kapasitas Tampungan Air		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.02	Layanan Pembangunan Tanggul Sungai	Masyarakat	Data Bangunan Infrastruktur Pengendali Banjir		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.03	Layanan Smart Monitoring dan Survey Sumber Daya Air di Bojonegoro	Masyarakat	Data Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi	SIPUSDA, e-PAKSI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.04	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Masyarakat	Data Panjang Jaringan Irigasi Permukaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.05	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi/Normalisasi Embung	Masyarakat	Data Embung	SIPUSDA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

BJN-DAL 01.17.05.06	Layanan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Masyarakat	Data Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.07	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Masyarakat	Data Stasiun Pompa Banjir		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.08	Layanan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Masyarakat	Data Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.09	Layanan Pembangunan/Rehabilitasi Tebing Sungai	Masyarakat	Data Pembangunan/Rehabilitasi Tebing Sungai		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.10	Layanan Curah Hujan	Masyarakat	Data Curah Hujan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAL 01.17.05.11	Layanan Usulan Pemberdayaan Hippy/Ghippa	Masyarakat	Data Usulan Pemberdayaan Hippy/Ghippa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

BJN-DAL 01.19.02.01	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Masyarakat	Data Uji Kendaraan Bermotor, Data Antrian Uji Kendaraan Bermotor	SIMPKB, SUKIRNO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.01	Layanan Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan	Masyarakat	Data Izin Usaha dan Izin Trayek	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.02	Layanan Persetujuan Hasil ANDALALIN	Masyarakat	Data Dokumen Persetujuan ANDALALIN		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.03	Layanan Pelayanan Pengajuan Rekomendasi Pembangunan Pos PJL	Masyarakat	Data Permohonan Pembangunan Pos PJL		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.04	Layanan Pengamanan Perjalanan Kereta Api Di Perlindungan Sebidang KA	Masyarakat	Data Tata Cara Pengamanan Perjalanan KA		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.05	Layanan Pengawasan Pos PJL Perlindungan Sebidang KA	Masyarakat	Data Teknis Pengawasan & Pemeliharaan Pos PJL		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.06	Layanan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dan Perlindungan Sebidang KA	Masyarakat	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dan Perlindungan Sebidang KA		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan

BJN-DAL 01.19.03.01	Layanan Izin Parkir Insidentil Tepi Jalan Umum	Masyarakat	Data Pengajuan Izin Parkir Insidentil		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.03.02	Layanan Parkir Berlangganan	Masyarakat	Data Parkir	Bojonegoro TIC	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.03.03	Layanan Pelayanan Parkir	Masyarakat	Data Parkir	Bojonegoro TIC	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.03.04	Layanan Izin Penggunaan Jalan	Masyarakat	Data Rekomendasi Izin Penggunaan Jalan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.03.05	Layanan CCTV	Masyarakat	Data CCTV	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.04.01	Layanan Angkutan Pelajar Gratis	Masyarakat	Data Angkutan Pelajar Gratis	APEL GRATIS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.20.01.01	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Masyarakat	Data Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

BJN-DAL 01.20.01.02	Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	Masyarakat	Data Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.02.01	Layanan Pengaduan Kerusakan PJU	Masyarakat	Data Penanganan Kerusakan PJU	SmartPJU, Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.02.01	Layanan Rekomendasi Siteplan	Masyarakat	Data Rekomendasi Siteplan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.03.01	Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Masyarakat	Data Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.03.02	Layanan Pemeliharaan Saluran Air	Masyarakat	Data Pemeliharaan Saluran Air	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.03.03	Layanan Fasilitas Pembuangan MCK	Masyarakat	Data Pembuangan MCK	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.04.01	Layanan Fasilitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	Data Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.04 PENYELENGGARA AN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.21.01.01	Layanan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa	Masyarakat	Data Inovasi Lomba Teknologi Tepat Guna		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

							BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAL 01.21.01.01	Layanan Pembinaan Peningkatan Indeks Desa Membangun	Masyarakat	Data Indeks Ketahanan Lingkungan,Data Indeks Ketahanan Ekonomi,Data Indeks Ketahanan Sosial	IDM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.01.02	Layanan Pembinaan Pembangunan Desa Berkelanjutan	Masyarakat	Data Indikator Pembangunan Desa Berkelanjutan	SDGS Desa	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.01.03	Layanan Usulan Santunan Duka	Masyarakat	Data Santunan Duka Terverifikasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG	Kecamatan Bojonegoro

							DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAL 01.21.01.04	Layanan Keterangan Ahli Waris	Masyarakat	Data Ahli Waris Tersertifikasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAL 01.21.01.05	Layanan Surat Dispensasi Nikah	Masyarakat	Data Dispensasi Nikah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAL 01.21.01.06	Layanan Fasilitas Pencairan BHP/Retribusi	Masyarakat	Data BHP/Retribusi Terlaksana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA	Kecamatan Bojonegoro

							MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAL 01.21.02.01	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa Balai/Kantor Desa	Masyarakat	Data Berkas Administrasi Penyaluran Badan Kredit Desa Balai/Kantor Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.02.01	Layanan Fasilitas Pencairan Ajuan ADD	Masyarakat	Data Pencairan Anggaran Dana Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAL 01.21.02.02	Layanan Fasilitas Pencairan Ajuan DD Bangunan	Masyarakat	Data Ajuan Dana Desa Bangunan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAL 01.21.02.03	Layanan Fasilitas Pengajuan Proposal Desa	Masyarakat	Data Pencairan Proposal Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro

BJN-DAL 01.21.02.04	Layanan Pencairan Anggaran Kelurahan	Masyarakat	Data Anggaran Kelurahan	SIPD-RI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAL 01.21.05.01	Layanan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa	Masyarakat	Data SK Kepala Desa	SIAP DESA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.05.02	Layanan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD (PAW)	Masyarakat	Data Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD (PAW)	SIAP DESA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.06.01	Layanan Fasilitas Pendampingan Penyusunan RKP Desa	Masyarakat	Data RKP Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.06.01	Layanan Fasilitas Pemberdayaan BUM Desa	Masyarakat	Data Proses Bisnis BUM Desa	SIBUMBO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	RAL.01.21.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

						TERTINGGAL	DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	
BJN-DAL 01.21.07.01	Layanan Fasilitas Penyaluran Dana Desa	Masyarakat	Data Penyaluran Dana Desa	SIAP DESA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.07.02	Layanan Fasilitas Penyaluran Alokasi Dana Desa	Masyarakat	Data Penyaluran Alokasi Dana Desa	SISKEUDES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.07.03	Layanan Pengajuan Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD)	Masyarakat	Data Berkas Persyaratan Administrasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa	SIPADES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.07.04	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa	Masyarakat	Data Penyaluran BKD Desa Lokasi Puncak Peringatan BBGRM dan HKG-PKK, Data Penyaluran BKD Honor/Insentif Ketua RT dan Ketua RW	SISKEUDES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.21.07.05	Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa BUM Desa	Masyarakat	Data Penyaluran BKD BUM Desa	SISKEUDES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.22.01.01	Layanan Informasi Tata Ruang	Masyarakat	Data Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	SIPETARUNG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

BJN-DAL 01.22.01.01	Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha	Masyarakat	Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.22.01.02	Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	Masyarakat	Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.23.02.01	Layanan Pencatatan Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB	Masyarakat	Data Pengguna Pelayanan KB	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.02.01	Layanan Pelayanan Keluarga Berencana	Masyarakat	Data Pelayanan Keluarga Berencana	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.02.02	Layanan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Masyarakat	Data Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.02.03	Layanan Pendayagunaan Petugas P3AKB	Masyarakat	Data Petugas P3AKB		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.01	Layanan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Masyarakat	Data Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

BJN-DAL 01.23.03.02	Layanan Standar Pelayanan KIE	Masyarakat	Data Standar Pelayanan KIE		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.03	Layanan Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga	Masyarakat	Data Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.04	Layanan Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia	Masyarakat	"Data Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia"	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.05	Layanan Pembentukan Kelompok PIK Remaja	Masyarakat	Data Pembentukan Kelompok PIK Remaja	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.06	Layanan Kegiatan Bimtek, Workshop dan Pelatihan SDM Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Masyarakat	"Data Kegiatan Bimtek, Workshop dan Pelatihan SDM Lembaga Penyedia Layanan Keluarga"		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.07	Layanan Pembentukan Model Layanan Keluarga	Masyarakat	Data Pembentukan Model Layanan Keluarga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.23.03.08	Layanan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Masyarakat	Data Pembinaan Keluarga Sejahtera		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

BJN-DAL 01.25.01.01	Layanan Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	Masyarakat	Data Hasil Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	SIDIK PERISA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.02	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Masyarakat	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	SIPATAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.03	Layanan Perencanaan Kebutuhan SDM	Masyarakat	Data Perencanaan Kebutuhan SDM	REN BUT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.04	Layanan Registrasi Fasyankes Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan	Masyarakat	Data Praktik Mandiri Terdaftar	REGISTRASI FASYANKES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.05	Layanan Manajemen SDM Fasyankes	Masyarakat	Data SDM Fasyankes	SISDMK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.01.06	Layanan Verifikasi Praktik Mandiri Tenaga Medis Kesehatan	Masyarakat	Data Hasil Verifikasi dan Pendaftaran Praktik Mandiri Tenaga Medis Kesehatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.07	Layanan Pencabutan Izin Praktik	Masyarakat	Data Pencabutan Izin Praktik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.08	Layanan Konsultasi Satusehat SDMK	Masyarakat	Data Sarana Konsultasi Satusehat SDMK	SatuSehat SDMK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.09	Layanan Penerimaan dan Pembelajaran Mahasiswa Baru	Masyarakat	Data Pembelajaran Mahasiswa	HEALS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAL 01.25.01.10	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masyarakat	Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	SISDMK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

BJN-DAL 01.25.01.11	Layanan Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Masyarakat	Data Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	REN BUT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.01.12	Layanan Pelaporan Fasilitas, SDM dan Kemampuan Rumah Sakit dalam Menangani Rujukan Maternal dan Neonatal	Masyarakat	"Data Fasilitas, SDM, dan Kemampuan RS Rujukan Neonatal"	SIMATNEO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.01.13	Layanan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masyarakat	Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	SISDMK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.01.14	Layanan Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Masyarakat	Data Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	REN BUT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.01.15	Layanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Masyarakat	Data Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	E-Ukom System	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan

BJN-DAL 01.25.01.16	Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	Masyarakat	Data Pengembangan Kompetensi ASN	Semestabangkom	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.01.17	Layanan Pelaporan Fasilitas, SDM dan Kemampuan Rumah Sakit dalam Menangani Rujukan Maternal dan Neonatal	Masyarakat	"Data Fasilitas, SDM, dan Kemampuan RS Rujukan Neonatal"	Simatneo	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.02.01	Layanan Ketersediaan Obat Indikator	Masyarakat	Data Ketersediaan Obat	Bank Data e-Logistics	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.02	Layanan Ketersediaan Vaksin dan Logistik Vaksin	Masyarakat	Data Ketersediaan Vaksin	SMILE IMUNISASI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.03	Layanan Ketersediaan Obat Program ATM dan PKG	Masyarakat	Data Laporan Ketersediaan Obat Program ATM dan PKG	SMILE Logistik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.04	Layanan Pelaporan Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika	Masyarakat	Data Penggunaan Obat Narkotika dan Psikotropika	SIPNAP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.05	Layanan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat Program dan Obat Esensial	Masyarakat	Data RKO Obat Program dan RKO Obat Esensial	e-Monev Obat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.02.06	Layanan Penggunaan Obat Program TB	Masyarakat	Data Penggunaan Obat Program TB	SITB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.07	Layanan Kelompok Tani	Masyarakat	Data Penggunaan Obat Program HIV	SIHA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.08	Layanan Monitoring & Evaluasi Katalog Obat	Masyarakat	Data Katalog dan Formularium Obat Nasional	e-MONEV OBAT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.03.01	Layanan Pelaporan Limbah Medis Rumah Sakit	Masyarakat	Data Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair RS	SIKELIM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.03.01	Layanan Radiologi Diagnostik	Masyarakat	Data Hasil Radiologi Pasien	PACS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.03.01	Layanan Pengajuan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Masyarakat	Data Kronologi Kerusakan/Pemeliharaan Alat Kesehatan	SOBAT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.01	Layanan Kesehatan Primer	Masyarakat	Data Kunjungan Pasien	SINTESA EMAS (RME)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.02	Layanan Pasien JKN	Masyarakat	Data Kunjungan Pasien JKN	PCARE BPJS KESEHATAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.04.03	Layanan Kegawatdaruratan Medis	Masyarakat	Data Panggilan Kegawatdaruratan Masyarakat, Data Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	Emergency Button Bojonegoro, SIGAP PSC 119	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.04	Layanan Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	Masyarakat	Data Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	SINTESA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.05	Layanan Rujukan Pasien ke Fasilitas Kesehatan	Masyarakat	Data Rujukan Pasien Fasilitas Kesehatan	SISRUTE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.06	Layanan Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	Masyarakat	Data Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	SIRS ONLINE, RS ONLINE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.07	Layanan Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Masyarakat	Data Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Mutu Fasyankes	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.08	Layanan Fasyankes Tingkat Pertama	Masyarakat	Data Fasyankes Tingkat Pertama	DFO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.09	Layanan IKP dan Mutu Fasyankes Tingkat Pertama	Masyarakat	Data IKP dan Mutu Fasyankes Tingkat Pertama	Mutu Fasyankes	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.10	Layanan Penilaian Kinerja Puskesmas	Masyarakat	Data Penilaian Kinerja Puskesmas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.04.11	Layanan Indeks Keluarga Sehat Puskesmas	Masyarakat	Data Indeks Keluarga Sehat Puskesmas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.12	Layanan Kesehatan Tradisional	Masyarakat	Data Kesehatan Tradisional	SIMPKT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.13	Layanan Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional	Masyarakat	Data Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika	SIPNAP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.14	Layanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Masyarakat	"Data Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan"	ASPAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.15	Layanan Pemeriksaan Angka Kuman (ALT)	Masyarakat	Data Laporan Angka Kuman		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.16	Layanan Radiologi Diagnostik	Masyarakat	Data Pemeriksaan Mikrofilariasis		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.17	Layanan Pemeriksaan Pertusis	Masyarakat	Data Pemeriksaan Pertusis		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.18	Layanan Uji Kualitas Udara	Masyarakat	Data Uji Kualitas Udara		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.04.19	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Masyarakat	Data Logistik Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan	SMILE Logistik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.20	Layanan Pemeriksaan Dhifteria	Masyarakat	Data Pemeriksaan Difteria		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.21	Layanan Informasi Kesehatan	Masyarakat	Data Profil Kesehatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.22	Layanan Perawatan Pasien	Masyarakat	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Audit Cuci Tangan	SIMRS Pelayanan, DASI JR, SIAP RS, Ekclaim BPJS Kesehatan, Vclaim BPJS Kesehatan, SIRS Online Kemenkes, ePLKK, Pelkes InHealth, HFIS BPJS, SITB, SIHA, SATU DATA, SIGIZI, e-RM, SIMATNEO, Laboratorium Information System, PACS, KPPI E-Reporting, IRR PERNEFRI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAL 01.25.04.23	Layanan Medical Check Up Kesehatan	Masyarakat	Data Medical Check Up Pasien	SIMRS Pelayanan, E-RM, Laboratorium Information System, PACS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

BJN-DAL 01.25.04.24	Layanan Indikator Mutu Nasional (IMN) Rumah Sakit	Masyarakat	Data Capaian Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit	INM RS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.25	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat	SuKMa-e Jatim	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.26	Layanan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Masyarakat	Data SPM Rumah Sakit		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.27	Layanan Akreditasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	SI-DHP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.28	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rumah Sakit	SIRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.29	Layanan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir	Masyarakat	"Data Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir"	e-Kohort	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.30	Layanan Manajemen Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rekam Medis Pasien, Data Pegawai, Data Keuangan, Data Stok Obat dan BMHP	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.31	Layanan Pengaduan Keluhan Peserta BPJS Kesehatan	Masyarakat	Data Peserta BPJS Kesehatan	SIPP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

BJN-DAL 01.25.04.32	Layanan Informasi Kesehatan Kerjasama BPJS Kesehatan	Masyarakat	Data Layanan Kesehatan Rumah Sakit	HFIS BPJS KESEHATAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.33	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan	Masyarakat	Data Klaim Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Penjaminan BPJS Kesehatan	VCLAIM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.34	Layanan Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur	Masyarakat	Data Indikator Rumah Sakit,Data Kunjungan,Data Penyakit	SIRS JATIM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.35	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan oleh Jasa Raharja	Masyarakat	Data Klaim Pasien Penjaminan Jasa Raharja	JRCARE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.36	Layanan Rujuk Pasien	Masyarakat	Data Rujukan Keluar dan Masuk Pasien	SISRUTE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.37	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan	Masyarakat	Data Klaim Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Penjaminan BPJS Ketenagakerjaan	e-PLKK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.38	Layanan Pelaporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Masyarakat	"Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan"	ASPAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.39	Layanan Pelaporan Indikator Mutu Nasional dan HAls	Masyarakat	Data Capaian Indikator Mutu Nasional dan HAls	SIMAR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan

BJN-DAL 01.25.04.40	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rekam Medis Pasien	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.41	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat	SuKMa-e Jatim	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.42	Layanan Akreditasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	SI-DHP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.43	Layanan Rujuk Pasien	Masyarakat	Data Rujukan Keluar dan Rujukan Masuk Pasien	SISRUTE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.44	Layanan Pengajuan Laporan Penjaminan Asuransi / Jasa Raharja / BPJS untuk Korban Laka Lantas	Masyarakat	Data Pengajuan Laporan Penjaminan Asuransi / Jasa Raharja / BPJS	TACS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.45	Layanan Pendataan Bayi Lahir	Masyarakat	Data Bayi Lahir	KOLAK PISANG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.46	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rumah Sakit	SIRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.47	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Masyarakat	Data Hasil Laboratorium Pasien	HCLAB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan

BJN-DAL 01.25.04.48	Layanan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir	Masyarakat	"Data Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir"	e-Kohort	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.49	Layanan Pengelolaan Data Rumah Sakit Terintegrasi	Masyarakat	Data Dashboard Pelayanan Pasien	SIM-RS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.50	Layanan Pendaftaran Antrian Pasien Online	Masyarakat	Data Pendaftaran Pasien Online	SAPA-SOULMATE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.51	Layanan Pengantaran Obat Gratis ke Rumah Pengguna Layanan	Masyarakat	Data Alamat Pengguna Layanan	MAS-PIO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.52	Layanan Pemberian Informasi dan Pengaduan Pengguna Layanan	Masyarakat	Data Informasi dan Pengaduan Pengguna Layanan	SI-PIPIT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.53	Layanan Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi	Masyarakat	Data Pemetaan Ibu Hamil Risiko Tinggi	SI-DEK RISTI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.54	Layanan Pemantauan dan Edukasi Pasien Poli	Masyarakat	Data Informasi Kondisi Pasien		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.55	Layanan Pengelolaan Data Pelayanan Hasil Pemeriksaan Radiologi	Masyarakat	Data Pemeriksaan Radiologi	SIM-ONE-MisterBian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo

BJN-DAL 01.25.04.56	Layanan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Masyarakat	Data Insiden Keselamatan Pasien		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.57	Layanan Pelaporan Indikator Mutu	Masyarakat	Data Indikator Mutu	SI-IMUT-Misterbian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.58	Layanan Pengelolaan Data Asuhan Keperawatan Pasien	Masyarakat	Data Asuhan Keperawatan Pasien	SI-KEP-Misterbian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.04.59	Layanan Rekam Medis Elektronik	Masyarakat	Data Rekam Medis Elektronik	E-RM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.05.01	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	Masyarakat	Data Pasien TBC, Data Terapi Pencegahan TBC, Data Investigasi Kontak, Data Manajemen Laboratorium TBC, Data Manajemen Logistik TBC, Data Keuangan Pengajuan Klaim TCM, Data Uji Silang Mikroskopis TBC, Data Terduga TBC	SITB,e-Tb12	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.02	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS	Masyarakat	Data Pemeriksaan HIV,Data Positif HIV,Data OHDIV on ARV,Data Logistik HIV,Data Tes Viraload HIV	SIHA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.05.03	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	Masyarakat	Data Ibu Hamil Periksa Hepatitis B,Data Ibu Hamil Positif Hepatitis B,Data Bayi Positif Hepatitis B HBIG,Data Kasus Diare,Data Logistik Diare,Data Kasus Diare Dehidrasi	SIHEPI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.04	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensi Wabah/KLB	Masyarakat	Data Kasus Potensi Wabah/KLB,Data Kasus Pengiriman Sampel,Data Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Mingguan	SKDR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.05	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	Masyarakat	Data Kelengkapan Laporan (Zero Repport),Data Ketepatan PE,Data Pengobatan Standart Malaria,Data Registrasi Kasus Positif Malaria,Data Registrasi Pemeriksaan Malaria,Data Dasar Penduduk,Data Logistik Stok,Data Dasar Faskes,Data Pelapor	SISMAL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.06	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Vektor	Masyarakat	Data Pemetaan Angka Bebas Jentik,Data Registrasi Puskesmas	SILANTOR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.05.07	Layanan Imunisasi	Masyarakat	Data Imunisasi Bayi,Data Imunisasi Baduta,Data Imunisasi TT Bumil dan WUS,Data Imunisasi Anak Sekolah,Data KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi),Data Logistik Imunisasi	Web Imunisasi, Sehat Indonesiaku, Keamanan Vaksin, SMILE IMUNISASI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.08	Layanan Haji	Masyarakat	Data Pemeriksaan Jemaah Haji	SISKOHATKES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.09	Layanan Pencegahan dan Pengendalian NAPZA	Masyarakat	Data Skrining Penggunaan NAPZA	SINAPZA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.10	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	Masyarakat	Data Obat Jiwa,Data Bunuh Diri,Data Pasung,Data ODGJ,Data Skrining Kesehatan Jiwa	SIMKESWA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.11	Layanan Cek Kesehatan Gratis	Masyarakat	Data Pendaftaran Cek Kesehatan Gratis,Data Cek Kesehatan Gratis,Data Kehadiran Cek Kesehatan Gratis	Sehat Indonesiaku	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.05.12	Layanan Pencegahan dan Pengendalian PTM	Masyarakat	Data Deteksi Dini PTM,Data Faktor Risiko PTM,Data Kasus PTM	Sehat Indonesiaku	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.05.13	Layanan Pelaporan Pasien HIV	Masyarakat	Data Pasien HIV	SIHA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.05.14	Layanan Pelaporan Program Keluarga Berencana	Masyarakat	Data Penerimaan Layanan Program KB	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.05.15	Layanan Pelaporan Pasien TBC	Masyarakat	Data Pasien TBC RSUD Kepohbaru	SITB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.05.16	Layanan Pelaporan Balita Gizi Buruk	Masyarakat	Data Balita Gizi Buruk	SIGIZI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.05.17	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan HIV AIDs	Masyarakat	Data Pemeriksaan HIV AIDs	SIHA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.05.18	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan TB	Masyarakat	Data Pemeriksaan TB	SITB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.05.19	Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan Biogran, Kultur, dll	Masyarakat	Data Pemeriksaan PPRA	SIRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Padangan

BJN-DAL 01.25.05.20	Layanan Pelaporan Pelayanan KB	Masyarakat	Data Pelayanan KB	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.05.21	Layanan Telekonsultasi Gizi	Masyarakat	Data Telekonsultasi Gizi	SI-SEPAT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.06.01	Layanan Croschek TB	Masyarakat	Data Laporan Kasus Tuberkulosis	e-Tb12	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.02	Layanan Kasus Malaria	Masyarakat	Data Laporan Kasus Malaria	SISMAL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.03	Layanan PME	Masyarakat	Data Laporan PME	Simultan PME	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.04	Layanan Monitoring TB	Masyarakat	Data Laporan Monitoring TB	SITB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.05	Layanan Pemeriksaan Kualitas Air	Masyarakat	"Data Laporan Mikrobiologi, Fisika, Kimia Air"		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.06	Layanan Pemeriksaan Limbah Cair	Masyarakat	Data Laporan Limbah Cair		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.06.07	Layanan Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	Masyarakat	Data Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	SAJI PANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.08	Layanan Kampanye Germas	Masyarakat	Data Penggerakan GERMAS	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.09	Layanan Posyandu Siklus Hidup	Masyarakat	Data Posyandu Siklus Hidup	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.10	Layanan Penilaian Strata Kader Posyandu	Masyarakat	Data Strata Kader Posyandu	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.11	Layanan Saka Bakti Husada	Masyarakat	Data Pangkalan SBH	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.12	Layanan Komunikasi Antar Pribadi	Masyarakat	Data Penerapan Komunikasi Antar Pribadi	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.13	Layanan Pos Kesehatan Pesantren	Masyarakat	Data Poskestren	IKI Pesat Jatim	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.14	Layanan Pengelolaan Limbah	Masyarakat	Data Pengelolaan Limbah	SIKELIM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.06.15	Layanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Masyarakat	Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	SISTBM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.16	Layanan Saji Pangan	Masyarakat	Data Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	SAJI PANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.17	Layanan Pengawasan Kualitas Air Minum	Masyarakat	Data Pengawasan Kualitas Air Minum	SIPEKAM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.18	Layanan Tempat Pengelolaan Pangan	Masyarakat	Data Sarana Tempat Pengelolaan Pangan	e-Monev HSP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.19	Layanan Tempat Fasilitas Umum	Masyarakat	Data Sarana Tempat Fasilitas Umum	e-Monev Satu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.20	Layanan Kesehatan Pekerja	Masyarakat	Data Laporan Kesehatan Pekerja	SITKO,Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.21	Layanan Kesehatan Olahraga	Masyarakat	Data Laporan Kesehatan Olahraga	SITKO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.22	Layanan Perizinan PIRT	Masyarakat	Data Perizinan SPPIRT	SPPIRT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.06.23	Layanan Gizi Ibu Hamil	Masyarakat	Data Anemia Ibu Hamil,Data Suplementasi Gizi Ibu Hamil,Data Kurang Energi Kronis Ibu Hamil	SIGIZIKESGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.24	Layanan Gizi Balita	Masyarakat	Data Bayi Baru Lahir Mendapat IMD,Data Balita Underweight (BB Kurang dan Sangat Kurang),Data Balita Overweight (Gizi Lebih dan Obesitas),Data Bayi Usia Kurang dari 6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif,Data Bayi Usia 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif,Data Balita Usia 6-23 Bulan Mendapatkan MP-ASI,Data Balita Mendapatkan Kapsul Vitamin A,Data Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S),Data Balita Ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D),Data Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk,Data Balita Gizi Kurang Dapat Tambahan Asupan Gizi,Data Balita BB	SIGIZIKESGA,Kom dat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

			Tidak Naik (T) Dapat Tambahan Asupan Gizi,Data Balita Berat Badan Kurang Dapat Tambahan Asupan Gizi,Data Laporan LB 3 Neonatal					
BJN-DAL 01.25.06.25	Layanan Gizi Remaja Putri	Masyarakat	Data Skrining Anemia Remaja Putri,Data Konsumsi Tablet Tambah Darah Remaja Putri,Data Tatalaksana Anemia Remaja Putri	SIGIZIKESGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.26	Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	Masyarakat	Data PWS Ibu Hamil,Data LB3 Maternal,Data Pemantauan Ibu Hamil Risti,Data Kematian Ibu	Komdat Ditjen Kesmas,MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.27	Layanan Kesehatan Balita	Masyarakat	Data Bayi Baru Lahir,Data Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita,Data Bayi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi,Data Kematian Bayi,Data Kematian Balita,Data Laporan PWS Anak,Data Laporan Skrining BBL,Data Laporan SDIDTK Balita	Komdat Ditjen Kesmas,MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 01.25.06.28	Layanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Masyarakat	Data Laporan Kesehatan Remaja, Data Laporan Penjangkaran Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.29	Layanan Kesehatan Usia Produktif	Masyarakat	Data Laporan Pasangan Usia Subur Risti dan Metode Kontrasepsinya, Data Peminjaman Arsip, Data Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, "Data Pelayanan KBPP, KB Baru, Komplikasi KB, Efek Samping", Data Pelayanan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.30	Layanan Kesehatan Usia Lanjut	Masyarakat	Data Kesehatan Usia Lanjut	Komdat Ditjen Kesmas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.06.31	Layanan Pelaporan Kematian Maternal dan Perinatal	Masyarakat	Data Kematian Maternal dan Perinatal	MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.06.32	Layanan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)	Masyarakat	Data Insiden Keselamatan Pasien RS	IKP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Kepohbaru

BJN-DAL 01.25.06.33	Layanan Pelaporan Kematian Maternal dan Perinatal	Masyarakat	Data Kematian Maternal dan Perinatal	MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.07.01	Layanan Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan NAPZA	Masyarakat	"Data Penerimaan, Penggunaan dan Stok Sediaan NAPZA"	SIPNAP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.08.01	Layanan Pemeriksaan Bakteri Makanan dan Minuman	Masyarakat	Data Laporan Bakteri Makanan dan Minuman		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.08.02	Layanan Pemeriksaan Bahan Tambahan Pangan	Masyarakat	Data Laporan Bahan Tambahan Pangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.26.01.01	Layanan Pengajuan Izin Adopsi	Masyarakat	Data Pemohon Adopsi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.02	Layanan Rekomendasi Rumah Singgah	Masyarakat	Data Rumah Singgah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.03	Layanan Pemberian Bimbingan Sosial Masyarakat	Masyarakat	Data Penerima Bimbingan Sosial Masyarakat	SIAP BANSOS,SiBantu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial

BJN-DAL 01.26.01.04	Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Masyarakat	"Data Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual"	SiBantu,SIAP BANSOS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.05	Layanan Rehabilitasi Sosial	Masyarakat	Data Pemerlu Pelayanan Rehabilitasi Sosial		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.06	Layanan Penyediaan Sandang	Masyarakat	Data PPKS pemerlu sandang kedaruratan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.07	Layanan Penyediaan Makanan	Masyarakat	Data Penerima Makanan Shelter dan Rumah Singgah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.08	Layanan Pemberian Penelusuran Keluarga	Masyarakat	Data PPKS Terlantar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.09	Layanan Rujukan Orang Gangguan Jiwa	Masyarakat	Data Rujukan ODGJ		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.01.10	Layanan Reunifikasi Keluarga	Masyarakat	Data Penerima Layanan Reunifikasi Keluarga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARA AN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.03.01	Layanan Hibah Keuangan	Masyarakat	Data Penerima Hibah Keuangan	e-Hibah	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARA AN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat

BJN-DAL 01.26.03.02	Layanan Insentif Keagamaan	Masyarakat	Data Penerima Insentif Keagamaan	SIPIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAL 01.26.03.03	Layanan Santunan Duka	Masyarakat	Data Penerima Santunan Duka	SANDUK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAL 01.26.03.04	Layanan Rekomendasi 1 Desa 10 Sarjana	Masyarakat	Data Penerima PKH	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.03.05	Layanan Surat Keterangan Penerima PKH	Masyarakat	Data Penerima PKH	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.03.06	Layanan Penanganan Khusus Kelompok Rentan	Masyarakat	Data Usulan Fasilitas Kelompok Rentan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.03.07	Layanan Kinerja SDM Kesehatan	Masyarakat	Data Kinerja SMD Kesehatan	SIPENA		RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAL 01.26.04.01	Layanan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Masyarakat	Data LKSA Terdaftar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial

BJN-DAL 01.26.04.02	Layanan Rekomendasi DTKS (KIP/Beasiswa/Subsidi listrik)	Masyarakat	Data Keluarga Miskin Terdata DTKS	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.03	Layanan Rekomendasi KKS-BPNT	Masyarakat	Data Pemohon Hilang Kartu,Data Beda Identitas Bank	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.04	Layanan PBI-KIS	Masyarakat	Data Kepesertaan BPJS Kesehatan	e-Dabu Pemda	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.05	Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.06	Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Masyarakat	Data Karang Taruna se-Kabupaten		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.07	Layanan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Masyarakat	Data Pekerja Sosial Masyarakat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.08	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Masyarakat	Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Leluhur		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial

BJN-DAL 01.26.04.09	Layanan Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Masyarakat	Data Rekomendasi Lembaga Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.04.10	Layanan Pengelolaan Fakir Miskin	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Sosial	SiBantu,SIAP BANSOS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.26.06.01	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masyarakat	Data Korban Tertangani		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAL 01.26.06.02	Layanan Informasi Rawan Bencana	Masyarakat	Data Informasi Rawan Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAL 01.26.06.03	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Masyarakat	Data Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAL 01.26.06.04	Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Masyarakat	Data Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAL 01.26.06.05	Layanan Pemadaman Kebakaran	Masyarakat	Data Kejadian Kebakaran	Sadam	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran

BJN-DAL 01.26.06.06	Layanan Evakuasi dan Penyelamatan	Masyarakat	Data Penanganan Evakuasi dan Penyelamatan	Sadam	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANG AN BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAL 01.26.06.07	Layanan Fasilitas Sarana Prasarana Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Masyarakat	Data Sarana Prasarana Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANG AN BENCANA	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAL 01.26.06.08	Layanan Penanganan Bencana	Masyarakat	Data Korban Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARA AN PENANGGULANG AN BENCANA	Dinas Sosial
BJN-DAL 01.27.05.01	Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Masyarakat	Data Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAL 01.28.01.01	Layanan Informasi Produk Hukum DPRD	Masyarakat	Data Produk Hukum DPRD	JDIH DPRD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.01 PENYELENGGARA AN PERATURAN PERUNDANG-UND ANGAN	Sekretaris DPRD

BJN-DAL 01.28.02.01	Layanan Pengelolaan Informasi Hukum	Masyarakat	Data Produk Hukum Daerah	JDIH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
BJN-DAL 01.29.01.01	Layanan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat	Data Organisasi Kemasyarakatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 01.29.01.01	Layanan Tindakan Penertiban	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Tindakan Penertiban	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.02	Layanan Tindakan Persuasif	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Tindakan Persuasif	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.03	Layanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Masyarakat	Data Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Sijalinmaja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.04	Layanan Penertiban Pelanggaran Trantibum	Masyarakat	Data Pelanggaran Trantibum	Gatramas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.05	Layanan Tindakan Represif	Masyarakat	Data Penindakan Represif	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

BJN-DAL 01.29.01.06	Layanan Tindakan Yustisi	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Tindakan Yustisi	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.07	Layanan Tindakan Non Yustisi	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Non Yustisi	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.08	Layanan Penertiban Bangunan Liar	Masyarakat	Data Penertiban Bangunan Liar	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.09	Layanan Pengaduan Online Satpol PP	Masyarakat	Data Laporan Aduan Masyarakat	Sijalinmaja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.10	Layanan Data Aset Pos Kampling	Masyarakat	Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.11	Layanan Data Aset Pos Satlinmas	Masyarakat	Data Aset Pos Satlinmas Kabupaten Bojonegoro	Sijalinmaja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.12	Layanan Manajemen Anggota Satlinmas	Masyarakat	Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas, Sijalinmaja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

BJN-DAL 01.29.01.13	Layanan Kegiatan Anggota Satlinmas	Masyarakat	Data Kegiatan Anggota Satlinmas	Sijalinmaja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.14	Layanan Sarana dan Prasarana Trantibum	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Trantibum	Gatramas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.02.01	Layanan Penegakan Perda	Masyarakat	Data Penegakan Perda	Sijalinmaja, Gatramas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.02.02	Layanan Garuda Mas	Masyarakat	Data Rekap Perka Perkada Tupoksi Satpol PP	Gatramas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.03.01	Layanan Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Data Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Kebakaran	Sadam	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAL 01.29.03.02	Layanan Inspeksi Proteksi kebakaran	Masyarakat	Data Bangunan Gedung, Data Penilaian Bangunan Gedung		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAL 01.31.01.01	Layanan Informasi Manajemen Tunjangan Guru	Masyarakat	Data Manajemen Tunjangan Guru	SIM TUNJANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.01.01	Layanan Penilaian Kinerja Guru	Masyarakat	Data Penilaian Kinerja Guru		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

BJN-DAL 01.31.01.02	Layanan Pengajar NUPTK	Masyarakat	Data Pengajar NUPTK		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.01	Layanan Perubahan Dapodik	Masyarakat	Data Perubahan Dapodik	SILAPDIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.02	Layanan Data Pokok Pendidikan	Masyarakat	Data Pokok Pendidikan	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.03	Layanan Standart Pelayanan Minimal	Masyarakat	Data Standart Pelayanan Minimal	E-SPM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.04	Layanan Pengajuan NPSN	Masyarakat	Data Pengajuan NPSN	SILAPDIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

							DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
BJN-DAL 01.31.02.05	Layanan Mutasi Siswa	Masyarakat	Data Mutasi Siswa	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.06	Layanan Verval PD	Masyarakat	Data Verval PD	SIM TUNJANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.07	Layanan Rekom Mutasi Siswa Luar Daerah	Masyarakat	Data Rekom Mutasi Siswa Luar Daerah	ARKAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.08	Layanan Legalisir Ijazah SD	Masyarakat	Data Legalisir Ijazah SD	E-SPM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN	Dinas Pendidikan

							PENDIDIKAN MENENGAH	
BJN-DAL 01.31.02.09	Layanan Perpanjangan Izin Operasional SD	Masyarakat	Data Perpanjangan Izin Operasional SD		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.10	Layanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang	Masyarakat	Data Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.11	Layanan Layanan Legalisir Ijazah SMP	Masyarakat	Data Layanan Legalisir Ijazah SMP		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.12	Layanan Pengajuan NISN	Masyarakat	Data Pengajuan NISN		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

							MENENGAH	
BJN-DAL 01.31.02.13	Layanan Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan dan Kebudayaan	Masyarakat	Data Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan dan Kebudayaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.14	Layanan Operasional Penyelenggara PAUD	Masyarakat	Data Operasional Penyelenggara PAUD		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.15	Layanan Pengelolaan Dana BOS	Masyarakat	Data Pengelolaan Dana BOS		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.31.02.16	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	Masyarakat	Data Penerimaan Peserta Didik Baru		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan

BJN-DAL 01.31.03.01	Layanan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB)	Masyarakat	Data Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.03 PENDIDIKAN NON FORMAL	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 01.32.01.01	Layanan Jasa Penyewaan Alat Olah Kayu	Masyarakat	Data Jasa Sewa Alat Olah Kayu		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.02.01	Layanan Penerbitan AK1 / Kartu Kuning	Masyarakat	Data Pemohon AK1		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.02.02	Layanan Rekomendasi Paspor ID CPMI	Masyarakat	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	SiapKerja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.02.03	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Masyarakat	Data Lowongan Pekerjaan	Siti Worobejo	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.02.04	Layanan Kegiatan Pelatihan	Masyarakat	Data Pelatihan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

							KERJA	
BJN-DAL 01.32.03.01	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Masyarakat	Data SK Pengesahan Peraturan Perusahaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.03.02	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Masyarakat	Data Bukti Pencatatan PKWT		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.04.01	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Masyarakat	"Data Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut"	SIHAPSARI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAN	RAL.01.32.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Inspektorat
BJN-DAL 01.33.02.01	Layanan Ijin Penelitian/KKL/KKN/Magang	Masyarakat	Data Hasil Ijin Penelitian/ Magang	Simaniz	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 01.33.02.01	Layanan Bojonegoro Innovative Award	Masyarakat	Data Lomba Bojonegoro Inovative Award	BIA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 01.33.02.02	Layanan Innovative Government Award (IGA)	Masyarakat	Data Lomba Bojonegoro Inovative Award	IGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BJN-DAL 01.34.01.01	Layanan Permintaan Organisasi Pemuda	Masyarakat	Data Organisasi Pemuda		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.34.02.01	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	Masyarakat	Data Diklat Kepramukaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.34.02.02	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Kegiatan Kepramukaan	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Kepramukaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.01.01	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.01.02	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Stadion	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.01.03	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR)	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.02.01	Layanan Pembinaan Potensi Olahraga	Masyarakat	Data Potensi Olahraga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.02.01	Layanan Pengiriman Atlet ke Tingkat Provinsi	Masyarakat	Data Atlet		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BJN-DAL 01.40.01.01	Layanan Pengawasan Usaha Industri	Masyarakat	Data Pengawasan Industri	SIPP DOKLING	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.01.02	Layanan Persetujuan Teknis dan SLO	Masyarakat	Data Persetujuan Teknis dan SLO		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.01.03	Layanan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Skala Amdal	Masyarakat	Data Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.01.04	Layanan Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia	Masyarakat	Data Rendah Karbon	AKSARA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.01.05	Layanan Permohonan Persetujuan Lingkungan	Masyarakat	Data Permohonan Persetujuan Lingkungan	OSS RBA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.02.01	Layanan Potong Pohon	Masyarakat	Data Potong Pohon		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.02.01	Layanan Penyediaan Bibit Pohon	Masyarakat	Data Penyediaan Bibit		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

BJN-DAL 01.40.02.01	Layanan Pembuatan Kompos	Masyarakat	Data Pengelolaan Kompos		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.02.01	Layanan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Masyarakat	Data Penanaman	IKLH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.03.01	Layanan Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.03.01	Layanan Pengelolaan Aksi,Sumber Daya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat	Data Aksi Pengendalian Perubahan Iklim	SRN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.03.02	Layanan Perhitungan Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca	Masyarakat	Data Potensi Reduksi Emisi GRK	SPECTRUM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.03.03	Layanan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Masyarakat	Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca	SIGN SMART	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.04.01	Layanan Pengelolaan TPS 3R	Masyarakat	Data Pengelolaan TPS 3R		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.04.01	Layanan Pengelolaan Sampah TPA	Masyarakat	Data Sampah	SIPSN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup

BJN-DAL 01.40.04.01	Layanan Kebersihan Lingkungan	Masyarakat	Data Kebersihan Lingkungan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.04.02	Layanan Permohonan MOU Pembuangan Sampah	Masyarakat	Data MOU		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.04.03	Layanan Penerimaan Retribusi Persampahan	Masyarakat	Data Penerimaan Retribusi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.04.04	Layanan Pembinaan Bank Sampah	Masyarakat	Data Bank Sampah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.05.01	Layanan Rekomendasi Teknis Limbah B3	Masyarakat	Data Surat Persetujuan Lingkungan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.40.05.01	Layanan Monitoring Kualitas Lingkungan	Masyarakat	"Data Pengendalian Pencemaran Air, Udara, Limbah Domestik dan B3"	SIPP DOKLING	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.40.07.01	Layanan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata dan GPBLHS	Masyarakat	Data Sekolah Adiwiyata	SIDIA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAL 01.42.01.01	Layanan Pendaftaran dan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	Masyarakat	Data Nomor Induk Kesenian	ETNIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BJN-DAL 01.42.01.02	Layanan Pelatihan dan Workshop Pelaku Seni	Masyarakat	Data Pelaku Seni		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.42.01.03	Layanan Edukasi Sejarah Seni Budaya	Masyarakat	Data Sejarah Seni Budaya		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.42.01.04	Layanan Edukasi Cagar Budaya	Masyarakat	Data Cagar Budaya		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.42.01.05	Layanan Edukasi Potensi Seni Budaya	Masyarakat	Data Potensi Seni Budaya		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.42.01.06	Layanan Fasilitasi Ruwatan Murwakala	Masyarakat	Data Peserta Ruwatan Murwakala		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAL 01.42.05.01	Layanan Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	Masyarakat	Data Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.01	Layanan Keanggotaan	Masyarakat	Data Anggota Perpustakaan	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.02	Layanan Baca di Tempat	Masyarakat	Data Baca di Tempat	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BJN-DAL 01.42.06.03	Layanan Sirkulasi Pustaka	Masyarakat	Data Peminjaman Buku,Data Pengembalian Buku,Data Buku Rusak	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.04	Layanan Perpustakaan Keliling dan Storytelling	Masyarakat	Data Lokus dan Jumlah Pengunjung		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.05	Layanan e-Book	Masyarakat	Data e-book	e-Maos Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.43.01.01	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian	Masyarakat	Data Sumber Daya Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian	Jagasiber	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.01.02	Layanan Penanganan Insiden Keamanan Informasi	Masyarakat	Data Insiden Keamanan Informasi	Jagasiber	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.01.03	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	Masyarakat	Data Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.01.04	Layanan Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah	Masyarakat	Data Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah	Monitoring Jaringan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

BJN-DAL 01.43.01.05	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Pusat Data	Masyarakat	Data Infrastruktur Pusat Data	Monitoring Pusat Data	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.01.06	Layanan Pengendalian Resiko SPBE	Masyarakat	Data Manajemen Resiko SPBE		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.02.01	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah	Masyarakat	Data Aplikasi Pemerintah	Manajemen Pengembangan Aplikasi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.02.02	Layanan Tatakelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government	Masyarakat	Data Ekosistem e-Government	SIA SPBE V-2	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.02.03	Layanan Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik	Masyarakat	Data Sertifikat Elektronik	Manajemen Sertifikat Elektronik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.02.04	Layanan Permintaan Domain dan VM	Masyarakat	Data Domain dan VM server		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.03.01	Layanan Pengelolaan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	Masyarakat	Data Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	Situs Web Pemkab	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.03.02	Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik	Masyarakat	"Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	SP4N LAPOR,Sapa Bupati	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

BJN-DAL 01.43.03.03	Layanan Pelaksanaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	Masyarakat	Data Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	PPID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.03.04	Layanan Helpdesk TIK	Masyarakat	Data Aduan Kendala TIK	Helpdesk TIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.03.05	Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Video Conference	Masyarakat	Data Pengajuan Teleconference		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.04.01	Layanan Pembangunan Metadata Statistik Sektoral	Masyarakat	Data Statistik Sektoral	INDAH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.04.02	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral	Masyarakat	Data Rekomendasi Kegiatan Statistik,Data Statistik Sektoral	Satu Data Bojonegoro,ROMA NTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.04.03	Layanan Rekomendasi Statistik	Masyarakat	Data Rekomendasi Kegiatan Statistik	ROMANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.43.04.04	Layanan Rekomendasi Statistik	Masyarakat	Data Rekomendasi Kegiatan Statistik	ROMANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.43.05.01	Layanan Open Data Geospasial	Masyarakat	Data Statistik dan Geospasial,Data Map	GEOPORTAL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BJN-DAL 01.44.02.01	Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat	Data Keterbukaan Informasi Publik	SIMPONI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 01.44.02.01	Layanan Pengaduan Masyarakat	Masyarakat	Data Pengaduan Masyarakat	CEMARA, KESSAN BPJS KESEHATAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAL 02.01.01.01	Layanan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	Pemerintah	Data Partai Politik DPRD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 02.01.01.01	Layanan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas/ Perseorangan	Pemerintah	"Data Perijinan Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangan"	Simaniz	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 02.01.01.02	Layanan Paskibraka	Pemerintah	Data Paskibraka	BPIP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 02.01.01.03	Layanan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	Pemerintah	Data Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAL 02.01.01.04	Layanan Fasilitasi Reses	Pemerintah	Data Reses		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD
BJN-DAL 02.01.01.05	Layanan Aspirasi Masyarakat	Pemerintah	Data Aspirasi Masyarakat		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretaris DPRD

BJN-DAL 02.01.04.01	Layanan Fasilitasi Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna	Pemerintah	Data Inovasi Lomba Teknologi Tepat Guna		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 02.01.04.01	Layanan Profil Desa dan Kelurahan	Pemerintah	Data Potensi Wilayah Desa dan Kelurahan	PRODESKEL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 02.01.04.02	Layanan Pelaporan Dana Desa	Pemerintah	Data Realisasi Dana Desa	OMSPAN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 02.01.04.03	Layanan Inventarisasi Aset Desa	Pemerintah	Data Aset Desa	SIPADES	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 02.01.04.04	Layanan Perencanaan Pembangunan Desa	Pemerintah	Data Perencanaan Pembangunan Desa	DDC, SID	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 02.01.05.01	Layanan Pengusulan SHS	Pemerintah	Data SHS		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan
BJN-DAL 02.01.05.02	Layanan Pengelolaan Standar Biaya Umum	Pemerintah	Data SBU		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan

BJN-DAL 02.01.05.03	Layanan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pemerintah	Data Angka Inflasi	TPIN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAL 02.01.05.04	Layanan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Pemerintah	Data Program Kegiatan TPAKD	SITPAKD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAL 02.01.05.05	Layanan Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Pemerintah	Data RKP dan Realisasi DBHCHT	e-DBHCHT	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAL 02.01.06.01	Layanan Pinjam Ruangan	Pemerintah	Data Pinjam Ruangan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAL 02.01.06.02	Layanan Pinjam Kendaraan	Pemerintah	Data Pinjam Kendaraan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAL 02.01.06.03	Layanan Persuratan Pimpinan	Pemerintah	Data Persuratan Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum

BJN-DAL 02.01.06.04	Layanan Fasilitas Kegiatan Pimpinan	Pemerintah	Data Fasilitas Kegiatan Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Umum
BJN-DAL 02.01.07.01	Layanan Identitas Kependudukan Digital	Pemerintah	Data Identitas Kependudukan Digital	IKD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.02	Layanan Monitoring Perbaikan Perangkat dan Komunikasi Data	Pemerintah	Data Perbaikan Perangkat dan Komunikasi Data		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.03	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemerintah	Data Kependudukan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.04	Layanan Pengendalian Hak Akses Sistem Administrasi Kependudukan	Pemerintah	Data Hak Akses Sistem Administrasi Kependudukan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.05	Layanan Penghapusan Data Anomali Administrasi Kependudukan	Pemerintah	Data Anomali Administrasi Kependudukan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.06	Layanan Penerbitan KK	Pemerintah	Data KK	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BJN-DAL 02.01.07.07	Layanan Legalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pemerintah	Data Pendaftaran Penduduk		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.08	Layanan Penerbitan KIA	Pemerintah	Data KIA	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.09	Layanan Penerbitan KTP	Pemerintah	Data KTP	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.10	Layanan Pengarsipan Dokumen BID	Pemerintah	Data BID		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.11	Layanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan	Pemerintah	Data Penduduk di Kecamatan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.12	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	Pemerintah	Data Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.13	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Pemerintah	Data Akta Kelahiran	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BJN-DAL 02.01.07.14	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Pemerintah	Data Akta Kematian	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.15	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	Pemerintah	Data Akta Pengangkatan Anak		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.16	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Pemerintah	Data Akta Pengesahan Anak		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.17	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	Pemerintah	Data Akta Perceraian		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.18	Layanan Pencatatan Sipil Legalisasi Dokumen Kependudukan	Pemerintah	Data Pencatatan Sipil Legalisasi Dokumen Kependudukan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.19	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	Pemerintah	Data Akta Pengakuan Anak		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.20	Layanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Pemerintah	Data Status Kewarganegaraan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BJN-DAL 02.02.01.01	Layanan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah Berbasis Elektronik	Pemerintah	Data Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.01.02	Layanan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Pemerintah	Data Kebijakan Umum APBD	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.01.03	Layanan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Pemerintah	Data Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.01.04	Layanan Perbendaharaan Penatausahaan Pelaksanaan APBD	Pemerintah	Data SP2D	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.01.05	Layanan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	Pemerintah	Data RKAS	ARKAS	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Dinas Pendidikan
BJN-DAL 02.02.03.01	Layanan Manajemen Informasi Objek Pajak PBB-P2	Pemerintah	Data Objek Pajak PBB-P2	SISMIOP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.02	Layanan BPHTB	Pemerintah	Data Pemungutan BPHTB	e-BPHTB	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah

BJN-DAL 02.02.03.03	Layanan PBB - P2	Pemerintah	Data Tagihan PBB-P2, Data Pembayaran PBB-P2, Data Peta Objek Pajak PBB-P2, Data Pelayanan PBB-P2	e-PBB, SMART MAP, GISel, SIMPEL BAPENDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.04	Layanan Dokumentasi Administrasi Kebijakan Pajak Daerah	Pemerintah	Data Peraturan PBB-P2 dan BPHTB, Data NPOP BPHTB, Data Peraturan Pajak Daerah Lainnya	e-Arsip, KIPJAK-I	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.05	Layanan Pajak Daerah Lainnya	Pemerintah	Data Pembayaran Jenis Pajak Daerah Lainnya (PDL), Data Pembayaran Pajak Daerah Lainnya	SIMPATDU, e-Payment, Cek Pembayaran	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.06	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Pemerintah	Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu	DIJAMIN MINUL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.07	Layanan Pajak Air Tanah	Pemerintah	Data Kubikasi Meteran Air	Smart Water System	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.08	Layanan Pelaporan Pembayaran Pajak Daerah Lainnya	Pemerintah	Data Realisasi Pajak Daerah Lainnya	SMART REPORT	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah

BJN-DAL 02.02.03.09	Layanan Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	Pemerintah	Data Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	eMAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.10	Layanan Perforasi	Pemerintah	Data Tiket		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.11	Layanan Rekonsiliasi Retribusi Daerah	Pemerintah	Data Rekonsiliasi Retribusi Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.06.01	Layanan Pengelolaan Aset Daerah	Pemerintah	Data Barang Milik Daerah	e-BMD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.06.02	Layanan Penghapusan BMD	Pemerintah	Data Penghapusan BMD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.08.01	Layanan Akuntansi dan Investasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pemerintah	Data Pertanggungjawaban Keuangan	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.02.08.01	Layanan Pembuatan Data SPJ Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pemerintah	Data Perjalanan Dinas Dalam Kota	AKIRA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Dinas Kesehatan

BJN-DAL 02.02.08.01	Layanan Manajemen Data Keuangan dan Non Keuangan RSUD Sumberrejo	Pemerintah	Data Capaian Kinerja Keuangan dan Pelayanan RSUD Sumberrejo	MISTERBIAN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 02.02.11.01	Layanan Pengajuan dan Pelaksanaan Tender	Pemerintah	Data Tender, Data Non Tender, Data Non Tender Swakelola	SPSE	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAL 02.02.11.02	Layanan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah	Data Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAL 02.02.11.03	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah	Data Pengadaan Barang dan Jasa, Data Kinerja Penyedia	SPSE, e-Katalog, SIRUP,SIKAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAL 02.03.01.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi Jalan Poros Antar Desa	Pemerintah	Data Monev Jalan Poros Antar Desa	GEOPORTAL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.02	Layanan Sumber Mata Air	Pemerintah	Data Sumber Mata Air	GEOPORTAL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.03	Layanan Penyusunan RKPd	Pemerintah	Data Renja,Data Pokok-Pokok Pikiran Dewan,Data Musrengbang	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.04	Layanan Penyusunan RPJMD	Pemerintah	Data Perencanaan RPJMD	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BJN-DAL 02.03.01.05	Layanan Penyusunan RPJPD	Pemerintah	Data Perencanaan RPJPD	SIPD-RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.06	Layanan Koordinasi Perencanaan Bidang SDA dan Perencanaan	Pemerintah	Data NTP,Data Rencana Induk Geopark		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.07	Layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Pemerintah	Data Masterplan Bidang Keciaptakarya		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.08	Layanan Monitoring Data Penduduk Miskin	Pemerintah	Data Monitoring Penduduk Miskin	DAMISDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.01.09	Layanan Monitoring Data Stunting	Pemerintah	Data Monitoring Stunting	ASTRO	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.03.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Pemerintah	Data Evaluasi Kinerja Anggaran	E-MONEV	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.03.02	Layanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Pemerintah	Data Laporan Pertanggungjawaban	E-LKPJ	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.03.03	Layanan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah	Data Pelaporan Keuangan Daerah	IPKD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BJN-DAL 02.03.03.04	Layanan Program CSR Perusahaan	Pemerintah	Data Pelaksanaan Program CSR		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.03.03.05	Layanan Fasilitas KKN/PKL	Pemerintah	Data Fasilitas KKN		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.04.01.01	Layanan Administrasi Pemerintahan	Pemerintah	Data Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, "Data Usulan Kepala Daerah dan WKDH, dan Usulan DPRD", Data Laporan Monev Kecamatan	SIOLA Kemendagri, SIPENDEKAR, SINCAN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAL 02.04.01.02	Layanan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pemerintah	Data laporan LPPD, Data laporan SPM	SILPPD, SPM BANGDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAL 02.04.01.03	Layanan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemerintah	Data Batas Kelurahan dan Kecamatan, Data Nama Rupabumi	SINAR BIG	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAL 02.04.01.04	Layanan Fasilitas Kerjasama Daerah	Pemerintah	Data Fasilitas Kerjasama Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
BJN-DAL 02.04.01.05	Layanan Protokol	Pemerintah	Data Keprotokolan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAL 02.04.01.06	Layanan Dokumentasi Pimpinan	Pemerintah	Data Dokumentasi Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BJN-DAL 02.04.01.07	Layanan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Pemerintah	Data Fasilitas Komunikasi Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAL 02.04.02.01	Layanan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemerintah	Data Kelembagaan, Data Anjab	SIMONA, e-Formasi Menpan, SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAL 02.04.02.01	Layanan Fasilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah	Data Kinerja dan Reformasi Birokrasi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAL 02.04.02.02	Layanan Akuntabilitas Kinerja	Pemerintah	Data Akuntabilitas Kinerja	SAKIP Bojonegoro	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
BJN-DAL 02.04.03.01	Layanan Pensiun PNS	ASN/Pegawai	Data Pensiun	SIMANTAPS,SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.02	Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	ASN/Pegawai	Data WP LHKPN	e-LHKPN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.03	Layanan Cuti	ASN/Pegawai	Data Cuti PNS	SIMANTAPS,SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.04	Layanan Satya Lancana Karya Satya	ASN/Pegawai	Data SK Satya Lancana Karya Satya	SIOLA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

							APARATUR	
BJN-DAL 02.04.03.05	Layanan Administrasi Kepegawaian	ASN/Pegawai	Data Administrasi Kepegawaian	SIMANTAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.06	Layanan Perbaikan Nama/ NIP	ASN/Pegawai	Data Nama dan NIP	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.07	Layanan Perencanaan SOTK	ASN/Pegawai	Data SOTK	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.08	Layanan Pendaftaran ASN	ASN/Pegawai	Data Calon ASN	SSCASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.09	Layanan Usulan Kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan	ASN/Pegawai	Data Usulan Tenaga Kesehatan	e-Formasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.10	Layanan Usulan Kebutuhan ASN	ASN/Pegawai	Data Usulan Kebutuhan ASN		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.11	Layanan Tugas Belajar bagi PNS	ASN/Pegawai	Data SK Tugas Belajar PNS		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

BJN-DAL 02.04.03.12	Layanan Diklat Penjenjangan	ASN/Pegawai	Data Peserta Diklat Penjenjangan PNS/PPPK		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.13	Layanan Diklat Teknis	ASN/Pegawai	Data Peserta Diklat Teknis PNS		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.14	Layanan Diklat Fungsional	ASN/Pegawai	Data Peserta Diklat Fungsional PNS		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.15	Layanan Kenaikan Pangkat	ASN/Pegawai	Data SK Kenaikan Pangkat	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.16	Layanan Pencantuman Gelar	ASN/Pegawai	Data Pertimbangan Teknis BKN	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.17	Layanan Penambahan Masa Kerja (PMK)	ASN/Pegawai	Data SK PMK PNS	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.18	Layanan Mutasi Antar Daerah	ASN/Pegawai	Data SK Mutasi	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

BJN-DAL 02.04.03.19	Layanan Mutasi Promosi	ASN/Pegawai	Data SK Mutasi/ Promosi	I Mut	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.20	Layanan Penilaian Kinerja	ASN/Pegawai	Data SKP	e Kinerja	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.21	Layanan Presensi Online	ASN/Pegawai	Data Daftar Hadir ASN	SIKEPO	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.04.01	Layanan Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	Pemerintah	Data SAKIP OPD	Perisai	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.02	Layanan Pemantauan Kerugian Daerah	Pemerintah	Data Kerugian Daerah	SIKAD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.03	Layanan Pemantauan Administrasi LHP BPK	Pemerintah	Data Tindak Lanjut BPK	SIPTL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI	Inspektorat

							BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
BJN-DAL 02.04.04.04	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	Pemerintah	Data Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	Si-Esi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.05	Layanan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Pemerintah	Data Dukung Pembangunan Zona Integritas	Si-Ezi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.06	Layanan Pengendalian Risiko Terintegrasi	Pemerintah	Data Manajemen Risiko Terintegrasi	Si-Pinter	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.07	Layanan Pencegahan Korupsi Daerah	Pemerintah	Data Area Intervensi Pencegahan Korupsi Daerah	Jaga	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,	Inspektorat

							PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
BJN-DAL 02.04.04.08	Layanan Pemantauan Progres Pembangunan	Pemerintah	Data Progres Pembangunan	e-Prog	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.09	Layanan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional	Pemerintah	Data Perkembangan Reformasi Birokrasi Nasional	Portal RB	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.10	Layanan Reviu RKA Elektronik Kemendagri	Pemerintah	Data Reviu RKA	e-Reviu Kemendagri	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.11	Layanan Audit SPBE	Pemerintah	Data Audit Aplikasi	Audit Tools	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN,	Inspektorat

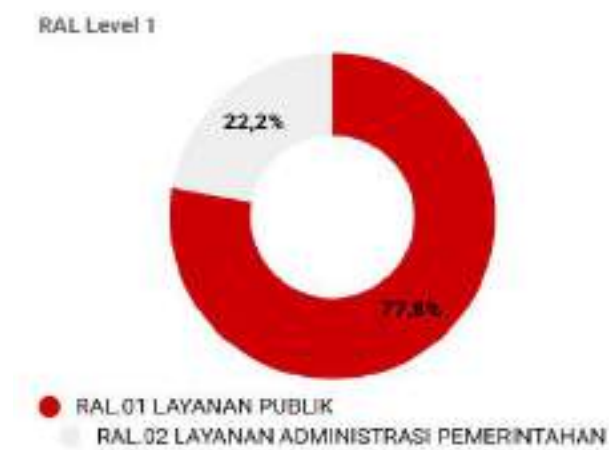
							DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
BJN-DAL 02.04.04.12	Layanan Informasi Kegiatan DPRD	Pemerintah	Data Kegiatan DPRD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretaris DPRD
BJN-DAL 02.04.04.13	Layanan Fasilitasi Rapat	Pemerintah	Data Rapat Badan Anggaran, Data Rapat Panitia Khusus, Data Rapat Paripurna DPRD, Data Rapat Kerja Komisi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretaris DPRD
BJN-DAL 02.04.05.01	Layanan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pemerintah	Data Pelayanan Publik dan Tata Laksana		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
BJN-DAL 02.04.05.02	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Pemerintah	Data SKM	SUKMA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
BJN-DAL 02.04.05.03	Layanan Legilasi Daerah	Pemerintah	Data Legilasi Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sekretaris DPRD

BJN-DAL 02.04.06.01	Layanan Administrasi Persuratan	Pemerintah	Data Arsip Surat Masuk dan Keluar	AFIFAH	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGAR AN KEARSIPAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.04.06.01	Layanan Dokumentasi Surat Menyurat dan Kearsipan	Pemerintah	Data Surat Menyurat dan Kearsipan	SISAPU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGAR AN KEARSIPAN	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 02.04.06.01	Layanan Arsip Dinamis	Pemerintah	Data Arsip Dinamis	SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGAR AN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 02.04.06.02	Layanan Pembinaan Kearsipan	Pemerintah	Data Pembinaan Kearsipan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGAR AN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 02.04.06.03	Layanan Restorasi Arsip	Pemerintah	Data Restorasi Arsip		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGAR AN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 02.04.06.04	Layanan Peminjaman Arsip	Pemerintah	Data Peminjaman Arsip		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGAR AN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 02.05.05.01	Layanan Manajemen Rapat	Pemerintah	Data Manajemen Rapat	SMART BIMA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.05 KESEKRETARIATA N NEGARA	RAL.02.05.05 PENYELENGGAR AN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGG AAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA,	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

							DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN	

3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan

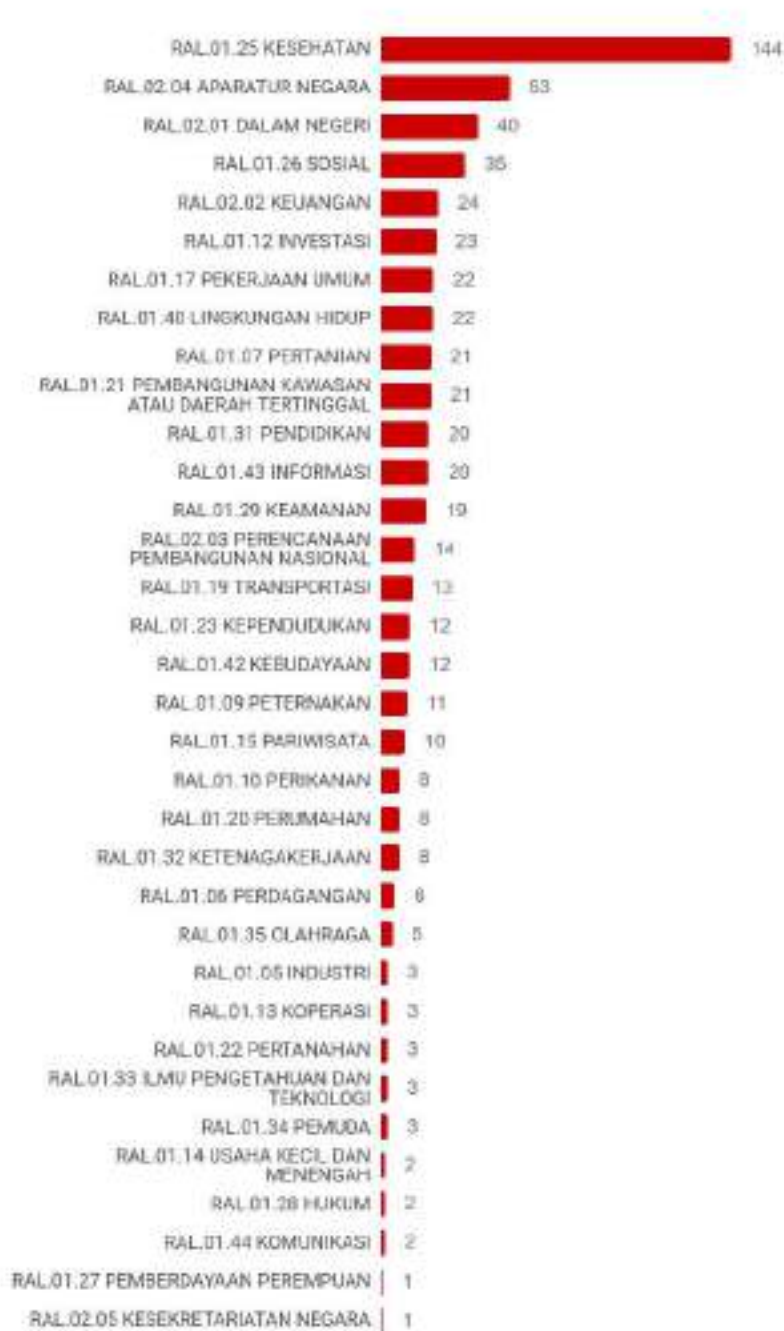
Merujuk pada hasil pemetaan layanan pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2.3.2.1. Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

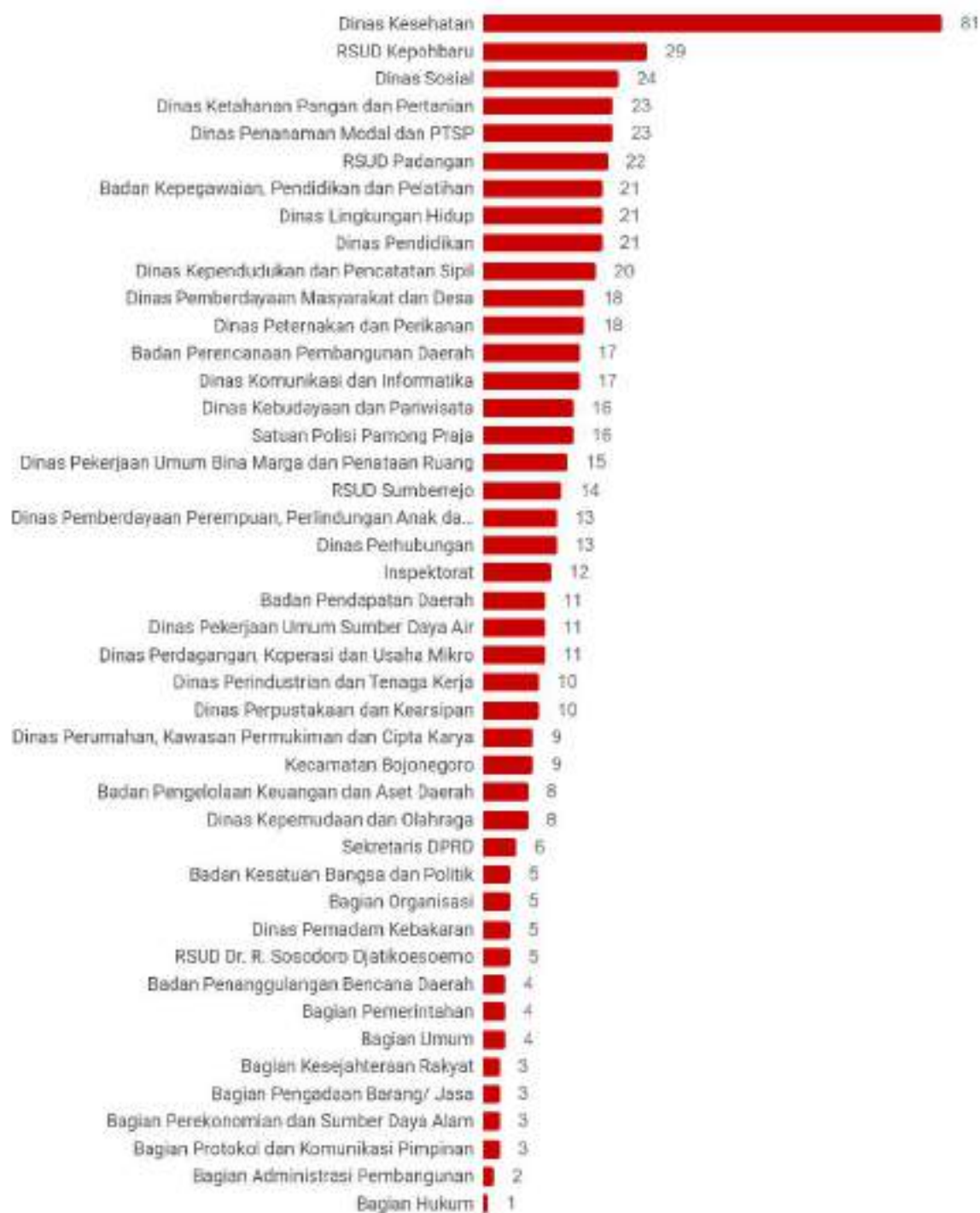
Berdasarkan grafik 3.2.3.2.1 serta mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional (RAL Level 1) dari total 594 layanan yang dimiliki, terdapat 77.8% (462 Layanan) merupakan RAL.01 Layanan Publik dan sebesar 22.2% (132 Layanan) merupakan RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan. Mengacu pada referensi arsitektur ini, mayoritas layanan yang ada merupakan layanan publik untuk masyarakat dimana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menjadikannya sebagai panduan untuk memfasilitasi kerjasama antara instansi pemerintah/perangkat daerah dalam pengembangan layanan publik dan juga membantu pemerintah dalam merancang dan mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan transparan.

RAL Level 2



Grafik 3.2.3.2.2 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Grafik 3.2.3.2.2 dapat dilihat RAL Level 2 yang paling banyak adalah RAL.01.25. Kesehatan sejumlah 144 layanan, RAL.02.04 Aparatur Negara sejumlah 53 layanan dan RAL.02.01 Dalam Negeri sejumlah 40 layanan. Referensi Arsitektur Layanan Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencakup 34 Referensi dari 52 Arsitektur Layanan Nasional. Perbedaan pada jumlah layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menyesuaikan pada tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Grafik 3.2.3.2.3. Grafik Jumlah Layanan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.3. menunjukkan bahwa layanan paling banyak dimiliki oleh Dinas Kesehatan sejumlah 81 layanan dan RSUD Kepohbaru sejumlah 29 layanan. Sedangkan paling sedikit berada pada Bagian Hukum yang hanya memiliki 1 layanan. Berdasarkan hasil survei, keseluruhan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah memerlukan verifikasi agar layanan dapat terstandarisasi serta memastikan layanan tersebut berjalan optimal.

3.2.4. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi berisi gambaran mengenai berbagai komponen seperti nama aplikasi, basis aplikasi, basis data. Arsitektur layanan juga menggambarkan keterkaitan antara aplikasi dengan layanan dan output datanya. Arsitektur ini disusun bertujuan untuk menyediakan panduan dan struktur untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal, memiliki keamanan yang memadai, dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

3.2.4.1. Katalog Aplikasi

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE Nasional merupakan sebuah aplikasi internal daerah maupun instansi pusat yang digunakan dalam menunjang layanan seluruh perangkat daerah. Berikut ini disajikan daftar aplikasi *eksisting* yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 1 dan 2 mengacu pada referensi arsitektur aplikasi SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog aplikasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog aplikasi yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Aplikasi.**

Tabel 3.2.4.1.1. Cuplikan Katalog Aplikasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.01	SSCASN	Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara	https://sscasn.bkn.go.id	Layanan Pendaftaran ASN	Data Calon ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.02	SIGA	Sistem Informasi Keluarga	https://siga.bkkbn.go.id/	Layanan Pencatatan Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB, Layanan Pelayanan Keluarga Berencana, Layanan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi, "Layanan Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia", Layanan Pembentukan Kelompok PIK Remaja, Layanan Pelaporan Program Keluarga Berencana, Layanan Pelaporan Pelayanan KB	Data Pengguna Pelayanan KB, Data Pelayanan Keluarga Berencana, Data Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi, "Data Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia", Data Pembentukan Kelompok PIK Remaja, Data Penerimaan Layanan Program KB, Data Pelayanan KB	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana"
BJN-DAA 01.01.03	ODS	Online Data Sistem Koperasi	cag.kemenkopukm.go.id	Layanan Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.04	SIMPD	Sistem Informasi Manajemen Pasar Daerah		Layanan Pengelolaan PAD Pasar Daerah	Data Sewa Lapak	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"
BJN-DAA 01.01.05	SmartPJU	Sistem Informasi Laporan Penerangan Jalan Umum		Layanan Pengaduan Kerusakan PJU	Data Penanganan Kerusakan PJU	Desktop	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya"
BJN-DAA 01.01.06	Cek Pembayaran	Aplikasi monitoring status pembayaran semua jenis pajak daerah	https://pajakonline .bojonegorokab.go .id/	Layanan Pajak Daerah Lainnya	Data Pembayaran Pajak Daerah Lainnya	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.01.07	DIJAMIN MINUL	Digitalisasi Pajak Mamin	https://pajakonline .bojonegorokab.go .id/	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.08	e-BPHTB	Layanan BPHTB Digital	https://pajakonline.bojonegorokab.go.id/	Layanan BPHTB	Data Pemungutan BPHTB	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.01.09	e-Payment	Aplikasi pembayaran pajak daerah melalui QRIS	https://pajakonline.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pajak Daerah Lainnya	Data Pembayaran Pajak Daerah Lainnya	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.01.10	e-PBB	Layanan PBB-P2 digital untuk wajib PBB-P2	https://pajakonline.bojonegorokab.go.id/	Layanan PBB - P2	Data Tagihan PBB-P2, Data Pembayaran PBB-P2	Web Based	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.01.11	eMAP	Peta Digital Wajib Pajak Daerah I	https://emap.bapedabojonegoro.id/	Layanan Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	Data Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.12	SMART MAP	Peta Objek PBB-P2		Layanan PBB - P2	Data Peta Objek Pajak PBB-P2	Desktop	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.01.13	BIA	Aplikasi Lomba Inovasi	https://bia.bojonegorokab.go.id/	Layanan Bojonegoro Innovative Award	Data Lomba Bojonegoro Innovative Award	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 01.01.14	JDIH	Sistem Informasi Manajemen Perizinan di Kabupaten Bojonegoro	jdih.bojonegorokab.go.id	Layanan Pengelolaan Informasi Hukum	Data Produk Hukum Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Bagian Hukum
BJN-DAA 01.01.15	TPIN	Tim Pengendalian Inflasi Nasional	tpin.id	Layanan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Data Program Kegiatan TPAKD	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.16	e-Hakcipta	Sistem Informasi Hak Cipta	https://e-hakcipta.dgip.go.id/	Layanan Pendataan Hak Cipta	Data Sertifikat HKI	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAA 01.01.17	e-Ticketing	Sistem Informasi Pembayaran Ticketing		Layanan Kunjungan PIG (Pusat Informasi Geologi) dan Tempat Wisata	Data Kunjungan Wisata	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAA 01.01.18	ETNIK	Layanan untuk Pendaftaran/Perpanjangan Nomor Induk Kesenian secara Elektronik	https://wisatabojonegoro.com/pendaftaran-etnik-baru/	Layanan Pendaftaran dan Perpanjangan Nomor Induk Kesenian	Data Nomor Induk Kesenian	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAA 01.01.19	WISATA BOJONEGORO	Layanan Informasi terkait Destinasi Wisata Bojonegoro	https://wisatabojonegoro.com/#	Layanan Destinasi Wisata	Data Destinasi Wisata	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.20	IKD	Identitas Kependudukan Digital	https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&hl=id&pli=1	Layanan Identitas Kependudukan Digital	Data Identitas Kependudukan Digital	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAA 01.01.21	Emergency Button Bojonegoro	Dipakai oleh masyarakat untuk meminta bantuan ke Command Center PSC, dapat dipakai juga untuk mendapatkan informasi seputar PSC.	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.psc.119.bojonegoro.eb	Layanan Kegawatdaruratan Medis	Data Panggilan Kegawatdaruratan Masyarakat	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.22	Keamanan Vaksin	Aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan serta monitoring KIPI	https://keamananvaksin.kemkes.go.id/	Layanan Imunisasi	Data KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.23	Sehat Indonesiaku	Aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan serta monitoring capaian Imunisasi	https://sehatindonesiaku.kemkes.go.id	Layanan Imunisasi, Layanan Cek Kesehatan Gratis, Layanan Pencegahan dan Pengendalian PTM	Data Imunisasi Bayi, Data Imunisasi Baduta, Data Imunisasi TT Bumil dan WUS, Data Imunisasi Anak Sekolah, Data Pendaftaran Cek Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Gratis, Data Cek Kesehatan Gratis, Data Kehadiran Cek Kesehatan Gratis, Data Deteksi Dini PTM, Data Faktor Risiko PTM, Data Kasus PTM					
BJN-DAA 01.01.24	SIHA	Sistem Informasi HIV-AIDS	https://sihapims2.kemkes.go.id	Layanan Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS, Layanan Penggunaan Obat Program HIV, Layanan Perawatan Pasien, Layanan Pelaporan Pasien HIV, Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan HIV AIDs	Data Pemeriksaan HIV, Data Positif HIV, Data OHDIV on ARV, Data Logistik HIV, Data Tes Viralload HIV, Data Penggunaan Obat Program HIV, "Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Pasien HIV, Data Pemeriksaan HIV AIDs	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.25	SIHEPI	Aplikasi pelaporan penyakit Hepatitis kementerian kesehatan	https://sihepi.kemkes.go.id/	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis dan Diare	Data Ibu Hamil Periksa Hepatitis B, Data Ibu Hamil Positif Hepatitis B, Data Bayi Positif Hepatitis B HBIG,	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Data Kasus Diare, Data Logistik Diare, Data Kasus Diare Dehidrasi					
BJN-DAA 01.01.26	SIKELIM	Aplikasi Sistem Informasi digunakan untuk mencatat dan melaporkan pengelolaan limbah medis ditingkat fasyankes	https://sikelim.kemkes.go.id/	Layanan Pengelolaan Limbah, Layanan Pelaporan Limbah Medis Rumah Sakit	Data Pengelolaan limbah, Data Pengelolaan Limbah Medis Padat dan Cair RS	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.27	SILANTOR	Sistem Surveilans Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	https://silantor.kemkes.go.id/	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Vektor	Data Pemetaan Angka Bebas Jentik, Data Registrasi Puskesmas	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.28	SIMKESWA	aplikasi berbasis website untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi terkait kesehatan jiwa	simkeswa.kemkes.go.id	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	Data Obat Jiwa, Data Bunuh Diri, Data Pasung, Data ODGJ, Data Skrining Kesehatan Jiwa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.29	SIMPKT	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	sippkt.dinkes.jatimprov.go.id	Layanan Kesehatan Tradisional	Data Kesehatan Tradisional	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.30	Simultan PME	Aplikasi untuk pelaporan PME	http://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id	Layanan PME	Data Laporan PME	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.31	SINAPZA	Sistem Informasi NAPZA yang digunakan untuk pelaporan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kesnewsinapza&pcampaignid=web_share	Layanan Pencegahan dan Pengendalian NAPZA	Data Skrining Penggunaan NAPZA	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.32	SIPATAS	Sistem perizinan praktik tenaga kesehatan	https://sipatas.dinkeskabbojonegoro.com/	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.33	SIPEKAM	Aplikasi Sistem Informasi digunakan untuk mencatat dan melaporkan data Pengawasan Kualitas Air Minum	pkam.kemkes.go.id	Layanan Pengawasan Kualitas Air Minum	Data Pengawasan Kualitas Air Minum	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.34	SIPNAP	Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional	https://sipnap.kemkes.go.id/	Layanan Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional, Layanan Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan NAPZA	Data Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika, "Data Penerimaan, Penggunaan dan Stok Sediaan NAPZA"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.35	SIRS ONLINE	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengetahui data profil dan kunjungan Rumah Sakit se-Kabupaten Bojonegoro	https://sirs6.kemkes.go.id/	Layanan Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	Data Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.36	SISDMK	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	https://sisdmk.kemkes.go.id/	Layanan Manajemen SDM Fasyankes, Layanan Informasi Sumber Daya Manusia	Data SDM Fasyankes, Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Kesehatan						
BJN-DAA 01.01.37	SISKOHATKES	Sistem Komputerisasi Haji terpadu Bidang Kesehatan	https://siskohatkes.kemkes.go.id/authenticate/login	Layanan Haji	Data Pemeriksaan Jemaah Haji	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.38	SISMAL	Sistem Informasi Surveilans Malaria	https://sismal.kemkes.go.id	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria, Layanan Kasus Malaria	Data Kelengkapan Laporan (Zero Repport), Data Ketepatan PE, Data Pengobatan Standart Malaria, Data Registrasi Kasus Positif Malaria, Data Registrasi Pemeriksaan Malaria, Data Dasar Penduduk, Data Logistik Stok, Data Dasar Faskes, Data Pelapor, Data Laporan Kasus Malaria	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.39	SISRUTE	Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional (SISRUTE) adalah aplikasi yang membantu proses rujukan pasien ke rumah sakit	https://sisrute.kemkes.go.id/	Layanan Rujukan Pasien ke Fasilitas Kesehatan, Layanan Rujuk Pasien	Data Rujukan Pasien Fasilitas Kesehatan, Data Rujukan Keluar dan Masuk Pasien, Data Rujukan Keluar dan Rujukan Masuk Pasien	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.40	SISTBM	Aplikasi Sistem Informasi digunakan untuk mencatat dan melaporkan data 5 Pilar STBM	https://monev-stbm.kemkes.go.id/	Layanan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.41	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis	https://jatim.sitb.id/sitb2024/app	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC, Layanan Monitoring TB, Layanan Penggunaan Obat Program TB, Layanan Perawatan Pasien, Layanan Pelaporan Pasien TBC, Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan TB	Data Pasien TBC, Data Terapi Pencegahan TBC, Data Investigasi Kontak, Data Manajemen Laboratorium TBC, Data Manajemen Logistik TBC, Data Keuangan Pengajuan Klaim TCM, Data Penggunaan Obat Program TB, Data Laporan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Monitoring TB,Data Pasien TBC RSUD Kepohbaru,Data Pemeriksaan TB,Data Terduga TBC					
BJN-DAA 01.01.42	SITKO	Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	sitko.kemkes	Layanan Kesehatan Pekerja, Layanan Kesehatan Olahraga	Data Laporan Kesehatan Pekerja, Data Laporan Kesehatan Olahraga	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.43	SKDR	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	https://skdr.surveilans.org/aggregate-puskesmas	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensi Wabah/KLB	Data Kasus Potensi Wabah/KLB, Data Kasus Pengiriman Sampel, Data Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Mingguan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.44	SMILE IMUNISASI	Aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan serta monitoring pemakaian vaksin dan logistik Imunisasi	https://imunisasi-logistik.kemkes.go.id/id/login	Layanan Imunisasi, Layanan Ketersediaan Vaksin dan Logistik Vaksin	Data Ketersediaan Vaksin, Data Logistik Imunisasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.45	SMILE Logistik	Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan secara Elektronik	https://logistik.sml-indonesia.id/	Layanan Ketersediaan Obat Program ATM dan PKG, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Data Laporan Ketersediaan Obat Program ATM dan PKG, Data Logistik Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.46	SPPIRT	Perizinan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	https://sppirt.pom.go.id/	Layanan Perizinan PIRT	Data Perizinan SPPIRT	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.47	Web Imunisasi	Aplikasi untuk pelaporan dan monitoring cakupan Imunisasi	https://imunisasi.dinkes.jatimprov.go.id/	Layanan Imunisasi	Data Imunisasi Bayi, Data Imunisasi Baduta, Data Imunisasi TT Bumil dan WUS, Data Imunisasi Anak Sekolah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.48	Helpdesk TIK	Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Layanan Helpdesk TIK	Data Aduan Kendala TIK	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.49	PPID	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	https://ppid.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pelaksanaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	Data Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.01.50	Sapa Bupati	Sistem Informasi Informasi Publik		"Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	"Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.01.51	Situs Web Pemkab	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	https://bojonegorokab.go.id	Layanan Pengelolaan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	Data Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.01.52	SP4N LAPOR	Sistem layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	lapor.go.id	"Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	"Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.53	SIPETARUNG	Sistem Informasi Penataan Ruang	sipetarung.bojonegorokab.go.id	Layanan Informasi Tata Ruang	Data Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAA 01.01.54	SISAPU	Sistem Informasi Data Bojonegoro	sisapu.bojonegorokab.go.id	Layanan Dokumentasi Surat Menyurat dan Kearsipan	Data Surat Menyurat dan Kearsipan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAA 01.01.55	SMART BIMA	Sistem Perizinan Berusaha Yang Terintegrasi Secara Elektronik	smartbima.bojonegorokab.go.id	Layanan Manajemen Rapat	Data Manajemen Rapat	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAA 01.01.56	SIPUSDA	Aplikasi SiPUSDA merupakan Portal Satu Data Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro. Sipusda memberikan kemudahan dalam menyimpan (save), memvisualisasikan (publish),	https://sipusda.bojonegorokab.go.id/	Layanan Smart Monitoring dan Survey Sumber Daya Air di Bojonegoro	Data Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		menggunakan (using), berbagi data (share), serta smart monitoring & survey terkait Sumber Daya Air Bojonegoro.								
BJN-DAA 01.01.57	SID	Profil Desa	sid.kemendesa.go.id	Layanan Perencanaan Pembangunan Desa	Data Perencanaan Pembangunan Desa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 01.01.58	BKPM PIR	Sistem Informasi Potensi Investasi		Layanan Sarana Informasi Investasi	Data Sarana Informasi Investasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAA 01.01.59	Mal Pelayanan Publik	Mall Pelayanan Publik	https://mpp.bojonegorokab.go.id/beranda	Layanan MPP	Data Pelayanan MPP	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.60	OSS RBA	Online Single Submission	oss.go.id	Layanan Perizinan Berusaha Risiko Rendah, Layanan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah, Layanan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi, Layanan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi, Layanan Perizinan Berusaha UMKU, Layanan Kegiatan Penanaman Modal, Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal, Layanan Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan, Layanan Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan, Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha, Layanan	Data Perizinan Berusaha Risiko Rendah, Data Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah, Data Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi, Data Perizinan Berusaha UMKU, Data Kegiatan Penanaman Modal, Data dan Informasi Penanaman Modal, Data Perizinan Bidang Bina Usaha Perdagangan, Data Izin Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan, Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha, Data Permohonan Persetujuan Lingkungan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Permohonan Persetujuan Lingkungan						
BJN-DAA 01.01.61	Pengambilan Antrian	Sistem Informasi Antrian MPP		Layanan MPP	Data Pelayanan MPP	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAA 01.01.62	Point Jatim	Sistem Informasi Peta Potensi Investasi		Layanan Sarana Informasi Investasi	Data Sarana Informasi Investasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAA 01.01.63	SIM TUNJANGAN	SIM TUNJANGAN	https://simtun.gtk.dikdasmn.go.id/login	Layanan Informasi Manajemen Tunjangan Guru	Data Manajemen Tunjangan Guru	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pendidikan
BJN-DAA 01.01.64	APEL GRATIS	Sistem Informasi Angkutan Pelajar Gratis	apelgratis.bojonegoro.kab.go.id	Layanan Angkutan Pelajar Gratis	Data Angkutan Pelajar Gratis	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.65	Bojonegoro TIC	Bojonegoro Traffic Information Center	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bojonegorokab.boti&hl=id&pli=1	Layanan Pelayanan Parkir	Data Parkir	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan
BJN-DAA 01.01.66	DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	https://merek.dgip.go.id/	Layanan Fasilitas Legalitas Merk	Data Pemohon Legalitas Merk	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAA 01.01.67	SiapKerja	Sistem Informasi Lowongan Kerja	https://siapkerja.kemnaker.go.id/	Layanan Rekomendasi Paspor ID CPMI	Data Calon Pekerja Migran Indonesia	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAA 01.01.68	SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional	https://siinas.kemenerin.go.id	Layanan Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan Siap Beroperasi, Layanan Pengawasan dan Pengendalian Teknis dan Surat Keputusan Siap Beroperasi	Data Pemenuhan Persyaratan Izin Terverifikasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.69	Siti Worobejo	Sistem Informasi Terpadu Industri dan Wong Bojonegoro ben Iso Kerjo		Layanan Informasi Lowongan Kerja	Data Lowongan Pekerjaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAA 01.01.70	e-Dabu Pemda	Elektronik Data Badan Usaha	https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/Home/Login	Layanan PBI-KIS	Data Kepesertaan BPJS Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial
BJN-DAA 01.01.71	SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation	https://siks.kemensos.go.id/login	Layanan Rekomendasi DTKS (KIP/Beasiswa/Subsidi listrik), Layanan Rekomendasi KKS-BPNT, Layanan Rekomendasi 1 Desa 10 Sarjana, Layanan Surat Keterangan Penerima PKH	Data Keluarga Miskin Terdata DTKS, Data Pemohon Hilang Kartu, Data Beda Identitas Bank, Data Penerima PKH	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.72	Jaga	Sistem Informasi Progres Pembangunan	https://jaga.id/	Layanan Pemantauan Administrasi LHP BPK	Data Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Inspektorat
BJN-DAA 01.01.73	ePLKK	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Inhealth	https://e-plkk.bpjs.ketenagakerjaan.go.id/	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 01.01.74	KESAN BPJS KESEHATAN	Kesan dan Pesan Setelah Pelayanan BPJS Kesehatan	https://kesan.bpjs-kesehatan.go.id/kesan/survey/search/ew0KlmtkcHBrIjogljEzMjcwMTAzliwNCiJubXBwayl6lCJkYXRpICsDOoi a2RkYXRpMil6lClwMjEzlg0KfQ	Layanan Pengaduan Masyarakat	Data Pengaduan Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 01.01.75	Vclaim BPJS Kesehatan	Sistem Informasi Klaim BPJS	https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/vclaim	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.76	SIGIZI	Sistem Informasi Maternal dan Neonatal	https://sigizikesga.kemkes.go.id/	Layanan Perawatan Pasien, Layanan Pelaporan Balita Gizi Buruk	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Balita Gizi Buruk	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 01.01.77	SIMATNEO	Maternal Perinatal Death Notification	https://simatneo.kemkes.go.id/	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", "Data Fasilitas, SDM, dan Kemampuan RS Rujukan Neonatal"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Kepohbaru, RSUD Padangan
BJN-DAA 01.01.78	SIRS	Sistem Informasi Antrian dan Pelayanan RS	https://sirs.kemkes.go.id/	Layanan Perawatan Pasien, Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit, "Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan Biogran, Kultur, dll"	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Rumah Sakit, Data Pemeriksaan PPRA	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Kepohbaru, RSUD Padangan
BJN-DAA 01.01.79	e-PLKK	Elektronik Pusat Layanan Kecelakaan Kerja	https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan	Data Klaim Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Penjaminan BPJS Ketenagakerjaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Kepohbaru

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.80	JRCARE	Jasa Raharja Care	https://jrcare.id/portal/home	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan oleh Jasa Raharja	Data Klaim Pasien Penjaminan Jasa Raharja	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 01.01.81	SIPP	Saluran Informasi Penanganan Pengaduan	https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/access/signin	Layanan Pengaduan Keluhan Peserta BPJS Kesehatan	Data Peserta BPJS Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 01.01.82	SIRS JATIM	Sistem Informasi Rumah Sakit	https://sirs.dinkes.jatimprov.go.id/index.php/login	Layanan Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur	Data Indikator Rumah Sakit, Data Kunjungan, Data Penyakit	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 01.01.83	VCLAIM	Virtual Claim	https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id	Layanan Klaim Pembiayaan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan	Data Klaim Pelayanan Rumah Sakit Terhadap Penjaminan BPJS Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Kepohbaru

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.84	SIMAR	Sistem Informasi Mutu Akreditasi Rujukan	https://mutufasya.nkes.kemkes.go.id/simar/	Layanan Pelaporan Indikator Mutu Nasional dan HAIs	Data Capaian Indikator Mutu Nasional dan HAIs	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Padangan
BJN-DAA 01.01.85	TACS	Traffic Accident Claim System	http://www.tacslan.tas.id/	Layanan Pengajuan Laporan Penjaminan Asuransi / Jasa Raharja / BPJS untuk Korban Laka Lantas	Data Pengajuan Laporan Penjaminan Asuransi / Jasa Raharja / BPJS	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Padangan
BJN-DAA 01.01.86	SAPA-SOULMATE	Pemberian Informasi Obat	https://rsudsumberejo.my.id/	Layanan Pendaftaran Antrian Pasien Online	Data Pendaftaran Pasien Online	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 01.01.87	SI-IMUT-Misterbian	Sistem Informasi Asuhan Keperawatan	https://misterbian-rsudsbi.com	Layanan pelaporan indikator mutu	Data indikator mutu	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Sumberrejo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.88	SIM-RS	Sistem Administrasi Pendaftaran Antrian Sosial Media		Layanan pengelolaan data rumah sakit terintegrasi	Data Renja, Data Pokok-Pokok Pikiran Dewan, Data Musrenbang, Data Perencanaan RPJMD, Data Perencanaan RPJPD	Desktop	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 01.01.89	Gatramas	Sistem Jaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	gatramas.bojonegoro.kab.go.id	Layanan Penertiban Pelanggaran Trantibum, Layanan Penegakan Perda, Layanan Garuda Mas, Layanan Data Aset Pos Kampling, Layanan Manajemen Anggota Satlinmas, Layanan Sarana dan Prasarana Trantibum	Data Pelanggaran Trantibum, Data Penegakan Perda, Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro, Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro, Data Sarana dan Prasarana Trantibum	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAA 01.01.90	JDIH DPRD	Sistem informasi Produk Hukum	jdih-dprd.bojonegoro.kab.go.id	Layanan Informasi Produk Hukum DPRD	Data Produk Hukum DPRD	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Sekretaris DPRD

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.01	e Kinerja	Elektronik Kinerja	https://kinerja.bkn.go.id/	Layanan Penilaian Kinerja	Data SKP	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"
BJN-DAA 01.02.01	e-Formasi	Elektronik Formasi	https://formasi.menpan.go.id/	Layanan Usulan Kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan	Data Usulan Tenaga Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"
BJN-DAA 01.02.01	e-LHKPN	Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	https://elhkp.kpk.go.id/	Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Data WP LHKPN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"
BJN-DAA 01.02.02	I Mut	Integrated Mutasi	https://imut.bkn.go.id/	Layanan Mutasi Promosi	Data SK Mutasi/Promosi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.03	SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	https://siasn-instansi.bkn.go.id/	Layanan Perbaikan Nama/ NIP, Layanan Perencanaan SOTK, Layanan Kenaikan Pangkat, Layanan Pencantuman Gelar, Layanan Penambahan Masa Kerja (PMK), Layanan Mutasi Antar Daerah, Layanan Pensiun PNS, Layanan Cuti, Layanan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Data Nama dan NIP, Data SOTK, Data SK Kenaikan Pangkat, Data Pertimbangan Teknis BKN, Data SK PMK PNS, Data SK Mutasi, Data Pensiun, Data Cuti PNS, Data Kelembagaan, Data Anjab	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"
BJN-DAA 01.02.03	SIOLA	Sistem Informasi Online Layanan Administrasi	https://ula.kemendagri.go.id/	Layanan Satya Lancana Karya Satya	Data SK Satya Lencana Karya Satya	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"
BJN-DAA 01.02.04	SIMPEL	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Metrologi Legal	metrologi.kemendag.go.id	"Layanan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan"	Data Tera Ulang Alat Ukur, Data Tera Ulang Alat Takar, Data Tera Ulang Alat Timbang, Data Tera Ulang Alat Perlengkapan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.05	Siska Perbapo	Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok	siskaperbapo.jatimprov.go.id	Layanan Manajemen Data Harga Bahan Pokok	Data Harga Bahan Pokok	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"
BJN-DAA 01.02.06	SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok	sp2kp.kemendag.go.id	Layanan Manajemen Data Harga Bahan Pokok	Data Harga Bahan Pokok	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"
BJN-DAA 01.02.07	SIMBG	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	simbg.pu.go.id	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana, Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana, Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diluar Fungsi Hunian,	Data Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana, Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana, Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Diluar Fungsi Hunian, Data Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	"Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)						
BJN-DAA 01.02.08	SIMPATDU	Sistem Informasi Pajak Daerah Terpadu	https://pajakonline.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pajak Daerah Lainnya	Data Pembayaran Jenis Pajak Daerah Lainnya (PDL)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.02.09	SIMPEL BAPENDA	Aplikas administrasi pelayanan PBB-P2		Layanan Pelayanan PBB-P2	Data Pelayanan PBB-P2	Desktop	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.02.10	SMART REPORT	Aplikasi Pelaporan Pajak Daerah	https://pajakonline.bojonegorokab.go.id	Layanan Pelaporan Pembayaran Pajak Daerah Lainnya, Layanan Pajak Daerah Lainnya	Data Realisasi Pajak Daerah Lainnya	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.02.11	Smart Water System	Monitoring Water Meter	https://pajakonline.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pajak Air Tanah	Data Kubikasi Meteran Air	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.12	IGA	Aplikasi Lomba Inovasi	https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/	Layanan Innovative Government Award (IGA)	Data Lomba Bojonegoro Inovative Award	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 01.02.13	IPKD	Aplikasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	https://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/	Layanan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Pelaporan Keuangan Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 01.02.14	SIPD-RI	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/	Layanan Penyusunan RKPD, Layanan Penyusunan RPJMD, Layanan Penyusunan RPJPD, Layanan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah Berbasis Elektronik, Layanan Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Layanan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran	Data Renja, Data Pokok-Pokok Pikiran Dewan, Data Musrengbang, Data Perencanaan RPJMD, Data Perencanaan RPJPD, Data Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Data Kebijakan Umum APBD, Data Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Data Pertanggungjawaban	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Sementara, Layanan Akuntansi dan Investasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Layanan Perbendaharaan Penatausahaan Pelaksanaan APBD, Layanan Pencairan Anggaran Kelurahan	an Keuangan, Data SP2D, Data Anggaran Kelurahan					
BJN-DAA 01.02.15	e-Formasi Menpan	Elektronik Formasi Kebutuhan ASN	https://formasi.menpan.go.id/	Layanan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Data Kelembagaan, Data Anjab	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi
BJN-DAA 01.02.16	SIMONA	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja	https://simona.kemendagri.go.id/	Layanan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Data Kelembagaan, Data Anjab	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.17	SUKMA	Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik Kab. Bojonegoro	https://sukma.jatimprov.go.id	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Data SKM	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi
BJN-DAA 01.02.18	SILPPD	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	elppd.kemendagri.go.id	Layanan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Data Laporan LPPD	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan
BJN-DAA 01.02.19	SINAR BIG	Sistem Informasi Nama Rupabumi	sinar.big.go.id	Layanan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Data Nama Rupabumi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan
BJN-DAA 01.02.20	SIOLA Kemendagri	Aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi	ula.kemendagri.go.id	Layanan Administrasi Pemerintahan	Data Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.21	SIPENDEKAR	Sistem Informasi Pelayanan DPRD dan Kepala Daerah	https://sipendekar.ropem.jatimprov.go.id/	Layanan Administrasi Pemerintahan	"Data Usulan Kepala Daerah dan WKDH, dan Usulan DPRD"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan
BJN-DAA 01.02.22	SPM BANGDA	Aplikasi Standar Pelayanan Minimal	spm.bangda.kemendagri.go.id	Layanan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Data Laporan SPM	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan
BJN-DAA 01.02.23	e-Katalog	e-Katalog adalah sistem informasi belanja pemerintah berbasis elektronik yang juga dikembangkan oleh LKPP.	https://e-katalog.lkpp.go.id/	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAA 01.02.24	SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, aplikasi penyusunan paket pekerjaan fisik dan non fisik	https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginct/index	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.25	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	https://lpse.bojonegorokab.go.id/epr-oc4	Layanan Pengajuan dan Pelaksanaan Tender, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Tender, Data Non Tender, Data Non Tender Swakelola, Data Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAA 01.02.26	SIKAP	Sistem informasi kinerja penyedia	https://sikap.lkpp.go.id/	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Kinerja Penyedia	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
BJN-DAA 01.02.27	SITPAKD	Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit	https://sitpakd.ojk.go.id/	"Layanan Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan"	Data RKP dan Realisasi DBHCHT	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAA 01.02.28	e-Monev Satu	Aplikasi Sistem Informasi digunakan untuk mencatat dan melaporkan data Sarana Tempat Fasilitas Umum (TFU)	https://e-satu.kemkes.go.id/	Layanan Tempat Pengelolaan Pangan	Data Sarana Tempat Pengelolaan Pangan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.29	Komdat Ditjen Kesmas	Aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan data capaian indikator promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : Capaian posyandu aktif, Posyandu siklus hidup, Germas, Komunikasi Antar Pribadi, SBH, Data kader Posyandu	https://komdatkesmas.kemkes.go.id/home	Layanan Kampanye Germas, Layanan Posyandu Siklus Hidup, Layanan Penilaian Strata Kader Posyandu, Layanan Saka Bakti Husada, Layanan Komunikasi Antar Pribadi, Layanan Kesehatan Pekerja, Layanan Gizi Balita, Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Layanan Kesehatan Balita, Layanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, Layanan Kesehatan Usia Produktif, Layanan Kesehatan Usia Lanjut	Data Penggerakan GERMAS, Data Posyandu Siklus Hidup, Data Strata Kader Posyandu, Data Pangkalan SBH, Data Penerapan Komunikasi Antar Pribadi, Data Laporan Kesehatan Pekerja, Data PWS Ibu Hamil, Data LB3 Maternal, Data Pemantauan Ibu Hamil Risti, Data Bayi Baru Lahir, Data Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita, Data Bayi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi, Data Laporan PWS Anak, Data Laporan Skrining BBL, Data Laporan SDIDTK Balita, Data Laporan LB 3 Neonatal, Data Laporan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Kesehatan Remaja, Data Laporan Penjangkaran Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah, Data Laporan Pasangan Usia Subur Risti dan Metode Kontrasepsinya, Data Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, "Data Pelayanan KBPP, KB Baru, Komplikasi KB, Efek Samping", Data Pelayanan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak, Data Kesehatan Usia Lanjut					
BJN-DAA 01.02.30	MPDN	Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) adalah aplikasi pelaporan kematian maternal DAN Perinatal	https://mpdn.kemkes.go.id/	Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin, Layanan Kesehatan Balita, Layanan	Data Kematian Ibu, Data Kematian Bayi, Data Kematian Balita, "Data Rekam Medis, Biaya, dan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Perawatan Pasien, Layanan Pelaporan Kematian Maternal dan Perinatal	Kunjungan Pasien", Data Kematian Maternal dan Perinatal					
BJN-DAA 01.02.31	Mutu Fasyankes	Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	https://akun-yankes.kemkes.go.id/?continued=https://mutufasyankes.kemkes.go.id/halaman/landing	Layanan Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Data Pelaporan Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.02.32	REGISTRASI FASYANKES	Aplikasi pencatatan resmi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode fasyankes	https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/	Layanan Registrasi Fasyankes Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan	Data Praktik Mandiri Terdaftar	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.02.33	RS ONLINE	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengetahui data profil dan kunjungan Rumah Sakit se-Kabupaten Bojonegoro	https://akun-yankes.kemkes.go.id/	Layanan Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	Data Profil dan Kunjungan Rumah Sakit	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.34	SatuSehat SDMK	Portal untuk SDMK di Indonesia yang terpusat dan terintegrasi	https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk	Layanan Konsultasi Satusehat SDMK	Data Sarana Konsultasi Satusehat SDMK	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.02.35	SINTESA	Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro	https://sintesa.bojonegorokab.go.id	Layanan Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	Data Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.02.36	SINTESA EMAS (RME)	Aplikasi Rekam Medis Elektronik yang berfungsi sebagai aplikasi pelayanan di tingkat Puskesmas yang telah terhubung dengan platform SATUSEHAT, P-Care dan Web Antrian (MJKN BPJS)	https://sintesaemas.bojonegorokab.go.id	Layanan Kesehatan Primer	Data Kunjungan Pasien	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.37	EPUSLUH	Elektronik Penyuluhan	https://2025.epusluh.id/	Layanan Penyuluhan Pertanian	Data Penyuluhan Pertanian	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAA 01.02.38	INDAH	Sistem Monitoring kerentanan dan insiden Keamanan Informasi pada Aplikasi dan Server di Pusat Data	https://indah.bps.go.id/	Layanan Pembangunan Metadata Statistik Sektoral	Data Statistik Sektoral	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.02.39	Manajemen Sertifikat Elektronik	Sistem Monitoring Perangkat Jaringan Intra Pemerintah Daerah	bsre.bssn.go.id	Layanan Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik	Data Sertifikat Elektronik	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.02.40	Satu Data Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro	data.bojonegorokab.go.id	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral, Layanan Informasi Kondisi Jalan Kabupaten, Layanan Informasi Kondisi Jembatan Kabupaten, Layanan Tindakan Penertiban,	Data Statistik Sektoral, Data Penindakan Dengan Tindakan Penertiban, Data Penindakan Dengan Tindakan Persuasif, Data Penindakan Represif, Data Penindakan Dengan Tindakan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Tindakan Persuasif, Layanan Tindakan Represif, Layanan Tindakan Yustisi, Layanan Tindakan Non Yustisi, Layanan Penertiban Bangunan Liar, Layanan Data Aset Pos Kampling, Layanan Manajemen Anggota Satlinmas, Layanan Pengaduan Kerusakan PJU, Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung, Layanan Fasilitasi Pembangunan SPAM, Layanan Pemeliharaan Saluran Air, Layanan Fasilitas Pembuangan MCK,	Yustisi, Data Penindakan Dengan Non Yustisi, Data Penertiban Bangunan Liar, Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro, Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro, Data Jalan Kabupaten, Data Jembatan Kabupaten, Data Penanganan Kerusakan PJU, Data Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung, Data Pembangunan SPAM, Data Pemeliharaan Saluran Air, Data Pembuangan MCK, Data Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Data CCTV					

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Fasilitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Layanan CCTV						
BJN-DAA 01.02.41	SIA SPBE V-2	Rekomendasi Kegiatan Statistik Online	https://arsitektur.spbe.go.id/	Layanan Tatakelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government	Data Ekosistem e-Government	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.02.42	IKLH	Aplikasi Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login	Layanan Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Layanan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Data Penanaman	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAA 01.02.43	SIPSN	memberikan akses transparan kepada masyarakat terkait kondisi pengelolaan sampah di seluruh Indonesia	https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/login	Layanan Pengelolaan Sampah TPA	Data Sampah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.44	IDM	Indeks Desa Membangun	idm.kemendesa.go.id	Layanan Pembinaan Peningkatan Indeks Desa Membangun	Data Indeks Ketahanan Lingkungan, Data Indeks Ketahanan Ekonomi, Data Indeks Ketahanan Sosial	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 01.02.45	PRODESKEL	Sistem Profil Desa	prodeskel.binapades.kemendagri.go.id	Layanan Profil Desa dan Kelurahan	Data Potensi Wilayah Desa dan Kelurahan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 01.02.46	SDGS Desa	Capaian 18 goals SDGS Desa	dashboard-SDGS.kemendesa.go.id	Layanan Pembinaan Pembangunan Desa Berkelanjutan	Data Indikator Pembangunan Desa Berkelanjutan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 01.02.47	MPP Digital	MPP (Mal Pelayanan Publik) Digital adalah layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dalam satu platform	https://admin.mppdigital.go.id	Layanan Perizinan Tenaga Kesehatan	Data Perizinan Tenaga Kesehatan	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.48	Satu Data BKPM	Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi	https://data.bkpm.go.id/home	Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal	Data dan Informasi Penanaman Modal	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAA 01.02.49	DAPODIK	DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)	https://dapo.dikdasmen.go.id/	Layanan Data Pokok Pendidikan	Data Pokok Pendidikan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAA 01.02.50	E-SPM	PELAPORAN PENERAPAN SPM (E-SPM)	https://spm.bangd.a.kemendagri.go.id/	Layanan Standart Pelayanan Minimal	Data Standart Pelayanan Minimal	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Pendidikan
BJN-DAA 01.02.51	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	https://srikandi.arsip.go.id	Layanan Arsip Dinamis	Data Arsip Dinamis	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.52	ISIKHNAS	Sistem informasi kesehatan hewan Nasional	https://isikhnas.pertanian.go.id/	Layanan Kesehatan Hewan	Data Kesehatan Hewan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAA 01.02.53	Portal Data KKP	Portal Data Kementerian Kelautan dan Perikanan	https://portaldata.kkp.go.id	Layanan Data Pokok Perikanan	Data Pokok Perikanan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAA 01.02.54	Audit Tools	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	https://audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/	Layanan Audit SPBE	Data Audit Aplikasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
BJN-DAA 01.02.55	e-Reviu Kemendagri	Audit Tools Aplikasi dan Infrastruktur SPBE	e-reviu.kemendagri.go.id	Layanan Reviu RKA Elektronik Kemendagri	Data Reviu RKA	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.56	Portal RB	Sistem e-Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	portalrb.id	Layanan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional	Data Perkembangan Reformasi Birokrasi Nasional	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
BJN-DAA 01.02.57	Si-Pinter	Aplikasi Pencegahan Korupsi	https://si-pinter.siapwaspada.site/	Layanan Pengendalian Risiko Terintegrasi	Data Manajemen Risiko Terintegrasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
BJN-DAA 01.02.58	SIKAD	Layanan Pemantauan Administrasi LHP BPK	https://eauditee.bpk.go.id/login-page-new-sikad	Layanan Pemantauan Kerugian Daerah	Data Kerugian Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
BJN-DAA 01.02.59	SIPTL	Survey Internal Elektronik terkait Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	https://eauditee.bpk.go.id/login-page-new	Layanan Pemantauan Administrasi LHP BPK	Data Tindak Lanjut BPK	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.60	HFIS BPJS	Sistem Informasi Pelaporan Tuberkulosis	https://hfis.bpjs-ke sehatan.go.id/hfis/ /	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 01.02.61	HFIS BPJS KESEHATAN	Health Facilities Information System	https://hfis.bpjs-ke sehatan.go.id/hfis/ /login	Layanan Informasi Kesehatan Kerjasama BPJS Kesehatan	Data Layanan Kesehatan Rumah Sakit	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 01.02.62	IKP	Indikator Keselamatan Pasien	https://mutufasya nkes.kemkes.go.id /	Layanan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)	Data Insiden Keselamatan Pasien RS	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 01.02.63	INM RS	Rekomendasi Data Statistik	https://mutufasya nkes.kemkes.go.id /	Layanan Indikator Mutu Nasional (IMN) Rumah Sakit	Data Capaian Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Kepohbaru

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.02.64	SuKMa-e Jatim	Sistem Informasi Damar Husada Paripurna	https://sukma.jatimprov.go.id/fe	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Kepohbaru, RSUD Padangan
BJN-DAA 01.02.65	E-Ukom System	Sistem Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	https://jabfung-na.kes.kemkes.go.id/eukom/	Layanan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Data Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Padangan
BJN-DAA 01.02.66	Semestabangkom	Sistem Manajemen Sertifikat Pengembangan Kompetensi	https://semestabangkom.id/	Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	Data Pengembangan Kompetensi ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RSUD Padangan
BJN-DAA 02.01.01	SIKEPO	Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online	http://absensi-online.bojonegorokab.go.id/	Layanan Presensi Online	Data Daftar Hadir ASN	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.01	SIMANTAP	Sistim Informasi Manajemen Terpadu Kepegawaian	https://simantap.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pensiun PNS, Layanan Cuti, Layanan Administrasi Kepegawaian	Data Pensiun, Data Cuti PNS, Data Administrasi Kepegawaian	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"
BJN-DAA 02.01.02	Disdag Online	Dinas Perdagangan Online	disdag-online.bojonegorokab.go.id	Layanan Manajemen Data Harga Bahan Pokok	Data Harga Bahan Pokok	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"
BJN-DAA 02.01.03	BPIP	Sistem Informasi Pelayanan Pasien Rumah Sakit	https://paskibraka.bpip.go.id/	Layanan Paskibraka	Data Paskibraka	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAA 02.01.04	e-Arsip	Layanan Internal Bidang Pajak Daerah II	arsip.bapendabojo-negoro.id	Layanan Dokumentasi Administrasi Kebijakan Pajak Daerah	Data Peraturan PBB-P2 dan BPHTB, Data NPOP BPHTB	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.05	GISel	Aplikasi pengolahan data peta PBB-P2 yang terintegrasi dengan peta digital	https://pajakdaerahbojonegorokab.id/geospasial_bjn/lo gin	Layanan PBB - P2	Data Peta Objek Pajak PBB-P2	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 02.01.06	SISMIOP	Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak		Layanan PBB - P2	Data Objek Pajak PBB-P2	Desktop	Oracle	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 02.01.07	e-BMD	Sistem Informasi Milik Kementerian Dalam Negeri dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021	https://bojonegoro.e-bmd.co.id/	Layanan Pengelolaan Aset Daerah	Data Barang Milik Daerah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAA 02.01.08	DAMISDA	Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah	damisda.bojonegorokab.go.id	Layanan Monitoring Data Penduduk Miskin	Data Monitoring Penduduk Miskin	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.09	E-LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	https://e-lkpi.bojonegorokab.go.id/	Layanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Data Laporan Pertanggungjawaban	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 02.01.10	E-MONEV	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran	https://e-monev.bojonegorokab.go.id/	Layanan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Data Evaluasi Kinerja Anggaran	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 02.01.11	GEOPORTAL	Portal Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional	https://geoportal.bojonegorokab.go.id/	Layanan Open Data Geospasial	Data Statistik dan Geospasial, Data Map	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 02.01.12	e-Hibah	Elektronik Administrasi Hibah Keuangan		Layanan Hibah Keuangan	Data Penerima Hibah Keuangan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.13	SINCAN	Sistem Informasi Kecamatan	https://satria.rope.m.jatimprov.go.id/sincan/	Layanan Administrasi Pemerintahan	Data Laporan Monev Kecamatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Bagian Pemerintahan
BJN-DAA 02.01.14	e-DBHCHT	Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah	e-DBHCHT-jatimprov.go.id	Layanan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data Angka Inflasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAA 02.01.15	PANAH SRIKANDI	Identitas Kependudukan Digital	https://panahsrikanandi.bojonegorokab.go.id/	Layanan Penerbitan KK, Layanan Penerbitan KIA, Layanan Penerbitan KTP, Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar, Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran, Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Data KK, Data KIA, Data KTP, Data Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar, Data Akta Kelahiran, Data Akta Kematian	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.16	Bank Data e-Logistics	Aplikasi Logistik dan Perbekalan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	http://bankdataeloq.kemkes.go.id/apps/login	Layanan Ketersediaan Obat Indikator	Data Ketersediaan Obat	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.17	DFO	Data Fasyankes Online	https://dfo.kemkes.go.id/	Layanan Fasyankes Tingkat Pertama, Layanan IKP dan Mutu Fasyankes Tingkat Pertama	Data Fasyankes Tingkat Pertama, Data IKP dan Mutu Fasyankes Tingkat Pertama	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.18	e-Kohort	Sistem Informasi Maternal dan Neonatal.	https://e-kohort.kemkes.go.id/	"Layanan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir"	"Data Pemeriksaan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.19	e-Monev HSP	Aplikasi Sistem Informasi digunakan untuk mencatat dan melaporkan data Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	https://tpm.kemkes.go.id/kesling-nw/tpm/	Layanan Tempat Fasilitas Umum	Data Sarana Tempat Fasilitas Umum	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.20	e-Monev Obat	Sistem Monitoring & Evaluasi Katalog Obat (	https://monevkatalogobat.kemkes.go.id/	Layanan Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat Program dan Obat Esensial	Data RKO Obat Program dan RKO Obat Esensial, Data Katalog dan Formularium Obat Nasional	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.21	e-Tb12	Aplikasi Pelaporan TB	http://etb12.sitb.id	Layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC, Layanan Croschek TB	Data Terduga TBC, Data Pasien TBC, Data Terapi Pencegahan TBC, Data Investigasi Kontak, Data Manajemen Laboratorium TBC, Data Manajemen Logistik TBC, Data Keuangan Pengajuan Klaim TCM, Data Uji Silang Mikroskopis TBC, Data Laporan Kasus Tuberkulosis	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.22	IKI Pesat Jatim	Aplikasi untuk program kesehatan yang bertujuan mengembangkan Pesantren Sehat di Jawa Timur.	https://dinkes.jatimprov.go.id/iki-pesat/	Layanan Pos Kesehatan Pesantren	Data Poskestren	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.23	PCARE BPJS KESEHATAN	Aplikasi Pelayanan Pasien BPJS	https://pcarejkn.bps-kesehatan.go.id/eclaim/Login	Layanan Pasien JKN	Data Kunjungan Pasien JKN	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.24	REN BUT	Sistem Informasi Rumah Sakit	https://renbut.kemkes.go.id/	Layanan Perencanaan Kebutuhan SDMK, Layanan Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Data Perencanaan Kebutuhan SDMK, Data Perhitungan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.25	SAJI PANGAN	Sistem Informasi Perijinan Keamanan Pangan		Layanan Saji Pangan	Data Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.26	SIDIK PERISA	Sistem Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	https://sidikperisa.dinkesbojonegoro.com/	Layanan Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	Data Hasil Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.27	SIGAP PSC 119	Sabagai sarana bagi petugas di lapangan untuk menerima, mencatat hasil dan melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Command Center.	https://bojonegoro.psc-119.id/downloads/ https://bojonegoro.psc-119.id/	Layanan Kegawatdaruratan Medis	Data Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.28	SIGIZIKESGA	aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan data capaian indikator pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KIA serta layanan Gizi Masyarakat	https://sigizikesga.kemkes.go.id	Layanan Gizi Ibu Hamil, Layanan Gizi Balita, Layanan Gizi Remaja Putri	Data Anemia Ibu Hamil, Data Suplementasi Gizi Ibu Hamil, Data Kurang Energi Kronis Ibu Hamil, Data Bayi Baru Lahir Mendapat IMD, Data Balita Underweight (BB Kurang dan Sangat Kurang), Data Balita Overweight (Gizi Lebih dan Obesitas), Data Bayi Usia Kurang dari 6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif, Data Bayi Usia 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif, Data Balita Usia 6-23	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Bulan Mendapatkan MP-ASI, Data Balita Mendapatkan Kapsul Vitamin A, Data Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S), Data Balita Ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D), Data Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk, Data Balita Gizi Kurang Dapat Tambahan Asupan Gizi, Data Balita BB Tidak Naik (T) Dapat Tambahan Asupan Gizi, Data Balita Berat Badan Kurang Dapat Tambahan Asupan Gizi, Data Skrining Anemia Remaja Putri, Data Konsumsi Tablet Tambah Darah					

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Remaja Putri, Data Tatalaksana Anemia Remaja Putri					
BJN-DAA 02.01.29	SIMPONI	Sistem Informasi Profil Kelompok Tani, Aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan menyajikan profil kelompok tani se Kabupaten Bojonegoro	https://simponi.bojonegorokab.go.id	Layanan Kelompok Tani, Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Data Kelompok Tani, Data Keterbukaan Informasi Publik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAA 02.01.30	Jagasiber	Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (AMS) adalah aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) untuk melakukan proses pendaftaran, pembaruan, pencabutan dan monitoring sertifikat elektronik yang	jagasiber.bojonegorokab.go.id	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian, Layanan Penanganan Insiden Keamanan Informasi	Data Sumber Daya Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian, Data Insiden Keamanan Informasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		diterbitkan BSR.E.								
BJN-DAA 02.01.31	Monitoring Pusat Data	Monitoring Pusat Data	http://pantau.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Pusat Data	Data Infrastruktur Pusat Data	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 02.01.32	ROMANTIK	Rekomendasi Kegiatan Statistik	https://romantik.web.bps.go.id/	Layanan Pembangunan Metadata Statistik Sektoral, Layanan Rekomendasi Statistik	Data Rekomendasi Kegiatan Statistik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 02.01.33	SIDIA	Sistem Informasi Adiwiyata (Sidia) merupakan aplikasi untuk memantau Gerakan PBLHS dan sebagai alat dalam melakukan penilaian calon Sekolah Adiwiyata	https://pusatpghk.bp2sdm.menlhk.go.id/sidia/login	Layanan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata dan GPBLHS	Data Sekolah Adiwiyata	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAA 02.01.34	SIGN SMART	sistem aplikasi inventarisasi gas rumah kaca (GRK) nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/frontend/login	Layanan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		(KLHK)								
BJN-DAA 02.01.35	SPECTRUM	aplikasi seluler berbasis android yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dan berbagai pihak dalam menghitung potensi penurunan emisi GRK di lapangan		Layanan Perhitungan Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca	Data Potensi Reduksi Emisi GRK	Mobile	SQL Server	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAA 02.01.36	SIJAKOB	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Bojonegoro	sijakob.bojonegoro.go.id	Layanan Jasa Konstruksi	Data Jasa Konstruksi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAA 02.01.37	e-PAKSI	Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi	http://103.122.35.24/loginpaksi.html	Layanan Smart Monitoring dan Survey Sumber Daya Air di Bojonegoro	Data Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.38	DDC	Data Data Desa	https://datadesace.ter.dpmptj.jatimprov.go.id	Layanan Perencanaan Pembangunan Desa	Data Perencanaan Pembangunan Desa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 02.01.39	OMSPAN	Sistem Monitoring Keuangan yang bersumber dari Pusat	https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd	Layanan Pelaporan Dana Desa	Data Realisasi Dana Desa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 02.01.40	SIAP DESA	Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa	https://siapdesa.bojonegorokab.go.id	Layanan Fasilitas Penyaluran Dana Desa	Data Penyaluran Dana Desa	Mobile	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 02.01.41	SIBUMBO	Sistem Informasi BUM Desa Bojonegoro	sibumbo.bojonegorokab.go.id	Layanan Fasilitas Pemberdayaan BUM Desa	Data Proses Bisnis BUM Desa	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.42	SIMANIZ	Sistem Informasi Manajemen Perizinan di Kabupaten Bojonegoro	simaniz.bojonegoro.kab.go.id	Layanan Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan, Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha, Layanan Ijin Penelitian/KKL/KKN/Magang, "Layanan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas/Perseorangan", Layanan Izin Usaha Angkutan (KPS), Layanan Izin Usaha Angkutan (Trayek), Layanan Izin Pemakaian Tanah Stren, Data Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, "Layanan Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan", Layanan Izin Reklame, Layanan Persetujuan	Data Izin Usaha dan Izin Trayek, Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha, Data Hasil Ijin Penelitian/ Magang, Data Perijinan Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangan, Data Izin Usaha Angkutan (KPS), Data Izin Usaha Angkutan (Trayek), Data Izin Pemakaian Tanah Stren, Data Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Data Izin Reklame, Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha, Data Izin Praktik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha, Layanan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH), Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator), Layanan Izin Reklame Insidentil	Dokter Hewan (SIP DRH), Data Izin Paramedik Veteriner PeData Inseminator, Data Izin Reklame Insidentil					
BJN-DAA 02.01.43	SILAPDIK	SISTEM INFORMASI LAYANAN PERUBAHAN DAPODIK (SILAPDIK)	https://sites.google.com/dinas.belajar.id/silapdik-bojonegoro	Layanan Perubahan Dapodik	Data Perubahan Dapodik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan
BJN-DAA 02.01.44	SIMPKB	Sistem Informasi Uji Kendaraan Bermotor	http://103.87.16.5:2245/simpkb/auth	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Data Uji Kendaraan Bermotor	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perhubungan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.45	e-Maos Bojonegoro	Aplikasi perpustakaan digital	https://web-emaos.bojonegoro.moco.co.id/login	Layanan e-Book	Data e-book	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAA 02.01.46	BPH Migas Xstar	Platform Digital Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi		Layanan Rekomendasi BBM	Data Rekomendasi BBM	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAA 02.01.47	IDENTIK PKH	Penandaan dan Pendataan Ternak	https://identikpkh.com/	Layanan Kesehatan Hewan	Data Kesehatan Hewan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAA 02.01.48	SIAP BANSOS	Sistem Informasi Aplikasi Penyaluran Bantuan Sosial	https://siapbansos.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pemberian Bimbingan Sosial Masyarakat, "Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial", Layanan Pengelolaan Fakir Miskin	Data Penerima Bimbingan Sosial Masyarakat, "Data Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual", Data Penerima Bantuan Sosial	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Sosial

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.49	SiBantu	Sistem Informasi Bantuan Sosial	https://sibantu.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pemberian Bimbingan Sosial Masyarakat, "Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial", Layanan Pengelolaan Fakir Miskin	Data Penerima Bimbingan Sosial Masyarakat, "Data Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual", Data Penerima Bantuan Sosial	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Sosial
BJN-DAA 02.01.50	e-Prog	Sistem Informasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional	http://eprog.siapwaspada.site/	Layanan Pemantauan Progres Pembangunan	Data Progres Pembangunan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Inspektorat
BJN-DAA 02.01.51	Perisai	Siste Informasi tentang Kerugian Daerah	perisai.siapwaspada.site	Layanan Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	Data SAKIP OPD	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Inspektorat
BJN-DAA 02.01.52	Si-Esi	Aplikasi Evaluasi Zona Integritas	si-esi.siapwaspada.site	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	Data Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Inspektorat

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.53	SIHAPSARI	Sistem Penilaian Mandiri Implementasi AKIP Terintegrasi	pantau.siapwaspa da.site	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	"Data Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Inspektorat
BJN-DAA 02.01.54	CEMARA	Kesan dan Pesan Setelah Pelayanan	https://rsudsosod oro.id:8011	Layanan Pengaduan Masyarakat	Data Pengaduan Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.01.55	DASI JR	Sistem Informasi Rumah Sakit Online	https://dasi.jasara harja.co.id/	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.01.56	IRR PERNEFRI	Elektronik Rekam Medis	https://sim4.indon esianrenalregistry.org/irr/	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.57	Laboratorium Information System	Picture Archiving and Communication System		Layanan Perawatan Pasien, Layanan Medical Check Up Kesehatan	Data Medical Check Up Pasien	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.01.58	MAS-PIO	Sistem Pemberian Informasi dan Pengaduan Terintegrasi		Layanan pengantaran obat gratis ke rumah pengguna layanan	Data alamat pengguna layanan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.01.59	MISTERBIAN	Sistem Informasi Manajemen Objektif dan Efisien	https://misterbian-rsudsbj.com/	Layanan manajemen data keuangan dan non keuangan RSUD Sumberrejo	Data capaian kinerja keuangan dan pelayanan RSUD Sumberrejo	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.01.60	SI-KEP-Misterbian	Elektronik Medical Record	https://misterbian-rsudsbj.com/	Layanan pengelolaan data asuhan keperawatan pasien	Data asuhan keperawatan pasien	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.61	SI-PIPIT	Sistem Informasi Deteksi Risiko Tinggi		Layanan pemberian informasi dan pengaduan pengguna layanan	Data informasi dan pengaduan pengguna layanan	Mobile	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.01.62	SI-SEPAT	Sistem Informasi Indikator Mutu		Layanan Telekonsultasi Gizi	Data Telekonsultasi Gizi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.01.63	SIM-ONE-MisterBian	Sistem Informasi Nutrisi Sesuai dan Tepat	https://misterbian-rsudsbj.com//	Layanan Pengelolaan Data Pelayanan Hasil Pemeriksaan Radiologi	Data Pemeriksaan Radiologi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.01.64	SOBAT	Sistem Informasi Pemeliharaan Obat dan Alat Kesehatan		Layanan Pengajuan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Data Kronologi Kerusakan/Pemeliharaan Alat Kesehatan	Mobile	SQL Server	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Sumberrejo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.65	Sijalinmaja	Sistem Integrasi jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur	sijalinmaja.jatimprov.go.id	Layanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Layanan Penegakan Perda, Layanan Data Aset Pos Satlinmas, Layanan Manajemen Anggota Satlinmas, Layanan Kegiatan Anggota Satlinmas, Layanan Pengaduan Online Satpol PP	Data Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Data Rekap Perka Perkada Tupoksi Satpol PP, Data Penegakan Perda, Data Aset Pos Satlinmas Kabupaten Bojonegoro, Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro, Data Kegiatan Anggota Satlinmas	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAA 02.02.01	KIPJAK-I	Sistem Informasi Bidang Pajak Daerah I	https://sites.google.com/view/kipjak1	Layanan Dokumentasi Administrasi Kebijakan Pajak Daerah	Data Peraturan Pajak Daerah Lainnya	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 02.02.01	AFIFAH	Sistem Persuratan Milik OPD BPKAD	https://afifah.bpkad.id/cyber.php/surat/masuk	Layanan Administrasi Persuratan	Data Arsip Surat Masuk dan Keluar	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.02	ASTRO	Aplikasi Stunting Bojonegoro	astro.bojonegorokab.my.id	Layanan Monitoring Data Stunting	Data Monitoring Stunting	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 02.02.03	SANDUK	Sistem Informasi Santunan Duka	https://sanduk.bojonegorokab.go.id/	Layanan santunan Duka	Data Penerima Santunan Duka	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAA 02.02.04	SAKIP Bojonegoro	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab Bojonegoro	https://sakup.bojonegorokab.go.id	Layanan Akuntabilitas Kinerja	Data Akuntabilitas Kinerja	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Organisasi
BJN-DAA 02.02.05	SIPSO	Sistem Informasi Pengeleolaan Sarana Olahraga		Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Stadion, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Gedung Olah Raga (GOR)						
BJN-DAA 02.02.06	AKIRA	Aplikasi Pembuatan Data SPJ Perjalanan Dinas Dalam Kota	https://akira.dopamin.web.id/	Layanan Pembuatan Data SPJ Perjalanan Dinas Dalam Kota	Data Perjalanan Dinas Dalam Kota	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.02.07	ASPAK	Sistem Aplikasi dan Sarana Prasarana Kesehatan	https://aspak.kemkes.go.id/aplikasi/	"Layanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan", Layanan Pelaporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	"Data Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan", "Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.02.08	Manajemen Pengembangan Aplikasi	Sistem Informasi Arsitektur SPBE berbasis web		Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah	Data Aplikasi Pemerintah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 02.02.09	Monitoring Jaringan	Sistem Monitoring Perangkat Server di Pusat Data	http://nms.bojonegorokab.go.id:8787/	Layanan Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah	Data Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.10	SIPIK	Sistem Informasi Penerima Insentif Keagamaan		Layanan Insentif Keagamaan	Data Penerima Insentif Keagamaan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 02.02.11	AKSARA	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksara hadir sebagai wadah perekaman aksi pembangunan rendah karbon nasional yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi.	https://pprk.bappe nas.go.id/aksara/	Layanan Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia	Data Rendah Karbon	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAA 02.02.12	SIPP DOKLING	Sistem Informasi Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	dokling.bojonegoro.my.id	Layanan Pengawasan Usaha Industri, Layanan Monitoring Kualitas Lingkungan	Data Pengawasan Industri, "Data Pengendalian Pencemaran Air, Udara, Limbah Domestik dan B3"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAA 02.02.13	SRN	Sistem Registri Nasional akan menjadi wadah pengelolaan data dan informasi aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi	https://srn.menlhk.go.id/index.php?r=home%2Flogin	"Layanan Pengelolaan Aksi, Sumber Daya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim"	Data Aksi Pengendalian Perubahan Iklim	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		perubahan iklim di Indonesia								
BJN-DAA 02.02.14	Sadam	Sistem aplikasi pemadam kebakaran	https://sadam.bojonegorokab.go.id/	Layanan Pemadaman Kebakaran, Layanan Evakuasi dan Penyelamatan, Layanan Pemberdayaan masyarakat	Data Kejadian Kebakaran, Data Penanganan Evakuasi dan Penyelamatan, Data Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Kebakaran	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemadam Kebakaran
BJN-DAA 02.02.15	SIPADES	Sistem Pengelola Aset Desa	https://latihan.sipadescloud.id/	Layanan Pengajuan Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD), Layanan Inventarisasi Aset Desa	Data Berkas Persyaratan Administrasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa, Data Aset Desa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 02.02.16	SISKEUDES	Sistem Keuangan Desa		Layanan Fasilitas Penyaluran Alokasi Dana Desa, Layanan Fasilitas Penyaluran Badan Kredit Desa	Data Penyaluran Alokasi Dana Desa, Data Penyaluran BKD Desa Lokasi Puncak Peringatan BBGRM dan HKG-PKK, Data Penyaluran BKD Honor/Insentif Ketua RT dan Ketua RW	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.17	SAMIN	Sarana Informasi Investasi bagi Calon Investor di Kabupaten Bojonegoro	samin.bojonegoro.kab.go.id	Layanan Sarana Informasi Investasi	Data Sarana Informasi Investasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAA 02.02.18	ARKAS	RKAS - RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS)	https://arkas.kemdikbud.go.id/	Layanan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	Data RKAS	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pendidikan
BJN-DAA 02.02.19	SUKIRNO	Sistem Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor	sukirno.bojonegoro.kab.go.id	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Data Antrian Uji Kendaraan Bermotor	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Perhubungan
BJN-DAA 02.02.20	INLISLite	Perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan	http://10.1.2.89/backend/ (saat ini dapat digunakan melalui jaringan lokal kominfo)	Layanan Keanggotaan, Layanan Baca di Tempat, Layanan Koleksi Referensi dan Koleksi Braille, Layanan Sirkulasi Pustaka	Data Anggota Perpustakaan, Data Baca di Tempat, Data Koleksi Referensi dan Koleksi Braille, Data Peminjaman Buku, Data Pengembalian Buku	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.21	Si-Ezi	Aplikasi Pengendalian Internal Terintegrasi	https://zi.bojonegoro.kab.go.id/	Layanan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Data Dukung Pembangunan Zona Integritas	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Inspektorat
BJN-DAA 02.02.22	Eklaim BPJS Kesehatan	Jasa Raharja Enterprise Data	https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.02.23	HEALS	Cerita Pemasaran, Promosi, dan Pengaduan		Layanan Penerimaan dan Pembelajaran Mahasiswa Baru	Data Pembelajaran Mahasiswa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.02.24	KPPI E-Reporting	Health, Education and Learning System		Layanan Perawatan Pasien	Data Audit Cuci Tangan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

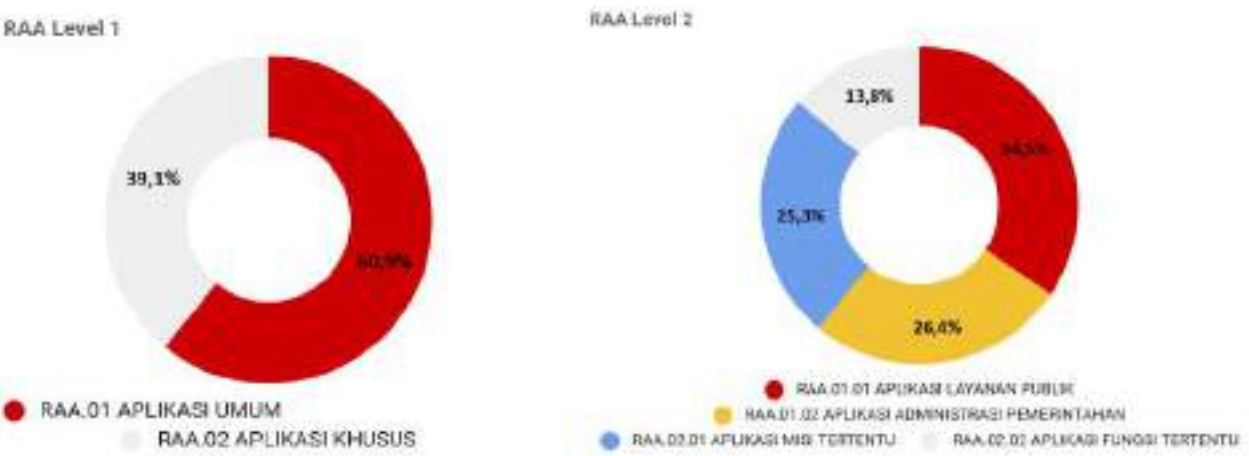
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.25	Pelkes InHealth	Sistem Informasi Manajemen Data Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan	https://pelkesonline.inhealth.co.id/	Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.02.26	SIAP RS	Sistem Informasi Pasien BPJS Ketenagakerjaan		Layanan Perawatan Pasien	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien"	Mobile	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.02.27	SIMRS Pelayanan	Sistem Informasi Virtual Klaim BPJS	IP Internal RS/SIM	Layanan Perawatan Pasien, Layanan Medical Check Up Kesehatan	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Medical Check Up Pasien	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAA 02.02.28	SIPENA	Sistem Informasi Kinerja SDM Kesehatan	Lokal	Layanan Kinerja SDM Kesehatan	Data Kinerja SDM Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.29	PACS	Picture Archiving and Communication System		Layanan Perawatan Pasien, Layanan Medical Check Up Kesehatan, Layanan Radiologi Diagnostik	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Medical Check Up Pasien, Data Hasil Radiologi Pasien	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Padangan
BJN-DAA 02.02.30	E-RM	Sistem Informasi Laboratorium Patologi Klinik		Layanan Perawatan Pasien, Layanan Medical Check Up Kesehatan, Layanan Rekam Medis Elektronik	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Medical Check Up Pasien	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.02.31	SI-DHP	Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	https://apps.larsdhp.or.id/simarsdhp/profil	Layanan Akreditasi Rumah Sakit	Data Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Kepohbaru, RSUD Padangan
BJN-DAA 02.02.32	HCLAB	Hematology Clinical Laboratory		Layanan Informasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Data Hasil Laboratorium Pasien	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Padangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.02.33	KOLAK PISANG	Kolaborasi Dukcapil dengan Rumah Sakit No Gratifikasi	http://35.109.0.114/kolak-pisang/rs	Layanan Pendataan Bayi Lahir	Data Bayi Lahir	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Padangan
BJN-DAA 02.02.34	SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit		Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit, Layanan Manajemen Rumah Sakit	Data Rekam Medis Pasien	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Padangan, RSUD Kepohbaru
BJN-DAA 02.02.35	SI-DEK RISTI	Monev Internal Terpadu Rencana Bisnis Anggaran	https://sidekristi.rsudsbj.my.id/	Layanan Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi	Data Pemetaan Ibu Hamil Risiko Tinggi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Sumberrejo

3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi

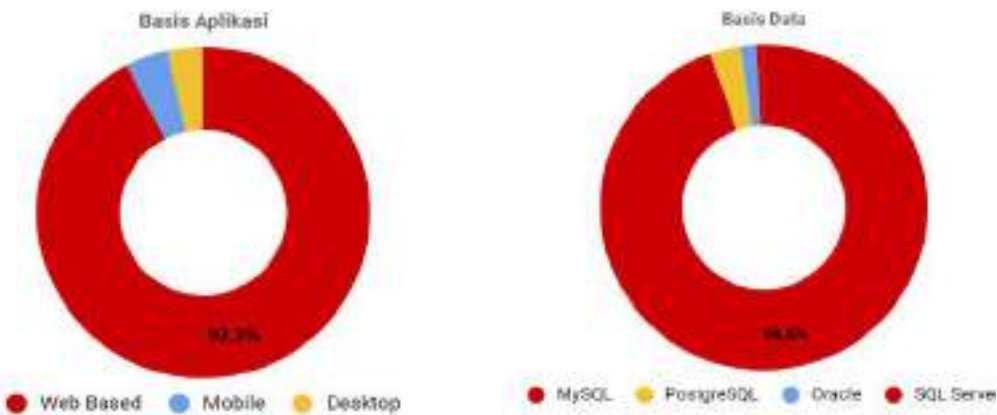
Merujuk pada hasil pemetaan aplikasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2.4.2.1. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan RAA Level 1 & 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Aplikasi umum didefinisikan sebagai sebuah aplikasi bersama yang digunakan dalam proses administrasi di seluruh perangkat daerah, sedangkan aplikasi khusus merupakan aplikasi yang hanya digunakan oleh suatu perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Merujuk pada grafik 3.2.4.2.1. dan mengacu pada referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional (RAA Level 1) dari total 261 Aplikasi, 159 Aplikasi (60,9%) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum dan 102 Aplikasi (39.1%) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus.

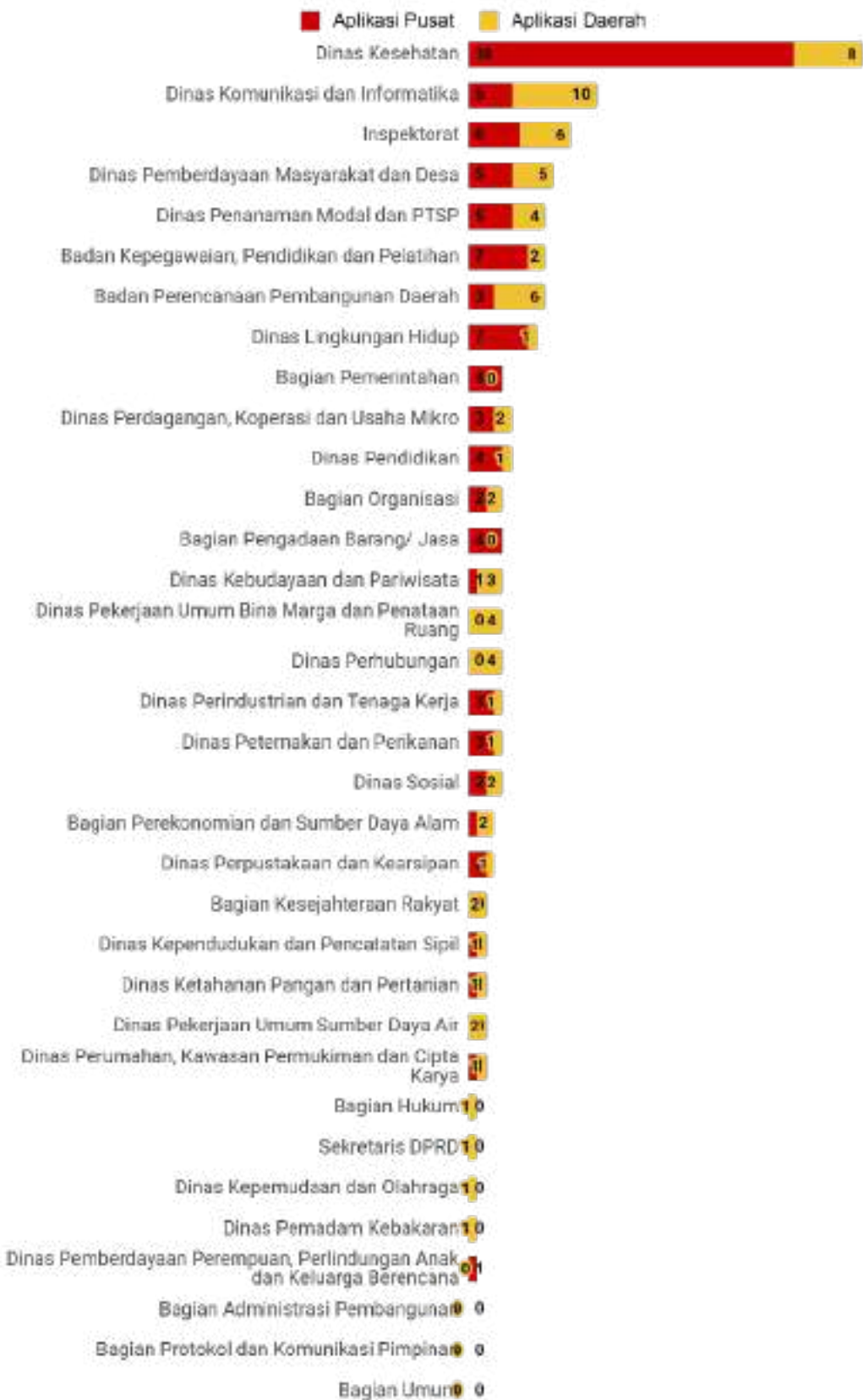
Sedangkan untuk RAA Level 2 terkait RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik sejumlah 90 Aplikasi (34.5%), RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan sejumlah 69 aplikasi (26.4%), dan RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu sejumlah 36 aplikasi (13.8%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak digunakan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah jenis Aplikasi Layanan Publik sehingga diperlukan pengelolaan interoperabilitas data, baik untuk internal maupun untuk instansi pusat.



Grafik 3.2.4.2.2. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan dari Basis Aplikasi dan Basis Datanya

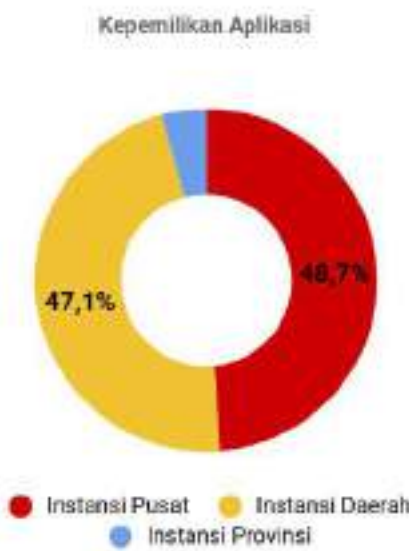
Berdasarkan grafik 3.2.4.2.2. menunjukkan bahwa terdapat 241 Aplikasi (92.3%) memiliki basis aplikasi Web Based, Desktop jumlah 9 aplikasi (3.4%) dan Mobile 11 Aplikasi (4.2%) . Hal ini menunjukkan bahwa kedepan perlu dipastikan jumlah *web programmer* pemeliharaan aplikasi yang ada. Sedangkan, kepemilikan untuk basis data MySQL 94.6% (247 aplikasi), basis data SQL Server 0.8% (2 Aplikasi), basis data MariaDB 0% (0 Aplikasi), dan PostgreSQL 3.1% (8 Aplikasi) . Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan MySQL sebagai dasar dalam standar pengembangan aplikasi selanjutnya.

Unit Operasional Teknologi



Grafik 3.2.4.2.3. Grafik Jumlah Aplikasi yang digunakan di Perangkat Daerah

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.3. menunjukkan bahwa perangkat daerah yang paling banyak dalam melakukan digitalisasi yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan karena Dinas tersebut diberikan mandatori untuk menggunakan aplikasi dari Kementerian.



Grafik 3.2.4.2.4. Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Eksisting

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.4. menjelaskan bahwa dari total 261 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejumlah 48.7% (127 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Pusat, 47.1% (123 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Daerah dan 4.2% (11 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Provinsi. Berdasarkan grafik diatas perlu dievaluasi terkait aplikasi milik daerah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan digitalisasi Layanan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

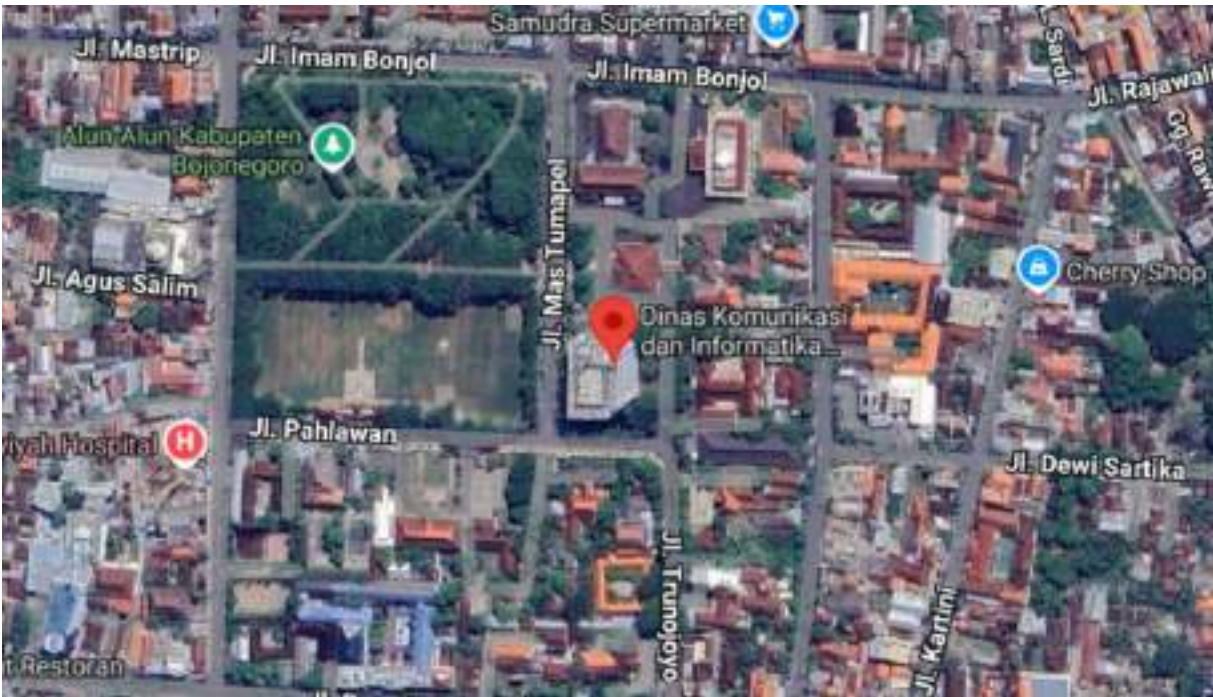
3.2.5. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan kerangka kerja yang menggambarkan komponen-komponen teknologi informasi dan interkoneksi jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional aplikasi SPBE. Infrastruktur SPBE yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi: ruang pusat data, jaringan intra pemerintah yang didalamnya terdapat jaringan data lokal (Local Area Network - LAN) kantor OPD/UPT, dan sistem penghubung layanan untuk berbagi pakai data antar aplikasi. Berikut ini adalah uraian dari arsitektur infrastruktur SPBE.

3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)

A. Lokasi Pusat Data

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki Pusat Komputasi (Pusat Data) yang berlokasi di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jl. Mas Tumapel, Bojonegoro, Ledok Wetan, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62112



Gambar 3.2.5.1.1. Lokasi Pusat Komputasi Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

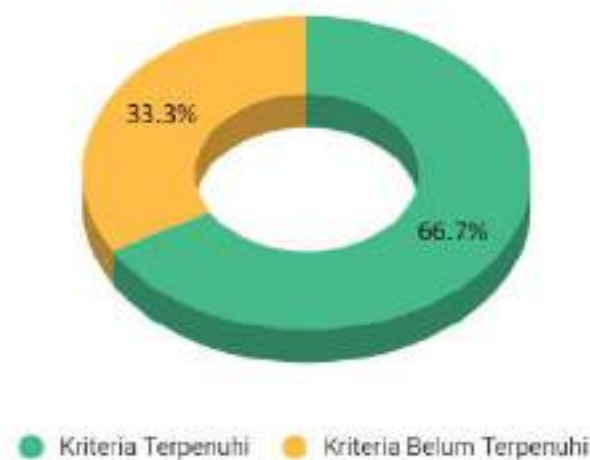
Adapun kondisi saat ini terkait lokasi yang digunakan pusat komputasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Terdapat 3 kriteria yang diajukan yaitu:

- Aman dari rentan bencana alam;
- Aman dari area atau lokasi huru-hara; dan
- Aman dari jalur transportasi.

Tabel 3.2.5.1.1. Kriteria Lokasi Pusat Data

No	Kriteria Lokasi Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Aman dari rentan bencana alam	Ya
2	Aman dari area atau lokasi huru-hara	Tidak
3	Aman dari jalur transportasi	Ya

Kriteria Lokasi Pusat Data (Pusat Komputasi)



Grafik 3.2.5.1.1. Kriteria Lokasi Pusat Data (Pusat Komputasi) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dari grafik 3.2.5.1.1. dapat diperoleh informasi bahwa dari 3 kriteria standar lokasi pusat komputasi, mengacu pada SNI 8799-1 Pusat Data, pusat komputasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi sebagian besar kriteria.

B. Layout Gedung Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Ruang kerja (ruang area fungsi) telah tersedia, Berdasarkan kriteria yang diajukan terkait ruang area fungsi pada pusat komputasi, kondisinya sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1.2. Tabel Pemenuhan Standar Topologi Ruangannya mengacu SNI 8799-1 Pusat Data

No	Area Fungsi Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Terdapat Ruang Data Center (Computer room)	Ya
2	Terdapat Ruang untuk Access Provider	Tidak
3	Terdapat Ruang Operasi Personel TI	Tidak
4	Terdapat Staging area (Tempat konfigurasi perangkat untuk System Administrator dan Network Engineer sebelum perangkat beroperasi)	Tidak
5	Terdapat Ruang Elektrikal/UPS	Ya
6	Terdapat Ruang Generator	Ya
7	Terdapat Ruang Administrasi Kunjungan	Ya
8	Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan datangnya perangkat baru	Tidak
9	Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan perangkat yang tidak berfungsi dan tidak terpakai	Tidak
10	Terdapat Area Bongkar Muat	Tidak

Area Fungsi Pusat Data



Grafik 3.2.5.1.2. Area Fungsi Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dari tabel 3.2.5.1.2. dapat diperoleh informasi bahwa dari 10 kriteria area fungsi pusat komputasi (Pusat Data) yang ada, area fungsi Pusat Data Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi 4 kriteria.

C. Rack Perangkat Jaringan

Ruang perangkat jaringan berfungsi untuk penempatan rak perangkat jaringan baik milik sendiri, maupun dari pihak ketiga seperti penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider*).



Gambar 3.2.5.1.2. Rack dan Perangkat Jaringan

Dari gambar diatas, diperoleh informasi bahwa perangkat jaringan sudah ditempatkan di rak khusus.

D. Rack Server

Kondisi saat ini terdapat beberapa rak khusus untuk menempatkan perangkat server seperti terlihat gambar di bawah ini.



Gambar 3.2.5.1.3. Rak dan Perangkat Server

E. Sistem Pemadam Kebakaran

Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang memadai, dan juga belum tersedia Perangkat Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Tabel 3.2.5.1.3. Sistem Pemadam Kebakaran

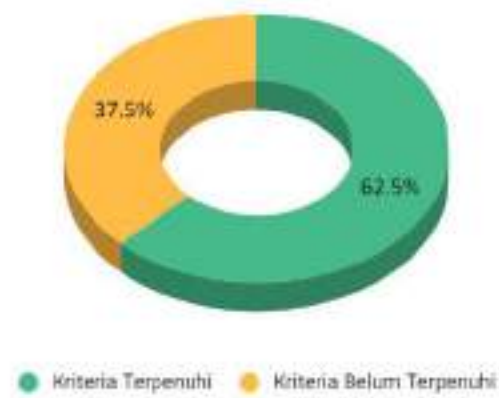
No.	Jenis Pemadam	Bahan Pemadam	Penempatan
1	Pemadam Kebakaran Otomatis	Co2	Di dalam ruang pusat data

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem pemadam kebakaran di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.4. Tabel Pemenuhan Standar Sistem Pemadam Kebakaran sesuai SNI Pusat Data

No	Sistem Pemadam Kebakaran	Kriteria Terpenuhi
1	Tersedia pintu darurat di area pusat data yang dapat dibuka keluar	Tidak
2	Tersedia lampu darurat sebagai penanda keluar darurat ketika terjadi bencana seperti kebakaran.	Ya
3	Bahan bangunan di ruang pusat data tidak mudah terbakar api	Ya
4	Penerapan sistem deteksi asap bangunan yang diintegrasikan ke satu alarm Bersama.	Tidak
5	Di area pusat tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis dan dapat juga diaktifkan secara manual.	Ya
6	Pemeliharaan rutin dan tercatat pada alat-alat pengendali kebakaran.	Ya
7	Pelatihan pengendalian api terjadwal kepada personel TI	Tidak
8	Bangunan pusat data dilengkapi dengan sistem proteksi petir untuk menanggulangi kebakaran	Ya

Sistem Pemadam Kebakaran



Grafik 3.2.5.1.3. Sistem Pemadam Kebakaran

Dari tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memenuhi 5 kriteria sistem pemadam kebakaran dari 8 kriteria yang ada.

F. Catu Daya Listrik Cadangan

Ruang Server Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki catu daya listrik cadangan berupa Generator dan UPS. Berikut ini disajikan daftar catu daya listrik cadangan di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 3.2.5.1.5. Tabel Catu Daya Listrik Cadangan

No.	Merek	Jumlah Daya	Status Aktif
1	UPS	5 KVA X 2	Mampu menyala 1 jam



Gambar 3.2.5.1.4. Catu Daya Listrik Cadangan - Genset dan UPS

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem catu daya listrik di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.6. Tabel Status Pemenuhan Standar Catu Daya Listrik Cadangan sesuai SNI yang ada di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No	Penyediaan Catu Daya	Kriteria Terpenuhi
1	Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data	Tidak
2	Sumber listrik diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda.	Tidak
3	Pengelola Listrik menyediakan catu daya listrik alternatif berupa generator.	Tidak
4	Generator dapat menyala otomatis oleh sensor ketika terjadi listrik PLN mati, kurang dari 10 detik.	Ya
5	UPS mampu memasok daya ke Data Center ketika listrik PLN mati	Ya
6	Pergantian sumber listrik dari PLN ke Genset atau sebaliknya menggunakan sistem ATS (Automatic Transfer switch) dan didukung Sistem AMF (<i>Automatic Main Failure</i>) untuk menyalakan mesin genset.	Ya
7	Komputer kerja personil pusat data disediakan alternatif catu daya	Tidak



Grafik 3.2.5.1.4. Penyediaan Catu Daya

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi 3 kriteria sistem kelistrikan dari 7 kriteria yang ada.

G. Sistem Pendingin Ruangan

Perangkat yang ada di ruangan server mengeluarkan panas sehingga ruangan server perlu diberikan sistem pendingin untuk menjaga kinerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat teknologi informasi karena suhu yang tinggi (panas). Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dilengkapi dengan sistem pendingin yakni Air Conditioning (AC).

Kondisi saat ini pendingin ruangan server menggunakan AC Split sebanyak 3 (tiga) unit dan AC Standing Polytron 1 (satu) unit seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.

Tabel 3.2.5.1.7. Sistem Pendingin Ruang Data Center

Jenis	Merek	Kapasitas (PK)	Jumlah
PAC		5	1



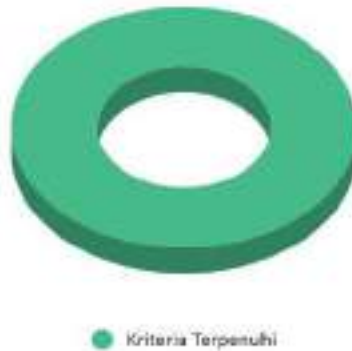
Gambar 3.2.5.1.5. AC Pendingin Ruangan Server

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem pendingin ruangan di Ruang Server DiskominfoSandi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.8. Tabel Status Pemenuhan Standar Pendingin Ruangan Ruang Server sesuai SNI

No	Sistem Pendingin, Suhu dan Kelembaban Ruang Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Terdapat alat pengkondisi suhu dan kelembaban udara	Ya
2	Terdapat alat pemantau suhu dan kelembaban ruang pusat data	Ya
3	Suhu dingin di ruang pusat data terkontrol antara 18°C-24°C	Ya
4	Kelembaban udara di ruang pusat data terkontrol antara 40%-60% RH (Relative Humidity).	Ya
5	Sistem pendingin udara (AC) pusat data dihubungkan dengan daya utama (listrik PLN) satu sumber dengan pusat data.	Ya
6	Sistem pendingin udara pusat data dihubungkan ke catu daya alternative (seperti generator).	Ya
7	Sistem Pendingin menggunakan AC presisi atau HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning)	Ya

Sistem Pendingin dan Suhu Ruang Pusat Data



Grafik 3.2.5.1.5. Sistem Pendingin

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi semua kriteria Sistem Pendingin dan Suhu Ruang Pusat Data dari 7 kriteria yang ada.

H. Manajemen Kabel

Kabel data digunakan untuk Interkoneksi antar perangkat teknologi informasi di Pusat Data yang terdiri dari kabel UTP dan *Fiber Optic*. Selain itu juga terhadap kabel listrik. Untuk menjaga keamanan kabel data dan listrik maka perlu dibuatkan jalur kabel khusus data dan listrik (*cable tray*) dan diberikan penanda (label) pada kabel tersebut.



Gambar 3.2.5.1.6. Manajemen Kabel

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar manajemen kabel di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.9. Tabel pemenuhan standar manajemen kabel sesuai SNI Pusat Data

No	Manajemen Kabel di Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Kabel daya (Kabel listrik) dan kabel data tembaga (UTP/STP) diberi jarak antara 30-60cm	Ya
2	Kabel yang berada di rack cabinet diatur dengan rapi	Ya
3	Kabel data (kabel jaringan) yang melewati dinding sebagian besar sudah menggunakan pelindung kabel (cable duct).	Ya Sebagian Besar
4	Kabel-kabel di pusat data diberikan jalur (cable pathways) menggunakan <i>cable tray</i> .	Ya Sebagian Besar
5	Kabel jaringan di pusat data telah diberikan label identifikasi (Terkoneksi ke)	Ya Sebagian Besar
6	Setiap Rak perangkat diberikan label informasi terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Ya
7	Terdapat raised floor atau lantai yang ditinggikan	Ya



Grafik 3.2.5.1.6. Manajemen Kabel

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memenuhi 4 kriteria manajemen kabel dari 7 kriteria yang ada.

I. Sistem Pemantauan Server dan Jaringan

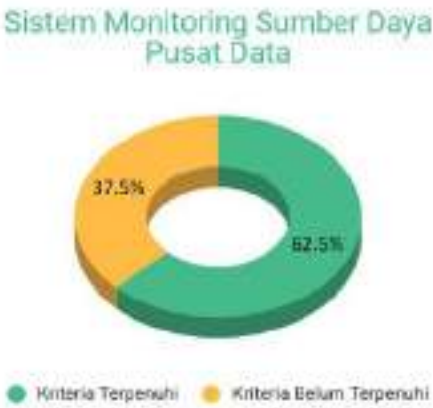
Fasilitas dan perangkat teknologi informasi di pusat data perlu selalu dipantau sebagai langkah pencegahan atau preventif untuk menjaga ketersediaan, dan kinerja dari pusat data. Kondisi saat ini belum ada ruang untuk melakukan pemantauan mengenai perangkat server maupun perangkat jaringan.

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem monitoring sumber daya Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.10. Tabel pemenuhan standar Pemantauan Sumber Daya Pusat Data sesuai SNI Pusat Data

No	Sistem Monitoring Sumber Daya Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) Server	Tidak

2	Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) jaringan	Tidak
3	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Server (Security Information and Event Management)	Ya
4	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Jaringan (Security Information Event Management)	Ya
5	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Aplikasi (Security Information Event Management)	Ya
6	Tersedia Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara di Pusat Data	Tidak
7	Tersedia Sistem Monitoring pada UPS dan Genset untuk Pusat Data	Ya
8	Tersedia Sistem Monitoring pada BBM genset untuk Pusat Data	Ya



Grafik 3.2.5.1.7. Sistem Monitoring

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memenuhi 5 kriteria sistem *monitoring* sumber daya pusat data dari 8 kriteria yang ada.

J. Keamanan Lingkungan

Keamanan Pusat Data meliputi keamanan fisik luar dan dalam lingkungan pusat data seperti adanya petugas keamanan fisik (*security*), alat pemantau lingkungan (CCTV), dan lainnya. Terdapat 6 (enam) lapis keamanan lingkungan yakni:

- 1. area pintu masuk kawasan pusat data;
- 2. area gedung dan parkir kendaraan;
- 3. area pintu masuk gedung pusat data;
- 4. area menuju pintu masuk ruang *data center*;
- 5. pintu utama ruang *data center*; dan
- 6. ruang utama *data center* (*rack server*).

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar keamanan lingkungan di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.11. Tabel Pemenuhan Standar Keamanan Lingkungan sesuai SNI Pusat Data

No	Pengamanan Area Gedung Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
Penerapan Six Layer Security pada area Pusat Data		
1	Layer 1, perimeter defense (Area pintu utama kawasan data center)	
1.1	a. Terdapat CCTV pemantau	Ya

No	Pengamanan Area Gedung Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1.2	b. Pagar	Ya
1.3	c. Petugas keamanan	Ya
2	Layer 2, clear zone. (Area Gedung dan parkir kendaraan)	
2.1	a. Tempat parkir untuk pengunjung dan karyawan	Ya
2.2	b. Terdapat CCTV pemantau	Ya
2.3	c. Lampu pencahayaan yang mengarah ke pintu masuk Gedung pusat data	Ya
2.4	d.Terdapat sensor pendeteksi gangguan	Tidak
3	Layer 3, reception area (Area pintu masuk Gedung Data Center)	
3.1	a. Terdapat CCTV Pemantau	Ya
3.2	b. Sistem pengunci manual	Ya
3.3	c. Sistem pengunci biometrik (finger,kartu,retina)	Tidak
3.4	d. Pos jaga Satpam	Ya
4	Layer 4, hallway/gray space (Area menuju pintu utama ruang data center)	
4.1	a. Terdapat sistem manajemen pengunjung	Ya
4.2	b. Pintu akses ke ruang pusat data	Ya
4.3	c. Sistem pengunci manual dan biometric sebagai pengontrol akses.	Ya
5	Layer 5, Data center room/white space. (Pintu utama ruang data center)	
5.1	a. Terdapat video pemantau (CCTV)	Ya
5.2	b. Sistem pengunci multi. biometric dan manual	Ya
5.3	c. Tidak terdapat label Ruang Pusat Data	Tidak
6	Layer 6, data center cabinet/white space. (Area utama di rak cabinet data center)	
6.1	a. Terdapat CCTV Dome, memantau 360°	Tidak
6.2	b. Terdapat pintu dan pengunci pada rak cabinet.	Ya

Pengamanan Area Gedung Pusat Data



Grafik 3.2.5.1.8. Pengamanan Area Gedung Pusat Data

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi 15 kriteria dari 19 kriteria keamanan lingkungan pusat data.

K. Katalog Pusat Data/Komputasi

Katalog infrastruktur (fasilitas komputasi - pusat data) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (fasilitasi komputasi - pusat data) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.1.12 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Fasilitas Komputasi - Pusat Data

ID	Nama Fasilitas	Kode Model Referensi SPBE	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
BJN-DAI.01.01.03.01	Pusat komputasi Kabupaten Bojonegoro	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	1 Gbps	2,3 Gbps	Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jl. P. Mas Tumapel, Bojonegoro, Jawa Timur	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Diskominfo	Tidak menggunakan tingkatan Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.03 PUSAT DATA INSTANSI DAERAH
BJN-DAI.01.01.03.02	Pusat Komputasi Bappenda	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI						Tidak menggunakan tingkatan Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.03 PUSAT DATA INSTANSI DAERAH

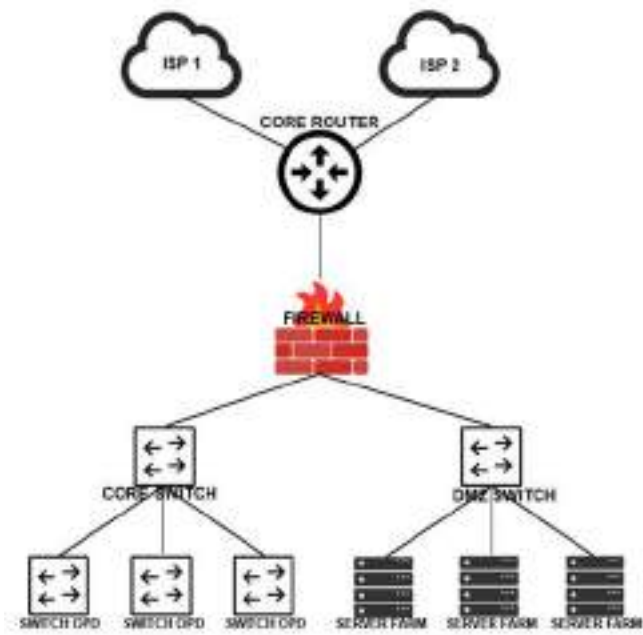
BJN-DAI.01.01.03.03	Pusat Komputasi Dinas Perhubungan	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI						Tidak menggunakan tingkatan Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.03 PUSAT DATA INSTANSI DAERAH
BJN-DAI.01.01.04.01	Telkom Sigma	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI			Pusat Data Telkom Sigma	Telkom	Diskominfo			RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.04 PUSAT DATA NON PEMERINTAH
BJN-DAI.01.01.01.01	Pusat Data Nasional Sementara	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI		160 Mbps	PDNS	Kemenkomdi gi	Diskominfo			RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.01 PUSAT DATA NASIONAL
BJN-DAI.01.01.04.02	PLN Icon Plus	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI		30 Mbps	Pusat Data Icon Plus	PLN	Diskominfo			RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.04 PUSAT DATA NON PEMERINTAH

3.2.5.2. Sistem Integrasi

A. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dikelola oleh Diskominfo untuk melayani jaringan antar komputer di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akses ke server, dan akses jaringan internet. Berikut ini gambar topologi Jaringan di Gedung Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

1. Topologi Jaringan



Gambar 3.2.5.2.1. Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa peta jaringan di Pusat Data Gedung Dishubkominfo Kabupaten Bojonegoro bisa dibagi menjadi beberapa zona yakni:

- Zona Internet

Zona internet adalah zona yang terhubung langsung ke internet melalui penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider* - ISP). Kondisi saat ini koneksi internet disediakan oleh 2 vendor yaitu PT. Telkom dengan kapasitas bandwidth sebesar 1000 mbps dan PT. HSP dengan kapasitas bandwidth sebesar 1300 Mbps.

- Zona Jaringan Area Kabupaten (MAN)

Jaringan area metropolitan atau *Metropolitan Area Network* merupakan jaringan untuk menghubungkan lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Pusat Data atau Pusat Kendali. Kondisi saat ini sebanyak 67 OPD sudah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah mendapatkan sumber internet dari Dishubkominfo dengan menggunakan media transmisi kabel *fiber optic* (FO) dan wireless.

Tabel 3.2.5.2.1.. Sebaran Jaringan Intra Pemerintah/MAN

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Badan	Terhubung
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan	Terhubung
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan	Terhubung
4	Badan Pendapatan Daerah	Badan	Terhubung
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan	Terhubung
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan	Terhubung
7	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian	Terhubung
8	Bagian Hukum	Bagian	Terhubung
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian	Terhubung
10	Bagian Organisasi	Bagian	Terhubung
11	Bagian Pemerintahan	Bagian	Terhubung
12	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bagian	Terhubung
13	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian	Terhubung
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian	Terhubung
15	Bagian Umum	Bagian	Terhubung
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas	Terhubung
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas	Terhubung
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas	Terhubung
19	Dinas Kesehatan	Dinas	Terhubung
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas	Terhubung
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas	Terhubung
22	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas	Terhubung
23	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas	Terhubung
24	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Dinas	Terhubung
25	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas	Terhubung
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas	Terhubung
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas	Terhubung
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas	Terhubung
29	Dinas Pendidikan	Dinas	Terhubung
30	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas	Terhubung
31	Dinas Perhubungan	Dinas	Terhubung
32	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas	Terhubung
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas	Terhubung
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas	Terhubung
35	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas	Terhubung
36	Dinas Sosial	Dinas	Terhubung
37	Inspektorat	Lainnya	Terhubung
38	Kecamatan Balen	Kecamatan	Terhubung
39	Kecamatan Baureno	Kecamatan	Terhubung
40	Kecamatan Bojonegoro	Kecamatan	Terhubung
41	Kecamatan Bubulan	Kecamatan	Terhubung
42	Kecamatan Dander	Kecamatan	Terhubung
43	Kecamatan Gayam	Kecamatan	Tidak Terhubung
44	Kecamatan Gondang	Kecamatan	Terhubung
45	Kecamatan Kalitidu	Kecamatan	Terhubung
46	Kecamatan Kanor	Kecamatan	Terhubung
47	Kecamatan Kapas	Kecamatan	Terhubung
48	Kecamatan Kasiman	Kecamatan	Terhubung
49	Kecamatan Kedewan	Kecamatan	Terhubung
50	Kecamatan Kedungadem	Kecamatan	Terhubung
51	Kecamatan Kepohbaru	Kecamatan	Terhubung
52	Kecamatan Malo	Kecamatan	Terhubung
53	Kecamatan Margomulyo	Kecamatan	Terhubung
54	Kecamatan Ngambon	Kecamatan	Terhubung
55	Kecamatan Ngasem	Kecamatan	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
56	Kecamatan Ngraho	Kecamatan	Terhubung
57	Kecamatan Padangan	Kecamatan	Terhubung
58	Kecamatan Purwosari	Kecamatan	Terhubung
59	Kecamatan Sekar	Kecamatan	Terhubung
60	Kecamatan Sugihwaras	Kecamatan	Terhubung
61	Kecamatan Sukosewu	Kecamatan	Terhubung
62	Kecamatan Sumberrejo	Kecamatan	Terhubung
63	Kecamatan Tambakrejo	Kecamatan	Terhubung
64	Kecamatan Temayang	Kecamatan	Terhubung
65	Kecamatan Trucuk	Kecamatan	Terhubung
66	RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	BLUD	Terhubung
67	RSUD Kepohbaru	BLUD	Tidak Terhubung
68	RSUD Padangan	BLUD	Tidak Terhubung
69	RSUD Sumberrejo	BLUD	Tidak Terhubung
70	Satuan Polisi Pamong Praja	Lainnya	Terhubung
71	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Lainnya	Terhubung

- Zona DeMilitarized Zone (DMZ)

Zona DMZ untuk penempatan server - server aplikasi. Switch server langsung terhubung dengan Router Firewall. Akses dari internal maupun eksternal akan disaring (filter) oleh Router Firewall.

B. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Diskominfo saat ini telah mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan (SPL) dan berikut merupakan katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

C. Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Katalog infrastruktur (sistem penghubung layanan pemerintah) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (sistem penghubung layanan pemerintah) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.2.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis SPL [Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Aplikasi (Dependency)	Data dan Informasi (Dependensi)
BJN-DAI.02.0 2.01.01	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang digunakan sebagai APO Gateway untuk pertukaran data	Sistem Penghubung Non Pemerintah	Instansi Pemerintah Lain	Komdigi		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.02.01 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH			

D. Katalog Jaringan Intra Pemerintah

Katalog infrastruktur (jaringan intra pemerintah) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jaringan ini dirancang khusus untuk menghubungkan perangkat daerah seperti Dinas, Badan, UPT, Kabupaten, Kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. JIP beroperasi sebagai jaringan Area Kota (MAN) yang mencakup area tertentu

di dalam Kota. Bertindak sebagai pengelola jaringan. JIP memiliki tujuan untuk mendukung pertukaran data dan komunikasi yang efisien antara perangkat daerah. Dengan adanya jaringan ini, kolaborasi dan koordinasi antara unit-unit pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat terjalin dengan baik untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.2.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Sistem Integrasi - JIP

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Nama Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
BJN-DAI.02.01.0 3.01	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Jaringan digunakan untuk operasional Intra Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Fiber Optik	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Gbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

3.2.5.3. Platform

A. Pusat Komputasi Awan

Katalog infrastruktur (pusat komputasi awan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (pusat komputasi awan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Pusat Komputasi Awan

ID	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud [Mengacu Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Jangka Waktu Pelayanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.02.03.01	Google Drive	untuk penyimpanan dokumen administrasi	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAI.03.02.03.02	Google drive	memantau surat masuk dan surat keluar untuk Bupati / Sekda	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Bagian Umum
BJN-DAI.03.02.03.03	Google drive	untuk penyimpanan data	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Bagian Organisasi
BJN-DAI.03.02.03.04	Google Drive	Aplikasi penyimpanan	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI	RAI.03.02.03 SAAS	Badan Kesatuan Bangsa dan

ID	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud [Mengacu Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Jangka Waktu Pelayanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)
		yang dapat digunakan untuk menyimpan dan sharing data									AWAN		Politik
BJN-DAI.03.02.03.05	bpbdbojonegoro	penyimpanan data penting OPD	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free			Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAI.03.02.03.06	Google Drive	Menyimpan data penting kantor dan membagikan file-file penting ke pegawai maupun ke instansi lain	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	Sekretariat Bappeda	Subkoordinato r Program dan Laporan	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAI.03.02.03.07	Google Drive	Menyimpan data pribadi serta penting kantor dan membagikan file-file penting ke pegawai maupun ke instansi lain	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	Sekretariat Bappeda	Subkoordinato r Program dan Laporan	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAI.03.02.03.08	Simpan Data	Cloud yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro	SaaS	Sendiri	Dinkominfo Bojonegoro	Free	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ditentukan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAI.03.02.03.09	Google Drive	GDRIVE	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAI.03	Simpan Cloud	Penyimpanan	SaaS	Instansi	Dinkominfo	Free	E-Government	-	Tidak	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Kesehatan

ID	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud [Mengacu Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Jangka Waktu Pelayanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)
.02.03.10		Data		Pemerintah Lain	Bojonegoro				Ditentukan		KOMPUTASI AWAN		
BJN-DAI.03 .02.03.11	Google Drive	Penyimpanan Data	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03 .02.03.12	Dropbox	Penyimpanan Data	SaaS	Swasta Luar Negeri	Dropbox	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03 .02.03.13	Simpan Cloud	Penyimpanan cloud	SaaS	Instansi Pemerintah Lain	Dinkominfo Bojonegoro	Free	Bidang TIK Dinas Kominfo	Sub Koordinator Pengembangan Infrastruktur Pusat Data	Tidak Ditentukan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03 .02.03.14	Google Drive	Google Drive	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	Tidak ada	Tidak ada	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAI.03 .02.03.15	Simpan Cloud	Aplikasi penyimpanan yang dapat digunakan untuk menyimpan dan sharing data	SaaS	Instansi Pemerintah Lain	Dinkominfo Bojonegoro	Free	Dinkominfo Bojonegoro	Dinkominfo Bojonegoro	Tidak Ditentukan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BJN-DAI.03 .02.03.16	Google Drive	Data pada Program dan Laporan	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Pendidikan
BJN-DAI.03 .02.03.17	Google drive	-	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	tidak ada	tidak ada	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAI.03 .02.03.18	Google drive	Dinas Perumahan Kawasan	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas PKP dan Cipta Karya

ID	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud [Mengacu Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Jangka Waktu Pelayanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)
		Permukiman dan Cipta Karya ciptakaryadpkpc k@gmail.com											
BJN-DAI.03 .02.03.19	Google drive	DOKUMEN RENSTRA RENJA; SOTK; SOP	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	-	-	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Dinas Sosial
BJN-DAI.03 .02.03.20	Simpan Cloud	Dinkominfo	SaaS	Instansi Pemerintah Lain	Dinkominfo Bojonegoro	Free	Dinkominfo	Dinkominfo	Tidak Ditetapkan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	RSUD Sumberrejo
BJN-DAI.03 .02.03.21	Google Drive	Penyimpanan data terkait program dan layanan	SaaS	Swasta Luar Negeri	Google	Free	Puskesmas Bojonegoro	Puskesmas Bojonegoro	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.03 SAAS	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAI.03 .02.02.01	Telkom Sigma	Penyimpanan data terkait program dan layanan	SaaS	BUMN	Telkom Sigma	150000000		Dinkominfo Bojonegoro	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.02 IAAS	
BJN-DAI.03 .02.02.02	Icon+	Penyimpanan data terkait program dan layanan	SaaS	BUMN	Icon +	150000000		Dinkominfo Bojonegoro	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.02 IAAS	
BJN-DAI.03 .02.02.03	CLOUD PDN	Penyimpanan data terkait program dan layanan	SaaS	Instansi Pemerintah Lain	Kemenkom digi	Free		Dinkominfo Bojonegoro	Pertahun	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.02 IAAS	

B. Perangkat Keras Server

Katalog infrastruktur (perangkat keras server) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras server) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna an Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilika n	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpan an	Teknik Penyimpan an	→ RAI Level 1 (Dependen cy)	→ RAI Level 2 (Dependen cy)	→ RAI Level 3 (Dependen cy)	→ Instansi (Dependen cy)
BJN-DAI.03.01.01.01	Kominfo	Si-Sanduk (Santunan Duka)	Web Server		Instansi Pemerintah Lain	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Kominfo	Kominfo	High End	Kominfo	Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Bagian Kesejahtera an Rakyat
BJN-DAI.03.01.01.02	LENOVO SR550	Server LPSE	Web Server,Mail Server,Aplik asi,Databas e,File Server,Activ e		Sendiri	Bagian Pengada n Barang/Jasa	Data Centre Dlnas Kominfo	Pusat Data Dinkominfo	Centos 8	128 G	High End	10T	RAID 5+1 Hot Spare	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Bagian Pengada n Barang/Jas a
BJN-DAI.03.01.01.03	LENOVO SR550	Server LPSE	Web Server,Mail Server,Aplik asi,Databas e,File		Sendiri	Bagian Pengada n Barang/Jasa	Data Centre Dlnas Kominfo	Pusat Data Dinkominfo	Centos 8	128 G	High End	10T	RAID 5+1 Hot Spare	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Bagian Pengada n Barang/Jas a

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna an Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilika n	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpan an	Teknik Penyimpan an	→ RAI Level 1 (Dependen cy)	→ RAI Level 2 (Dependen cy)	→ RAI Level 3 (Dependen cy)	→ Instansi (Dependen cy)
			Server,Active														
BJN-DAI.03.01.01.04	Kominfo (SIKIP)	Kominfo												RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Bagian Organisasi
BJN-DAI.03.01.01.05	Satu Data	memuat seluruh data yang merupakan output dari masing-masing PD seluruh Bojonegoro	Web Server		Sendiri	Kominfo	Kominfo	Pusat Data Dinkomnfo						RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAI.03.01.01.06	Web Service Cek PBB	Web Service Cek PBB	Web Server		Sendiri	Bapenda	Bapenda	Internal PD	Windows	10.0 GB	High End	-	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.01.01.07	SIMPADU	SIMPADU	Web Server		Sendiri	Bapenda	Bapenda	Internal PD	Windows	128 GB	High End	-	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.01.01.08	SIMDA3	SIMDA3	Web Server		Sendiri	BPKAD	BPKAD	Internal PD	Windows	2 TB	-	-	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAI.03.01.01.09	Supermicro server 6017R-WRF	memory 512 GB, Intel Xeon Processor 6C E5-2620v2	Server Aplikasi		Sendiri	Bappeda	Bappeda	Pusat Data Kominfo	Linux	512 GB	Mid End	2x1TB	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		2.1G, HDD 2x 1TB SATA, Inteli350 dual port gigabit ethernet															
BJN-DAI.03.01.01.10	Lenovo	Server Lenovo	Proxy		Sendiri	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Windows Server	128 GB	High End	2 TB	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAI.03.01.01.11	Lenovo	Server Lenovo	Proxy		Sendiri	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Windows Server	64 GB		1 TB	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAI.03.01.01.12	IBM	Server IBM	Server Aplikasi		Sendiri	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Dinas Dukcapil	Windows Server	64 GB		2 TB	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAI.03.01.01.13	E-health	Server untuk aplikasi E-health	Web server		Sendiri	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Windows Server	16Gb	High End	2 TB	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.01.01.14	Beroe Net Computindo	Tidak ada	Server Database		Sendiri	DKPP	DKPP	Internal PD	Windows	-		-	-	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAI.03.01.01.15	Dell Power Edge R720	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna an Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilika n	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpan an	Teknik Penyimpan an	→ RAI Level 1 (Dependen cy)	→ RAI Level 2 (Dependen cy)	→ RAI Level 3 (Dependen cy)	→ Instansi (Dependen cy)
BJN-DAI.03.01.01.16	IBM System x3530 M4	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.17	IBM System x3530 M4	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.18	Lenovo System x3650 M5	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.19	Lenovo System x3650 M5	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.20	Lenovo ThinkServer SR590	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.21	Lenovo System x3650 M5	Akses via Web Browser Server Developmen t	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.22	Lenovo ThinkServer SR590	Akses via Web Browser Server Dinas Pendidikan	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRU KTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna an Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependen cy)	→ RAI Level 2 (Dependen cy)	→ RAI Level 3 (Dependen cy)	→ Instansi (Dependen cy)
BJN-DAI.03.01.01.23	ASUS RS520	Akses via Web Browser	Web Server											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.24	Lenovo ThinkAgile HX3320 Appliance	AHV Hypervisor el7.nutanix.2 0201105.222 9 AOS 5.20.2 Cluster Maintenance Utilities 2.0.3 FSM 2.1.1 Foundation 5.0.4 Foundation Platforms 2.7 Licensing LM.2020.1.1 .1 NCC 4.3.0	Server Database											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.25	Lenovo ThinkAgile HX3320 Appliance	AHV Hypervisor el7.nutanix.2 0201105.222 9 AOS 5.20.2 Cluster Maintenance	Server Database											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		e Utilities 2.0.3 FSM 2.1.1 Foundation 5.0.4 Foundation Platforms 2.7 Licensing LM.2020.1.1 . 1 NCC 4.3.0															
BJN-DAI.03.01.01.26	Lenovo ThinkAgile HX3320 Appliance	AHV Hypervisor el7.nutanix.2 0201105.222 9 AOS 5.20.2 Cluster Maintenance Utilities 2.0.3 FSM 2.1.1 Foundation 5.0.4 Foundation Platforms 2.7 Licensing LM.2020.1.1 . 1 NCC 4.3.0	Server Database											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.01.27	IBM System x3530 M4	Kode: SV01 Server Database	Server Database											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.28	IBM System x3250 M5	Kode: SV02 Server SMS Gateway	Proxy											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.29	Dell Power Edge R430	Kode: SV03 Proxy Server	Proxy											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.30	Supermicro SuperServer	Kode: SV04 Server Geoportal	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.31	Supermicro SuperServer	Kode: SV05 Server Geoportal	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.32	Rakitan	Kode: SV06 Server E-Health	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.33	Lenovo System x3650 M5	Kode: SV07 giteaServ	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.01.34	Lenovo System x3650 M5	Kode: SV08 Server Simcan	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.35	Lenovo ThinkServer SR550	Kode: SV09 LPSEServ1	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.36	Lenovo ThinkServer SR550	Kode: SV10 LPSEServ2	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.37	Dell Power Edge R740	Kode: SV11 BKPPServ	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.38	Lenovo ThinkServer SR550	Kode: SV12 Open SID	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.39	Lenovo ThinkServer SR550	Kode: SV13 Simpan	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.40	Dell Power Edge R440	Kode: SV14 E-TLE	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.01.41	Lenovo ThinkServer SR590	Kode: SV15 Open DK	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.42	Lenovo ThinkServer SR590	Kode: SV16 Harvester HCI	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.43	Lenovo ThinkServer SR590	Kode: SV17 BKPPServ2	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.44	Lenovo System x3650 M5	NS2 ns2.bojonegoro.rokab.go.id	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.45	Dell Power Edge R710	NS3 ns3.bojonegoro.rokab.go.id	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.46	IBM Storewize V37000	ST01	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.47	Infotrend EonNAS 3012R	ST02	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 1 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.01.48	IBM Storewize V5030 SFF	ST03	Server Aplikasi											RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.01.49	SERVER APLIKASI BOJONEGORO TRAFFIC INFORMATION CENTER	DESKTOP SERVER (RAKITAN)	Server Aplikasi		Sendiri	DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOJONEGORO	DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOJONEGORO	INTERNAL PD	LINUX	8GB	Mid End	1000 GB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.01.01.50	SERVER STREAMING CCTV	SERVER STREAMING CCTV	Server Aplikasi		Sendiri	DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOJONEGORO	DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOJONEGORO	INTERNAL PD	WINDOWS SERVER	16GB	Mid End	1000 GB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.01.01.51	BACKUP DATABASE SIM PKB	DELL R240	Server Database		Sendiri	DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOJONEGORO	DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOJONEGORO	INTERNAL PD	LINUX	8GB	High End	1000 GB	RAID	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.01.01.52	Server Database	R340 Intel Xeon E-2226G 3.4 GHz, 12M cache, 6C/6T, turbo (80W) Trusted Platform Module 1.2 PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot,	Server Database		Sendiri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Internal PD	Belum difungsikan	2 TB		2 TB	Belum difungsikan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Pengguna an Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependen cy)	→ RAI Level 2 (Dependen cy)	→ RAI Level 3 (Dependen cy)	→ Instansi (Dependen cy)
		R240/R340 Heatsink for 80W or less CPU Dual Deskside Power Cord, 250V,1.8 M 3 x 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM 3 x 1.2 TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hotplug Hard Drive, 3.5in															
BJN-DAI.03.01.01.53	LENOVO SR59 / 2X	INTEL XEON	Web Server, Database, Aplikasi		Sendiri	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data Dinkominfo	Ubuntu Linux	16GB	Mid end	1000GB	Raid 5	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.01.01.54	DELL R730	Sinkronisasi Siap RS, BPJS dan Bank Jatim	Web Server, Database		Sendiri	RSUD	RSUD	Internal PD	Windows Server 2012					RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesome
BJN-DAI.03.01.01.55	DELL POWEREDGE R540	DIGUNAKAN SERVER SIMRS	WEBSERVER , APLIKASI JAVA, DATABASE		Sendiri	RUMAH SAKIT	IT	INTERNAL PD	CENTOS 7	16 GB	Mid End	2TB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	RSUD Padangan
BJN-DAI.03.01.01.56	DELL POWEREDGE R440	DIGUNAKAN SERVER E-KLAIM KEMENKES	WEBSERVER , DATABASE		Sendiri	RUMAH SAKIT	IT	INTERNAL PD	WINDOWS 10 PRO	8 GB	Low End	1,2 TB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN	RAI.03.01.01 SERVER	RSUD Padangan

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		DAN BPJS													APLIKASI		
BJN-DAI.03.01.01.57	DELL POWEREDGE T330	SERVER AKREDITASI	WEN SERVER, DATABASE		Sendiri	RUMAH SAKIT	IT	INTERNAL PD	WINDOWS 10 PRO	8 GB	Low End	1 TB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	RSUD Padangan

C. Perangkat Keras Storage

Katalog infrastruktur (perangkat keras storage) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras storage) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Keras Storage

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
BJN-DAI.03.01.0 2.01	hardisk eksternal	file kajian dan analisa kebijakan	file kajian dan analisa kebijakan		bagian hukum	Bagian Hukum			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Bagian Hukum
BJN-DAI.03.01.0 2.02	Seagate	External hardisk	administrasi		BPBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
BJN-DAI.03.01.0 2.03	Flashdisk 16 GB	-	persuratan dan kepegawaian		Bagian Umum	Bagian Umum			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Bagian Umum
BJN-DAI.03.01.0 2.04	Hardisk Eksternal	Penyimpanan data	Data Bagian Organisasi		Bagian Organisasi	Bagian Organisasi			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Bagian Organisasi
BJN-DAI.03.01.0 2.05	Seagate Backup Plus Portable 4TB External Hard Drive - Red (STDR4000902)	Penyimpanan dokumen foto dan video pimpinan	foto, video		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAI.03.01.0 2.06	HARDISK	SEAGATE	DOKUMEN OPD		BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
BJN-DAI.03.01.0 2.07	Hardisk Eksternal	perangkat portabel yang dapat Anda pasang pada	Data Administrasi Keuangan dan Program Laporan		Bakesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
		komputer mana pun untuk mengakses data yang disimpannya											
BJN-DAI.03.01.0 2.08	Hard Disk	Buat menyimpan data penting OPD	Kebencanaan		tidak ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAI.03.01.0 2.09	Hardisk Eksternal	Hardisk Eksternal	-		Bapenda	Badan Pendapatan Daerah			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.01.0 2.10	File D	Berisi File Kantor Penting	=+/- 106 GB		Bappeda Kabupaten Bojonegoro	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAI.03.01.0 2.11	Google Drive	Berisi Back-Up Data pada Flash Disk Kantor	=+/- 11 GB		M. S. Anshori	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAI.03.01.0 2.12	Hardisk	-	-		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAI.03.01.0 2.13	Harddisk Eksternal	Harddisk Eksternal	Penyimpanan Data kantor		Dinas Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAI.03.01.0 2.14	Synology DS1517+	NAS	Dokumen, Foto, Video		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan			Network Attached	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.02 MEDIA	Dinas Kesehatan

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
					Kabupaten Bojonegoro				Storage (NAS)		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	
BJN-DAI.03.01.0 2.15	Hardisk Eksternal	Hardisk Eksternal	Word, Excel		DKPP Bojonegoro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAI.03.01.0 2.16	Hardisk	Hardisk OPD	-		-	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAI.03.01.0 2.17	HDD Eksternal	Hardisk Eksternal	Data administrasi kantor		DPMTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BJN-DAI.03.01.0 2.18	Flashdisk	media penyimpanan portabel. Kapasitas penyimpanan yang ada pada flashdisk ini tidak sebesar harddisk.	0		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.01.0 2.19	Hardisk	Berfungsi sebagai penyimpanan data yang ada pada komputer. Harddisk ini			Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
		memiliki kapasitas penyimpanan yang luar biasa besar.											
BJN-DAI.03.01.02.20	HARD DISK EXTERNAL	HARD DISK EXTERNAL	DATA KANTOR		SEKRETARIAT	Dinas Perhubungan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.01.02.21	Server Database	R340 Intel Xeon E-2226G 3.4 GHz, 12M cache, 6C/6T, turbo (80W) Trusted Platform Module 1.2 PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot, R240/R340 Heatsink for 80W or less CPU Dual Deskside Power Cord, 250V,1.8 M 3 x 16GB 2666MT/s	Data Tenaga Kerja dan Lowongan Kerja		Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Instansi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Network Attached Storage (NAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
		DDR4 ECC UDIMM 3 x 1.2 TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hotplug Hard Drive, 3.5in											
BJN-DAI.03.01.0 2.22	Seagate	Seagate Hardisk Exos	Alih Media Kearsipan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.01.0 2.23	Western Digital	Western Digital	Data Kearsipan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.01.0 2.24	Seagate	Backup Plus Slim	Alih Media Kearsipan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.01.0 2.25	Flash Disk	Toshiba 16GB	Data Internal		Dinas Pernakan dan Perikanan	Dinas Pernakan dan Perikanan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Pernakan dan Perikanan
BJN-DAI.03.01.0 2.26	Memori Internal Komputer	Memori Internal PC	Data Internal		Dinas Pernakan dan Perikanan	Dinas Pernakan dan Perikanan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Pernakan dan Perikanan
BJN-DAI.03.01.0 2.27	Hard Disk External	Aspire, Seagate, 1 TB dan 500GB	Data Internal		Dinas Pernakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro	Dinas Pernakan dan Perikanan			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Pernakan dan Perikanan

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
BJN-DAI.03.01.0 2.28	Hard Disk	Pengadaan Hard Disk	Untuk menyimpan database internal OPD		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya	Dinas PKP dan Cipta Karya			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas PKP dan Cipta Karya
BJN-DAI.03.01.0 2.29	HARD DISK	JUMLAH 3 MERK TOSHIBA	MENYIMPAN DATA		DINAS SOSIAL	Dinas Sosial			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.01.0 2.30	DELL NAS Storage	Storage server untuk penyimpanan file dokumen hasil penunjang medis dan e-Rekam Medis	pdf, jpeg, jpg		RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo			Network Attached Storage (NAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAI.03.01.0 2.31	Harddisk	Harddisk untuk penyimpanan data rumah sakit (database rekam medis pasien)	sql data		Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo	RSUD Sumberrejo			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	RSUD Sumberrejo
BJN-DAI.03.01.0 2.32	Hard disk external	Penyimpanan data	Data akreditasi Puskesmas		Puskesmas	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro			Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.02 MEDIA PENYIMPANAN (DATA STORAGE)	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro

D. Perangkat Keras Jaringan

Katalog infrastruktur (perangkat keras jaringan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras jaringan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.4. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat keras jaringan

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.03.01	Core Router (Mikrotik CCR2116-12G-4S+)	Perangkat yang berfungsi untuk gateway antara jaringan intra dan internet	Router	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.03.02	Core Router Backup(MikroBits Dinara v3 (RoS Level 5))	Perangkat yang berfungsi untuk gateway antara jaringan intra dan internet	Router	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.03.03	Core Switch (Cisco WS-C4506-E)	Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke suatu jaringan.	Switch L3	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.03.04	Core Switch Backup (Cisco WS-C4506-E)	Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan	Switch L3	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		perangkat ke suatu jaringan.								
BJN-DAI.03.01.03.05	VPN Router (Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S +)	Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dari jaringan publik ke jaringan intra	Router	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika
TSM-DAI.03.01.03.06	Router Board Mikrotik (CCR1036-12G-4S)		Router	Sendiri	Dishubkominfo	Dishubkominfo	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Dishubkominfo
TSM-DAI.03.01.03.07	Switch Manageable (D-Link DGS-3120-30TS)		Switch L3	Sendiri	Dishubkominfo	Dishubkominfo	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Dishubkominfo

E. Perangkat Keras Keamanan

Katalog infrastruktur (perangkat keras keamanan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras keamanan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Keras Keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Keamanan Device	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.04.01	Firewall Palo Alto		Firewall	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.04 PERANGKAT KERAS KEAMANAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.04.02	Firewall Palo Alto		Firewall	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.04 PERANGKAT KERAS KEAMANAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.04.03	Biometrik Scanner		Intrusion Prevention System	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.04 PERANGKAT KERAS KEAMANAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.01.04.04	Jaga Siber Bojonegoro	Aplikasi pemantau keamanan informasi pada sistem elektronik	Intrusion Prevention System	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.04 PERANGKAT KERAS KEAMANAN	Dinas Komunikasi dan Informatika

F. Perangkat Periferal

Katalog infrastruktur (perangkat keras periferal) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras periferal) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.6. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Periferal

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.05.01	Proyektor	menampilkan informasi	Output	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Pemerintahan
BJN-DAI.03.01.05.02	Monitor	menampilkan informasi	Output	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Pemerintahan
BJN-DAI.03.01.05.03	Perangkat Elektronik yang mendukung	HT	Input/Output	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAI.03.01.05.04	GPS	Penunjuk Arah	Input	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BJN-DAI.03.01.05.05	proyektor	Penampil Gambar	Output	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Administrasi Pembangunan
BJN-DAI.03.01.05.06	kamera digital	Penangkap Gambar	Input	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Administrasi Pembangunan
BJN-DAI.03.01.05.07	televisi	Penampil Gambar	Input/Output	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Administrasi Pembangunan
BJN-DAI.03.01.05.08	speaker	Pengeras Suara	Output	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Administrasi Pembangunan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.01.05.09	TV	Penampil Gambar	Input/Output	Bagian Umum	Bagian Umum	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Umum
BJN-DAI.03.01.05.10	Proyektor	Penampil Gambar	Output	Bagian Umum	Bagian Umum	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Umum
BJN-DAI.03.01.05.11	Lcd Proyektor	Penampil Gambar	Output	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Organisasi
BJN-DAI.03.01.05.12	Camera	Camera dan handycam (1)	Input	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Organisasi
BJN-DAI.03.01.05.13	Scanner	Pemindai Dokumen / Gambar	Input/Output	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Organisasi
BJN-DAI.03.01.05.14	Printer	Sebagai alat cetak dokumen dan scan dokumen PD.	Output	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAI.03.01.05.15	Speaker aktif	Pengeras suara dalam ruangan, sebagai alat tambahan untuk beberapa fungsi terkait video conference dan pengarahannya virtual	Output	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAI.03.01.05.16	Canon EOS 7D Mark II	Canon EOS 7D Mark II EF-S18-135mm dilengkapi dengan sensor CMOS	Input	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		20.2 megapiksel yang hebat, ISO 16,000, dan dioperasikan oleh prosesor pencitraan ganda DIGIC 6 untuk memastikan kualitas gambar yang sempurna dalam kondisi pemotretan dan situasi pencahayaan. Fungsi Piksel Ganda CMOS AF menghasilkan fokus yang halus dan akurat ketika merekam video, sehingga subjek tetap fokus bahkan pada suasana yang paling dinamis.							
BJN-DAI.03.01.05.17	Canon EOS 80D	Canon EOS 80D Kit I EF-S 18-55mm merupakan kamera DSLR Canon EOS 80D namun dilengkapi dengan Lensa Kit	Input	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		18- 55mm IS STM. Kamera DSLR ini mempunyai sensor 24.2MP APS-C CMOS, Image Processor DIGIC 6, dan ISO yang bisa mencapai ISO 25600.							
BJN-DAI.03.01.05.18	SONY Alpha a7 III Kit 24-105mm Kamera Mirrorless	Kamera ini hadir dengan resolusi 42.4 megapixel, itu artinya kamera Sony tersebut akan mampu dalam menghasilkan foto dengan kualitas tinggi, apalagi di dalamnya juga tersemat sensor Full Frame. Sony A7R Mark III tidak bisa diandalkan untuk kebutuhan foto selfie, hal yang membuatnya unggul dari pendahulunya adalah penggunaan panel	Input	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		sentuh yang akan memudahkan pemilihan titik fokus. Kemudian untuk sistem fokusnya sendiri terdiri dari 399 titik Phase Detect dan 425 titik Contrast Detect. Sony bahkan sudah membekali kamera mirrorless-nya tersebut dengan teknologi Eye AF, maka secara otomatis kamera ini dapat mengunci fokus pada mata objek dan 4D Focus yang mampu menjaga fokus meskipun sedang memotret objek yang bergerak cepat. Meskipun memiliki resolusi yang ekstra tinggi, 42.4 megapixel Sony tetap							

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		menambahkan fitur yang memungkinkan kamera ini bisa menghasilkan foto dengan resolusi 169.2 megapixel.							
BJN-DAI.03.0 1.05.19	Seagate Backup Plus Portable 4TB External Hard Drive - Red (STDR4000902)	Penyimpanan Dokumentasi Pimpinan, Foto, Video, Rilis	Input/Output	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BJN-DAI.03.0 1.05.20	CAMERA VIDEO	CANON EOS 1200D	Input	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
BJN-DAI.03.0 1.05.21	LCD PROJECTOR	OPTAMA W 316 ST	Output	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
BJN-DAI.03.0 1.05.22	Keyboard	Keyboard terdiri dari berbagai tombol huruf, angka, dan simbol, serta	Input	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		tombol fungsi lainnya							
BJN-DAI.03.0 1.05.23	Mouse	Mouse berfungsi untuk menjalankan cursor di dalam GUI (Graphic User Interface) dan melakukan inputan dengan cara mengklik pada tombol	Input	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAI.03.0 1.05.24	Microphone	perangkat peripheral yang sangat dibutuhkan sekali pada sebuah device	Input	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAI.03.0 1.05.25	Speaker	sebuah perangkat peripheral output yang memberikan data berupa suara atau audio	Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAI.03.0 1.05.26	Proyektor	sebuah perangkat peripheral output yang dapat menampilkan data dengan proyeksi yang lebih luas dan besar	Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAI.03.0 1.05.27	Harddisk Eksternal	sebuah perangkat peripheral	Input/Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		penyimpanan dengan ukuran dan jumlah data penyimpanan yang lebih besar dari flash disk			Bangsa dan Politik		APLIKASI		
BJN-DAI.03.0 1.05.28	Scanner	sebuah perangkat peripheral input yang memiliki fungsi untuk menyalin/mengcopy data hardcopy menjadi dokumen softcopy	Input/Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAI.03.0 1.05.29	TV	Entertainment system	Input/Output	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.30	Scanner	Scanner	Input/Output	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.31	Plotter	Plotter	Output	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.32	Sound System	Sound System	Output	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.33	Camera Video	Camera Video	Input	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAI.03.0	Camera	Camera Electronic	Input	Badan Pendapatan	Badan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05	Badan Pendapatan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
1.05.34	Electronic			Daerah	Pendapatan Daerah		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PERIPHERAL	Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.35	Huawei	alat yg digunakan untuk mengirimkan paket data		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.36	tp-link	mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.37	Router	mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAI.03.0 1.05.38	HT	Motorola	Input/Output	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Sekretariat DPRD
BJN-DAI.03.0 1.05.39	Tustel	Penangkap Gambar	Input	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BJN-DAI.03.0 1.05.40	KAMERA	NIKON	Input	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAI.03.0 1.05.41	DRONE KAMERA	DJIMAVIX	Input	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAI.03.0	HARDISK	Penyimpanan	Input/Output	Dinas Kepemudaan	Dinas	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05	Dinas Kepemudaan dan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
1.05.42	EXTERNAL	Dokumentasi Pimpinan, Foto, Video, Rilis	t	dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PERIPHERAL	Olahraga
BJN-DAI.03.0 1.05.43	HT	MOTOROLA	Input/Output	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAI.03.0 1.05.44	TV	TV TABUNG MERK SHARP, SMART TV 55 INCH TV SAMSUNG /USB HDMI HARD PANEL LED 32 INCH	Input/Output	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAI.03.0 1.05.45	LCD PROYEKTOR	BENQ	Output	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAI.03.0 1.05.46	Fingerprint	Alat perekaman	Input	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAI.03.0 1.05.47	Perekam Iris Mata	Irish Scanner	Input	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAI.03.0 1.05.48	Kamera	Penangkapan Gambar	Input	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
					Sipil				
BJN-DAI.03.0 1.05.49	Camera	Penangkapan Gambar	Input	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.50	Sound System	Pengeras Suara	Output	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.51	CCTV	Perekam Gambar	Input	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.52	Perangkat Video Conference	Kamera, Sound, Microphone	Input/Output	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.53	Webcam	Perekam Gambar	Input	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.54	Microphone	Pengeras suara	Input	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.55	Radio Rig	Media Transmisi	Input/Output	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Kesehatan
BJN-DAI.03.0 1.05.56	LCD Proyektor	LCD Proyektor	Output	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAI.03.0 1.05.57	Camera Elektronik	Kamera DSLR	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.58	Camera Elektronik	Digital Camera	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
					Informatika				
BJN-DAI.03.0 1.05.59	Slide Proyektor	Slide Proyektor	Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.60	Camera Video	webcam	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.61	Handy Cam	Handy Cam	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.62	Camera Elektronik	Penangkap Gambar	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.63	Camera Elektronik	Penangkap Gambar	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.64	Televisi	Penampil Gambar	Input/Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.65	Camera Elektronik	Penangkap Gambar	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.66	Televisi	Penampil Gambar	Input/Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.0 1.05.67	DRONE	Penangkap Gambar dan Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.68	Camera Video	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.69	Camera Video	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.70	Camera Video	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.71	Camera Video	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.72	Videotron	Penampil Gambar	Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.73	PROJEKTOR LCD	Penampil Gambar	Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.74	Handy Cam	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0	Camera Video	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi	Dinas	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05	Dinas Komunikasi dan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
1.05.75				dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PERIPHERAL	Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.76	Handy Talky (HT)	Alat Komunikasi frekuensi	Input/Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.77	Videotron	Penampil Gambar	Output	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.78	Handy Cam	Perekam Video	Input	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAI.03.0 1.05.79	Camera	Camera	Input	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAI.03.0 1.05.80	LCD	LCD	Output	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAI.03.0 1.05.81	DRONE	DRONE	Input	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Lingkungan Hidup
BJN-DAI.03.0 1.05.82	Keyboard	Keyboard	Input	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAI.03.0 1.05.83	Mouse	Mouse	Input	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
					Marga dan Penataan Ruang				
BJN-DAI.03.0 1.05.84	Monitor	Monitor	Output	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAI.03.0 1.05.85	LCD Proyektor	LCD Proyektor	Output	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAI.03.0 1.05.86	Kamera	Kamera	Input	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAI.03.0 1.05.87	Proyektor	Penampil Gambar	Output	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
BJN-DAI.03.0 1.05.88	Projector	salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada	Output	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dsb.			Berencana				
BJN-DAI.03.0 1.05.89	Monitor	perangkat hardware untuk menampilkan informasi kepada publik / internal PD dengan visualisasi / gambar.	Output	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAI.03.0 1.05.90	SCANNER	Scanner merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital.	Input/Output	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAI.03.0 1.05.91	Camera Digital	kamera merupakan suatu peranti untuk	Input	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Pada kamera televisi, sistem lensa membentuk gambar pada sebuah lempeng yang peka cahaya.		dan Keluarga Berencana	Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				Keluarga Berencana
BJN-DAI.03.01.05.92	Handy Cam	Handycam merupakan sebuah perangkat yang mampu merekam video dan memiliki kerja yang hampir sama seperti kamera digital. Video yang di rekam tersebut sebenarnya merupakan sebuah series dari gambar yang ditangkap oleh lensa kamera dari handycam	Input	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
BJN-DAI.03.01.05.93	HDD Eksternal	Harddisk eksternal untuk menyimpan data di luar komputer	Input/Output	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
					Terpadu Satu Pintu				
BJN-DAI.03.0 1.05.94	Mesin Absensi	Untuk absensi pegawai	Input	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.0 1.05.95	AC	Pendingin Ruangan	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.0 1.05.96	Kulkas	Lemari pendingin	Tidak Ada	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.0 1.05.97	TV	Alat penghasil gambar dan suara	Input	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.0 1.05.98	Kipas angin	Alat untuk menghasilkan angin		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.0 1.05.99	Amplifier	penguat sinyal suara berbentuk analog dari sumber suara		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.0 1.05.100	Sound	Pemancar suara	Output	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAI.03.0 1.05.101	SCANNER	SCANNER		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.0 1.05.102	PROYEKTOR	PROYEKTOR	Output	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.0 1.05.103	PERANGKAT AUDIO (SPEAKER)	PERANGKAT AUDIO (SPEAKER)	Output	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.0 1.05.104	CAMERA SLR	CAMERA SLR	Input	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perhubungan
BJN-DAI.03.0 1.05.105	Peripheral Input	Keyboard dan Mouse	Input	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAI.03.0 1.05.106	Peripheral Output	LCD monitor dan Printer	Output	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAI.03.0 1.05.107	Peripheral Penyimpanan	Hardisk dan atau SSD	Input/Output	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAI.03.0	Kamera	Sony, Nikon	Input	Dinas Perindustrian	Dinas	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05	Dinas Perindustrian dan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
1.05.108				dan Tenaga Kerja	Perindustrian dan Tenaga Kerja		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PERIPHERAL	Tenaga Kerja
BJN-DAI.03.0 1.05.109	Layar informasi elektronik	Penampil Gambar	Output	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAI.03.0 1.05.110	CCTV	Kamera Outdoor HikVision	Input	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAI.03.0 1.05.111	Radio	Trajed	Input	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.0 1.05.112	Camera Film	CANON	Input	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.0 1.05.113	Camera Video	NIKON	Input	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.0 1.05.114	Hardisk	Penyimpanan Dokumentasi Pimpinan, Foto, Video, Rilis	Input/Output	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAI.03.0 1.05.115	Digital Camera	CANON EOS 1100D, Sony / HXR-MC 1500 P,	Input	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Peternakan dan Perikanan

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		CANON EOS 1100D, SONY DSG / WX220, Sony A7 / ILCE-7M2/BQ			Perikanan				
BJN-DAI.03.0 1.05.116	LCD/Proyekt or	ACER	Output	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAI.03.0 1.05.117	Handycam	Canon 18 MP	Input	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAI.03.0 1.05.118	Hard Disk External	Seagate, Aspire, 1 TB, 500MB	Input/Output	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAI.03.0 1.05.119	Speaker Active	Dolby	Output	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Peternakan dan Perikanan
BJN-DAI.03.0 1.05.120	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Pengadaan CPU Database (Bidang PJU)		Dinas PKP dan Cipta Karya	Dinas PKP dan Cipta Karya	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas PKP dan Cipta Karya
BJN-DAI.03.0 1.05.121	Speaker Komputer	Pengadaan Speaker Bluetooth (Sekretariat)	Output	Dinas PKP dan Cipta Karya	Dinas PKP dan Cipta Karya	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas PKP dan Cipta Karya
BJN-DAI.03.0 1.05.122	Papan Bergerak	Pengadaan Papan Tulis Digital	Output	Dinas PKP dan Cipta Karya	Dinas PKP dan Cipta Karya	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas PKP dan Cipta Karya
BJN-DAI.03.0	Layar	Pengadaan Layar	Output	Dinas PKP dan Cipta	Dinas PKP	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05	Dinas PKP dan Cipta

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
1.05.123	Film/Projector	Rotari		Karya	dan Cipta Karya		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PERIPHERAL	Karya
BJN-DAI.03.0 1.05.124	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Pengadaan UPS		Dinas PKP dan Cipta Karya	Dinas PKP dan Cipta Karya	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas PKP dan Cipta Karya
BJN-DAI.03.0 1.05.125	SOUND SYSTEM	MERK ASHLEY DAN BMB	Output	Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.126	CAMERA VIDEO (DSLR)	MERK NIKON	Input	Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.127	uninterruptible power supply / UPS	MERK APC		Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.128	Layar Film/Projector	MERK PANASONIC	Output	Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.129	HARD DISK	MERK TOSHIBA	Input/Output	Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.130	AC DAN AC SPLIT	MERK POLYTRON, PANASONIC, LG, SHARP, HAIER, NATIONAL		Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.131	LCD Proyektor/Infocus	EPSON	Output	Dinas Sosial	Dinas Sosial	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas Sosial
BJN-DAI.03.0 1.05.132	CCTV - Camera Control Television System	CCTV pada Satuan Polisi Pamong Praja digunakan untuk mengawasi kinerja dan	Input	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Satuan Polisi Pamong Praja

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		keamanan aset.							
BJN-DAI.03.0 1.05.133	Mesin Absensi	Digunakan untuk absen kedatangan dan kepulangan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja.	Input	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAI.03.0 1.05.134	Camera Video	Camera video digunakan untuk mendokumentasi kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja	Input	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAI.03.0 1.05.135	Camera Flim	Camera film digunakan untuk mendokumentasi kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja	Input	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAI.03.0 1.05.136	Handy Talkie (HT)	Handy Talkie digunakan untuk kegiatan yang dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk koordinasi antara perseorangan.	Input/Output	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAI.03.0 1.05.137	Absensi sidik jari	Alat Sensor sidik Jari	Input	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoeseoemo	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoeseoemo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoeseoemo

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.0 1.05.138	Sidik Jari parkir	Alat Sensor sidik Jari	Input	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoeseoemo	RSUD Dr.R.Sosodo ro Djatikoeseo mo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoeseoemo
BJN-DAI.03.0 1.05.139	MESIN ANTRIAN POLIKLINIK	Alat Cetak	Input/Output	RSUD Padangan	RSUD Padangan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	RSUD Padangan
BJN-DAI.03.0 1.05.140	TV	Untuk media edukasi pasien	Output	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAI.03.0 1.05.141	LED Sign	Untuk tampilan nomor antrian pasien, Papan nama Puskesmas	Output	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAI.03.0 1.05.142	LCD Proyektor	Untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar	Output	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro
BJN-DAI.03.0 1.05.143	CCTV	Untuk keamanan	Input	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Puskesmas Kecamatan Bojonegoro

G. Perangkat Lunak

Katalog infrastruktur (perangkat lunak) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat lunak) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.7. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Lunak

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Perangkat Sistem Operasi	Jenis Perangkat Sistem Utilitas	Jenis Perangkat Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi [Tanggal Berakhirnya Lisensi]	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependenc y)	→ RAI Level 3 (Dependenc y)	→ Instansi (Dependency)
BJN-DAI.03.0 1.07.01	Belum ada												

3.2.6. Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Mengacu pada Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2021, ada tiga hal yang perlu dilakukan pengecekan kondisi saat ini yaitu;

1. Standar keamanan
2. Penerapan keamanan
3. Kelaikan keamanan



Gambar 3.2.6.1 Komponen Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.

Secara umum, taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional pada tingkat 1 terdapat 3 domain keamanan yaitu: (1) Standar Keamanan, (2) Penerapan Keamanan, (3) Kelaikan keamanan.



Gambar 3.2.6.2. Domain Arsitektur Keamanan

3.2.6.1. Standar Keamanan

Standar keamanan berdasarkan Peraturan Presiden no 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional terdapat 3 (tiga) hal yaitu:

- 1. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- 2. Standar Keamanan Internasional
- 3. Regulasi lainnya.

Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini telah menyediakan kebijakan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.6.1.1 Daftar Peraturan Terkait Keamanan Informasi

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
BJN-DAK.01.01	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Kelola TIK dan Keamanan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Peraturan Pemerintah Daerah		2015		RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.02	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Peraturan Pemerintah Daerah		2022		RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.03	SK Bupati Bojonegoro Nomor : 188/500/KEP/412.013/2023 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2027	Peraturan Pemerintah Daerah		2023		RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.04	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 473.1/1486/412.213/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal. Himbauan Keamanan Informasi	Peraturan Pemerintah Daerah		21 September 2023		RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.05	Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor : 500.12.16.3/04/412.213/2024 Tentang Percepatan Transformasi Digital	Peraturan Pemerintah Daerah		2024		RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.06	SOP instalasi, konfigurasi, pengoperasian dan pengamanan ruang server dan komponen pendukungnya.	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
BJN-DAK.01.01.07	Prosedur Operasional Pusat data, Pusat Data Cadangan	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.01.08	Prosedur Operasional Server	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.01.09	SOP penanganan insiden dan masalah TIK	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.01.10	Prosedur Operasional Jaringan Intra Pemerintah	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.01.11	SOP Pengelolaan Kapasitas Server Data Center	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.01.01.12	SOP Penanganan Gangguan Koneksi Jaringan Internet	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANA N	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

3.2.6.2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan sebagai bentuk program kerja Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah diterapkan meliputi:

1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
3. Peningkatan Keamanan SPBE
4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
5. Audit Keamanan SPBE

A. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Katalog keamanan (edukasi kesadaran keamanan) berisi deskripsi mengenai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (edukasi kesadaran keamanan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.1. Referensi Arsitektur Keamanan - Edukasi Kesadaran Keamanan

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
BJN-DAK.02.01.01	Bimbingan Teknis Security Awareness 2024	Memberikan sosialisasi terkait security awareness pada OPD	11 Desember 2024	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE
BJN-DAK.02.01.02	Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi	Memberikan sosialisasi terkait Perlindungan Data Pribadi	6 Desember 2023	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE

B. Identifikasi Keamanan SPBE

Katalog keamanan (identifikasi keamanan) berisi deskripsi mengenai langkah-langkah identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (identifikasi keamanan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.2.. Referensi Arsitektur Keamanan - Identifikasi Keamanan

ID	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	RAK Level 1 (Dependency)	RAK Level 2 (Dependency)	→ Aplikasi (Dependency)
BJN-DAK.0 2.02.01	Penetration Testing menggunakan Invicti	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi	2025	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Aplikasi JDIH Pemkab Bojonegoro
BJN-DAK.0 2.02.02	Penetration Testing menggunakan Invicti	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi	2025	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Website Pemkab Bojonegoro
BJN-DAK.0 2.02.03	Penetration Testing menggunakan OWASP	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi	2025	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Website Pemkab Bojonegoro
BJN-DAK.0 2.02.04	Penetration Testing menggunakan BURP SUITE	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi sebelum mendapatkan alokasi Server	2025	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Aplikasi Si-Perkim (DPKP-CK)
BJN-DAK.0 2.02.05	Penetration Testing menggunakan BURP SUITE	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi sebelum mendapatkan alokasi Server	2024	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Aplikasi Angkutan Pelajar (Dishub)
BJN-DAK.0 2.02.06	Penetration Testing menggunakan BURP SUITE	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi sebelum mendapatkan alokasi Server	2024	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Aplikasi SIPD Aktual (BPKAD)
BJN-DAK.0 2.02.07	Penetration Testing menggunakan BURP SUITE	Melakukan analisa dan verifikasi setiap kemungkinan celah keamanan pada Aplikasi sebelum mendapatkan alokasi Server	2024	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	Aplikasi e-TPP (BKPP)

C. Peningkatan Keamanan SPBE

Katalog keamanan (peningkatan keamanan) berisi deskripsi mengenai upaya penguatan sistem, prosedur, dan teknologi keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (peningkatan keamanan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.3. Referensi Arsitektur Keamanan - Peningkatan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Keamanan Siber	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
BJN-DAK.02.03.01	Belum ada kegiatan					

D. Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Katalog keamanan (penanganan insiden keamanan) berisi deskripsi mengenai prosedur, mekanisme, dan sistem yang diterapkan dalam menangani insiden keamanan siber di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (penanganan insiden keamanan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.4. Referensi Arsitektur Keamanan - Penanganan Insiden Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	→ Aplikasi (Dependency))
BJN-DAK.02.04.01	Belum ada kegiatan				

E. Audit Keamanan SPBE

Katalog keamanan (audit keamanan) berisi deskripsi mengenai proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap penerapan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (audit keamanan) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.5. Referensi Arsitektur Keamanan - Audit Keamanan

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	→ Aplikasi (Dependancy)	→ Infrastruktur (Dependancy)
BJN-D AK.02 .05.0 1	Audit Indeks Keamanan Informasi 2021	c. perlu peningkatan	Internal	30 Desember 2021		Tata Kelola Keamanan Informasi	
BJN-D AK.02 .05.0 2	Laporan ITSA BSSN	c. perlu peningkatan	Eksternal	5 Desember 2022	Perbaikan Aplikasi	Aplikasi SIMANTAP	
BJN-D AK.02 .05.0 3	Layanan Digital Forensik BSSN	-	Eksternal	28 Agustus 2020	-	Aplikasi LPSE Kab. Bojonegoro	
BJN-D AK.02 .05.0 4	Laporan Audit Aplikasi	c. perlu peningkatan	Insternal	26 Agustus 2024	Perbaikan tata kelola dan manajemen pembuatan aplikasi	Layanan Aplikasi DAMISDA	
BJN-D AK.02 .05.0 5	Laporan Audit Infrastruktur	c. perlu peningkatan	Internal	26 Agustus 2024	perbaikan pada Tahap Perencanaaan, Pengembangan dan Impementasi Layanan		Layanan SPLP

F. Standar Teknis Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Berikut ini ditampilkan tabel pemenuhan standar teknis keamanan jaringan intra pemerintah sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2.6.2.6. Pemenuhan Standar Teknis Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.1.	Menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra	Tidak	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.2	Mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan	Tidak	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.3	Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait	Tidak	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.4	Membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik	Tidak	
Kontrol akses dan autentikasi	2.1	Menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah	Tidak	
Kontrol akses dan autentikasi	2.2	Menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra	Tidak	
Kontrol akses dan autentikasi	2.3	Menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra	Tidak	
Kontrol akses dan autentikasi	2.4	Mematikan atau membatasi protocol, port, dan layanan yang tidak digunakan	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.5	Menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.6	Menerapkan fungsi honeypot untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan	Tidak	
Kontrol akses dan autentikasi	2.7	Menerapkan virtual private network dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.8	Memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.9	Menerapkan secure endpoints	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.10	Memblokir layanan yang tidak dikenal	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.11	Menerapkan secure socket layer atau transport layer security versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.12	Menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.1	Menggunakan perangkat security information and event management untuk network logging dan monitoring	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.2	Menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.3	Menggunakan perangkat firewall	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.4	Menggunakan perangkat intrusion detection systems dan intrusion prevention systems	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.5	Menerapkan virtual private network terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.6	Menerapkan kontrol update patching pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.7	Menggunakan perangkat web application firewall	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.8	Menggunakan perangkat load balancer untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.9	Perbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.10	Mengunduh perangkat lunak melalui enterprise software distribution	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.11	Menerapkan sertifikat elektronik	Ya	
Kontrol keamanan gateway	4.1	Menerapkan content filtering	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.2	Menerapkan inspection packet filtering untuk memeriksa paket yang masuk pada Jaringan Intra	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.3	Menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat gateway	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Kontrol keamanan gateway	4.4	Memastikan perangkat gateway yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.5	Melaksanakan manajemen traffic gateway	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.6	Memastikan port tidak dibuka secara default	Ya	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.1	Menerapkan protokol keamanan access point nirkabel dan teknologi enkripsi terkini	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.2	Menerapkan media access control pada address filtering	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.3	Menerapkan dedicated service set identifier	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.4	Menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.5	Menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.6	Menerapkan manajemen vulnerability secara berkala dan berkelanjutan	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.7	Melakukan patching firmware secara rutin	Tidak	

G. Standar Teknis Keamanan Aplikasi Web

Berikut ini ditampilkan tabel pemenuhan standar teknis keamanan aplikasi web sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2.6.2.7. Pemenuhan Standar Teknis Keamanan Aplikasi Web

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Autentikasi	1.1	Menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi	Ya	
Autentikasi	1.2	Menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Autentikasi	1.3	Mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.4	Mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.5	Mengatur mekanisme pemulihan kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.6	Menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi	Ya	
Autentikasi	1.7	Menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi	Tidak	
Manajemen sesi	2.1	Menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi	Tidak	
Manajemen sesi	2.2	Menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi	Tidak	
Manajemen sesi	2.3	Mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi	Tidak	
Manajemen sesi	2.4	Mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.5	Validasi dan pencantuman session id	Ya	
Manajemen sesi	2.6	Perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi	Ya	
Manajemen sesi	2.7	Perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna	Ya	
Persyaratan kontrol akses	3.1	Menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses	Ya	
Persyaratan kontrol akses	3.2	Mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus menerus pada fungsi	Tidak	
Persyaratan kontrol akses	3.3	Mengatur antarmuka pada sisi administrator	Tidak	
Persyaratan kontrol akses	3.4	Mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan	Ya	
Validasi Input	4.1	Menerapkan fungsi validasi input pada sisi server	Ya	
Validasi Input	4.2	Menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi	Ya	
Validasi Input	4.3	Memastikan runtime environment aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input	Ya	
Validasi Input	4.4	Melakukan validasi positif pada seluruh input	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Validasi Input	4.5	Melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya	Ya	
Validasi Input	4.6	Menggunakan fitur kode dinamis	Ya	
Validasi Input	4.7	Melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip	Tidak	
Validasi Input	4.8	Melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data	Tidak	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.1	Menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.2	Melakukan autentikasi data yang dienkripsi	Tidak	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.3	Menerapkan manajemen kunci kriptografi	Ya	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.4	Membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi	Tidak	
Penanganan error dan pencatatan log	6.1	Mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.2	Menggunakan metode penanganan error untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.3	Tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.4	Mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden	Tidak	
Penanganan error dan pencatatan log	6.5	Mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah	Tidak	
Penanganan error dan pencatatan log	6.6	Melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log	Tidak	
Penanganan error dan pencatatan log	6.7	Melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar	Tidak	
Proteksi data	7.1	Melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan	Tidak	
Proteksi data	7.2	Melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Proteksi data	7.3	Melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan	Tidak	
Proteksi data	7.4	Melakukan penentuan jumlah parameter	Tidak	
Proteksi data	7.5	Memastikan data disimpan dengan aman	Ya	
Proteksi data	7.6	Menentukan metode untuk menghapus dan mengeksport data sesuai permintaan pengguna	Tidak	
Proteksi data	7.7	Membersihkan memori setelah tidak diperlukan	Tidak	
Keamanan komunikasi	8.1	Menggunakan komunikasi terenkripsi	Ya	
Keamanan komunikasi	8.2	Mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna	Ya	
Keamanan komunikasi	8.3	Mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya	Tidak	
Keamanan komunikasi	8.4	Mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.1	Menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.2	Memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.3	Mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi	Tidak	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.4	Mengatur perlindungan integritas	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.5	Mengatur mekanisme fitur pembaruan	Tidak	
Logika bisnis	10.1	Memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;	Ya	
Logika bisnis	10.2	Memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validitas	Ya	
Logika bisnis	10.3	Memonitor aktivitas yang tidak biasa	Tidak	
Logika bisnis	10.4	Membantu dalam kontrol anti otomatisasi	Tidak	
Logika bisnis	10.5	Memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa	Tidak	
File	11.1	mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan kuota ukuran file yang diunggah	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
File	11.2	Melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan	Ya	
File	11.3	Melakukan perlindungan terhadap metadata input dan metadata file	Ya	
File	11.4	Melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya	Ya	
File	11.5	Melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan	Ya	
Keamanan API dan web service	12.1	melakukan konfigurasi layanan web	Ya	
Keamanan API dan web service	12.2	Verifikasi uniform resource identifier API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan	Ya	
Keamanan API dan web service	12.3	Membuat keputusan otorisasi	Tidak	
Keamanan API dan web service	12.4	Menampilkan metode RESTful hyperteBojonegorot transfer protocol apabila input pengguna dinyatakan valid	Tidak	
Keamanan API dan web service	12.5	Menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input	Ya	
Keamanan API dan web service	12.6	Menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web	Ya	
Keamanan API dan web service	12.7	Menerapkan kontrol anti otomatisasi	Tidak	
Keamanan konfigurasi	13.1	Mengkonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.2	Mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.3	Menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.4	Memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal	Tidak	
Keamanan konfigurasi	13.5	Menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman	Tidak	

H. Standar Teknis Keamanan Aplikasi Mobile

Berikut ini ditampilkan tabel pemenuhan standar teknis keamanan aplikasi *mobile* sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2.6.2.8.Pemenuhan Standar Teknis Keamanan Aplikasi Mobile

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.1	Menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.2	Membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan third party	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.3	Menonaktifkan cache keyboard pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.4	Melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi inter process communication	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.5	Melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna	Tidak	
Kriptografi	2.1	Menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan	Tidak	
Kriptografi	2.2	Mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan	Tidak	
Kriptografi	2.3	Menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritma kriptografi yang obsolet	Tidak	
Kriptografi	2.4	Menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama	Tidak	
Kriptografi	2.5	Menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.1	Menerapkan autentikasi pada remote endpoint terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.2	Menggunakan session identifier yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan stateful manajemen sesi	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.3	Memastikan server menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritme yang aman apabila menggunakan autentikasi stateless berbasis toke	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.4	Memastikan remote endpoint memutus sesi yang ada saat pengguna log out	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Autentikasi dan manajemen sesi	3.5	Menerapkan pengaturan sandi pada remote endpoint	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.6	Membatasi jumlah percobaan log in pada remote endpoint	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.7	Menentukan masa berlaku sesi dan masa kadaluarsa token pada remote endpoint	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.8	Melakukan otorisasi pada remote endpoint	Tidak	
Komunikasi Jaringan	4.1	Menerapkan secure socket layer atau transport layer security yang tidak obsolet secara konsisten	Tidak	
Komunikasi Jaringan	4.2	Memverifikasi sertifikat remote endpoint	Tidak	
Interaksi Platform	5.1	Memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan	Tidak	
Interaksi Platform	5.2	Melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna	Tidak	
Interaksi Platform	5.3	Menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema custom uniform resource locator dan fasilitas inter process communication;	Tidak	
Interaksi Platform	5.4	Menggunakan protokol hyperteBojonegorot transfer protocol secure pada WebView	Tidak	
Interaksi Platform	5.5	Menghindari penggunaan JavaScript dalam WebView	Tidak	
Interaksi Platform	5.6	Mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman	Tidak	
Kualitas kode dan	6.1	Menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid	Tidak	
Kualitas kode dan	6.2	Memastikan aplikasi dalam mode rilis	Tidak	
Kualitas kode dan	6.3	Menghapus simbol debugging dari native binary	Tidak	
Kualitas kode dan	6.4	Menghapus kode debugging dan kode bantuan pengembang	Tidak	
Kualitas kode dan	6.5	Mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen third party	Tidak	
Kualitas kode dan	6.6	Menentukan mekanisme penanganan error	Tidak	
Kualitas kode dan	6.7	Mengelola memori secara aman	Tidak	
Kualitas kode dan	6.8	Mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia	Tidak	
Ketahanan	7.1	Mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah	Tidak	
Ketahanan	7.2	Mendeteksi dan merespons debugger	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Ketahanan	7.3	Mencegah eBojonegoroecutable file melakukan perubahan pada sumber daya perangkat	Tidak	
Ketahanan	7.4	Mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat reverse engineering	Tidak	
Ketahanan	7.5	Mencegah aplikasi berjalan dalam emulator	Tidak	
Ketahanan	7.6	Mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memo	Tidak	
Ketahanan	7.7	Menerapkan fungsi device binding dengan menggunakan properti unik pada perangkat	Tidak	
Ketahanan	7.8	Melindungi seluruh file dan library pada aplikasi	Tidak	
Ketahanan	7.9	Menerapkan metode obfuscation	Tidak	

Laporan Arsitektur Kondisi Eksisting SPBE ini disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dibandingkan antara dengan kondisi ideal yang perlu dilakukan dalam penerapan SPBE. Secara umum, kondisi eksisting SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa disimpulkan telah terstandar dan mayoritas aplikasi internal yang ada sudah terintegrasi dengan aplikasi internal lainnya maupun dengan aplikasi instansi pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan layanan internal dan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dalam proses pemerintahan secara elektronik. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kemudahan akses informasi serta layanan publik di era digital saat ini.

Kedepannya, dalam SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu adanya peningkatan pada domain tata kelola dan manajemen serta integrasi beberapa sarana infrastruktur internal daerah dengan infrastruktur nasional dalam mendukung operasional SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari analisa formulir kuesioner yang disebar ke perangkat daerah, hasil *interview* terhadap seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai koordinator dalam tim koordinasi SPBE, maupun data sekunder (referensi dan pengalaman konsultan di institusi sejenis). Substansi dalam laporan Kondisi Eksisting ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kondisi ideal/target layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun mendatang.

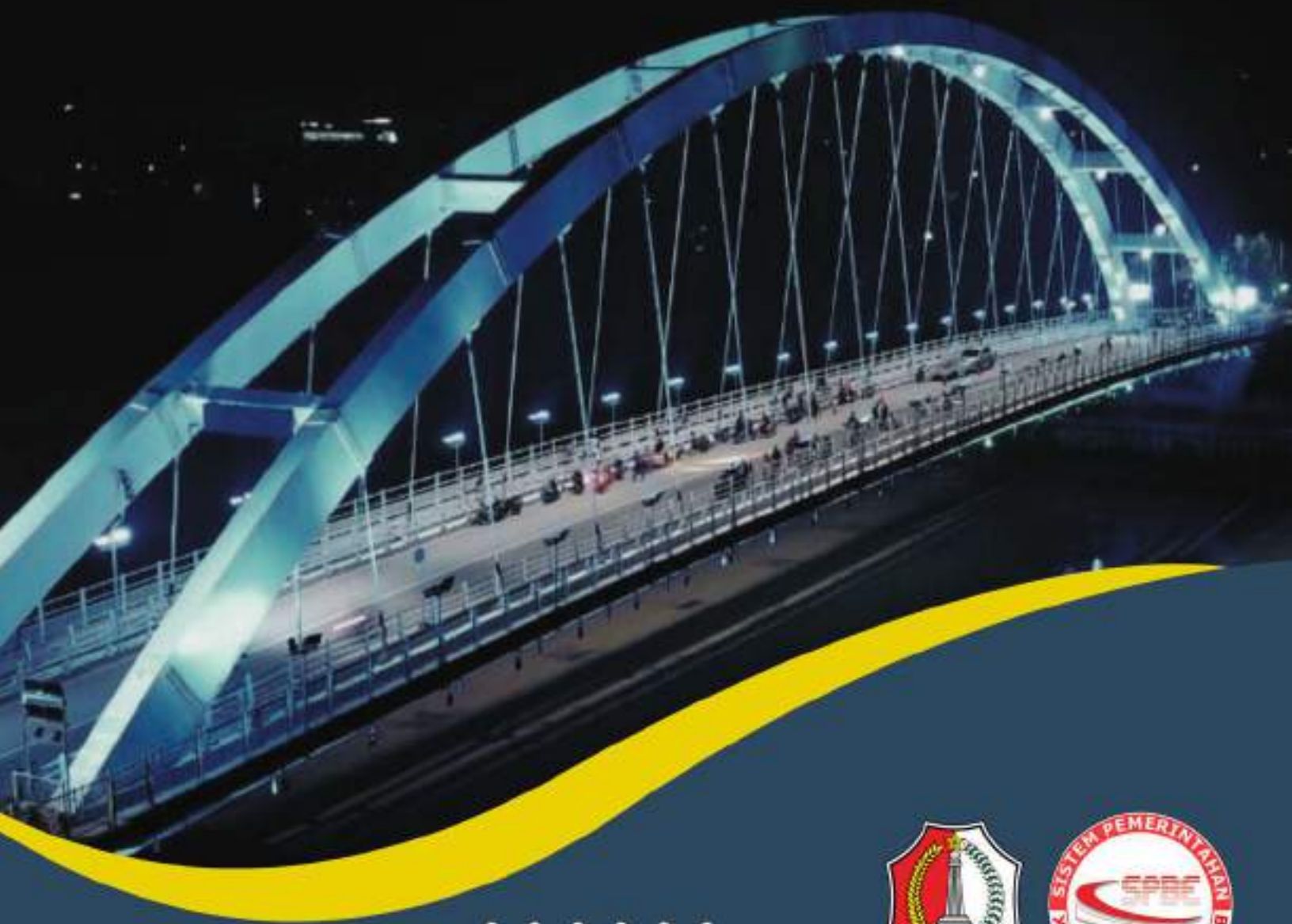


Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO



BUKU 2 **KONDISI TARGET** **ARSITEKTUR SISTEM** **PEMERINTAHAN** **BERBASIS ELEKTRONIK** **(SPBE)**

PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO

2026

Lembar Pengesahan

DOKUMEN ARSITEKTUR & PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPBE
DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Daftar Isi

Bab I Konsep Solusi SPBE	5
1.1. Kondisi Ideal Tata Kelola SPBE	6
1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan	6
1.1.1.1. Kelompok Kerja (Pokja) SPBE	8
1.1.1.2. Tim Digital Transformation	13
1.1.1.3. Kebijakan SPBE	18
1.1.2. Penganggaran SPBE	18
1.2. Tata Kelola SPBE	20
1.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE	20
1.2.2. Tata Kelola Kebijakan SPBE	23
1.2.3. Tata Kelola Proses Bisnis	24
1.2.4. Tata Kelola Data	27
1.2.5. Tata Kelola Layanan	31
1.2.6. Tata Kelola Aplikasi	35
1.2.6.1. Prinsip Pengembangan Aplikasi	37
1.2.6.2. Tren Teknologi Pengembangan Aplikasi	38
1.2.7. Tata Kelola Infrastruktur	41
1.2.7.1. Pusat Data	42
1.2.7.2. Jaringan Intra Pemerintah	43
1.2.7.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	44
1.2.8. Tata Kelola Keamanan	46
1.2.8.1. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi	46
1.2.8.2. Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan	47
1.2.8.3. Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi	47
1.3. Manajemen SPBE	48
1.3.1. Manajemen Risiko SPBE	49
1.3.2. Manajemen Keamanan Informasi	52
1.3.3. Manajemen Data	58
1.3.4. Manajemen Aset TIK	65
1.3.5. Manajemen SDM	67
1.3.6. Manajemen Pengetahuan	69
1.3.7. Manajemen Perubahan	72
1.3.8. Manajemen Layanan	75
1.3.9. Audit TIK	81
Bab II Arsitektur Target SPBE	83
2.1. Arsitektur Proses Bisnis Target	84
2.1.1. Katalog Proses Bisnis Target	84
2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis Target	90
2.2. Arsitektur Data dan Informasi Target	93
2.2.1. Katalog Data dan Informasi Target	93
2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi Target	114
2.3. Arsitektur Layanan Target	117
2.4.1. Katalog Layanan Target	117
2.4.2. Analisis Katalog Layanan Target	132
2.4. Arsitektur Aplikasi Target	135
2.4.1. Desain Arsitektur Aplikasi	135

2.4.2. Integrasi Aplikasi	136
2.4.3. Arsitektur Aplikasi Target	137
2.4.3.1. Katalog Aplikasi Target	137
2.4.3.2. Analisis Diagram Aplikasi Target	149
2.4.3.3. Analisis Effort Impact	151
2.4.4. Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	151
2.5. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan Target	158
2.5.1. Tren Teknologi dan Praktek Terbaik (Best Practice)	158
2.5.1.1. Teknologi Virtualisasi	158
2.5.1.2. DevOps	162
2.5.1.3. Microservices	169
2.5.1.4. OWASP 10 - 2021	172
2.5.1.5. Security Operation Center (SOC)	174
A. Triad SOC	174
B. SOC – People	175
C. SOC – Process	176
D. SOC – Technology	177
E. SIEM	178
F. ELK	180
2.5.2. Infrastruktur SPBE To Be	182
2.5.2.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	183
2.5.2.2. Pusat Data	184
A. Usulan Topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)	223
2.5.2.3. Metadata Arsitektur Infrastruktur To Be	225
2.5.2.4. Jaringan Intra Pemerintah	226
A. Topologi Jaringan	227
B. Berjenjang atau hirarki (3-Tier Hierarchy)	227
C. Zonasi (Zoning)	230
D. Redudansi (Redundancy)	232
E. Keamanan (Security)	232
F. Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah	234
G. Usulan Infrastruktur Jaringan Data	235
2.5.2.5. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	239
A. Integrasi Data	240
B. Integrasi Presentasi	242
C. Integrasi Fungsional (Proses Bisnis)	243
D. Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan	243
E. Usulan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan	243
2.5.3. Arsitektur Keamanan To-Be	248
2.5.3.1. Kondisi Eksisting Keamanan SPBE	248
2.5.3.2. Arsitektur Keamanan SPBE	248
2.5.3.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE	249
A. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE	250
B. SNI ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi	251
2.5.3.4. Standar Teknis dan Prosedur	254
A. Keamanan Data dan Informasi	254
B. Keamanan Aplikasi SPBE	256
C. Keamanan Sistem Penghubung Layanan	261
D. Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	262
E. Keamanan Pusat Data	265
2.5.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi	266
A. Identifikasi (Identify)	266
B. Proteksi (Protect)	267

C. Deteksi (Detect)	267
D. Respon (Respond)	267
E. Pemulihan (Recover)	267
Bab III Penutup	269

Bab I Konsep Solusi SPBE

1.1. Kondisi Ideal Tata Kelola SPBE

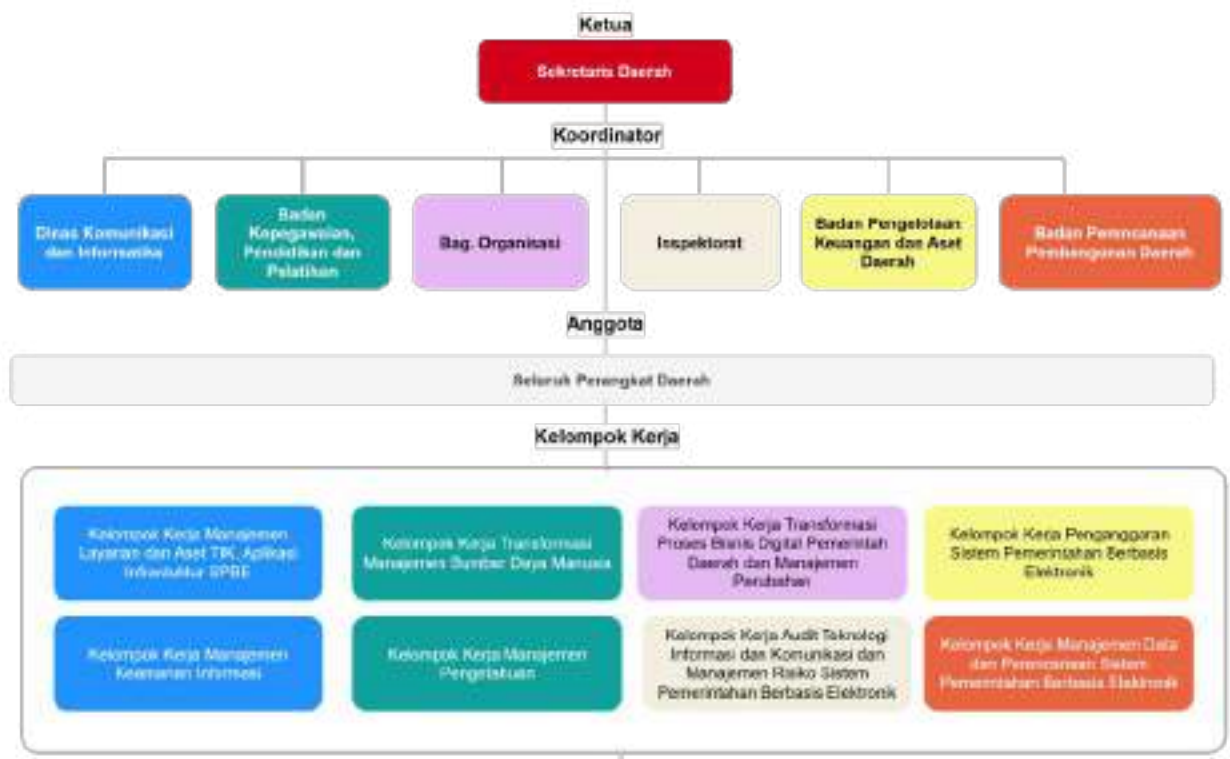
Analisa kondisi ideal dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi yang dapat dicapai dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Analisa kondisi ideal ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, tren teknologi informasi saat ini, dan tren teknologi informasi yang akan datang. Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf tujuan pengembangan SPBE, tiga tujuan utama SPBE, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Kerangka fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau agen yang memicu terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, secara umum, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE.

1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah perpaduan model sentralisasi. Model sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, dalam penerapan SPBE perlu dibentuk sebuah Tim Koordinasi SPBE, dimana Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.



Gambar 1.1.1.1. Struktur Tim Koordinasi SPBE Ideal (rekomendasi)

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa kondisi ideal dalam struktur Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas Koordinator dan Anggota. Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas:

- Memberikan arahan dan validasi terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi;
- Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar unit;
- Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE; dan
- Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari seluruh perangkat daerah yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
10. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

11. Dinas Pemadam Kebakaran
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
14. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
15. Dinas Pendidikan
16. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
21. Dinas Peternakan dan Perikanan
22. Dinas Sosial
23. Badan Pendapatan Daerah
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26. Satuan Polisi Pamong Praja
27. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
28. RSUD Padangan
29. RSUD Sumberrejo
30. RSUD Kepohbaru
31. Kecamatan Bojonegoro

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari seluruh perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap layanan, data, aplikasi, infrastruktur maupun keamanan informasi. Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan arahan program dan kegiatan SPBE yang telah diputuskan oleh Koordinator;
- b. Melakukan optimalisasi proses bisnis;
- c. Melakukan integrasi data dalam aplikasi dalam rangka penerapan SPBE yang optimal;
- d. Mengelola jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi yang berkelanjutan; dan
- e. Menerapkan manajemen SPBE sebagai budaya kerja.

1.1.1.1. Kelompok Kerja (Pokja) SPBE

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE dan membaginya ke dalam delapan kelompok kerja SPBE. Delapan kelompok kerja SPBE ini merupakan kepanjangan tangan dari kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional. Adapun kedelapan kelompok kerja dijelaskan sebagai berikut.

1. Pokja Perencanaan SPBE (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) :

- a. melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan SPBE
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah dalam pelaksanaan SPBE
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah dalam pelaksanaan SPBE, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pokja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah (Bagian Organisasi) :
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan proses bisnis digital pemerintah daerah
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi proses bisnis digital pemerintah daerah .
3. Pokja Penganggaran SPBE (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) :
- a. merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja SPBE
 - b. menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan anggaran SPBE dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penganggaran SPBE
4. Pokja Aplikasi dan Infrastruktur SPBE (Dinas Komunikasi dan Informatika):
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pengelolaan infrastruktur SPBE
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE,
 - c. merumuskan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang menggunakan kode sumber tertutup, merumuskan kebijakan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi dalam SPBE
 - d. melakukan koordinasi penyiapan pembangunan repositori aplikasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE
 - e. merumuskan kebijakan standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi dalam pelaksanaan SPBE
 - f. merumuskan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE, serta koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE.

5. Pokja Manajemen Risiko (Inspektorat) :

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai unit pemilik risiko
- b. menetapkan konteks risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi: inventarisasi informasi umum, identifikasi sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menentukan struktur pelaksana manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, identifikasi pemangku kepentingan, identifikasi Peraturan Perundang-undangan, menetapkan kategori risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan area dampak risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan kriteria risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan matriks analisis risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan level risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan selera risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. melakukan analisis risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. melakukan evaluasi risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. menetapkan rencana penanganan risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- f. melaporkan proses dan hasil penilaian risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;

6. Pokja Manajemen Layanan (Dinas Komunikasi dan Informatika) :

- a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan
- b. melakukan perumusan standar interoperabilitas antar layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE
- c. melakukan perumusan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE
- d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi penerapan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE

7. Pokja Manajemen Aset TIK (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) :

- a. merumuskan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE,
- c. melakukan monitoring dan evaluasi manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE

8. Pokja Manajemen Data (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) :

- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai pemilik data;
 - b. melakukan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data;
 - c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;
9. Pokja Manajemen Keamanan Informasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) :
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai penyelenggara sistem elektronik;
 - b. menetapkan ruang lingkup, menetapkan penanggung jawab, merencanakan mendukung pengoperasian, mengevaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. melaporkan proses dan hasil manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;
10. Pokja Manajemen Sumber Daya Manusia (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) :
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai pemilik sumber daya manusia;
 - b. melakukan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;
11. Pokja Manajemen Pengetahuan (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) :
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai unit pelaksana manajemen pengetahuan
 - b. melakukan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, alih pengetahuan dan teknologi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana
12. Pokja Manajemen Perubahan (Bagian Organisasi)
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai unit pelaksana manajemen perubahan
 - b. melakukan serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana

13. Pokja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Inspektorat)

- a. melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika
- b. merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE, serta koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan SPBE.

1.1.1.2. Tim Digital Transformation

Berikut ini dijelaskan kebutuhan Tim Digital Transformation untuk mendukung pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya. Standar salary menyesuaikan dengan UMK Bojonegoro dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.

Tabel 1.1.1.1. Kebutuhan Anggaran Tim Digital Transformation

Kebutuhan Anggaran SDM TIK			Tahun									
No	Position	Salary/Month	2025		2026		2027		2028		2029	
			Person	Budget	Person	Budget	Person	Budget	Person	Budget	Person	Budget
1	System Analyst	Rp5.000.000	1	Rp70.000.000	1	Rp 70.000.000	2	Rp 140.000.000	2	Rp 140.000.000	2	Rp 140.000.000
2	Data Scientist/Engineer	Rp7.000.000	1	Rp98.000.000	1	Rp 98.000.000	1	Rp 98.000.000	1	Rp 98.000.000	1	Rp 98.000.000
3	UI/UX Designer	Rp4.000.000	1	Rp56.000.000	1	Rp 56.000.000	2	Rp 112.000.000	2	Rp 112.000.000	2	Rp 112.000.000
4	Front-End Web Developer	Rp5.000.000	1	Rp70.000.000	2	Rp 140.000.000	2	Rp 140.000.000	3	Rp 210.000.000	3	Rp 210.000.000
5	Front-End Mobile Developer	Rp5.500.000	1	Rp77.000.000	1	Rp 77.000.000	1	Rp 77.000.000	1	Rp 77.000.000	2	Rp 154.000.000
6	Back-End Developer	Rp6.500.000	1	Rp91.000.000	2	Rp 182.000.000	2	Rp 182.000.000	3	Rp 273.000.000	3	Rp 273.000.000
7	Network Engineer	Rp4.500.000	1	Rp63.000.000	1	Rp 63.000.000	1	Rp 63.000.000	1	Rp 63.000.000	2	Rp 126.000.000
8	Quality Assurance	Rp4.000.000	1	Rp56.000.000	1	Rp 56.000.000	1	Rp 56.000.000	1	Rp 56.000.000	1	Rp 56.000.000
Budget Need / Year			8	Rp581.000.000	10	Rp 742.000.000	12	Rp 868.000.000	14	Rp 1.029.000.000	16	Rp 1.169.000.000
Total												
Note : Standar Salary Menyesuaikan UMK Bojonegoro (Rp 2.525.132) dan Standar Perusahaan IT Swasta												

Adapun kompetensi minimum yang dibutuhkan dalam Tim *Digital Transformation* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadopsi standar dari bursa kerja yang dijelaskan sebagai berikut:

A. System Analyst

1. Persyaratan

- Memiliki *background* pendidikan TI/Ilmu Komputer;
- Menguasai *SDLC* dan *Agile* dalam pengembangan aplikasi;
- Memahami logika pemrograman dan *business process modelling*;
- Mampu menganalisis *DFD*, *Use Case*, dan *ERD*;
- Berpengalaman dalam *programming* dan integrasi data menggunakan *API* serta mendokumentasikannya; dan
- Berpengalaman dalam mendesain *mockup* dan *functional specification document*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan analisis kebutuhan aplikasi dalam mengembangkan aplikasi berbasis *cloud* pada *platform* dan aplikasi di dalam Tim *Developer* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan menghitung dan mengidentifikasi kerentanan atau potensi kegagalan dan ketidaklayakan implementasi aplikasi;
- Berkoordinasi dengan Tim *Programmer*, Tim *Data*, Tim *Produk*, Tim *Operasional* dan *Stakeholder* dalam proses identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis *Cloud* pada *platform* dan aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
- Mendokumentasikan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis *cloud* pada *platform* dan aplikasi dalam bentuk dokumentasi teknis yang menjelaskan *flowchart*, *database* dan spesifikasi teknis lainnya yang dapat dipahami oleh Tim *Programmer*, sebagai acuan untuk proses pengembangan aplikasi.

B. Data Scientist/Engineer

1. Persyaratan

- Lulusan gelar sarjana di bidang teknik, matematika, statistik, riset operasi, atau disiplin terkait lainnya;
- Membuat dan memelihara *data pipeline Architecture* yang optimal;
- Mengotomatiskan proses manual, mengoptimalkan pengiriman data, mendesain ulang;
- Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pemuatan data yang optimal dari berbagai sumber data menggunakan teknologi *SQL* dan *NOSQL*;
- Bekerja sama dengan Tim *Digital Transformation* dalam pengembangan aplikasi untuk membantu masalah teknis terkait data dan mendukung kebutuhan infrastruktur data; dan

- Menguasai *Python, Bigquery, MySQL, PostgreSQL, dan Airflow*. Opsional: *MongoDB, elasticSearch, Cloud Platform (eg: GCP), dan Gitlab*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Identifikasi sumber data yang berkualitas dan otomatisasi proses pengumpulan;
- Melakukan *preprocessing* data terstruktur dan tidak terstruktur;
- Menganalisis keperluan data untuk pengembangan aplikasi;
- Menyajikan informasi menggunakan teknik visualisasi data;
- Mengusulkan solusi dan strategi untuk tren pengembangan aplikasi; dan
- Berkolaborasi dengan Tim Internal *Developer*.

C. Front-End Developer (Web dan Mobile)

1. Persyaratan

- Lulusan minimum S1 Ilmu Komputer atau Teknik Informatika;
- Menguasai pengembangan *front end* dengan *javascript*;
- Memahami konsep *DOM, HoC, Promise, Async/Await, Event Delegation, dan Event Bubbling*;
- Menguasai konsep *UI/UX design pattern* dan responsif desain pada *web* dan *mobile*;
- Familiar menggunakan *code repository management*, seperti: *Git/Gitlab*;
- Memahami penggunaan HTML sesuai *best practice*;
- Memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi dengan bahasa pemrograman *javascript* atau *typescript*;
- Memiliki kemampuan dalam menggunakan *CSS/Less/Sass* dengan baik;
- Memiliki kemampuan pengembangan produk menggunakan *Bootstrap/Tailwind/Vuetify/MUI/Framework7/Ant Design*;
- Memiliki kemampuan dalam membangun produk menggunakan *ReactJS, NextJS/Gatsby*, dan *library/framework* berbasis *ReactJS* lainnya;
- Memiliki kemampuan dalam membangun produk menggunakan *VueJS, NuxtJS/Gridsome*, dan *Library/framework* berbasis *VueJS*; dan
- Memiliki kemampuan yang baik dalam memahami konsep, dasar, dan cara menggunakan beberapa jenis *web service/API*, khususnya *REST API*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Membangun dan merancang aplikasi *front end* sebuah aplikasi/fitur;
- Memastikan kelayakan teknis desain *UI/UX*;
- Memastikan semua *input user* tervalidasi dan terkirim ke *backend*;
- Mengatasi berbagai *bug* dan *error* pada sisi *front end*;
- Menerapkan prinsip pengembangan *front end* yang sesuai (*best practice*) dan memastikan bahwa *front end* dapat berjalan dengan baik di semua perangkat;
- Melakukan *maintenance* dan pembaharuan aplikasi *front end* yang sudah ada;
- Mendukung siklus pengembangan (konsep, desain, pengujian, rilis, operasional);
- Bekerja sama dengan tim untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan performa aplikasi;

- Berkolaborasi dengan tim infrastruktur dan tim *programmer* yang berspesialisasi dalam *DevOps*, *Backend*, *QA*, *System Analyst*, *Product Owner*, *UI/UX Designer*; dan
- Berkontribusi dalam membantu pembuatan dokumentasi teknis atau secara manual.

D. Back-End Developer

1. Persyaratan

- Merupakan lulusan S1 Teknik Informatika;
- Memiliki minimum 2 tahun pengalaman terkait bidang pemrograman atau pembangunan aplikasi;
- Memiliki pemahaman yang kuat terkait konsep OOP dan MVC;
- Berpengalaman dalam penggunaan PHP dan *framework* yang relevan (*Laravel*, *Yii*, *CI*, dll)/*C# .Net/ASP.Net*;
- Memahami bahasa pemrograman SQL (*SQL pusat data/PostgreSQL/MySQL*);
- Memahami konsep manajemen *source code* seperti *Git*;
- Memahami dan dapat mengimplementasikan *web service/API*;
- Bersedia untuk belajar *framework*, teknologi, atau bahasa pemrograman yang berbeda;
- Dapat membaca dokumen kebutuhan aplikasi; dan
- Memiliki jiwa yang kreatif, berorientasi pada detail dan memiliki *skill* komunikasi yang baik.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan perancangan *database*;
- Melakukan *update* atau pembaharuan struktur data yang telah ada;
- Membuat perancangan alur aplikasi;
- Melakukan pembangunan aplikasi dan *testing* di sisi *backend*;
- Mengatur keamanan aplikasi dan memastikan aplikasi memiliki tingkat keamanan yang baik;
- Melakukan *maintenance*/menemukan *bug* pada aplikasi dan memperbaikinya; dan
- Berkoordinasi dengan tim *frontend* untuk melakukan riset dan evaluasi terkait tampilan desain aplikasi agar sesuai dengan struktur *database* yang dibangun.

E. Network Engineer

1. Persyaratan

- Pendidikan: Gelar sarjana di bidang Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, atau bidang terkait.
- Sertifikasi: Memiliki sertifikasi seperti *Cisco Certified* atau *Mikrotik Certified* atau sertifikasi lainnya yang relevan.

- Pengalaman: Pengalaman kerja di bidang jaringan komputer, baik sebagai Network Engineer atau posisi terkait.
- Keterampilan Teknis: Memahami protokol jaringan (TCP/IP, DNS, DHCP), teknologi nirkabel, dan sistem operasi jaringan.
- Keterampilan Analitis: Kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah secara efektif.
- Komunikasi: Keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan tim dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Perancangan Jaringan: Membuat rencana dan desain jaringan yang mencakup topologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan organisasi.
- Implementasi Jaringan: Menginstal dan mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, dan perangkat lainnya.
- Pemeliharaan Jaringan: Memantau kinerja jaringan secara terus-menerus dan melakukan pemeliharaan preventif untuk mencegah gangguan.
- Keamanan Jaringan: Menerapkan kebijakan keamanan dan solusi untuk melindungi data dan sumber daya jaringan dari ancaman dan serangan.
- Troubleshooting: Mendiagnosis dan memperbaiki masalah jaringan dengan cepat untuk meminimalkan waktu henti dan dampak terhadap operasional.
- Dokumentasi: Menyusun dan memperbarui dokumentasi teknis terkait jaringan, termasuk diagram, konfigurasi perangkat, dan prosedur operasional.
- Kolaborasi: Bekerja sama dengan tim IT lainnya untuk memastikan integritas sistem dan aplikasi yang efektif dalam jaringan.
- Pengujian dan Evaluasi: Melakukan pengujian pada sistem jaringan dan mengevaluasi teknologi baru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

F. Quality Assurance

1. Persyaratan

- S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer;
- Minimal 1 tahun di bidang QA, pengujian perangkat lunak;
- Memiliki kemampuan teknis Manual Testing (UAT, Functional Testing, Regression Testing).
- Memiliki kemampuan teknis Automated Testing (menggunakan tools seperti Selenium, Appium, Katalon, atau Cypress);
- Familiar dengan Tools Git; dan
- Memiliki kemampuan teknis melakukan pengujian API menggunakan tools Postman/SoapUI..

2. Deskripsi Pekerjaan

- Membuat dan mengelola test plan dan test case;
- Melakukan pengujian manual maupun otomatis;

- Melaporkan bug dan bekerja sama dengan tim Developer untuk memperbaikinya;
- Melakukan regression testing setelah perbaikan bug;
- Menyusun laporan hasil pengujian dan memberikan rekomendasi.

1.1.1.3. Kebijakan SPBE

Reviu kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan sumber daya TIK. Daftar kebijakan yang perlu direviu, yaitu:

- a. Kebijakan internal arsitektur SPBE;
- b. Kebijakan internal peta rencana SPBE;
- c. Kebijakan internal manajemen data SPBE;
- d. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
- e. Kebijakan internal layanan pusat data;
- f. Kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah;
- g. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah;
- h. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi;
- i. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE.

1.1.2. Penganggaran SPBE

Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dituangkan dalam Peta Rencana SPBE. Anggaran dan belanja SPBE kemudian disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja perangkat daerah. Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda dan dibantu dengan Diskominfo. Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh perangkat daerah.

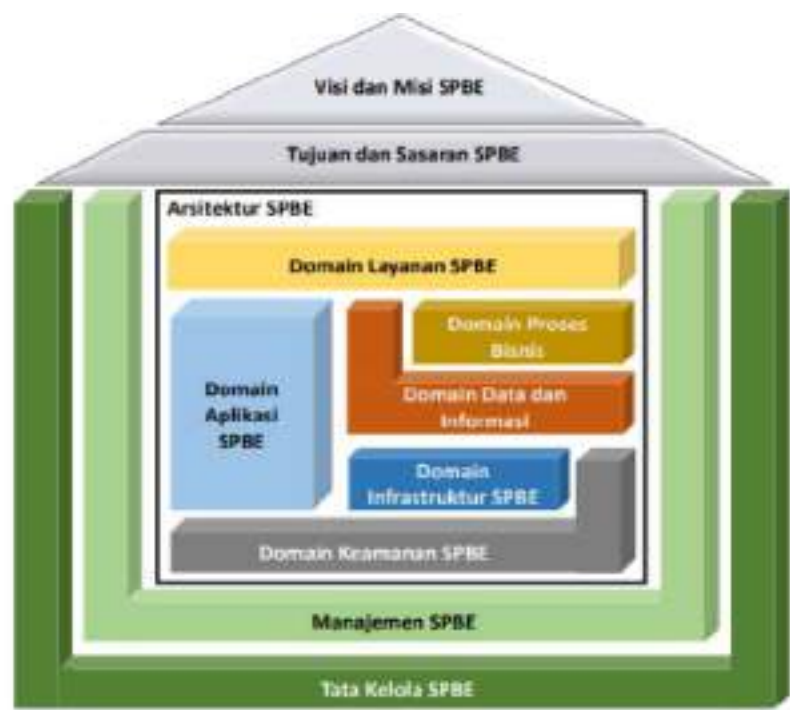
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertugas untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Anggaran dan belanja SPBE harus mendapatkan persetujuan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala. Lebih jauh, hasil peninjauan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran menjadi salah satu elemen krusial untuk memastikan setiap inisiatif teknologi dan digitalisasi berjalan optimal. Proses penganggaran SPBE yang efektif melibatkan beberapa tahapan mulai dari perencanaan awal, pengajuan, hingga evaluasi dan clearance melalui aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE.

1.2. Tata Kelola SPBE

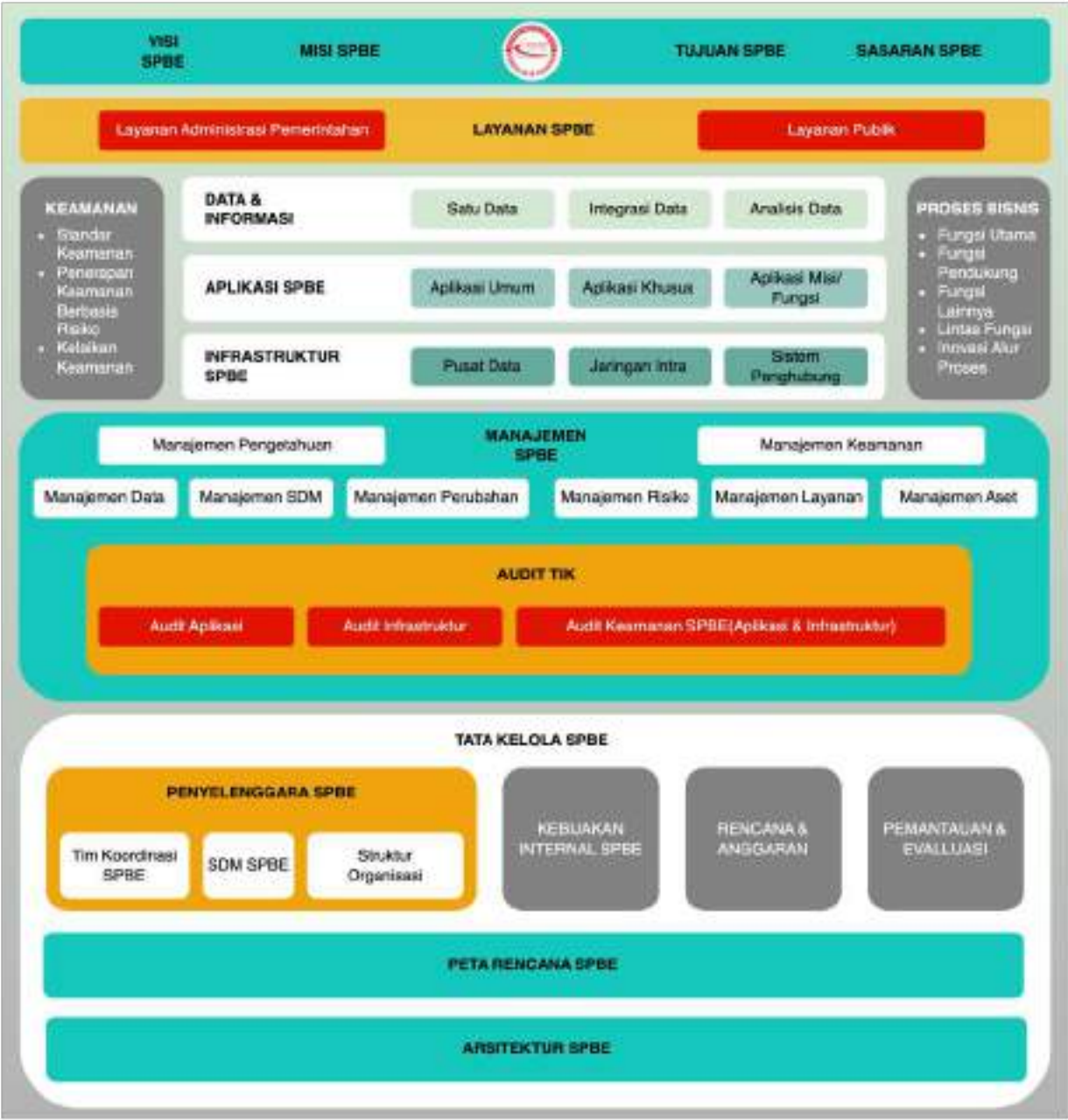
1.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur memuat beberapa domain yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.2.1.1. Domain Arsitektur SPBE (i)

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari kelima aspek tersebut didukung oleh manajemen yang dikelola dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci serta terarah. Setiap domain yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Detail dari masing-masing domain dijelaskan dalam Gambar 1.2.1.2. Domain Arsitektur SPBE (ii).



Gambar 1.2.1.2. Domain Arsitektur SPBE (ii)

Proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE diawali dengan domain tata kelola. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi, menentukan kebijakan, dan menyusun rencana serta anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien.

Adapun 8 (delapan) proses manajemen dalam SPBE mencakup:

1. Manajemen Resiko;
2. Manajemen Perubahan;
3. Manajemen Data;
4. Manajemen SDM;
5. Manajemen Aset TIK;
6. Manajemen Layanan;
7. Manajemen Pengetahuan; dan
8. Manajemen Keamanan Informasi.

Lebih jauh, arsitektur SPBE pada domain SPBE yang perlu dikelola pertama adalah domain proses bisnis. Proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal serta pelayanan paling efektif dan efisien. Domain proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan aplikasi lain. Beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

1. Portal layanan administrasi pemerintahan; dan
2. Portal layanan publik.

Berdasarkan penggunaannya, aplikasi dapat dibagi menjadi aplikasi yang bersifat khusus dan aplikasi yang bersifat umum. Setiap pembangunan aplikasi tidak lepas dari adanya integrasi data antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Integrasi data tidak hanya antar perangkat daerah saja tetapi juga dapat dilakukan integrasi ke portal data nasional. Selain itu, domain lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah domain infrastruktur. Domain ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Domain infrastruktur dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi, termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data. Domain terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah domain keamanan informasi. Aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilindungi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah aplikasi informasi. Aspek-aspek ini meliputi privasi/kerahasiaan khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun oleh Tim Koordinasi SPBE dan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE dan peta rencana perlu ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi perubahan terhadap arsitektur SPBE Nasional, dokumen perencanaan pembangunan dan kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 menyatakan perlu adanya perubahan substansi kondisi arsitektur SPBE agar disesuaikan dengan Arsitektur SPBE Nasional. Peninjauan tersebut dilakukan

oleh Tim Koordinator SPBE. Hasil peninjauan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam mengubah arsitektur SPBE dan peta rencana di Tahun 2023 ini.

1.2.2. Tata Kelola Kebijakan SPBE

Penyusunan kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan dan operasional SPBE. Rekomendasi kebijakan yang perlu dibuat mengacu pada Perpres 95/2018 dan pembuatan kebijakan berdasarkan analisis domain, aspek, dan indikator untuk peningkatan nilai indeks evaluasi SPBE. Adapun rekomendasi kebijakan terkait tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

A. Kebijakan internal arsitektur SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, serta layanan SPBE); dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal arsitektur SPBE.

B. Kebijakan internal peta rencana SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal terkait peta rencana SPBE yang telah mengatur seluruh muatan peta rencana SPBE secara lengkap (tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK); dan
2. Membuat jadwal reviu dan melakukan evaluasi secara periodik pada kebijakan internal peta rencana SPBE.

C. Kebijakan internal manajemen data SPBE

1. Menetapkan kebijakan manajemen data yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal manajemen data.

D. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE yang mengatur siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE.

E. Kebijakan internal layanan pusat data

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait layanan pusat data yang mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data Nasional dan/atau mengatur penggunaan layanan pusat data Nasional; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal Layanan Pusat Data.

F. Kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait layanan jaringan intra yang mengatur interkoneksi layanan jaringan intra Pemerintah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah.

G. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan yang mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh perangkat daerah dan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan sistem penghubung layanan Pemerintah.

H. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi

1. Menetapkan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang mengatur penerapan untuk seluruh perangkat daerah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan manajemen keamanan informasi.

I. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi

1. Menetapkan kebijakan internal terkait audit TIK yang telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (audit infrastruktur SPBE audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE); dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan audit teknologi informasi dan komunikasi.

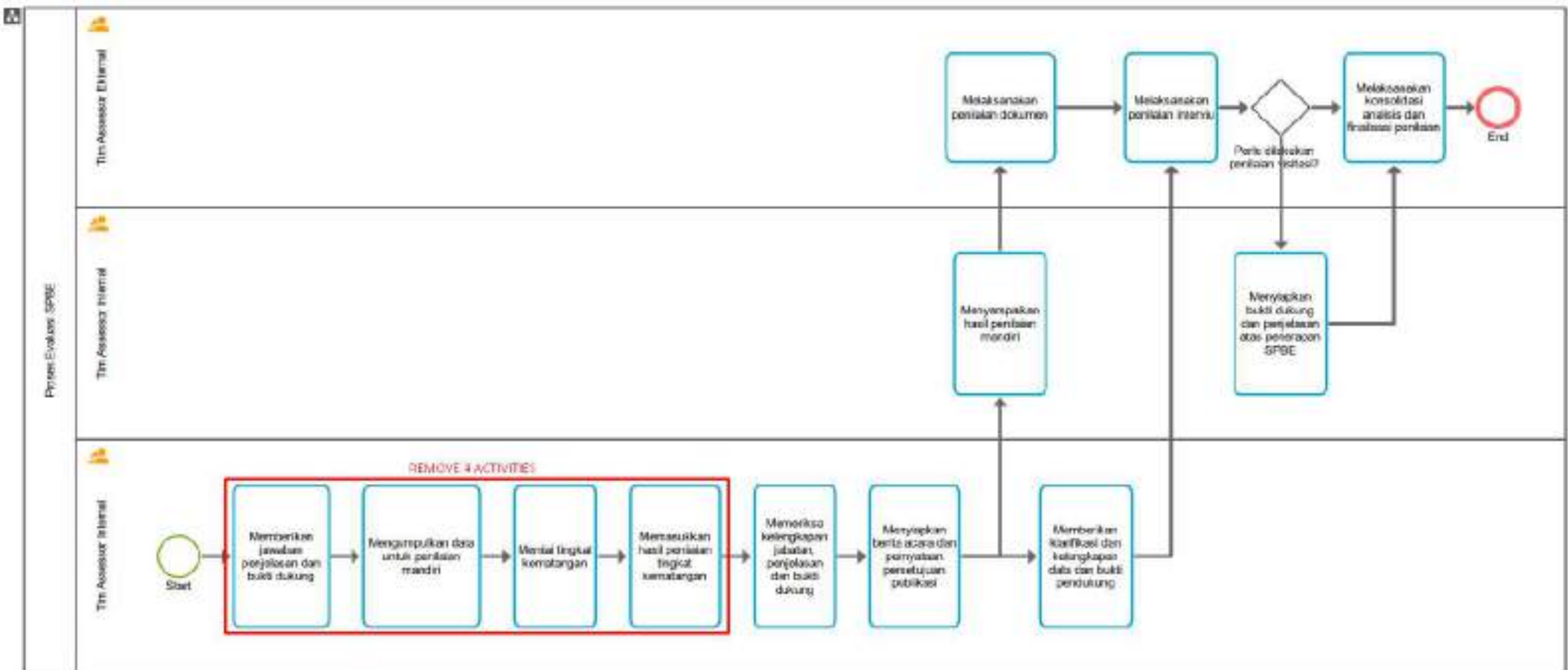
J. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE yang telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh perangkat daerah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal tim koordinasi SPBE.

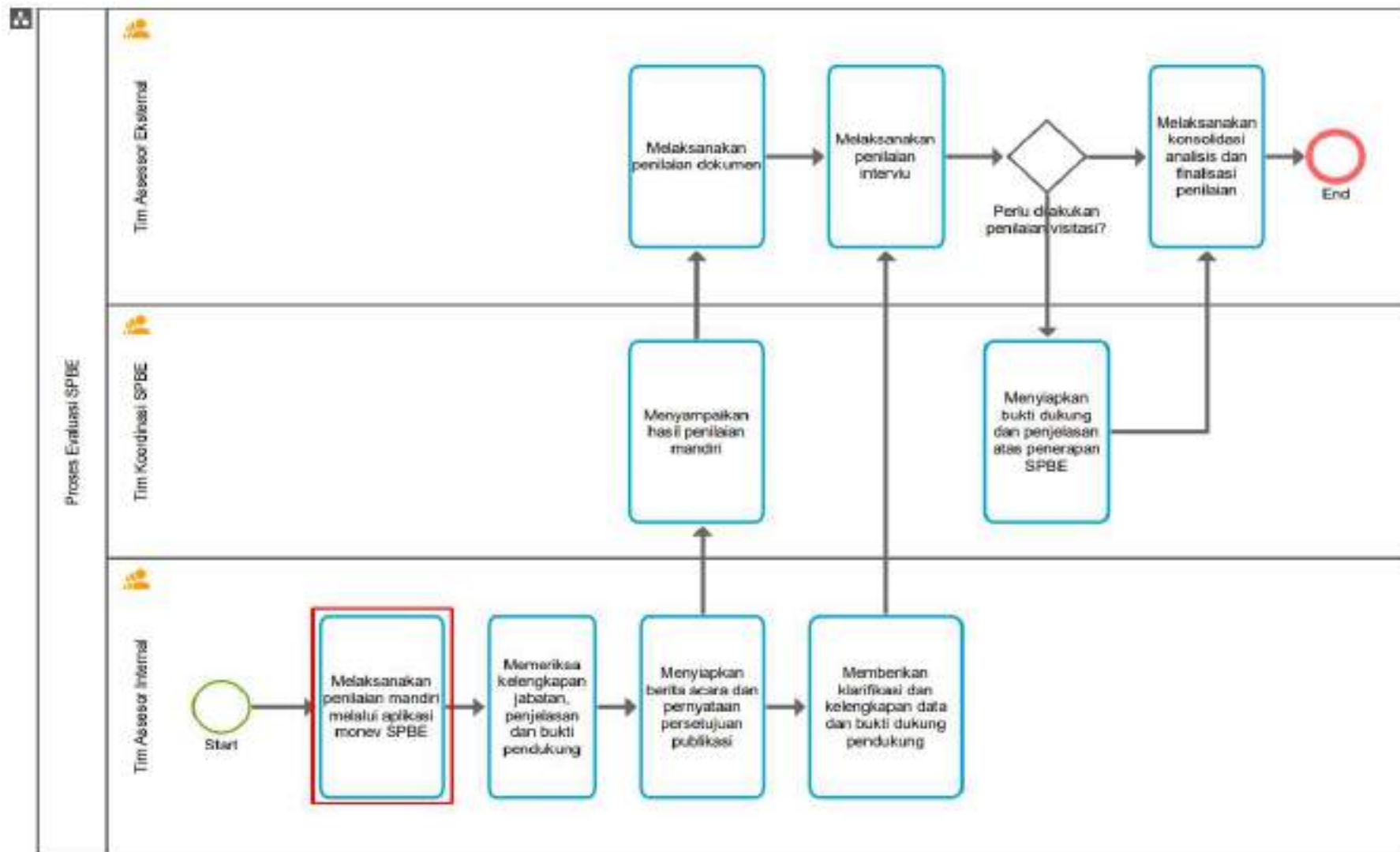
1.2.3. Tata Kelola Proses Bisnis

Proses bisnis pemerintahan perlu dipetakan secara berkala minimal 5 tahun sekali ke dalam bentuk peta proses bisnis yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Dewasa ini, digitalisasi dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis pemerintah yang kompleks menjadi lebih efisien dan efektif, sebagai contoh proses evaluasi SPBE yang yang didalamnya terdapat 10 aktivitas dan dilakukan secara manual. Selanjutnya ketika dilakukan digitalisasi dalam proses evaluasi SPBE tersebut terdapat beberapa aktivitas yang bisa di simplifikasi dari 10 aktivitas menjadi 7 aktivitas. Adapun ilustrasi digitalisasi untuk simplifikasi proses bisnis ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.2.3.1. Ilustrasi Simplifikasi Proses Evaluasi SPBE As-Is



Gambar 1.2.3.2. Ilustrasi Simplifikasi Proses Evaluasi SPBE To-Be

1.2.4. Tata Kelola Data

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dengan Instansi Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019). Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- 2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- 3. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
- 4. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Standar data statistik dan data geospasial ditetapkan oleh pembina data yang merupakan salah satu perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus menetapkan standar data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh pembina data. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata yang informasinya mengikuti struktur dan format baku yang merujuk pada bagian informasi serta spesifikasi atau standar teknis dari metadata. Adapun standar metadata Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

Tabel 1.2.4.1 Standar Metadata

Elemen	Keterangan
Sumber	Nama instansi pemilik data
Author	Bidang di perangkat daerah selaku produsen data
Last Updated	Tanggal data di <i>update</i>
Created	Tanggal data dibuat
Nama Berkas	Nama berkas digital
Ekstensi	Format file (<i>xls, doc, ppt, pdf</i>)

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan tersebut adalah standarisasi data. Standarisasi data adalah proses menetapkan format, struktur, dan aturan yang seragam dalam mengelola, menyimpan, dan mengakses data pada sebuah aplikasi. Standarisasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang dihasilkan atau digunakan oleh aplikasi memiliki konsistensi yang tinggi dan dapat dengan mudah dipahami, diberbagai pakaikan, serta diintegrasikan antar sistem. Dengan standarisasi, instansi dapat mengurangi kesalahan input data, meningkatkan akurasi informasi, dan mempermudah proses analisis yang lebih akurat. Ketika data yang digunakan tidak memiliki standar yang jelas, berbagai masalah bisa muncul seperti :

- **Kesulitan Integrasi Data**
Untuk menggabungkan data dari berbagai aplikasi, diperlukan upaya ekstra dalam memetakan atribut yang berbeda ini. Proses transformasi data akan memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan, terutama jika data yang dikelola sangat besar.
- **Ketidakesesuaian Data**
Saat data dari aplikasi yang berbeda digabungkan untuk tujuan pelaporan, format yang tidak konsisten dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat. Misalnya data "jenis kelamin" yang menggunakan berbagai format dapat menghambat pembuatan statistik yang benar.
- **Menurunnya Efisiensi Operasional**
Sistem yang tidak memiliki standarisasi data membuat proses berbagi informasi antar aplikasi menjadi tidak efisien. User harus membuat penyesuaian manual, yang meningkatkan biaya dan waktu operasional, serta menghambat kecepatan pengambilan keputusan.

Data yang belum distandarisasi mengacu pada data yang tidak memiliki format, struktur, atau aturan yang seragam, sehingga setiap bagian sistem atau pengguna dapat menginterpretasikannya secara berbeda seperti gambar berikut :



Gambar 1.2.3.2. Ilustrasi Perbedaan Standar Data pada Beberapa Aplikasi

Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang digunakan oleh aplikasi memiliki konsistensi yang tinggi, dapat dengan mudah dipahami, dipertukarkan, serta diintegrasikan antar sistem. Dengan standarisasi, sebuah instansi dapat mengurangi kesalahan input data, meningkatkan akurasi informasi, dan mempermudah proses analisis yang lebih akurat.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pembina data. Data dari produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Adapun kaidah interoperabilitas data harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Panduan dasar yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan berkaitan dengan data. Adapun panduan data yang dapat diikuti untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

A. Forum Satu Data Indonesia

Mengacu pada Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 10 Ayat (3) huruf a, Forum Satu Data Indonesia akan menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Perangkat daerah yang menjadi produsen data atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.

B. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

1. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
2. Walidata Tingkat Kabupaten;
3. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten; dan
4. Produsen Data Tingkat Kabupaten.

C. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Tugas Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
4. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia.

D. Komposisi Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Dewan Pengarah Satu Data Indonesia terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota, yaitu Sekda; dan
2. Anggota, terdiri atas Kepala Dinas dari masing-masing perangkat daerah.

E. Pembina Data Tingkat Daerah

Tugas Pembina Data Tingkat Daerah, yaitu:

1. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah;
2. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Daerah;
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;

4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Produsen Data

Tugas produsen data tingkat daerah, yaitu:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarkan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
3. Membantu pembina data dalam membina produsen data;
4. Memberikan masukan kepada pembina data dan Kepala Dinas mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
5. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
6. Menyampaikan data dan metadata kepada produsen data.

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

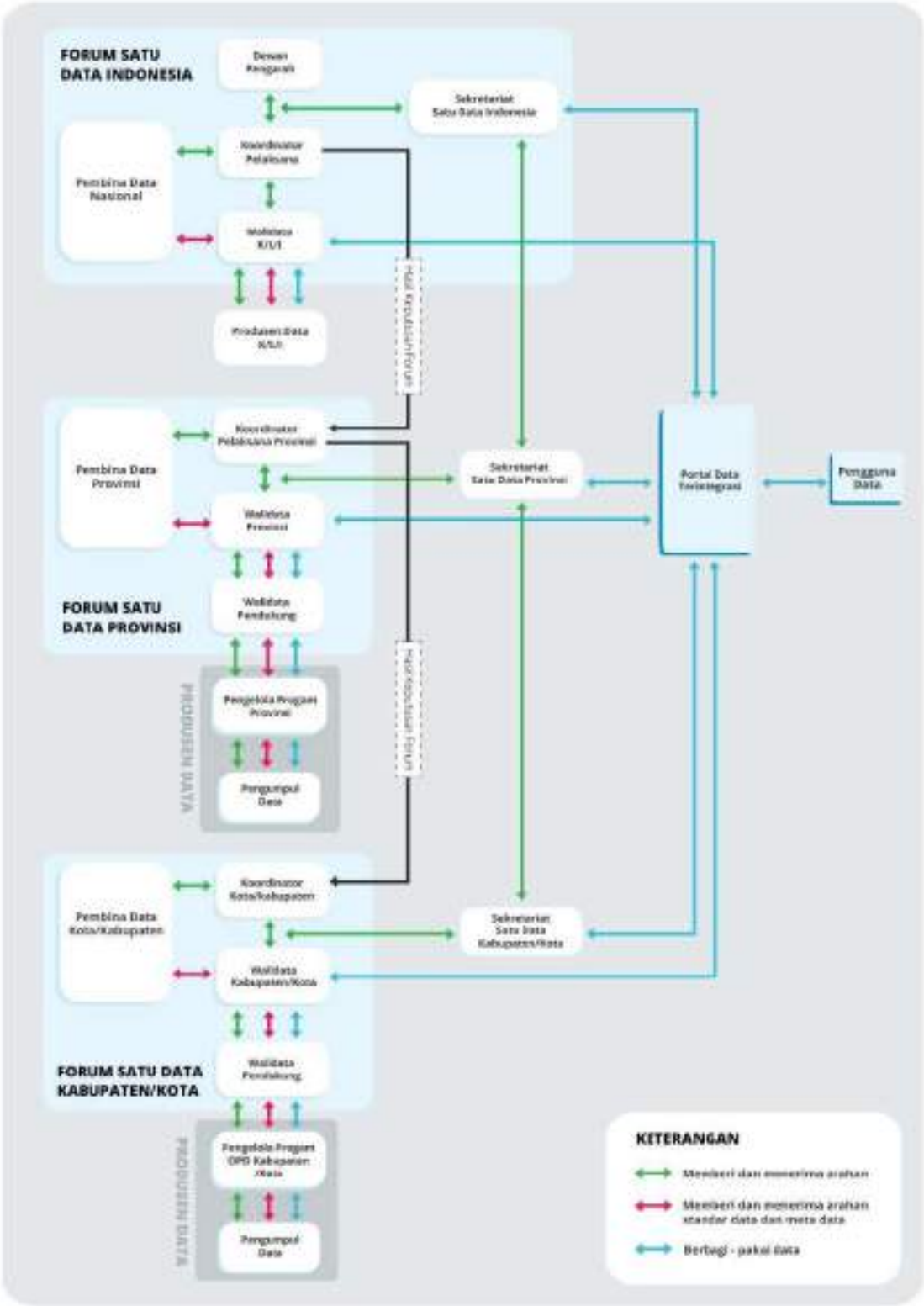
1. Standar data;
2. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
3. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data yang selanjutnya disampaikan kepada produsen data.

G. Pelaksana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Pelaksana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan oleh:

1. Pembina data tingkat daerah;
2. Produsen data tingkat daerah;
3. Produsen data pendukung; dan
4. Produsen data tingkat daerah.

Dari panduan dasar untuk implementasi Satu Data Indonesia di atas, maka didapatkan alur koordinasi aktor yang dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



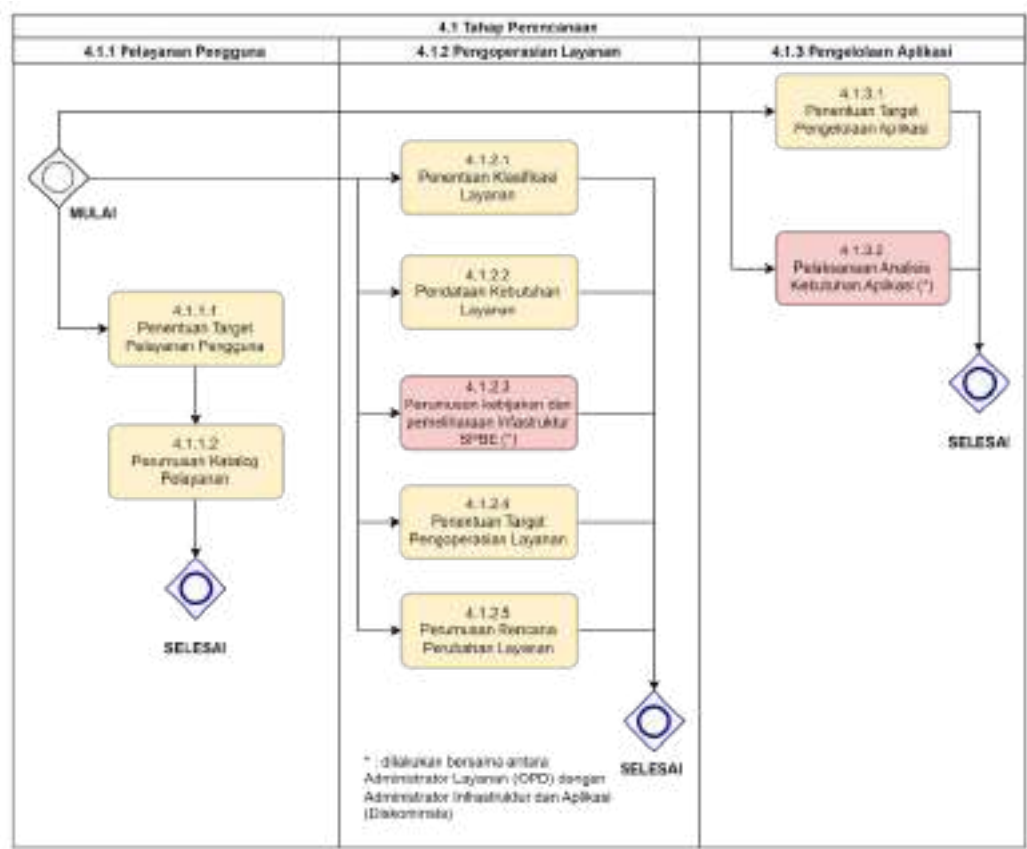
Gambar 1.2.4.1. Alur Koordinasi Aktor Forum Satu Data

1.2.5. Tata Kelola Layanan

Tata kelola layanan SPBE merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola penyediaan layanan pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Proses tata kelola layanan ini meliputi 3 (tiga) tahap diantaranya perencanaan, operasional, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan guna memastikan layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam tata kelola layanan SPBE yang bertujuan untuk menyusun strategi, kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan.



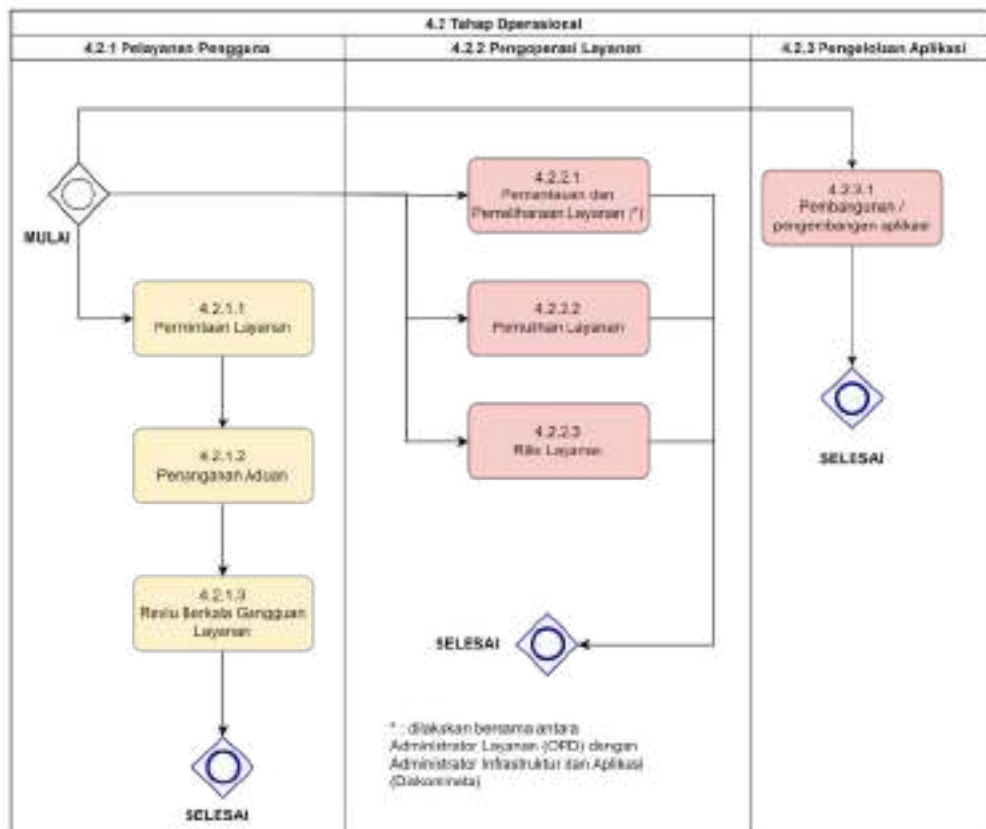
Gambar 1.2.5.1. Tahap Perencanaan Tata Kelola Layanan

Beberapa aspek penting dalam perencanaan antara lain:

- Identifikasi Kebutuhan: Menentukan jenis layanan yang dibutuhkan berdasarkan regulasi, kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari masyarakat.
- Penyusunan Kebijakan dan SOP: Menyusun regulasi, standar operasional prosedur (SOP), serta pedoman yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan.
- Penganggaran dan Sumber Daya: Menyediakan anggaran, tenaga kerja, teknologi, serta infrastruktur pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan.
- Perencanaan Teknologi dan Integrasi: Jika layanan berbasis teknologi, perlu dirancang sistem yang mendukung proses layanan secara efisien, termasuk aspek keamanan data dan integrasi dengan layanan lain.

b. Operasional

Tahap operasional merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, mencakup pelaksanaan layanan, pengawasan, serta koordinasi dengan pihak terkait.



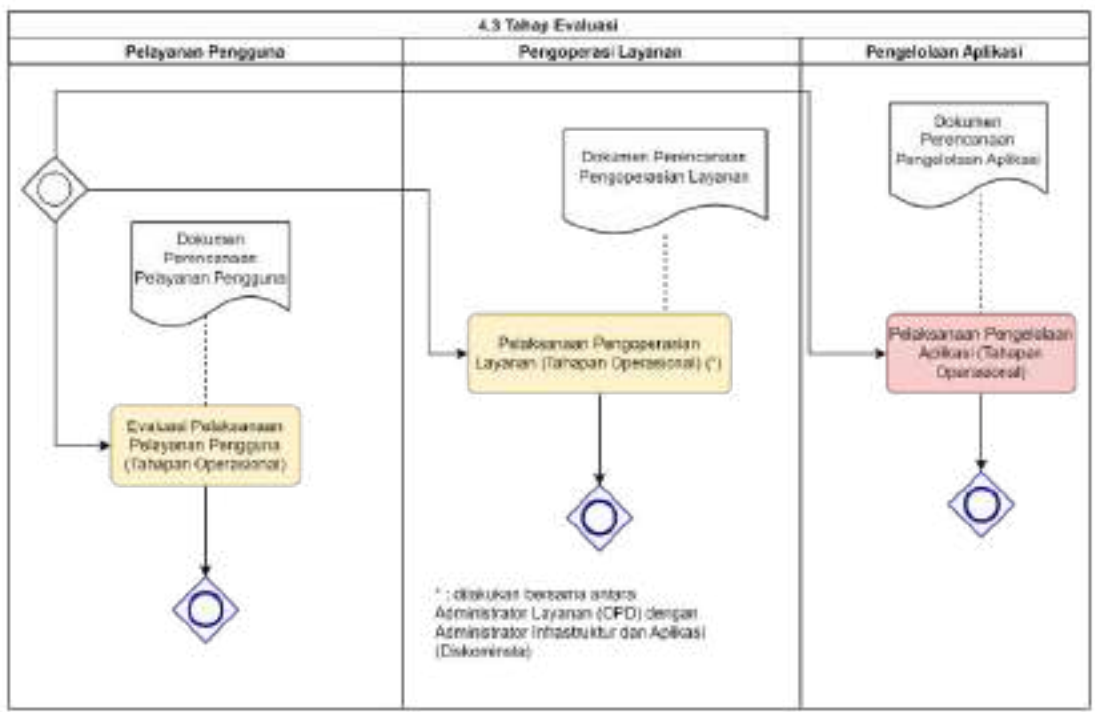
Gambar 1.2.5.2. Tahap Operasional Tata Kelola Layanan

Beberapa langkah utama dalam operasional layanan meliputi:

- Pelaksanaan Layanan: Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Monitoring dan Pengendalian: Mengawasi jalannya layanan secara berkala untuk memastikan layanan berjalan dengan baik serta melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan.
- Koordinasi dan Komunikasi: Menjalin kerja sama antara perangkat daerah, instansi terkait, serta masyarakat agar layanan dapat berjalan dengan lancar.
- Penggunaan Teknologi: Jika layanan berbasis digital, dilakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal.

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.



Gambar 1.2.5.3. Tahap Evaluasi Tata Kelola Layanan

Beberapa aspek yang diperhatikan dalam evaluasi antara lain:

- Pengukuran Kinerja: Menilai efektivitas layanan berdasarkan indikator kinerja utama (KPI) dan standar yang telah ditetapkan.
- Umpan Balik dari Masyarakat: Mengumpulkan saran dan masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan.
- Audit dan Kepatuhan: Memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
- Penyempurnaan dan Inovasi: Melakukan perbaikan berkelanjutan serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan agar lebih efektif dan efisien.
- Melalui proses tata kelola layanan yang sistematis dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital nasional Perpres 82 Tahun 2023, portal layanan *as-is* (kondisi eksisting) dan *to-be* (kondisi target) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diselaraskan dengan ekosistem 9 (sembilan) layanan prioritas nasional diatas guna meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat akses layanan publik, serta memastikan keterpaduan sistem administrasi pemerintahan secara nasional. Berikut merupakan gambaran portal layanan digital terpadu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Layanan Administrasi Pemerintah	Layanan Publik	
Layanan Perencanaan	Pengaduan Publik	Kesejahteraan Ekonomi
Layanan Penganggaran	Dokumentasi dan Informasi	Pertanian dan Peternakan
Layanan Keuangan	Kependudukan	Ketenagakerjaan
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan Usaha	Agama
Layanan Kepegawaian	Kebudayaan	Pemukiman
Layanan Kearsipan Dinamis	Pendidikan	Perlindungan Sosial
Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lingkungan Hidup	Perdagangan
Layanan Pengawasan Internal	Industri	Pariwisata
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Kesehatan	Transportasi
Layanan Kinerja Pegawai	Portal Data	

Gambar 1.2.5.1 Tata Kelola Layanan SPBE

1.2.6. Tata Kelola Aplikasi

Secara umum, saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membangun solusi TI dalam beberapa aplikasi yang terpisah/silo, bukan dalam satu kesatuan aplikasi. Hal ini dikarenakan usulan aplikasi biasanya terbagi berdasarkan perangkat daerah, atau berdasarkan proses bisnis yang ada. Hal ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah ketika terjadi perubahan pada proses bisnis maka perlu menyesuaikan pada beberapa aplikasi terkait. Kedepan, alternatif digitalisasi proses bisnis harus dapat meminimalisir banyaknya aplikasi internal yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebagai contoh praktik terbaik yaitu adanya sebuah aplikasi layanan kepegawaian milik BKD yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan kepegawaian, seperti: *profiling* pegawai, presensi, izin cuti-sakit, kinerja pegawai, dan lain sebagainya.

Selain itu, masifnya pembangunan aplikasi yang akan dibangun menjadi tantangan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode untuk menentukan prioritas aplikasi yang akan diakomodasi. Pemilihan prioritas salah satunya dapat menggunakan *matrix impact-implementation*. Cara membaca tabel prioritas yaitu dimulai dari kanan atas (aplikasi yang mudah diimplementasikan dan memiliki *impact* tinggi) ke bawah, dilanjutkan dengan aplikasi dengan implementasi dan *impact* sedang menuju ke bagian *impact* tinggi. Aplikasi-aplikasi yang akan dibangun, baik usulan dari perangkat daerah, maupun inisiatif dari Diskominfo dipetakan dalam matriks sebagai berikut.



Gambar 1.2.6.1. Matrix Easy Implementation

Pengembangan aplikasi dikategorikan mudah (*easy*) jika:

1. Aplikasi telah ada/ pernah digunakan di perangkat daerah lain sebelumnya;
2. Biaya pengembangan aplikasi sama dengan atau lebih kecil dari rata-rata biaya pengembangan aplikasi;
3. Platform aplikasi relevan dengan kualifikasi SDM TIK di Diskominfo/perangkat daerah; dan
4. Proses kerja aplikasi tidak terlalu kompleks.

Aplikasi dikategorikan memiliki *impact* yang besar (*high impact*) jika:

1. Aplikasi yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (G2C);
2. Aplikasi diusulkan oleh lebih dari satu perangkat daerah;
3. Aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu perangkat daerah; dan
4. Aplikasi pesanan langsung dari pimpinan (*strategic decision maker*).

Selain menggunakan *matrix impact-implementation* di atas, proses penentuan prioritas pengembangan aplikasi juga dilakukan dengan menggunakan strategi yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1.2.6.2. Bagan Strategi Prioritisasi Pengembangan Aplikasi

Aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan menyentuh jajaran eksekutif/pimpinan perlu diprioritaskan pengembangannya. Jika hal tersebut telah terpenuhi, prioritas selanjutnya ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang mengefisiensikan

proses kolaborasi antar perangkat daerah. Terakhir, aplikasi yang diprioritaskan merupakan aplikasi yang sifatnya untuk kalangan bisnis dan investor. Prioritas pengembangan aplikasi tersebut mempertimbangkan kesiapan internal perangkat daerah dari sisi SDM dan anggaran, serta adanya dukungan pimpinan perangkat daerah terhadap pengembangan Layanan SPBE.

Pengembangan aplikasi dapat diinisiasi melalui berbagai kegiatan seperti: 1) penyusunan panduan integrasi antar aplikasi perangkat daerah, 2) pengembangan dan pemeliharaan *platform* integrasi aplikasi (*web services*), 3) pengembangan dan pemeliharaan *data warehouse* dan aplikasi *dashboard*, 4) pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, dan 5) *penetration testing* aplikasi. Secara keseluruhan, kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan berdasarkan perkembangan kesiapan proses bisnis.



Gambar 1.2.6.3. Inisiatif Pengembangan Aplikasi

Sebagai langkah untuk mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi, terdapat 4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penguatan aplikasi *eksisting* untuk meningkatkan reliabilitas aplikasi dan akuntabilitas data;
2. Pengembangan *platform* integrasi berbasis layanan (*services*) guna memastikan tiap perangkat daerah memiliki rujukan untuk interoperabilitas aplikasi maupun data;
3. Kolaborasi bersama dengan inisiatif pengembangan aplikasi di perangkat daerah agar bisa dimanfaatkan pada level nasional; dan
4. Pengembangan *mobile applications* untuk menyajikan layanan publik yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

1.2.6.1. Prinsip Pengembangan Aplikasi

Prinsip-prinsip pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus meliputi aspek: *Sustainable, Mobile, Agile, Reliability, Transparency* (SMART).

A. Sustainability

Aplikasi yang dikembangkan dapat ditingkatkan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan berkembang menyesuaikan kebutuhan. Konsep ini dikenal dengan istilah *System Development Life Cycle* (SDLC).

B. *Mobile*

Aplikasi yang dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus dapat meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan teknologi dan kemudahan bagi masyarakat.

C. *Agile*

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro cepat tanggap dalam merespon kebutuhan maupun permasalahan dalam implementasi SPBE.

D. *Reliability*

Aplikasi yang akan dikembangkan harus bisa diandalkan, dalam hal ketepatan proses dan ketepatan informasi.

E. *Transparency*

Aplikasi yang dikembangkan harus dapat mendukung budaya transparansi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar tercipta pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2.6.2. Tren Teknologi Pengembangan Aplikasi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengembangan aplikasi, baik dalam sektor pemerintahan. Pengembangan aplikasi modern tidak lagi hanya berfokus pada fungsionalitas dasar, tetapi juga menekankan aspek efisiensi, skalabilitas, keamanan, serta pengalaman pengguna (user experience) yang optimal. Adapun beberapa tren teknologi utama yang mendominasi dunia pengembangan aplikasi saat ini adalah sebagai berikut:

A. Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)

Integrasi AI dalam aplikasi memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan rekomendasi secara otomatis. Dalam pemerintahan, teknologi ini digunakan untuk membangun chatbot layanan publik kabupaten bojonegoro, sistem analitik kebijakan berbasis data, dan deteksi anomali dalam anggaran atau pengaduan masyarakat.

B. Pengembangan Berbasis Cloud (Cloud Computing)

Cloud computing menjadi pondasi penting dalam pengembangan aplikasi modern, karena memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Aplikasi berbasis cloud memungkinkan pemerintah kabupaten bojonegoro mengakses data dan sistem secara real-time, tanpa terbatas oleh perangkat atau lokasi fisik tertentu.

C. Penggunaan Arsitektur Microservices

Arsitektur microservices memungkinkan pengembangan aplikasi secara modular, di mana setiap komponen atau layanan dapat dikembangkan, diuji, dan ditingkatkan

secara terpisah. Ini memberikan kemudahan dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut tanpa mengganggu keseluruhan sistem.

D. Penguatan Keamanan Aplikasi (Application Security)

Meningkatnya ancaman siber mendorong pengembang untuk memprioritaskan keamanan sejak tahap awal pengembangan (security by design). Teknologi seperti enkripsi end-to-end, autentikasi multi-faktor (multi-factor authentication), dan pemantauan anomali berbasis AI kini menjadi standar dalam pengembangan aplikasi, terutama dalam pengelolaan data publik.

E. Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile dan Web Responsif

Dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile, aplikasi yang dikembangkan saat ini cenderung bersifat responsif dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Platform *Progressive Web App* (PWA) juga menjadi pilihan karena mampu menggabungkan keunggulan aplikasi web dan mobile dalam satu sistem yang ringan dan mudah diakses.

F. Bahasa Pemrograman dan Tools

Terdapat banyak ragam teknologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak saat ini. Beberapa di antaranya termasuk:



Gambar 1.2.6.2.1. Ragam Bahasa Pemrograman

1. Bahasa Pemrograman Umum:

- Python
- Java
- C#
- JavaScript
- Ruby
- Go
- Swift
- Kotlin
- Rust

2. Bahasa Pemrograman untuk Aplikasi Web:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
- Ruby on Rails
- ASP.NET

- Node.js
3. Bahasa Pemrograman untuk Aplikasi Mobile:
 - Java (untuk Android)
 - Swift (untuk iOS)
 - Kotlin (untuk Android)
 - React Native (JavaScript framework untuk pengembangan aplikasi mobile lintas platform)
 4. Relational Database Management System (RDBMS):
 - Oracle Database
 - Microsoft SQL Server
 - MySQL/MariaDB
 - PostgreSQL.

Berdasarkan hasil survei aplikasi internal di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi merupakan berbasis *web* yang berjumlah 223 aplikasi (93,3%). Pemilihan *platform web* merupakan hal yang umum mengingat *platform* ini dapat diakses dari *personal* komputer maupun *smartphone* sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi dalam mengakses sebuah layanan pemerintah.

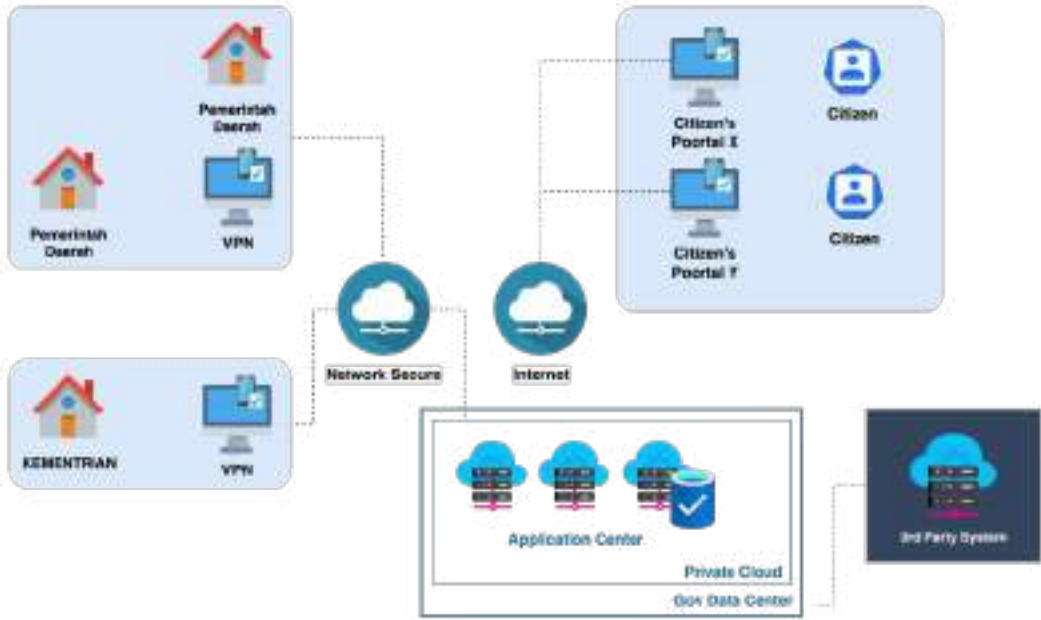
Aplikasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tentunya akan terus diarahkan dan diproyeksikan menjadi sebuah aplikasi yang mampu mendukung bisnis proses dasar dan pendukung yang ada. Teknologi yang terus berkembang dapat menjawab tantangan kompleksitas bisnis proses agar lebih efisien dengan adanya otomasi. Namun dibalik pesatnya perkembangan teknologi terdapat tantangan yang dihadapi yaitu banyaknya ragam teknologi yang ada perlu didukung dengan SDM yang menguasai teknologi tersebut. Dari kondisi riil aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini terhadap penggunaan teknologi yang marak digunakan dan kompetensi programmer yang ada maka perlu ditetapkan standar teknologi yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1.2.6.2.1. Pilihan Teknologi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No	Platform	Teknologi
1	Front End Web	HTML, CSS, Js, Vue JS
	Back End Web	PHP
2	Front End Mobile	Flutter, Kotlin
	Back End Mobile	PHP
3	Desktop	C#, Java
4	RDBMS	MySQL, PostgreSQL
5	Interoperability	JSON

G. Integrasi **Data dengan Platform Interoperabilitas**

WSO2 merupakan *platform* interoperabilitas berlisensi terbuka (*open source*) yang mendukung berbagai jenis layanan integrasi. WSO2 menawarkan keuntungan *platform middleware* berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA) yang mudah untuk diintegrasikan dan mendukung layanan berbasis *cloud* serta menyediakan *helpdesk* di dalam produknya. Republik Moldova merupakan salah satu negara yang telah menerapkan WSO2 di dalam penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis e-Government guna keperluan *identity management*, *authentication* dan *authorization transaction* untuk berbagai *electronic devices* dan *mobile apps*.



Gambar 1.2.6.2.2. Integrasi Data dengan Platform Interoperabilitas

Gambar di atas mengilustrasikan integrasi data dan pertukaran informasi antar perangkat daerah di dalam mengelola layanannya melalui *secure network* dan menyediakan media penyampaian informasi publik melalui portal masyarakat berdasarkan pusat data pemerintahan.

1.2.7. **Tata Kelola Infrastruktur**

Infrastruktur SPBE terdiri dari Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data Kementerian atau Lembaga dapat menjadi Pusat Data Nasional jika memenuhi SNI: 9799-1: 2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data dan SNI: 9799-2: 2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data. Pada Pusat Data terdapat beberapa komponen antara lain *pusat data*, *storage*, perangkat pendukung pusat data, dan teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi.

1.2.7.1. Pusat Data



Gambar 1.2.7.1.1. SNI No: 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

A. SNI No: 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi teknis pusat data.

1. Spesifikasi gedung

Pemilihan lokasi gedung pusat data tidak boleh terletak di wilayah rawan bencana. Referensi wilayah rawan bencana dapat mengacu pada Katalog BMKG melalui

<https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Gempabumi-Signifikan-dan-Merusak-1821-2018.pdf> serta Dokumen Risiko Bencana Indonesia (RBI) dari BNPB melalui <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi-1.pdf>.

- Ketahanan gempa;
- Ketahanan beban gempa;
- Pembagian ruangan;
- Ketahanan material gedung; dan
- Sistem monitoring gedung.

2. Spesifikasi sistem kelistrikan:

- Catu daya listrik;
- Sistem kelistrikan berkesinambungan;
- Persediaan bahan bakar;
- *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
- Analisis sistem listrik;
- Konstruksi panel listrik;
- Jalur kabel listrik;
- Penumaian; dan
- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*).

3. Spesifikasi sistem pendinginan:

- Spesifikasi sistem jaringan data;
- Spesifikasi sistem pemadam kebakaran;
- Spesifikasi sistem monitoring lingkungan pusat data; dan
- Spesifikasi sistem keamanan akses fisik.

B. SNI-No: 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data.



Gambar 1.2.7.1.2. SNI-No 8799-1:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

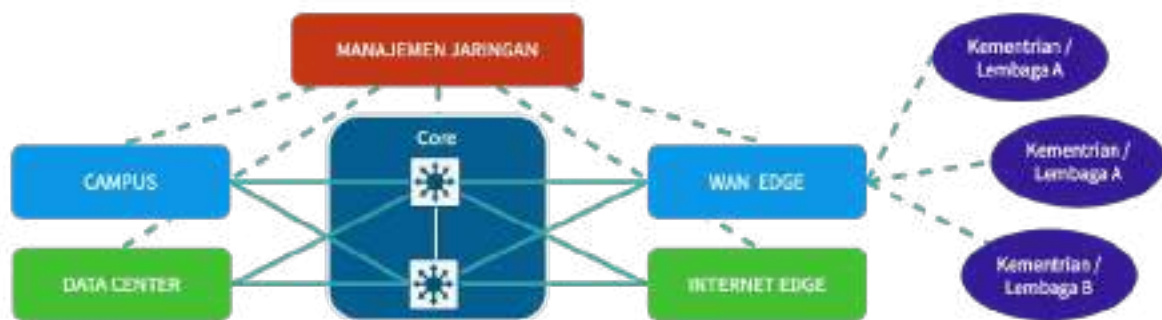
1. Perencanaan
 - Analisis kebutuhan
 - Manajemen risiko dan kesesuaian
2. Operasional
 - Organisasi penyelenggara pusat data
 - Sistem manajemen layanan operasional pusat data
 - Infrastruktur
3. Manajemen layanan
 - Sistem manajemen layanan tingkat lanjut (STML)
 - Manajemen keselamatan
 - Manajemen keamanan
 - Manajemen proyek
4. Manajemen SDM
 - Pengelolaan kompetensi
 - Pelatihan
 - Manajemen kinerja
5. *Monitoring*, pelaporan dan pengendalian
6. Manajemen keberlangsungan
 - Manajemen keberlangsungan kegiatan
 - Manajemen keberlangsungan lingkungan

C. SNI No: 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit Pusat Data

1. Program audit.
2. Kegiatan audit.
3. Penyiapan, pengesahan dan penyampaian laporan audit.
4. Kompetensi auditor.

1.2.7.2. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagi informasi dan komunikasi antar *stakeholder*. Jaringan ini umumnya tersedia untuk layanan basis data, berbagi dokumen, dan berbagi informasi dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya. Jaringan intra pemerintah juga dapat digunakan untuk mengatur akses ke layanan administratif, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan.



Gambar 1.2.7.2.1. Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Dari gambar arsitektur di atas diperoleh informasi bahwa untuk koneksi jaringan intra pemerintah antara jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota/Kabupaten melalui WAN Edge dengan menggunakan koneksi yang aman dan terenkripsi. WAN Edge didukung oleh perangkat router WAN dan Next-Generation Firewall WAN.

1.2.7.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah sistem yang menyediakan akses ke berbagai layanan pemerintah dari satu tempat. Sistem ini dapat berupa portal layanan pemerintah atau antarmuka berbasis *web* yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pelayanan fiskal, sosial, pengawasan, dan lainnya. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti verifikasi, pelaporan, dan pemantauan untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat diakses oleh masyarakat,

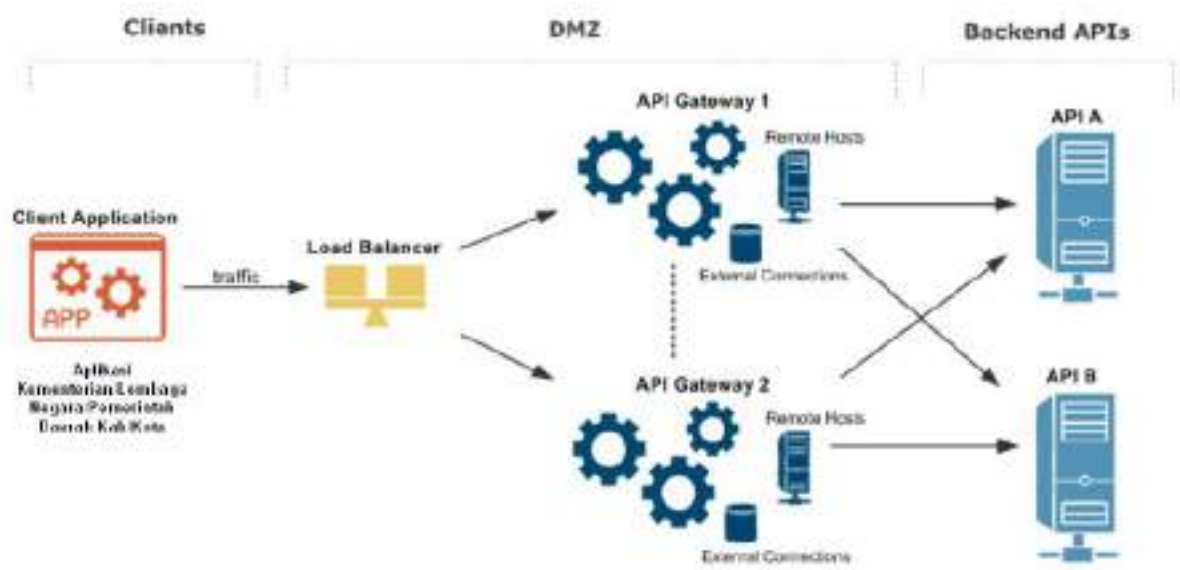


Gambar 1.2.7.3.1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

A. Application Programming Interface (API)

API adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu *developer* melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. API memungkinkan *developer* untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti

function, protocols dan tools lain. API dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.



Gambar 1.2.7.3.2. Arsitektur API Gateway dengan konfigurasi High Availability

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar Arsitektur API Gateway diatas dengan konfigurasi High Availability (HA) sebagai berikut.

1. Aplikasi klien eksternal membuat panggilan masuk melalui protokol pengangkutan pesan tertentu (misalnya, *HTTP*, *JMS*, atau *FTP*) ke penyeimbang beban.
2. Penyeimbang beban melakukan pemeriksaan pada setiap instance API Gateway, dan mendistribusikan beban pesan ke port di setiap instance API Gateway (default-nya adalah 8080).
3. Setiap instance API Gateway harus memiliki Koneksi Eksternal ke sistem pihak ketiga. Termasuk database seperti *Oracle* dan *MySQL*, dan *Authentication Repositories* seperti *CA SiteMinder*, *Oracle Access Manager*, pusat data *Local Directory Access Protocol (LDAP)*, dan sebagainya.
4. Setiap instance API Gateway direplikasi menggunakan sistem caching berdasarkan Ehcache.
5. Setiap instance API Gateway memiliki antarmuka Host Jarak Jauh yang menentukan koneksi keluar sistem API backend.
6. Setiap instance API Gateway berisi database *Apache Cassandra* yang disematkan dan digunakan oleh fitur-fitur tertentu untuk penyimpanan data persisten, dimana setiap instance API Gateway memiliki kemampuan HA-nya sendiri.
7. Setiap instance API Gateway berisi sistem pesan *Apache ActiveMQ* tertanam, yang dapat dikonfigurasi untuk HA dalam sistem file bersama.
8. Setiap API backend juga direplikasi untuk memastikan tidak ada kegagalan di tingkat pusat data.

9. Traffic manajemen yang digunakan oleh Admin Node Manager, API Gateway Manager, dan Policy Studio ditangani secara terpisah di port yang berbeda (default 8090).

1.2.8. Tata Kelola Keamanan



Gambar 1.2.8.1 Keamanan SPBE

Tata Kelola Keamanan SPBE terdapat beberapa komponen yang mencakup didalamnya, seperti Arsitektur Keamanan Sistem Informasi yang terdiri atas keamanan aplikasi, keamanan database, dan keamanan arsitektur berorientasi layanan. Selain itu, juga terdapat arsitektur keamanan infrastruktur: layanan yang didalamnya mencakup manajemen akses, manajemen ancaman, antivirus/antimalware dan pencegahan kebocoran data.

1.2.8.1. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi

Arsitektur Keamanan Sistem Informasi terdiri dari keamanan aplikasi, keamanan database, dan keamanan arsitektur berorientasi layanan. Setiap data dan informasi yang dikelola oleh satuan kerja wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur. Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi telah tertuang dalam SOP dan ditetapkan. Kepastian keamanan data dan informasi, perlu dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

1.2.8.2. Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan

Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan meliputi manajemen akses, manajemen ancaman, antivirus/anti malware, dan pencegah kebocoran data. Dalam memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE. Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

1.2.8.3. Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi

Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi terdiri dari manajemen identitas, manajemen kejadian dan keamanan informasi, dan forensik dan analisa keamanan. Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE mencakup:

1. Penjaminan kerahasiaan.
2. Penjaminan keutuhan.
3. Penjaminan ketersediaan.
4. Penjaminan kenirsangkalan.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

1.3. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE perlu adanya manajemen dalam implementasi SPBE dan mengakomodir proses operasional SPBE yang mengacu dari Perpres 95/2018. Secara keseluruhan dalam manajemen SPBE terdapat beberapa lingkup yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.3.1. Lingkup Manajemen SPBE

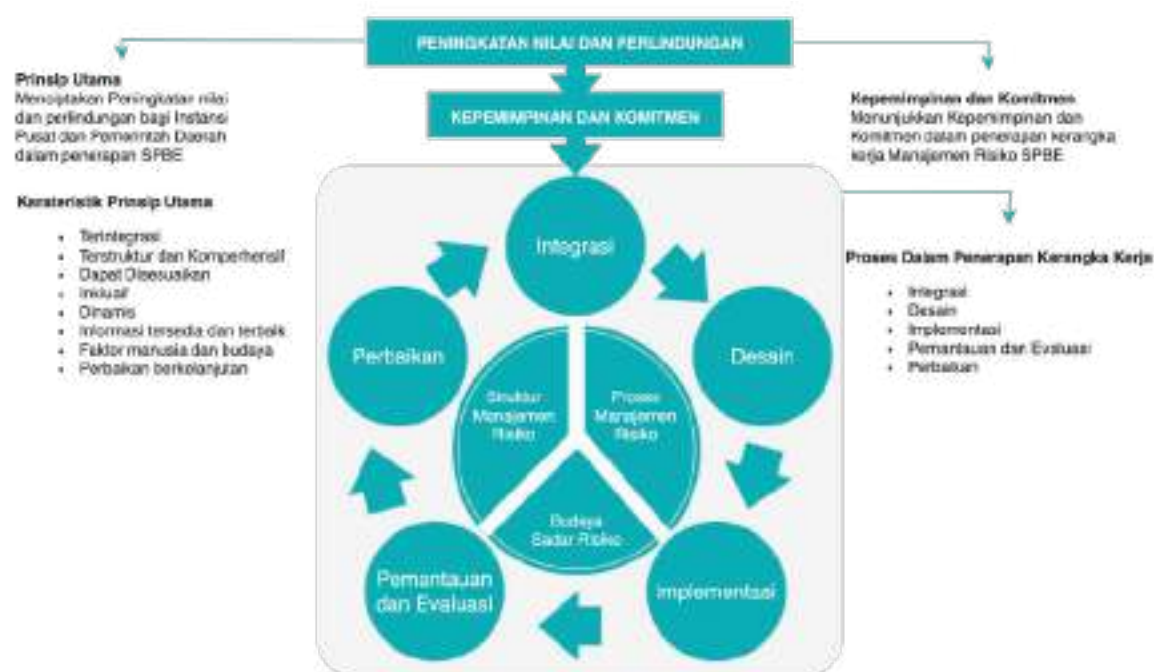
No	Lingkup	Referensi	Kegiatan (Disesuaikan dengan Kegiatan Peta Rencana)	Penanggung Jawab
a.	Manajemen Risiko	PermenpanRB 05/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, International Standardization Organization (ISO) 31000 tentang <i>Risk Management</i> , 27005 tentang <i>Information technology– Security techniques – Information security risk management</i>	1. Pembentukan komite manajemen risiko 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE 3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko 5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat 6. Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, fgd 7. Penetapan konteks risiko SPBE 8. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak 9. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE 10. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya 11. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
b.	Manajemen Keamanan Informasi	ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1. Pembentukan tim keamanan informasi 2. Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 3. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 4. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
c.	Manajemen Data	Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Permen PPN 16/2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SNI 8799:2019 tentang Pusat Data,	1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Lingkup	Referensi	Kegiatan (Disesuaikan dengan Kegiatan Peta Rencana)	Penanggung Jawab
		International Standardization Organization (ISO) 11179 tentang <i>Metadata Registry</i>	data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	
d.	Manajemen Aset TIK	<i>International Standardization Organization (ISO) 19770-5</i> tentang Sistem Manajemen Aset TIK	1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK 4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika
e.	Manajemen SDM	PermenPANRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, <i>Skills Framework for the Information Age (SFIA) Framework</i> , ISO 30400 tentang <i>Human Resource Management</i> , Peta Okupasi TIK	1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK 2. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK 3. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
f.	Manajemen Pengetahuan	<i>Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP manajemen pengetahuan) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Dinas Komunikasi dan Informatika
g.	Manajemen Perubahan	<i>Change Management (ITIL) COBIT 2019</i>	1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi
h.	Manajemen Layanan	<i>Information Technology Infrastructure Library (ITIL)</i>	1. Pembentukan tim helpdesk TIK 2. Pengembangan aplikasi ticketing layanan TIK 3. Evaluasi dan perbaikan kinerja tim helpdesk TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3.1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka membangun pondasi kebijakan manajemen SPBE yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko SPBE pada instansi pemerintah. Manajemen risiko SPBE mengidentifikasi, memahami, mengukur, mengelola, dan memantau risiko yang dihadapi dalam implementasi SPBE. Selain itu, dalam manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, menilai tingkat risiko, mencari cara untuk

mengurangi risiko, serta mengawasi risiko secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai, serta agar proses dan pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajememen Risiko SPBE.



Gambar 13.1.1. Manajemen Risiko SPBE

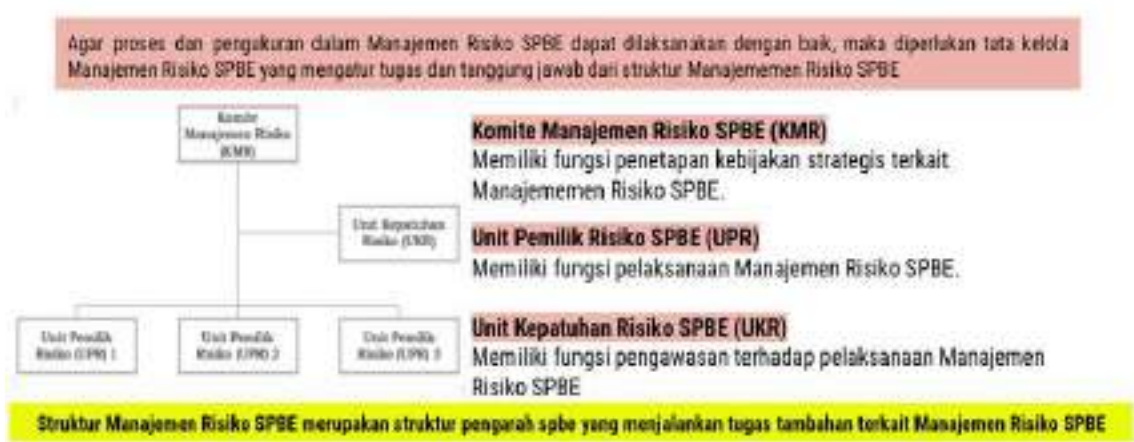
Manajemen risiko saat ini telah menjadi rujukan utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini bisa berupa upaya dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait SPBE secara terus-menerus dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Mengacu pada Permen PAN RB 05/2020 tentang pedoman Manajemen Risiko SPBE, tujuan dari Manajemen Risiko SPBE adalah :

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Instansi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
4. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE.
5. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Instansi Pemerintah Daerah.
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan di Instansi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Pemerintah Daerah.
5. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Pemerintah Daerah.

Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana yang telah tertuang dalam PermenpanRB No. 05/2020 dan dijelaskan sebagai berikut :



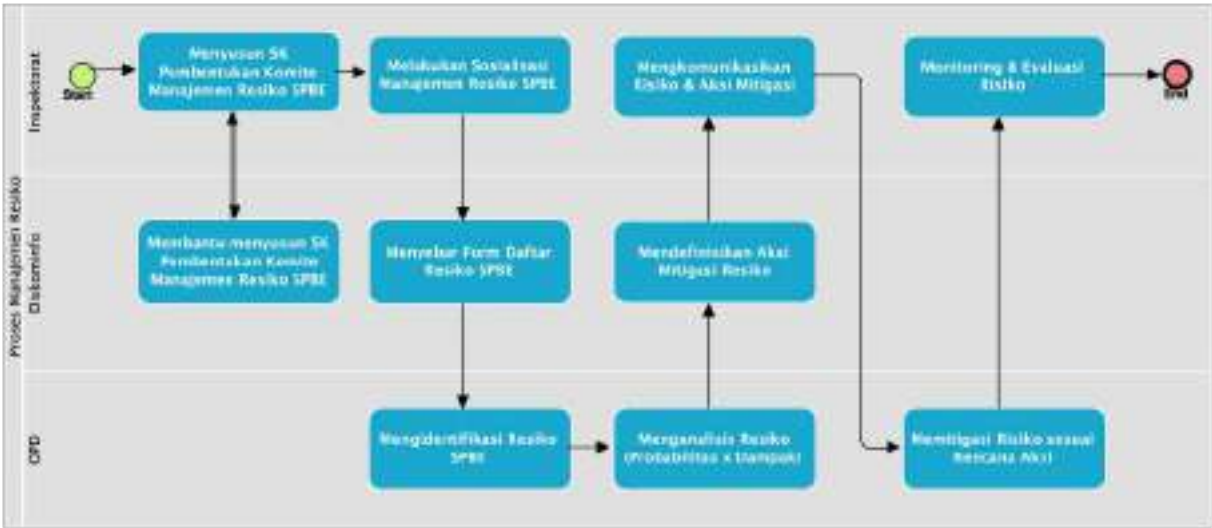
Gambar 1.3.1.2. Pedoman Struktur Manajemen Risiko SPBE Daerah

Mengacu pada gambar di atas maka susunan untuk struktur manajemen risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1.3.1.3. Struktur Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Merujuk pada *best practices* yang ada dalam PermenpanRB 05/2020 terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menjalankan manajemen risiko SPBE yang dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1.3.1.4. Alur Proses Manajemen Risiko SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun SOP dan dokumen terkait manajemen risiko dengan lingkup sebagai berikut :

1. SOP Manajemen Risiko SPBE oleh setiap perangkat daerah; dan
2. Kajian Manajemen Risiko.

1.3.2. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi merupakan kegiatan pengelolaan yang menyediakan perlindungan keamanan informasi pada SPBE. Manajemen keamanan informasi termasuk dalam identifikasi, penetapan, implementasi, dan pemeliharaan kontrol dan prosedur keamanan yang menyediakan perlindungan terhadap penggunaan, distribusi, dan perlindungan informasi yang tersimpan dalam SPBE. Secara umum, ruang lingkup dalam manajemen keamanan informasi meliputi: data/informasi SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan jaringan SPBE di setiap instansi pemerintah.



Gambar 1.3.2.1. Domain Keamanan Informasi

Secara umum terdapat empat domain keamanan SPBE yaitu :

1. Keamanan Data/Informasi

Keamanan data atau informasi adalah proses memastikan bahwa data atau informasi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan melalui sistem informasi dapat diakses, dirahasiakan, dan digunakan hanya oleh orang-orang yang berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi data atau informasi dari ancaman keamanan seperti kebocoran, peningkatan, pencurian, dan sabotase. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara termasuk penyimpanan data, enkripsi data dan akses yang diatur.

2. Keamanan Aplikasi

Seperangkat prinsip, standar, prosedur, dan operasi yang digunakan untuk melindungi data dan informasi pada aplikasi dari ancaman keamanan. Kontrol keamanan aplikasi bertujuan untuk mencegah atau mereduksi risiko. Secara umum, kontrol keamanan aplikasi, meliputi: enkripsi data, *authentication*, *authorization*, *access control*, *logging & monitoring*, and *code review* dan *testing*.

3. Keamanan Jaringan

Suatu proses yang dimaksudkan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan yang berbahaya dengan mengatur akses ke sistem informasi dan jaringan komputer. Secara umum, *software* keamanan jaringan digunakan untuk melakukan autentikasi user dan pengguna yang akan mengakses jaringan melalui sistem enkripsi.

4. Keamanan Infrastruktur

Keamanan infrastruktur mengacu pada *best practices* COBIT 2019. Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen keamanan informasi yaitu:

- a. Menentukan ruang lingkup dan batas-batas manajemen keamanan informasi dalam hal karakteristik organisasi, lokasi, aset dan teknologi.
- b. Menetapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan kebijakan instansi dan konteks dimana instansi beroperasi.

- c. Menyelaraskan manajemen keamanan informasi dengan pendekatan organisasional secara keseluruhan pada manajemen keamanan.
- d. Mendapatkan otorisasi dari pejabat struktural untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah manajemen keamanan informasi.
- e. Mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang lingkup manajemen keamanan informasi.
- f. Menetapkan serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.
- g. Mengkomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.

1.3.2.1. Urgensi Keamanan



Gambar 1.3.2.1.1. Manajemen Keamanan Informasi

Setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah diwajibkan menyelenggarakan SPBE. Transformasi digital pada setiap layanan menjadi salah satu bentuk penerapan SPBE oleh pemerintah. Namun demikian, penyelenggaraan SPBE tidak terlepas dari berbagai tantangan baru salah satunya pada keamanan informasi. Beberapa masalah yang muncul dalam keamanan informasi antara lain: tingginya risiko penyerangan siber dan minimnya penerapan keamanan SPBE yang didasari pada rendahnya kemampuan SDM pemerintah dalam menangani keamanan informasi SPBE. Berdasarkan kondisi yang ada, BSSN menyusun strategi dan menetapkan kebijakan manajemen serta standar teknis terkait keamanan SPBE agar dapat menjadi panduan dan acuan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan keamanan SPBE. Dengan adanya kebijakan manajemen keamanan SPBE menjadikan teknologi yang digunakan lebih aman serta selaras dengan proses bisnis sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan.

1.3.2.2. Manajemen Keamanan SPBE

Mengacu dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat pedoman dalam melakukan manajemen keamanan informasi SPBE. Manajemen keamanan informasi SPBE

dilakukan oleh instansi pusat dan daerah. Adapun proses manajemen keamanan informasi meliputi:



Gambar 1.3.2.2.1. Proses Manajemen Keamanan Informasi

1. Penetapan ruang lingkup
Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh setiap pimpinan instansi pusat atau Kepala Daerah. Dalam menetapkan ruang lingkup keamanan cyber dapat dilakukan berdasarkan 2 hal yaitu isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi dan isu eksternal keamanan informasi SPBE. Isu internal keamanan informasi SPBE adalah area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE. Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE setidaknya meliputi:
 - Data dan informasi SPBE;
 - Aplikasi SPBE;
 - Aset Infrastruktur SPBE; dan
 - Kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.Sedangkan isu eksternal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan penanggung jawab
Penetapan penanggung jawab pada manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh kepala daerah. Penanggung jawab Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi dalam Tim Koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya, Kelompok Kerja Manajemen keamanan informasi akan menetapkan pelaksana teknis keamanan SPBE yang terdiri dari:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan Informasi TK; dan
 - b. Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.
3. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Tahap perencanaan terdiri dari dua bagian yaitu program kerja keamanan SPBE dan target realisasi program kerja keamanan SPBE. Adapun program kerja yang dilakukan meliputi:

- a. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE



Gambar 1.3.2.2.2. Contoh Sosialisasi dan Pelatihan

Gambar 1.3.2.2.2. merupakan salah satu contoh dari sosialisasi atau *spread awareness* yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai bentuk dari manajemen keamanan informasi melalui berbagai kegiatan seperti: informasi tips menghindari serangan *man in the middle attack* di *wifi public* dan tips menghindari penipuan atau *scam (phising)* melalui sosial media.

- b. Pengukuran Nilai Kerentanan Keamanan SPBE

Adapun tahapan pengukuran nilai kerentanan keamanan SPBE dapat dilakukan dengan cara:

- Menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
- Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
- Mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

- c. Peningkatan Keamanan SPBE

Adapun upaya dalam peningkatan keamanan SPBE dapat dilakukan dengan cara:

- Menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan

- Menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen keamanan informasi dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Akses Ruang Pusat Data.
 2. SOP *Backup* dan *Restore Data*.
 3. SOP Hak Akses TIK.
 4. SOP Penanganan Gangguan TIK.
 5. SOP Pengajuan Jaringan Baru.
 6. SOP Pengembangan Sistem Informasi.
 7. SOP Penitipan dan Pengembalian pusat data.
 8. SOP Evaluasi Keamanan SPBE.
- d. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
1. Mengidentifikasi sumber serangan;
 2. Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
 3. Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
 4. Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi; dan
 5. Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.



Gambar 1.3.2.2.3. Alur Proses Penanganan Insiden SPBE

- e. Audit Keamanan SPBE.

Audit keamanan SPBE perlu dilakukan 2 tahun sekali sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen keamanan informasi, sedangkan untuk target realisasi program kerja ditetapkan oleh masing-masing instansi.

4. Dukungan Pengoperasian

Dukungan pengoperasian dalam kelompok kerja manajemen keamanan informasi harus menyediakan SDM yang berkompeten dan anggaran keamanan SPBE. Kelompok kerja manajemen keamanan informasi harus menyediakan SDM keamanan SPBE yang memiliki kompetensi dalam bidang infrastruktur TIK dan juga keamanan aplikasi. Diperlukan pelatihan atau bimtek untuk SDM yang belum kompeten. Selain itu, anggaran keamanan SPBE yang akan disediakan harus didasarkan pada perencanaan yang telah disusun.

5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh kelompok kerja manajemen keamanan informasi. Evaluasi kinerja keamanan SPBE dapat mencakup hal-hal berikut ini:

- a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan SPBE;
- b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
- c. memformulasi pelaksanaan keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
- d. menganalisis efektifitas pelaksanaan keamanan SPBE; dan
- e. mendukung dan merealisasikan program audit keamanan SPBE.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Perbaikan berkelanjutan merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Perbaikan berkelanjutan mencakup:

- a. Solusi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE; dan
- b. Perbaikan pelaksanaan keamanan SPBE secara periodik.

Setiap instansi pemerintahan baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan SPBE termasuk didalamnya dalam hal keamanan informasi. Dalam penerapannya, keamanan SPBE juga harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang diatur melalui Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 1.3.2.2.4. Standar Teknis dan prosedur keamanan

1.3.3. Manajemen Data

Manajemen data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Manajemen data SPBE memungkinkan pemerintah untuk menyimpan, menganalisis, dan memanfaatkan data

sehingga memudahkan pemerintah untuk mengakses dan mengelola data secara efektif, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manajemen data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Adapun sasaran manajemen data SPBE bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah yaitu :

- 1. memahami kebutuhan data;
- 2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
- 3. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; dan
- 4. memaksimalkan penggunaan data dan memberikan hasil yang efektif.

Tujuan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian manajemen data SPBE. Secara umum, penyelenggaraan Satu Data Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan manajemen data SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat.

Menurut Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat, terdapat empat komponen utama yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen data khususnya manajemen data SPBE. Komponen tersebut adalah manajemen arsitektur data, manajemen data induk dan data referensi, manajemen basis data, dan manajemen kualitas data.



Gambar 13.3.1. Manajemen Basis Data

1. Manajemen Arsitektur Data

Arsitektur data didefinisikan sebagai model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE. Sedangkan, manajemen arsitektur data merupakan rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen arsitektur data. Manajemen arsitektur data memungkinkan pemerintah untuk membangun dan mengelola data untuk mengakses informasi, serta

mengintegrasikan data dan informasi antar aplikasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi warga. Selain itu, manajemen arsitektur data juga bermanfaat dalam mengelola pemeliharaan dan peningkatan serta keamanan data.

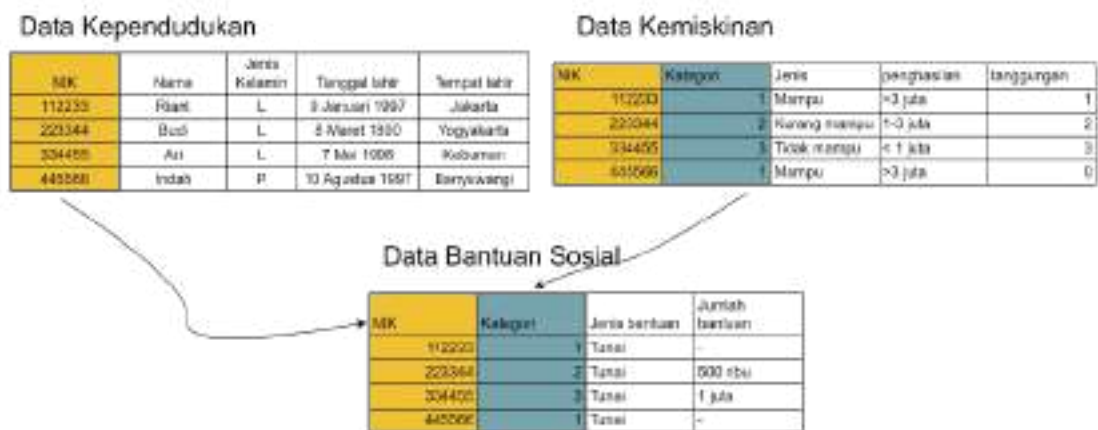
Arsitektur data sangat penting untuk manajemen data. Data pemerintahan perlu direpresentasikan pada tingkat abstraksi yang berbeda sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Artefak Arsitektur Data mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang ada, menentukan persyaratan data, memandu integrasi data, dan mengontrol aset data seperti yang dituangkan dalam strategi data. Arsitektur Data organisasi dijelaskan melalui kumpulan dokumen desain induk yang terintegrasi pada berbagai tingkat abstraksi, termasuk standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diatur, digunakan, dan dihapus. Arsitektur data juga diklasifikasikan berdasarkan deskripsi semua wadah dan jalur yang diambil data melalui sistem Pemerintah Daerah.

Manajemen arsitektur data terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data (format dan struktur baku untuk data induk dan referensi) dan ketentuan data (tata perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data). Tujuan manajemen arsitektur data untuk menyediakan data berkualitas tinggi, mengidentifikasi, merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data. Kegiatan manajemen arsitektur data meliputi penyusunan dan penetapan, penyebarluasan, dan review.

2. Manajemen Data Referensi

Data referensi merupakan komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain. Lebih jauh, manajemen data referensi didefinisikan sebagai rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data referensi. Manajemen data referensi SPBE memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang relevan, memperbarui informasi yang ada, dan berbagi informasi secara efisien. Data referensi SPBE juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan operasional pemerintahan. Data referensi dapat mencakup hal-hal seperti undang-undang, peraturan, program pemerintah, dan lain sebagainya.

Tujuan manajemen data dari data referensi adalah menyediakan data yang sesuai struktur dan format baku, dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan, serta menghindari duplikasi. Kegiatan dalam manajemen data referensi, meliputi: perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data.



Gambar 1.3.3.2. Ilustrasi Manajemen Data

Gambar di atas merupakan contoh dari data bantuan sosial. Data bantuan sosial diperoleh dari data kependudukan dan data kemiskinan. Data kependudukan dan data kemiskinan merupakan data referensi yang diambil oleh data bantuan sosial. Data kependudukan untuk mengetahui data diri penerima bantuan sosial dan data kemiskinan untuk mengetahui kategori dan penghasilan penerima bantuan sosial. Adapun beberapa Kegiatan manajemen data yaitu :

1. Memenuhi persyaratan data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Beberapa area dalam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memerlukan akses ke kumpulan data yang sama, dengan keyakinan bahwa kumpulan data tersebut lengkap, terkini, dan konsisten. Data induk sering menjadi dasar kumpulan data (misalnya, menentukan apakah suatu analisis mencakup semua perangkat daerah bergantung pada penerapan definisi perangkat daerah secara konsisten).
2. Mengelola kualitas data: inkonsistensi data, masalah kualitas, dan kesenjangan, menyebabkan keputusan yang salah atau kehilangan peluang, Manajemen data induk mengurangi risiko kurangnya kualitas data dengan mengaktifkan representasi yang konsisten dari entitas penting di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Mengelola biaya integrasi: Biaya integrasi sumber data baru ke dalam lingkungan yang sudah kompleks menjadi lebih tinggi tanpa adanya data induk. Hal ini mengurangi variasi dalam menentukan dan mengidentifikasi entitas penting.
4. Mengurangi risiko: data induk dapat memungkinkan penyederhanaan arsitektur berbagi data untuk mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan lingkungan yang kompleks.

3. Manajemen Basis Data

Manajemen basis data didefinisikan sebagai proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat data nasional. Manajemen basis data SPBE merupakan sebuah cara untuk mengelola dan menyimpan data yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi pemerintahan. Hal ini termasuk membangun dan mengatur struktur data, membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan data tersedia untuk pembuatan keputusan, mengatur hak akses pengguna, dan memantau kinerja sistem.

Tujuan manajemen basis data adalah menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dapat dibagi pakaikan, menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus, dan menjaga keamanan data. Kegiatannya meliputi mendefinisikan kebutuhan walidata dan produsen data untuk basis data, mengelola basis data di Pusat Data Nasional serta menyebarluaskan basis data melalui portal SDI. Ketentuan penyimpanan data diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

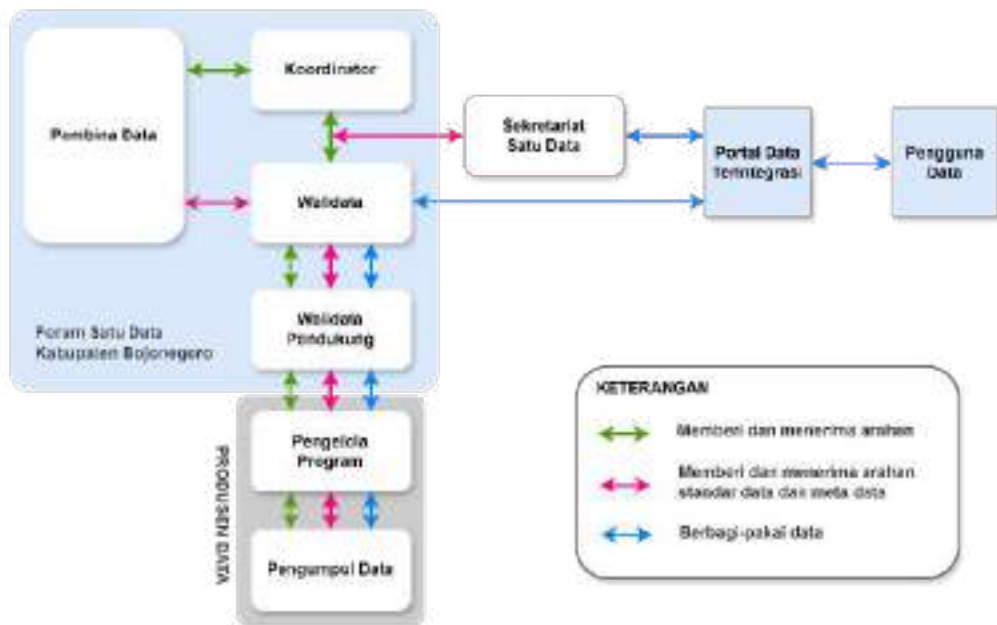
4. Manajemen Kualitas Data

Manajemen kualitas data didefinisikan sebagai proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Manajemen kualitas data SPBE merupakan sebuah proses untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan kualitas data yang diterima oleh sistem, termasuk dalam hal ini penilaian data, memeriksa konsistensi data, mengevaluasi standar data, memverifikasi integritas data, melacak dan menganalisis masalah kualitas data, dan mengidentifikasi tren kualitas data. Selain itu, proses manajemen kualitas data termasuk dalam mengidentifikasi sumber data dan memahami kontribusi yang diberikan oleh sumber data tersebut.

Tujuan dari manajemen kualitas data adalah untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data memenuhi prinsip SDI dan diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data. Kegiatan manajemen kualitas data meliputi pengembangan dan promosi kesadaran kualitas, menentukan persyaratan kualitas data, menetapkan profil, menganalisis, dan menilai kualitas data serta menentukan matriks kualitas data. Kualitas data dapat dideskripsikan menjadi 6 bagian yaitu :

- Kelengkapan : Proporsi data yang disimpan terhadap potensi 100%.
- Keunikan : Tidak ada instance entitas (benda) yang akan direkam lebih dari satu kali berdasarkan bagaimana benda tersebut diidentifikasi.
- Ketepatan Waktu : Sejauh mana data mewakili kenyataan dari titik waktu yang diperlukan.
- Validitas : Data valid jika sesuai dengan sintaks (*format, type, range*) definisinya.
- Akurasi : Sejauh mana data dengan benar menggambarkan objek atau peristiwa "dunia nyata" yang dijelaskan.
- Konsistensi : Tidak adanya perbedaan, ketika membandingkan dua atau lebih representasi dari suatu hal terhadap definisi.

Mengacu pada Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Penerapan Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun struktur forum satu data seperti berikut :



Gambar 1.3.3.3. Kelembagaan Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Penugasan:

Koordinator	Sekretaris Daerah
Pembina Data	Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Walidata	Dinas Komunikasi dan Informatika
Walidata Pendukung	Unsur perangkat daerah/instansi
Produsen Data	Unsur perangkat daerah/instansi

Tugas Pembina Data:

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wali Data Tingkat Kabupaten:

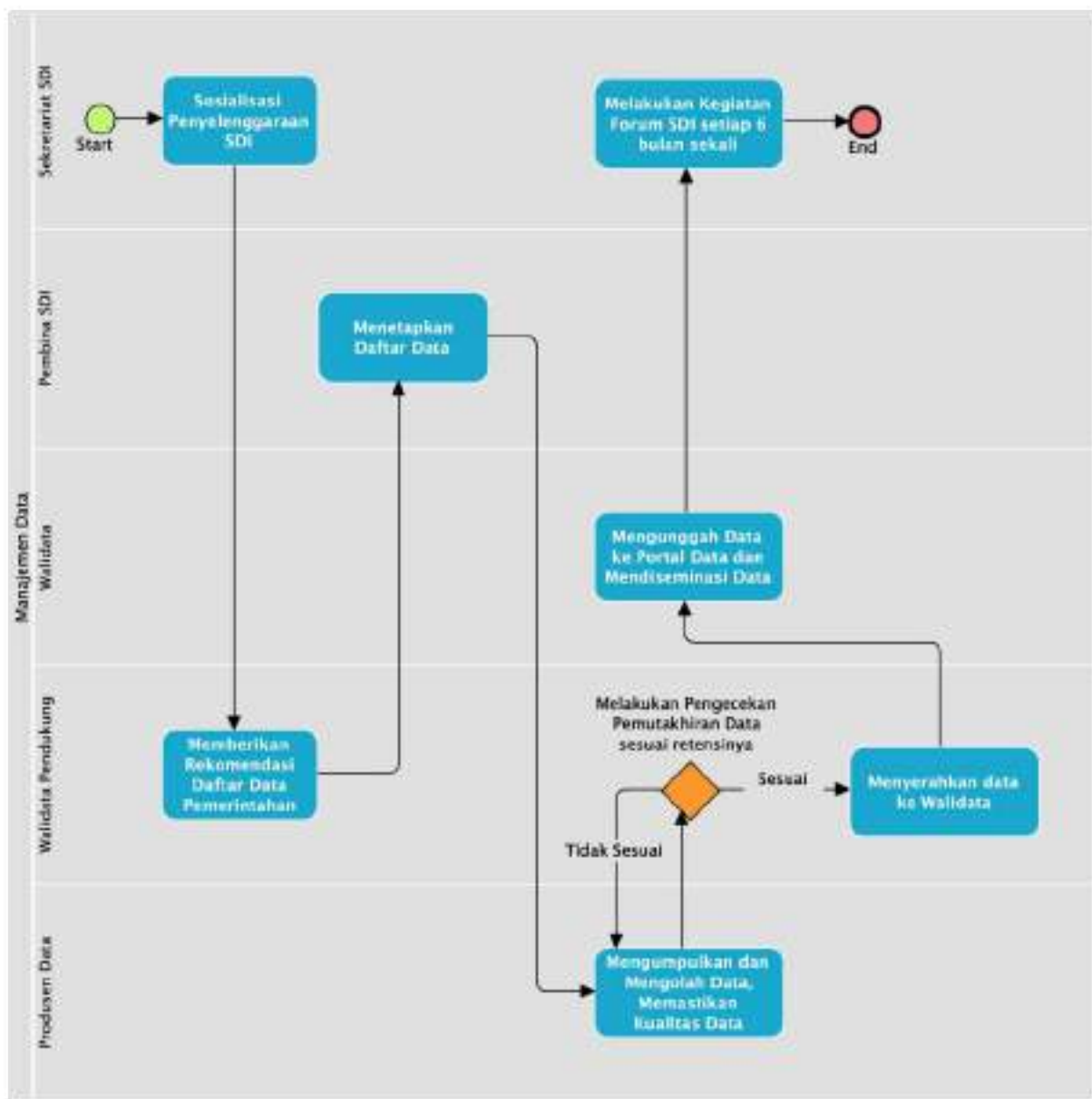
1. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
3. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG;
4. mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;
5. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
6. bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;

7. membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
8. berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Tugas Produsen Data Tingkat Kabupaten:

1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG *berikut* metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
4. bertanggung jawab dalam penyampaian data *berikut* metadata kepada Walidata tingkat Kabupaten melalui walidata pendukung tingkat Kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Berdasarkan *best practices* di atas, alur pengelolaan implementasi Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilaksanakan seperti berikut ini :



Gambar 1.3.3.4. Alur Koordinasi Satu Data

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen data dengan lingkup sebagai berikut :

1. Arsitektur Data yang berisi kamus data dan kewenangan wali data;
2. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data *warehouse*;
3. SOP Pengumpulan data;
4. SOP Penyebarluasan data;
5. SOP Pemanfaatan data;
6. SOP Penentuan walidata dan produsen data; dan
7. SOP Pembuatan dan perubahan kamus data metadata.

1.3.4. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset TIK melibatkan pengelolaan

kebutuhan dan kebutuhan yang berubah, mengurangi biaya keseluruhan, dan memastikan ketersediaan sistem yang dibutuhkan. Manajemen aset TIK yang efektif dapat memastikan bahwa layanan teknologi informasi pemerintah berjalan dengan lancar dan berkinerja tinggi. Contoh kasus dalam mengelola pusat data perlu memastikan perangkat terpelihara, terlindungi dengan baik (tersedia *power supply* saat listrik mati, ditempatkan di ruangan ber AC agar tidak *overheat*) serta melakukan perawatan terhadap perangkat sesuai dengan *life-time*. Mengacu pada *best practices* dalam ISO/IEC 19770-5 tentang *IT Asset Management*, berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen Aset TIK :



Gambar 1.3.4.1. Manajemen Aset TIK

- A. Mengidentifikasi kondisi aset TIK saat ini**
Mencatat seluruh aset TIK (*software* dan *hardware*) beserta kondisi dan *lifetime* nya. Selain itu, *software* berbayar perlu dipastikan lisensinya sudah terbayar.
- B. Mengelola aset TIK yang penting**
Memastikan aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan untuk dapat digunakan dalam menunjang operasional SPBE.
- C. Mengelola siklus aset TIK**
Mengelola aset mulai dari pengadaan hingga pembuangan dalam arti ketika sudah habis masa pakainya *lifetime* perlu dilakukan pembaharuan aset. Pastikan aset digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik sampai akhir *lifetime*.
- D. Mengoptimalkan nilai aset TIK**
Meninjau aset serta mengidentifikasi bagaimana cara mengoptimalkan aset sesuai kebutuhan proses bisnis SPBE.

Berdasarkan *best practices* di atas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam alur proses pengelolaan manajemen aset TIK nya dapat merujuk pada gambar berikut ini :

Gambar 1.3.4.2. Alur Pengelolaan Manajemen Aset TIK

1. SOP Pembuatan dan Perubahan Pengkodean Aset TIK.
2. SOP Inventarisasi dan konfigurasi Aset TIK.
3. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK.
4. SOP Penghapusan Aset TIK.

Manajemen SDM merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Manajemen SDM membantu mengelola sumber daya manusia, memberikan dukungan teknis, dan memonitor aktivitas. Selain itu, manajemen SDM membantu dalam melacak kemampuan dan kompetensi pegawai, mengatur tugas dan pekerjaan, menganalisis kinerja, mengatur jadwal, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan informasi yang akurat tentang kesiapan SDM TIK, memungkinkan manajemen TIK untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa semua aspek dari SDM TIK berfungsi dengan baik.

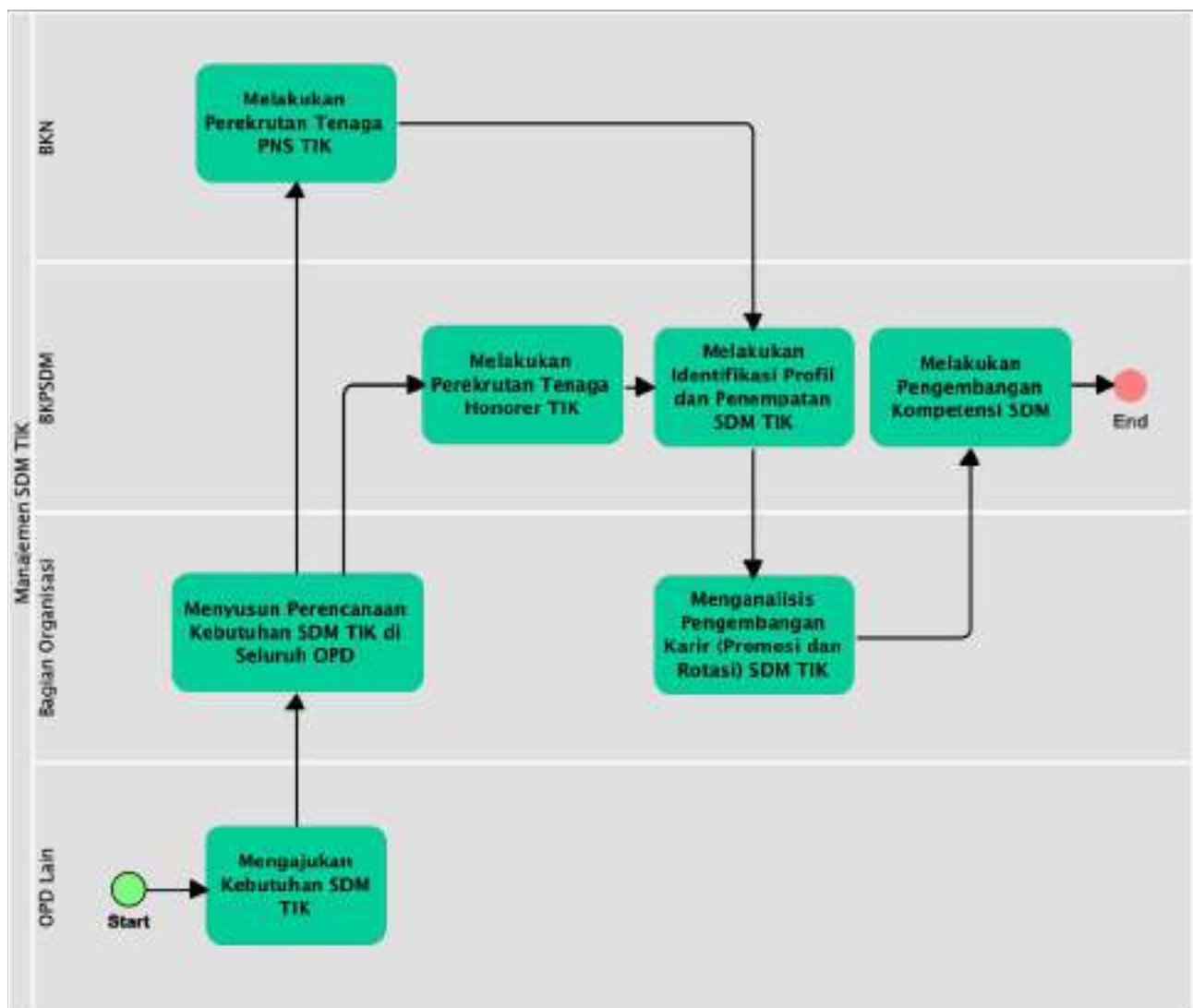
1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Promosi dan/atau Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan

9. Kelompok Rencana Suksesi (*talent pool*) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada kondisi ideal setiap perangkat daerah diharapkan memiliki SDM TIK yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi dan tugas yang diberikan. Adapun keahlian TIK yang dibutuhkan, meliputi:

1. Kebijakan SPBE: Profesional dalam bidang ini berfokus pada penyusunan kebijakan, dan regulasi terkait penggunaan dan pengembangan SPBE di pemerintahan.
2. Manajemen SPBE: Melibatkan perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan keseluruhan aspek SPBE dalam lingkungan pemerintahan.
3. *Enterprise Architect*: Ahli transformasi digital berfokus pada merombak proses administratif dan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
4. *Project Manager*: Spesialis pengelolaan proyek TIK bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengelola proyek pengembangan atau peningkatan sistem TIK.
5. *System Analyst*: Profesional TIK dengan keahlian dalam menganalisis kebutuhan sistem informasi, merancang solusi berbasis teknologi, dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi.
6. *Programmer*: Ahli pengembangan perangkat lunak di pemerintahan bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak yang mendukung berbagai tugas administratif dan layanan publik.
7. *Network Engineer*: Keahlian dalam merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan, server, dan sistem penyimpanan yang mendasari operasi teknologi di pemerintahan.
8. *IT Security*: Professional keamanan informasi bekerja untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur TIK pemerintahan dari ancaman siber dan pelanggaran keamanan.
9. *Application Support*: Tim dukungan teknis menyediakan bantuan dan solusi teknis bagi pengguna dalam mengatasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.
10. *Data Scientist*: Ahli dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan.

Peningkatan kemampuan SDM TIK dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang terlibat. Peningkatan kemampuan personel dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada pekerjaannya. Dalam hal peningkatan SDM TIK, diperlukan bentuk penghargaan yang berbeda sehingga perlu adanya tenaga ahli TIK di masing-masing perangkat daerah yang bertugas mengelola TIK.



Gambar 1.3.5.1. Alur Prosedur Manajemen SDM

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen SDM dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK Perangkat Daerah.
2. SOP Pengadaan dan Pengelolaan SDM TIK non ASN.
3. SOP Permintaan Kebutuhan Training, Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi SDM TIK.

1.3.6. Manajemen Pengetahuan

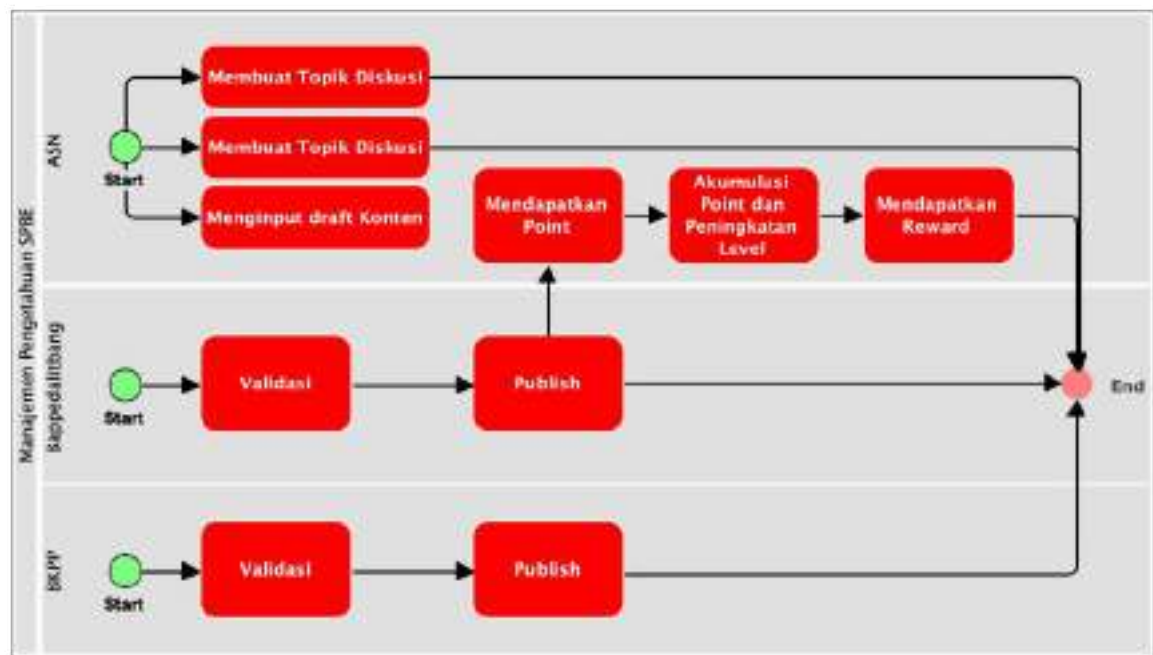
Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Aktivitas dalam manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual instansi pemerintah daerah. Manajemen pengetahuan menjadi penting karena memuat hasil pekerjaan yang berasal dari pengetahuan yang diterapkan, tumbuhnya *knowledge economies*, pengembangan SDM yang profesional, perlunya berbagi pengetahuan lintas bagian dalam organisasi, serta risiko

pergantian pegawai terhadap organisasi. Adapun struktur komite manajemen pengetahuan SPBE sebagai berikut.



Gambar 1.3.6.1. Struktur Komite Manajemen Pengetahuan

Mekanisme alur proses manajemen pengetahuan SPBE yang perlu ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.3.6.2. Alur Proses Manajemen Pengetahuan

Implementasi SPBE perlu melakukan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE perlu mempersiapkan serangkaian proses :

1. Mensosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan;

2. Membentuk kelompok kerja implementasi manajemen pengetahuan;
3. Menjabarkan visi dan misi dalam implementasi manajemen pengetahuan melalui sosialisasi secara berkala;
4. Merencanakan *Quick-Win* untuk mengatasi keraguan dan resistensi;
5. Melakukan konsolidasi manfaat yang sudah tercapai, untuk mendapatkan momentum; dan
6. Menerapkan budaya “*sharing dan re-use*” sebagai cara bekerja yg efektif dan efisien.



Gambar 1.3.6.3. Manajemen Pengetahuan

Manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE sebagai berikut :

1. Mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau cara kerja.
2. Mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE.
3. Meningkatkan kompetensi operator layanan SPBE.
4. Memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK dan analis proses bisnis
5. Meningkatkan kualitas layanan SPBE.

Pada manajemen pengetahuan terdapat siklus hidup yang dimulai dari proses identifikasi, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan. Adapun siklus manajemen pengetahuan digambarkan sebagai berikut.

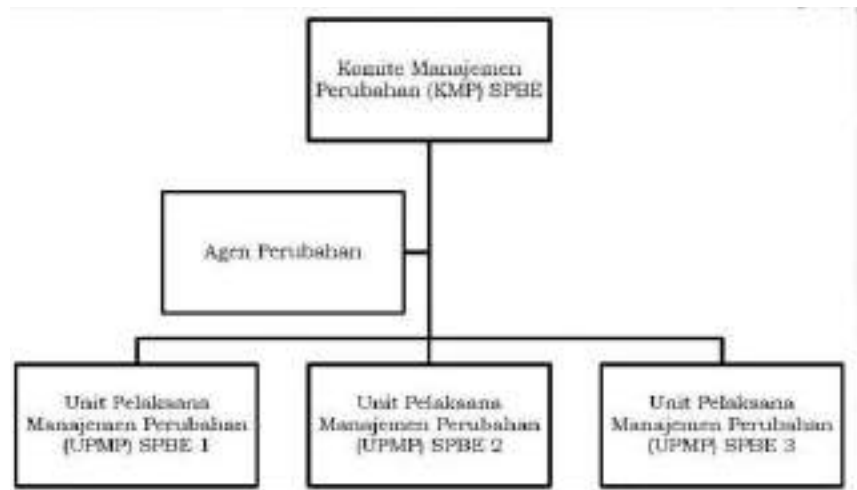


Gambar 1.3.6.4. Siklus Manajemen Pengetahuan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen pengetahuan dengan lingkup SOP Pencatatan pengalaman & *lesson learned* untuk setiap perangkat daerah.

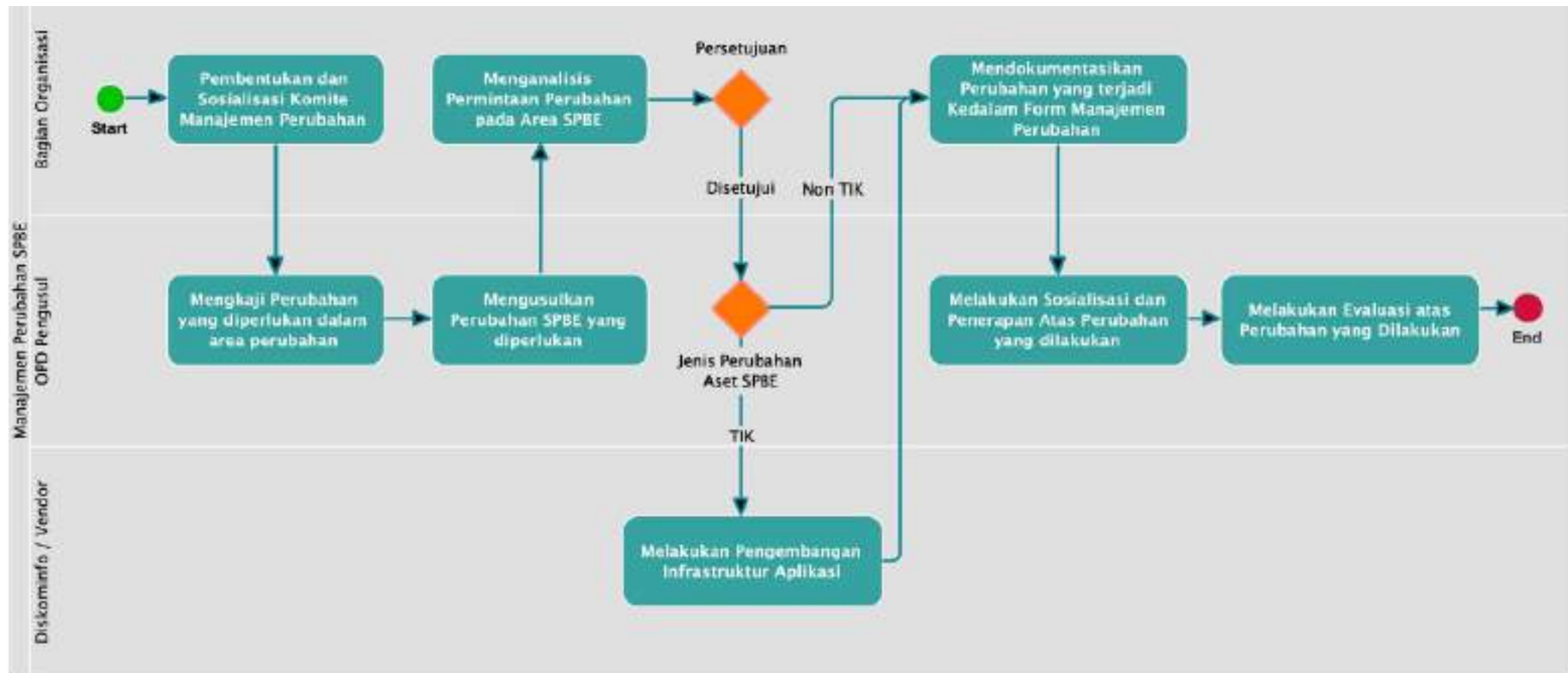
1.3.7. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan sebuah pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini menuju keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan. Manajemen perubahan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan merespon perubahan yang dihadapi. Selain itu, dalam manajemen perubahan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan, mengevaluasi dampak perubahan, mengembangkan dan melaksanakan rencana perubahan, dan memonitoring dan mengevaluasi efektivitas perubahan. Oleh karena itu, dalam manajemen perubahan diperlukan sebuah komite manajemen perubahan yang bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi, menentukan strategi, dan menciptakan kebijakan untuk memastikan bahwa perubahan berhasil diimplementasikan dengan sukses. Adapun skema komite manajemen perubahan sebagai berikut.



Gambar 1.3.7.1. Komite Manajemen Perubahan SPBE

Setiap perubahan yang terdapat pada visi dan misi/kebijakan/SOTK berimplikasi dengan perubahan pada layanan. Layanan harus mampu mengadopsi perubahan tersebut dengan melakukan manajemen perubahan pada bisnis proses, aplikasi maupun infrastrukturnya. Mekanisme alur perubahan layanan SPBE yang perlu ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dijelaskan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.3.7.2. Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen perubahan dengan lingkup SOP Manajemen Perubahan.

1.3.8. Manajemen Layanan

Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Manajemen layanan SPBE membantu pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Manajemen layanan SPBE memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan, pengujian, dan verifikasi data secara *real-time* sehingga memastikan bahwa layanan yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Standar Teknis Persyaratan Keberlangsungan Layanan :

1. Pelayanan Pengguna meliputi :
 - a. Pelayanan Pengguna untuk bantuan proses bisnis aplikasi SPBE yang dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE
 - b. Pelayanan Pengguna untuk bantuan teknis aplikasi SPBE dilakukan oleh
 - i. Menteri
 - ii. Instansi Pusat atau Pemerintah daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari aplikasi SPBE
 - iii. Pihak ketiga Pengembang aplikasi SPBE
 - c. Pelayanan Pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk helpdesk
 - d. Helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions)
 - e. Helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait aplikasi SPBE menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.
2. Pelayanan Pengoperasian Aplikasi SPBE :
 - a. Pengelolaan Risiko untuk meminimalkan dampak risiko aplikasi SPBE
 - b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk peningkatan dan pemeliharaan aplikasi SPBE
 - c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan aplikasi SPBE
 - d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan
 - e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat
 - f. Penyalinan (Backup) data dan aplikasi SPBE dilakukan secara berkala
 - g. pelaksanaan audit aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kerangka Kerja Manajemen Layanan SPBE mendeskripsikan kegiatan mendasar melandasi landasan penerapan manajemen Layanan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah

Tujuan dari kerangka kerja manajemen Layanan SPBE adalah untuk membantu instansi pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan manajemen layanan SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah daerah.



Gambar 1.3.8.1. Kerangka Kerja Manajemen Layanan SPBE

1. Struktur Manajemen Layanan SPBE

Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE merupakan tanggung jawab bersama antara unit pengelola TIK dan Unit Penyedia Layanan di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



Gambar 1.3.8.2. Struktur Manajemen Layanan SPBE

2. Proses Manajemen Layanan SPBE

a. Perencanaan

Bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup penerapan Layanan SPBE yang harus dikelola dalam manajemen layanan SPBE. Proses Perencanaan dilakukan oleh koordinator Layanan, berkoordinasi dengan penyedia Layanan

- Klasifikasi Sistem
- Target Pelayanan Pengguna

- Target Operasional Layanan
- Perumusan Katalog Layanan (Nama Layanan, Deskripsi Layanan, Penyedia Layanan, Pengelola Layanan, Pengelola Teknis, Cara Akses Layanan, Target Ketersediaan Layanan, Kontak Ketersediaan Layanan, Kontak Permintaan Bantuan, Waktu Pelayanan Bantuan, Target Pemenuhan Layanan, Ketersediaan Layanan)
- b. Pelayanan Pengguna
 - Umum
 - Permintaan Layanan
 - Penanganan Gangguan
- c. Pengoprasian Layanan
 - Umum
 - Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan
 - Pemulihan Layanan
- d. Pengelolaan Layanan
 - Umum
 - Pengembalian Layanan
 - Rilis Layanan
- e. Evaluasi
 - Umum
 - Laporan Evaluasi

Implementasi SPBE perlu memastikan portofolio layanan SPBE terpelihara dengan baik dengan berbagai cara. Mengacu pada *best practices* yang terdapat dalam pedoman ITIL v.4, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti:

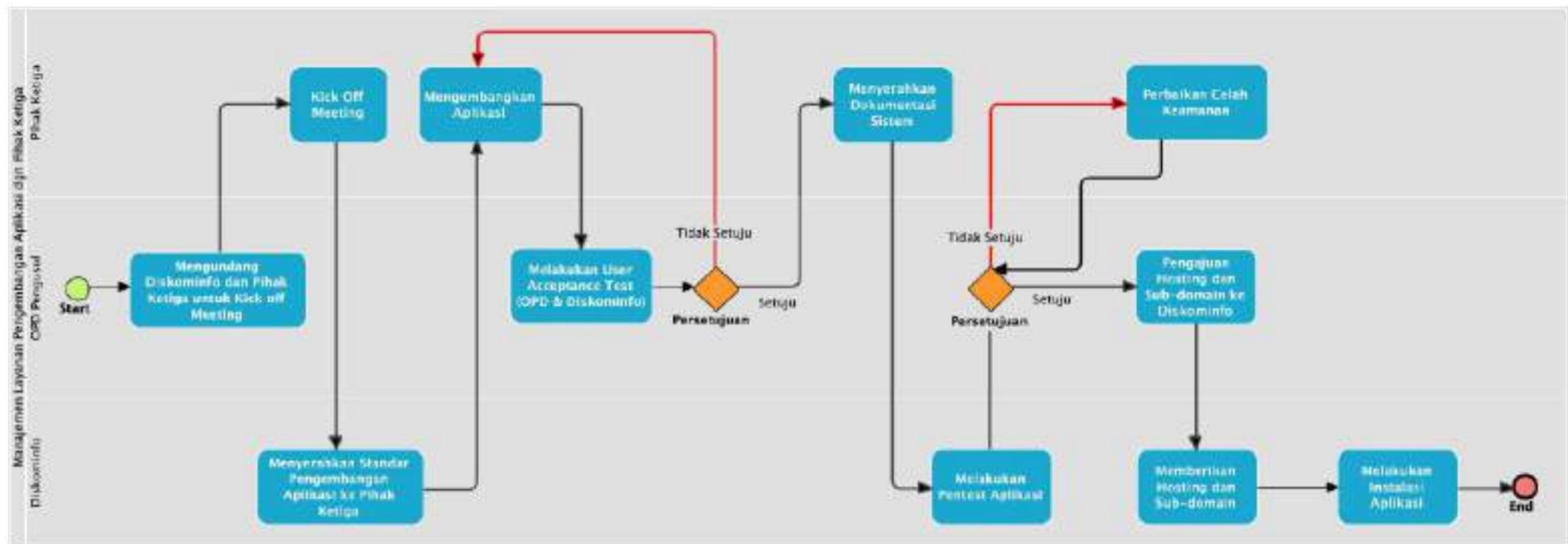


Gambar 1.3.8.3. Manajemen Layanan

1. Mengelola gangguan dengan menyediakan *platform helpdesk* TIK disertai dengan *ticketing* dan monitoring *Service Level Agreement (SLA)*.
2. Melakukan pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur TIK secara berkala dan sesuai dengan prioritas risiko.

3. Berpedoman pada metodologi baku seperti ITIL v4 terkait standar manajemen layanan IT.

Berdasarkan *best practices* di atas Diskominfo dapat melakukan pemberian dukungan layanan TI terkait (a.) layanan pengembangan aplikasi dan (b). layanan penanganan insiden yang dijelaskan pada gambar berikut ini :



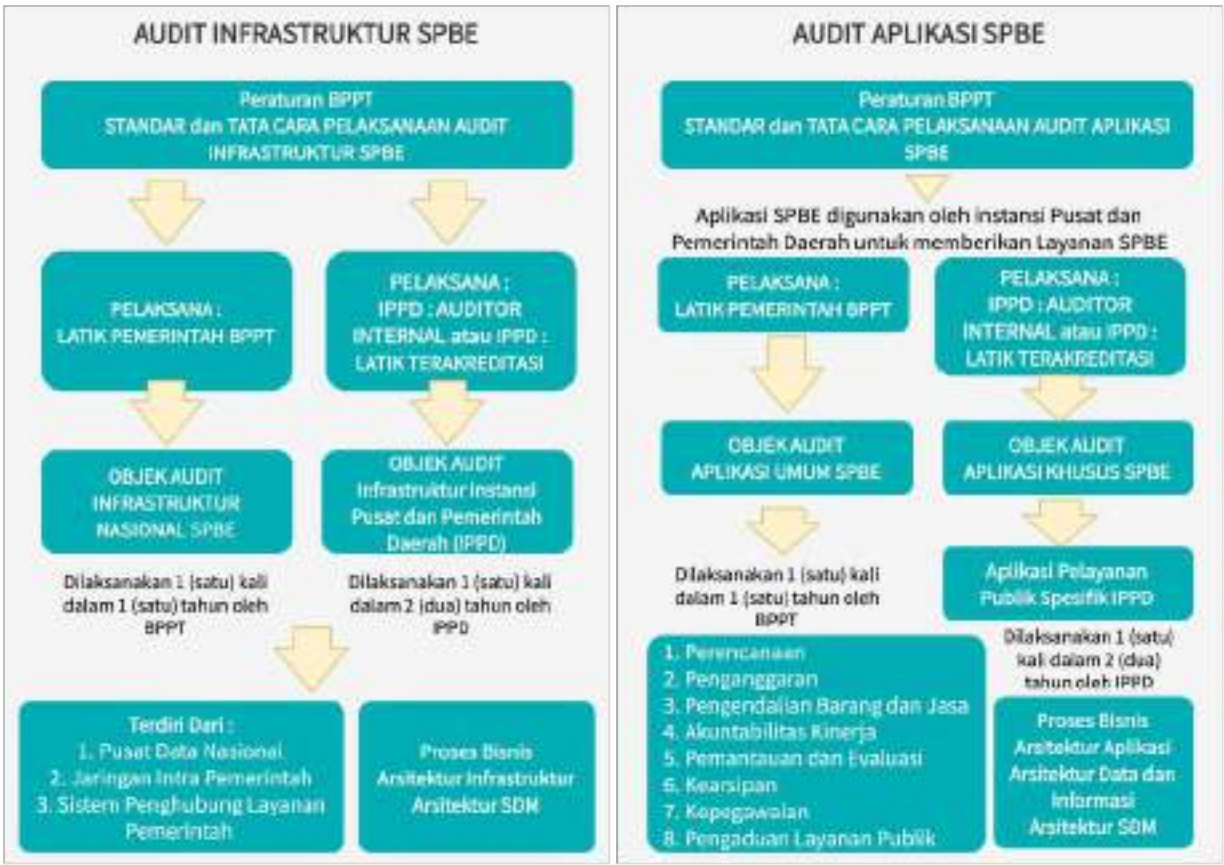
Gambar 1.3.8.2. Layanan Pengembangan Aplikasi



Gambar 1.3.8.3. Layanan Penanganan Insiden

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen layanan dengan lingkup SOP Pengajuan layanan (*Helpdesk*) dan SOP Pengembangan Aplikasi dengan pihak ketiga.

1.3.9. Audit TIK



Gambar 1.3.9.1. Lingkup Audit TIK

(sumber: Paparan KemenpanRB)

Audit TIK merupakan evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi dalam rangka memberikan nilai tambah (manfaat) kepada pihak yang diaudit atau pemilik kepentingan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi.
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan.
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam audit teknologi informasi yaitu:

- A. Audit infrastruktur SPBE, merujuk pada Perpres 95/2018 pasal 55 disebutkan:
 - 1. Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
 - 2. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diaudit setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK tersertifikasi atau terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
 - 3. Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.
- B. Audit Aplikasi SPBE dilakukan dengan mengaudit aplikasi umum setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan audit aplikasi khusus dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK yang berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.
- C. Audit Keamanan Informasi pada infrastruktur SPBE Nasional dan aplikasi umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN, sedangkan untuk audit keamanan pada infrastruktur SPBE dan aplikasi khusus di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK atau perusahaan audit TIK.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Audit TIK dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi;
- 2. Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi;
- 3. Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi;
- 4. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi;
- 5. Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi;
- 6. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi;
- 7. Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi;
- 8. Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi;
- 9. Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi;
- 10. Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi;
- 11. Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi;
- 12. Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi;
- 13. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi; dan
- 14. Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.

Bab II Arsitektur

Target SPBE

2.1. Arsitektur Proses Bisnis Target

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2.1.1. Katalog Proses Bisnis Target

Katalog proses bisnis to-be merupakan kondisi ideal atau target yang ingin dicapai di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog disusun berdasarkan peta proses bisnis eksisting Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan terdapat kondisi target yang ingin dicapai, dan dimana Level 1,2, dan 3 mengacu pada Referensi Arsitektur Bisnis (RAB) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis to-be Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. Metadata katalog proses bisnis To Be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Probis.

Tabel 2.1.1.1. Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 02.02.01.02	Peningkatan Pendapatan Perkapita	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAB 02.03.08.01	Penyuluhan Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAB 02.08.01.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAB 02.08.06.01	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 03.01.01.01	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 03.01.01.02	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.03.02.01	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.03.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.03.02	Perizinan Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.03.04.01	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAB 03.04.01.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.02.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.03.02	Peningkatan Sanitasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.03.03	Penyelenggaraan PSU Perumahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAB 03.04.04.01	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 03.05.06.01	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAB 03.06.01.02	Pemanfaatan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAB 04.01.01.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.01.04	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.01	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.03	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.04	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.01.04.06	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 04.01.08.01	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAB 04.02.03.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAB 05.02.01.02	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAB 05.02.02.03	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAB 06.02.02.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAB 06.03.02.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 06.05.01.01	Pembinaan Olahraga Rekreasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAB 08.02.06.01	Pengelolaan Perpustakaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAB 09.01.04.01	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 09.01.07.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.01.07.04	Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAB 09.02.03.02	Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAB 09.02.06.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.02.08.02	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAB 09.03.02.03	Pengembangan Aplikasi dan Probis Pemerintahan Elektronik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.03.04.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.04.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.04 KOMUNIKASI	RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAB 09.05.03.01	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAB 09.06.03.02	Peningkatan Kinerja ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAB 09.06.03.05	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.03.06	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAB 09.06.04.03	Pengawasan Internal	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis Target

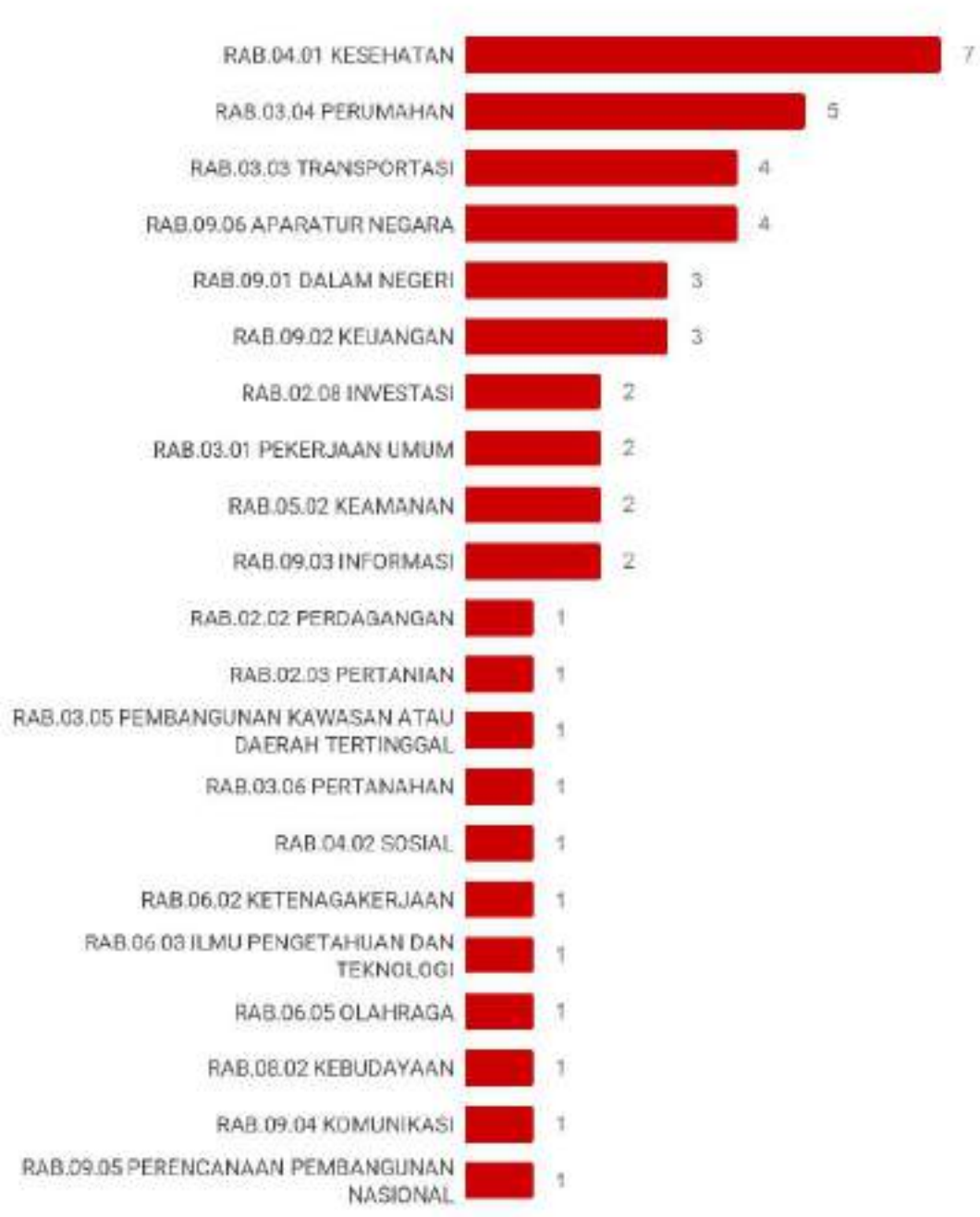
Merujuk pada hasil pemetaan proses bisnis pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis pengelompokan Level 1 RAB Nasional sebagai berikut:



Grafik 2.1.2.1. Grafik Jumlah Proses Bisnis RAB berdasarkan Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Level 1 RAB Nasional, sebagian besar proses bisnis masuk dalam RAB.09 Pemerintahan Umum dan RAB.03 Pembangunan Kewilayahan. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

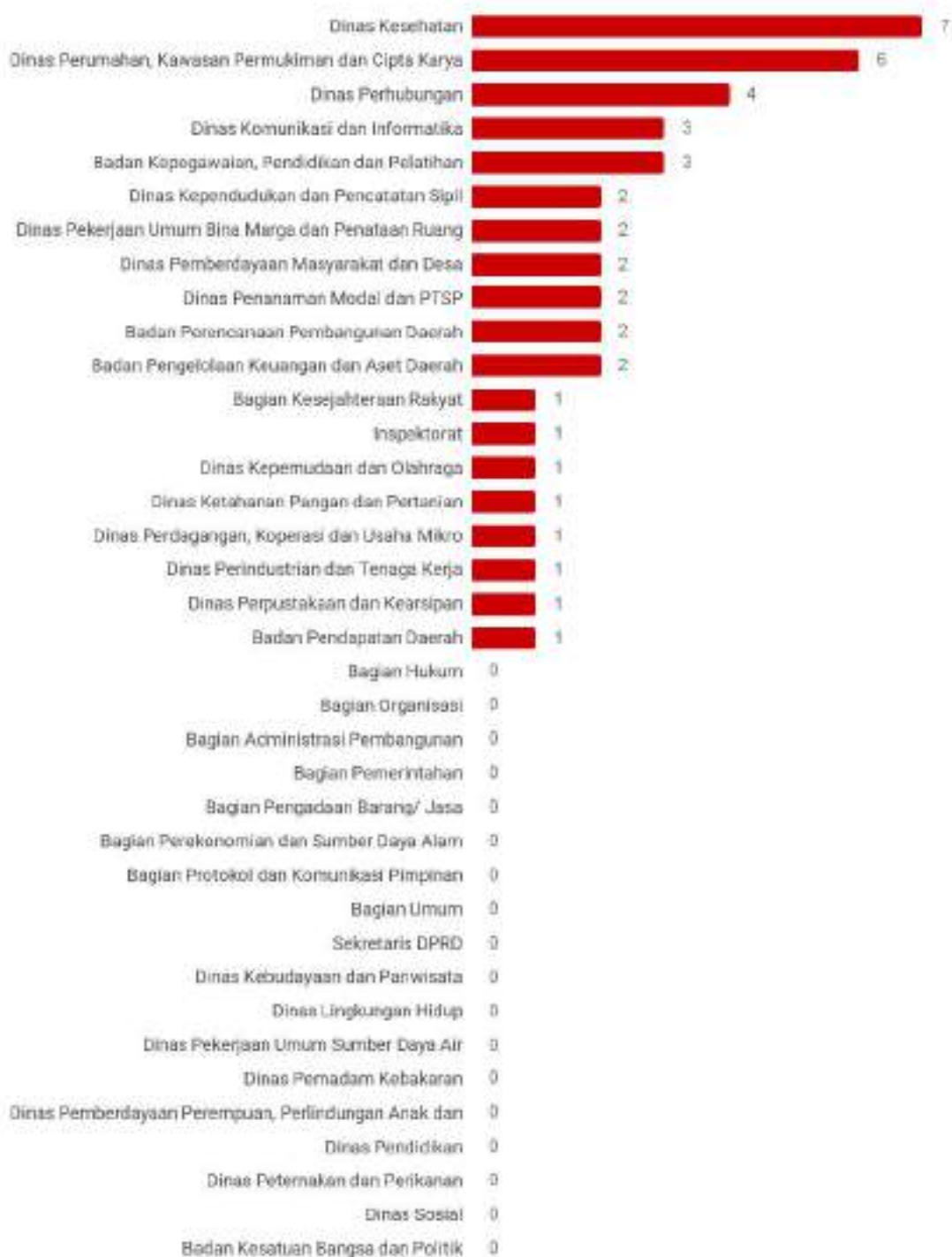
RAB Level 2



Grafik 2.1.2.2. Grafik Jumlah Proses Bisnis berdasarkan RAB Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan level 2 RAB nasional, kategori terbanyak terdapat pada RAB.04.01. Kesehatan sejumlah 7 proses bisnis, RAB.03.04 Perumahan sejumlah 5 proses bisnis dan RAB.03.03 Transportasi dengan jumlah 4 proses bisnis. Urusan proses bisnis dengan jumlah paling sedikit terdapat pada RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jumlah 1 proses bisnis. Tentunya varietas jumlah proses bisnis tergantung pada tipe perangkat daerah. Kondisi ini dapat berubah sesuai perkembangan dan inovasi daftar metadata probis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Unit Kerja



Grafik 2.1.2.3. Grafik Jumlah Proses Bisnis pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 2.1.2.3. Kepemilikan proses bisnis didominasi oleh Dinas Kesehatan sejumlah 8 Proses Bisnis dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sejumlah 7 proses bisnis. Sedangkan Unit Kerja yang memiliki proses bisnis paling sedikit terletak pada Badan Kesatuan Bangsa Politik yang memiliki 1 proses bisnis. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan proses bisnis pada perangkat daerah sangat beragam dan tergantung pada karakteristik serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2.2. Arsitektur Data dan Informasi Target

Arsitektur data memberikan gambaran mengenai daftar data pokok yang dimiliki seluruh perangkat daerah. Daftar data ini perlu dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disajikan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah, aman, dan terintegrasi secara efektif di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

2.2.1. Katalog Data dan Informasi Target

Data dan Informasi to-be merupakan kondisi ideal atau target yang ingin dicapai agar arsitektur data dapat mendefinisikan bagaimana data seharusnya dikelola, dibagikan, dan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dalam ekosistem digital pemerintahan. Domain Data dan Informasi Arsitektur SPBE merupakan suatu kumpulan data pokok (by name, by address) hasil output dari pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Data (RAD) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur data SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog data dan informasi to-be Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. Metadata katalog data dan informasi to-be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Data.

Tabel 2.2.1.1 Daftar Data dan Informasi yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.02.01.01	Data Sewa Lapak	SIMPD	Tertutup	Bulanan	Peningkatan Pendapatan Perkapita	Layanan Pengelolaan PAD Pasar Daerah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.03.08.01	Data Kelompok Tani	SIMPONI	Terbuka	Tiga Tahunan	Penyuluhan Pertanian	Layanan Kelompok Tani	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAD 02.08.01.01	Data Sarana Informasi Investasi	SAMIN, Point Jatim, BKPM PIR	Terbuka	Realtime	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Layanan Sarana Informasi Investasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.11	Data Izin Usaha Angkutan (KPS)	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Usaha Angkutan (KPS)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.12	Data Izin Usaha Angkutan (Trayek)	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Usaha Angkutan (Trayek)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.13	Data Izin Pemakaian Tanah Stren	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Pemakaian Tanah Stren	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 02.08.06.14	Data Izin Reklame	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Reklame	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.15	Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.16	Data Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 02.08.06.17	Data Izin Paramedik Veteriner PeData Inseminator	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Hewan (SIPP Inseminator)				
BJN-DAD 02.08.06.18	Data Izin Reklame Insidentil	SIMANIZ	Tertutup	Realtime	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Layanan Izin Reklame Insidentil	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAD 03.01.01.01	Data Jalan Kabupaten	SATU DATA BOJONEGORO	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Informasi Kondisi Jalan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.01.02	Data Jembatan Kabupaten	SATU DATA BOJONEGORO	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Layanan Informasi Kondisi Jembatan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAD 03.01.05.12	Data Penanganan Kerusakan PJU	SmartPJU, Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Harian	Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman	Layanan Pengaduan Kerusakan PJU	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.01.05.14	Data Pembangunan SPAM	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Fasilitas Pembangunan SPAM	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.01.05.15	Data Pemeliharaan Saluran Air	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Layanan Pemeliharaan Saluran Air	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.01.05.16	Data Pembuangan MCK	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Sanitasi	Layanan Fasilitas Pembuangan MCK	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.03.01.01	Data Parkir	Bojonegoro TIC	Terbatas	Bulanan	Perizinan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Parkir Berlangganan Layanan Pelayanan Parkir	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.03.01.02	Data Angkutan Pelajar Gratis	APEL GRATIS	Terbatas	Harian	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	Layanan Angkutan Pelajar Gratis	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.02.02	Data Uji Kendaraan Bermotor	SIMPKB	Terbatas	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.03	Data Izin Usaha dan Izin Trayek	SIMANIZ	Terbatas	Realtime	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	Layanan Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.03.03.07	Data CCTV	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Realtime	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan CCTV	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAD 03.04.01.04	Data Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 03.04.04.01	Data Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Satu Data Bojonegoro	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Layanan Fasilitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAD 03.05.06.02	Data Proses Bisnis BUM Desa	SIBUMBO	Terbuka	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Layanan Fasilitas Pemberdayaan BUM Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.05.07.01	Data Penyaluran Dana Desa	SIAP DESA	Terbuka	Realtime	Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Fasilitas Penyaluran Dana Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAD 03.06.01.03	Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	SIMANIZ	Terbuka	Realtime	Pemanfaatan Ruang	Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.01.03	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	SIPATAS	Terbatas	Realtime	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.34	Data Kunjungan Pasien	SINTESA EMAS (RME)	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Kesehatan Primer	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.36	Data Panggilan Kegawatdaruratan Masyarakat	Emergency Button Bojonegoro	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kegawatdaruratan Medis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.37	Data Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	SIGAP PSC 119	Tertutup	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kegawatdaruratan Medis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.38	Data Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	SINTESA	Terbatas	Harian	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 04.01.04.47	Data Hasil Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	SIDIK PERISA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Layanan Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.01.04.96	Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien	SIMRS Pelayanan, DASI JR, SIAP RS, Eklaime BPJS Kesehatan, Vclaim BPJS Kesehatan, SIRS Online Kemenkes, ePLKK, Pelkes InHealth, HFIS BPJS, SITB, SIHA, SATU DATA, SIGIZI, e-RM, SIMATNEO, Laboratorium Information	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Perawatan Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
		System, PACS, IRR PERNEFRI								
BJN-DAD 04.01.04.98	Data Medical Check Up Pasien	SIMRS Pelayanan, E-RM, Laboratorium Information System, PACS	Terbatas	Realtime	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Medical Check Up Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAD 04.01.04.107	Data Rekam Medis Pasien	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Manajemen Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAD 04.01.04.113	Data Kunjungan	SIRS JATIM	Terbatas	Bulanan	Peningkatan Sarpras Destinasi Pariwisata, Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM	Layanan Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit Jawa Timur	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					dan UKP, Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
BJN-DAD 04.01.04.119	Data Rekam Medis Pasien	SIMRS	Tertutup	Realtime	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAD 04.01.08.04	Data Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	SAJI PANGAN	Terbuka	Realtime	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Layanan Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAD 04.02.03.03	Data Penerima Insentif Keagamaan	SIPIK	Terbatas	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Insentif Keagamaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAD 05.02.01.02	Data Penindakan Dengan Tindakan Penertiban	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Tindakan Penertiban	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									KETERTIBAN MASYARAKAT	
BJN-DAD 05.02.01.03	Data Penindakan Dengan Tindakan Persuasif	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Tindakan Persuasif	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.06	Data Penindakan Represif	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Tindakan Represif	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.07	Data Penindakan Dengan Tindakan Yustisi	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Tindakan Yustisi	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.08	Data Penindakan Dengan Non Yustisi	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Tindakan Non Yustisi	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 05.02.01.09	Data Penertiban Bangunan Liar	Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Bulanan	Penegakan Perda dan Perbup/Wali Kota	Layanan Penertiban Bangunan Liar	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.10	Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Data Aset Pos Kampling	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 05.02.01.12	Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas, Sijalinmaja	Terbuka	Bulanan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Manajemen Anggota Satlinmas	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAD 06.02.02.03	Data Lowongan Pekerjaan	Siti Worobejo	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Layanan Informasi Lowongan Kerja	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAD 06.03.02.01	Data Hasil Ijin Penelitian/ Magang	Simaniz	Terbuka	Realtime	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Ijin Penelitian/KKL/KN/Magang	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 06.03.03.01	Data Lomba Bojonegoro Inovative Award	BIA, IGA	Terbatas	Tahunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Bojonegoro Innovative Award, Layanan Innovative Government Award (IGA)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 06.05.01.01	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	Terbuka	Realtime	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Stadion, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 08.02.05.01	Data Anggota Perpustakaan	INLISLite	Tertutup	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Keanggotaan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.02	Data Baca di Tempat	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Baca di Tempat	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.03	Data Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.04	Data Peminjaman Buku	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Sirkulasi Pustaka	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAD 08.02.05.05	Data Pengembalian Buku	INLISLite	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Sirkulasi Pustaka	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	
BJN-DAD 09.01.01.02	Data Perijinan Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangan	Simaniz	Terbuka	Realtime	Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Masyarakat	"Layanan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas/ Perseorangan"	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAD 09.01.07.06	Data KK	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan KK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.08	Data KIA	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan KIA	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.09	Data KTP	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan KTP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.12	Data Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.01.07.13	Data Akta Kelahiran	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.01.07.14	Data Akta Kematian	PANAH SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAD 09.02.06.01	Data Barang Milik Daerah	e-BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Aset Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAD 09.03.02.01	Data Aplikasi Pemerintah	Manajemen Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Realtime	Pengembangan Aplikasi dan Probis Pemerintahan Elektronik	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.03.02	Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik	SP4N LAPOR, Sapa Bupati	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	"Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.03.03.03	Data Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	PPID	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pelaksanaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.04.03	Data Statistik Sektoral	INDAH, Satu Data Bojonegoro	Terbuka	Lainnya	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Pembangunan Metadata Statistik Sektoral, Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAD 09.03.05.01	Data Peta Objek Pajak PBB-P2	SMART MAP, GISel	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan PBB - P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.03.05.02	Data Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	eMAP	Tertutup	Harian	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAD 09.04.02.01	Data Keterbukaan Informasi Publik	SIMPONI	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Keterbukaan Informasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

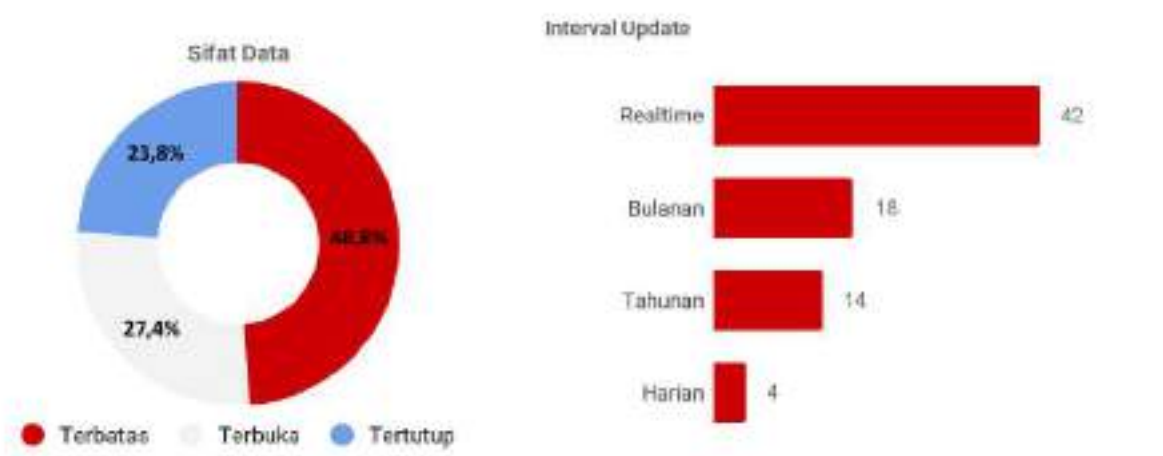
ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.05.01.03	Data Perencanaan RPJMD	SIPD-RI	Tertutup	Lima Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RPJMD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.04	Data Perencanaan RPJPD	SIPD-RI	Tertutup	Lainnya	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RPJPD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.05	Data Renja	SIPD-RI	Tertutup	Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RKPd	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.06	Data Pokok-Pokok Pikiran Dewan	SIPD-RI	Tertutup	Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RKPd	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.01.07	Data Musrenbang	SIPD-RI	Tertutup	Tahunan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Penyusunan RKPd	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAD 09.05.03.01	Data Evaluasi Kinerja Anggaran	E-MONEV	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Layanan Monitoring dan Evaluasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Perencanaan Pembangunan				
BJN-DAD 09.06.03.01	Data Pensiun	SIMANTAP, SIASN	Terbatas	Bulanan	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Pensiun PNS	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.03	Data Cuti PNS	SIMANTAP, SIASN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Cuti	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.03.05	Data Administrasi Kepegawaian	SIMANTAP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian	Layanan Administrasi Kepegawaian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAD 09.06.04.01	Data Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut	SIHAPSARI	Terbatas	Realtime	Pengawasan Internal	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
BJN-DAD 09.06.04.02	Data SAKIP OPD	Perisai	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kinerja ASN	Layanan Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAD 09.06.04.07	Data Manajemen Risiko Terintegrasi	Si-Pinter	Terbatas	Enam Bulanan	Pengawasan Internal	Layanan Pengendalian Risiko Terintegrasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi Target

Merujuk pada hasil pemetaan data dan informasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Grafik 2.2.2.1. Grafik Jumlah Daftar Data dan Informasi To Be Berdasarkan Sifat dan Interval Update

Berdasarkan grafik 2.2.2.1. menunjukkan bahwa terdapat 84 data pokok to be yang berada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan 41 data (48,8%) merupakan data yang bersifat terbatas, 23 Data (27,4%) merupakan data yang bersifat terbuka, 20 Data (23,8%) merupakan data yang bersifat tertutup. Merujuk grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki sifat terbatas atau dapat diartikan bahwa pemilik data hanya dapat membagikan data tersebut dengan akses data yang terbatas.

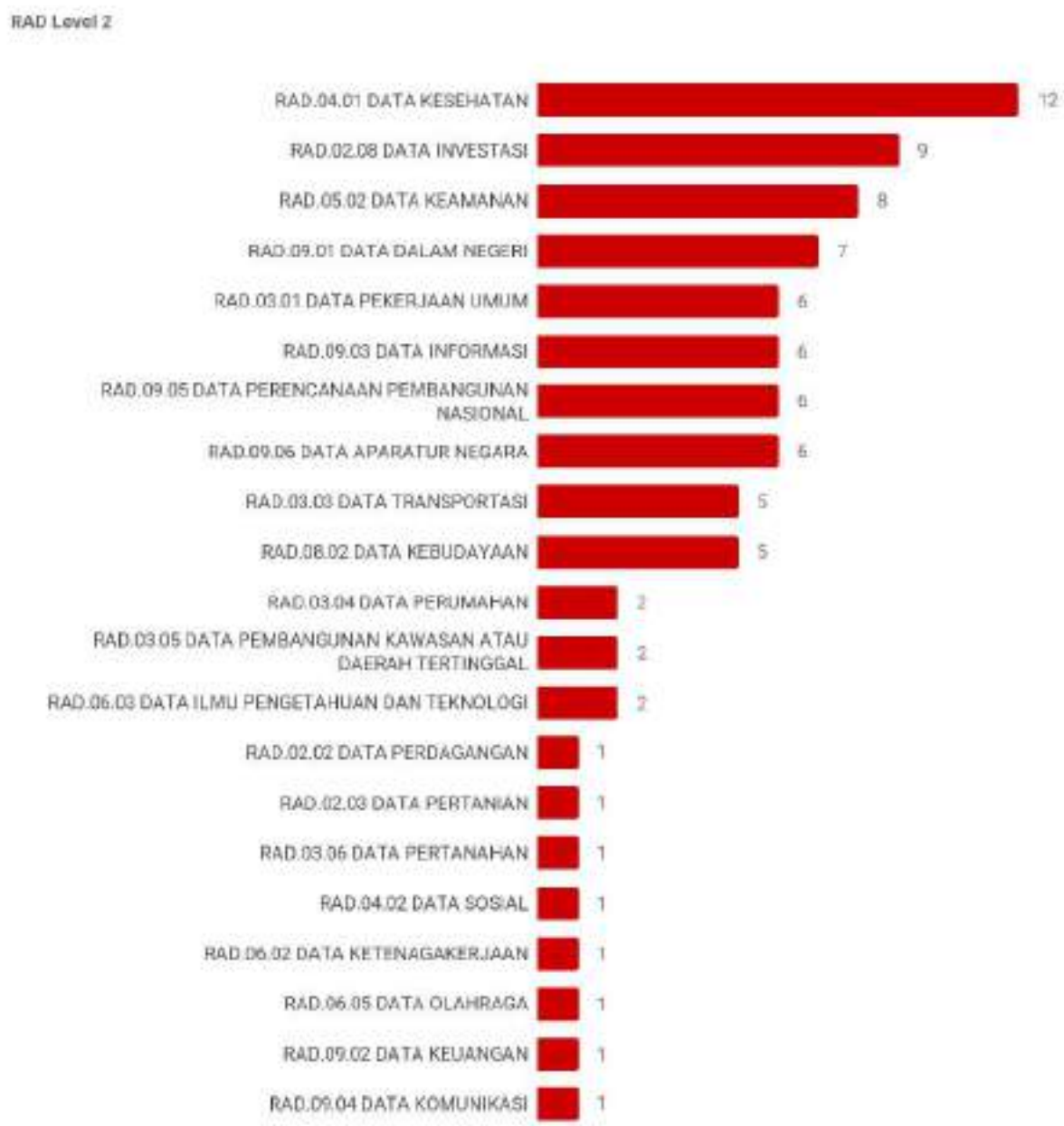
Adapun dari 84 data pokok mayoritas, sebanyak 42 data merupakan data dengan interval update *Realtime*, 18 data merupakan data dengan interval update *Bulanan*, dan 14 data merupakan data dengan interval update *Tahunan*, serta Interval update data terendah dengan interval update *Harian* sejumlah 4 data. Secara umum, mayoritas data di Kabupaten Bojonegoro harus di update secara *realtime* sehingga diperlukan digitalisasi proses bisnis untuk memudahkan pemrosesan pengolahan data.



Grafik 2.2.2.2. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Grafik 2.2.2.2. mayoritas data didominasi oleh RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum sejumlah 27 Data, RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan sejumlah 16 Data. Sedangkan RAD yang paling sedikit yaitu pada RAD.07 Informasi Budaya dan Agama dengan

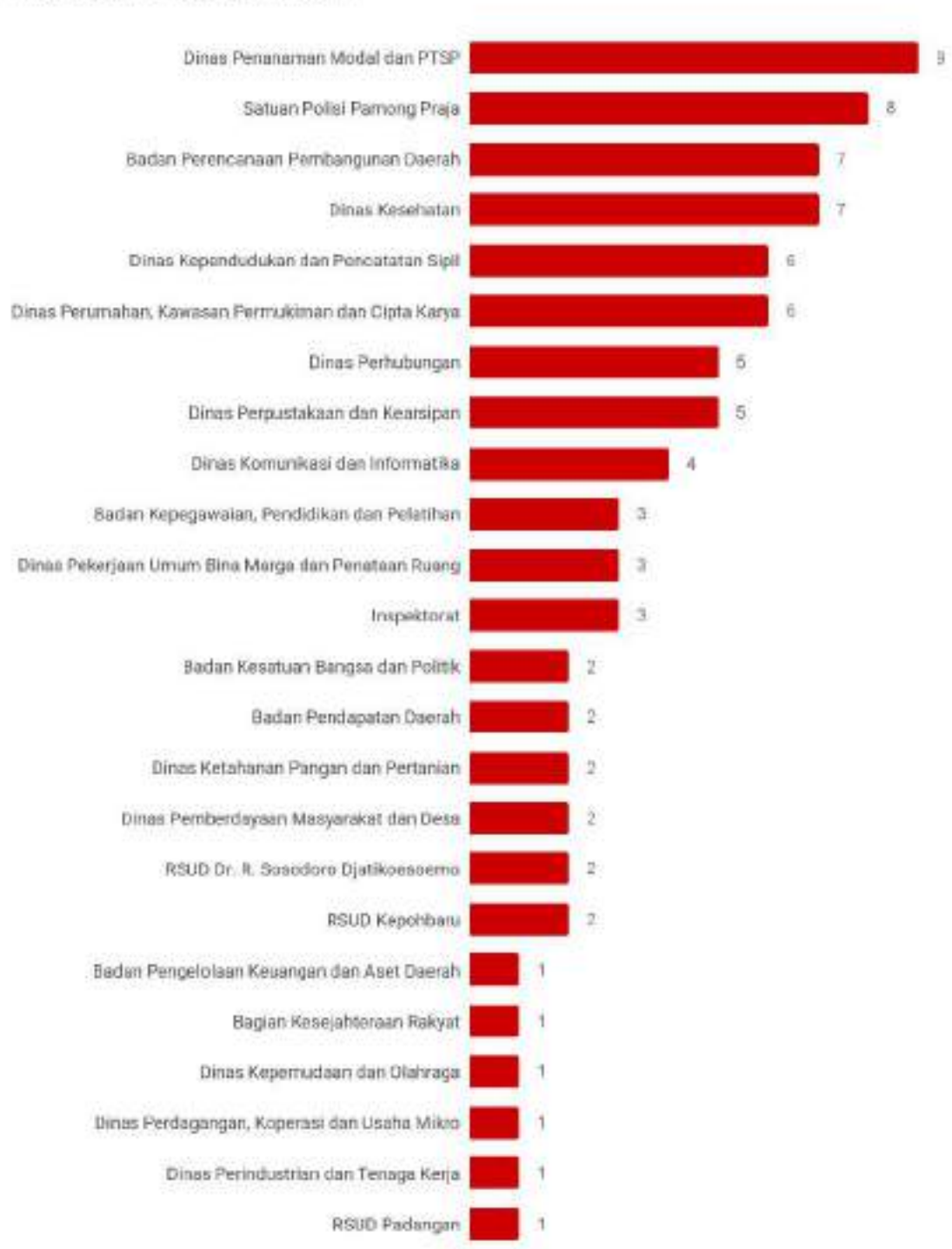
jumlah 2. Data. Kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata arsitektur data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Grafik 2.2.2.3 Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Grafik 2.2.2.3. menunjukkan bahwa RAD level 2 didominasi oleh, RAD.04.01 Data Kesehatan sejumlah 12 data, RAD.02.08 Data Investasi sejumlah 9 data. Sedangkan paling sedikit, yaitu RAD.09.04 Data Komunikasi sejumlah 1 data. Merujuk pada referensi arsitektur data Nasional yang berjumlah 49 referensi, referensi arsitektur data Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 21 Referensi Arsitektur Data Nasional, sementara 28 referensi lainnya bukan merupakan referensi/urusan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Produsen Data/Penanggung Jawab Data



Grafik 2.2.2.4 Grafik Jumlah Daftar Data di Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 2.2.2.4. menunjukkan bahwa mayoritas data terbanyak dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan jumlah 24 data. Data paling sedikit yaitu pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki jumlah 1 data. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan inventarisasi data di masing-masing perangkat daerah untuk memvalidasi apakah data yang dimiliki telah sesuai.

2.3. Arsitektur Layanan Target

Layanan SPBE dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan. Secara umum, arsitektur layanan menggambarkan kondisi mengenai layanan yang dihadirkan pada masing-masing perangkat daerah sesuai proses bisnis utamanya.

2.4.1. Katalog Layanan Target

Katalog layanan To-be merupakan kondisi ideal atau target yang ingin dicapai untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan integrasi layanan pemerintahan berbasis TI. Katalog Layanan to-be merupakan proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (customer), baik itu internal (perangkat daerah, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan (RAL) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur layanan SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog layanan to-be Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. Metadata katalog layanan To Be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Layanan.

Tabel 2.3.1.1 Katalog Layanan yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.06.01.01	Layanan Pengelolaan PAD Pasar Daerah	Bisnis	Data Sewa Lapak	SIMPD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
BJN-DAL 01.07.08.01	Layanan Kelompok Tani	Masyarakat	Data Kelompok Tani	SIMPONI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.12.01.01	Layanan Sarana Informasi Investasi	Bisnis	Data Sarana Informasi Investasi	SAMIN,Point Jatim,BKPM PIR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.11	Layanan Izin Usaha Angkutan (KPS)	Bisnis	Data Izin Usaha Angkutan (KPS)	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.12	Layanan Izin Usaha Angkutan (Trayek)	Bisnis	Data Izin Usaha Angkutan (Trayek)	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.13	Layanan Izin Pemakaian Tanah Stren	Bisnis	Data Izin Pemakaian Tanah Stren	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.14	Layanan Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan	Bisnis	"Data Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan"	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.15	Layanan Izin Reklame	Bisnis	Data Izin Reklame	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.12.06.16	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	Bisnis	Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.17	Layanan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	Bisnis	Data Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.18	Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator)	Bisnis	Data Izin Paramedik Veteriner PeData Inseminator	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.12.06.19	Layanan Izin Reklame Insidentil	Bisnis	Data Izin Reklame Insidentil	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAL 01.17.01.01	Layanan Informasi Kondisi Jalan Kabupaten	Masyarakat	Data Jalan Kabupaten	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.17.01.02	Layanan Informasi Kondisi Jembatan Kabupaten	Masyarakat	Data Jembatan Kabupaten	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.17.01.06	Layanan Fasilitasi Pembangunan SPAM	Masyarakat	Data Pembangunan SPAM	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.19.02.01	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Masyarakat	Data Uji Kendaraan Bermotor, Data Antrian Uji Kendaraan Bermotor	SIMPKB, SUKIRNO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.02.01	Layanan Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan	Masyarakat	Data Izin Usaha dan Izin Trayek	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.03.03	Layanan Pelayanan Parkir	Masyarakat	Data Parkir	Bojonegoro TIC	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.03.05	Layanan CCTV	Masyarakat	Data CCTV	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
BJN-DAL 01.19.04.01	Layanan Angkutan Pelajar Gratis	Masyarakat	Data Angkutan Pelajar Gratis	APEL GRATIS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.20.01.01	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Masyarakat	Data Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.01.02	Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	Masyarakat	Data Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.02.01	Layanan Pengaduan Kerusakan PJU	Masyarakat	Data Penanganan Kerusakan PJU	SmartPJU, Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.03.02	Layanan Pemeliharaan Saluran Air	Masyarakat	Data Pemeliharaan Saluran Air	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.03.03	Layanan Fasilitas Pembuangan MCK	Masyarakat	Data Pembuangan MCK	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.20.04.01	Layanan Fasilitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	Data Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
BJN-DAL 01.21.06.01	Layanan Fasilitas Pemberdayaan BUM Desa	Masyarakat	Data Proses Bisnis BUM Desa	SIBUMBO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.21.07.01	Layanan Fasilitas Penyaluran Dana Desa	Masyarakat	Data Penyaluran Dana Desa	SIAP DESA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAL 01.22.01.02	Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	Masyarakat	Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha	SIMANIZ	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
BJN-DAL 01.25.01.01	Layanan Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	Masyarakat	Data Hasil Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	SIDIK PERISA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.01.02	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Masyarakat	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	SIPATAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.02.07	Layanan Kelompok Tani	Masyarakat	Data Penggunaan Obat Program HIV	SIHA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.01	Layanan Kesehatan Primer	Masyarakat	Data Kunjungan Pasien	SINTESA EMAS (RME)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.25.04.03	Layanan Kegawatdaruratan Medis	Masyarakat	Data Panggilan Kegawatdaruratan Masyarakat, Data Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	Emergency Button Bojonegoro, SIGAP PSC 119	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.04	Layanan Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	Masyarakat	Data Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	SINTESA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAL 01.25.04.22	Layanan Perawatan Pasien	Masyarakat	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Audit Cuci Tangan	SIMRS Pelayanan, DASI JR, SIAP RS, Eklaime BPJS Kesehatan, Vclaim BPJS Kesehatan, SIRS Online Kemenkes, ePLKK, Pelkes InHealth, HFIS BPJS, SITB, SIHA, SATU DATA, SIGIZI, e-RM, SIMATNEO, Laboratorium Information System, PACS,	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
				KPPI E-Reporting, IRR PERNEFRI				
BJN-DAL 01.25.04.23	Layanan Medical Check Up Kesehatan	Masyarakat	Data Medical Check Up Pasien	SIMRS Pelayanan, E-RM, Laboratorium Information System, PACS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
BJN-DAL 01.25.04.28	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rumah Sakit	SIRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.30	Layanan Manajemen Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rekam Medis Pasien, Data Pegawai, Data Keuangan, Data Stok Obat dan BMHP	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Kepohbaru
BJN-DAL 01.25.04.40	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rekam Medis Pasien	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.46	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Rumah Sakit	SIRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Padangan
BJN-DAL 01.25.04.59	Layanan Rekam Medis Elektronik	Masyarakat	Data Rekam Medis Elektronik	E-RM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Sumberrejo
BJN-DAL 01.25.06.16	Layanan Saji Pangan	Masyarakat	Data Pemenuhan Persyaratan	SAJI PANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
			Perijinan Keamanan Pangan					
BJN-DAL 01.26.03.02	Layanan Insentif Keagamaan	Masyarakat	Data Penerima Insentif Keagamaan	SIPIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BJN-DAL 01.29.01.01	Layanan Tindakan Penertiban	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Tindakan Penertiban	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.02	Layanan Tindakan Persuasif	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Tindakan Persuasif	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.05	Layanan Tindakan Represif	Masyarakat	Data Penindakan Represif	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.06	Layanan Tindakan Yustisi	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Tindakan Yustisi	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.07	Layanan Tindakan Non Yustisi	Masyarakat	Data Penindakan Dengan Non Yustisi	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.29.01.08	Layanan Penertiban Bangunan Liar	Masyarakat	Data Penertiban Bangunan Liar	Satu Data Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.10	Layanan Data Aset Pos Kampling	Masyarakat	Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.29.01.12	Layanan Manajemen Anggota Satlinmas	Masyarakat	Data Anggota Linmas Kabupaten Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro, Gatramas, Sijalinmaja	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
BJN-DAL 01.32.02.03	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Masyarakat	Data Lowongan Pekerjaan	Siti Worobejo	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAL 01.32.04.01	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Masyarakat	"Data Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut"	SIHAPSARI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Inspektorat

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.33.02.01	Layanan Ijin Penelitian/KKL/KKN/Magang	Masyarakat	Data Hasil Ijin Penelitian/ Magang	Simaniz	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 01.33.02.01	Layanan Bojonegoro Innovative Award	Masyarakat	Data Lomba Bojonegoro Inovative Award	BIA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 01.35.01.01	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.01.02	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Stadion	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.35.01.03	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR)	Masyarakat	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	SIPSO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAL 01.42.05.01	Layanan Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	Masyarakat	Data Koleksi Referensi dan Koleksi Braille	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.01	Layanan Keanggotaan	Masyarakat	Data Anggota Perpustakaan	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.42.06.02	Layanan Baca di Tempat	Masyarakat	Data Baca di Tempat	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.03	Layanan Sirkulasi Pustaka	Masyarakat	Data Peminjaman Buku,Data Pengembalian Buku,Data Buku Rusak	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.42.06.05	Layanan e-Book	Masyarakat	Data e-book	e-Maos Bojonegoro	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAL 01.43.02.01	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah	Masyarakat	Data Aplikasi Pemerintah	Manajemen Pengembangan Aplikasi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.03.02	Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik	Masyarakat	"Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	SP4N LAPOR,Sapa Bupati	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.03.03	Layanan Pelaksanaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	Masyarakat	Data Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	PPID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAL 01.43.04.02	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral	Masyarakat	Data Rekomendasi Kegiatan Statistik,Data Statistik Sektoral	Satu Data Bojonegoro,ROMA NTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 01.44.02.01	Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat	Data Keterbukaan Informasi Publik	SIMPONI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAL 02.01.01.01	Layanan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas/ Perseorangan	Pemerintah	"Data Perijinan Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangan"	Simaniz	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJN-DAL 02.01.07.06	Layanan Penerbitan KK	Pemerintah	Data KK	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.08	Layanan Penerbitan KIA	Pemerintah	Data KIA	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.09	Layanan Penerbitan KTP	Pemerintah	Data KTP	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.12	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	Pemerintah	Data Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.01.07.13	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Pemerintah	Data Akta Kelahiran	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 02.01.07.14	Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Pemerintah	Data Akta Kematian	PANAH SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BJN-DAL 02.02.03.03	Layanan PBB - P2	Pemerintah	Data Tagihan PBB-P2, Data Pembayaran PBB-P2, Data Peta Objek Pajak PBB-P2, Data Pelayanan PBB-P2	e-PBB, SMART MAPGISel, SIMPEL BAPENDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.03.09	Layanan Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	Pemerintah	Data Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	eMAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAL 02.02.06.01	Layanan Pengelolaan Aset Daerah	Pemerintah	Data Barang Milik Daerah	e-BMD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAL 02.03.03.01	Layanan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Pemerintah	Data Evaluasi Kinerja Anggaran	E-MONEV	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAL 02.04.03.01	Layanan Pensiun PNS	ASN/Pegawai	Data Pensiun	SIMANTAP,SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
BJN-DAL 02.04.03.03	Layanan Cuti	ASN/Pegawai	Data Cuti PNS	SIMANTAP,SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.03.05	Layanan Administrasi Kepegawaian	ASN/Pegawai	Data Administrasi Kepegawaian	SIMANTAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BJN-DAL 02.04.04.01	Layanan Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	Pemerintah	Data SAKIP OPD	Perisai	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
BJN-DAL 02.04.04.06	Layanan Pengendalian Risiko Terintegrasi	Pemerintah	Data Manajemen Risiko Terintegrasi	Si-Pinter	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

2.4.2. Analisis Katalog Layanan Target

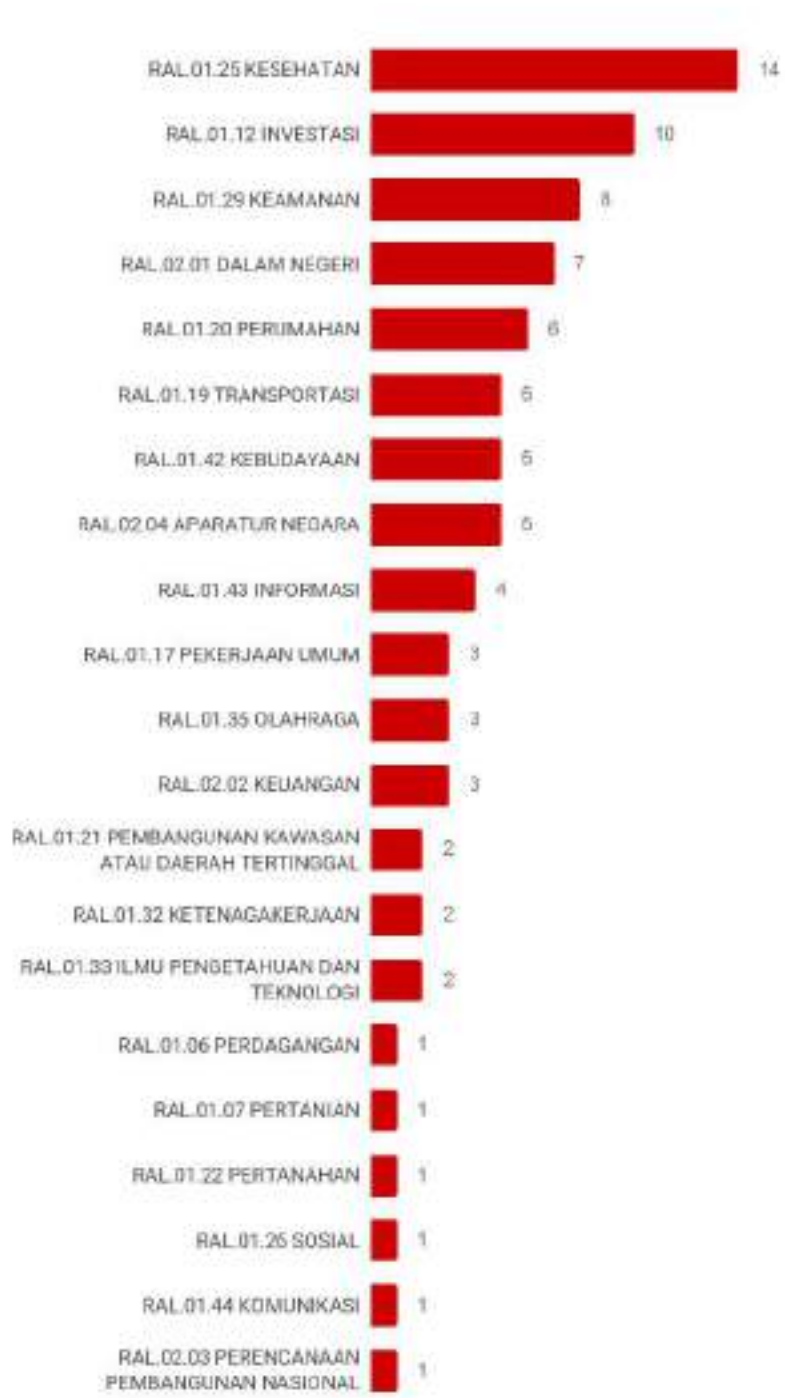
Merujuk pada hasil pemetaan layanan pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 2.3.2.1. Grafik Jumlah Layanan To Be Berdasarkan RAL Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

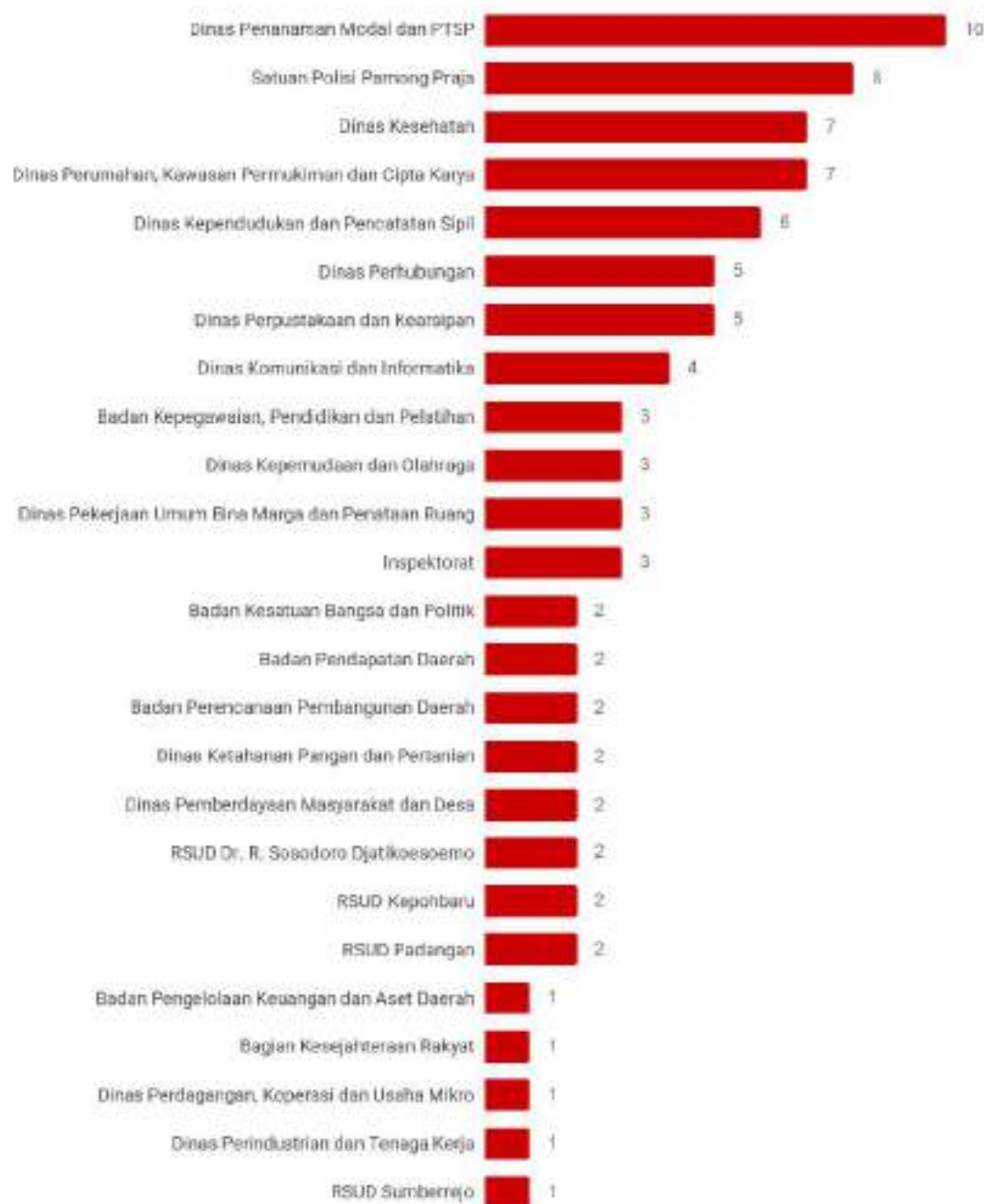
Berdasarkan grafik 2.3.2.1 serta mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional (RAL Level 1) dari total 41 layanan To Be yang dimiliki, terdapat 81,2% (69 Layanan) merupakan RAL.01 Layanan Publik dan sebesar 18,8% (16 Layanan) merupakan RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan. Mengacu pada referensi arsitektur ini, mayoritas layanan yang ada merupakan layanan publik untuk masyarakat dimana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menjadikannya sebagai panduan untuk memfasilitasi kerjasama antara instansi pemerintah/perangkat daerah dalam pengembangan layanan publik dan juga membantu pemerintah dalam merancang dan mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan transparan.

RAL Level 2



Grafik 2.3.2.2 Grafik Jumlah Layanan To Be Berdasarkan RAL Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegara

Berdasarkan Grafik 2.3.2.2 dapat dilihat RAL Level 2 yang paling banyak adalah RAL.01.25 Kesehatan sejumlah 14 layanan dan RAL.01.12 Investasi sejumlah 10 layanan. Referensi Arsitektur Layanan Nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegara mencakup 21 Referensi dari 52 Arsitektur Layanan Nasional. Perbedaan pada jumlah layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menyesuaikan pada tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegara.



Grafik 2.3.2.3. Grafik Jumlah Layanan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan grafik 2.3.2.3. menunjukkan bahwa layanan paling banyak dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sejumlah 10 layanan dan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 8 layanan. Sedangkan paling sedikit berada pada RSUD Sumberrejo Yang hanya memiliki 1 layanan. Berdasarkan hasil survei, keseluruhan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah memerlukan verifikasi agar layanan dapat terstandarisasi serta memastikan layanan tersebut berjalan optimal.

2.4. Arsitektur Aplikasi Target

2.4.1. Desain Arsitektur Aplikasi



Gambar 2.4.1.1.. Desain Arsitektur Aplikasi

Desain arsitektur aplikasi SPBE dijabarkan sebagai berikut:

- **Access Layer**

Bagian ini akan terdapat aplikasi-aplikasi yang akan mendukung perangkat daerah dalam proses operasional utama di perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah akan memiliki aplikasi dengan alur probis (proses bisnis) yang beragam sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Selain itu juga perangkat daerah perlu belajar untuk memanfaatkan tools *business intelligence* dengan tujuan untuk memvisualisasikan data sebagai rangkaian dalam penerapan satu data Indonesia.
- **Integration Layer**

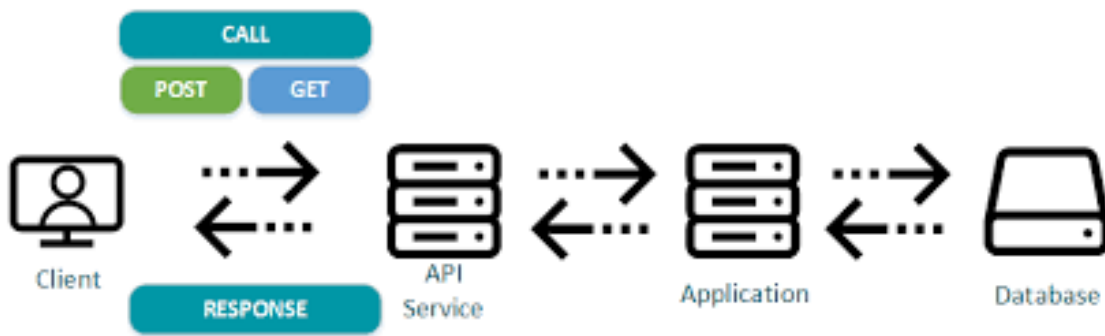
Bagian ini ditujukan untuk aplikasi, *platform*, *module*, *services* yang berfungsi sebagai jembatan antara *layer* data dengan *layer* access. Proses pengaturan terhadap akses data juga dikelola oleh layanan pada *layer* ini. Pada *layer* ini akan terdapat *API gateway* yang terhubung dengan masing-masing aplikasi yang berjalan guna mengelola akses integrasi data antar aplikasi.
- **Data Layer**

Bagian data *layer* ini berisi *database* dari data-data pemerintahan sektoral yang berasal dari berbagai aplikasi. Secara umum *DBMS* yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu MySQL.
- **Layer Arsitektur**

Bagian ini terdapat perangkat jaringan, pusat data dan CCTV guna mendukung operasional aplikasi 24x7 jam.

2.4.2. Integrasi Aplikasi

Permasalahan integrasi merupakan kendala yang cukup kompleks dalam implementasi SPBE. Kurang adanya integrasi antar aplikasi berdampak pada ketidak efisiennya layanan operasional pemerintahan dan rentan terjadinya duplikasi data. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat diintegrasikan dengan menggunakan teknologi *Application Programming Interface (API)*.



Gambar 2.4.2.1. Skema Alur Kerja API

API adalah kumpulan fungsi-fungsi untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam *system call* dengan bahasa yang terstruktur. API menyediakan fungsi untuk menghubungkan koneksi antar aplikasi. Secara umum API mampu menerima respon data dalam format *JSON* dan *XML*. Sebagai contoh, data kependudukan (DUKCAPIL), data bencana alam (BPBD), dan data bantuan sosial (DINSOS) saling terintegrasi sebagai dasar penyusunan laporan alokasi bantuan sosial untuk korban bencana alam.



Gambar 2.4.2.2. Ilustrasi Integrasi antar Aplikasi

2.4.3. **Arsitektur Aplikasi Target**

2.4.3.1. **Katalog Aplikasi Target**

Aplikasi to-be dalam arsitektur SPBE adalah representasi dari kondisi ideal aplikasi digital pemerintah di masa depan, yang dibangun ataupun dikembangkan kembali untuk mendukung keterpaduan sistem, efisiensi birokrasi, dan pelayanan publik berbasis digital. Aplikasi to-be menjadi bagian penting dalam strategi transformasi digital pemerintahan yang terarah dan terstandarisasi. Berikut ini disajikan daftar aplikasi to-be yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 1 dan 2 mengacu pada referensi arsitektur aplikasi SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog aplikasi to-be Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. Metadata katalog aplikasi to-be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE, dapat diakses pada link: <https://bit.ly/MetadataSPBEBojonegoro> di sheet Aplikasi.

Tabel 2.4.3.1.1 Katalog Aplikasi Usulan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 01.01.04	SIMPD	Pengelolaan Pasar Daerah	Web Based	MySQL	Layanan Pengelolaan PAD Pasar Daerah	Data Sewa Lapak	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro"
BJN-DAA 01.01.05	SmartPJU	Aplikasi untuk pencatatan masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) serta melakukan perbaikan berdasarkan laporan dari masyarakat dan menyampaikan kembali kepada	Desktop	PostgreSQL	Layanan Pengaduan Kerusakan PJU	Data Penanganan Kerusakan PJU	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	"Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		masyarakat hasil dari perbaikan							
BJN-DAA 01.01.11	eMAP	Aplikasi yang digunakan untuk menampilkan peta persebaran Wajib Pajak Daerah I	Web Based	MySQL	Layanan Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	Data Peta Persebaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 01.01.13	BIA	Untuk penilaian tahap awal Lomba Bojonegoro Innovative Award	Web Based	MySQL	Layanan Bojonegoro Innovative Award	Data Lomba Bojonegoro Inovative Award	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 01.01.21	Emergency Button Bojonegoro	Dipakai oleh masyarakat untuk meminta bantuan ke Command Center PSC, dapat dipakai juga untuk mendapatkan informasi seputar PSC.	Mobile	MySQL	Layanan Kegawatdaruratan Medis	Data Panggilan Kegawatdaruratan Masyarakat	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.32	SIPATAS	Aplikasi yang digunakan untuk izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan	Web Based	MySQL	Layanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.01.49	PPID	Layanan Aspirasi dan Pengaduan berbasis WA	Web Based	MySQL	Layanan Pelaksanaan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	Data Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 01.01.50	Sapa Bupati	Menyediakan akses publik terhadap informasi yang	Mobile	MySQL	"Layanan Pengelolaan Informasi, Opini dan	"Data Pengelolaan Informasi, Opini dan Aspirasi Publik"	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		dikelola oleh instansi pemerintah atau badan publik lainnya			Aspirasi Publik"				
BJN-DAA 01.01.64	APEL GRATIS	Aplikasi yang digunakan untuk pendataan penggunaan Angkutan Pelajar Gratis	Web Based	MySQL	Layanan Angkutan Pelajar Gratis	Data Angkutan Pelajar Gratis	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan
BJN-DAA 01.01.65	Bojonegoro TIC	Media Informasi Layanan OPD	Mobile	MySQL	Layanan Pelayanan Parkir	Data Parkir	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan
BJN-DAA 01.01.69	Siti Worobejo	Membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan	Web Based	MySQL	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Data Lowongan Pekerjaan	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
BJN-DAA 01.01.88	SIM-RS	Aplikasi ini digunakan untuk pendaftaran pasien secara online	Desktop	MySQL	Layanan pengelolaan data rumah sakit terintegrasi	Data Renja, Data Pokok-Pokok Pikiran Dewan, Data Musrengbang, Data Perencanaan RPJMD, Data Perencanaan RPJPD	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 01.02.35	SINTESA	Sistem informasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan data pelayanan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kab Bojonegoro dalam satu data. SINTESA merupakan aplikasi sistem informasi	Web Based	MySQL	Layanan Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	Data Kunjungan Pasien Fasilitas Kesehatan	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		data Fasilitas Pelayanan Kesehatan berbasis website bagi seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro							
BJN-DAA 01.02.36	SINTESA EMAS (RME)	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan di 35 Puskesmas	Web Based	MySQL	Layanan Kesehatan Primer	Data Kunjungan Pasien	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 01.02.40	Satu Data Bojonegoro	Satu Data Bojonegoro adalah platform yang menyediakan data statistik, informasi geografis, serta data lainnya yang relevan dengan kondisi dan perkembangan Bojonegoro	Web Based	MySQL	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral, Layanan Informasi Kondisi Jalan Kabupaten, Layanan Informasi Kondisi Jembatan Kabupaten, Layanan Tindakan Penertiban, Layanan Tindakan Persuasif, Layanan Tindakan Represif, Layanan Tindakan Yustisi, Layanan Tindakan Non Yustisi, Layanan Penertiban Bangunan Liar, Layanan Data Aset	Data Statistik Sektoral, Data Penindakan Dengan Tindakan Penertiban, Data Penindakan Dengan Tindakan Persuasif, Data Penindakan Represif, Data Penindakan Dengan Tindakan Yustisi, Data Penindakan Dengan Non Yustisi, Data Penertiban Bangunan Liar, Data Aset Pos Kampling Kabupaten Bojonegoro, Data Anggota Linmas Kabupaten	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Pos Kampling, Layanan Manajemen Anggota Satlinmas, Layanan Pengaduan Kerusakan PJU, Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, Layanan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung, Layanan Fasilitas Pembangunan SPAM, Layanan Pemeliharaan Saluran Air, Layanan Fasilitas Pembuangan MCK, Layanan Fasilitas Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Layanan CCTV	Bojonegoro, Data Jalan Kabupaten, Data Jembatan Kabupaten, Data Penanganan Kerusakan PJU, Data Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung, Data Pembangunan SPAM, Data Pemeliharaan Saluran Air, Data Pembuangan MCK, Data Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Data CCTV			
BJN-DAA 01.02.57	Si-Pinter	Aplikasi terkait pemenuhan capaian perbaikan 8 area intervensi yang dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah	Web Based	MySQL	Layanan Pengendalian Risiko Terintegrasi	Data Manajemen Risiko Terintegrasi	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
BJN-DAA 02.01.01	SIMANTAP	Aplikasi untuk pengajuan Pensiun dari OPD	Web Based	MySQL	Layanan Pensiun PNS, Layanan Cuti, Layanan Administrasi	Data Pensiun, Data Cuti PNS, Data Administrasi Kepegawaian	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	"Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan"

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Kepegawaian				
BJN-DAA 02.01.05	GISel	Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data peta PBB-P2	Web Based	MySQL	Layanan PBB - P2	Data Peta Objek Pajak PBB-P2	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah
BJN-DAA 02.01.07	e-BMD	Sistem Informasi untuk pengelolaan aset daerah, meliputi Penatausahaan BMD, Penghapusan BMD, Pemindah tangan dst	Web Based	MySQL	Layanan Pengelolaan Aset Daerah	Data Barang Milik Daerah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BJN-DAA 02.01.10	E-MONEV	Untuk memonitoring realisasi dan melakukan evaluasi kinerja dan anggaran yang tertuang dalam dokumen RENJA PD	Web Based	PostgreSQL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Data Evaluasi Kinerja Anggaran	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BJN-DAA 02.01.15	PANAH SRIKANDI	Aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi resmi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang memuat versi digital KTP-el dan data kependudukan lainnya. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses KTP, KK, dan dokumen lainnya secara digital lewat ponsel.	Web Based	MySQL	Layanan Penerbitan KK, Layanan Penerbitan KIA, Layanan Penerbitan KTP, Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar, Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran, Layanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Data KK, Data KIA, Data KTP, Data Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar, Data Akta Kelahiran, Data Akta Kematian	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.25	SAJI PANGAN	Mengelola perijinan yang berkaitan dengan aspek keamanan pangan, memastikan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.	Web Based	MySQL	Layanan Saji Pangan	Data Pemenuhan Persyaratan Perijinan Keamanan Pangan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.26	SIDIK PERISA	Aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk diskusi dan konsultasi mengenai perizinan sarana fasilitas kesehatan	Web Based	MySQL	Layanan Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	Data Hasil Konsultasi dan Diskusi Perizinan Sarana Kesehatan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.27	SIGAP PSC 119	Sabagai sarana bagi petugas di lapangan untuk menerima, mencatat hasil dan melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Command Center.	Web Based	MySQL	Layanan Kegawatdaruratan Medis	Data Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
BJN-DAA 02.01.29	SIMPONI	Memberikan informasi terkait Kelompok Tani	Web Based	MySQL	Layanan Kelompok Tani, Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Data Kelompok Tani, Data Keterbukaan Informasi Publik	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BJN-DAA 02.01.40	SIAP DESA	Publikasi Administrasi	Mobile	MySQL	Layanan Fasilitasi Penyaluran Dana	Data Penyaluran Dana Desa	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Pemerintahan Desa			Desa				Desa
BJN-DAA 02.01.41	SIBUMBO	Pelaporan Profil dan laporan keuangan BUM Desa	Web Based	PostgreSQL	Layanan Fasilitasi Pemberdayaan BUM Desa	Data Proses Bisnis BUM Desa	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BJN-DAA 02.01.42	SIMANIZ	Digitalisasi dari proses pengajuan izin yang sebelumnya dilakukan secara manual	Web Based	MySQL	Layanan Rekomendasi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan, Layanan Kajian Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha, Layanan Ijin Penelitian/KKL/KKN/ Magang, "Layanan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas/ Perseorangan", Layanan Izin Usaha Angkutan (KPS), Layanan Izin Usaha Angkutan (Trayek), Layanan Izin Pemakaian Tanah Stren, "Layanan Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Ormas dan Perseorangan", Layanan Izin Reklame, Layanan Persetujuan	Data Izin Usaha dan Izin Trayek, Data Kajian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha, Data Hasil Ijin Penelitian/ Magang, Data Perijinan Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangan, Data Izin Usaha Angkutan (KPS), Data Izin Usaha Angkutan (Trayek), Data Izin Pemakaian Tanah Stren, Data Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Data Izin Reklame, Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha, Data Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH), Data Izin Paramedik Veteriner PeData	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha, Layanan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH), Layanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator / Sarjana Kedokteran Hewan (SIPP Inseminator), Layanan Izin Reklame Insidentil	Inseminator, Data Izin Reklame Insidentil			
BJN-DAA 02.01.44	SIMPKB	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengujian kendaraan	Web Based	MySQL	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Data Uji Kendaraan Bermotor	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perhubungan
BJN-DAA 02.01.45	e-Maos Bojonegoro	Aplikasi perpustakaan digital yang menampilkan koleksi e-book yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro yang dapat dibaca dan dipinjam secara gratis oleh masyarakat	Web Based	MySQL	Layanan e-Book	Data e-book	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

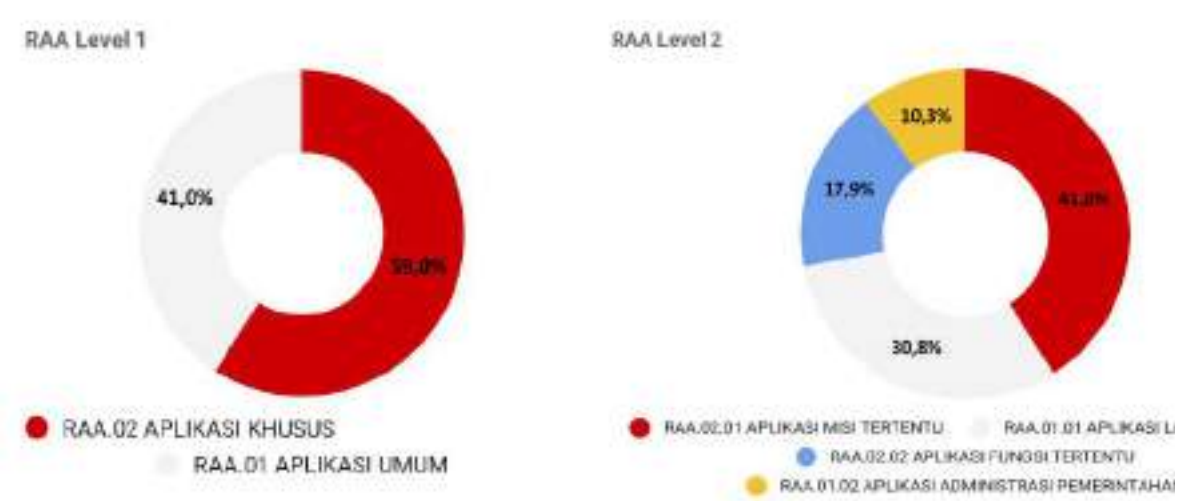
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
BJN-DAA 02.01.51	Perisai	Untuk mengetahui nilai kerugian daerah dan pembayaran kerugian daerah	Web Based	MySQL	Layanan Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP	Data SAKIP OPD	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Inspektorat
BJN-DAA 02.01.53	SIHAPSARI	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi penilaian mandiri AKIP	Web Based	MySQL	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	"Data Rekapitulasi Hasil Pengawasan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut"	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Inspektorat
BJN-DAA 02.02.05	SIPSO		Web Based	MySQL	Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Stadion, Layanan Pinjam Pakai Sarpras Olah Raga Penggunaan Gedung Olah Raga (GOR)	Data Sarana dan Prasarana Olahraga	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BJN-DAA 02.02.08	Manajemen Pengembangan Aplikasi	Penggambaran Domain Arsitektur secara Visual serta Tersedia fitur Analisa Pelaporan dan Dashboard dan Penerapan Federated EA yang telah terintegrasi	Web Based	MySQL	Layanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah	Data Aplikasi Pemerintah	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
BJN-DAA 02.02.10	SIPIK		Web Based	MySQL	Layanan Insentif Keagamaan	Data Penerima Insentif Keagamaan	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Kesejahteraan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Basis Data	→ Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
									Rakyat
BJN-DAA 02.02.17	SAMIN	Aplikasi digunakan untuk melihat potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bojonegoro	Web Based	MySQL	Layanan Sarana Informasi Investasi	Data Sarana Informasi Investasi	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
BJN-DAA 02.02.20	INLISLite	Aplikasi yang digunakan untuk menerapkan otomasi perpustakaan dalam mengelola administrasi perpustakaan, melayani data perpustakaan yang tersedia, dan menyajikan statistik perpustakaan	Web Based	MySQL	Layanan Keanggotaan, Layanan Baca di Tempat, Layanan Koleksi Referensi dan Koleksi Braille, Layanan Sirkulasi Pustaka	Data Anggota Perpustakaan, Data Baca di Tempat, Data Koleksi Referensi dan Koleksi Braille, Data Peminjaman Buku, Data Pengembalian Buku	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BJN-DAA 02.02.30	E-RM	Sistem untuk mengelola informasi hingga mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja laboratorium	Web Based	MySQL	Layanan Perawatan Pasien, Layanan Medical Check Up Kesehatan, Layanan Rekam Medis Elektronik	"Data Rekam Medis, Biaya, dan Kunjungan Pasien", Data Medical Check Up Pasien	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo
BJN-DAA 02.02.34	SIMRS	Aplikasi yang digunakan untuk memuat seluruh informasi rekam medis pasien	Desktop	MySQL	Layanan Sistem Informasi Rumah Sakit, Layanan Manajemen Rumah Sakit	Data Rekam Medis Pasien	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Padangan, RSUD Kepohbaru



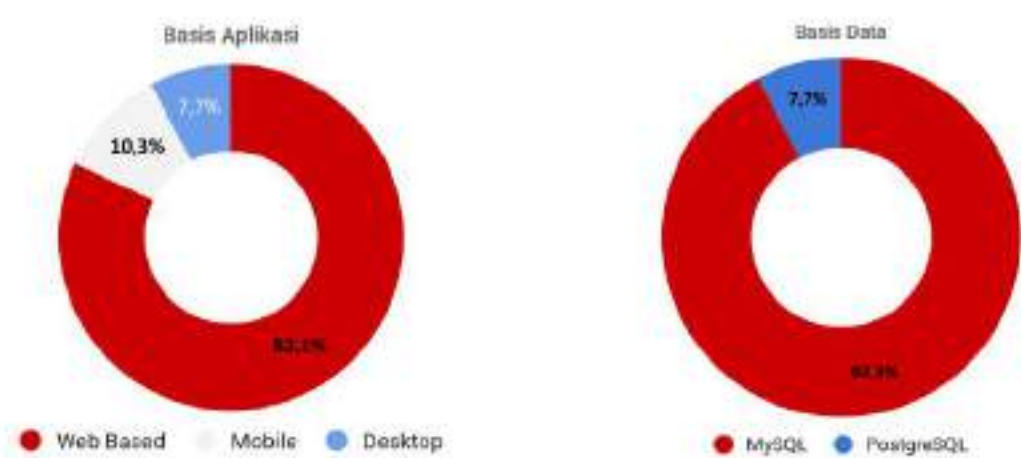
2.4.3.2. Analisis Diagram Aplikasi Target

Analisa terhadap kondisi aplikasi usulan dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 2.4.3.2.1. Referensi Arsitektur Aplikasi Nasional

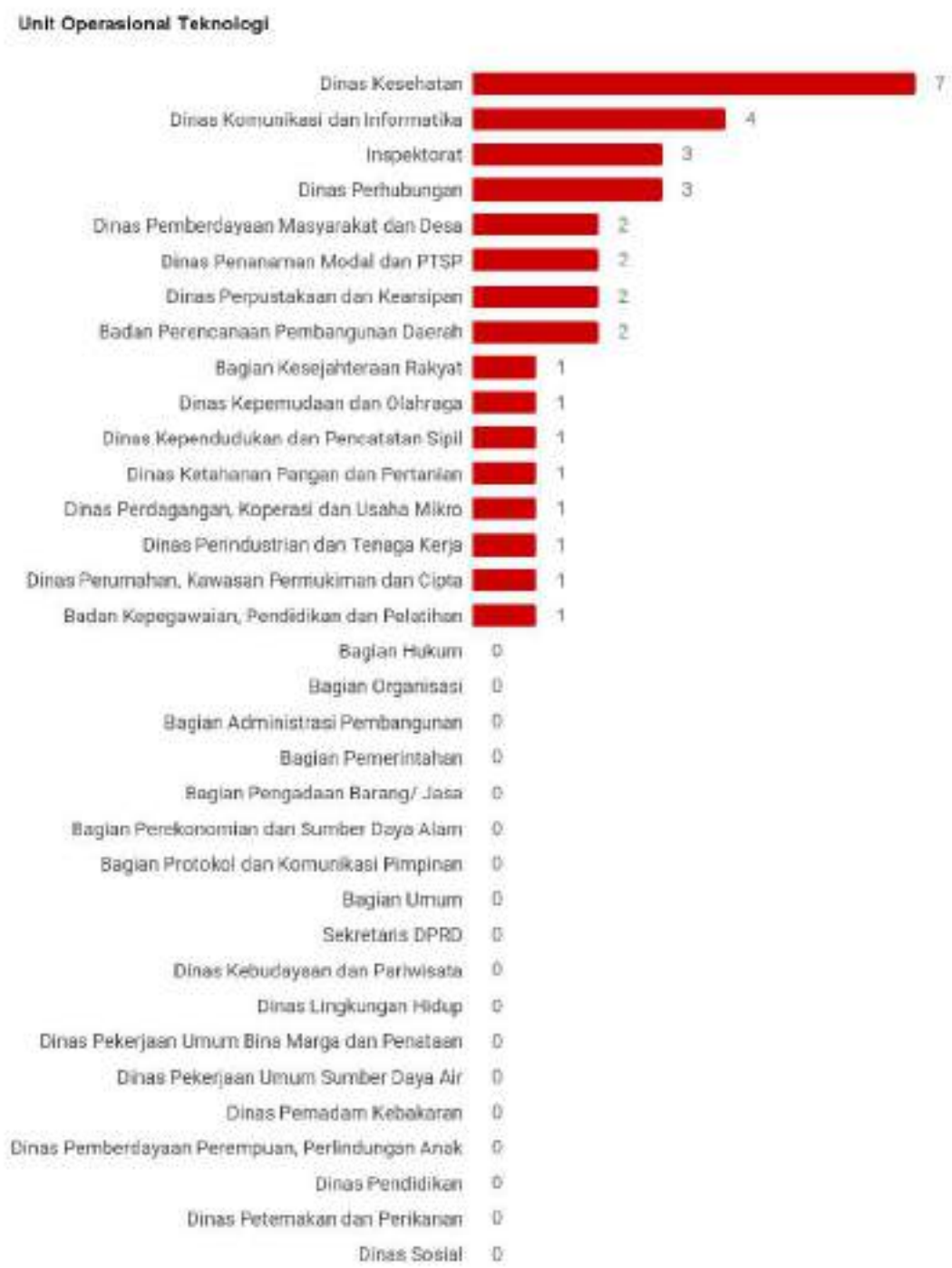
Merujuk pada Grafik 2.4.3.2.1. menunjukkan referensi arsitektur aplikasi usulan pada RAA Level 1 dan RAA Level 2. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan Referensi Arsitektur Nasional Level 1 terdapat 41% (16 Aplikasi) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum dan 59% (23 Aplikasi) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus, selanjutnya Referensi Arsitektur Nasional Level 2 Aplikasi usulan terbagi menjadi 4 yaitu 30,8% (12 Aplikasi) merupakan RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik, 10,3% (4 Aplikasi) merupakan RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, 17,9% (7 Aplikasi) merupakan RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu, serta 41% (16 Aplikasi) merupakan RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu. RAA Nasional didominasi pada RAA.01 Aplikasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi diusulkan dominan aplikasi umum yang menunjang layanan di perangkat daerah.



Grafik 2.4.3.2.2. Teknologi Platform Aplikasi Usulan

Berdasarkan basis aplikasi yang digunakan dalam aplikasi usulan 82,1% (32 Aplikasi) merupakan Web Based sedangkan 10,3% (4 Aplikasi) merupakan Mobile, serta 7,7% (3 Aplikasi) merupakan Desktop dengan basis data yang digunakan dalam aplikasi usulan 92,3% (36 Aplikasi) merupakan MySQL dan 7,7% (3 Aplikasi) merupakan PostgreSQL.

Berdasarkan kondisi aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah hampir semuanya berbasis website, karena mudah untuk di akses di berbagai platform, selanjutnya perlu dipastikan jumlah web programmer dapat mengakomodir pengembangan aplikasi usulan tersebut.



Grafik 2.4.3.2.3. Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Usulan

Merujuk pada grafik tersebut dapat dilihat Perangkat Daerah yang paling banyak dalam melakukan usulan yaitu Dinas Kesehatan dengan usulan pengembangan 7 Aplikasi. Hal ini perlu dilakukan agar layanan di Perangkat Daerah tersebut bisa terdigitalisasi dan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang tidak membutuhkan pengembangan aplikasi untuk 5 tahun kedepan.

sehingga dalam hal ini INA Digital berperan dalam mengakselerasi penggunaan teknologi digital di sektor pemerintahan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan daya saing nasional di era digital.

INA Digital merupakan bagian dari BUMN PERURI, yang mana INA Digital bukanlah sebuah aplikasi, portal, ataupun platform, melainkan penyelenggara ekosistem layanan digital pemerintahan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.



Gambar 2.4.4.1. Portal Layanan Prioritas Nasional

Mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional, INA Digital berperan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan sistem prioritas yang mencakup 9 (sembilan) layanan utama. Layanan-layanan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- a. **Portal Infrastruktur Publik Digital (INA Pas)**, portal yang terdiri atas sistem identitas digital, platform pertukaran data, serta sistem pembayaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
- b. **Portal Administrasi Pemerintahan (INA Gov)**, portal yang mendukung tata kelola pemerintahan, meliputi aspek pengelolaan keuangan, perencanaan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta layanan internal lainnya guna meningkatkan efektivitas birokrasi.
- c. **Portal Layanan Publik Terintegrasi (INA Ku)**, portal yang mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, serta layanan perizinan berbasis elektronik, termasuk SIM online. Untuk memastikan keterpaduan layanan, portal ini mengadopsi beberapa

komponen utama, yaitu SPLP (Sistem Penghubung Layanan Publik), SSO (*Single Sign-On*), dan PDN (Pusat Data Nasional).

- **SPLP (Sistem Penghubung Layanan Publik)**
SPLP berfungsi sebagai mekanisme interoperabilitas antar layanan publik yang memungkinkan berbagai sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk saling terhubung. Dengan SPLP, setiap instansi dapat berbagi data dan layanan secara efisien tanpa perlu membangun sistem baru secara terpisah, sehingga mengurangi redudansi dan meningkatkan efisiensi layanan.
- **SSO (*Single Sign-On*)**
SSO memungkinkan masyarakat dan aparatur sipil negara untuk mengakses berbagai layanan digital dengan satu akun tunggal. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat akun terpisah di setiap platform layanan, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan sistem. Implementasi SSO juga membantu mengurangi risiko keamanan akibat penggunaan kata sandi yang lemah atau berulang.
- **PDN (Pusat Data Nasional)**
PDN merupakan infrastruktur utama dalam transformasi digital pemerintahan yang menyediakan layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan penyimpanan data terpusat. Dengan adanya PDN, data layanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai server lokal dapat dikonsolidasikan dalam satu ekosistem yang lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. PDN juga memastikan bahwa seluruh layanan digital memiliki standar keamanan dan ketersediaan yang tinggi.

Dengan Adanya Percepatan Transformasi Digital pada Pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib melaksanakan identifikasi portal layanan dan fokus pada 9 Layanan Prioritas. Pemerintah Daerah wajib memetakan terkait digitalisasi tersebut, Banyak manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah, dengan adanya pengembangan portal layanan mengingat pengguna harus membuka laman web dan akun login yang begitu banyak. Dengan adanya portal layanan yang mengumpulkan berbagai layanan digital, memudahkan masyarakat dan juga ASN Internal untuk mengakses berbagai layanan hanya dalam satu portal saja. Gambar dibawah merupakan portal layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dapat dibuat untuk menyatukan berbagai layanan yang sudah terintegrasi.



Gambar 2.4.4.2. Arsitektur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Smart Services

Tabel 2.4.4.3.. Daftar Layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Smart Services

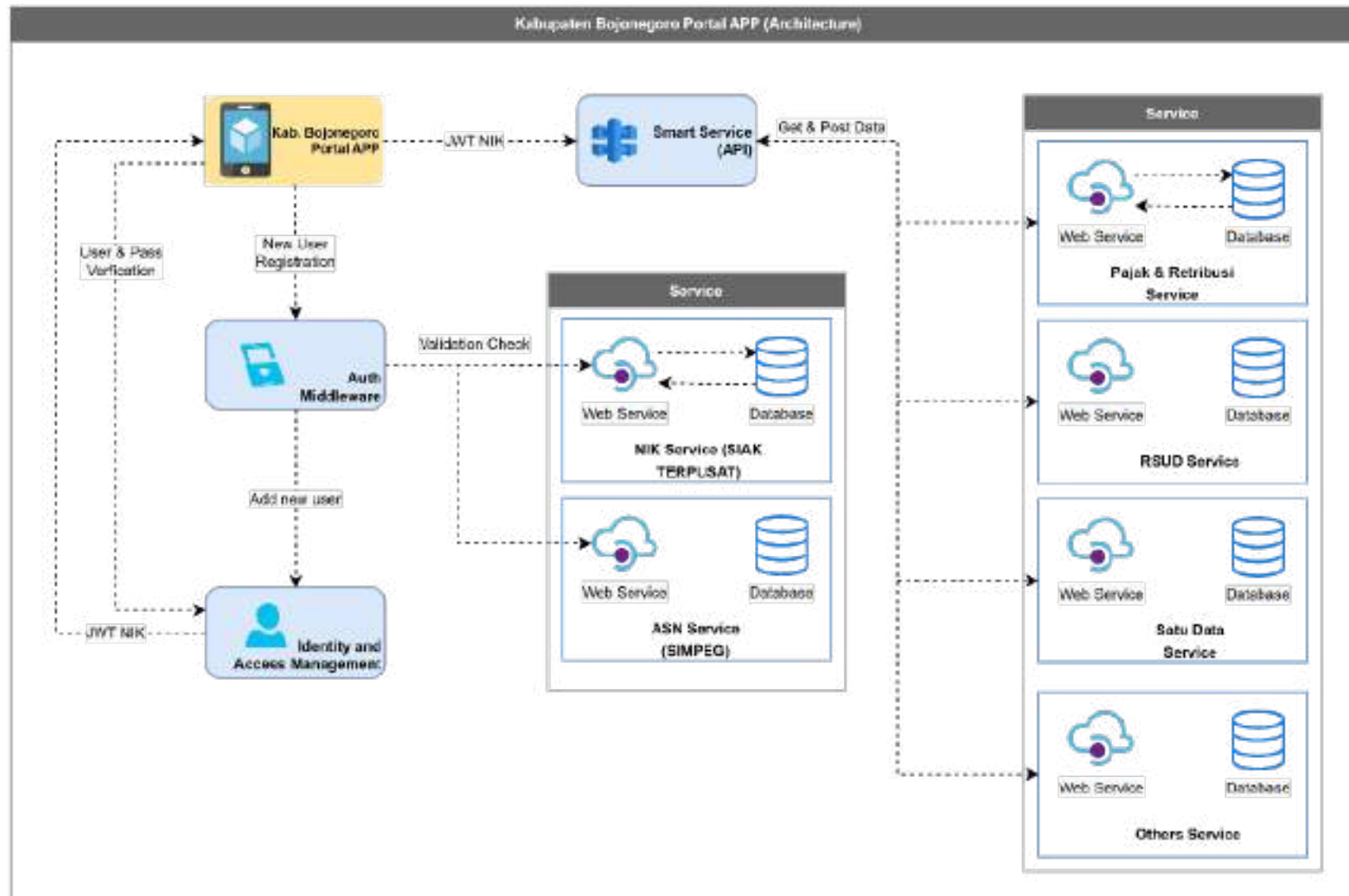
#	Layanan	Sub Layanan	Aplikasi
Layanan Publik			
1	Berita dan Informasi		Website Bojonegoro Kab Chatbot Kecerdasan Artifisial (AI)
2	CCTV		CCTV Bojonegoro

3	Titik Wifi publik		-
4	Telekomunikasi		-
5	Event		-
6	Profil Perangkat Daerah		-
7	Kependudukan	Data Penduduk dan Pencatatan Sipil	PANAH SRIKANDI
8	Ketenagakerjaan	Lowongan Pekerjaan	Siti Worobejo
		Tenaga Kerja Asing	TKA Daerah
9	Pendidikan	Data Pokok Pendidikan	DAPODIK
		Beasiswa	PIP
		PPDB	-
10	Perpustakaan	Perpustakaan Digital	e-Maos Bojonegoro
11	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	SIMPUS
		Stunting	-
12	Hukum	Diseminasi Kebijakan	JDIH Bojonegoro
13	Perizinan	Peluang Investasi	SAMIN
		Perizinan Berusaha	OSS
14	Pembangunan Daerah	Perencanaan Daerah	E-MONEV
		Evaluasi Pembangunan Daerah	E-MONEV
15	Pajak Daerah	Pajak	SIMPATDU eMAP
		Retribusi	-
		Pembayaran Digital	QRIS
16	Marketplace	Data Koperasi	ODS
		Harga Pangan	Siska Perbapo SP2KP
		UMKM	-
17	Pariwisata	Destinasi Wisata	ETNIK WISATA BOJONEGORO
18	Sosial	Data Sosial	SIKS DJ
19	Satu Data	Data Statistik	Satu Data Bojonegoro
20	Aduan Masyarakat	Aduan Umum	Sapa Bupati SP4N Laporan
		Aduan WBS	-
21	PPID	PPID	PPID Bojonegoro
22	Pengadaan Barang dan Jasa		SPSE
23	Transportasi	Informasi Transportasi	-
24	Social Media	Youtube	-
		Instagram	-
		Twitter	-
25	Televisi	TV Streaming	-
26	Radio	Radio Streaming	-
27	Kontak		-
28	Survei Kepuasan Masyarakat		e-SIM IKM
Layanan Internal Pemerintahan			
29	Pengumuman ASN		-
30	Persuratan	Persuratan	SRIKANDI
		TTE	Tanda Tangan Elektronik (TTE)
31	Kepegawaian	Profil Kepegawaian	-

		Presensi	SIKEPO
		Cuti dan Izin	SIMANTAP
		Tunjangan	-
		Mutasi	-
		Promosi	-
		Formasi	-
		Kinerja Harian	-
		KGB	-
		Kenaikan Pangkat	-
		Manajemen Talenta	-
		Penataan Jabatan	-
32	Layanan TIK	Helpdesk TIK	-
		Keamanan Sistem Elektronik	Jagasiber
33	Dashboard Pimpinan		-
34	Knowledge Management System		-
35	Push Notification		Firebase
36	Login Page		Keycloak
37	About		-
38	FAQ		-

Portal App Bojonegoro *Smart Services* perlu dikembangkan secara bertahap dan dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Pengembangan Portal App *Smart Services* disesuaikan dengan dependensi dari berbagai aplikasi yang sudah ada. Selain itu dalam proses perancangan, desain ini harus disusun prioritas berdasarkan dari analisis kompleksitas data dan fitur di masing-masing layanan. Pengembangan tahap pertama dimulai dengan mengembangkan *platform* dasar portal layanan. Tahap kedua mengintegrasikan layanan digital yang sudah didukung dengan *API*. Tahap ketiga membuat *API* dari layanan digital yang belum didukung dengan *API*. Tahap keempat terus melakukan *continuous improvement* dengan melakukan penambahan layanan-layanan baru yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Portal App Bojonegoro *Smart Services* berperan sebagai aplikasi satelit (*satellite app*)/*aggregator* guna memindahkan *user interface* di sisi pengguna yang ada di masing-masing aplikasi utama (*main apps*) ke dalam portal. Portal tersebut menggunakan teknologi *Single Sign On* (SSO) seperti: *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP)/*Keycloak* agar memudahkan pengguna yang terbagi menjadi 4 (empat) *roles*: admin, ASN Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, warga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan warga non Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.4.4.4. Arsitektur Portal Aplikasi Bojonegoro Smart Services

2.5. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan Target

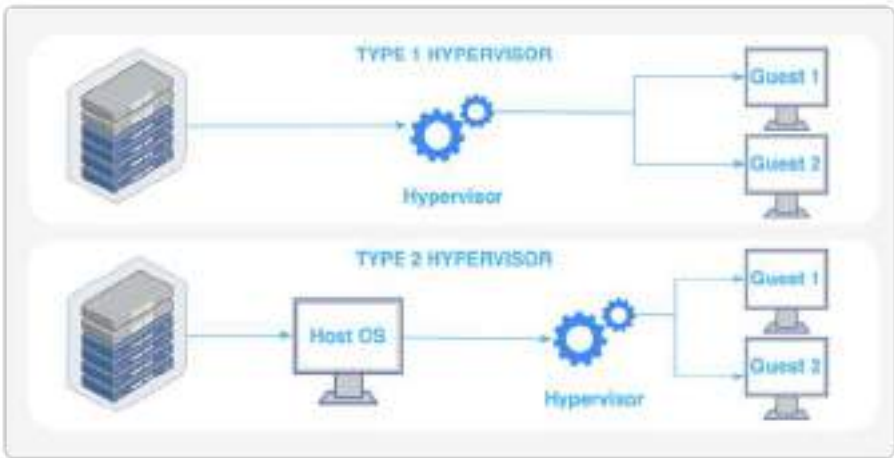
2.5.1. Tren Teknologi dan Praktek Terbaik (*Best Practice*)

2.5.1.1. Teknologi Virtualisasi

Virtualisasi merupakan pembagian pusat data fisik menjadi beberapa *virtual* pusat data yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan *resource* pusat data fisik. Dalam virtualisasi pusat data, *resource* dari pusat data fisik disembunyikan dari pengguna *virtual* pusat data, dan hanya admin yang bisa melihat *resource* asli dari pusat data fisik. Perbedaan arsitektur pusat data modern dengan pusat data tradisional (lama) adalah virtualisasi pusat data menggunakan *hypervisor* yang digunakan untuk membagi *resource* pusat data fisik ke dalam banyak *Virtual Environment* (VE) atau yang sering disebut *Virtual Private pusat data* (VPS), *Guests*, *Instance*, *Container* atau *Emulation*.

Sebuah server fisik bisa dibuat banyak *virtual* pusat data, VPS, *host* dengan spesifikasi *hardware* yang bisa ditentukan (asal tidak melebihi *resource* fisik) mulai dari jumlah *core CPU*, *RAM*, *Network Interface*, *Storage*, *BIOS* dll. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi *resource* pusat data fisik dapat dimanfaatkan secara optimal karena kita bisa meng-*install* beberapa sistem operasi yang akan dikonfigurasi menjadi pusat data sesuai kebutuhan tanpa membeli *hardware* baru.

Agar dapat mendukung implementasi virtualisasi pusat data, *CPU* dari sebuah pusat data harus mendukung teknologi virtualisasi, dan *hardware* saat ini sudah mendukung teknologi virtualisasi bahkan untuk komputer biasa pun sudah mendukung teknologi virtualisasi. Pada teknologi virtualisasi, sebuah pusat data dipecah ke dalam *virtual environment* dan setiap *virtual environment* dapat di-*install* sistem operasi yang berbeda dari sistem operasi pusat data fisik atau sistem operasi dari *virtual environment* lainnya. Ketika *virtual environment* berjalan *resource* yang digunakan tidak dapat diidentifikasi sehingga dalam teknologi virtualisasi diperlukan sebuah *Hypervisor* yang mengkoordinasi komunikasi dan instruksi antara *virtual environment* dengan *resource* fisik/*physical resource*. *Hypervisor* inilah yang dipegang oleh administrator dari sebuah pusat data yang mengimplementasikan teknologi virtualisasi untuk mengatur *virtual environment*.



Gambar 2.5.1.1.1 Dua Jenis Hypervisor

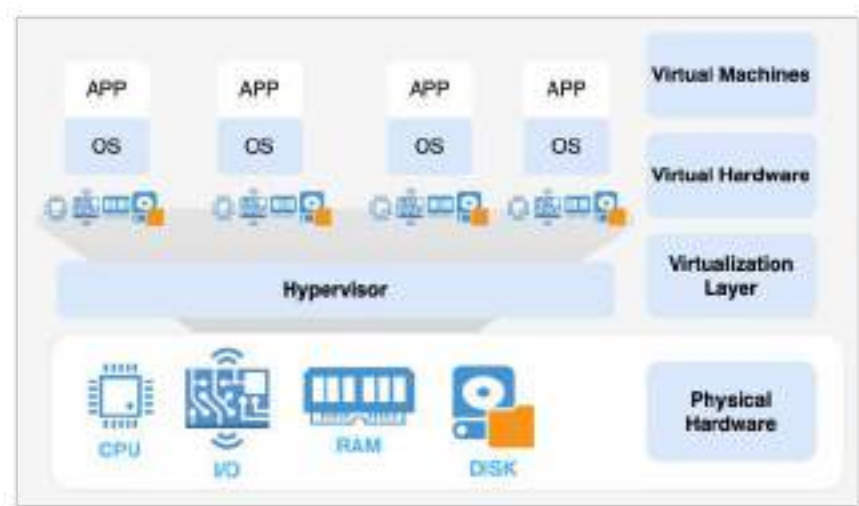
Terdapat 2 jenis *hypervisor* dalam dunia virtualisasi saat ini:

- *Hypervisor Type 1 (Bare Metal Hypervisor)*
Hypervisor ini mengakses langsung *hardware* fisik tanpa bantuan sistem operasi, dan biasanya untuk menggunakan *hypervisor* tipe 1 kita harus menginstall *hypervisor* sebagai sistem operasi bukan diinstall dalam sistem operasi. Contoh *Hypervisor Type 1* diantaranya: KVM, Red hat Enterprise Virtualisation (RHEV), XEN/Citrix Xenpusat data, Hyper-V, VMware vSphere/ESXi.
- *Hypervisor Tipe 2 (Hosted Hypervisor)*
Jenis *hypervisor* ini memerlukan sistem operasi untuk berjalan, karena jenis *hypervisor* ini berjalan di atas sistem operasi. Contoh *Hypervisor Type 2* diantaranya: VMware Work station, VMware Player, dan Virtualbox.

Perkembangan implementasi dari teknologi virtualisasi meliputi pusat data, storage, DC dan DRC, serta perkembangan terakhir yakni *container*.

1. Virtualisasi pusat data

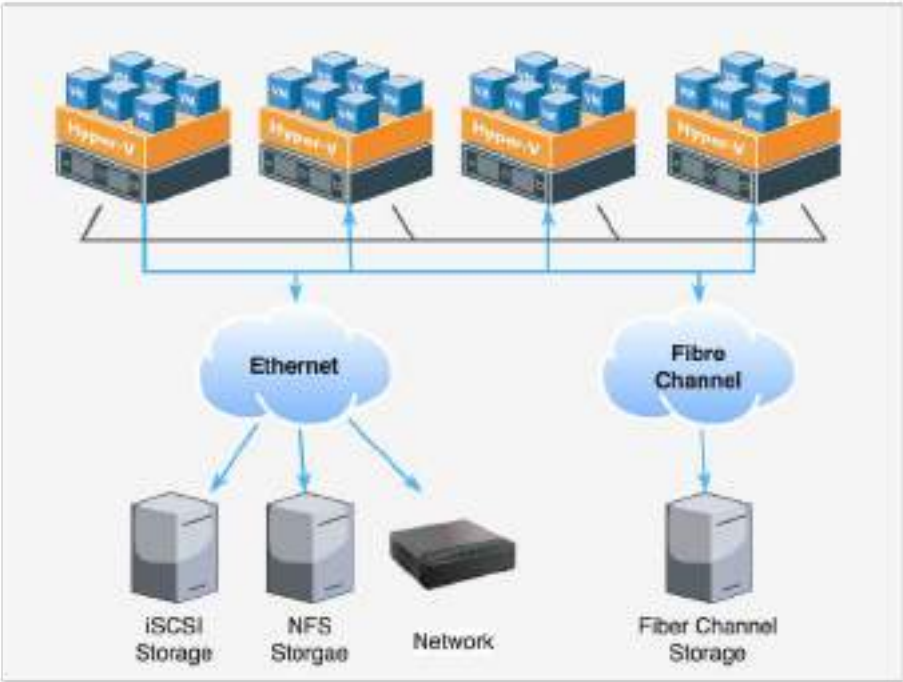
Adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah *resource* fisik pusat data kedalam beberapa virtual pusat data yang nantinya akan diinstall berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan atau bisa juga virtual pusat data ini dijual/disewakan oleh pihak *hosting*. Kita sering mendengarnya dengan istilah VPS (*Virtual Private pusat data*) *hosting*.



Gambar 2.5.1.1.2. Lapisan-lapisan Teknologi Virtualisasi pusat data

Virtualisasi pusat data adalah melakukan konsolidasi dan melakukan pengurangan jumlah pusat data dalam bentuk fisik, dengan menciptakan mesin virtual dalam jumlah banyak yang ditempatkan di beberapa *host* fisik, menggunakan storage dan jaringan.

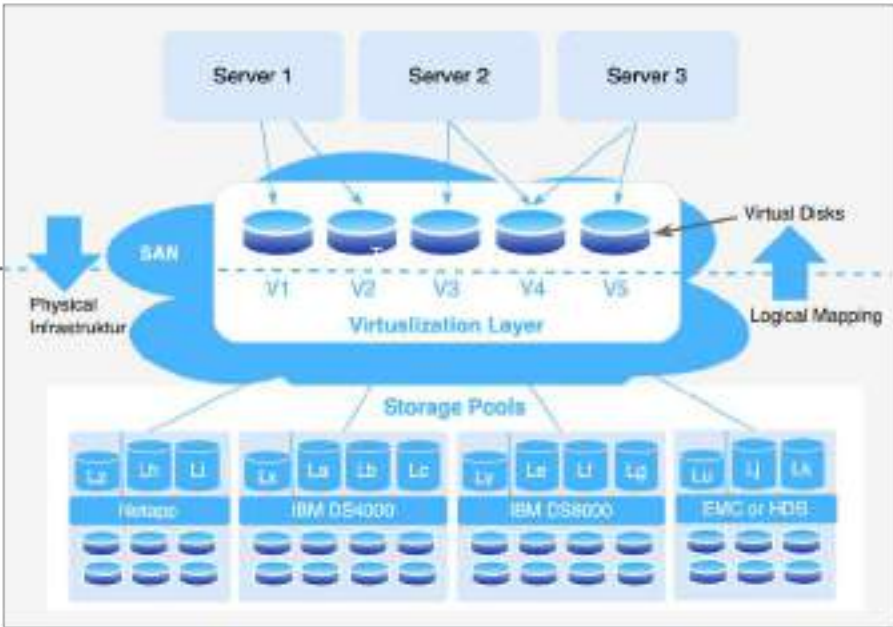
Virtualisasi memudahkan dalam perancangan pusat data dengan tingkat ketersediaan yang tinggi (*high-availability*) dengan teknik *clustering*, redudansi, dan replikasi.



Gambar 2.5.1.1.3 Topologi Virtualisasi Pusat Data dan Storage di Pusat Data

2. Virtualisasi Storage

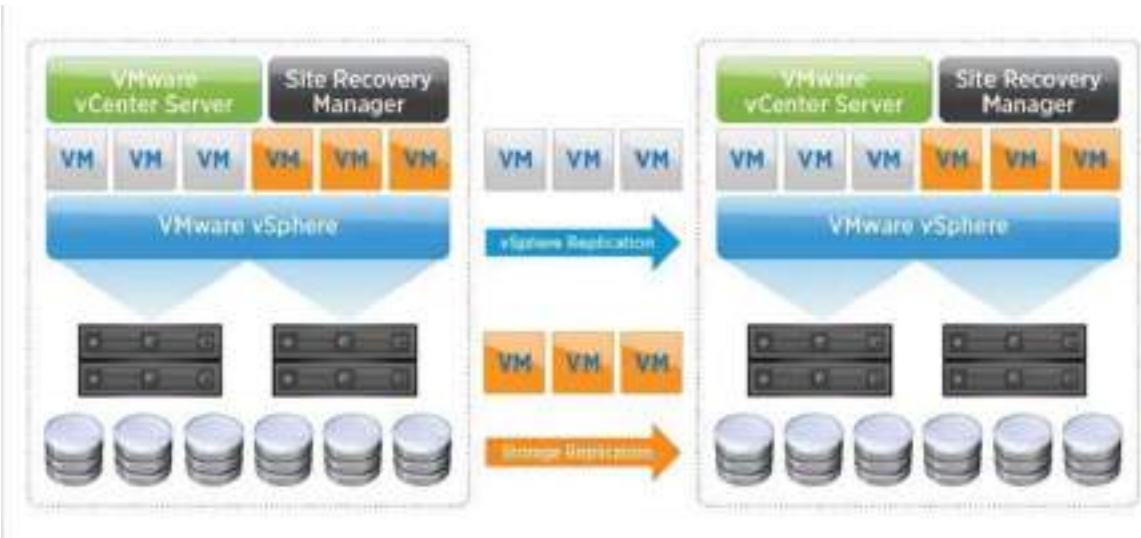
Virtualisasi storage menyediakan media penyimpan (storage) yang terisolasi (terpisah dari resource fisik), aman dan mudah dalam failover dan backup. Salah satu contoh implementasi virtualisasi storage yang gampang kita lihat adalah fasilitas cloud storage, seperti: DropBox dan Google drive yang menyediakan/menyewakan cloud storage bagi pelanggannya dengan menawarkan *flexibilitas* dimana pengguna bisa mengakses storage kapanpun dan dimanapun.



Gambar 2.5.1.1.4 Virtualisasi Storage

3. Virtualisasi DC-DRC

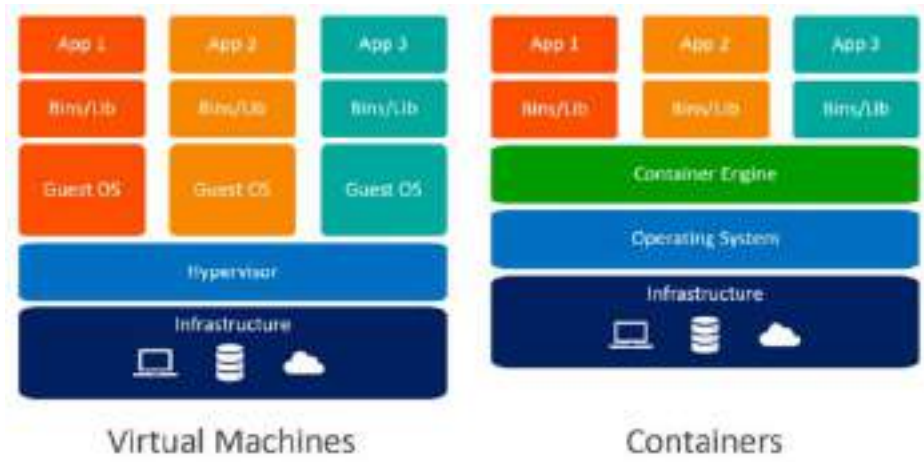
Penggunaan teknologi virtualisasi di pusat data dan DRC akan memudahkan dalam proses *backup*, replikasi, dan migrasi pusat data dan aplikasi. Virtualisasi juga memudahkan dalam melakukan *scale-up* atau *scale-down* pusat data sesuai dengan kebutuhan bisnis.



Gambar 2.5.1.1.5 Replikasi Pusat Data dengan Teknologi Virtualisasi

4. Container

Perkembangan dari teknologi virtualisasi yakni *container* yang menyatukan aplikasi dengan dependensinya sehingga dapat memberikan sistem yang terisolasi (*isolated environment*) pada level OS yang dijalankan pada satu induk *linux kernel* (*host*). Teknologi *container* merubah cara mengembangkan, mendistribusikan dan menyebarkan perangkat lunak.

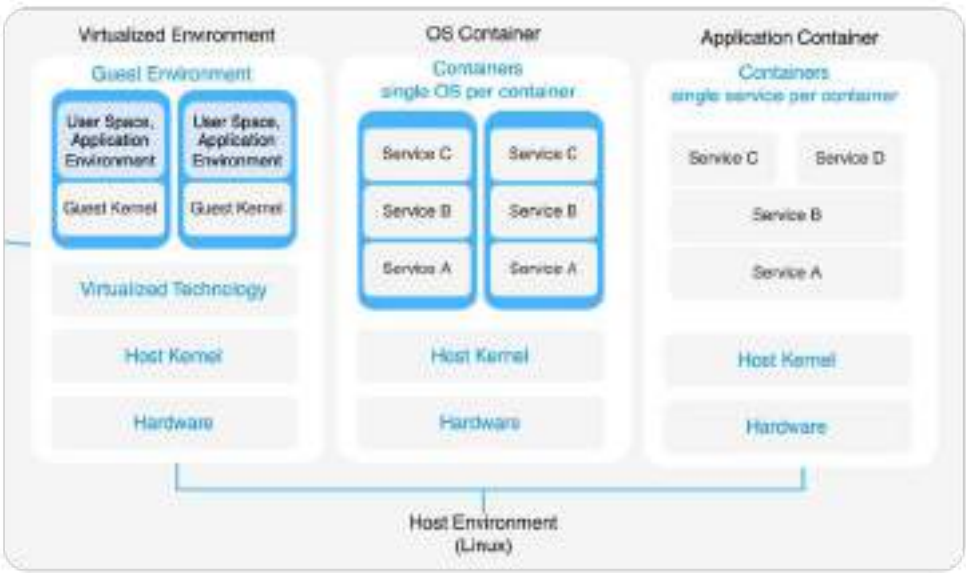


Gambar 2.5.1.1.6 Perbandingan Teknologi Virtual Machines dan Containers

Saat ini terdapat 2 jenis *container* yang umum dapat kita pergunakan, yaitu:

- a. *Container* berbasis sistem operasi (*OS Container*), yakni *container* yang memberikan isolasi pada level sistem operasi dan memanfaatkan kernel yang sama dari suatu induk, contohnya adalah LXC, OpenVZ, Linux Vpusat data, BSD Jails and Solaris zones.
- b. *Container* berbasis aplikasi (*Application Container*), yakni *container* yang memberikan isolasi pada level aplikasi dengan memanfaatkan beberapa

komponen yang ada pada sistem operasi induk, serta beberapa komponen pada *container-container* lain yang menjadi basis dari berjalannya sebuah aplikasi, contohnya adalah *Docker* dan *Rocket (rkt)*.



Gambar 2.5.1.1.7 Perbandingan Teknologi Virtualisasi dan Container
(sumber:<https://blog.andi.dirgantara.co/teknologi-kontainer-pengantar-pengenalan-docker-706eafe03269>)

Penggunaan teknologi *container* mempunyai banyak keuntungan, antara lain:

- a. Ringan
Container menyediakan virtualisasi yang berbeda konsep dengan virtualisasi perangkat keras yang tersedia di mesin virtual (*Virtual Machine*). Menggunakan *host* dan kernel yang sama *container* berbagi manajemen memori, *management* proses, I/O dll, sementara proses pada tiap *container* terisolasi dan mempunyai dependensi terpisah.
- b. Kinerja Maksimal
Karena *container* dikelola pada *host* yang sama, proses pada *container* dijalankan dengan kinerja sama seperti *host*, setiap proses yang dijalankan dalam *container* sebenarnya adalah proses dalam *host* yang di isolasi.
- c. Konsumsi Sumber Daya Lebih Rendah
Karena *container* tidak membutuhkan virtualisasi perangkat keras yang penuh, satu *host* dapat mempunyai banyak *container* dibanding VM.
- d. Cepat
Proses perjalanan penyalan *server* (*booting*) dalam *container* hampir sama dengan proses *booting* pada *host*, dibanding *virtual machine* yang menjalankan proses tunggal namun harus melakukan *booting* pada sistem operasi secara penuh.

2.5.1.2. DevOps

1. Pengertian

DevOps adalah kombinasi dari budaya, praktik, dan alat untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan agar proses *delivery* aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada proses pengembangan aplikasi secara tradisional.

Sesuai dengan namanya, istilah *DevOps* adalah gabungan dari kata *Development* dan *Operations*. Jadi secara garis besar metodologi *DevOps* akan menguraikan proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan mengotomatiskan dan mengintegrasikan aktivitas dari tim *Development* (pengembang) dan tim *IT Operations* (operasi). Di bawah model *DevOps* ini, tim pengembang dan operasi akan bekerja bersama di seluruh tahapan daur hidup pengembangan aplikasi (*software development life cycle*) untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas secara efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Manfaat

DevOps dirancang untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi yakni kecepatan dalam pemenuhan permintaan klien, dan faktor keamanan yang kadang diabaikan, dengan cara mengintegrasikan semua orang yang terkait dengan *software development* dan *deployment* baik itu *business users*, *developers*, *test engineers*, *security engineers*, *system administrators*, dan lain-lain. Tim ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan fokus utama yaitu *delivery* produk/*software* berkualitas tinggi yang dapat memenuhi semua *user requirements* namun tetap mampu menjaga integritas dan stabilitas seluruh sistem. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang telah mengimplementasikan *DevOps*:

A. Perusahaan dapat bergerak dengan cepat

Praktik *DevOps* memungkinkan perusahaan dapat bergerak cepat dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan demikian, praktik ini mampu mendorong bisnis agar bisa berkembang dengan cepat.

B. Delivery yang cepat

Praktik *DevOps* dapat membantu perusahaan untuk dapat merilis produk dengan waktu yang lebih cepat. Dengan cara ini, perusahaan memiliki peluang untuk bisa lebih unggul dari kompetitor.

C. Keandalan

DevOps bekerja seperti pada praktik *CI/CD* (*Continuous Integration/Continuous Delivery*) yang dapat membantu tim memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki kualitas yang tinggi. Di sisi lain, tim juga dapat mengirim produk yang andal dengan kecepatan tinggi.

D. Kolaborasi tim yang lebih baik

Di bawah model *DevOps*, tim pengembang dan tim operasi akan berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan menggabungkan alur kerja mereka. Cara ini dapat membantu tim untuk bekerja secara efektif dan efisien.

E. Aman

Tim dapat mengadopsi model *DevOps* tanpa perlu mengorbankan keamanan dengan menggunakan alat pengujian keamanan terintegrasi dan otomatis.

3. **DevOps Pipeline**

Pipeline DevOps adalah sekumpulan proses yang memungkinkan tim *developer* dan tim *IT operations* dapat bekerja sama untuk membangun dan menerapkan kode ke lingkungan produksi (*production environment*). Secara garis besar fase *DevOps pipeline* meliputi:

A. **Plan**

Fase ini melibatkan perencanaan untuk seluruh alur kerja yang dibutuhkan sebelum tim pengembang mulai menulis kode. Dalam tahap ini, manajer produk dan manajer proyek akan memainkan peran penting. Mereka akan bekerjasama untuk mengumpulkan *requirements* dan *feedback* dari klien ataupun *stakeholders*. Informasi tersebut kemudian akan dikumpulkan untuk membangun lini masa produk untuk memandu proses pengembangan yang akan dilakukan.

B. **Code**

Setelah rencana dibuat, tim *developer* dapat mulai menulis kode yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Tim *developer* biasanya akan menggunakan seperangkat *plugin* standar yang dipasang di lingkungan pengembangan mereka untuk membantu proses pengembangan, membantu menerapkan gaya kode yang konsisten, serta menghindari kelemahan keamanan umum dan *anti-pattern*.

C. **Build**

Setelah tim *developer* selesai menulis kode yang dibutuhkan, mereka akan memasukan kode tersebut ke dalam *shared code repository*. *Developer* akan mengirimkan *pull request*, setelah *developer* yang lain akan mereview perubahan yang telah dilakukan. Jika kode tidak memiliki masalah, maka *developer* tersebut akan menyetujui *pull request* yang telah dikirim sebelumnya.

D. **Test**

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Jika ada masalah yang ditemukan pada fase ini, maka masalah tersebut akan dikirim kembali ke tim *developer* untuk diselesaikan.

E. **Release**

Fase *release* menjadi tonggak penting dalam *DevOps pipeline*. Pada tahap ini, setiap perubahan kode telah melewati serangkaian pengujian dan tim *IT*

operations telah memastikan bahwa masalah yang merusak dan regresi sudah teratasi dengan baik.

F. Deploy

Tahap selanjutnya adalah deployment. Setelah *production environment* dibuat dan dikonfigurasi maka versi terakhir dari pengembangan yang telah dilakukan akan diterapkan.

G. Monitor

Pada tahap terakhir ini, tim *IT operations* akan terus bekerja keras untuk memantau infrastruktur, sistem, dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga mengumpulkan data-data penting dari log, analitik, sistem monitoring, serta melihat *feedback* dari pengguna untuk mengetahui jika ada masalah pada kinerja aplikasi.



Gambar 2.5.1.2.1. DevOps Pipeline (Sumber: blog.isostech.com)

4. Praktik Terbaik untuk DevOps yang Efektif

Untuk menjalankan DevOps secara efektif terdapat beberapa praktik yang dapat diterapkan, yaitu:

1. Continuous Integration (CI)

Continuous Integration adalah praktik dalam *software development* dimana tim developer akan secara rutin menggabungkan pembaruan kode ke dalam *central repository*. Tujuan utama dari *CI* adalah menemukan dan mengatasi *bug* lebih cepat, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memvalidasi dan merilis pembaruan perangkat lunak yang baru.

2. Continuous Delivery (CD)

Continuous Delivery adalah praktik dalam *software development* yang memastikan bahwa kode selalu dalam status “*deployable*”. Artinya, setiap perubahan yang ada di dalam kode seperti penambahan fitur, perbaikan *bug*, perubahan konfigurasi, atau yang lain, akan selalu siap untuk diterapkan ke dalam *production environment* atau bahkan ke tangan *user* dengan cepat, aman, dan berkelanjutan.

3. *Microservices*

Microservice adalah gaya arsitektur yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks. Implementasi arsitektur ini memungkinkan aplikasi yang sedang dikembangkan menjadi sangat mudah dipelihara dan “*testable*”.

4. *Infrastructure as Code (IaC)*

Infrastructure as Code adalah sebuah pendekatan untuk mengelola *data center server*, *storage*, dan infrastruktur jaringan. *IaC* digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi dan manajemen skala besar secara signifikan.

5. *Monitoring dan logging*

Monitoring dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cepat sehingga dapat mencegah munculnya masalah lain yang lebih besar. Dengan cara ini, tim mampu mengukur kinerja aplikasi/*software* dan memastikan sistem tetap bekerja secara stabil.

Selain itu, tim juga akan menganalisis *log* yang dihasilkan oleh aplikasi. Dengan demikian, tim *DevOps* dapat lebih memahami bagaimana perubahan atau pembaruan perangkat lunak yang telah dilakukan dapat memengaruhi *user*.

5. Peta Jalan (Road Map) *DevOps*

Implementasi *DevOps* tidak bisa dilakukan secara langsung tetapi harus melalui beberapa tahapan karena *DevOps* akan merubah pola atau budaya kerja. Peta jalan perlu disusun untuk memudahkan dalam pemantauan dan kontrol.



Gambar 2.5.1.2.2. Peta Jalan Implementasi DevOps

6. Tools DevOps

Untuk mengimplementasikan DevOps diperlukan aplikasi pendukung (tools) antara lain:

1. *Version Control*
 - a. *Github*
 - b. *Bitbucket*
 - c. *GitLab*
2. *Container Management tools*
 - a. *Docker*
 - b. *Kubernetes*
 - c. *Mesos*
3. *Application Performance Monitoring tools*
 - a. *Prometheus*
 - b. *Dynatrace*
 - c. *AppDynamics*
4. *Deployment dan Server Monitoring tools*
 - a. *Datadog*
 - b. *Sensu*
5. *Configuration Management tools*
 - a. *Chef*
 - b. *Puppet*
 - c. *Ansible*
6. *CI / Deployment Automation tools*
 - a. *Bamboo*
 - b. *Jenkins*
 - c. *IBM UrbanCode*
7. *Test Automation tools*
 - a. *Test.ai*
 - b. *Ranorex*
 - c. *Selenium*
8. *Artifact Management tools*
 - a. *JFrog Artifactory*
 - b. *Sonatype NEXUS*
9. *Codeless Test Automation tools*
 - a. *Testim.io*
 - b. *AccelQ*

7. Transformasi Tim

Terdapat beberapa metodologi untuk topologi implementasi DevOps khususnya transformasi tim.



Gambar 2.5.1.2.3. Transformasi Tim DevOps

2.5.1.3. Microservices

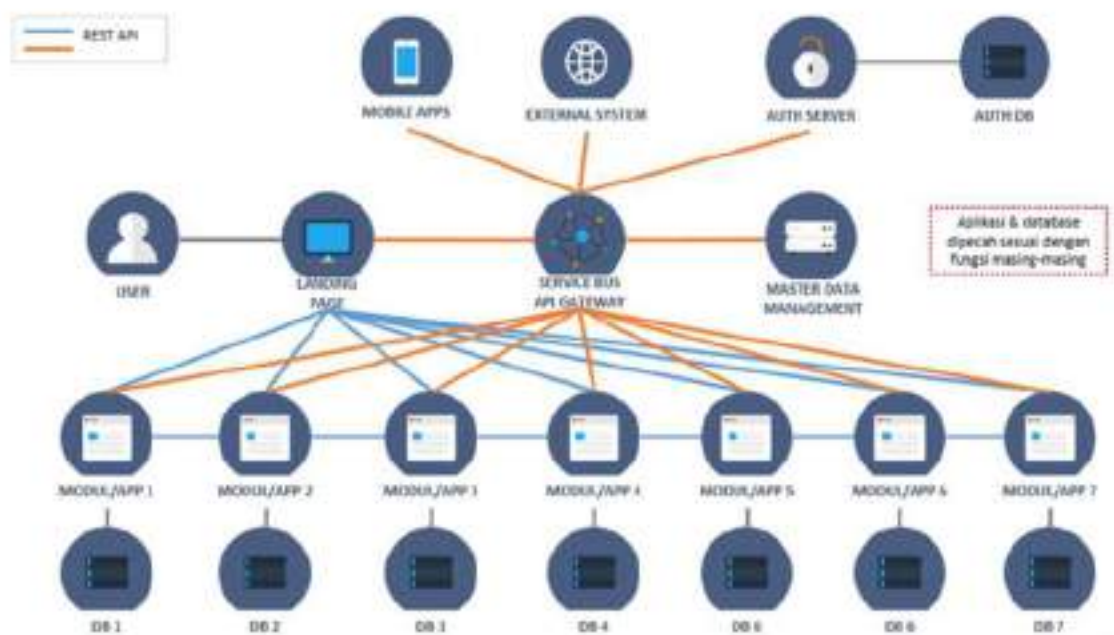
Secara sederhana, arsitektur aplikasi *microservices* menggunakan desain yang memecah aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Aplikasi *microservices* tidak sekedar memisahkan berdasarkan *user-role* atau subdomain saja, tetapi aplikasi akan di *breakdown* lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya. Aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen. Setiap fungsi dapat menggunakan teknologi *stack* yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun artinya akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi besar. Setiap *microservices* merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta berbagai adaptornya (bahasa pemrograman, dll).

Pola arsitektur *microservices* secara signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Berbagai skema *database* tunggal dengan *services* lainnya memiliki skema *database* tersendiri. Pendekatan ini bertentangan dengan gagasan model data *enterprise-wide* yang sering kali menghasilkan duplikasi beberapa data. Memiliki skema *database* per *service* sangat penting jika ingin mendapatkan keuntungan dari layanan *microservice*. Masing-masing *service* memiliki *database* sendiri. Selain itu, *services* dapat menggunakan jenis *database* dan bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Microservices membagi *service* ke bagian yang lebih kecil dimana *service-service* tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap *services* yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk implementasi ke *web*, *android*, *iOS* dll tidak bisa secara langsung, pengembang harus membuat terlebih dahulu yang namanya *API Gateway*. *API Gateway* memiliki tugas seperti *load balancing*, *caching*, *access controll* , *API metering*, dan *monitoring*.

Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan arsitektur *microservices* pada setiap modul memerlukan *engine* seperti *web server* serta basis data (*micro database*) yang akan berdampak terhadap peningkatan kinerja aplikasi yang signifikan. Di samping itu

keamanan aplikasi akan lebih terjamin dengan melakukan pengamanan melalui *REST API*, sehingga transaksi dan pertukaran data yang dilakukan akan lebih terjaga.



Gambar 2.5.1.3.1. Arsitektur *Microservices*

Arsitektur *microservices* mempunyai kelebihan sebagai berikut:

A. Komponen Terpisah

Pertama, semua layanan dapat digunakan dan diperbarui secara independen, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas. Kedua, *bug* dalam satu *microservices* berdampak pada layanan tertentu dan tidak memengaruhi keseluruhan aplikasi. Selain itu, jauh lebih mudah untuk menambahkan fitur-fitur baru ke aplikasi yang dikembangkan dengan arsitektur *microservices* daripada aplikasi yang menggunakan arsitektur monolitik.

B. Pemahaman yang Lebih Mudah

Arsitektur aplikasi dengan *microservices* lebih mudah dipahami dan dikelola karena aplikasi dibagi menjadi komponen yang lebih kecil dan sederhana. Hal ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk fokus hanya pada layanan spesifik yang terkait dengan tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Skalabilitas yang Lebih Baik

Keuntungan lain dari pendekatan *microservices* adalah bahwa setiap elemen dapat diskalakan secara independen sehingga proses lebih efektif baik dari segi biaya dan waktu dibandingkan dengan dengan pendekatan *monolitik* dimana seluruh komponen pembentuk aplikasi harus ditingkatkan meskipun hal tersebut tidak diperlukan. Selain itu, setiap arsitektur monolitik memiliki batasan dalam hal skalabilitas komponen infrastruktur servernya, sehingga semakin kompleks elemen, maka semakin banyak masalah yang berpotensi muncul.

Selain memiliki keuntungan, arsitektur *microservices* memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

A. Kompleksitas Ekstra

Arsitektur layanan *microservices* merupakan sistem terdistribusi dengan kompleksitas ekstra sehingga harus memilih dan mengatur koneksi antara semua modul dan *database*. Lebih lanjut, aplikasi tersebut termasuk layanan independen, semuanya harus dikerahkan secara independen.

B. Distribusi Sistem

Arsitektur layanan *microsoft* adalah sistem kompleks dari banyak modul dan basis data sehingga semua koneksi harus ditangani dengan hati-hati.

C. Fungsi Lintas Sektoral (Cross-Functional) Bertambah

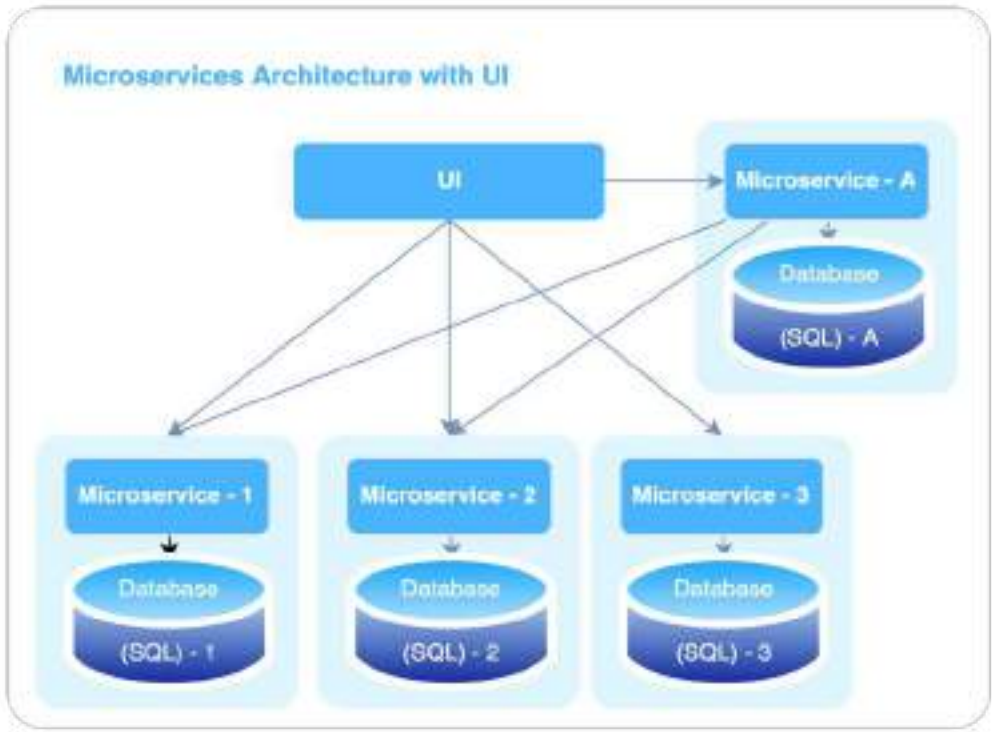
Saat membuat aplikasi *microservices*, pengembang harus berurusan dengan sejumlah masalah lintas sektoral termasuk konfigurasi eksternal, *logging*, metrik, pemeriksaan kesehatan, dan lainnya.

D. Pengujian

Sebagian besar komponen yang dapat digunakan secara terpisah membuat pengujian solusi berbasis layanan jauh lebih sulit.

Arsitektur Pangkalan Data (Database) *Microservices*

Arsitektur basis data yang akan diterapkan pada arsitektur aplikasi *microservices* menggunakan *two-tier architecture*, dimana dalam setiap modul aplikasi tersebut memiliki pangkalan data masing-masing sesuai dengan perannya, seperti: terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5.1.3.2. Arsitektur Pangkalan Data *Microservices*

2.5.1.4. OWASP 10 - 2021

OWASP TOP 10 atau yang biasa disebut OWASP 10 adalah sebuah daftar teratas kerentanan keamanan yang dapat mengancam keamanan suatu *website* yang dirilis oleh komunitas OWASP (*Open Web Application Security Project*). Daftar ini terus berkembang dan berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi *website/aplikasi web* yang terus berkembang dan versi terakhir adalah 2021. OWASP Top 10 adalah sebuah panduan bagi para *developers* dan *security team* tentang kelemahan-kelemahan pada *web apps* yang mudah diserang dan harus segera disiasati. Berikut daftar OWASP Top 10:2021:

A. A01:2021-Broken Access Control

Aplikasi tidak akan bekerja dengan baik sesuai fungsinya jika penerapan otorisasi hak akses tidak berjalan efektif. Misalnya, apabila pengguna aplikasi (*user*) berhasil melewati halaman *login*, selanjutnya pengguna dapat bebas menjalankan operasi apabila mengakses tautan web tertentu dalam halaman admin, padahal mereka tidak memiliki akses.

Access control atau lebih sering disebut sebagai otorisasi, adalah suatu proses pemberian akses fungsi atau konten kepada beberapa pengguna, dan tidak kepada pengguna lain dalam suatu aplikasi. Proses ini terjadi setelah pengguna berhasil melakukan otentikasi atau lebih umum dikenal dengan proses *login*. *Access Control* seringkali tidak didefinisikan, dibentuk dan didesain secara keseluruhan pada awal pembuatan aplikasi, melainkan berkembang seiring dengan perkembangan aplikasi itu sendiri. Pada setiap fungsi baru yang ditambahkan, aturan *access control* akan disisipkan. Hal ini menyebabkan aturan *access control* yang terkumpul akhirnya menjadi rumit dan sulit dipahami.

B. A02:2021-Cryptographic Failures

Implementasi enkripsi atau kriptografi yang buruk pada sebuah data sensitif, sehingga mengakibatkan permasalahan terhadap perlindungan dan kerahasiaan data, baik saat pengiriman data maupun ketika data disimpan. Permasalahan pada konsep kriptografi yang buruk sering menyebabkan maraknya data *breach*, karena data yang tidak terenkripsi kerap kali dimanfaatkan oleh *attacker* untuk mengakses data yang lebih tinggi lagi.

C. A03:2021-Injection

Sistem/program memproses sebuah data yang tidak valid, yang mengakibatkan peretas (*hacker*) yakni orang dengan kemampuan teknis komputer tertentu yang dapat menerobos masuk ke dalam aplikasi *web* suatu organisasi, dengan cara memecahkan kode-kode atau sandi-sandi melalui jaringan komputer atau internet. Peretas dapat menginputkan kode tertentu kepada program lalu kode tersebut akan membuat program menjalankan perintah yang salah.

D. A04:2021-Insecure Design

Insecure Design merujuk pada salah satu daftar kerentanan keamanan yang dirilis oleh OWASP (*Open Web Application Security Project*). Kerentanan ini mengacu pada kelemahan yang terkait dengan desain atau arsitektur aplikasi atau sistem yang memungkinkan serangan atau pelanggaran keamanan. Hal ini dapat terjadi karena pengembang tidak memperhatikan keamanan dalam tahap perancangan atau desain sistem. Dengan demikian pengembang perlu menerapkan prinsip keamanan salah satunya *Secure By Design* pada tahapan awal desain program atau aplikasi. *Secure By Design* dalam dunia *software engineering* adalah sebuah *software* yang seharusnya memiliki kapabilitas *design* yang cukup aman secara fundamental. Setiap *attacker* mendapatkan sebuah informasi sensitif yang terdapat pada pesan *error*, hal tersebut dapat terjadi karena pengembang tidak menggunakan *error handler* dengan baik.

Hal tersebut sering terjadi ketika pengguna salah mengisi *input* seperti tidak sesuai tipe data yang diminta, kurang nya jumlah *character*, atau pengguna tidak sengaja mengisi *null* pada sebuah *input request*.

E. A05:2021-Security Misconfiguration

Security Misconfiguration merupakan kerentanan keamanan yang terjadi karena konfigurasi atau pengaturan sistem yang tidak tepat pada suatu aplikasi atau infrastruktur teknologi informasi. Hal ini dapat terjadi ketika pengembang tidak melakukan konfigurasi atau pengaturan dengan benar, atau tidak memperbarui dan memperbaiki konfigurasi yang sudah ada. Akibatnya, peretas dapat dengan mudah menemukan celah keamanan dan memanfaatkannya untuk melakukan serangan ke sistem atau aplikasi yang rentan tersebut.

F. A06:2021-Vulnerable and Outdated Components

Kondisi dimana pengembang masih menggunakan sebuah aplikasi, *framework*, *library*, atau komponen versi lawas (*outdated*), dan pengembang tidak melakukan pengecekan apakah aplikasi sudah dilakukan *patching*, atau *updating*.

G. A07:2021-Identification and Authentication Failures

Sebuah kerentanan yang terjadi pada aktivitas pengidentifikasian serta autentikasi. Kerentanan ini disebabkan karena sistem pengidentifikasian dan autentikasi gagal mengidentifikasi pengguna, nantinya akan menyebabkan pengguna dapat terautentikasi sebagai pengguna lain, secara sengaja maupun tidak di sengaja.

H. A08:2021-Software and Data Integrity Failures

Gagalnya sebuah *software/aplikasi* memeriksa integritas sebuah data, yang disebabkan tidak terimplementasinya *development life cycle* dengan benar, yang mana beberapa pengembang sering melewati proses tes integritas sebuah data sebelum *release*, atau tidak melakukan *code review/static analysis* pada aplikasi yang akan di *deploy* dan di *release* untuk memastikan tidak ada *malicious code* yang tertanam pada *software/aplikasi*.

I. A09:2021-Security Logging and Monitoring Failures

Kondisi ketika pusat data/aplikasi tidak terpantau dengan baik, biasanya disebabkan karena manajemen rekam jejak (*log management*) yang buruk dan *log* yang tidak terformat dengan baik. Selain itu juga terdapat faktor kesalahan manusia (*human error*), yakni ketika tim *Security Operation Center* (SOC) tidak melakukan pemeriksaan lanjutan atau melakukan analisis *log* secara proaktif terhadap *alert*.

J. A10:2021-Side Request Forgery

Kondisi kerentanan saat sebuah aplikasi *web* meminta *remote resource* tanpa melakukan validasi URL. Hal ini menyebabkan *hacker* dapat memaksa aplikasi untuk mengirim *crafted request* ke destinasi yang tidak diharapkan, meskipun sudah dilindungi oleh *firewall*, VPN, atau tipe lain.

2.5.1.5. Security Operation Center (SOC)

Meningkatnya serangan dan insiden siber mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengimplementasikan berbagai solusi keamanan TI yang mencakup banyak bidang area. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu lembaga yang menjadi target untuk banyak jenis serangan, sehingga perlu mengetahui kondisi keseluruhan postur keamanan saat ini dan melindunginya. Unit *Security Operation Center* (SOC) dibentuk untuk melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari serangan siber. SOC menyediakan fungsi penting dalam memantau dan mendeteksi setiap kejadian yang dapat mengancam, dimana hal ini sangat penting bagi keamanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Fungsi – fungsi umum yang dilakukan oleh SOC meliputi :

1. Pengelolaan *log*
2. Pemantauan Proaktif berkelanjutan
3. Peringkat dan manajemen peringatan
4. Investigasi penyebab insiden
5. Respon ancaman
6. Penyempurnaan dan peningkatan keamanan
7. Pemulihan dan remediasi
8. Manajemen kepatuhan

A. Triad SOC

Triad CSOC yang mencakup yakni:

- *People* untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai fungsi;
- *Technology* berupa produk keamanan yang berbeda; dan
- *Process* terdiri dari berbagai proses dan prosedur.



Gambar 2.5.1.5.1. Triad SOC

Perangkat keamanan TI yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti firewall, *Intrusion Prevention System (IPS)*, *Web Application Firewall (WAF)*, *Antivirus* dan lain – lain memiliki fungsi utama untuk melindungi aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari jenis serangan siber tertentu. Karena dengan banyaknya solusi keamanan TI yang tersedia dan diimplementasikan, ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mengatur semua solusi tersebut untuk manajemen keamanan yang lebih baik. Solusi *Security Information and Events Management (SIEM)* untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keamanan TI secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mendeteksi dan bereaksi lebih baik dan lebih cepat terhadap serangan siber.

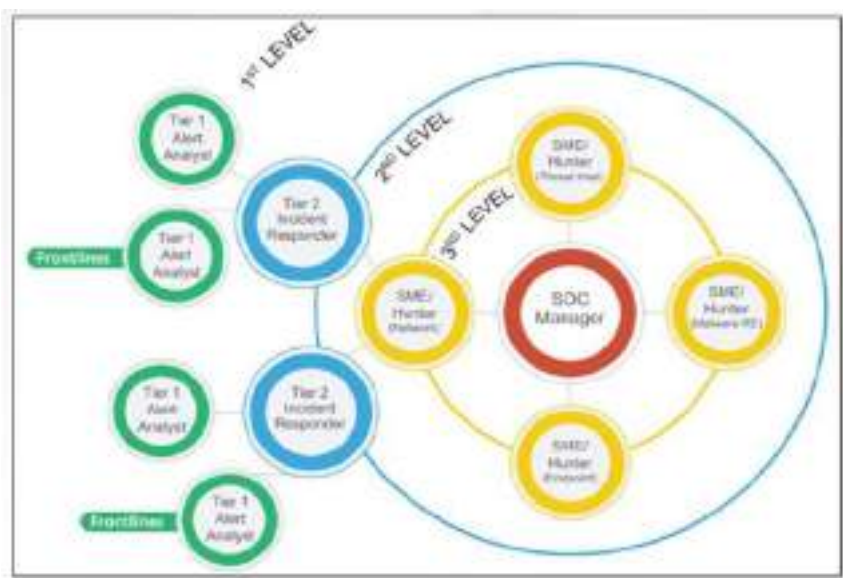
B. SOC – People

Operasional SOC dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkat atau level yakni:

- *Tier 1 (Frontliner)*
Monitoring dan menganalisa alert, monitoring sensor keamanan dan endpoint, mengumpulkan data penting untuk di eskalasikan ke Tier 2.
- *Tier 2 (Incident Responder)*
Melakukan analisa insiden secara mendalam dengan menghubungkan data dari berbagai sumber, menentukan jika ada sistem atau data yang

terkena *impact*, memberi saran terkait remediasi, menyediakan metode analisa untuk mendeteksi ancaman.

- **Tier 3 (SME/Hunter)**
Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai jaringan, *endpoint*, *threat intelligence*, forensik, dan *malware reverse engineering*, melakukan threat hunting, melakukan *tuning* dan implementasi *threat detection analytics*.
- **Tier 4 (SOC Manager)**
Mengelola sumber daya termasuk personel, anggaran, penjadwalan shift, dan strategi teknologi untuk memenuhi *SLA*.



Gambar 2.5.1.5.2. Hirarki Tugas dan Tanggung Jawab SOC

Untuk pemenuhan SDM untuk operasional SOC diperlukan pengetahuan dan kompetensi seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.1.5.1. Pengetahuan dan Kompetensi SDM untuk SOC

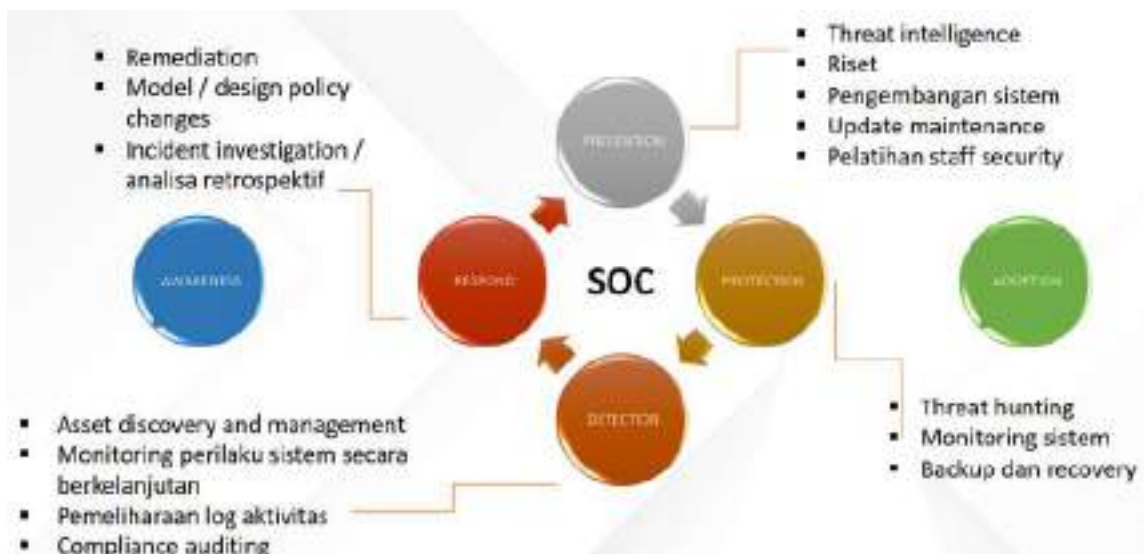
Knowledge & Skill Level	Tier-1	Tier-2	Tier-3
Basic	• CompTIA Security+ • MITRE ATTACK Framework (fundamental)	• CompTIA Security + • MITRE ATTACK Framework (fundamental)	• CompTIA Security+ • MITRE ATTACK Framework (fundamental)
Intermediate		• CompTIA CySA+ • CompTIA PenTest+ • MITRE ATTACK Framework (Intermediate)	• CompTIA CySA+ • CompTIA PenTest+ • MITRE ATTACK Framework (Intermediate)
Advance		• Cyber Intrusion Detection and Analysis • Incident Response	• CompTIA CASP+ • Incident Response

C. SOC – Process

Tahapan kegiatan yang ada di SOC terdiri dari:

- A. Deteksi (*Detection*), meliputi aktivitas:

- Pengumpulan dan Manajemen aset;
 - Pemantauan perilaku sistem secara berkelanjutan (anomali dan kejadian);
 - Pemeliharaan log aktivitas;
 - Proses deteksi;
- B. Proteksi (*Protection*), meliputi aktivitas:
- Akses kontrol
 - Pemantauan sistem
 - Rekam cadang (*backup*) dan pemulihan (*recovery*)
 - *Threat hunting*
 - Keamanan data
- C. Respon (*Respond*), meliputi aktivitas:
- Rencana respon
 - Komunikasi
 - Remediasi
 - Investigasi/analisa retrospektif
- D. Pencegahan (*Prevention*), meliputi aktivitas:
- Riset
 - Pengembangan sistem
 - Pemeliharaan pembaruan sistem
 - Pelatihan staf SOC
 - *Threat intelligence*



Gambar 2.5.1.5.3. Tahapan Kegiatan di SOC

D. SOC – Technology

SOC mengumpulkan data – data dari perangkat jaringan, server, dan lainnya seperti :

- *Network Device* (Firewall, router)
- *Security tools*
- *SaaS* (Microsoft 365, Gsuite)

- User device (laptop, PC)
- Server / virtual machine
- Workstation
- Active Directory, LDAP, DHCP
- Web application
- Digital asset (Domain, company name, Brand name, VIP email, etc)

Pilihan teknologi yang dapat diimplementasikan di SOC antara lain :

- SIEM (Security Information & Event Management)
- IDPS
- Security Monitoring dan Analytic
- Security Incident Management
- SOAR (Security Orchestration, Automation, Response)
- Threat Intelligence
- Threat Hunting
- Vulnerability management
- Log data management

E. SIEM

SIEM (*Security Information and Event Management*) pada dasarnya menyediakan analisis real-time dari *security alert* yang dihasilkan oleh aplikasi, server, perangkat security dan network. Dengan memiliki data (berbentuk *logs* dan *events*) dari berbagai perangkat IT, SIEM dapat digunakan untuk deteksi dini terhadap *targeted attack* dan pencurian data, serta untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyelidiki dan melaporkan data kejadian untuk respons insiden, forensik dan kepatuhan terhadap peraturan (*regulatory compliance*). Cara SIEM melakukan fungsi di atas adalah dengan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber, mengidentifikasi penyimpangan dari data normal dan mengambil tindakan yang tepat (peringatan dan pelaporan). Untuk mencapai tujuan utamanya, SIEM perlu melakukan beberapa tugas dan fungsi yang menjadi kemampuan utamanya, yaitu :

A. Log Management

Manajemen log dari semua data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat, seperti server, database, aplikasi dan perangkat security.

B. Data aggregation

Log Management mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk network, security, database dan aplikasi, menyediakan kemampuan untuk mengkonsolidasi data yang dimonitor, sehingga membantu untuk mencegah hilangnya data/event yang penting.

C. Correlation

Mencari atribut yang bersifat umum, dan menghubungkan peristiwa bersama menjadi informasi yang bermakna. Teknologi ini menyediakan kemampuan untuk melakukan berbagai teknik korelasi untuk mengintegrasikan berbagai sumber, untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Korelasi biasanya merupakan fungsi dari bagian Manajemen Event Keamanan dari solusi SIEM penuh.

D. Alerting

Analisis otomatis dari sebuah kejadian yang terkait dan membuat peringatan, untuk memberi tahu kepada pihak yang terkait dengan segera. Alert dapat ditampilkan ke *dashboard*, atau dikirim melalui saluran pihak ketiga seperti *email*, *telegram*.

E. Dashboards

Perangkat SIEM dapat mengambil data peristiwa dan mengubahnya menjadi informasi berbentuk grafik untuk membantu dalam melihat pola, atau mengidentifikasi aktivitas diluar pola standar.

F. Compliance

Perangkat SIEM dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengumpulan data terkait kepatuhan (*compliance*), menghasilkan laporan yang beradaptasi dengan proses keamanan, tata kelola dan audit yang ada.

G. Searching

Mencari ke semua log berdasarkan bermacam kriteria untuk tujuan analisa forensik dan melihat data lampau.

H. Retention

Menyediakan penyimpanan data historis jangka panjang untuk memfasilitasi korelasi data dari waktu ke waktu, dan untuk menyediakan retensi yang diperlukan untuk persyaratan kepatuhan. Retensi data log jangka panjang sangat penting dalam penyelidikan forensik karena amat jarang untuk menemukan pelanggaran jaringan akan terjadi pada saat pelanggaran terjadi.

I. *Security & Forensic analysis*: Kemampuan untuk mencari di log pada berbagai node dan periode waktu berdasarkan kriteria tertentu. Ini mengurangi beban, dimana harus mencari melalui ribuan bahkan jutaan log.

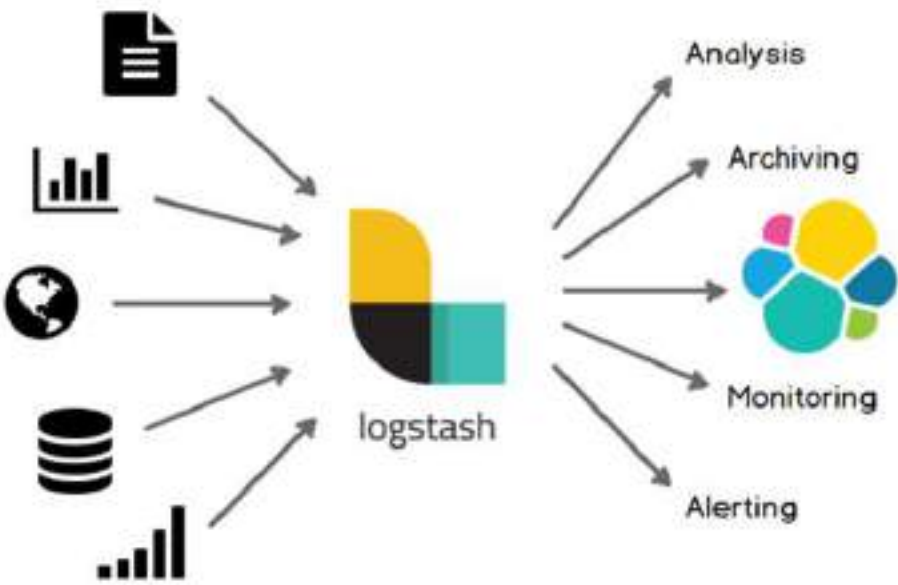
J. Berdasarkan uraian di atas SIEM memegang peran penting dalam implementasi dan operasi dari *Security Operation Center* (CSOC). Bersama dengan alat

pemantauan, forensik dan analisis lain seperti *network forensic* dan *End Point Detection and Response* (EDR), analis keamanan di SOC akan melakukan pemantauan dan analisis postur keamanan organisasi, untuk menemukan ancaman apa pun yang mungkin membahayakan dan melakukan mitigasi yang diperlukan.

- K. Terdapat beberapa solusi *proprietary platform SIEM* seperti *LogRhythm*, *Splunk*, dan *ArcSight*. Solusi ini cukup mahal, khususnya untuk pemakaian jangka panjang dan organisasi yang besar. Selain itu juga tersedia solusi open source platform antara lain *AlienVault OSSIM*, *ELK Stack*, *OSSEC*, *Wazuh*, *SIEMOnster*, dan lain – lain.

F. ELK

ELK terdiri dari 3 jenis perangkat lunak: *Elasticsearch*, *Logstash* dan *Kibana*. Semua perangkat lunak itu akan berkolaborasi satu sama lain secara *native*, mulai dari menerima log dan informasi dari berbagai sumber, sampai melaporkan, memberikan *alert* serta memvisualisasikan hasilnya. Komponen pertama yang menerima informasi adalah *Logstash*. *Logstash* adalah seperti pipa pengolahan data (*server-dise*) yang menerima data dari banyak sumber secara bersamaan, mengubahnya sesuai keinginan, dan kemudian mengirimkannya ke "penyimpanan" favorit. *Logstash* mendukung berbagai *input* yang mengambil event dari banyak sumber yang umum, semua secara *realtime*. *Logstash* juga dapat dengan mudah menerima data berbentuk *log*, metrik, aplikasi web, *data stores*, secara terus menerus, secara *streaming*. Ketika data berpindah dari sebuah sumber ke tempat lain, *Logstash* memfilter dan mengurai setiap peristiwa, mengidentifikasi *named fields* untuk membuat *structure*, dan mengubahnya menjadi kumpulan format yang umum untuk tujuan analisis, dan mendapatkan nilai bisnis yang lebih mudah dan lebih cepat.



Gambar 2.5.1.5.4. *Logstash*

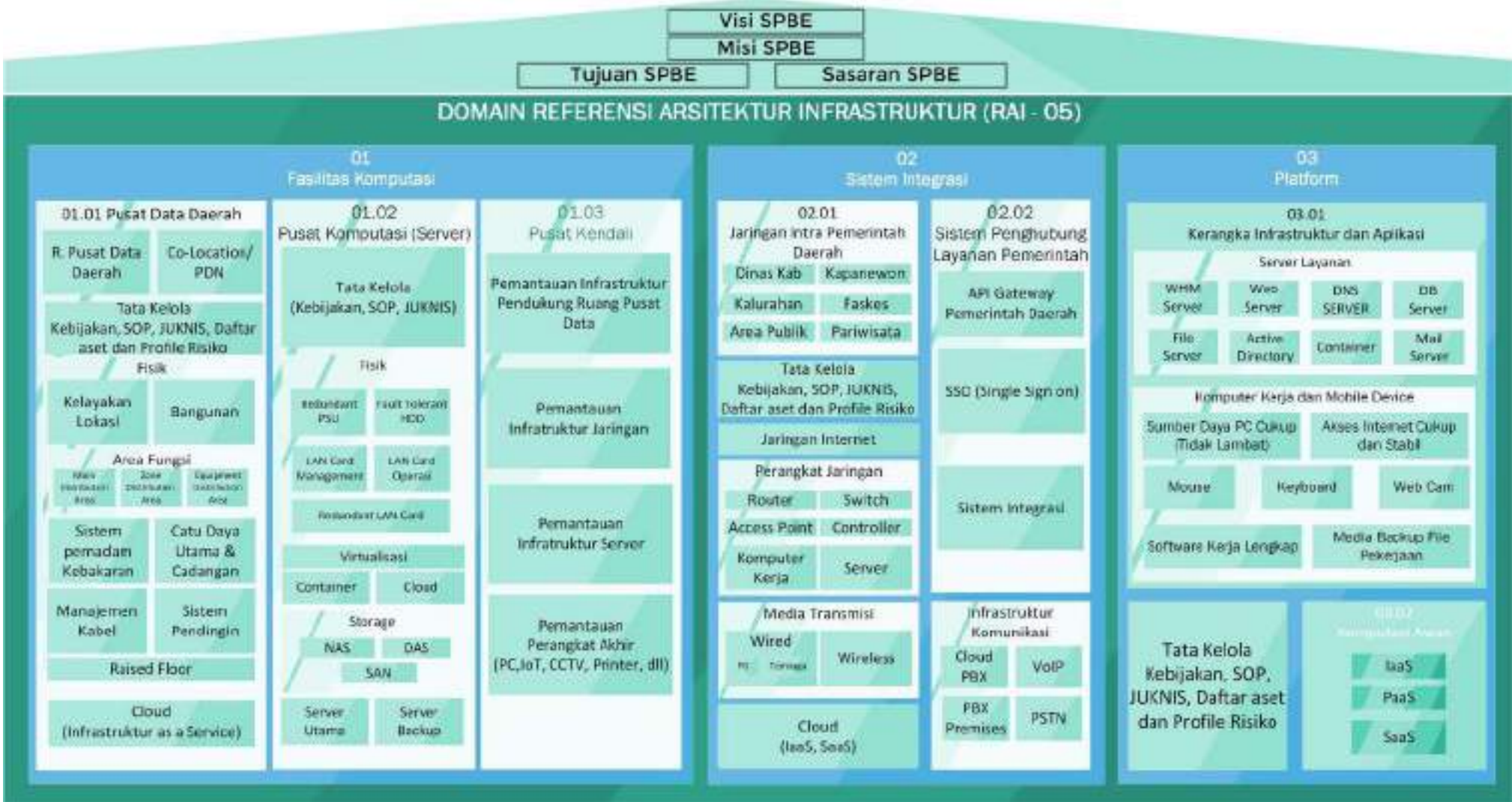
Setelah menerima, mengurai, dan mengubah data, *Logstash* akan mengirim data ke tujuan dan format apa pun. *Logstash* memiliki berbagai output yang memungkinkan mengirimkan data kemana saja, memberikan fleksibilitas untuk banyak *use-case*. Setelah *log* diterima, diubah dan diformat ulang oleh *Logstash*, akan mengirim output ke *Elasticsearch*. *Elasticsearch* adalah mesin pencarian dan analisis terdetail, berbasis *RESTful*, yang mampu memecahkan semakin banyak *use-case*. Sebagai inti dari *Elastic Stack*, *Elasticsearch* menyimpan data secara tersentralisasi, sehingga dapat menemukan data yang diinginkan dan mengungkapkan data tak terduga. *Elasticsearch* dapat digunakan untuk mencari semua jenis dokumen. *Elasticsearch* dapat melakukan dan menggabungkan banyak jenis pencarian - terstruktur, tidak terstruktur, geometrik, dan lain sebagainya.

Stack ELK terakhir sebagai *SIEM* dan alat *Log Management* adalah *Kibana*. *Kibana* adalah platform *analytics* dan *visualization* berbasis *OSS* yang dirancang untuk bekerja dengan *Elasticsearch*. Dengan *Kibana* dapat memvisualisasikan data *Elasticsearch* dan menavigasi *Elastic Stack*. *Kibana* untuk mencari, melihat, dan berinteraksi dengan data yang disimpan dalam indeks *Elasticsearch*.



Gambar 2.5.1.5.5. Hubungan antar *Stack* pada *ELK*

2.5.2. Infrastruktur SPBE To Be



Gambar 2.5.2.1. Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

2.5.2.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI merupakan tulang punggung dalam integrasi proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai media transfer data dari pusat data ke pengguna data atau dari sumber data ke pusat data. Untuk menjamin data terkirim dengan baik dan aman, maka pengembangan infrastruktur TI harus memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:



Gambar 2.5.2.1.1 Prinsip Pengembangan Infrastruktur SPBE

- A. Peningkatan Kapasitas (Scalable)

Kemampuan infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menangani pertumbuhan beban kerja dengan lancar. Data, proses, dan pengguna seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah besar dan kompleks sehingga menuntut infrastruktur TI untuk beradaptasi dengan tuntutan bisnis tersebut.
- B. Kemudahan Pengelolaan (Manageable)

Pengelolaan infrastruktur TI oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan mudah dilakukan melalui alat pengelolaan infrastruktur TI maupun dengan mempelajari infrastruktur yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu contoh kemudahan dalam pengelolaan adalah pengalokasian IP Address menggunakan DHCP (Domain Host Control Protocol) oleh sistem administrator, sehingga memudahkan dalam mengatur IP Address komputer pengguna dalam jumlah besar.
- C. Tingkat Ketersediaan Tinggi (Available)

Infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat beroperasi sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati atau ditarget. Pencegahan terhadap kegagalan, komponen infrastruktur TI dapat memanfaatkan redundancy. Redundancy merupakan mekanisme penduplikasian komponen kritis pada infrastruktur TI, sehingga ketika komponen utama mengalami kegagalan fungsinya dapat digantikan oleh komponen cadangan.
- D. Kemudahan dalam Perbaikan (Serviceable)

Kemampuan infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam kemudahan perbaikan infrastruktur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. SLA

terkadang mencantumkan persyaratan *downtime* dari sebuah komponen infrastruktur TI, sehingga kemudahan dalam perbaikan sangat diperlukan untuk mempertahankan SLA tersebut. Kemudahan dalam perbaikan infrastruktur TI (*server, storage, dll*) jika terjadi kerusakan dapat diperoleh dengan memilih teknologi teruji di industri dan memiliki dukungan teknis dari *vendor* yang dapat diandalkan.

E. Keamanan (*Secure*)

Infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data maupun sistem. Keamanan tidak hanya melibatkan pencegahan akses yang tidak sah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui infrastruktur TI terjaga keasliannya. Sebagai contoh, pengguna harus melewati proses otentikasi dan otorisasi sebelum mengakses sistem, dan digital signature dapat digunakan untuk memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan tidak berubah selama proses transfer.

2.5.2.2. Pusat Data

Infrastruktur *server, storage*, perangkat jaringan, dan perangkat keamanan jaringan perlu ditempatkan, disimpan pada suatu lokasi yang terstandarisasi untuk sistem elektronik maupun pengolahan data yang disebut pusat data. Selain itu juga untuk menjaga keberlangsungan layanan dan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia maka diperlukan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).

Berikut ini adalah prinsip dan kriteria dalam perancangan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana antara lain adalah:

A. Ketersediaan (*Availability*)

Pusat data dibuat untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Pusat data harus dibuat sebisa mungkin menghindari kegagalan (*zero-failure*) untuk seluruh komponennya.

B. Skalabilitas (*Scalability*)

Pusat data harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika ada servis baru yang harus disediakan oleh pusat data tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi pusat data secara keseluruhan. Selain itu juga kemudahan dalam implementasi tanpa perlu membeli komponen infrastruktur tambahan, dan aplikasi.

C. Keamanan (*Security*)

Pusat data menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga berupa aset fisik (*tangible*) seperti perangkat pusat data, jaringan, dan lain - lain maupun non fisik (*intangible*) yakni data data dan informasi. Oleh karenanya sistem pengamanan

pusat data dibuat seketat mungkin meliputi pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.

D. Kemudahan *Backup dan Recovery*

Pusat data yang ada mudah untuk di *backup* termasuk seluruh konfigurasi sistem. Jika terjadi *crash* atau kerusakan pada *pusat data* maka mudah untuk di *recovery* tanpa perlu instalasi dan konfigurasi sehingga hemat waktu, tenaga dan sumber daya.

E. Kemudahan *Deployment*

Pusat data dapat digandakan (*cloning*) dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi sehingga mempercepat proses implementasi suatu sistem.

F. Fleksibel (*Flexibility*)

Kemudahan dalam pengelolaan pusat data seperti ketika ingin memindah, merubah *resource* bahkan ketika kita ingin melakukan *live migration* atau memindahkan pusat data dalam keadaan hidup tanpa mengalami *down*. Apabila terjadi kerusakan/*error* pada *server, storage* yang ditempatkan di pusat data dapat dilakukan penginstalan dan pemulihan (*recovery*) kembali.

G. Redudansi

Untuk menjamin ketersediaan dan kinerja aplikasi maka diperlukan redudansi aplikasi, basis data (*database*) dengan menggunakan teknik *clustering* dan duplikasi pusat data. *Clustering pusat data* aplikasi dapat membagi beban kerja pusat data (*load sharing*) dan duplikasi pusat data dapat menjaga ketersediaan aplikasi (*fail-over*).

H. Pemulihan Bencana yang Lebih Baik

Memiliki tingkat fleksibilitas dalam rencana pemulihan bencana yang lebih mudah untuk diberlakukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Jika terjadi bencana yang menyerang pusat data, proses pemindahan pusat data aplikasi ke tempat lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

I. Penghematan

Prinsip penghematan yang dimaksud meliputi:

1. Optimalisasi Pusat Data

Operasionalisasi pusat data akan optimal jika infrastruktur *server, storage*, dan lainnya yang ditempatkan pada ruang *server* sesuai dengan perencanaan kapasitas pusat data.

2. Hemat Listrik dan *Hardware*

Teknologi virtualisasi pusat data dapat menghemat penggunaan sumber daya listrik, dan perangkat keras pendukung pusat data, seperti: sistem pendingin ruangan, dan lainnya.

3. Hemat Ruang/Rack Pusat Data

Semakin sedikit jumlah server fisik berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika pusat data ditempatkan pada suatu *colocation* pusat data, akan berimbas pada pengurangan biaya sewa.

4. Tidak Terikat pada Satu Vendor

Pusat Data hendaknya tidak tergantung pada satu vendor, atau *platform* tertentu karena hal ini akan memudahkan proses pengembangan dan pemulihan jika terjadi kerusakan pada aplikasi.

5. Aplikasi Lama Masih Dapat Digunakan

Ketika ada aplikasi lama yang sudah tidak bisa berjalan di modern *Operating System (OS)* saat ini (misalnya aplikasi *DOS*) maka aplikasi tetap dapat dijalankan dengan teknologi tertentu pada pusat data yang ada.

6. Keamanan

Jika terjadi kasus pusat data di *hack* dan data penting dalam pusat data dihapus/dirusak maka proses mengembalikan pusat data dan data penting dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu untuk menghapus *backdoor* dan *malware* yang ditinggalkan *hacker* tersebut juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Sesuai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2018 tentang Standarisasi Infrastruktur pusat data, penyelenggara pusat data harus memperhatikan:

1. Lokasi pusat data hendaknya aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan pusat data.
2. Rancangan dan bangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan kajian kebutuhan bisnis dan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*).
3. Kapasitas *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*).
4. Jalur *supply utility* dan logistik untuk keberlangsungan layanan Pusat Data. menyediakan *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*).
5. Sistem pemantauan lingkungan pusat data (*environment monitoring system*) yang meliputi antara lain monitoring temperatur, kelembaban, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik.
6. Standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan.
7. Rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif

8. SNI Pusat Data

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pusat data terdiri dari:

1. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Bagian seri standar pusat data ini bertujuan untuk memberi panduan spesifikasi teknis pusat data yang diberlakukan di wilayah Indonesia bagi penyedia layanan berbasis elektronik, baik penyedia layanan berbasis elektronik untuk publik maupun yang dipergunakan untuk keperluan sendiri.



Gambar 2.5.2.2.1 SNI No 8799-1:2019 - Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Standar Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data merinci persyaratan spesifikasi teknis pusat data sebagai berikut:

a. Spesifikasi gedung

- Lokasi Gedung Pusat Data

Ketentuan lokasi gedung pusat data antara lain tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG, tidak berada pada lokasi rawan huru hara, perkampungan padat atau kumuh, jarak dengan arteri lalu lintas (jalan raya utama dan jalur kereta api) minimal 91m.

- Ketahanan gempa

Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II.

- Ketahanan beban gedung

Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah beban merata bukan hanya pada tulang lantai.

- Pembagian ruangan

Pembagian ruangan meliputi area perkantoran (area publik, pribadi, ruang fasilitas penunjang), area telekomunikasi, dan area pusat data.

- Ketahanan material gedung
Persyaratan ketahanan material gedung meliputi persyaratan ketahanan api dan ketahanan pengembungan.
- Sistem monitoring gedung
Sistem monitoring gedung pusat data memiliki fitur sekurang - kurangnya antara lain pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, pelayanan penghuni atau tamu, pengelolaan pengamanan dan pengelolaan energi.

b. Spesifikasi sistem kelistrikan

- Catu daya listrik
Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan dari catu daya listrik primer atau catu daya listrik sekunder.
- Sistem kelistrikan berkesinambungan
Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan berkesinambungan dengan catu daya cadangan seperti genset dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dengan pemisahan panel-panel distribusi listrik untuk area pusat data hingga perangkat yang berada didalam gedung pusat data.
- Persediaan bahan bakar
Pusat data memiliki tangki bahan bakar penyuplai genset dengan jumlah dan kapasitas minimum tertentu untuk melayani operasi pusat data.
- *Uninterruptible Power Supply* (UPS)
Pusat data memiliki UPS untuk menjaga ketersediaan kelistrikan tidak terputus. Kapasitas Perhitungan kapasitas UPS minimum yakni beban puncak pusat data sebelum arus kelistrikan digantikan oleh arus listrik dari genset. Pusat data memiliki sekurang-kurangnya 120% kapasitas listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pusat data dengan prioritas utama, beserta ruang-ruang lain yang yang diperlukan dalam operasi pusat data. Tersedia sambungan langsung otomatis atau manual untuk sistem kelistrikan yang diperlukan dalam perawatan jaringan kelistrikan.
- Analisis sistem listrik
Pusat data memiliki analisis sistem listrik untuk mendapatkan kapasitas ukuran dari pemutus arus sesuai dengan beban yang ada sehingga jika terjadi hubungan singkat pada perangkat teknologi informasi tidak menyebabkan pemutus arus utama terputus.
- Konstruksi panel listrik
Setiap panel listrik memiliki persyaratan konstruksi khususnya untuk panel induk pada masing-masing kategori strata pusat data.

- Jalur kabel listrik

Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik. Setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram.

- Penumbumian

Pusat data memiliki pennumbumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrik, perangkat dari bahan metal dan pennumbumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011. Pusat data memiliki sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pennumbumian dengan ketahanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ohm.

- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*)

Memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pusat data.

c. Spesifikasi sistem pendinginan

Pusat data memiliki dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin, skema diagram sistem pendinginan, jaminan layanan purna jual, nomor kontak layanan, dan kontrak perawatan. Pengoperasian peralatan teknologi informasi di dalam area pusat data dan area telekomunikasi harus memenuhi pengukuran:

- Temperatur ruangan : 18°C – 27°C;
- Tingkat perubahan temperatur ruangan per-jam maksimum : 5°C;
- Kelembaban ruangan : RH (*Relative Humidity*) $\leq$ 60%, titik embun : 5.5°C – 15°C; dan
- Tingkat perubahan kelembaban ruangan maksimum per-jam : 5% RH.

Penyusunan posisi rak pusat data harus mampu memisahkan jalur panas dan dingin. Jalur panas adalah bagian belakang dari rak pusat data. Jalur dingin adalah bagian depan dari rak pusat data sebagai jalur masuk udara dingin dari sistem pendingin.

Bagian pada rak pusat data yang kosong harus ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal. Insulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pengembunan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara ruang pusat data dengan ruang sekitarnya. Insulasi dapat berupa material pelindung berbahan *aluminium foil* berserat dan karet berbahan NBR sesuai ISO 6944-1.

d. Spesifikasi sistem jaringan data

Pusat data memiliki topologi jaringan data terperinci pada area ruang pusat data dan ruang interkoneksi telekomunikasi. Pusat data memiliki topologi distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat data. Distribusi jaringan dapat menggunakan berbagai moda kabel dan berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel. Pusat data

memiliki sistem monitoring jaringan dengan *fitur* peringatan dini dan alur alternatif sesuai dengan kategori strata pusat data.

e. Spesifikasi sistem kebakaran

Spesifikasi sistem kebakaran ditinjau dari berbagai aspek, seperti pemilihan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran (seperti *sprinkler*, alat pemadam api, dan detektor asap), sistem alarm, konfigurasi jaringan, dan prosedur pengujian dan pemeliharaan. Tujuan dari tinjauan spesifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa sistem kebakaran dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran terjadi, sehingga dapat melindungi keamanan dan keselamatan manusia serta properti yang berharga. Sistem pemadam kebakaran yang ada di pusat data perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik. Pusat data hendaknya memiliki sistem monitoring dan deteksi dini bahaya kebakaran yang meliputi deteksi asap dan deteksi panas dengan moda sinar ultra.

f. Spesifikasi sistem *monitoring* lingkungan

Pusat data memiliki sistem *monitoring* lingkungan yang terdiri dari:

- stabilitas tegangan arus listrik dan penggunaan daya listrik yang dapat memberikan peringatan sebelum terjadi kelebihan beban;
- suhu perangkat serta kelembaban relatif ruangan di dalam area pusat data dan area telekomunikasi; dan
- sistem pemipaan dengan *fitur monitoring* kebocoran pipa air atau genangan di bawah *raised floor*.

g. Spesifikasi sistem keamanan fisik

Spesifikasi sistem keamanan fisik mencakup berbagai aspek seperti pemilihan dan pemasangan perangkat keamanan fisik (seperti kamera, sensor gerak, dan alarm), konfigurasi jaringan, sistem kontrol akses, dan prosedur pengujian dan pemeliharaan. Spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keamanan fisik dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna, serta dapat melindungi aset dan sumber daya dari ancaman keamanan. Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari. Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan tentang desain dan penetapan pengaturan manajemen pusat data, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat data, serta menyediakan contoh-contoh untuk dipertimbangkan dalam manajemen pusat data. Manajemen pusat data perlu diterapkan secara sistematis dan konsisten agar penyediaan layanan pusat data yang berkualitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Standar Panduan Manajemen Pusat Data dapat digunakan oleh penyelenggara yang bertanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan Pusat Data, meliputi: perencanaan, operasional, manajemen layanan, manajemen SDM, monitoring, pelaporan dan pengendalian, serta manajemen keberlangsungan.



Gambar 2.5.2.2.2 SNI: No 8799-2:2019-Panduan Manajemen Pusat Data

Panduan Manajemen Pusat Data sebagai berikut :

- a. Perencanaan
Meliputi analisis kebutuhan, serta manajemen risiko dan kesesuaian.
- b. Operasional
Meliputi organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan operasional pusat data, infrastruktur (lokasi pusat data, manajemen fasilitas pusat data, manajemen aset, manajemen konfigurasi).
- c. Manajemen layanan
Meliputi manajemen layanan pusat data (sistem manajemen tingkat layanan, manajemen keselamatan, manajemen keamanan, dan manajemen proyek).
- d. Manajemen SDM
Meliputi pengelolaan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja.

- e. Monitoring, pelaporan dan pengendalian
Lingkup monitoring meliputi aktivitas pada gedung pusat data, aktivitas yang sedang berlangsung. Pelaporan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan, dan resolusi akhir kejadian. Perubahan kendali tercatat dalam dokumen pengendalian.
- f. Manajemen keberlangsungan
Meliputi manajemen keberlangsungan kegiatan, dan manajemen keberlangsungan lingkungan.
- g. Pengembangan Pusat Data

1. Topologi Pusat Data

Terdiri dari sistem-sistem pendukung, infrastruktur utama, dan infrastruktur pendukung pusat data. Rincian topologi pusat data sebagai berikut :

- a. Sistem-sistem pendukung pusat data meliputi:
 - Sistem kelistrikan;
 - Sistem pendingin dan kelembaban;
 - Sistem pemadam kebakaran;
 - Sistem pengkabelan;
 - Desain ruang komputer, meliputi: *raised floor*, *cable tray*, dan lokasi *rack* pusat data;
 - Sistem keamanan;
 - Sistem pencahayaan; dan
 - Sistem pemantau lingkungan.
- b. Infrastruktur Utama pusat data meliputi :
 - Infrastruktur jaringan;
 - Infrastruktur pusat data & *storage*;
 - Model pusat data; dan
 - Aplikasi pendukung (*Software*).
- c. Infrastruktur Pendukung pusat data meliputi :
 - *Local Area Network*;
 - *Wireless LAN*;
 - WAN;
 - *Remote Access* dan VPN;
 - Internet; dan
 - Telekomunikasi.

2. Ruang Pendukung

Ruang pendukung pusat data adalah ruangan-ruangan untuk menempatkan perangkat-perangkat pendukung operasional pusat data seperti ruang perangkat sistem pendingin dan kelembaban, ruang perangkat *fire suppression*, dll. Ruang operasional dan pemantauan pusat data juga termasuk ruang pendukung pusat

data. Rincian ruang pendukung pusat data yang direkomendasikan antara lain:

- a. *Lobby*
Lokasi ruang tunggu tamu, rekanan, penukaran kartu identitas dengan kartu akses.
- b. *Security*
Lokasi ruang operasi keamanan meliputi pemantauan CCTV, kontrol akses ke ruangan.
- c. *Office*
Ruang kerja administrasi pusat data termasuk ruang kepala pusat data.
- d. *Facility Control*
Ruang kontrol fasilitas pusat data seperti kontrol suhu dan kelembaban, power, listrik dan lain – lain.
- e. *Hall*
Ruang serba guna yang bisa digunakan untuk kegiatan meeting dalam jumlah besar atau lainnya.
- f. *Operations Command Center*
Petugas memonitor pusat data melalui *dashboard* yang ditayangkan dalam layar lebar.
- g. *Network Room*
Lokasi rak perangkat jaringan dan keamanan jaringan. Semua struktur kabel data baik UTP maupun *fiber optic* berakhir di ruang jaringan.
- h. *Meet Me Room*
Ruang terminasi (akhir) kabel jaringan dari *provider internet* (ISP), dan telekomunikasi.
- i. *Network Operating Center*
Ruang pemantauan kinerja jaringan pusat data yang ditayangkan melalui *dashboard*.
- j. *Meeting Room*
Ruang pertemuan untuk rapat atau diskusi pengelola pusat data.
- k. *Fire Suppression System*
Ruang untuk menempatkan perangkat – perangkat pendukung sistem pemadam kebakaran (*fire suppression*).
- l. *UPS*
Ruang untuk perangkat UPS pendukung catu daya cadangan ruang pusat data, lampu, cctv, access control dll.
- m. *UPS Battery*
Ruang *battery* UPS yang terpisah dari UPS sehingga mudah untuk perawatan dan penggantian *battery*.

- n. *Loading Dock*
Tempat untuk menerima peralatan yang baru datang untuk pusat data.
- o. *Build Room/Staging Area*
Tempat untuk membangun dan mengkonfigurasi peralatan yang akan digunakan bagi pusat data.
- p. *Chiller*
Ruang untuk perangkat *chiller* pendingin suhu.
- q. *Warehouse*
Ruang untuk perangkat listrik.
- r. *Genset Room*
Ruang untuk meletakkan perangkat generator pembangkit listrik cadangan (*genset*).
- s. *Trafo*
Ruang untuk meletakkan trafo listrik dari PLN.
- t. *Solar Tank*
Ruang untuk menyimpan solar sebagai bahan bakar *genset*.
- u. Ruang Mekanik
Ruang kerja *Mechanical Engineering (ME)*.
- v. Ruang *Sparepart*
Ruang gudang penyimpanan suku cadang (*sparepart*) perangkat *mechanical* dan listrik pusat data.

3. Sistem Kelistrikan

Sistem kelistrikan meliputi catu daya utama dan catu daya cadangan. Catu daya utama berasal dari listrik PLN sedangkan catu daya cadangan berasal dari generator, dan UPS. Ketentuan tentang sistem kelistrikan di pusat data sebagai berikut:

- a. Kabel daya masuk ke dalam bangunan pusat data determinasi di ruang kendali penyambungan listrik yang handal;
- b. Daya listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak di mana pusat data berada;
- c. Tersedianya catu daya listrik alternatif seperti *generator standby* dengan kapasitas yang memadai untuk operasional minimal 3 jam selama kejadian gangguan listrik utama;
- d. Perangkat *pusat data, storage, jaringan, keamanan pusat data & jaringan, CCTV, access control*, penerangan harus diproteksi dengan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* atau catu daya cadangan lainnya;
- e. UPS atau catu daya cadangan lainnya harus memiliki kapasitas memadai untuk memasok beban pusat data sampai catu daya

- alternatif mampu memikul beban perangkat pusat data (*steady-state*);
- f. Kapasitas UPS harus lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS;
 - g. UPS memiliki sistem pelaporan, pemantauan kinerja, dan sistem peringatan;
 - h. UPS yang digunakan telah memiliki jaminan dari pabrikan untuk dapat berfungsi sesuai spesifikasinya;
 - i. Bangunan harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir;
 - j. Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih (*surge suppressor*) sebelum ke ruang pusat data;
 - k. Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (*grounding*) tembaga yang menjadi titik acuan pembumian ruangan tersebut;
 - l. Sistem *grounding* untuk peralatan pusat data harus dibedakan dengan peralatan lainnya seperti sistem penangkal petir pada bangunan pusat data; dan
 - m. Semua benda logam harus terikat ke tanah termasuk lemari, rak, PDU, CRAC (AC Ruang pusat data), jalur kabel, dan setiap *raised floor* dengan *resistensi grounding* kurang dari 1 Ohm.

Kebutuhan listrik di pusat data untuk mendukung dua komponen yakni peralatan TI dan peralatan pendukung seperti tabel di bawah ini :

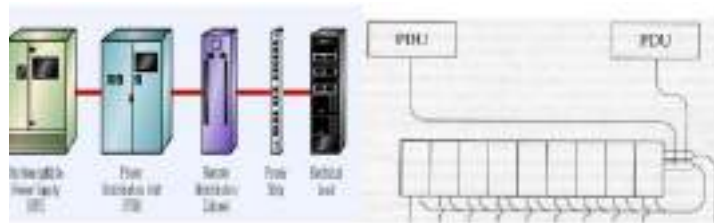
Listrik utk Peralatan IT	Listrik utk Pendukung DRC
• UPS • PDU • Cabling • Network Devices • Servers • Storage	• Sistem Pendingin • Pencahayaan • Fire Suppression • Keamanan – Access Door & CCTV • Generator

Gambar 2.5.2.2.3. Kebutuhan Listrik Pusat Data

4. Distribusi Listrik Ruang Pusat Data

Sistem kelistrikan di pusat data akan didistribusikan ke perangkat utama di dalam ruang komputer pusat data dengan dua teknik yakni:

- a. Distribusi secara langsung dari PDU (*Power Distribution Units*)
Dari PDU listrik akan didistribusikan ke setiap lokasi kabinet tanpa melalui perantara apapun. Namun untuk pusat data yang berkapasitas besar hal ini tidak mungkin dilakukan karena tidak efisien dari segi pengkabelan.
- b. Distribusi melalui *panel circuit*
PDU akan menuju ke *panel circuit* dan dari tempat tersebut akan didistribusikan ke masing-masing lokasi kabinet. Hal ini, jauh lebih efisien dari segi pengkabelan karena dapat meminimalkan jarak yang jauh antara lokasi kabinet pusat data dengan PDU.



Gambar 2.5.2.2.4 Distribusi Listrik dari PDU melalui Panel Circuit.

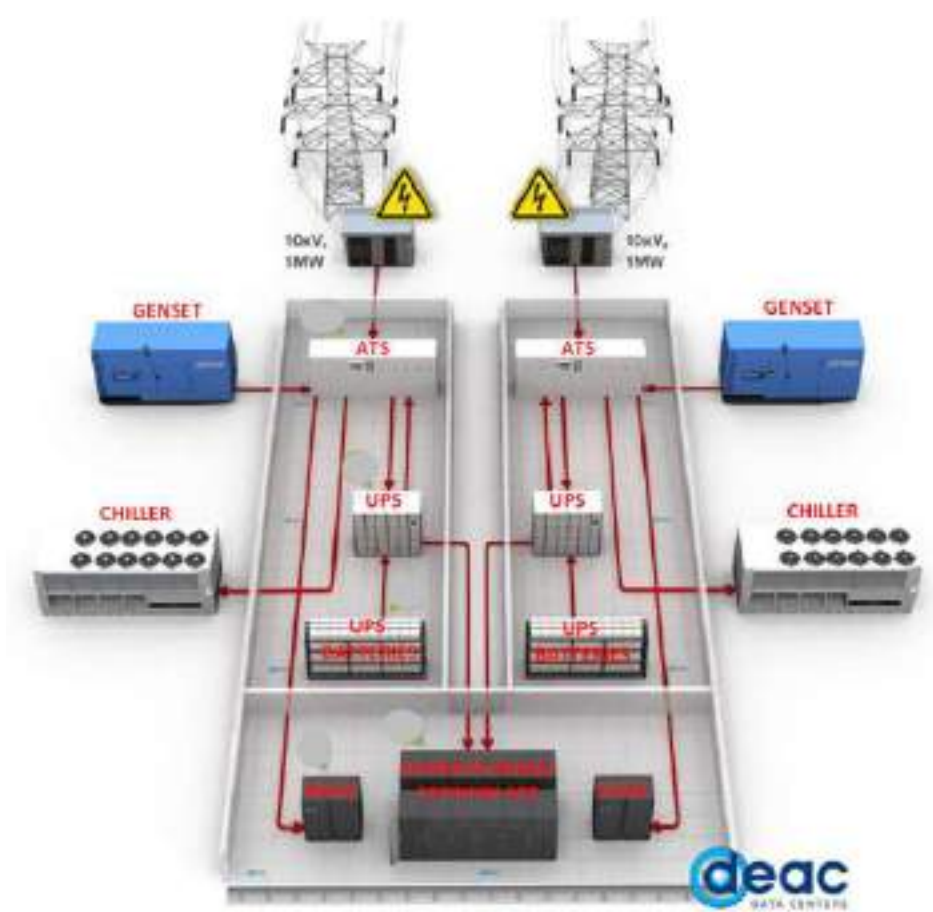
Gambar di atas adalah distribusi listrik dengan menggunakan *panel circuit* yang tersebar di perangkat *remote distribution cabinet* untuk mendistribusikan listrik dari perangkat UPS ke beberapa panel sirkuit melalui PDU. *Distribution cabinet power* dari perangkat UPS akan diteruskan ke PDU untuk selanjutnya didistribusikan ke beberapa panel circuit (*remote distribution cabinet*). Untuk selanjutnya *power* akan didistribusikan ke *power strip* yang ada di tiap rak *cabinet*. Di setiap *power strip* terdapat perangkat untuk pemantauan beban listrik (*electrical load*).

5. Redudansi Sumber Listrik

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang tinggi maka diperlukan redudansi pada perangkat utama maupun cadangan dan jalur masuk ke pusat data. Saluran listrik ke lokasi pusat data berasal dari sumber gardu listrik yang berbeda. Selain itu, jalur masuk ke pusat data dari arah yang berbeda juga.

Redudansi sumber listrik utama (PLN) dan sumber listrik cadangan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan kehandalan dari pusat data. Redudansi meliputi sumber listrik PLN dari gardu listrik

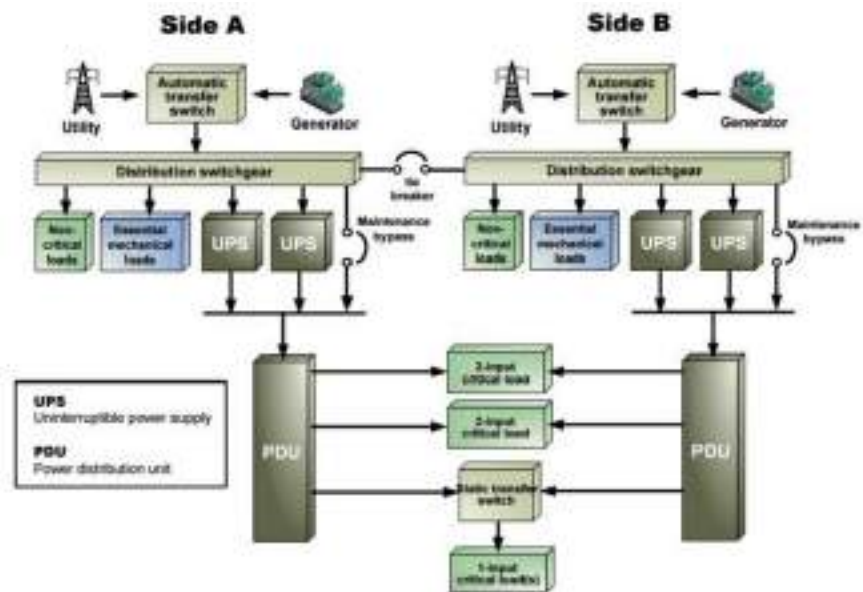
yang berbeda, jalur (lintasan) aliran listrik dari gardu menuju kawasan pusat data. Selain itu juga redudansi dari perangkat sumber listrik cadangan seperti generator, UPS, dan *automatic transfer switch* (ATS).



Gambar 2.5.2.2.5. Instalasi Jaringan Listrik dan Pendukung DC

Gambar di atas adalah gambar fisik instalasi sistem kelistrikan yang redundan. Listrik utama DC berasal dari dua sumber yang berbeda dengan jalur masuknya pun berbeda. Perangkat pendukung sistem kelistrikan, sistem pendingin diletakkan pada posisi yang berbeda yang memiliki jalur distribusi sendiri. Desain ini untuk menghindari adanya kegagalan pada sistem listrik atau pendingin karena adanya kerusakan pada salah satu jalur. Rak pusat data akan memiliki dua *power strip* dan akan ada *receptacle* yang berbeda juga disetiap pusat data.

Gambar di bawah ini adalah topologi infrastruktur jaringan kelistrikan secara logik. Setiap PDU terhubung ke sumber listrik cadangan (UPS) yang berbeda dengan sumber listrik utama dari dua sumber juga.



Gambar 2.5.2.2.6. Instalasi Logik dari Sistem Kelistrikan

6. Listrik Cadangan (*Standby Power*)

Sistem listrik yang berperan sebagai *standby power* pada pusat data merupakan sumber tenaga *back-up* ketika sistem listrik utama mengalami kegagalan. *Standby power* yang dibuat mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu redundansi, kesederhanaan, dan biaya. Berbagai perangkat terkait dengan *standby power* pada pusat data antara lain generator, UPS, dan baterai.

Berdasarkan fungsinya, UPS merupakan sebuah perangkat elektronik yang mampu menggantikan sementara, bahkan memperbaiki pasokan listrik yang diterima oleh satu atau beberapa perangkat yang dikoneksikan ke jalur keluaran UPS. Topologi UPS ada tiga, yaitu *offline UPS*, *online UPS* atau yang dikenal dengan *line-interactive UPS*, serta *true-online double conversion UPS*. Ketiganya memiliki perbedaan sangat mendasar, terutama pada besaran waktu perpindahan dari sumber listrik utama atau PLN ke sumber listrik UPS, yaitu baterai. Jika terjadi putus aliran listrik dari PLN, jika beban yang akan di-*back-up* oleh UPS adalah beban yang kritikal, maka sebaiknya menggunakan *True-online Double Conversion UPS* karena waktu perpindahannya adalah nol detik.

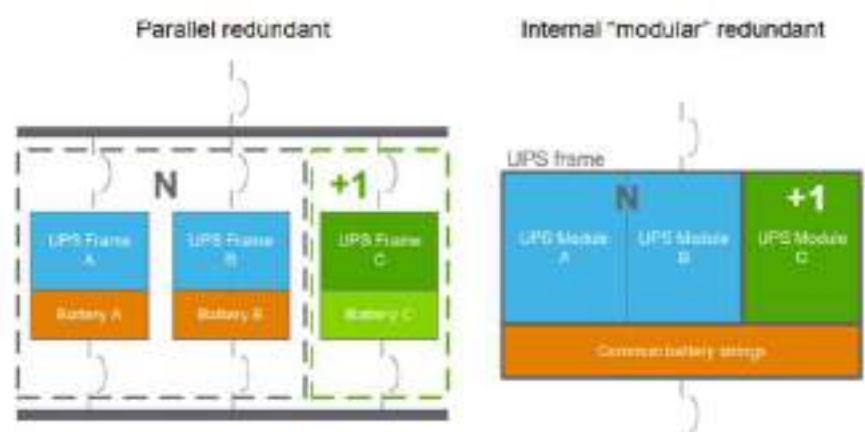
Selain lamanya waktu perpindahan, yang perlu dicatat adalah kehandalan dari masing-masing tipe terhadap kemampuan menangani permasalahan yang timbul dari jaringan listrik PLN, yaitu antara lain adalah kemampuan menangani tegangan naik atau turun, harmonik, *sag* (mati sesaat atau berkedip), *swell* (lonjakan tegangan), pergeseran fase, dan kemampuan untuk menerima daya dari genset sebagai pengganti listrik PLN untuk

beberapa jam per-hari. *UPS* untuk *DC* sebaiknya memiliki kriteria antara lain:

- *UPS* memiliki *power factor* 0.9% agar efisien dan dapat diandalkan;
- *Runtime UPS* atau kemampuan *UPS* hidup selama sumber utama mati yakni *UPS* dapat bertahan 30 menit sampai 60 menit; dan
- Perhitungan kapasitas *UPS* adalah lebihkan 25% dari beban puncak.

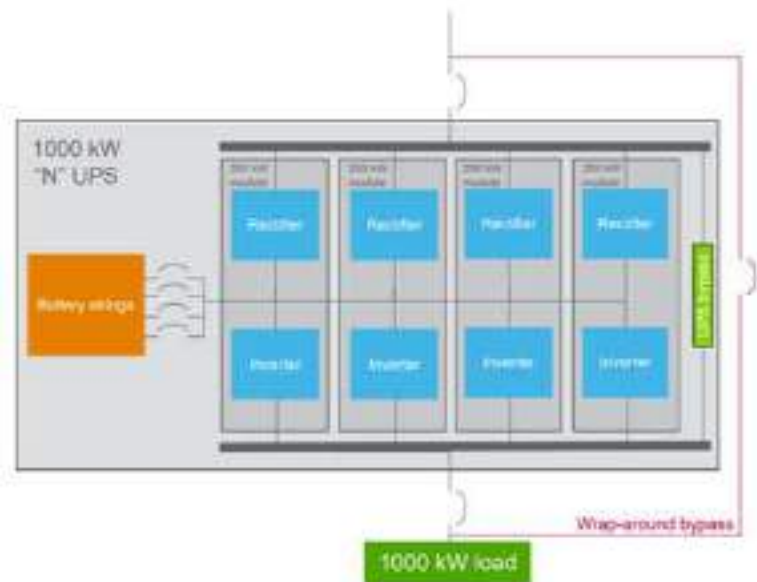
a. Redudansi UPS

Redudansi *UPS* terdiri dari dua model yakni *parallel redundant* atau *internal modular redundant*. *Parallel redundant* merupakan perangkat *UPS* yang terdiri dari *UPS Module* dengan baterai redundan $N+1$, dimana N adalah jumlah *UPS* pada beban puncak. Selain itu, *internal modular redundant* merupakan jumlah modul *redundant* tanpa baterai. Secara umum, gambar di bawah memberikan informasi topologi perangkat *UPS* dengan dua model, yakni: *parallel redundant* dan *internal modular redundant*.



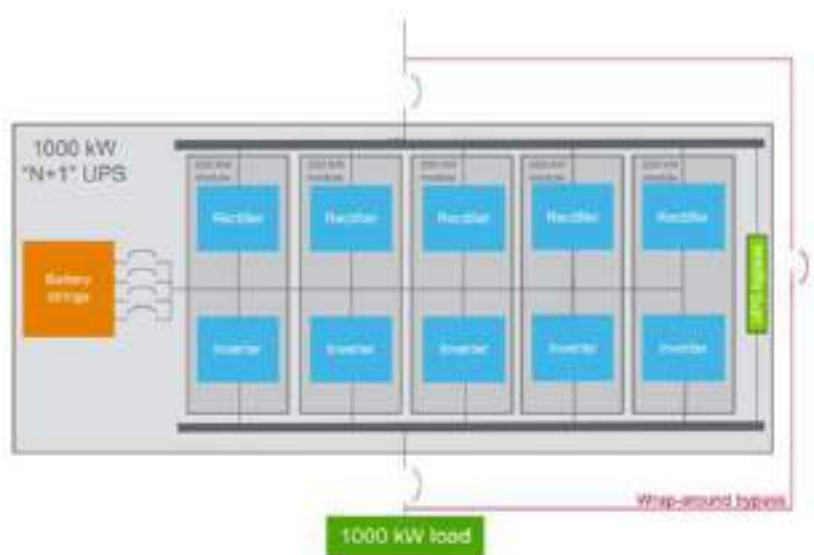
Gambar 2.5.2.2.7. Perbandingan Dua Model UPS DC

Gambar berikut menunjukkan contoh topologi perangkat *UPS* dengan kapasitas 1000kW yang terdiri dari 4 modul masing-masing 250kW, dimana *baseline 1N configuration* adalah satu *UPS* dengan empat modul tanpa *redundant*.



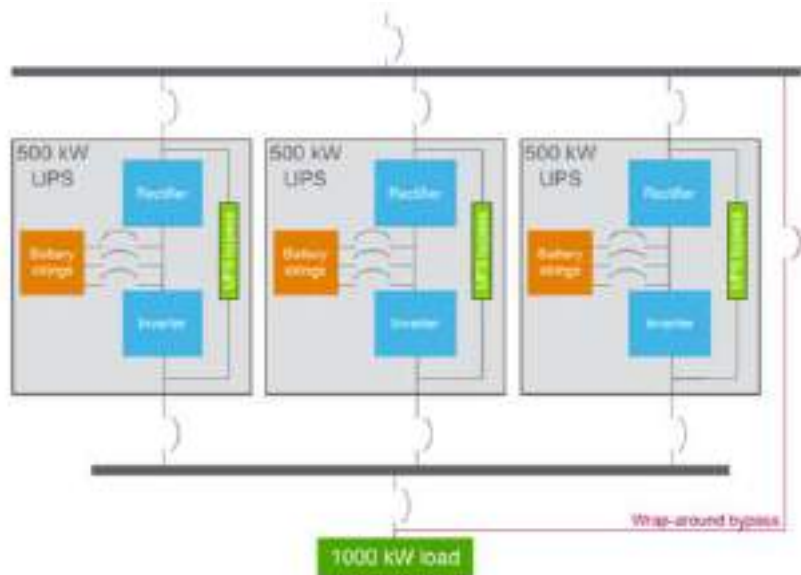
Gambar 2.5.2.2.8. UPS dengan Empat Modul Tanpa Redudansi

Gambar berikut menunjukkan topologi *UPS* dengan konfigurasi *N+1* yang redundan secara internal dengan model modular. Terdapat lima modul *UPS*, yaitu empat modul utama dan satu cadangan.



Gambar 2.5.2.2.9. UPS dengan *Internally Modular Redundancy*

Gambar berikut menunjukkan topologi *UPS* dengan konfigurasi *N+1* yang redundan secara paralel. *UPS* utama terdiri dari dua modul dengan masing-masing daya 500 kW, serta satu modul cadangan dengan daya 500 kW.



Gambar 2.5.2.2.10. UPS dengan *Parallel Redundant N+1*

b. *Fault Tolerance UPS*

Fault Tolerance adalah kegiatan yang memungkinkan suatu sistem untuk terus beroperasi (dalam hal ini, mendukung beban TI) jika terjadi kegagalan beberapa komponen. Beberapa *UPS* dirancang dengan tingkat toleransi kesalahan yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, dalam pemilihan *UPS* penting untuk mempertimbangkan atribut desain toleransi kesalahan provinsi terutama jika arsitektur yang dipilih terdiri dari satu bingkai *UPS* (seperti pada konfigurasi 1 dan 2). Di bawah ini contoh atribut desain toleransi kesalahan:

- Redudansi modul daya (*inverter/penyearah*);
- Redudansi penggemar;
- Redudansi catu daya pada pengontrol;
- Redudansi *string* baterai;
- Redudansi bus komunikasi;
- Redundansi dalam sistem kontrol; dan
- Saklar statis berukuran lebih besar dari beban maksimum yang diharapkan untuk mengakomodasi muatan *in-rush/step* peralatan IT.

7. Sistem Pendingin dan Kelembaban

Sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembaban di ruang pusat data tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat di dalam ruang pusat data.

Kriteria umum untuk sistem pendingin dan kelembaban adalah :

- Temperatur dan kelembaban ruangan dijaga dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan operasional normal perangkat di ruang pusat data yang paling peka;
- Peralatan pengatur temperatur dan kelembaban harus dihubungkan ke catu daya utama (didukung oleh catu daya alternatif);
- Memiliki skalabilitas dan adaptabilitas yang sangat baik; dan
- Sudah terstandarisasi.

Keadaan temperatur dan kelembaban yang harus dijaga di dalam pusat data:

- Temperatur kering: 200C–250C (680F–770F), dengan rata-rata keadaan temperatur normal di set menjadi $220C \pm 100C$;
- Kelembaban relatif (*Relative Humidity*) adalah jumlah air di udara pada suhu lingkungan : 40%-50%, dengan titik normal berada pada $45\% \pm 5\%$;
- Titik embun pada rentang 41,90F sampai 590F maksimum: 210C (69.80F); dan
- Perubahan maksimum yang boleh terjadi dari batas suhu sekarang adalah sebesar 50 C (90F) per jam.

Berikut ini adalah penjelasan dari perangkat sistem pendingin, tekanan udara, kelembaban, konsumsi listrik sistem pendingin, dan teknik pendinginan ruangan/pusat data :

Perangkat Sistem Pendingin

HVAC (*Heating, Ventilation, Air Conditioning*) bertujuan untuk menjaga agar temperatur tetap dalam keadaan rendah dan konstan serta menyebarkan titik-titik panas yang terletak di pusat data. Temperatur yang rendah sangat diperlukan untuk efisiensi operasi pusat data dan perangkat jaringan. Sistem pendingin pada pusat data pada prinsipnya adalah sistem aliran udara dingin, yang terbagi menjadi tiga perangkat utama, yaitu: *air handler*, *chiller*, dan *cooling towers*. Sistem pendingin dapat melakukan reduksi dengan memasang lebih dari satu *air handler* dan menara pendingin tambahan untuk setiap *chiller*. Selain itu, suplai air yang dibutuhkan untuk menciptakan udara dingin juga perlu dijamin keberadaannya dengan cara seperti membangun *container* penyimpan air yang dapat diandalkan.

Tekanan Udara

Tekanan udara pada pusat data harus dijaga pada level tertentu yang disebut sebagai tekanan statis. Pusat data didesain memiliki tekanan antara 0.2-0.5 in. wc guna menjaga agar tekanan udara tetap stabil maka periksa seluruh ruangan apakah telah tertutup dengan baik dan yakin bahwa tidak ada lubang sedikit pun. Mayoritas *handler* membutuhkan *buffer* sekitar 36-42 in (91.4-106.7 cm) sehingga perlu diletakan jauh dari *DC air handler*.

Kelembaban

Kelembaban merupakan konsentrasi uap air di udara. Kelembaban relatif menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga dalam ruangan pusat data. Kelembaban relatif adalah persentase perbandingan dari jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah uap air di udara kering. Perangkat pusat data dan jaringan dapat berfungsi pada rentang level kelembaban yang cukup panjang yaitu sekitar 20%-80%. Menjaga kelembaban relatif dalam keadaan normal berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi pada beberapa perangkat di pusat data karena penguapan (kelembaban tinggi) atau mencegah munculnya elektrostatis pada beberapa perangkat metal (kelembaban yang rendah). Cara yang dilakukan adalah melengkapi *Air Handling Unit (AH)* dengan kemampuan humidification atau melalui penggunaan unit-unit *humidification* yang terpisah dari *Air Handling Unit (AH)*. Kelembaban relatif yang memungkinkan untuk suatu ruangan pusat data adalah sekitar 45%-55%, yaitu level kelembaban relatif normal sebesar 50% dengan tingkat sensitivitas sekitar 10%, yang memungkinkan variasi pada level kelembaban sehingga komponen infrastruktur tidak konstan berada level tersebut.

Konsumsi Listrik Sistem Pendingin

Konsumsi listrik pusat data terbesar adalah pada sistem pendingin dan kelembaban (50%), pusat data dan *storage* (26%), perangkat jaringan (10%), *power conversion* (11%), dan *lighting* (3%). Untuk sistem pendingin dan kelembaban, komponen *chiller* mengkonsumsi daya listrik terbesar (39%), kipas (*fans*) (39%), *CW Pumps* (18%) dan paling kecil adalah *cooling towers* (4%).



Gambar 2.5.2.2.11. Grafik Konsumsi Listrik di Pusat Data

Dari informasi di atas, diperlukan sistem pendingin dan kelembaban yang efisien dan efektif serta dukungan dari perangkat yang ada. Sistem pendingin dan kelembaban berfungsi untuk mendinginkan perangkat pusat data, storage, dan perangkat jaringan. Jika kapasitas ruang pusat data belum maksimal, maka diperlukan strategi agar tidak terjadi pemborosan karena prinsipnya adalah mendinginkan pusat data bukan ruang pusat data.

8. Teknik Pendinginan Ruang/Pusat Data

Terdapat tiga teknik pendinginan ruangan pusat data atau rak pusat data yakni *Room Cooling* atau *Cooling Room Air Conditioner (CRAC)*, *IN-ROW*, dan *TOP Cooling*.



Gambar 2.5.2.2.12. Perbandingan Keuntungan dari Tiga Model Sistem Pendinginan Pusat Data

a) ROOM-COOLING

- Fungsi mendinginkan seluruh ruangan pusat data secara merata;
- CRAC/PAC disebar di sisi-sisi ruang pusat data;
- Jalur udara dingin (*cold aisle*) mengalir dari bawah *raised floor* naik ke atas melalui lubang – lubang kecil di papan *raised floor* arah depan *rack* pusat data;
- Jalur udara panas (*hot aisle*) yang berasal dari belakang *rack* pusat data akan mengalir ke perangkat CRAC; dan

- Kurang efisien jika ruang pusat data belum terisi penuh.

b) IN-ROW

- CRAC/PAC tidak lagi disebar di sisi-sisi ruang pusat data tapi sudah disebar di barisan rack pusat datanya;
- CRAC/PAC sudah disebar di barisan rack pusat datanya, di dalam barisan rack-rack pusat data ini di sisipkan cooling system yang mendinginkan udara panas di belakang pusat data dan menghembuskan ke sisi depan pusat data;
- Menutup jalur udara panas (*hot containment aisle*) agar tidak bercampur dengan jalur udara dingin, semua udara panas di dalam *hot containment* ini akan didinginkan oleh CRAC yang ada di samping rack pusat data; dan
- Tingkat efisiensi tinggi karena pembangunan bisa secara bertahap tergantung kebutuhan rack pusat data.

c) TOP-COOLING

- CRAC/PAC tidak lagi disebar di sisi-sisi ruang pusat data tapi diletakkan di atas rack pusat data;
- Di atas rack-rack pusat data ini disisipkan cooling system yang menghembuskan udara dingin ke sisi depan pusat data dan mendinginkan udara panas di belakang pusat data; dan
- Tingkat efisiensi tinggi paling tinggi karena tempat yang dibutuhkan paling kecil, konsumsi daya listrik paling kecil juga di bandingkan dua teknik lainnya.

CRAC (CW)	In-Row (CW)	CoolTop (CW)
• 3 CRAC units • cooling capacity 53 kW • air flow 9.000 m³/h • dimensions 950 x 900 mm • consumption 1,8 kW	• 6 in-row units • cooling capacity 21 kW • air flow 3800 m³/h • dimensions 300 x 100 mm • consumption 0,77 kW max (0,3 kW at capacity 96/6=16 kW per unit)	• 4 Topcooling units • cooling capacity 38 kW • air flow 7.700 m³/h) • dimensions 2400 x 660 mm • consumption 0,7 kW max (0,2 kW at capacity96/4=24 kW per unit)
• Occupied floor area = 2,6 m² • Total consumption 3,6 kW (2 running units)	• Occupied floor area = 1,8 m² • Total consumption 1,8 kW (5 low-speed running units)	• Occupied floor area = 0 m² • Total consumption 0,8 kW (4 running units)

Gambar 2.5.2.2.13. Perbandingan Tiga Model Sistem Pendingin Pusat Data

Berdasarkan gambar diatas diperoleh informasi perbandingan teknik pendinginan ruang pusat data, teknik CoolTop mengkonsumsi daya listrik paling kecil dibanding dua teknik lainnya sebesar 0,8kW. Selain itu luasan yang digunakan untuk perangkat pendingin juga paling kecil dibandingkan dua lainnya (0m2) karena perangkat di pasang di atas rack pusat data tidak menambah ruang di bawah. Kesimpulannya teknik CoolTop memiliki tingkat efisiensi paling tinggi untuk mendinginkan rack

pusat data. Pada kondisi ruang pusat data yang belum terisi penuh, teknik ini juga sebagai solusi menekan biaya listrik.

9. Fire Suppression System

Perlindungan pusat data dari api mempunyai tiga tujuan utama yakni: identifikasi adanya api (*detection*), pemberitahuan adanya api ke seluruh penghuni Pusat Data dan orang-orang yang berkepentingan (*alarm*), dan memadamkan api (*suppression*). Acuan Standar dalam pembangunan *fire suppression system* menggunakan standar dari NFPA (*National Fire Protection Association*). Tipe *Suppression System* yang ada antara lain:

a. Gas System

Sistem gas tidak merusak perangkat pusat data dan perangkat lain efektif tetapi waktu singkat.

- *Inert Gas Suppression System* : mengurangi kadar oksigen sampai 15% untuk memadamkan api sehingga ruangan masih bisa digunakan untuk bekerja; dan
- *Synthetic Gas Suppression* : *cooling mechanism* untuk memadamkan api dengan menggunakan beberapa tipe gas seperti FM-200, Halon 1301, CO₂.

b. Water sprinklers

Sistem air dapat merusak perangkat pusat data dll, dapat digunakan untuk melindungi bangunan dan memadamkan api. Kriteria *Fire Suppression System* untuk pusat data adalah sebagai berikut :

• QUICK

Sistem dapat memberikan respon cepat jika terjadi kebakaran untuk meminimalkan terjadinya kerusakan pada perangkat pusat data dll.

• CLEAN

Jika terjadi insiden adanya titik api dan setelah gas dilepas serta proses pemadaman, tidak ada sampah atau sisa gas yang tertinggal.

• ODORLESS

Gas yang dikeluarkan tidak menimbulkan bau yang menyengat.

• NON-TOXIC

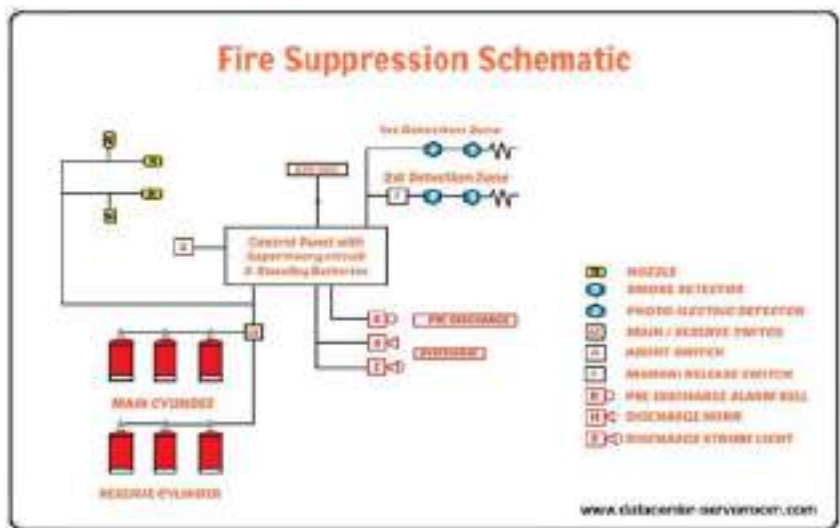
Gas yang dikeluarkan tergolong aman untuk manusia (tidak beracun).

• NON-CONDUCTIVE

Gas yang dikeluarkan bukan penghantar panas atau elektrik karena dapat menyebabkan kerusakan.

• LOW STORAGE SPACE

Perangkat utama dan pendukung hanya membutuhkan tempat yang kecil.



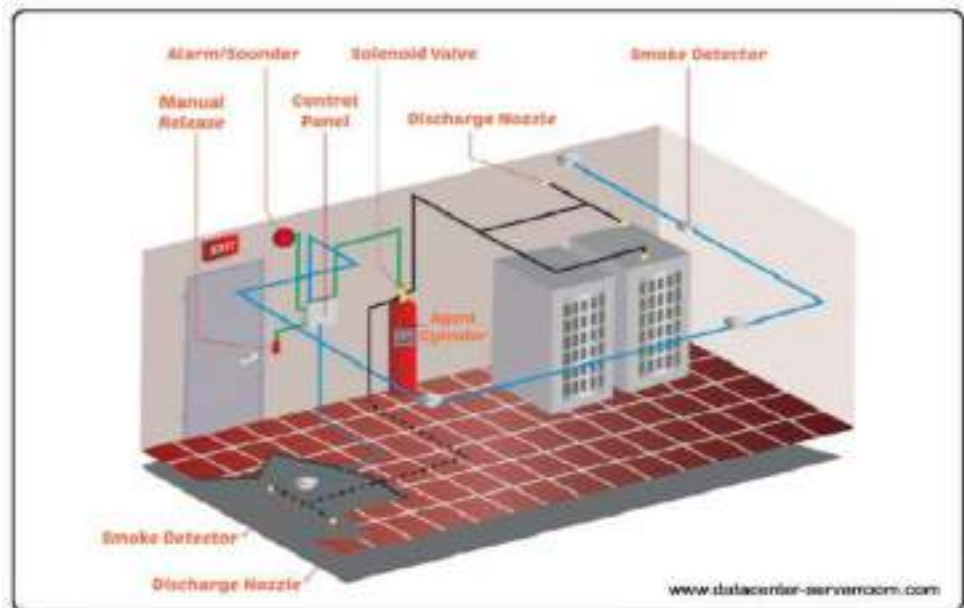
Gambar 2.5.2.2.14. Skema Fire Suppression System DC

Secara umum, sistem *fire suppression* terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut:

1. Deteksi panas yang linier (kabel sensor panas), ditempatkan sepanjang *tray wire* dan jalur elektrik baik diatas maupun dibawah *raised-floor*. Alarm pada sensor dibunyikan pada sistem kontrol bukan untuk memicu bekerjanya sistem *fire suppression*;
2. Deteksi tipe *spot* secara *intelligent* (*photoelectric detector*);
3. Deteksi asap (*smoke detector*);
4. *Portable fire extinguisher*;
5. Agen pembersih sistem *fire suppression*; dan
6. *Pull station*, perangkat sinyal, dan sistem kontrol.

Sistem peringatan proteksi dini sangat penting untuk menghindari kerusakan dan kehilangan yang dapat terjadi selama status kebakaran belum benar-benar terjadi (atau awal terjadinya kebakaran), karena kerusakan peralatan yang signifikan dapat semata-mata terjadi karena asap atau pembakaran produk-produk lain terhadap peralatan elektronik. Contoh sebuah sistem peringatan proteksi dini adalah *air sampling smoke detection systems* yang menyediakan proteksi level lain untuk ruang komputer dan fasilitas-fasilitas pintu masuk terkait, ruang mekanik, dan ruang listrik. Sistem peringatan proteksi dini juga disediakan sebagai pengganti *smoke detectors* biasa, karena sensitivitas dan kapabilitas deteksinya jauh melampaui detektor konvensional.

Gambar berikut adalah topologi *fire suppression system* yang terdiri dari perangkat utama dan pendukung serta topologi instalasinya. Silinder tabung gas terdiri dari silinder utama dan silinder cadangan untuk redudansi. Gambar di bawah adalah instalasi *fire suppression system* di ruang pusat data. *Smoke detector* di pasang di atas rack pusat data dan di bawah *raised floor*.



Gambar 2.5.2.2.15. Instalasi Fire Suppression System Pusat Data

Ketentuan dalam pembangunan *fire suppression system* pusat data sebagai berikut:

- Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pintu darurat kebakaran dapat dibuka ke arah luar;
- Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Titik panggil manual harus dipasang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Dinding dan pintu ke ruang pusat data, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan ruangan penting lainnya memiliki tingkat terbakar (*fire-rating*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ruang komputer harus diproteksi dengan sistem pendeteksi asap. Seluruh sistem deteksi asap bangunan harus diintegrasikan ke dalam satu alarm bersama;
- Catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman harus tersedia untuk keperluan pemeriksaan;

- h. Bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran harus tersedia;
- i. Ruang pusat data harus dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran otomatis harus dapat diaktifkan secara manual;
- j. Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- k. Semua tanda peringatan kebakaran harus ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran harus didesain dan dipasang oleh tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi di bidang desain dan pemasangan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional;
- m. Jika ruang pusat data, ruang telekomunikasi, ruang mekanikal dan kelistrikan memiliki sistem pemadam api otomatis (*sprinkler*), maka sistem tersebut harus tipe *preaction*; dan
- n. Jika ruang atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi pusat data tidak memiliki sistem pemadam api otomatis (*sprinkler*), maka risiko kebakaran harus dikaji.

10. Sistem Pengkabelan

Sistem pengkabelan mengambil peran dalam komunikasi antar item di dalam pusat data atau ke dunia luar. Sistem pengkabelan infrastruktur jaringan data di pusat data menjadi salah satu hal yang paling rumit untuk merancanginya. Beberapa kriteria sistem pengkabelan yang baik antara lain adalah:

- a. Mampu menyediakan konektivitas yang luas (*wide channel-capacity*) dan terstruktur dengan baik (sesuai dengan ketentuan).
- b. Sederhana, yang berarti struktur pengkabelan yang dibuat tidak rumit sehingga memudahkan relokasi atau *maintenance*.
- c. *Scalable* dan fleksibel, dapat mengakomodasi kebutuhan mendatang dan perubahan yang terjadi, serta keragaman dari aplikasi *user* (servis yang dimiliki pusat data).

Pertimbangan desain sistem pengkabelan yang akan digunakan yaitu:

- a. Kabel menyumbang kurang dari 10 persen dari total biaya infrastruktur jaringan.

- b. Rentang hidup dari sistem kabel yang khas adalah 16 tahun ke atas, sehingga kabel adalah komponen yang terpenting dalam sistem pengkabelan terstruktur.
- c. Hampir 70 persen dari semua jaringan yang bermasalah berasal dari pemasangan kabel yang tak memenuhi standar dan komponen kabel itu sendiri.

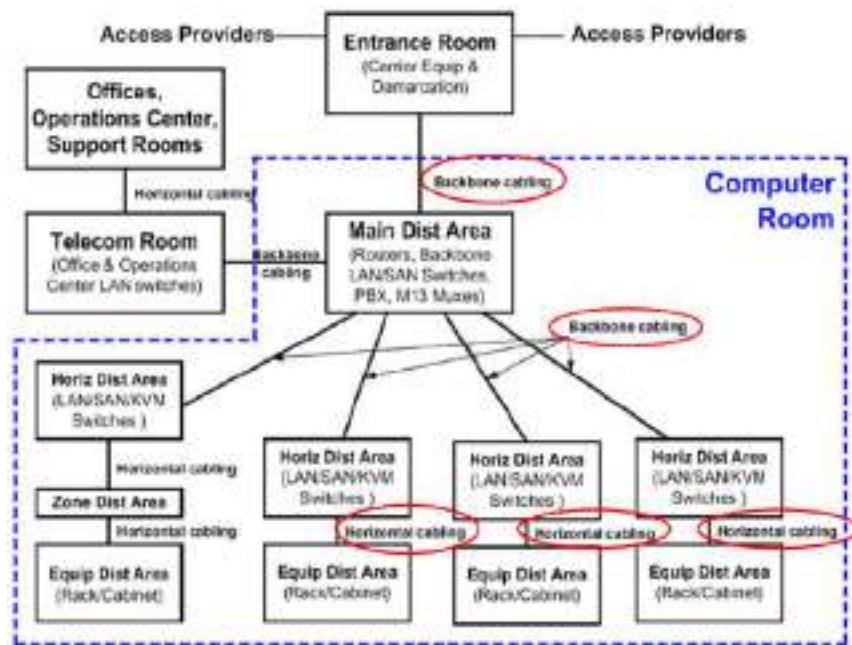
Beberapa ketentuan umum sistem pengkabelan listrik dan data di DC antara lain:

- a. Kabel kelistrikan dan kabel data harus dipisah, beberapa kabel harus diisolasi untuk menghindari gangguan.
- b. Sistem kabel di atas dan dibawah yang terstruktur serta terlindungi, mendukung kemudahan dalam instalasi dan keamanan dari hubungan arus pendek.
- c. Jalur kabel data harus memiliki jarak dari jalur listrik dan jalur *grounding* anti petir sesuai standard ANSI/TIA-469-B.
- d. Infrastruktur kabel sesuai standar TIA-942 :
 - Standar fiber optik jenis *single mode*;
 - Jaringan backbone menggunakan *fiber optic multimode* dengan ukuran 50 *micron* kategori *lazer-optimized*;
 - UTP CAT6;
 - *Backbone fiber optic* maksimal 300 meter; dan
 - Horizontal kabel maksimal 100 meter.

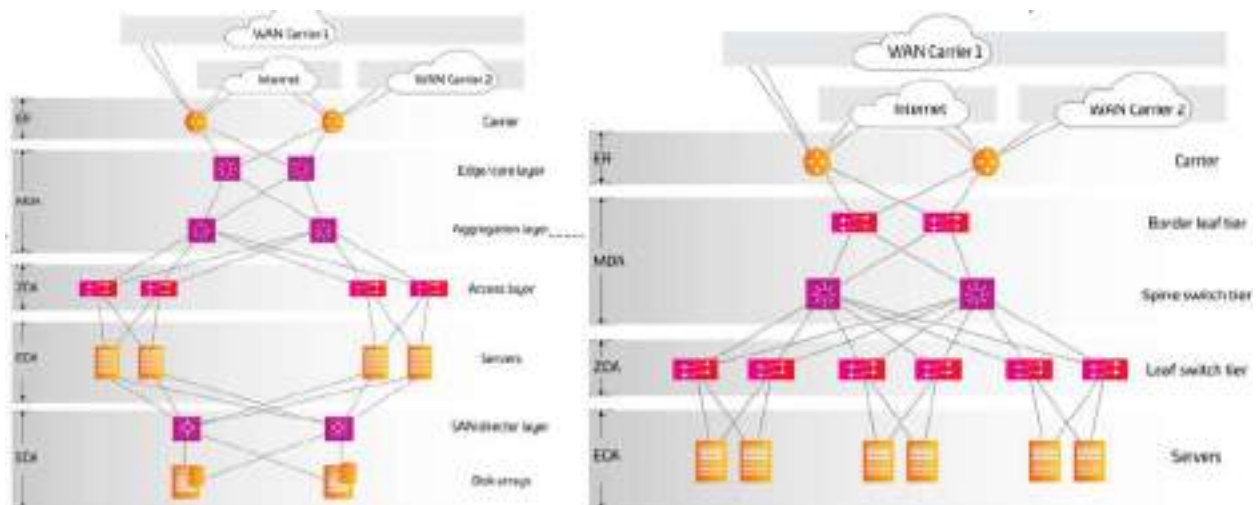
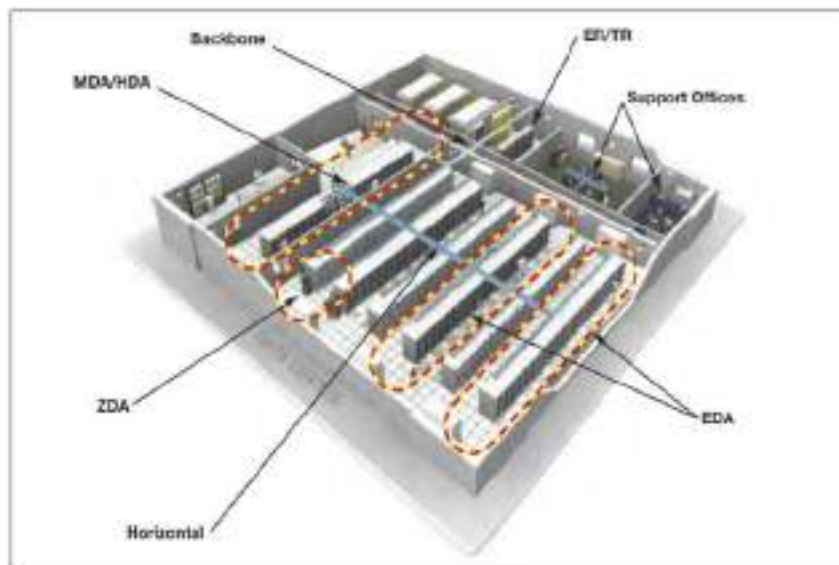
Standar ANSI/TIA/EIA-568-B berisi elemen dasar dari struktur sistem pengkabelan pada pusat data adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengkabelan horizontal (*horizontal cabling*);
2. Sistem pengkabelan *backbone* (*backbone cabling*);
3. *Cross-connect* pada pintu masuk (*entrance room*) atau area kerja (*main distribution area*);
4. *Main cross-connect* (MC) pada area distribusi utama(*main distribution area*);
5. *Horizontal cross-connect* (MC) pada ruang telekomunikasi, *HDA* atau *MDA*;
6. *Zone outlet* atau konsolidasi titik pada zone distribution area; dan
7. *Outlet* pada area distribusi perangkat (*equipment distribution area*).

Gambar di bawah ini adalah elemen fungsional yang saling terhubung satu sama lain pada sistem pengkabelan pusat data.



Gambar 2.5.2.2.16. Topologi Sistem Pengkabelan Pusat Data



Gambar 2.5.2.2.17. Arsitektur Instalasi Sistem Pengkabelan Pusat Data

1. Horizontal Cabling (Pengkabelan Horizontal)

Pengkabelan horisontal, sebagaimana ditentukan oleh ANSI/TIA/EIA-568-B, adalah kabel yang membentang dari ruang telekomunikasi ke area kerja dan berakhir di outlet

telekomunikasi (informasi outlet atau dinding). *Wiring horizontal* dijalankan dari setiap *workstation* di suatu lantai yang sama ke ruang telekomunikasi, kemudian berakhir pada pemutusan *punchdown*, atau langsung ke *patch panel*. Di ruang telekomunikasi, peralatan jaringan seperti hub atau switch terhubung ke setiap stasiun kabel. Hub atau switch kemudian melewati sinyal komputer ke *workstation* lain atau ke pusat data, atau bahkan ruang telekomunikasi lainnya untuk konektivitas utama dengan seluruh jaringan. Pengkabelan horizontal meliputi:

- a. Kabel dari *patch panel* ke area kerja;
- b. Outlet telekomunikasi;
- c. Kabel penghentian;
- d. *Cross-connections* (jika diizinkan);
- e. Pembatasan maksimal pada satu titik transisi;
- f. Komponen jaringan yang spesifik (*switch router*) tidak harus dipasang sebagai bagian dari kabel dengan sistem horizontal (dalam dinding). Perangkat *switch* atau *router* harus dipasang di ruang telekomunikasi atau area kerja;
- g. Titik transisi ANSI/TIA/EIA-568-B memungkinkan untuk satu titik transisi di kabel horizontal. Titik transisi adalah di mana salah satu jenis kabel terhubung ke yang lain, seperti di mana kabel bulat terhubung ke bawah karpet kabel. Sebuah titik transisi juga bisa menjadi titik dimana kabel didistribusikan ke *furniture modular*.

2. *Backbone Cabling* (Pengkabelan *Backbone*)

Kabel *backbone* diperlukan untuk menghubungkan fasilitas pintu masuk, ruang peralatan dan telekomunikasi, pengkabelan *backbone* juga bisa diaplikasikan antara lain untuk pemasangan kabel antara ruang inventaris dengan pintu masuk fasilitas pada bangunan dan koneksi vertikal antar lantai.

3. *Office, Operation Center* (Area Kerja)

Ruang bangunan di mana pengguna menggunakan peralatan telekomunikasi, mencakup semua komponen kabel antara outlet komunikasi (soket dinding) dan peralatan telekomunikasi pengguna akhir, seperti telepon, *workstation* dan printer, termasuk outlet komunikasi itu sendiri. Area kerja kabel sistem dirancang agar fleksibel, tapi masih memerlukan manajemen hati-hati. Agar terhindar dari masalah seperti pemasangan kabel yang tidak cocok, kita perlu memasang outlet area kerja dengan prosedur standar dan menggunakan

standar yang sama (T568A atau T568B) di seluruh sistem saat menyelesaikan kabelnya. Standar T568B lebih umum digunakan dalam aplikasi data. Standar ini memerlukan dua lubang *outlet* pada setiap dinding, satu untuk suara, dan satu lagi untuk *data.568B* standar yang lebih umum digunakan dalam aplikasi data.

4. *Telecom Room* (Telekomunikasi)

Daerah tertutup seperti ruang atau lemari, peralatan telekomunikasi perumahan, frame distribusi, terminasi kabel dan lintas menghubungkan kabel jaringan yang masuk dan keluar dari ruangan tersebut. Dengan kata lain, semua perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan kabel horizontal untuk kabel vertikal. Daerah ini sering juga rumah peralatan bantu, termasuk berkas pusat data jaringan. Setiap bangunan harus memiliki minimal satu kabel lemari, dan standar merekomendasikan satu per lantai. Ukuran lemari khusus juga dianjurkan, tergantung pada ukuran area layanan, harus ada ruang yang cukup untuk tenaga pelayanan untuk melakukan pemeliharaan dan melaksanakan tugas-tugas lain, serta untuk semua *hardware* yang dibutuhkan. Pencahayaan, pasokan listrik dan kondisi lingkungan juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh standar.

5. *Equipment Room* (Peralatan Kamar)

Setiap rumah tentu perlu membangun sebuah sistem telekomunikasi, seperti: *PBXs*, pusat data, *switch* dll, dan penghentian mekanik dari sistem kabel telekomunikasi. Hal ini dianggap berbeda dari lemari telekomunikasi karena kompleksitas komponen. Ruang peralatan mengambil tempat dari lemari telekomunikasi atau menjadi fasilitas terpisah. Secara umum, fungsi ruang peralatan dapat dimasukkan dalam lemari kabel. Ruang peralatan menyediakan titik terminasi untuk vertikal (*backbone*) kabel yang terhubung ke satu atau lebih lemari telekomunikasi. Hal ini juga dapat menjadi titik *cross-koneksi* utama untuk seluruh fasilitas. Sebagai contoh, di lingkungan kampus, setiap bangunan dapat memiliki ruang dan peralatan sendiri dimana peralatan lemari telekomunikasi saling terhubung. Peralatan di ruangan juga dapat terhubung ke fasilitas kampus yang terhubung ke seluruh kampus.

6. *Entrance Room* (Fasilitas Pintu Masuk)

Berisi pintu masuk layanan telekomunikasi ke gedung, dan mungkin juga mengandung koneksi *backbone*. Hal ini juga berisi titik demarkasi jaringan, yang merupakan interkoneksi untuk fasilitas telekomunikasi pertukaran operator lokal. Titik demarkasi biasanya 12 inci dari fasilitas pengangkut memasuki gedung, tapi *carrier* dapat menunjuk sebaliknya.

7. Administrasi Kabel

Administrasi kabel adalah kegiatan yang mencakup seluruh aspek pengaturan kabel dalam suatu bangunan, seperti: mencatat, mengelola, dan menguji sistem kabel, membuat serta menjaga rencana sistem yang telah dirancang.

A. Kabel Data *Ethernet*

Kabel data yang digunakan menggunakan tipe *UTP Category 6* (*UTP Cat6*) yang mampu meneruskan paket data sampai dengan 10 *Gbps* pada jarak 55 meter atau 1 *Gbps* pada jarak 100 meter. Di bawah ini adalah tabel kategori *UTP* dari yang awal *cat1* sampai dengan terbaru *Cat7*.

UTP Categories - Copper Cable				
UTP Category	Data Rate	Max. Length	Cable Type	Application
CAT1	Up to 1Mbps	-	Twisted Pair	Old Telephone Cable
CAT2	Up to 4Mbps	-	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT3	Up to 10Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring & 10BASE-T Ethernet
CAT4	Up to 16Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT5	Up to 100Mbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring
CAT5e	Up to 1 Gbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
CAT6	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	Gigabit Ethernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT6a	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	Gigabit Ethernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT7	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	Gigabit Ethernet, 10G Ethernet (100 meters)

Gambar 2.5.2.2.18. Kategori Kabel *UTP-Ethernet*

B. *Fiber Optic*

Standar ANSI/TIA/EIA-568-B memungkinkan penggunaan kabel serat optik baik yang menggunakan *mode single-mode* maupun *multimode*. Dengan kata lain, standar tersebut mengizinkan kabel serat optik yang memiliki karakteristik dan jenis mode yang berbeda untuk digunakan pada jaringan. Sistem pengkabelan horisontal ditetapkan dengan menggunakan kabel 62.5/125-micron *multimode*, sedangkan pengkabelan *backbone* dapat menggunakan baik kabel optik-serat *multimode* atau *single-mode*. Terdapat dua konektor yang sebelumnya banyak digunakan untuk pemasangan kabel dengan sistem serat optik, yaitu *ST* dan

konektor SC. Banyak instalasi telah menggunakan jenis konektor ST, tetapi standar sekarang mengakui hanya konektor 568SC-jenis. Hal ini pun berubah sehingga serat-optik spesifikasi ANSI/TIA/EIA-568-B dapat menyetujui dengan Standar IEC 11801 yang digunakan di Eropa. Standar ANSI/TIA/EIA-568-B menggunakan *small-form factor* konektor seperti konektor MT-RJ.

Merujuk pada Gambar 2.2.2.18., menunjukkan gambaran singkat mengenai standar kabel serat optik yang digunakan pada pengkabelan premis. Terdapat empat tipe serat optik yang terdiri dari tiga jenis serat *multimode* (OM1, OM2, OM3) dan satu jenis serat *singlemode* (OS1).

Tipe Serat Optik	Panjang Gelombang	Atenuasi dB/Km (maks)	OFL Bandwidth MHz Km (Min)	EFL Bandwidth MHz Km (Min)
OM1 (50/125um atau 62.5/125 um)	850 nm	3,5	200	Tidak ditentukan
	1300 nm	1,5	500	Tidak ditentukan
OM2 (50/125um atau 62.5/125 um)	850 nm	3,5	500	Tidak ditentukan
	1300 nm	1,5	500	Tidak ditentukan
OM3 (50/125um)	850 nm	3,5	1500 500	Tidak ditentukan
	1300 nm	1,5		Tidak ditentukan
OS1 (ITU-T G.652)	1310 nm	1,0	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
	1550 nm	1,0	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

Gambar 2.5.2.2.19. Kategori Tipe Kabel Serat Optik

11. Desain Ruang Pusat Data

a. Desain Raised Floor

Disebut juga *access floor* atau *raised access floor*

Fungsi :

- Sistem distribusi udara dingin untuk mendinginkan peralatan IT;
- Jalur kabel data;
- Jalur kabel listrik;
- Jaringan kabel tembaga untuk *grounding* peralatan; dan
- Lokasi untuk mengalirkan air dingin (*chilled water*) atau pipa utilitas lainnya

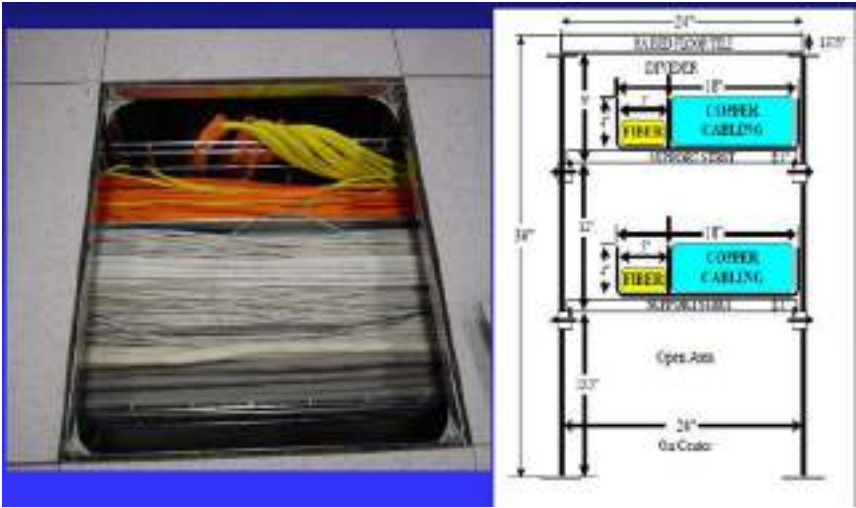
Ukuran :

- Panel : 60x60cm;
- Tebal : 28-42 mm; dan
- Tinggi penyangga : 35cm.



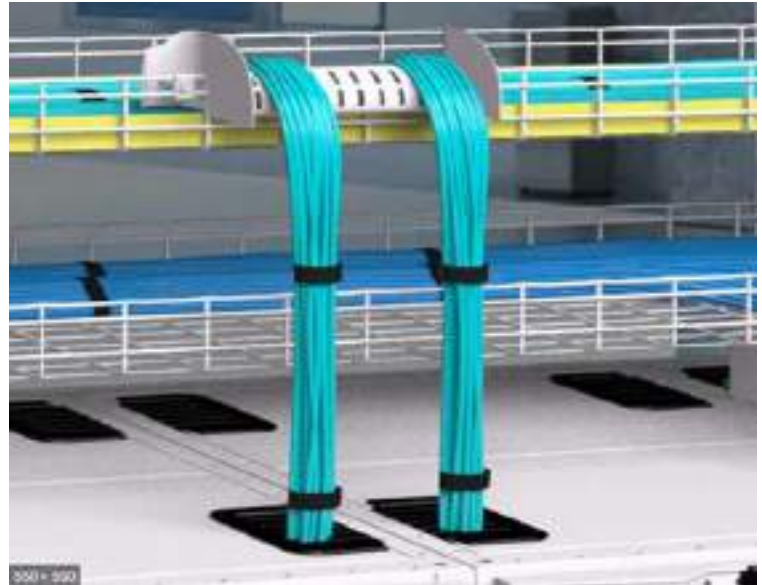
Gambar 2.5.2.20. Komponen Pendukung Raised Floor

- 1. Cable Tray
 - a. Bawah Raised Floor
 - 2 cable tray untuk listrik & data
 - Standar TIA-569-B : kabel data dan listrik terpisah minimal 61 cm

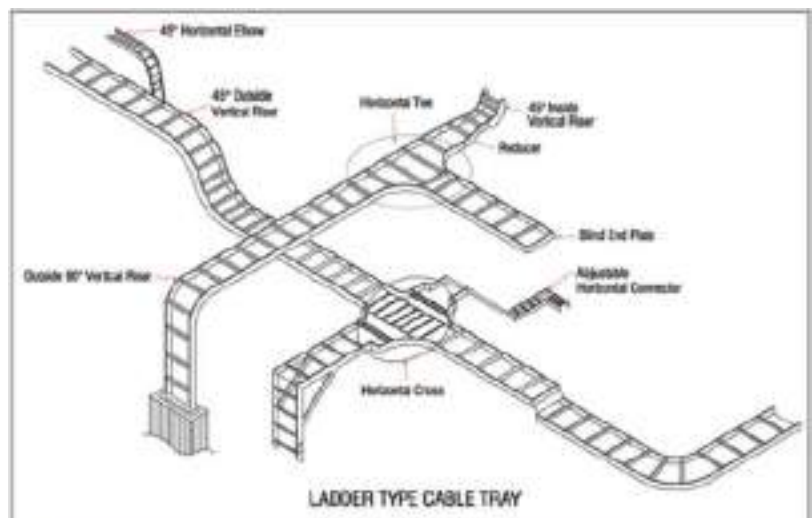


Gambar 2.5.2.21. Instalasi Kabel Data & Power di Bawah Raised Floor

b. Atas Rack Pusat Data



Gambar 2.5.2.22. Instalasi Kabel Data di Atas Rack pusat data dengan Cable Tray



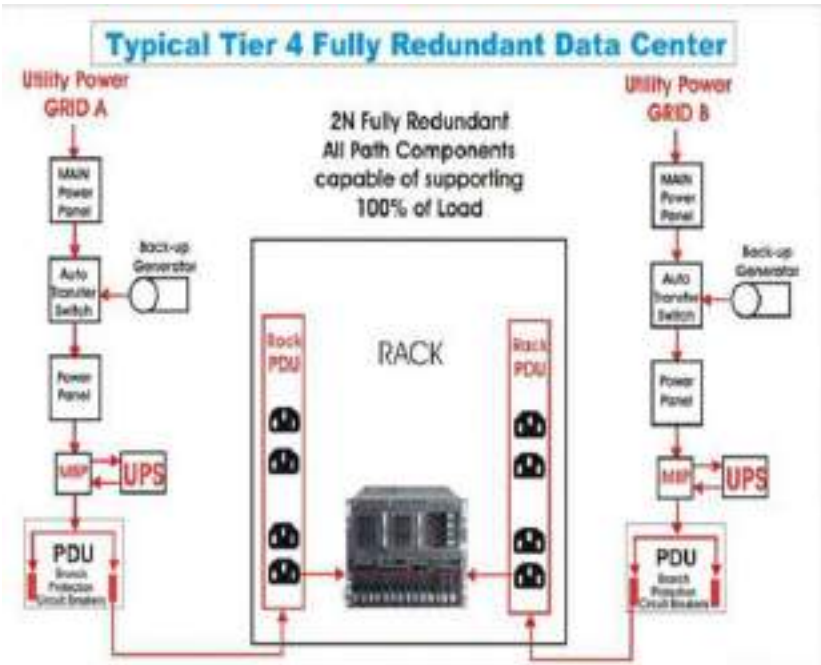
Gambar 2.5.2.23. Type Kabel Tray Untuk Instalasi Sistem Pengkabelan

c. Rack Location Unit

- Rack pusat data memenuhi persyaratan EIA-310 (Electrical Industry Alliance Standards) pada perangkat rack 19".
- Memiliki jalur akses listrik dan jalur kabel data di bagian atas dan bawah, selain dari bagian depan dan belakang.
- Tata letak kabinet diatur sedemikian rupa untuk dapat mudah diakses oleh para teknisi dan diberikan ruang kosong agar suhu pada rack pusat data dapat lebih terkendali.

- Seluruh perangkat pusat data dan peralatan lainnya yang besar diletakan dibagian paling bawah rack pusat data.
- Setiap rack pusat data memiliki dua *strip power* dengan sumber listrik dari sumber yang berbeda.

Gambar dibawah ini adalah topologi redudansi sistem kelistrikan untuk tipe Tier 4 dengan *mode aktif-aktif*. Dua buah *power strip* yang ada di rack pusat data di-supply oleh sumber listrik yang berbeda.



Gambar 2.5.2.2.24 Instalasi Sistem Kelistrikan Tier-4-Fully Redundant

12. Sistem Keamanan Fisik

Terdiri dari sistem pengamanan fisik dan non-fisik pada pusat data. *Fitur* sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke pusat data berupa kunci akses memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan seluruh petugas keamanan yang mengawasi keadaan pusat data (baik di dalam maupun di luar). Pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada seperangkat infrastruktur dengan melakukan penguncian dengan kunci gembok tertentu. Di dalam tabel sistem keamanan fisik pusat data terdiri dari keamanan gedung, keamanan ruang komputer, dan kebijakan serta prosedur keamanan.



Gambar 2.5.2.2.25 Keamanan Pusat Data

Gambar di bawah ini adalah contoh perangkat pendukung sistem keamanan di pusat data untuk keamanan rak pusat data, dan pintu masuk ruang pusat data.



Gambar 2.5.2.2.26 Perangkat Pendukung Keamanan Fisik Pusat Data

13. Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan pusat data diperlukan untuk menerangi ruang pusat data utama dan ruang-ruang lainnya termasuk jalur masuk atau lorong. Standar sistem pencahayaan menggunakan TIA-942-A. Lokasi penempatan lampu-lampu antara lain di atas lorong dan di atas antara rak cabinet. Selain lampu utama terdapat juga Lampu dan petunjuk darurat (*emergency lighting & signs*), jalur darurat. Penempatan dan intensitas cahaya lampu pusat data dibagi menjadi tiga lapisan yakni :

- Level 1: untuk lokasi yang tidak dihuni. Pencahayaan tidak perlu untuk mendukung kejelasan penglihatan manusia tetapi peralatan pengawas video harus tetap dapat bekerja dengan baik.
- Level 2: untuk lokasi menuju ruang pusat *Farm* berupa gang-gang dan lorong-lorong yang cukup diterangi untuk pergerakan yang aman dan kamera keamanan dapat bekerja dengan baik.
- Level 3: lokasi utama pusat data *Farm* dll dan ditempati di mana karyawan akan bekerja. Tingkat cahaya bidang horizontal: 500 lux dan bidang vertikal: 200 lux.

14. Sistem Pemantau Lingkungan

Fungsi utama dari *EMS (Environment Monitoring System)* adalah memonitor operasional pusat data dari ancaman lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh karena operasional pusat data yang *non-stop* maka perlindungan dan monitoring pada fasilitas ini harus diutamakan. Pada umumnya gangguan yang dimonitor oleh *EMS* ini adalah suhu dan kelembaban pada pusat data *room*, kebocoran air di bawah *raised floor (Water Leak)* yang diakibatkan kondensasi AC, getaran, dan tegangan listrik akibat pemadaman yang tiba-tiba. Untuk memonitoring perangkat *EMS* ini didukung oleh beberapa sensor cerdas yang berupa *modular sensor*. Sensor ini bervariasi, diantaranya *sensor status on/off AC, sensor water leak, door contact, temperature, humidity, vibration, air flow, voltage, smoke detector*, dll. Sensor ini mendeteksi adanya kelainan pada lingkungan pusat data, yang kemudian informasi tersebut dikirimkan ke perangkat *EMS*. Perangkat ini kemudian akan mengirimkan sinyal peringatan berupa *alarm, buzzers, e-mail, sms*, dan telepon ke *system administrator* atau *network administrator* yang selalu siaga di *NOC*, sehingga masalah tersebut dapat ditangani secepat mungkin. *EMS* akan melakukan pemantauan komponen berikut ini :

- Tegangan;
- Akses masuk keluar ruangan;
- Suhu/*temperatur*;
- Kelembaban;
- Adanya air di ruangan;
- Adanya asap/*smoke* di ruangan;
- Memonitor sisa solar di tangki genset;
- Mengaktifkan AC tambahan; dan
- Mendapatkan *alert* melalui *email/SMS* terintegrasi dengan *NMS* yang ada.



Gambar 2.5.2.2.27. Komponen Lingkungan yang akan di Pantau di Pusat Data



Gambar 2.5.2.2.28. Metode Notifikasi Sistem Pemantauan Lingkungan Pusat Data

15. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)

Data dan informasi merupakan “aset” paling berharga bagi organisasi pemerintahan maupun perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan dan pencadangan terhadap data dan informasi, sehingga data tetap aman apabila terjadi bencana. Dengan begitu aktivitas bisnis tetap berlanjut. Oleh karenanya dibutuhkan Pusat Pemulihan Bencana atau *Disaster Recovery Center (DRC)* untuk membuat data, informasi, dan aplikasi tetap aman dan dapat diakses. *DRC* adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat IT, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintahan. *DRC* diperlukan oleh organisasi pemerintahan maupun perusahaan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Kegagalan mesin dan perangkat keras (*hardware*)
Meskipun perusahaan telah berinvestasi dengan membeli mesin dan perangkat keras (*hardware*) kelas tinggi, bukan berarti tidak perlu membangun *DRC*. Mesin canggih dengan *hardware* tinggi dan *DRC*, akan membuat perusahaan tidak menemukan kegagalan layanan dikarenakan fungsi *hardware*.
2. Faktor kesalahan manusia
Pencegahan terhadap kesalahan manusia (*human error*) seperti penghapusan data atau kesalahan konfigurasi yang tidak disengaja. Organisasi bisa mencadangkan data dan mengembalikannya lagi seperti sebelum dilakukan kesalahan.
3. Faktor alam yang tak bisa diprediksi
Bencana tidak bisa dihindari dan diprediksi, untuk itu, memiliki *DRC* yang berada di beberapa tempat yang secara teori aman terhadap bencana besar.
4. Optimalisasi layanan
Kepemilikan *DRC* berarti memberikan layanan kepada masyarakat yang baik. Saat ini masyarakat ingin mendapatkan layanan cepat, dan itu bisa terjadi jika infrastruktur bisa diakses kapan saja. Keandalan dan kelancaran suatu layanan *DRC* bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat bangunan dan arsitektur sebagai berikut:
 - Jarak fisik antara Pusat Data utama (*DC*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*) minimal lebih dari 40 km.
 - Berada di luar radius mitigasi bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, dan lain – lain.
 - Tidak berada pada jalur patahan geologi.
 - Indeks rawan bencana rendah di Indonesia (Sumber: Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB, 2011).
 - Akses jaringan internet memadai, mudah dijangkau.
 - Bangunan harus memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani keluar - masuk barang/peralatan.

Terdapat 3 (tiga) jenis Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*) yakni:

1. *Cold DRC*

Cold DRC adalah jenis yang paling sederhana terdiri dari elemen daya dan kemampuan jaringan serta pendinginan tetapi tidak termasuk elemen perangkat keras lain seperti pusat data dan penyimpanan. Sebelum dapat digunakan, data cadangan bersama dengan beberapa perangkat keras tambahan harus dikirim ke lokasi *DRC* dan diinstal.

2. *Warm DRC*

Warm DRC adalah tipe *DRC* yang standar terdiri dari komputer dengan segala komponennya seperti aplikasi, jalur komunikasi data, serta *backup* data yang paling terbaru, dimana sistem tidak secara otomatis berpindah, tetapi masih terdapat proses manual meskipun dilakukan seminimal mungkin.

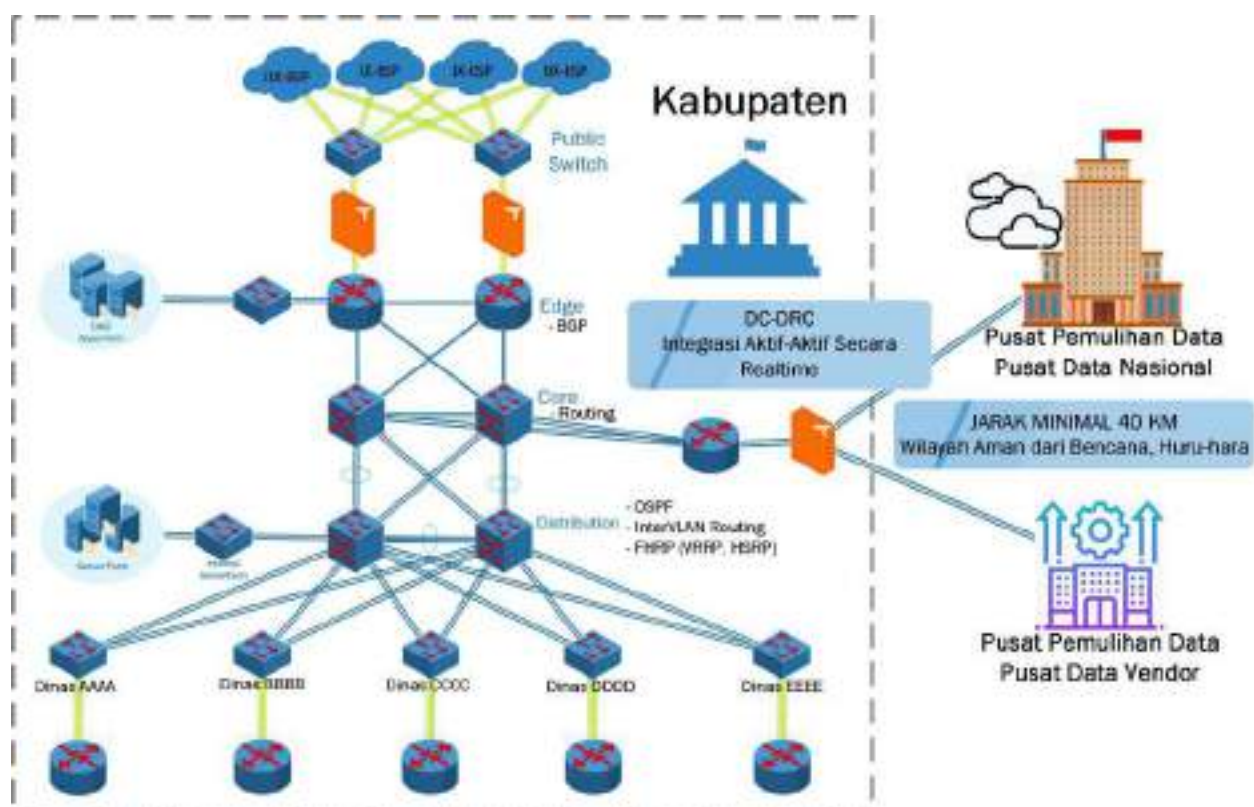
Ketika *DC* utama mengalami masalah atau bencana, semua akan dialihkan ke *DC* kedua yaitu *DRC* dan sementara itu *DRC* beroperasi, personel juga mulai memulihkan data yang ada pada *DC* utama agar *DC* utama bisa beroperasi kembali.

3. *Hot DRC*

Hot DRC merupakan tipe *DRC* yang paling cepat dengan mengatur secepat mungkin operasional bisnis, sistem aplikasi, jaringan komunikasi data yang sama sudah dipasang dan sudah tersedia di lokasi *DRC*. Data secara terus menerus (*realtime*) di *backup* menggunakan koneksi antara *DC* dan lokasi *DRC*, dan operasional bisnis akan berjalan pada saat itu juga, tanpa harus mematikan sistem di pusat data lama.

A. Usulan Topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*)

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum memiliki Pusat Pemulihan Bencana atau *DRC*. Sesuai dengan arahan dari Kebijakan Pemerintah untuk memanfaatkan Pusat Data Nasional. Diskominfo dapat memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional sebagai lokasi *DRC*.



Gambar 2.5.2.2.30 Usulan Topologi DC-DRC

2.5.2.3. Metadata Arsitektur Infrastruktur To Be

A. Pusat Data/Komputasi

Berikut ini disajikan Metadata Pusat Data/Komputasi To-Be menurut usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Surat Edaran KeMenPANRB No 18 Tahun 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.3.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Fasilitas Komputasi - Pusat Data

ID	Nama Fasilitas	Kode Model Referensi SPBE	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
BJN-DAI.01.01.05.01	Disaster Recovery Center	RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI								RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.05 PUSAT DATA PEMULIHAN

2.5.2.4. Jaringan Intra Pemerintah

Prinsip utama dalam penyediaan jaringan data meliputi aspek ketersediaan, keamanan, dan pengendalian. Untuk memenuhi ketiga prinsip tersebut maka pengembangan arsitektur jaringan intra pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat bertumpu pada empat karakteristik yakni berjenjang atau hirarki (*hierarchy*), zonasi (*zoning*), redudansi (*redudancy*), dan keamanan (*security*). Hierarki dan zonasi memungkinkan pengembangan jaringan yang terdiri dari banyak komponen yang saling terkait secara berlapis dan terstruktur. Model hierarkis dapat membantu untuk memaksimalkan kinerja jaringan, mengurangi waktu untuk mengimplementasikan dan memecahkan masalah desain, dan meminimalkan biaya.

Desain jaringan redudansi untuk memenuhi persyaratan untuk ketersediaan jaringan dengan menduplikasi komponen jaringan, jalur koneksi jaringan, dan rute jaringan (*routing*). Redudansi dapat menghilangkan satu titik kegagalan pada jaringan. Redudansi juga memfasilitasi pembagian beban, yang meningkatkan kinerja jaringan. Redudansi akan menambah kompleksitas dan biaya pada jaringan, dan harus dirancang dengan hati-hati. Desain keamanan jaringan ditujukan untuk meningkatkan keamanan jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari serangan yang dilakukan oleh pihak luar. Perangkat *firewall* berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan dan membatasi akses ke dalam jaringan internal, sehingga dapat membantu melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan dan memperkuat sistem keamanan jaringan secara keseluruhan.

A. Topologi Jaringan

Jaringan LAN harus dibangun secara terstruktur, baik dari sisi topologi jaringan, segmentasi jaringan, pengalamatan (*addressing*) maupun penggunaan perangkatnya. Dengan memiliki struktur jaringan yang baik maka akan dapat dilakukan pengaturan, pengawasan serta pemanfaatan yang lebih maksimal. Perangkat aktif jaringan sebagai komponen utama di jaringan tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya jaringan, seperti kapasitas *bandwidth*, menyaring paket data yang lewat (*traffic filtering*), segmentasi jaringan (VLAN), mengatur prioritas lalu lintas paket data (*traffic priority*), dan ketahanan jaringan (*network reliability*) yang baik, serta berbagai fungsi pengontrolan lainnya, sehingga pemanfaatan TI dalam proses bisnis organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang maksimal.

B. Berjenjang atau hirarki (3-Tier Hierarchy)

Model desain jaringan berjenjang atau hirarki untuk membantu dalam mengembangkan topologi di lapisan diskrit. Setiap lapisan atau *tier*, dalam hierarki menyediakan fungsi tertentu yang mendefinisikan perannya dalam jaringan secara keseluruhan. Setiap lapisan dapat difokuskan pada fungsi tertentu, memungkinkan untuk memilih sistem dan fitur yang tepat untuk setiap lapisan.

Setiap lapisan model hirarkis memiliki peran spesifik :

1. Lapisan inti (*Core Layer*)

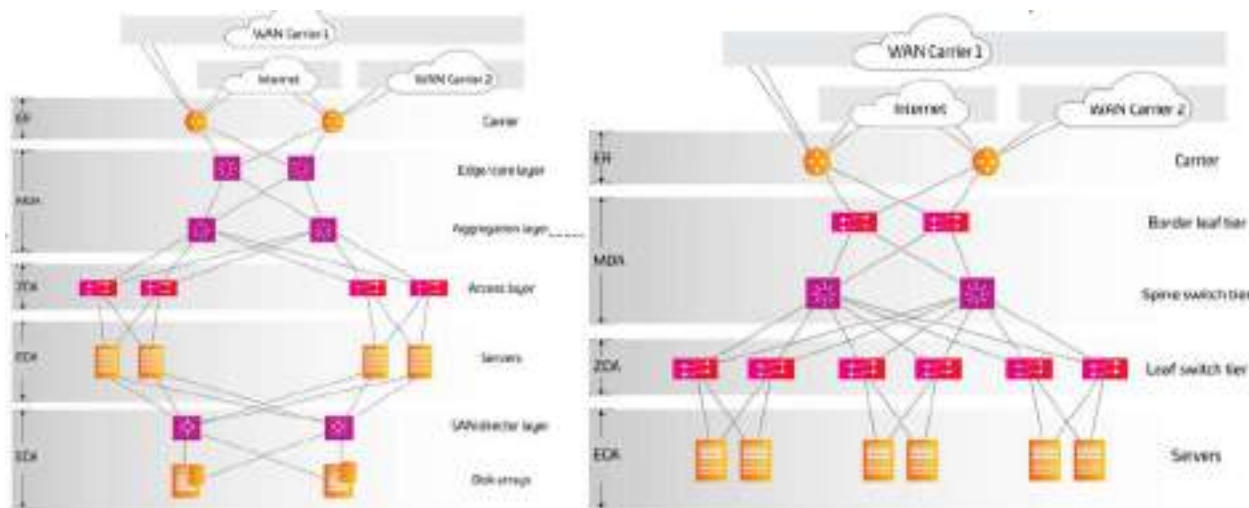
Menyediakan transportasi optimal antar lokasi. Lapisan inti dari topologi hierarkis tiga lapis adalah tulang punggung berkecepatan tinggi *internetwork*. Karena lapisan inti sangat penting untuk interkoneksi, maka komponen pendukung harus redundansi. Lapisan inti harus sangat andal dan harus beradaptasi dengan perubahan dengan cepat.

2. Lapisan distribusi (*Distribution Layer*)

Lapisan distribusi dapat berfungsi sebagai penghubung antara layanan jaringan pada lapisan akses dengan lapisan inti, penerapan kebijakan keamanan, lalu lintas paket data, dan perutean (*routing*). Pada lapisan distribusi dapat dikonfigurasi agar dapat merutekan atau menghubungkan antara satu VLAN dengan VLAN yang lain. Hal ini memungkinkan untuk terciptanya hubungan antar VLAN dalam satu jaringan yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pengelolaan jaringan secara keseluruhan.

3. Lapisan Akses

Lapisan akses adalah lapisan yang langsung berinteraksi dengan perangkat pengguna seperti komputer desktop, laptop, printer, CCTV, dan lain – lain. Perangkat jaringan yang digunakan pada lapisan akses meliputi *switch access* dan *Access Point (AP)* pada jaringan nirkabel.



Gambar 2.5.2.4.1 Topologi Jaringan *Hierarchy* dan *Spine Leaf*

Penggunaan model hirarki dapat membantu untuk meminimalkan biaya. Pembelian perangkat yang sesuai untuk setiap lapisan hierarki, dapat menghindari pengeluaran uang pada fitur yang tidak perlu. Pendekatan modular dari desain hierarkis memungkinkan perencanaan kapasitas yang akurat dalam setiap lapisan hierarki, sehingga mengurangi *bandwidth* yang terbuang.

Desain jaringan dengan pendekatan zonasi memungkinkan untuk menjaga setiap elemen desain sederhana dan mudah dipahami. Kesederhanaan meminimalkan kebutuhan untuk pelatihan ekstensif untuk personel operasi jaringan dan mempercepat implementasi suatu desain. Menguji desain jaringan menjadi mudah karena ada fungsionalitas yang jelas di setiap lapisan. Isolasi kesalahan ditingkatkan karena jaringan teknisi dapat dengan mudah mengenali titik transisi dalam jaringan untuk membantu mereka mengisolasi kemungkinan titik kegagalan.

Tabel 2.5.2.4.1 Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (*3-Tier Hierarchy*)

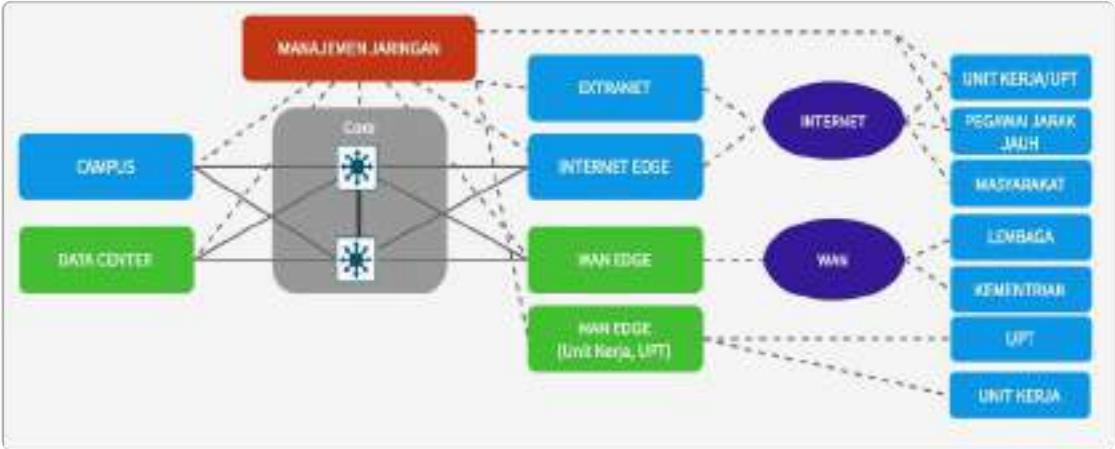
Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (<i>3-Tier Hierarchy</i>)	
Lapisan Inti (<i>Core Layer</i>)	
Jaringan pada <i>core layer</i> dirancang dengan mempertimbangkan: - Sebagai tulang punggung (<i>backbone</i>) jaringan yang menghubungkan zona-zona jaringan - Memiliki performansi dan stabilitas yang tinggi - Memiliki tingkat kompleksitas yang rendah - Sebagai titik agregasi layer distribusi - Memiliki skalabilitas yang tinggi untuk pengembangan ke depan - Memiliki rancangan yang independen dari sisi teknologi (menerapkan <i>open standard</i>)	

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (3-Tier Hierarchy)	
Lapisan Distribusi (<i>Distribution Layer</i>)	
	Jaringan pada layer distribusi dirancang dengan mempertimbangkan: • <i>Availability, load balancing, QoS dan provisioning</i> • Agregasi layer akses dan keterhubungan ke jaringan inti (<i>uplink</i>) • Mengamankan jaringan inti dari permasalahan di jaringan akses • Penerapan penyederhanaan <i>routing</i>, kecepatan konvergensi, jalur <i>redundant</i> dan <i>load sharing</i> • redundansi perangkat (HSRP, GLB)
Lapisan Akses (<i>Access Layer</i>)	
	Penerapan teknologi jaringan pada akses layer yang meliputi: • Jaringan <i>layer 2/layer 3</i>, mendukung konvergensi standar jaringan dan <i>storage, HA, security, QoS, IP multicast</i>. • Memiliki kemampuan <i>Intelligent Network Services: QoS, broadcast suppression, VLAN</i> dan <i>VTP, internal routing protocol, port aggregation</i>. • Mendukung fitur <i>security</i> yang terintegrasi 802.1x, CISF, <i>port security, DHCP snooping</i>. • Memiliki kompatibilitas interkoneksi dengan perangkat layanan: <i>Phone Discovery, PoE, auxiliary VLAN</i>. • Jaringan dikelompokkan menjadi tiga kategori yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan implementasi dan layanannya sebagai berikut:
	a. Jaringan internal
	<i>Local Area Network (LAN)</i>, memberikan akses jaringan di semua gedung dengan menggunakan kabel <i>fiber optic (FO)</i>. Kabel FO dipilih karena kabel FO memiliki ketebalan terhadap imbas petir dan gangguan elektromagnetik. Sehingga dalam rancangan ini ditetapkan bila jaringan melintas keluar bangunan maka harus memakai kabel FO.
	<i>Metropolitan Area Network (MAN)</i> dan <i>Wide Area Network (WAN)</i>, memberikan akses jaringan pada <i>remote site internal</i> dengan menggunakan interkoneksi yang disediakan oleh penyedia jaringan akses. Titik masuk jaringan WAN diharuskan melalui fasilitas ruang telekomunikasi (<i>Telecommunication Room Facility</i>) yang ada di pusat data, yang berfungsi sebagai area demarkasi kepemilikan infrastruktur dan pengamanan masalah fisik.
	<i>Redundancy Link</i>, penerapan jalur berganda pada jaringan LAN dan WAN untuk mendukung ketersediaan layanan yang tinggi pada jaringan data.
	Penggunaan protokol <i>routing</i> internal seperti OSPF digunakan dengan pertimbangan kebutuhan konvergensi yang cepat untuk melayani jaringan internal.
	b. Jaringan Pusat Data
	Jaringan pusat data memberikan akses jaringan untuk semua pusat data yang ada pada pusat data. Jaringan memiliki fleksibilitas dalam mendukung konektivitas yang dinamis berbasis modul atau zone, memiliki densitas <i>port interface</i> perangkat yang tinggi dan kemampuan melayani lalu-lintas jaringan dengan <i>bandwidth</i> yang tinggi.

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (3-Tier Hierarchy)	
	Memiliki fleksibilitas untuk mendukung standar sistem storage berbasis jaringan seperti <i>Network Area Storage</i> (NAS) maupun standar <i>Storage Area Network</i> (SAN) seperti iSCSI dan FcoE.

C. Zonasi (Zoning)

Proyek desain jaringan besar dan implementasi jaringan besar pada umumnya terdiri dari area yang berbeda atau zona. Setiap zona harus dirancang menggunakan pendekatan sistematis, *top-down*, penerapan hierarki dan redudansi.



Gambar 2.5.2.4.2. Arsitektur Jaringan Berbasis Zonasi (Zoning)

Arsitektur Jaringan Berbasis Zonasi (Zoning) terdiri dari beberapa zona sebagai berikut:

1. Zona Inti (Core)

Zona inti menghubungkan semua zona lainnya dan merupakan infrastruktur berkecepatan tinggi yang menyediakan transportasi *Layer 2* dan *Layer 3* yang andal dan dapat diukur. Core biasanya diimplementasikan dengan penggunaan dua unit switch (redundant) untuk menghubungkan ke zona kampus, pusat data, WAN edge, dan Internet edge.
2. Pusat Data

Pusat data menampung server, aplikasi, dan perangkat penyimpanan untuk digunakan oleh pengguna internal. Pusat data juga menghubungkan infrastruktur jaringan. Pusat data tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat umum melalui jaringan internet.
3. Kampus (Campus)

Jaringan kampus menyediakan akses jaringan ke pengguna dan perangkat akhir (*endpoint*) yang terletak di satu lokasi. Kampus dapat menjangkau beberapa lantai dalam satu bangunan atau beberapa bangunan untuk perusahaan besar. Kampus ini menyelenggarakan layanan data. Desain kampus harus memungkinkan pengguna kampus aman mengakses pusat data dan sumber daya Internet dari infrastruktur kampus.

4. Manajemen

Jaringan manajemen menyediakan pemantauan, analisis, otentikasi, dan layanan rekam jejak (logging). pusat data manajemen mendukung *RADIUS*, *Kerberos*, *Protokol Waktu Jaringan (Network Time Protocol)*, *Protokol Manajemen Jaringan Sederhana (Simple Network Management Protocol)*, dan lalu lintas *syslog*.

Tabel 2.5.2.4.2 Aplikasi pusat data Manajemen Jaringan

No	Aplikasi pusat data	Fungsi
1	<i>Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)</i>	pusat data yang memudahkan penyebaran <i>IP Address</i> ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual dengan memasukkan <i>IP Address</i> satu persatu ke perangkat.
2	<i>Domain Name pusat data (DNS) Lokal</i>	Sistem yang menghubungkan <i>Uniform Resource Locator (URL)</i> dengan <i>IP Address</i> . pusat data DNS berisi <i>database</i> alamat IP privat dan nama <i>host</i> terkait. pusat data DNS ini untuk melayani permintaan akses nama domain aplikasi intranet. Dengan adanya DNS Lokal, pengguna tidak perlu menghafal alamat IP dari aplikasi, cukup memasukkan nama domain.
3	<i>Directory Service</i>	pusat data yang memberikan layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan <i>security</i> pada pengguna atau jaringan komputer di perusahaan. <i>Directory Service</i> menyimpan konfigurasi jaringan baik <i>user</i> , <i>group</i> , komputer, <i>hardware</i> , serta berbagai <i>policy</i> keamanan dalam satu <i>database</i> terpusat. Contoh <i>directory service</i> pusat data yakni <i>Active Directory Domain Service (ADDS)</i> pada Windows pusat data, <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> pada distro Linux.
4	<i>Network Time Protocol (NTP)</i>	pusat data untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP.
5	<i>Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)</i>	pusat data yang digunakan untuk melayani service <i>Authentication</i> , <i>Authorization</i> , dan <i>Accounting (AAA)</i> di dalam sebuah jaringan. Singkatnya RADIUS pusat data ini menyimpan kumpulan <i>user</i> dimana <i>user-user</i> tersebut dapat digunakan oleh <i>client</i> atau <i>user</i> yang berada dalam satu jaringan dengan RADIUS pusat data tersebut.
6	<i>Network Monitoring System(NMS)</i>	Suatu pusat data yang diperuntukan oleh administrator jaringan untuk memantau performansi jaringannya, seperti <i>Memory usage</i> , <i>CPU load</i> , <i>disk usage</i> , <i>service states</i> , <i>running process</i> , dan lain sebagainya. NMS menggunakan protokol <i>SNMP (Simple Network Management Protocol)</i> yang merupakan standar manajemen jaringan pada TCP/IP.
7	<i>System Logging Protocol (Syslog)</i>	Protokol standar yang digunakan untuk mengirim log sistem atau pesan peristiwa ke pusat data tertentu, yang disebut pusat data <i>syslog</i> . Ini terutama digunakan untuk mengumpulkan berbagai log perangkat dari beberapa mesin berbeda di lokasi pusat untuk pemantauan dan peninjauan.

5. Jaringan Skala Luas (Wide Area Network)

WAN adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan Pusat Data dengan kantor Kementerian/Lembaga, dan lokasi Pusat Pemulihan Bencana (DRC).

6. Jaringan Dalam Kota (Metropolitan Area Network)

MAN (*Metropolitan Area Network*) adalah bagian dari jaringan komputer yang menghubungkan beberapa kantor perangkat daerah, dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di area kabupaten/kota yang sama dengan pusat data.

7. Internet

Internet adalah infrastruktur yang menyediakan konektivitas Internet dan yang bertindak sebagai pintu gerbang (*gateway*) ke seluruh dunia. Layanan Internet termasuk akses *De-Militarized Zone (DMZ)*, internet pengguna dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan akses jarak jauh *Virtual Private Network (VPN)*.

D. Redudansi (*Redundancy*)

Desain jaringan redudansi untuk memenuhi persyaratan ketersediaan jaringan. Redudansi akan menghilangkan titik tunggal dari kegagalan (*single point of failure*) pada jaringan. Tujuannya adalah untuk menduplikasi komponen yang penting (utama) untuk menghindari aplikasi penting tidak dapat diakses. Komponen tersebut bisa berupa *router* into, *switch*, tautan antara dua *switch*, catu daya, *WAN Router*, konektivitas internet, dan sebagainya. Redudansi meliputi:

1. Duplikasi Komponen Kritis (*Duplicating High Critical Component*)

Untuk menjaga ketersediaan layanan dan akses ke aplikasi utama maka komponen jaringan yang kritis seperti *switch core*, *firewall*, *router* internet harus diduplikasi dengan konfigurasi *High Availability (HA)* sehingga jika salah satu perangkat mengalami gangguan maka masih ada perangkat cadangan yang akan menggantikan secara otomatis.

2. Koneksi dan Jalur Cadangan (*Backup Path*)

Untuk menjaga interkonektivitas ketika satu atau lebih jalur utama sedang terputus, maka lalu lintas paket data akan melalui jalur cadangan secara otomatis. Untuk melakukan proses otomatisasi perpindahan jalur utama ke cadangan maka diimplementasikan protokol rute (*routing protocol*) tertentu.

3. Pembagian Beban (*Load Sharing*)

Tujuan utama redudansi adalah untuk memenuhi persyaratan ketersediaan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kinerja dengan mendukung pembagian beban lintas tautan paralel. *Load Sharing*, terkadang disebut *load balancing*, memungkinkan dua atau lebih antarmuka atau jalur untuk dibagikan beban lalu lintas.

E. Keamanan (*Security*)

Keamanan adalah tujuan teknis utama, dan desain keamanan adalah salah satu aspek terpenting desain jaringan organisasi. Meningkatnya ancaman baik dari dalam maupun dari luar jaringan organisasi memerlukan aturan dan teknologi keamanan paling mutakhir. Secara keseluruhan tujuan yang dimiliki sebagian besar organisasi adalah bahwa masalah keamanan seharusnya tidak mengganggu operasional organisasi.

Kegiatan perancangan desain keamanan jaringan secara efektif meliputi:

1. Mengidentifikasi Aset Jaringan (*Identifying Network Assets*)

Mengidentifikasi aset yang harus dilindungi, nilainya aset, dan biaya yang diharapkan terkait dengan kehilangan aset ini jika keamanan pelanggaran terjadi. Aset jaringan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan data. Aset juga termasuk kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan reputasi perusahaan.

Data yang digunakan perusahaan untuk mencapai misinya adalah aset yang sering diabaikan. Data dapat mencakup *blueprint*, dokumen perencanaan keuangan, hubungan pelanggan informasi, dokumen analisis persaingan, informasi konfigurasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak, nomor Jaminan Sosial karyawan, informasi lencana karyawan, dan sebagainya.

Integritas dan kerahasiaan data harus dilindungi dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Beberapa aset penting dalam jaringan adalah perangkat jaringan seperti *switch*, *router*, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi (IDS) yang memberikan layanan keamanan untuk pengguna jaringan. Oleh karena perangkat-perangkat ini menjadi target bagi peretas, maka perlu diperkuat agar tidak mudah diintervensi terhadap intrusi.

2. Menganalisis Risiko Keamanan (*Analyzing Security Risk*)

Menganalisa ancaman potensial dan mendapatkan pemahaman tentang kemungkinan dampak bisnis mereka. Penyusunan kebijakan keamanan dan desain jaringan yang aman memerlukan proses analisis risiko dan konsekuensinya yang berkelanjutan karena risiko dapat berubah dalam tingkat keparahan dan probabilitasnya.

3. Membangun Kebutuhan Keamanan (*Developing Security Requirements*)

Masalah keamanan seharusnya tidak mengganggu kemampuan organisasi untuk melakukan bisnis. Persyaratan keamanan paling mendasar yang dimiliki setiap organisasi. Keamanan sekunder persyaratannya adalah untuk melindungi aset agar tidak lumpuh, dicuri, diubah, atau dirugikan.

4. Menetapkan kebijakan keamanan (*Developing a Security Policy*)

Kebijakan keamanan memberitahu pengguna dan pimpinan tentang kewajiban mereka untuk melindungi aset teknologi dan informasi. Secara umum, suatu kebijakan setidaknya harus mencakup item-item berikut:

- a. Kebijakan akses yang menetapkan hak dan hak akses. Kebijakan akses harus memberikan pedoman untuk menghubungkan jaringan eksternal, menghubungkan perangkat ke jaringan, dan menambahkan perangkat lunak baru ke sistem. Kebijakan akses mungkin juga membahas caranya data dikategorikan (misalnya, rahasia, internal, dan sangat rahasia).
- b. Kebijakan akuntabilitas yang mendefinisikan tanggung jawab pengguna, staf operasi, dan manajemen. Kebijakan akuntabilitas harus menetapkan kemampuan audit dan memberikan pedoman penanganan insiden yang menentukan apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika kemungkinan intrusi terdeteksi.

- c. Kebijakan otentikasi yang membangun kepercayaan melalui kebijakan kata sandi yang efektif dan mengatur pedoman untuk otentikasi lokasi jauh.
 - d. Kebijakan privasi yang menetapkan ekspektasi privasi yang wajar mengenai pemantauan surat elektronik, pencatatan penekanan tombol, dan akses ke file pengguna.
 - e. Pedoman pembelian teknologi komputer yang menentukan persyaratan untuk memperoleh, mengkonfigurasi, dan mengaudit sistem dan jaringan komputer untuk kepatuhan dengan kebijakan tersebut.
5. Mengembangkan prosedur untuk menerapkan kebijakan keamanan (*Develop procedures for applying security policies*)
- Prosedur keamanan merupakan penerapan dari kebijakan keamanan. Prosedur tersebut meliputi konfigurasi, login, proses audit, dan pemeliharaan. Prosedur keamanan harus ditulis untuk pengguna, administrator jaringan, dan administrator keamanan. Prosedur keamanan juga memuat penanganan insiden yaitu, apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika intrusi terdeteksi.
6. Menguji keamanan secara periodik
- Pengujian keamanan jaringan dilakukan secara periodik misal satu tahun sekali untuk memastikan konfigurasi dan perangkat lunak perangkat keamanan jaringan sudah optimal, dan jika ditemukan adanya celah keamanan dapat segera dilakukan perbaikan.
7. Memelihara keamanan (*Maintain security*)
- Keamanan harus dijaga dengan menjadwalkan audit independen berkala, membaca audit log, menanggapi insiden, membaca literatur saat ini dan peringatan agen, melakukan pengujian keamanan, pelatihan administrator keamanan, dan memperbarui rencana dan kebijakan keamanan. Keamanan jaringan harus menjadi proses abadi. Risiko berubah seiring waktu, dan sebagainya harus keamanan. Penerapan, pemantauan, pengujian, dan peningkatan keamanan adalah proses yang tidak pernah berakhir.

F. Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah

Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadikan Distribution Switch sebagai pusat topologi setelah mendapat aliran internet dari Diskominfo dengan menggunakan kabel Fiber Optic dengan kecepatan transmisi 1000 Mbps sedangkan untuk Diskominfo sendiri mendapat jaringan internet dari vendor PT. Telkom dengan bandwidth internet sebesar 1000 Mbps dan PT. HSP dengan bandwidth internet sebesar 1300 Mbps. Distribution Switch juga menjadi tempat terhubungnya antar OPD dan perangkat kerja lainnya dengan menggunakan transmisi kabel Fiber Optic dengan kecepatan transmisi data 1000 Mbps ke tiap OPD.

G. Usulan Infrastruktur Jaringan Data

Infrastruktur jaringan data yang ada saat ini kurang adaptif terhadap semakin besarnya lalu lintas data, proses, dan pengguna serta keamanan jaringan. Oleh karena itu, arsitektur infrastruktur jaringan perlu didesain dengan menggunakan pendekatan zonasi. Zonasi infrastruktur jaringan akan memudahkan dalam pengembangan skalabilitas (*scalable*) sesuai dengan fungsi atau layanan dari zona tersebut. Zonasi yang diusulkan terdiri dari:

a. Zona Jaringan Inti (*Core Network*)

Merupakan zona interkoneksi antar zona. Perangkat pendukung zona jaringan inti adalah *Switch Layer 3* dengan kapasitas besar untuk menangani lalu lintas data antar zona. Perangkat *switch Core* ini sebaiknya tidak digunakan untuk fungsi lainnya seperti *DHPC pusat data*, dan lainnya.

b. Zona Jaringan Antar Gedung (*Campus Network*)

Jaringan lokal yang ada di setiap gedung-gedung di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berdekatan dengan kantor Diskominfo dapat dikelola dalam satu jaringan lokal yakni jaringan antar gedung (*Campus Network*).

c. Zona pusat data (*pusat data Farm*)

pusat data database, file pusat data, *storage* yang tidak langsung diakses oleh pengguna ditempatkan di zona *pusat data Farm*.

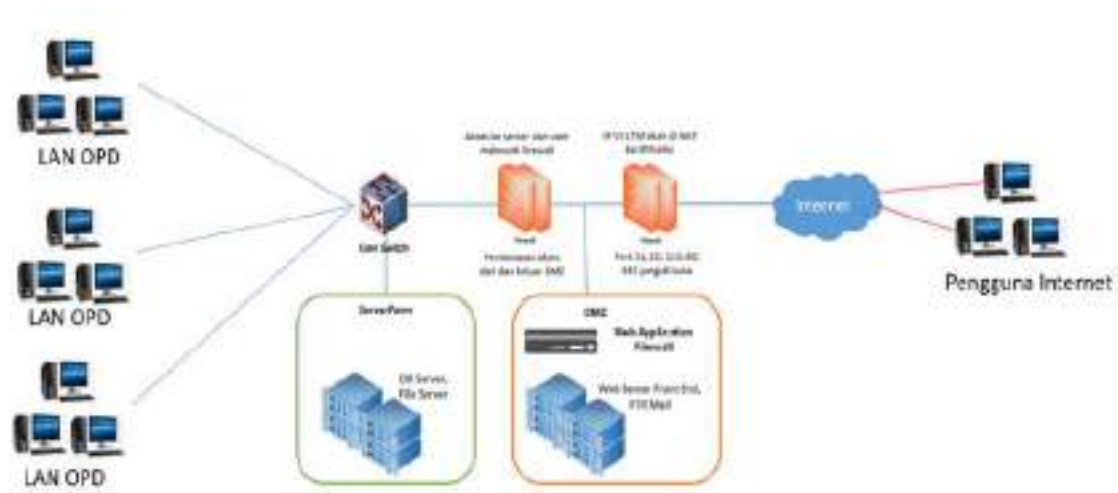
d. Zona Internet (*Internet Edge*)

Zona internet adalah zona yang melayani akses internet pengguna atau akses ke aplikasi *web internet* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, terdapat *De-Militerized Zone (DMZ)* untuk lokasi pusat data – pusat data yang diakses oleh publik melalui internet seperti *web pusat data*, *mail pusat data*, dan *cloud file pusat data*. Interkoneksi dari *web pusat data* ke *database pusat data* atau *file storage* harus difilter terlebih dahulu oleh *firewall*.

- e. Zona Jaringan Antar perangkat daerah (MAN)
Interkoneksi antara pusat data dengan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis ada di zona *Metropolitan Area Network (MAN)* dengan koneksi menggunakan kabel jaringan *fiber optic* atau radio link. Setiap perangkat daerah atau UPT memiliki jaringan lokal komputer (*LAN*) sendiri. Sehingga akses ke *pusat data* atau internet dari Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis menggunakan protokol *routing* seperti *static route*.
- f. Zona Jaringan Antar Kementerian/Lembaga (WAN)
Interkoneksi antara pusat data dengan kementerian atau lembaga lainnya berada di zona *Wide Area Network (WAN)*. Interkoneksi ini menggunakan jaringan *Metro-E* atau *VPN-IP* dari penyedia layanan WAN (*provider*). Pembatasan akses ke pusat data – pusat data di Pusat Data seperti alamat *IP*, *port*, dan lainnya akan dikonfigurasi di *router WAN*.

Server Farm dan DMZ

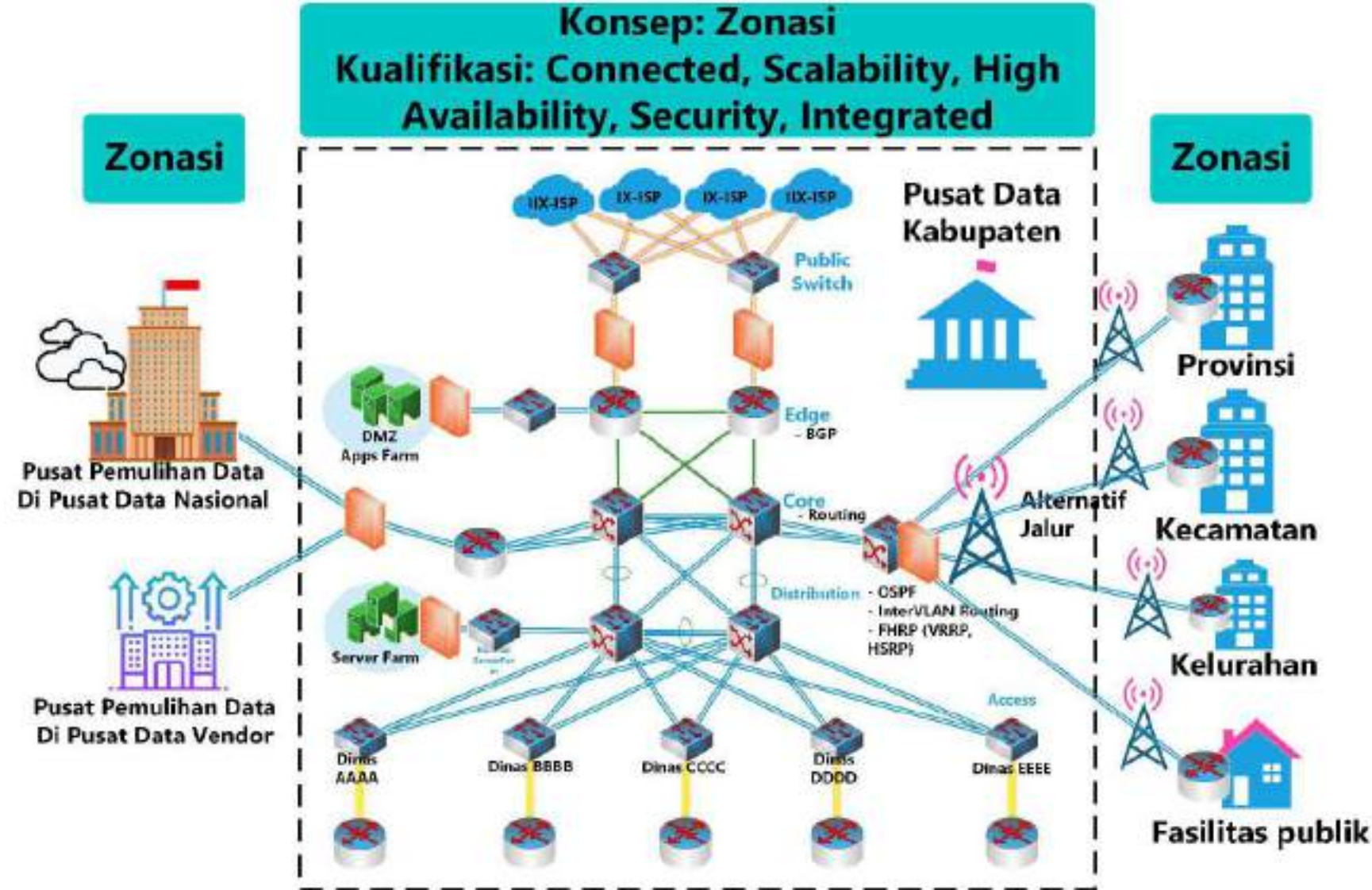
Topologi *Server Farm* dengan *DMZ* dapat digambarkan secara sederhana seperti di bawah ini :



Gambar 2.5.2.4.3 Pemisahan Logik *Server Farm* dengan *DMZ*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa antara pusat data *Farm* dan *DMZ* dipisahkan oleh perangkat *firewall* dan *Core Switch*. Pengguna – pengguna di perangkat daerah atau UPT akan dibatasi akses ke *server farm* melalui konfigurasi di *router MAN*. Akses aplikasi *web* dari pengguna di perangkat daerah/UPT menggunakan jaringan lokal (*intranet*). Akses aplikasi *web* melalui internet akan melewati *firewall* yang telah dikonfigurasi hanya *port* tertentu misal *port 80 (http)* atau *port 443 (https)* yang dibuka (*open*). *Firewall* secara logik akan dikonfigurasi untuk menyaring akses dari paket data dari *pusat data Farm* ke *DMZ* dan sebaliknya. Di dalam *DMZ* juga terdapat perangkat *Web Application Firewall* untuk perlindungan aplikasi *web* dari serangan seperti *SQL Injection*, *Site Cross Scripting (XSS)*, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar usulan arsitektur jaringan data Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berbasis Zonasi.

Berikut ini adalah usulan topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.



Gambar 2.5.2.4.4. Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar topologi di atas sebagai berikut :

1. koneksi internet dibagi menjadi 2 (dua) layanan yakni :
 - a. IP Transit yang digunakan untuk akses internet pusat data.
 - b. *Broadband* yang digunakan untuk akses internet komputer pengguna, perangkat bergerak (*laptop*), maupun telepon cerdas (*smartphone*).
2. koneksi internet *IP Transit* maupun *Broadband* menggunakan 2 (dua) penyedia layanan internet (ISP).
3. semua perangkat inti dan kritis sudah *redundant* seperti :
 - a. *router internet IP Transit* maupun *router internet Broadband*;
 - b. *Next-Generation Firewall (NG-Firewall)*;
 - c. *Core Switch*; dan
 - d. *Switch* pusat data.
4. *DMZ* digunakan untuk penempatan pusat data - pusat data yang diakses oleh publik/masyarakat melalui internet seperti *web* pusat data aplikasi, email pusat data, dan *cloud storage*. *Switch* pusat data *DMZ* langsung terkoneksi ke *NG-Firewall*.
5. *Pusat data Farm* digunakan untuk penempatan pusat data - pusat data yang hanya dapat diakses dari dalam jaringan Diskominfo antara lain pusat data Database, File pusat data, *DNS* pusat data, *NTP* pusat data, *DHCP*, dan lain - lain. *Switch* pusat data *Farm* langsung terkoneksi ke *Switch Core*.
6. Jaringan Lokal (LAN) Gedung A, dan B merupakan koneksi komputer, printer, dan lainnya yang berada satu gedung (Diskominfo) dengan perangkat jaringan utama. Jaringan LAN terdiri dari jaringan kabel (*wired*) dan non-kabel (*wireless*). Pengaturan perangkat *Access Point* pada jaringan *wireless* menggunakan *Wireless Controller* yang terkoneksi dengan *Switch Core*.
7. Jaringan Dalam Kota (MAN) merupakan koneksi antar LAN di setiap kantor perangkat daerah yang tersebar di beberapa lokasi. Interkoneksi menggunakan media *fiber optic* atau *radio link (wireless)*.
8. Jaringan Skala Luas (WAN) merupakan koneksi antara jaringan Diskominfo dengan Kementerian/Lembaga lain. Interkoneksi menggunakan layanan *VPN-IP* atau *Metro-E*.

2.5.2.5. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**

Seiring dengan adanya perkembangan proses bisnis serta kebutuhan pengguna informasi seperti pertukaran data/informasi antar organisasi di lingkungan pemerintahan, dan teknologi aplikasi yang heterogen maka diperlukan suatu sistem yang memudahkan dalam proses pertukaran data antar organisasi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paragraf 7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pasal 33:

- 1. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- 2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk menghubungkan berbagai layanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui satu *platform* atau portal tunggal. Ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menemukan dan mengakses berbagai layanan pemerintah yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi berbagai situs *web* atau kantor pemerintah yang berbeda. Sistem ini biasanya mencakup fitur seperti pengajuan permohonan *online*, informasi status permohonan, dan pembayaran *online* untuk layanan yang ditawarkan.

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dengan tujuan antara lain:

- a. efisiensi kerja;
- b. mewujudkan layanan yang cepat, mudah, dan murah;
- c. meningkatkan tingkat ketersediaan, dan validitas data; dan
- d. dapat melakukan prediksi dan analisis untuk sistem pengambil keputusan (*Decision Support System*).



Gambar 2.5.2.5.1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Secara umum, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari: Integrasi Data (Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi), Integrasi Presentasi (Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi) dan Integrasi Fungsional (Proses integrasi dilakukan pada level logika bisnis pada beberapa aplikasi). Adapun secara detail Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dijabarkan sebagai berikut :

A. Integrasi Data

Integrasi data fokus pada perpindahan data antara aplikasi dengan tujuan membagi data yang sama ke beberapa aplikasi yang berbeda. Dari sudut pandang teknis, integrasi level data ini secara relatif lebih sederhana yang sudah sangat dikenal oleh kebanyakan pengembang. Mengakses basis data lebih mudah dan ada beberapa tools yang memudahkan *sharing* data dan mempercepat. Selain itu, integrasi level data tidak memerlukan perubahan aplikasi.

Integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi data rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*). Integrasi data diperlukan karena adanya berbagai kebutuhan, seperti :

- a. Data yang sama (misalnya: data penduduk) dapat dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi); dan
- b. Data suatu instansi dapat dipakai bersama oleh instansi-instansi lain yang memerlukan (tidak perlu ada duplikasi data dalam suatu lingkungan organisasi).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses integrasi data antara lain :

- a. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data dapat menghasilkan *output*/keluaran yang tidak sesuai dan berdampak pada pengambilan keputusan.
- b. Syarat integrasi harus dipenuhi dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: konsisten dalam penamaan variabel, konsisten dalam ukuran variabel, konsisten dalam struktur pengkodean dan konsisten dalam atribut fisik dari data. Adapun masalah-masalah yang mungkin ada pada integrasi data yaitu adanya heterogenitas data, otonomi sumber data, kebenaran dan kinerja *query*/permintaan.

Penerapan interoperabilitas data diperlukan kaidah sebagai berikut :

1. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Fokus Pengembangan SPL

SPL dapat dikembangkan dengan berdasarkan pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemerintah, swasta baik lokal maupun internasional :

1. G2G: Interaksi sistem antar lembaga atau badan pemerintahan;
2. G2B: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dan bisnis/industri;
3. G2C: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan masyarakat;
4. G2Org: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan organisasi non pemerintah; dan
5. G2OG: Interaksi sistem badan pemerintahan antar negara.

Application Programming Interface (API)

Aplikasi Perantara Akses Data Elektronik yang berbasis Layanan Web umumnya dinamakan Antarmuka Program Aplikasi (*Application Programming Interface/API*) atau disingkat *Web-API*. *API* adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu pengembang (*developer*) aplikasi melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. *API* memungkinkan *developer* untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti *function*, *protocols* dan *tools* lain. *API* bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.

Keuntungan memprogram dengan menggunakan *API* adalah:

1. Portabilitas

Programmer yang menggunakan *API* dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah terinstall *API* tersebut. Sedangkan *system call* berbeda antar sistem operasi, dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda.

2. Lebih mudah dimengerti.

API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti daripada bahasa *system call*. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan.

3. Daur ulang (*Reusable*)

Web-API bersifat *reusable* (dapat didaur ulang) tanpa merubah akses layanan yakni alamat dan atribut *end point*.

Web-API digunakan sebagai akses terhadap suatu fungsi/prosedur pengolahan data dalam program aplikasi yang dikomunikasikan dari aplikasi lain yang berbeda *platform* dan lokasi bahkan dengan jarak yang berjauhan melalui jaringan internet umumnya dinamakan *Remote Procedure Call (RPC)* atau dengan kata lain *Web-API* dapat mengakses sumberdaya layanan, program, informasi atau data dari tempat yang berbeda. *Web-API* berfungsi menterjemahkan bentuk, struktur, dan semantik suatu sumber data ke dalam format data standar yang dapat dibaca oleh semua Aplikasi berupa format data *XML*, *JSON*, *PHP-ARRAY*, *PHP-SERIALIZE*.

Komunikasi data melalui *Web-API* dapat dilakukan melalui beberapa model interkoneksi, diantaranya:

- a. *SOAP (Simple Object Access Protocol)*



Gambar 2.5.2.5.2 Arsitektur SOAP

Komunikasi data model SOAP dilakukan antara Aplikasi Client/Request (SOAP-Client) dengan Web-API/Provider (SOAP-pusat data) melalui alamat Web-API dengan protokol HTTPs (Hypertext Transfer Protocol/Secure). Informasi Metadata yang disediakan SOAP-pusat data dapat disajikan melalui aplikasi Web-Browser dalam bentuk dokumen format XML dengan nama Web Services Description Language (WSDL), sementara data permintaan (SOAP-Request) dan tanggapan (SOAP-Response) dilewatkan diantara SOAP-Client dan SOAP-pusat data dalam format dokumen XML SOAP-Envelope yang dibentuk oleh fungsi SOAP-pusat data pada Web-API.

b. REST (Representational State Transfer)



Gambar 2.5.2.5.3. Arsitektur REST

Komunikasi model REST dilakukan antara Aplikasi Client/Requester dengan Web-API/Provider melalui Alamat Web-API dengan protokol HTTPs (Hypertext Transfer Protocol/Secure). Informasi Metadata yang disediakan Web-API dapat disajikan melalui aplikasi Web-Browser dalam bentuk dokumen format XML/HTML/JSON/CSV dengan nama Web Application Description Language (WADL), sementara data permintaan (Adapter-Request) dan tanggapan (API-Response) dilewatkan di antara Aplikasi dan Web-API dalam format dokumen standar XML, JSON, RSS yang dibentuk oleh Web-API.

B. Integrasi Presentasi

Integrasi interaksi pengguna dapat dicapai melalui pembuatan pengguna dengan sistem data yang berbeda. Misalnya menggunakan pintu untuk berinteraksi dengan data dan sistem intelegensi bisnis yang berbeda. Dengan demikian aplikasi dapat terintegrasi sehingga pengguna dapat melakukan operasi dengan Single Sign On (SSO). Sistem SSO merupakan salah satu teknologi yang dapat mengizinkan para penggunanya untuk dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan

menggunakan satu akun pengguna saja. Sistem SSO merupakan salah satu solusi untuk *identity management* dan *access control* yang ada di dalamnya. Penerapan sistem SSO memberikan kemudahan kepada pengguna dengan cukup melakukan otentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di dalam suatu jaringan atau aplikasi.

C. Integrasi Fungsional (Proses Bisnis)

Integrasi proses bisnis dilakukan dengan cara mengkoordinasikan setiap aktivitas melalui proses bisnis, seperti penjualan dan penagihan. Adapun tahapan dalam integrasi proses bisnis yaitu perencanaan dalam menentukan arah perusahaan, menerjemahkan strategi yang dibentuk dalam proses bisnis perusahaan, dan menerapkan serta memastikan bahwa proses bisnis yang direncanakan dijalankan sesuai dengan strategi perusahaan. Latar belakang diperlukannya integrasi proses bisnis antara lain:

a. Efisiensi

Beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang terintegrasi.

b. Persaingan bisnis

Persaingan instansi lain dengan konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga integrasi harus dilakukan untuk bersaing

c. Perkembangan Teknologi Informasi

Semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga integrasi proses bisnis semakin lebih mudah dilakukan.

D. Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan

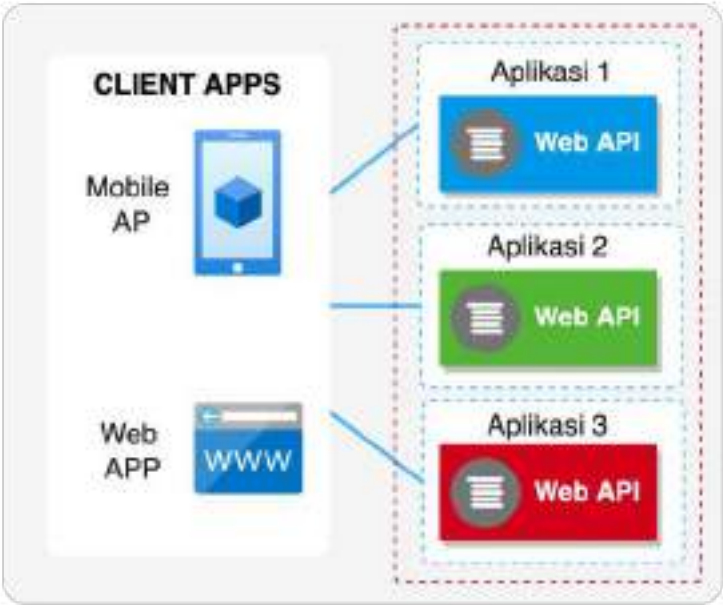
Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengimplementasikan SPLP dengan menggunakan platform yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo dengan alamat <https://splpdev.layanan.go.id/devportal/apis>.

E. Usulan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan

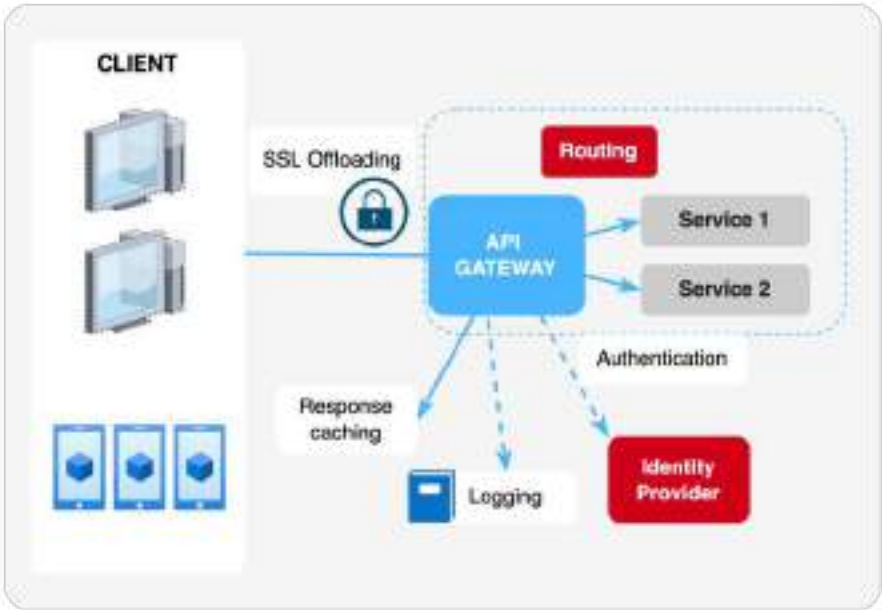
Terdapat beberapa cara suatu aplikasi mengakses *service* pada aplikasi lainnya. Salah satunya dengan pengaksesan langsung atau *direct access* pada *service* yang dimiliki oleh suatu aplikasi.

Akses langsung pada Web API Aplikasi

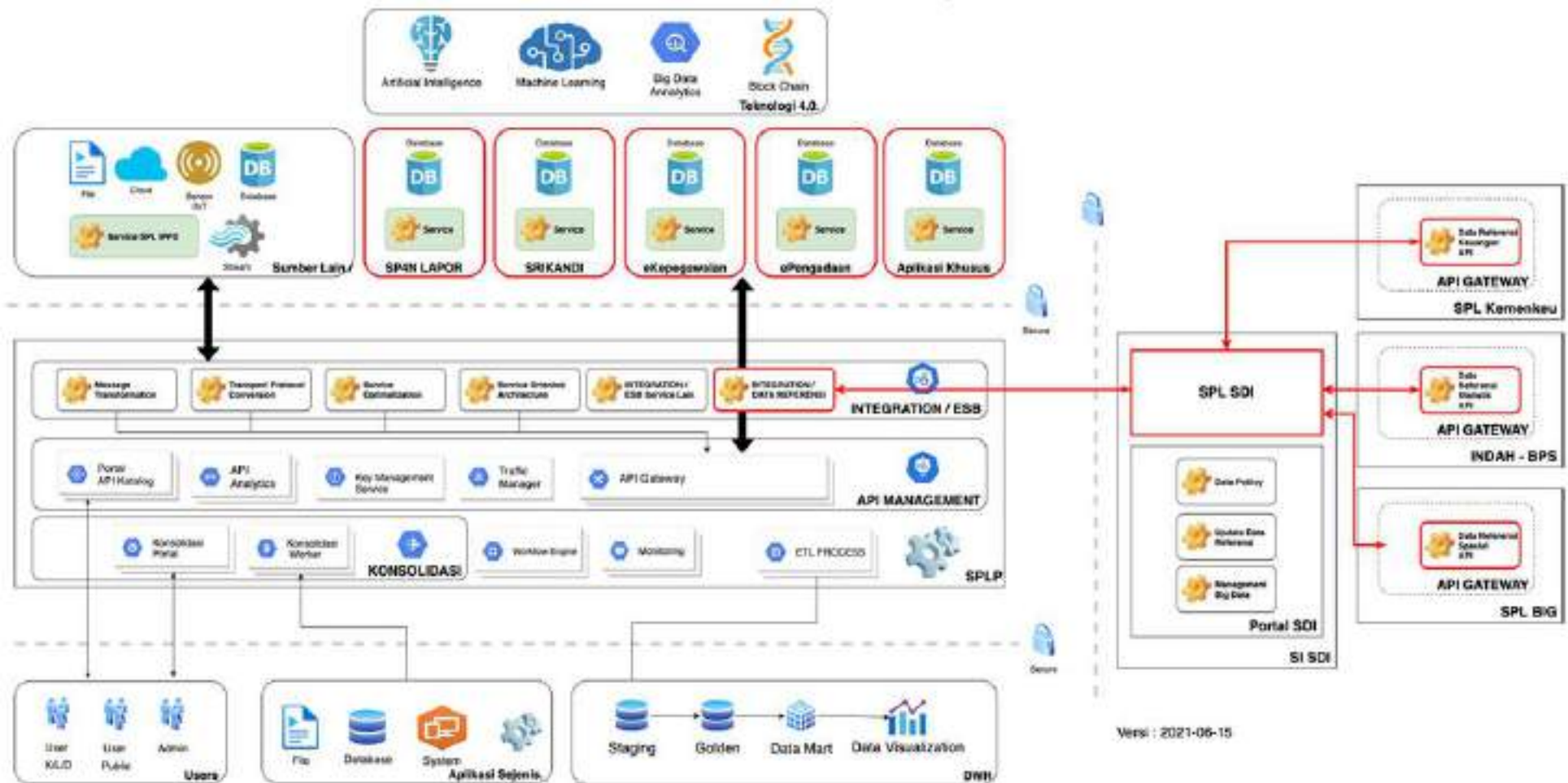
Cara pertama yang sering banyak digunakan, walaupun bukan pendekatan yang terbaik adalah dengan cara mengakses langsung pada setiap *service*. Biasanya setiap *service* memiliki suatu *IP public* yang dapat diakses dari jaringan internet. Terkadang juga dengan satu *IP public* tetapi dibedakan *port* untuk melayani setiap *service*-nya.



Gambar 2.5.2.5.4 Akses Langsung Antar API



Gambar 2.5.2.5.5. Fungsi API Gateway



Gambar 2.5.2.5.6. Arsitektur Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah



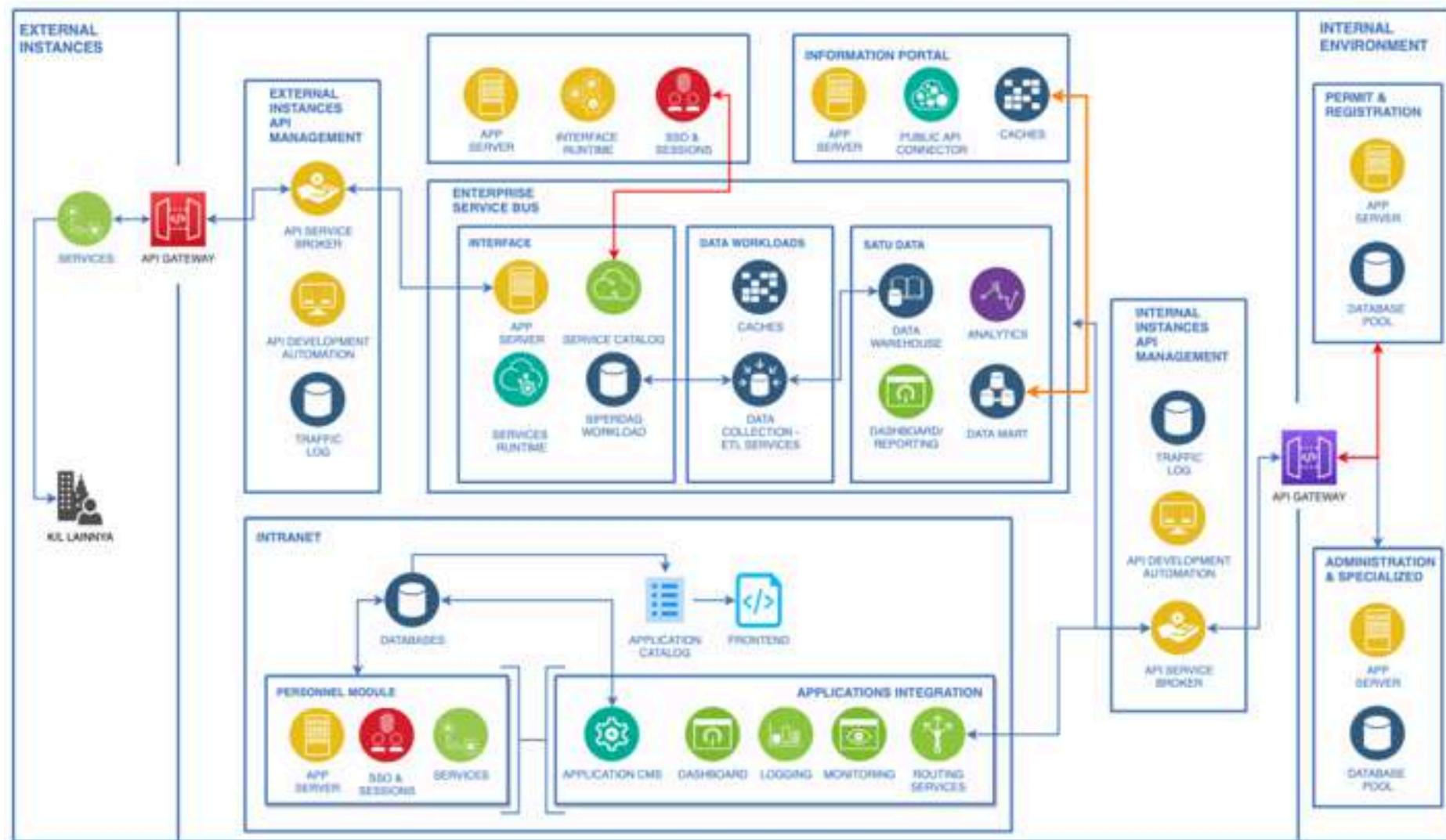
Gambar 2.5.2.5.7. Fitur Utama SPLP

Fitur unggulan yang ada pada teknologi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah antara lain:

1. API Manager
teknologi pengelolaan API yang menjadi gerbang dan portal dalam penyediaan layanan pemerintah.
2. ESB
teknologi enterprise service bus yang mengintegrasikan, memperkaya, serta mengorkestrasikan layanan pemerintah.
3. ETL
Extract Transform Load merupakan teknologi untuk melakukan konsolidasi data dari berbagai tipe sumber data.
4. Multi Tenancy
teknologi replikasi menjadi tenant - tenant memungkinkan teknologi SPLP dapat digunakan untuk instansi - instansi pemerintah.

Usulan Sistem Penghubung Layanan

Untuk menjaga keamanan pertukaran data, dan tingkat ketersediaan *API Manager* maka pengembangan *API Gateway* dapat menyesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan serta keamanan. *API Gateway* internal dapat digunakan untuk pertukaran data yang terjadi di lingkungan internal pusat data (intranet). Sedangkan *API Gateway* eksternal digunakan untuk pertukaran data dengan pihak lain seperti Kementerian/Instansi Pemerintah Daerah lain melalui melalui jalur internet.



Gambar 2.5.2.5.8. Arsitektur API Gateway Internal dan Eksternal

Gambar di atas, memperlihatkan bahwa terdapat dua *API Gateway* yakni *API Gateway* Eksternal (kotak warna merah sebelah kiri) untuk melayani akses ke Kementerian/Lembaga dan *API Gateway* Internal untuk melayani akses *service* internal/intranet.

2.5.3. Arsitektur Keamanan To-Be

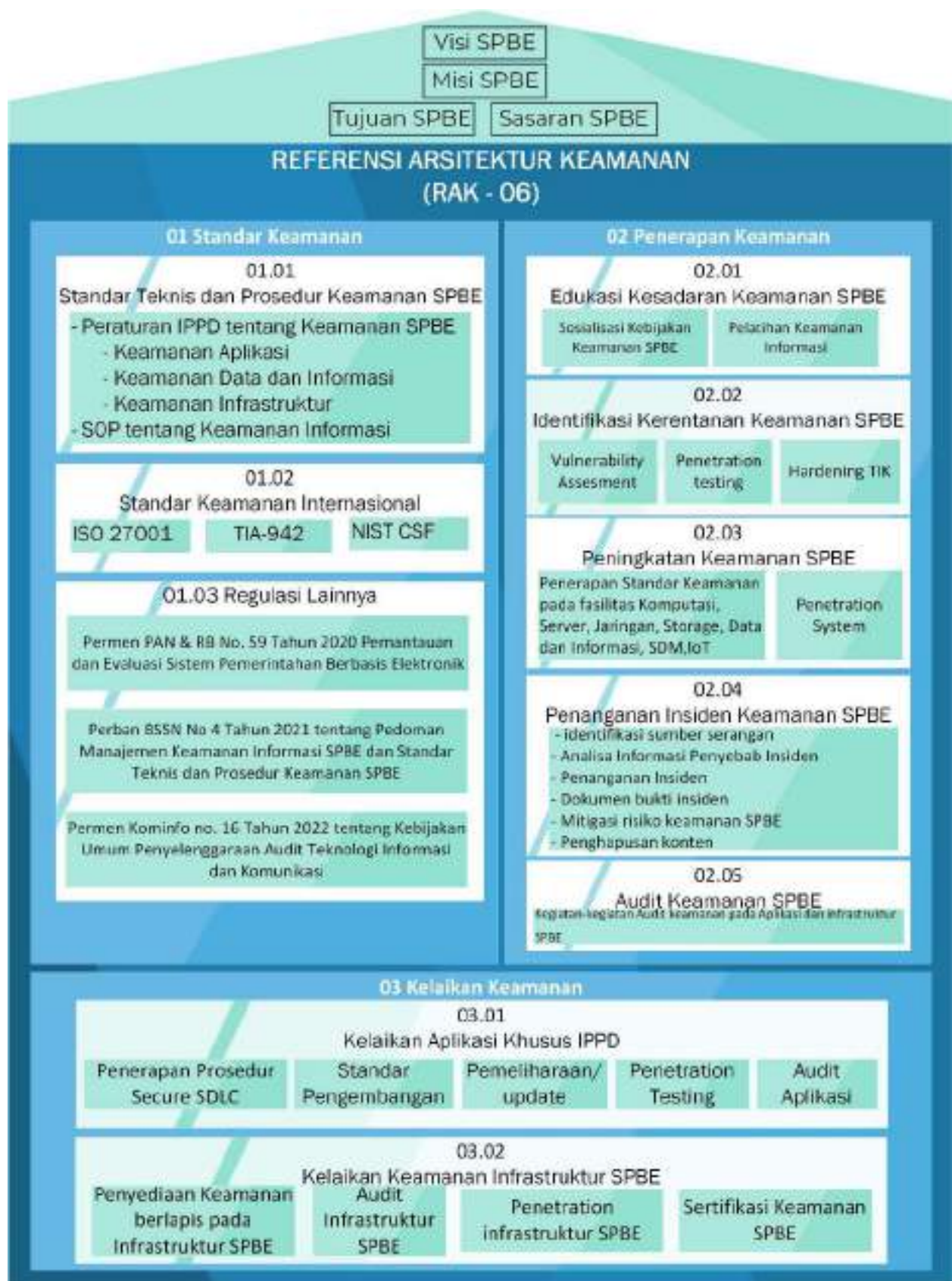
2.5.3.1. Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki beberapa kebijakan, standar, maupun prosedur keamanan informasi. Selain itu kegiatan seperti sosialisasi, peningkatan keamanan, dan penilaian mandiri keamanan informasi beberapa sudah dapat dilaksanakan.

2.5.3.2. Arsitektur Keamanan SPBE

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam usaha organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimiliki. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan tata letak kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan bisa berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, bergantung pada subsistem, produk dan aplikasi-aplikasi yang dikelola/digunakannya. Perbedaan kondisi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan pertahanan mendalam (*defense in depth*).

Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur keamanan juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya harus mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing-masing organisasi.



Gambar 2.5.3.2.1. Arsitektur Keamanan SPBE

2.5.3.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Adapun dasar hukum dari manajemen keamanan informasi SPBE yakni:

- Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- d. Peraturan BSSN Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE dan Standar Teknis & Prosedur Keamanan SPBE.

Perpres 95 menyebutkan bahwa Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Selanjutnya, dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 3 disebutkan bahwa pedoman manajemen keamanan informasi merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasioan, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.

A. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Standar teknis dan prosedur keamanan digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan minimal terpenuhi. Standar tersebut mencakup standar nasional dan internasional, serta peraturan regulasi yang berkaitan dengan keamanan SPBE. Penyusunan pedoman manajemen dan keamanan informasi berbasis risiko yang artinya melibatkan proses asesmen, identifikasi, dan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi di SPBE yang dapat digambarkan sebagai pilar seperti di bawah ini.



Gambar 2.5.3.3.1. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Proses penyusunan manajemen keamanan SPBE dapat mengacu pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.5.3.3.2. Proses Manajemen Keamanan Informasi SPBE

B. SNI ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi

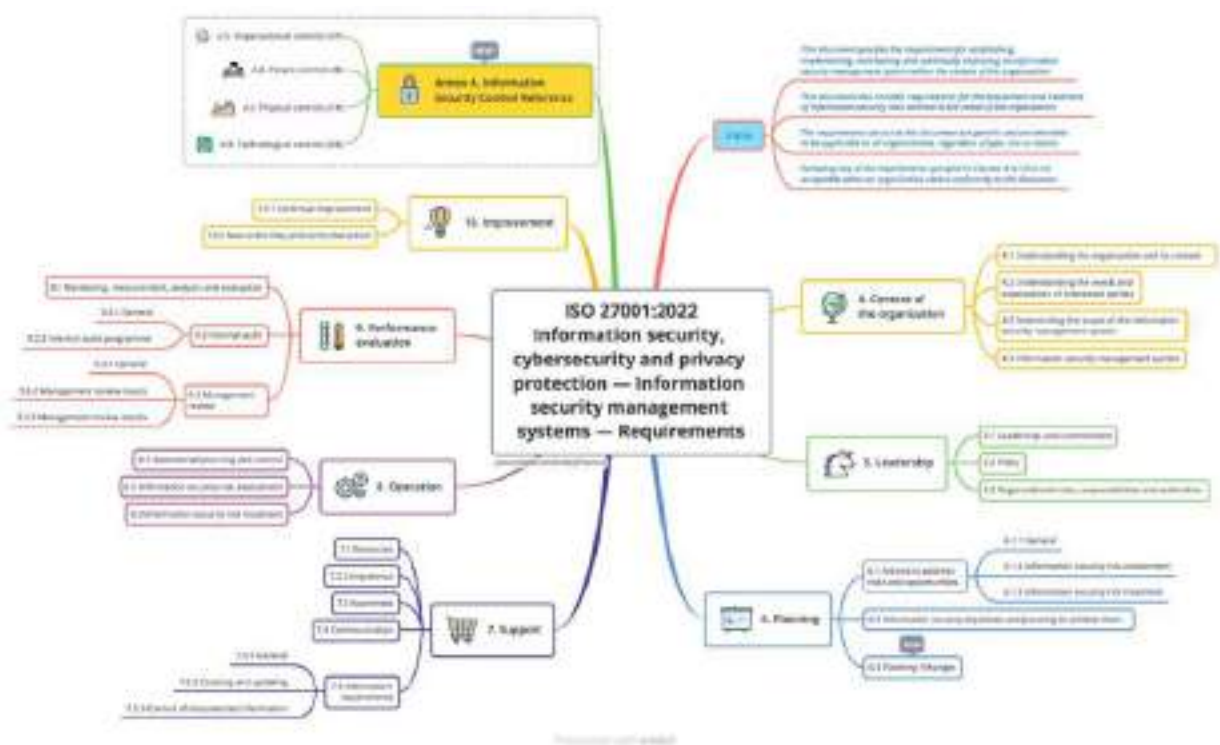
Sistem Manajemen Kemanan Informasi (SMKI) adalah cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan risiko bisnis yang sistematis untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi. Proses dalam SMKI disusun berdasarkan risiko pendekatan bisnis untuk merencanakan (*Plan*), mengimplementasikan dan mengoperasikan (*Do*), memonitor dan meninjau ulang (*Check*) serta memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan (*Act*).

Tabel 2.5.3.3.1. Peta PDCA dalam Proses SMKI

Plan (Penetapan SMKI)	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
Do (Penerapan dan Pengoperasian SMKI)	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
Check (Pemantauan dan Pengkajian SMKI)	Mengakses dan apabila berlaku mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.
Act (Peningkatan dan Pemeliharaan SMKI)	Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit SMKI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya, untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dalam SMKI.

Lingkup dan tujuan sistem manajemen keamanan aplikasi dari SNI ISO 27001:2022 meliputi :

- a. Mendefinisikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meningkatkan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen keamanan informasi;
- b. Persyaratan dalam standar ini bersifat umum dimaksudkan agar dapat diterapkan oleh organisasi tanpa membatasi jenis, ukuran, serta sifat organisasi;
- c. Merupakan standar dengan pendekatan berbasis risiko, artinya melibatkan asesmen serta manajemen risiko terkait keamanan informasi; dan
- d. Merupakan standar internasional dengan sasaran melindungi informasi dalam kontak CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*).



Gambar 2.5.3.3.3 Struktur SNI ISO 27001:2022

Berbeda dengan ISO/IEC 27001:2013, judul lengkap versi 2022 ini adalah ISO/IEC 27001:2022 *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection*. Bagian yang mengalami perubahan paling signifikan adalah Annex A ISO/IEC 27001 yang selaras dengan pembaruan ISO/IEC 27002:2022. Annex A dari ISO/IEC 27001:2022 berisi perubahan pada keduanya, jumlah kontrol, dan daftarnya dalam grup. Judul Lampiran juga telah berubah dari “tujuan dan kontrol-kontrol referensi” menjadi “referensi kontrol keamanan informasi”. Oleh karena itu, tujuan referensi dari setiap kelompok-kontrol yang ada di versi standar sebelumnya, sekarang telah dihapus.

Jumlah kontrol Annex A telah berkurang dari 114 menjadi 93. Penurunan jumlah kontrol sebagian besar berasal dari penggabungan banyak kontrol. 35 kontrol tetap sama, 23 kontrol diganti namanya, 57 kontrol digabungkan menjadi 24 kontrol, dan 1 kontrol telah dibagi menjadi 2 kontrol. 93 kontrol telah direstrukturisasi menjadi empat grup kontrol.

5. Organizational controls	6. People controls	8. Technological controls
5.1. Policies for information security 5.2. Information security roles and responsibilities 5.3. Segregation of duties 5.4. Management responsibilities 5.5. Contact with authorities 5.6. Contact with special interest groups 5.7. Threat intelligence 5.8. Information security in project management 5.9. Inventory of information and other associated assets 5.10. Acceptable use of information and other associated assets 5.11. Return of assets 5.12. Classification of information 5.13. Labelling of information 5.14. Information transfer 5.15. Access control 5.16. Identity management 5.17. Authentication information 5.18. Access rights 5.19. Information security in supplier relationships 5.20. Addressing information security within supplier agreements 5.21. Managing information security in the ICT supply chain 5.22. Monitoring, review and change management of supplier services 5.23. Information security for use of cloud services 5.24. Information security incident management planning and preparation 5.25. Assessment and decision on information security events 5.26. Response to information security incidents 5.27. Learning from information security incidents 5.28. Collection of evidence 5.29. Information security during disruption 5.30. ICT readiness for business continuity 5.31. Legal, statutory, regulatory and contractual requirements 5.32. Intellectual property rights 5.33. Protection of records 5.34. Privacy and protection of PII 5.35. Independent review of information security 5.36. Compliance with policies, rules and standards for information security 5.37. Documented operating procedures	6.1. Screening 6.2. Terms and conditions of employment 6.3. Information security awareness, education and training 6.4. Disciplinary process 6.5. Responsibilities after termination or change of employment 6.6. Confidentiality or non-disclosure agreements 6.7. Remote working 6.8. Information security event reporting 7. Physical controls 7.1. Physical security perimeter 7.2. Physical entry 7.3. Securing offices, rooms and facilities 7.4. Physical security monitoring 7.5. Protecting against physical and environmental threats 7.6. Working in secure areas 7.7. Clear desk and clear screen 7.8. Equipment siting and protection 7.9. Security of assets off-premises 7.10. Storage media 7.11. Supporting utilities 7.12. Cabling security 7.13. Equipment maintenance 7.14. Secure disposal or re-use of equipment	8.1. User endpoint devices 8.2. Privileged access rights 8.3. Information access restriction 8.4. Access to source code 8.5. Secure authentication 8.6. Capacity management 8.7. Protection against malware 8.8. Management of technical vulnerabilities 8.9. Configuration management 8.10. Information deletion 8.11. Data masking 8.12. Data leakage prevention 8.13. Information backup 8.14. Redundancy of information processing facilities 8.15. Logging 8.16. Monitoring activities 8.17. Clock synchronization 8.18. Use of privileged utility programs 8.19. Installation of software on operational systems 8.20. Network security 8.21. Security of network services 8.22. Segregation of networks 8.23. Web filtering 8.24. Use of cryptography 8.25. Secure development life cycle 8.26. Application security requirements 8.27. Secure system architecture and engineering principles 8.28. Secure coding 8.29. Security testing in development and acceptance 8.30. Outsourced development 8.31. Separation of development, test and production environments 8.32. Change management 8.33. Test information 8.34. Protection of information systems during audit testing

*New control, 2022

Gambar 2.5.3.3.4 Struktur SNI ISO 27001:2022

- A.5 Kontrol organisasi (organizational) - berisi 37 kontrol
- A.6 Kontrol orang (people) - berisi 8 kontrol
- A.7 Kontrol fisik (physical) - berisi 14 kontrol
- A.8 Kontrol teknologi (technology) - berisi 34 kontrol

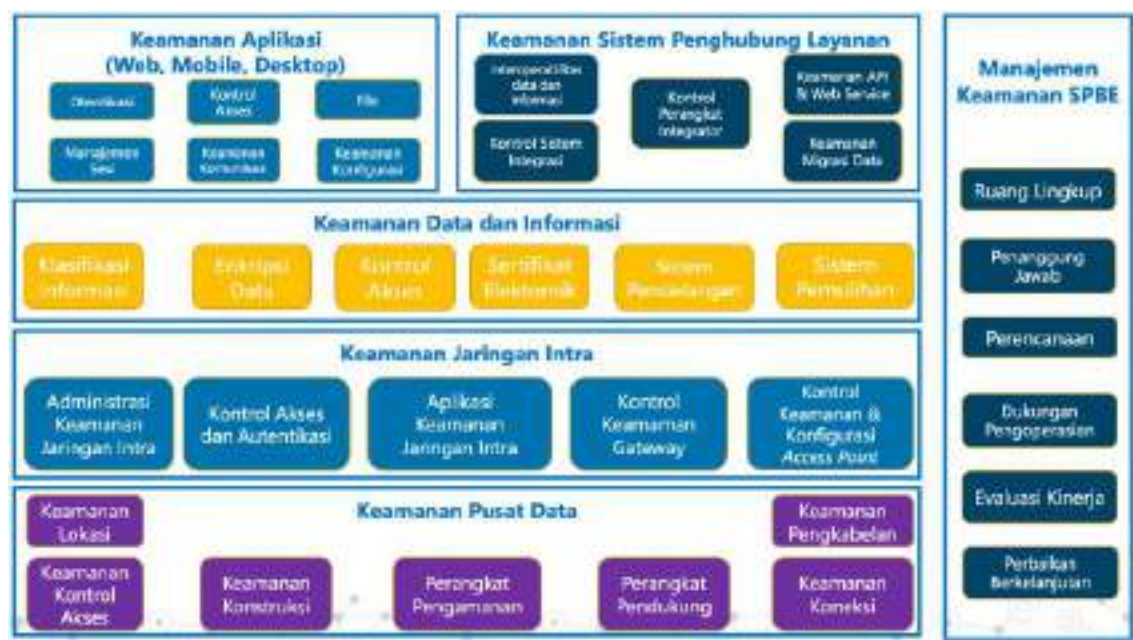
ISO/IEC 27001:2022 juga telah menambahkan 11 kontrol baru yang disebutkan di bawah ke Annex A:

1. Threat Intelligence (A.5.7)
2. ICT readiness for business continuity (A.5.30)
3. Information security for cloud services (A.5.23)
4. Physical security monitoring (A.7.4)
5. Configuration management (A.8.9)
6. Information deletion (A.8.10)
7. Data masking (A.8.11)
8. Data leakage prevention (A.8.12)
9. Monitoring activities (A.8.16)
10. Web filtering (A.8.23)
11. Secure coding (A.8.28)

Perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO 27001:2013 harus menyelesaikan transisi ke ISO 27001:2022 sebelum 31 Oktober 2025. Sedangkan bagi Badan sertifikasi harus mulai mensertifikasi perusahaan dengan standar ISO 27001:2022 paling lambat 31 Oktober 2023.

2.5.3.4. Standar Teknis dan Prosedur

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh IPPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Saat ini telah terbit Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 2.5.3.4.1. Fungsi - Fungsi pada Standar Teknis Keamanan SPBE

A. Keamanan Data dan Informasi

Fungsi - fungsi yang ada di dalam standar teknis keamanan data dan informasi meliputi aspek: (a) Kerahasiaan (*Confidentiality*), (b) Keaslian (*Authentication*), (c) Keutuhan (*Integrity*), (d) Kenirsangkalan (*Non-Repudiation*), dan (e) Ketersediaan (*Availability*). Berikut ini adalah rincian beberapa prosedur untuk memenuhi fungsi standar teknis.

- a. Kerahasiaan dengan menerapkan:
 - Klasifikasi informasi;
 - Enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
 - Kontrol akses atau pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan klasifikasi informasi dapat mengacu pada Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Tabel 2.5.3.4.1 Klasifikasi Informasi

Klasifikasi Informasi	Penjelasan
SANGAT RAHASIA	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa
RAHASIA	Jika diketahui oleh tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
TERBATAS	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan.
PUBLIK	Jika dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Date	Minimum of Strength	Symmetric Algorithms	Factoring Modulus	Discrete Logarithm Key	Discrete Logarithm Group	Elliptic Curve	Hash (A)	Hash (B)
(Legacy)	80	2TDEA*	1024	160	1024	160	SHA-1**	
2016 - 2030	112	3TDEA	2048	224	2048	224	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224	
2016 - 2030 & beyond	128	AES-128	3072	256	3072	256	SHA-256 SHA-512/256 SHA3-256	SHA-1
2016 - 2030 & beyond	192	AES-192	7680	384	7680	384	SHA-384 SHA3-384	SHA-224 SHA-512/224
2016 - 2030 & beyond	256	AES-256	15360	512	15360	512	SHA-512 SHA3-512	SHA-256 SHA-512/256 SHA-384 SHA-512 SHA3-512

Gambar 2.5.3.4.2 Standar Kriptografi untuk Enkripsi

- b. Keaslian
 - Mekanisme verifikasi;
 - Mekanisme validasi; dan
 - Menerapkan sistem *hash function*.
- c. Keutuhan
 - Penerapan pendeteksian modifikasi; dan
 - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- d. Kenirsangkalan
 - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - Penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.
- e. Ketersediaan
 - Penerapan sistem pencadangan secara berkala;
 - Pembuatan perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan

- Penerapan sistem pemulihan.

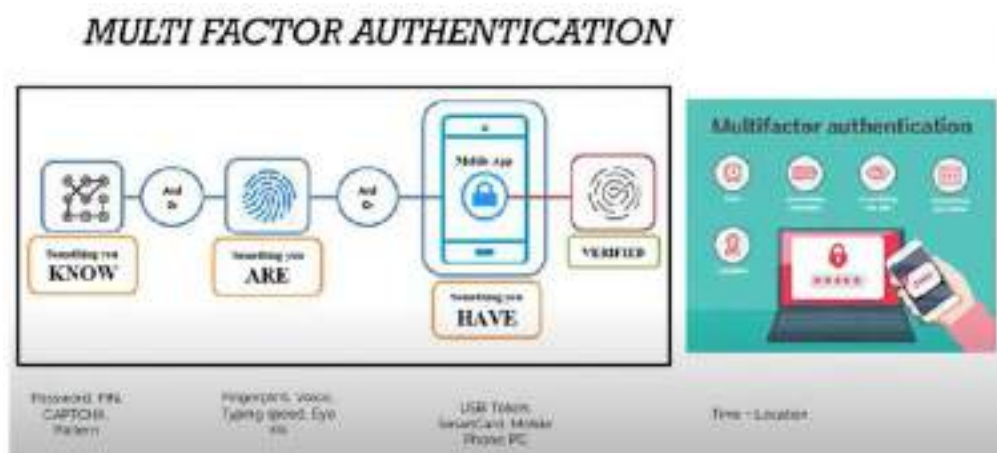
B. Keamanan Aplikasi SPBE

Keamanan aplikasi SPBE meliputi aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *mobile*. Fungsi yang ada di dalam standar teknis keamanan aplikasi berbasis web meliputi aspek :

1. Autentikasi;
2. Manajemen sesi;
3. Persyaratan kontrol akses;
4. Validasi *input*;
5. Kriptografi pada verifikasi statis;
6. Penanganan *error* dan pencatatan *log*;
7. Proteksi data;
8. Keamanan komunikasi;
9. Pengendalian kode berbahaya;
10. Logika bisnis;
11. *File*;
12. Keamanan *API* dan *web service*; dan
13. Keamanan konfigurasi.

Pemenuhan beberapa aspek standar keamanan aplikasi berbasis web diperlukan prosedur – prosedur seperti berikut ini :

1. Autentikasi
 - menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
 - menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi pusat data;
 - mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
 - mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi;
 - mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;
 - menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
 - menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.



Gambar 2.5.3.4.3. Multi Factor Authentication

2. Manajemen Sesi

- menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
- menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
- mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
- mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
- validasi dan pencantuman *session id*;
- perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
- perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.

3. Persyaratan Kontrol Akses

- menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
- mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi;
- mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
- mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.

4. Validasi Input

- menerapkan fungsi validasi *input* pada sisi pusat data;
- menerapkan mekanisme penolakan *input* jika terjadi kesalahan validasi;
- memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi *input*;
- melakukan validasi positif pada seluruh *input*;
- melakukan *filter* terhadap data yang tidak dipercaya;
- menggunakan *fitur* kode dinamis;
- melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
- melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.

5. Kriptografi pada Verifikasi Statis

- menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
- menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
- membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.

6. Penanganan *Error* dan Pencatatan *Log*

- mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
- menggunakan metode penanganan *error* untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga;
- menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
- tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan *log*;
- mengatur cakupan *log* yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
- mengatur perlindungan *log* aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;

- melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log; dan
- melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.

7. Proteksi Data

- melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
- melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;
- melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
- melakukan penentuan jumlah parameter;
- memastikan data disimpan dengan aman;
- menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna; dan
- membersihkan memori setelah tidak diperlukan.

8. Keamanan Komunikasi

- menggunakan komunikasi terenkripsi;
- mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
- mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
- mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

9. Pengendalian Kode Berbahaya

- menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
- memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
- mengatur izin terkait *fitur* atau sensor terkait privasi;
- mengatur perlindungan integritas; dan
- mengatur mekanisme *fitur* pembaruan.

10. Logika Bisnis

- memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
- memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
- memonitor aktivitas yang tidak biasa;
- membantu dalam kontrol anti otomatisasi; dan
- memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.

11. File

- mengatur jumlah *file* untuk setiap pengguna dan kuota ukuran *file* yang diunggah;
- melakukan validasi *file* sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
- melakukan perlindungan terhadap metadata *input* dan metadata *file*;
- melakukan pemindaian *file* yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
- melakukan konfigurasi pusat data untuk mengunduh *file* sesuai ekstensi yang ditentukan.

12. Keamanan API dan Web Service

- melakukan konfigurasi layanan web;
- memverifikasi *uniform resource identifier* API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;
- membuat keputusan otorisasi;
- menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
- menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
- menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web; dan
- menerapkan kontrol anti otomatisasi.

13. Keamanan konfigurasi

- mengkonfigurasi pusat data sesuai rekomendasi pusat data aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
- mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
- menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
- memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
- menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.

Standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile terdiri dari:

- a. penyimpanan data dan persyaratan privasi;
- b. kriptografi;
- c. autentikasi dan manajemen sesi;
- d. komunikasi jaringan;
- e. interaksi *platform*;
- f. kualitas kode dan pengaturan *build*; dan
- g. ketahanan.

Prosedur-prosedur yang dapat diterapkan untuk memenuhi standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile meliputi:

- a. penyimpanan data dan persyaratan privasi
 - menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem;
 - membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan *third party*;
 - menonaktifkan *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
 - melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
 - melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.

b. Kriptografi

- menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan *hardcoded key*;
- mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan;
- menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritma kriptografi yang obsolet;
- menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama; dan
- menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.

c. Autentikasi dan manajemen sesi

- menerapkan autentikasi pada *remote endpoint* terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh;
- menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan *stateful* manajemen sesi;
- memastikan pusat data menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritma yang aman apabila menggunakan autentikasi *stateless* berbasis token;
- memastikan *remote endpoint* memutus sesi yang ada saat pengguna *log out*;
- menerapkan pengaturan sandi pada *remote endpoint*;
- membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
- menentukan masa berlaku sesi dan masa kadaluarsa token pada *remote endpoint*; dan
- melakukan otorisasi pada *remote endpoint*.

d. Komunikasi jaringan

- menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* yang tidak obsolet secara konsisten; dan
- memverifikasi sertifikat *remote endpoint*.

e. Interaksi platform

- memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan;
- melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
- menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema *custom uniform resource locator* dan fasilitas *inter process communication*;
- menghindari penggunaan *JavaScript* dalam *WebView*;
- menggunakan protokol *hypertext transfer protocol secure* pada *WebView*; dan
- mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.

f. Kualitas kode dan pengaturan *build*

- menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid;
- memastikan aplikasi dalam *mode rilis*;
- menghapus simbol *debugging* dari *native binary*;
- menghapus kode *debugging* dan kode bantuan pengembang;
- mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*;
- menentukan mekanisme penanganan *error*;
- mengelola memori secara aman; dan

- mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.

g. Ketahanan

- mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah;
- mendeteksi dan merespons *debugger*;
- mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;
- mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat *reverse engineering*;
- mencegah aplikasi berjalan dalam *emulator*;
- mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
- menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *properti* unik pada perangkat;
- melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan
- menerapkan metode *obfuscation*.

C. Keamanan Sistem Penghubung Layanan

Standar keamanan pada Sistem Penghubung Layanan untuk memastikan penerapan kontrol sistem yang menghubungkan antara Aplikasi SPBE dengan aplikasi SPBE lainnya, atau antara Aplikasi SPBE dengan web pusat data, meliputi:

a. Keamanan interoperabilitas data dan informasi

- menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
- menerapkan sistem enkripsi data;
- memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
- menerapkan sistem *hash function* pada file.

b. Penerapan kontrol sistem integrasi

- menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
- menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
- menerapkan sistem anti *distributed denial of service*;
- menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
- menerapkan manajemen keamanan sesi;
- menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
- menerapkan validasi input;
- menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
- menerapkan sertifikat elektronik pada *web authentication*;
- menerapkan penanganan *error* dan pencatatan *log*;
- menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi;
- menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten file;

- menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
 - memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.
- c. Penerapan kontrol perangkat integrator
- menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
 - menggunakan anti virus dan *anti-spyware* terkini;
 - mengaktifkan fitur keamanan pada peramban *web*;
 - menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
 - mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
 - mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
 - mengaktifkan *sistem recovery* dan *restore* pada perangkat integrator.
- d. Keamanan API dan *web service*
- menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* di antara pengirim dan penerima API;
 - menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource pusat data* dan/atau *third party*;
 - menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - melindungi layanan *web RESTful* yang menggunakan *cookie* dari *cross-site request forgery*; dan
 - memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima API untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.
- e. Keamanan migrasi data
- memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
 - memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
 - mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
 - melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi data;
 - menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
 - melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.

D. Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Standar teknis keamanan jaringan intra diterapkan pada Jaringan Intra Pemerintah (JIP), dan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (JIPPD).

Standar teknis keamanan jaringan intra meliputi :

1. aspek administrasi keamanan jaringan intra;

2. kontrol akses dan autentikasi;
3. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;
4. kontrol keamanan *gateway*;
5. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan
6. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

Beberapa aspek pemenuhan standar teknis keamanan jaringan intra diperlukan prosedur-prosedur seperti berikut ini:

1. Aspek administrasi keamanan jaringan intra

- menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur jaringan intra;
- mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan;
- menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan jaringan intra; dan
- membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.

2. Kontrol akses dan autentikasi

- menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah;
- menggunakan autentikasi untuk mengakses jaringan intra;
- menerapkan pembatasan akses dalam jaringan intra;
- mematikan atau membatasi *protocol*, *port*, dan layanan yang tidak digunakan;
- menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya;
- menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan;
- menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan;
- memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam jaringan intra;
- menerapkan *secure endpoint*;
- memblokir layanan yang tidak dikenal;
- menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses jaringan Intra; dan
- menerapkan pusat data perantara saat *client* mengakses pusat data *database* dalam rangka pemeliharaan.

3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra

- menggunakan perangkat *security information and event management* untuk *network logging* dan *monitoring*;
- menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan;
- menggunakan perangkat *firewall*;
- menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*;
- menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas;

- menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur jaringan intra dan sistem komputer;
- menggunakan perangkat *web application firewall*;
- menggunakan perangkat *load balancer* untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi;
- memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas;
- mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*; dan
- menerapkan sertifikat elektronik.

4. Kontrol keamanan gateway

- menerapkan *content filtering*;
- menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra;
- menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*;
- memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik;
- melaksanakan manajemen *traffic gateway*; dan
- memastikan *port* tidak dibuka secara *default*.

5. Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel

- menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini;
- menerapkan *media access control* pada *address filtering*;
- menerapkan *dedicated service set identifier*;
- menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan;
- menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah;
- menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan; dan
- melakukan *patching firmware* secara rutin.

6. Kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel

- menggunakan kata sandi yang kuat;
- menggunakan protokol model *authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk *management user* atau otentikasi administrator *access point*;
- memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan kontrol keamanan;
- mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel; dan
- menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan.

E. Keamanan Pusat Data

Standar teknis keamanan Pusat Data yakni persyaratan keamanan fisik dan persyaratan koneksi ke perangkat pusat data. Persyaratan keamanan fisik pusat data mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data:

a. Lokasi

- Tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG;
- Tidak berada pada lokasi rawan huruhara seperti perkampungan padat atau kumuh;
- Jarak dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama minimal lebih dari 91 meter; dan
- Jarak ke bandara utama dan/atau pelabuhan minimal lebih dari 1,6 km.

b. Kontrol Akses

- Pusat data merupakan area kunjungan terbatas dan diperuntukan bagi yang telah mendapat izin memasuki area pusat data;
- Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari;
- Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan para pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data; dan
- Untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

c. Konstruksi

- Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang – kurangnya kategori risiko II;
- Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah beban merata bukan hanya pada tulang lantai; dan
- Memenuhi persyaratan ketahanan material gedung meliputi ketahanan api, dan pengembunan.

d. Perangkat Pengamanan dan Pendukung

- CCTV;
- Access door;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Sistem pendinginan; dan
- Sistem monitoring lingkungan (suhu, kelembaban relatif ruangan, genangan air).

e. Pengkabelan

- Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik;

- Setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram; dan
- Pusat data memiliki topologi distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat data. Distribusi jaringan dapat mempergunakan berbagai moda kabel dan berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel.

Persyaratan keamanan koneksi ke pusat data meliputi:

1. Memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional.
2. Memutus akses fisik atau logik dari perangkat yang tidak terotorisasi.
3. Memastikan akses tingkat *administrator* ke pusat data dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*.

2.5.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi

Guna menjalankan keamanan SPBE, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat menerapkan keamanan SPBE yang mengacu pada Kerangka Kerja Keamanan Siber (*Cyber Security Framework*) yang dipublikasikan oleh lembaga *US National Institute of Standards and Technology* (NIST). Pada kerangka kerja tersebut terdapat 5 (lima) aktivitas yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam menghadapi serangan siber yakni identifikasi (*identity*), proteksi (*protect*), deteksi (*detect*), respon (*respond*), dan pemulihan (*recover*). Masing-masing aktivitas tersebut memiliki tujuan dan manfaat serta kegiatan atau inisiatif yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsinya.



Gambar 2.5.3.5.1. Fungsi dan Kategori Aktivitas Keamanan Informasi

A. Identifikasi (*Identify*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu mengidentifikasi sistem, data, aset informasi, dan kemampuan yang harus dilindungi sesuai dengan tingkat kritikalitas dan prioritas yang ditentukan. Kegiatan dalam tahap identifikasi antara lain:

1. Manajemen aset;
2. Lingkungan bisnis;
3. Tata kelola;

4. Penilaian risiko; dan
5. Strategi manajemen risiko.

B. Proteksi (*Protect*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu melakukan tindakan mengembangkan dan menerapkan perlindungan terhadap seluruh aset informasi sesuai dengan kategori keamanan data yang telah ditentukan. Kegiatan dalam tahap proteksi antara lain:

1. Akses kontrol;
2. Pemahaman dan pelatihan;
3. Keamanan data;
4. Proses dan prosedur proteksi informasi; dan
5. Pemeliharaan.

C. Deteksi (*Detect*)

Pada tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi terjadinya serangan siber. Kegiatan dalam tahap deteksi antara lain:

1. Anomali dan kejadian;
2. Pemantauan Keamanan berkelanjutan; dan
3. Proses deteksi.

D. Respon (*Respond*)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat melakukan tindak lanjut terhadap insiden keamanan yang terdeteksi atau terjadi. Kegiatan dalam tahap respon antara lain:

1. Rencana Respon;
2. Komunikasi;
3. Analisis;
4. Mitigasi; dan
5. Improvisasi.

E. Pemulihan (*Recover*)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat memperbaiki atau memulihkan kemampuan, layanan, dan kondisi bisnis kembali seperti sedia kala yang mengalami gangguan keamanan/siber. Kegiatan dalam tahap pemulihan antara lain:

1. Rencana Pemulihan;
2. Improvisasi; dan
3. Komunikasi.



Gambar 2.5.3.5.2. Aktivitas Keamanan Informasi

Aktivitas dan kegiatan dari identifikasi sampai dengan pemulihan dapat dilaksanakan oleh *Security Operation Center* (SOC). Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, SOC berpedoman pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Untuk selanjutnya SOC bisa bekerja sama dengan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang dibentuk bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah (*constituency*) yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim CSIRT akan bertanggung jawab penuh untuk memonitor dan mengelola berbagai isu-isu terkait dengan keamanan internet untuk menjaga aset informasi dan komunikasi dari seluruh unit-unit aktivitas organisasi. Laporan Arsitektur Kondisi Target SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan gambaran kondisi kedepan yang perlu diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kondisi target yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kesenjangan dari kondisi eksisting dan kondisi yang ingin dicapai.

Bab III Penutup

Dokumen kondisi target ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam dokumen *Arsitektur Eksisting SPBE* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

■ ■ ■



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (LIVING DOCUMENT) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (ANNUAL REVIEW).



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO



BUKU 3

PETA RENCANA

ARSITEKTUR SISTEM

PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK

(SPBE)

PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO

2026

Lembar Pengesahan

DOKUMEN ARSITEKTUR & PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPBE
DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Daftar Isi

Bab I Analisis Kesenjangan	4
1.1. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Kegiatan Peta Rencana SPBE	5
Bab II Portofolio Inisiatif Indeks SPBE	47
2.1. Tata Kelola	48
2.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-001)	48
2.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-002)	48
2.1.3. Kebijakan Manajemen Data (PR-T-003)	49
2.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-004)	49
2.1.5. Kebijakan Pusat Data (PR-T-005)	50
2.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-006)	50
2.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-007)	51
2.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-008)	52
2.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-009)	52
2.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi (PR-T-010)	53
2.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-011)	53
2.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE (PR-T-012)	54
2.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-013)	55
2.2. Manajemen SPBE	55
2.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (PR-M-001)	55
2.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-002)	56
2.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-003)	57
2.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-004)	58
2.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-005)	58
2.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-006)	61
2.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-007)	62
2.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-008)	62
2.3. Layanan SPBE	63
2.3.1. Pengembangan Layanan RB Tematik (PR-L-001)	63
2.3.2. Pengembangan Layanan Prioritas SPBE (PR-L-002)	65
2.3.3. Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-003)	66
2.3.4. Pengembangan Platform Helpdesk TIK (PR-L-004)	69
2.3.5. Survey Pengguna Layanan (PR-L-004)	69
2.4. Aplikasi SPBE	70
2.4.1. Pengembangan Aplikasi (PR-A-001)	70
2.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway) (PR-A-002)	73
2.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data) (PR-A-003)	74
2.4.4. Pemeliharaan Aplikasi (PR-A-004)	75
2.5. Infrastruktur SPBE	75
2.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Fasilitas Pendukung Pusat Data (PR-I-001)	75
2.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Server dan	

Storage (PR-I-002)	76
2.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-003)	77
2.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-004)	78
2.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-005)	79
2.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (PR-I-006)	80
2.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi (PR-I-007)	80
2.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-008)	82
2.6. Keamanan Informasi	83
2.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE (PR-K-001)	83
2.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-002)	84
2.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-003)	85
2.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-004)	87
2.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-005)	88
2.6.6. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-006)	89
2.6.7. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-007)	90
2.6.8. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-008)	91
2.7. Audit SPBE	91
2.7.1. Pelaksanaan Audit TIK (PR-AT-001)	91
Bab III Peta Rencana SPBE	93
3.1. Penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2026-2029	94
Bab IV Penutup	210
LAMPIRAN	212

Bab I Analisis Kesenjangan

1.1. Analisis Kesenjangan & Inisiatif Kegiatan Peta Rencana SPBE

Inisiatif kegiatan yang dihasilkan merupakan tindak lanjut dari analisis kesenjangan terhadap proses bisnis yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Analisis ini dilakukan dengan meninjau keselarasan antara kondisi eksisting dengan standar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ideal. Proses analisis mencakup evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan tingkat digitalisasi dari proses bisnis yang ada, serta mengidentifikasi hambatan yang dapat menghambat optimalisasi layanan pemerintahan. Dari hasil analisis kesenjangan tersebut, dirumuskan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat transformasi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun inisiatif yang diusulkan berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan integrasi sistem informasi, otomatisasi layanan administrasi, serta pengembangan kebijakan pendukung dalam implementasi SPBE. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengoptimalkan layanan publik berbasis digital, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Hasil analisis kesenjangan dan rekomendasi inisiatif program yang telah dirumuskan menjadi landasan strategis dalam upaya transformasi digital yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun hasil analisis gap dan inisiatif program atau rekomendasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

Tabel 1.1.1. Analisis GAP dan Rekomendasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
BJN-DAB 02.02.01.01	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan secara optimal.	Pengadaan Tablet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan secara optimal.	Pengadaan TV LED
BJN-DAB 02.02.01.06	Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan secara optimal.	Pemeliharaan Printer
BJN-DAB 02.03.08.01	Penyuluhan Pertanian	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa secara	Pengadaan PC

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa secara optimal.	Pengadaan SAN Storage
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa secara optimal.	Pengadaan Tablet
BJN-DAB 02.03.15.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	Pengembangan Aplikasi SIMPONI
BJN-DAB 02.05.01.01	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan Printer
BJN-DAB 02.05.01.02	Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil secara optimal.	Pengadaan Smartphone
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan Hard Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.	Pengembangan Aplikasi BESTARI
BJN-DAB 02.05.05.01	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
BJN-DAB 02.06.02.01	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Printer
BJN-DAB 02.08.03.01	Promosi Penanaman Modal	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Baterai Kamera
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Pengembangan SAMIN
BJN-DAB 02.08.06.01	Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	Pengadaan Software
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	Pengembangan SIMANIZ
BJN-DAB 03.03.01.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian secara optimal.	Pengadaan Mesin Presensi
BJN-DAB 03.03.02.01	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor secara optimal.	Pengembangan SIMPKB
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Pengembangan SIMPKB
BJN-DAB 03.03.02.02	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	Pengadaan CCTV

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Rekayasa Lalu Lintas secara optimal.	
BJN-DAB 03.03.03.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
BJN-DAB 03.03.03.02	Perizinan Pembangunan Fasilitas Parkir	Perlunya Pengembangan Aplikasi Bojonegoro TIC	Pengembangan Aplikasi Bojonegoro TIC
BJN-DAB 03.03.04.01	Penyediaan Angkutan Umum Orang/Barang	Perlunya Pengembangan Aplikasi APEL GRATIS	Pengembangan Aplikasi APEL GRATIS
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Backup Data Berkala
BJN-DAB 03.04.02.01	Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman	Perlunya Pembuatan Aplikasi SmartPJU	Pembuatan Aplikasi SmartPJU
BJN-DAB 03.05.01.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara optimal.	Penyediaan Perangkat Keras Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Pengembangan Aplikasi SIAP DESA
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa.	Pelatihan Aplikasi SIPADES
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli IT
BJN-DAB 03.05.06.01	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara optimal.	Pengadaan Hard Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Pengadaan Laptop/Notebook

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara optimal.	Pengadaan TV LED
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya Pengembangan Aplikasi SIBUMBO	Pengembangan Aplikasi SIBUMBO
BJN-DAB 03.07.02.02	Pelaksanaan Pelayanan KB	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.	Pengembangan Aplikasi SiBatara
BJN-DAB 04.01.01.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Perlunya Pembuatan Aplikasi SIPATAS	Pembuatan Aplikasi SIPATAS
BJN-DAB 04.01.01.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal.	Penyediaan Lisensi
BJN-DAB 04.01.01.04	Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Perlunya Pengembangan Aplikasi SIDIK PERISA	Pengembangan Aplikasi SIDIK PERISA
BJN-DAB 04.01.04.01	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat secara optimal.	Penyediaan Lisensi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) secara optimal.	License Proxy Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan dan	Pemeliharaan Jaringan

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan secara optimal.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan secara optimal.	Pengadaan Layanan WhatsApp API
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan secara optimal.	Penyediaan Lisensi
		Perlunya Pengembangan Aplikasi E-RM	Pengembangan Aplikasi E-RM
		Perlunya Pengembangan Aplikasi Emergency Button Bojonegoro	Pengembangan Aplikasi Emergency Button Bojonegoro
		Perlunya Pengembangan Aplikasi SIGAP PSC 119	Pengembangan Aplikasi SIGAP PSC 119
BJN-DAB 04.01.04.02	Pelayanan Fasilitas Kesehatan UKM dan UKP	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pengadaan LCD Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya secara optimal.	Media Informasi Kantor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pengadaan Monitor

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya secara optimal.	Pengadaan Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara optimal.	Media Informasi Kantor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Puskesmas secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Puskesmas secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Puskesmas secara optimal.	Pengadaan Mesin Absensi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Puskesmas secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Puskesmas secara optimal.	Pengadaan Raspberry Pi / Mini PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit secara optimal.	Penyediaan Lisensi
BJN-DAB 04.01.04.03	Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Perlunya Pengembangan Aplikasi SINTESA	Pengembangan Aplikasi SINTESA
		Perlunya Pengembangan Aplikasi SINTESA EMAS (RME)	Pengembangan Aplikasi SINTESA EMAS (RME)
BJN-DAB 04.01.04.04	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara optimal.	Penyediaan Lisensi
		Perlunya Pengembangan Aplikasi SIM-RS	Pengembangan Aplikasi SIM-RS
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.	Pengadaan Software
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kesehatan (Customize)
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.	Pengembangan Modul Kefarmasian
BJN-DAB 04.01.04.05	Penerbitan Izin Rumah Sakit	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.	Pembuatan Aplikasi Software Berbasis Web
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan	Pengadaan Software

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.	
BJN-DAB 04.01.04.06	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas secara optimal.	Sewa LED Screen/Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Access Point
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Jaringan LAN
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Managed Switch
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Print Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Rak Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit secara optimal.	Pengadaan SAN Storage Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan	Pengadaan UPS Server

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Rumah Sakit secara optimal.	
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.	Pembuatan Aplikasi Pelayanan Kesehatan (Customize)
BJN-DAB 04.01.06.02	Pemberdayaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan secara optimal.	Pengadaan TV LED
BJN-DAB 04.01.08.01	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi TPM	Perlunya Pengembangan Aplikasi SAJI PANGAN	Pengembangan Aplikasi SAJI PANGAN
BJN-DAB 04.02.01.01	Rehabilitasi Sosial	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial secara optimal.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga secara optimal.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
BJN-DAB 04.02.03.01	Perlindungan Sosial	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga secara optimal.	Pengadaan Printer
BJN-DAB 04.02.03.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Perlunya Pembuatan Aplikasi SIPIK	Pembuatan Aplikasi SIPIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual secara optimal.	Pengadaan Lisensi Canva
BJN-DAB 04.02.04.01	Pemberdayaan Sosial	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
BJN-DAB 04.03.01.04	Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB secara optimal.	Berlangganan Internet
BJN-DAB 04.03.05.01	Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Printer
BJN-DAB 04.03.05.02	Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota secara optimal.	Berlangganan Internet

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
BJN-DAB 05.01.01.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Pengembangan Website JDIIH
BJN-DAB 05.01.02.01	Fasilitasi Hukum	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Pengembangan Aplikasi JDIIH
BJN-DAB 05.02.01.02	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.	Pengembangan Aplikasi Gatramas
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.	SOP Penggunaan Aplikasi
BJN-DAB 06.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan	Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan secara berkelanjutan.	PPDB Online
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa secara optimal.	Pengadaan Router
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan nan.	Pengembangan SILAPDIK
BJN-DAB 06.03.02.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi IGA
BJN-DAB 06.04.01.01	Pemberdayaan Pemuda Pelopor	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Dokumentasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Publikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota secara optimal.	Pengadaan Hard Disk Eksternal
BJN-DAB 06.04.01.03	Pemberdayaan Pemuda Kader	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Dokumentasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Publikasi
BJN-DAB 06.04.02.01	Penyadaran Pemuda dan Kepemudaan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	Belanja Jasa Dokumentasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi	Belanja Jasa Publikasi

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	Sewa LED Screen/Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Dokumentasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Publikasi
BJN-DAB 06.04.02.02	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Dokumentasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota secara optimal.	Belanja Jasa Publikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota secara optimal.	Sewa LED Screen/Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda secara optimal.	Belanja Jasa Publikasi
BJN-DAB 06.05.01.01	Pembinaan Olahraga Rekreasi	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan.	Pengembangan Aplikasi SIPSO
BJN-DAB 06.05.02.01	Peningkatan Sumberdaya Atlet Berprestasi	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Seleksi Atlet Daerah secara optimal.	Sewa LED Screen/Videotron
BJN-DAB 06.05.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	Sewa Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	Sewa LED Screen/Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	Sewa Printer Laser
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	Pengembangan Aplikasi BANG TIGOR

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		kabupaten/kota.	
BJN-DAB 07.05.01.05	Pengawasan Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan izin PPLH	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	Pengembangan Aplikasi SIPP DOKLING
BJN-DAB 08.02.06.01	Pengelolaan Perpustakaan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik secara optimal.	Pengadaan Hard Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.	Pengadaan e-book
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.	Pengembangan Aplikasi e-Maos Bojonegoro
BJN-DAB 09.01.01.04	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
BJN-DAB 09.01.01.05	Fasilitasi Tugas DPRD	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
BJN-DAB 09.01.05.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Pembuatan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Pengembangan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Penyusunan SOP Aplikasi
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Training Aplikasi
BJN-DAB 09.01.07.07	Pengumpulan Data Kependudukan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain secara optimal.	Berlangganan Internet

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.	Penyediaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
BJN-DAB 09.01.07.09	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara optimal.	Pengadaan Alat Perekaman
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara optimal.	Pengadaan Perangkat Keras Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara optimal.	Pengadaan Perangkat Mobile
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan secara optimal.	Pengadaan Synology
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Pengembangan Aplikasi PANAHSRIKANDI
BJN-DAB 09.02.01.02	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Perlunya Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kartu Kendali	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kartu Kendali
BJN-DAB 09.02.02.01	Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah secara optimal.	Belanja Sewa Komputer Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah secara optimal.	Belanja Sewa Komputer Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk	Integrasi Modul SIPD

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Penatausahaan
BJN-DAB 09.02.03.02	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Software / Proxy Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya Pengembangan Aplikasi eMAP.	Pengembangan Aplikasi eMAP
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	Pemeliharaan Aplikasi
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDU
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP 2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Pemeliharaan Aplikasi
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP 2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Pemeliharaan Aplikasi GIS-EL

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
BJN-DAB 09.02.06.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pemeliharaan CCTV
		Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pengadaan Komputer
		Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pengadaan Printer
		Perlunya optimalisasi penyelenggaraan layanan untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara berkelanjutan.	Pengadaan TV LED
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Adaptor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Charge Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Converter Adaptor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Keyboard
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Konektor Converter
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Mouse

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Tenaga Ahli IT
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD secara optimal.	Pengadaan USB Hub
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu secara optimal.	Pengadaan Tablet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas secara optimal.	Pengadaan Smart TV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas secara optimal.	Pengadaan Standing Bracket
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD secara optimal.	Pengadaan Baterai Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD secara optimal.	Pengadaan Lisensi Antivirus
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan	Belanja Peralatan Komputer/Printer

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Mesin Lainnya secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Komputer dan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Laptop, PC, dan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Laptop/PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan PC/Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan PC/Laptop/Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat IIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Printer, PC dan Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Sarana Kantor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung	Pengadaan Perangkat Mobile

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Penyediaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pemeliharaan Mainframe
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan Drone Camera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan Lensa Kamera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan Stabilizer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah secara optimal.	Pengadaan UPS
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD secara optimal.	Pengadaan Smart TV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara optimal.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara optimal.	Pengadaan PC

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa secara optimal.	Pengadaan Konektor Kabel UTP
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa secara optimal.	Pengadaan LCD Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud secara optimal.	Belanja Software
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Langganan Paket Data
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Digital Information Display
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Drone Camera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Genset
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Hard Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Hard Disk Eksternal
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Hardisk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan	Pengadaan Laptop/Notebook

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Mesin Lainnya secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan LCD Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Mesin Antrian
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Monitor LCD
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Network Video Recorder (NVR)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan NVR
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Screen Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Server Streaming
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Server/Data Storage
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Smart TV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Smartphone
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Software
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Tablet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Televisi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung	Pengadaan TV LED

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan UPS
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Video Wall Processor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Videowall
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Pengadaan Videowall CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Penyediaan Perangkat Desktop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Penyediaan Perangkat Keras Storage
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara optimal.	Penyediaan Perangkat Mobile
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Hard Disk Eksternal
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN secara optimal.	Pengadaan Baterai Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE secara optimal.	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor secara optimal.	Pengadaan Keyboard

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Langganan Paket Data
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pengadaan Harddisk Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pengadaan Lisensi Adobe Photoshop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pengadaan Lisensi Capcut
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Pengadaan Penyimpanan Cloud
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Penyediaan Hosting Domain
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Penyediaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara optimal.	Penyediaan Lisensi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara optimal.	Belanja Jasa Dokumentasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara optimal.	Belanja Jasa Publikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pelayanan Umum Kantor secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara optimal.	Sewa LED Screen/Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara optimal.	Penyediaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Smart TV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Langganan Paket Data
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung	Pemeliharaan Laptop

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat TIK
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Access Point
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Baterai Laptop
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Bracket TV LED
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Conference Camera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Drone Camera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Handphone
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Hard Disk Eksternal
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Kabel HDMI
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Keyboard
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Layar Monitor Display
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan LCD Proyektor

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Lisensi Canva Pro
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Memori Card
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Mesin Absensi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Microsoft Office
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Monitor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Penyimpanan Cloud
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Print Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Printhead Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Remot Drone
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan SAN Storage
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Screen Proyektor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Smart TV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Smartboard Interactive Display
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Smartphone
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Pengadaan Software

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlengkapan Kantor secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Soundcard
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan SSD
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Stabilizer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Standing Bracket
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Tablet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan TV LED
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan UPS
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Videotron
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal.	Pengadaan Videotron PPM
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Hard Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan TV LED
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara optimal.	Pengadaan Wireless Gateway
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung	Pengadaan Tablet

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah secara optimal.	Pengadaan Sewa Domain Desa
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah secara optimal.	Penyediaan Hosting Domain
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan Baterai Kamera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan DJI Osmo Pocket 3
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan Lensa Kamera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan Lisensi Capcut
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan Perangkat Zoom
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan Sony NP-FV70A V-Series
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Konten secara optimal.	Pengadaan SSD
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya Pengembangan Aplikasi e-BMD	Pengembangan Aplikasi e-BMD
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Pengembangan Aplikasi SIAP BANSOS
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.	Pengembangan Aplikasi LeMinHo
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Pengembangan Aplikasi Lelang Elektronik

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Pengembangan Aplikasi Manajemen Penghapusan Aset
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	Pengembangan Aplikasi Penyusunan Sewa Elektronik
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Pengembangan Aplikasi e-Bakul
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Langganan Domain Aplikasi PAS
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Pembuatan Website Bhakti Ormasku
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Pengembangan Aplikasi LeMinHo
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Pengembangan Aplikasi SI-Asmara
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	Pengembangan Aplikasi RKBMD
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Pengadaan CCTV
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Penyusunan SOP Aplikasi SinJab
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Penyusunan SOP Aplikasi e-Bakul
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Penyusunan SOP Aplikasi e-Kinerja Kabupaten
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Penyusunan SOP Aplikasi e-SAKIP
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Bimtek Teknik Audit Berbantuan Komputer
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SinJab
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Bakul
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Kinerja
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		untuk pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Aplikasi e-SAKIP
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Pengadaan Tenaga Ahli IT
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Pengadaan Web Admin
BJN-DAB 09.02.11.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara optimal.	Pemeliharaan Laptop/PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara optimal.	Pemeliharaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara optimal.	Penyediaan Perangkat Keras
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Pengembangan Aplikasi SIAP PRAJA (Sistem Informasi Administrasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa)
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Manual Book/Petunjuk Aplikasi SIAP PRAJA
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAP PRAJA
BJN-DAB 09.03.01.01	Peningkatan Implementasi Tata Kelola SPBE	Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Kajian/Penelitian (Dokumentasi Arsitektur SPBE pada SIA-SPBE)
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Kajian/Penelitian (Reviu Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital)
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Kajian/Penelitian (Reviu Peta Rencana SPBE/Pemerintah Digital)
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan dan Dokumentasi Arsitektur SPBE pada SIA-SPBE
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Smart City
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Arsitektur SPBE
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Peta Rencana SPBE
BJN-DAB 09.03.01.02	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE secara optimal.	Pengadaan Bandwidth
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE secara optimal.	Pengadaan Bandwidth IP Transit I
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE secara optimal.	Pengadaan Bandwidth IP Transit II

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE secara optimal.	Pengadaan Bandwidth Metro
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE secara optimal.	Pengadaan Iuran Keanggotaan APJII
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pemeliharaan Command Center
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan Kecamatan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan Wireless
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pemeliharaan NOC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Bandwidth
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Bandwidth IP Transit I
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Bandwidth IP Transit II
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Bandwidth Metro
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Camera Video Conference
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Core Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Core Switch
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Iuran Keanggotaan APJII
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Managed Switch
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan TV LED

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Video Conference System
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota secara optimal.	Pengadaan Wireless Access Point Indoor
BJN-DAB 09.03.02.01	Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pemeliharaan Data Center
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pemeliharaan PAC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pengadaan Garansi Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pengadaan Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pengadaan Server HCI
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pengadaan Storage
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa secara optimal.	Pengadaan Virtual Machine Server
BJN-DAB 09.03.02.03	Pengembangan Aplikasi dan Probis Pemerintahan Elektronik	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Bracket Monitor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli IT

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Kabel HDMI
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Keyboard
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Layanan WhatsApp API
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Lisensi Appstore Apple
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Lisensi Canva Pro
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Lisensi Github Co Pilot Pro +
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Lisensi Google AI Ultra 2
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Monitor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Monitor Portable
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Mouse
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau	Pengadaan Pemeliharaan Layanan Mail Server

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Penyimpanan Cloud
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Sewa Domain Desa
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Sewa Domain Website
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Sewa Layanan DNS Management
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Smart TV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Standing Bracket
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah secara optimal.	Pengadaan Virtual Machine
		Perlunya Pengembangan Aplikasi Manajemen Pengembangan Aplikasi	Pengembangan Aplikasi Manajemen Pengembangan Aplikasi
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Aplikasi e-Pasar
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Aplikasi e-TPP
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Aplikasi Gayatri
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi	Pembuatan Aplikasi Sapa Bupati

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Dashboard Bupati
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Website Bojonegoro Single Window (GAMPIL)
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Website PPID
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Website RSUD Kepohbaru
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pembuatan Website Streaming Radio Malowopati
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengadaan Layanan WhatsApp API
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi Bojonegoro Innovation Awards (BIA)
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi Gatramas
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi Satu Data
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi Si Mental Baja
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan	Pengembangan Aplikasi Si-Kepo

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi SIMANTAP
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.	Pengembangan Aplikasi Siti Worobejo
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.	Pembuatan SPLP Daerah
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.	Pengembangan Aplikasi SSO Kepegawaian
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.	Pengembangan Aplikasi SSO Layanan Publik
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.	Pengembangan Super Apps Kepegawaian
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.	Pengembangan Super Apps Layanan Publik
BJN-DAB 09.03.04.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia secara optimal.	Pengadaan Pelatihan Statistik Sektoral
BJN-DAB 09.03.08.01	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	Perlunya pelaksanaan audit TIK pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem.	Pengadaan Jasa Konsultansi Re-Sertifikasi ISO 27001:2022
		Perlunya pelaksanaan audit TIK pada sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem.	Pengadaan Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 27001:2022
		Perlunya pelaksanaan audit TIK pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem.	Pengadaan Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 27001:2022
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Pengadaan Pen Test Tools
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Pengadaan Lisensi Firewall
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Pengadaan Pen Test Tools

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Sewa Secure Socket Layer (SSL)
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi ISO 27001:2022
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Pengadaan Jasa Konsultansi Re-Implementasi ISO 27001:2022
BJN-DAB 09.04.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik secara optimal.	Pengadaan Drone Camera
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik secara optimal.	Pengadaan Webcam
		Perlunya Pengembangan Aplikasi Situs Web Pemkab	Pengembangan Aplikasi Situs Web Pemkab
		Perlunya Pengembangan Aplikasi Website Perangkat Daerah	Pengembangan Aplikasi Website Perangkat Daerah
BJN-DAB 09.05.01.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi SIPD-RI
BJN-DAB 09.05.01.03	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi DAMISDA
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.	Bimtek/Sosialisasi DAMISDA
BJN-DAB 09.05.01.05	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi E-WALIDATA
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi SIPD E-WALIDATA
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Bimtek/Sosialisasi SIPD E-WALIDATA
BJN-DAB	Pengendalian dan	Perlunya Pengembangan Aplikasi E-MONEV	Pengembangan Aplikasi

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
09.05.03.01	Pelaporan Pembangunan Daerah		E-MONEV
BJN-DAB 09.06.01.03	Administrasi Tata Pemerintahan	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah.	Pengadaan Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online "SiKado"
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	Manual Book Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online "SiKado"
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah.	Sosialisasi Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online "SiKado"
BJN-DAB 09.06.02.01	Penataan Organisasi	Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Pengembangan Aplikasi SinJab
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Kabupaten
BJN-DAB 09.06.03.04	Pengelolaan Kompetensi ASN	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE.	Optimalisasi penerapan Manajemen SPBE
	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	Perlunya pelaksanaan audit Aplikasi pada sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem.	Optimalisasi penerapan Audit Aplikasi
		Perlunya pelaksanaan audit Infrastruktur pada sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem.	Optimalisasi penerapan Audit Infrastruktur
		Perlunya pelaksanaan audit Keamanan pada sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem.	Optimalisasi penerapan Audit Keamanan
BJN-DAB 09.06.03.08	Pengembangan Kompetensi ASN	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.	Kursus Singkat/Pelatihan (SDM Digital)
BJN-DAB 09.06.04.03	Pengawasan Internal	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah secara optimal.	Penyediaan Hosting Domain
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.	Pengembangan Aplikasi Si-pinter
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.	Pengembangan Integrasi Perisai dan Sihapsari
BJN-DAB 09.06.04.06	Pendampingan dan Asistensi	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi secara optimal.	Pengadaan Flash Disk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi secara optimal.	Pengadaan Software
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro
BJN-DAB 09.06.05.01	Kualitas Pelayanan Publik	Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE.	Pengadaan Penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk layanan IT
BJN-DAB 09.06.06.01	Pengelolaan Arsip Dinamis	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pengadaan Laptop/Notebook

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Arsip Dinamis secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis.	Pembinaan Aplikasi SRIKANDI
BJN-DAB 09.06.06.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis secara optimal.	Penyediaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
BJN-DAB 09.06.06.03	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan UPS
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan LED Monitor
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Lisensi Canva
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Lisensi Capcut
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Keabsahan Arsip secara optimal.	
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip secara optimal.	Penyediaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan Lisensi Canva
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan Lisensi Capcut
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis secara optimal.	Pengadaan TV LED
#REF!	Peningkatan Pelayanan BLUD	Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Berlangganan Internet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pemeliharaan Jaringan
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pemeliharaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pemeliharaan Komputer/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pemeliharaan Perangkat Lunak
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pemeliharaan Printer

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan CCTV
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Desktop PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Hardisk
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Komputer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Laptop/Notebook
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Lisensi Aplikasi
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan PC
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Penyimpanan Cloud
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Peralatan Jaringan IT Rumah Sakit
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Printer
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Router
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Scanner
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Server
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Smartphone
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan SSD
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Storage
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan Tablet
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD secara optimal.	Pengadaan UPS
		Perlunya pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang	Peningkatan Kompetensi SDM

No	Proses Bisnis	Analisis GAP	Kegiatan (Project/ Activities)
		Pelayanan BLUD secara optimal.	
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengembangan Aplikasi E-Arsip
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengembangan Aplikasi SPM-RS
		Perlunya pengembangan atau penguatan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengembangan SIMRS
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pemeliharaan Firewall
		Perlunya penguatan aspek keamanan informasi untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengadaan Firewall
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE dalam pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengadaan Jasa Konsultansi Digitalisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Sumberrejo
		Perlunya penguatan tata kelola SPBE untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan efektif.	SOP Penggunaan Aplikasi
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Bimtek/Sosialisasi SDM TIK
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengadaan Penyimpanan Cloud
		Perlunya peningkatan kapasitas manajerial atau SDM untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	Pengadaan Tenaga Ahli IT

Hasil analisis kesenjangan dan inisiatif kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting secara komprehensif. Dengan demikian, setiap rekomendasi atau inisiatif yang diusulkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil pemerintahan daerah. Inisiatif kegiatan yang dihasilkan merupakan respons terhadap kesenjangan yang telah diidentifikasi dan disusun agar selaras dengan proses bisnis yang ada. Hal ini diharapkan dapat mempercepat implementasi digitalisasi layanan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan Tabel 1.1.1, terlihat bahwa pemetaan proses bisnis masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan secara berkala. Selain itu, beberapa proses bisnis yang ada saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan kode referensi SPBE Nasional, terutama pada RAB Level 3. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa evaluasi lintas fungsi terhadap peta proses bisnis, penerapan mindset digitalisasi berbasis simplifikasi dan efisiensi, serta penyesuaian struktur proses bisnis yang mengacu pada referensi nasional melalui penginputan ke dalam SIA SPBE versi 2.0.

Sebagai rekomendasi utama, pembaruan dan penyederhanaan proses bisnis menjadi langkah yang harus diutamakan guna menciptakan struktur yang lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan standar nasional. Selain itu, adopsi teknologi digital juga menjadi faktor penting

dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan. Dengan mengatasi kesenjangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mengimplementasikan SPBE secara lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Bab II Portofolio Inisiatif Indeks SPBE

2.1. Tata Kelola

2.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE (PR-T-001)

Tabel 2.1.1.1. Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	:	Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE. 2. Kebijakan Arsitektur SPBE di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

2.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE (PR-T-002)

Tabel 2.1.2.1. Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	:	Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK), Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE. 2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.

Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Kebijakan Peta Rencana SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 2.

2.1.3. Kebijakan Manajemen Data (PR-T-003)

Tabel 2.1.3.1. Program Kerja Kebijakan Manajemen Data

Deskripsi	:	Kebijakan Manajemen Data untuk mengatur implementasi Manajemen Data yang telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Manajemen Data. 2. Kebijakan Manajemen Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Manajemen Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Kebijakan Manajemen Data SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 3.

2.1.4. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE (PR-T-004)

Tabel 2.1.4.1. Program Kerja Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Deskripsi	:	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE untuk mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan dan mengatur standarisasi pengembangan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan

Pencapaian		Pembangunan Aplikasi SPBE. 2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 4.

2.1.5. Kebijakan Pusat Data (PR-T-005)

Tabel 2.1.5.1. Program Kerja Kebijakan Pusat Data

Deskripsi	:	Kebijakan Pusat Data untuk mengatur Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pusat Data
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pusat Data. 2. Kebijakan Pusat Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pusat Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 5.

2.1.6. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (PR-T-006)

Tabel 2.1.6.1. Program Kerja Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Deskripsi	:	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	:	1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Indikator	:	1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Layanan

Pencapaian	Jaringan Intra Pemerintah. 2. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 6.

2.1.7. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat (PR-T-007)

Tabel 2.1.7.1. Program Kerja Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat

Deskripsi	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat untuk mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat 2. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 7.

2.1.8. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (PR-T-008)

Tabel 2.1.8.1. Program Kerja Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi untuk mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perban BSSN Nomor 04 Tahun 2021.
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. 2. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 8.

2.1.9. Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PR-T-009)

Tabel 2.1.9.1. Program Kerja Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deskripsi	: Program Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum

Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 9.

2.1.10. Kebijakan Tim Koordinasi (PR-T-010)

Tabel 2.1.10.1. Program Kerja Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE untuk mengatur implementasi Tim Koordinasi SPBE yang mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada KepmenpanRB Nomor 962 Tahun 2021
Detail	: 1. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Tim Koordinasi SPBE. 2. Melakukan pembaharuan kebijakan Tim Koordinasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Kebijakan Tim Koordinasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 10.

2.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE (PR-T-011)

Tabel 2.1.11.1. Program Kerja Pembentukan Komite/Forum SPBE

Deskripsi	: Membentuk Komite/Forum manajemen SPBE, sejauh ini sesuai arahan dari Kemenpan-RB perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE, Komite/Forum Manajemen Data, Komite/Forum Manajemen Risiko dari ketiga hal tersebut yang belum dibentuk yakni Komite/Forum Manajemen Risiko
Detail	: Membentuk Komite/Forum Manajemen SPBE yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE
Indikator Pencapaian	: 1. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Tim Koordinasi SPBE 2. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Forum Satu Data

	3. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Manajemen Risiko 4. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Manajemen Perubahan 5. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Komite Manajemen Pengetahuan 6. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Pokja Manajemen Layanan 7. Penyusunan dan Evaluasi Pergub / SK Pokja Manajemen Keamanan Informasi
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	2026
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

2.1.12. Kolaborasi Penerapan SPBE (PR-T-012)

Tabel 2.1.12.1. Program Kerja Kolaborasi Penerapan SPBE

Deskripsi	: Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berarti kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk menerapkan sistem ini secara efektif dan efisien.
Detail	: 1. Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB tematik digitalisasi / SPBE 2. Evaluasi pelaksanaan penerapan RB tematik digitalisasi / Indeks SPBE Internal
Indikator Pencapaian	: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi layanan publik, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data pemerintah. penerapan SPBE juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Kolaborasi bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Instansi Pemerintah lain, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat. Kolaborasi SPBE dilakukan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 20.

2.1.13. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE (PR-T-013)

Tabel 2.1.13.1. Program Kerja Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

Deskripsi	:	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE secara berkala mengikuti pedoman SPBE dari Instansi Pusat terkait.
Detail	:	Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: - Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Adanya Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Setiap Tahunnya sesuai dengan kebijakan pusat. - Monitoring dan Evaluasi Rencana Anggaran TIK Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran TIK pada setiap perangkat daerah - Evaluasi dan Revisi Prose Bisnis Pemerintah Daerah Evaluasi Proses Bisnis yang sesuai dengan tupoksi utama pada perangkat daerah - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah Mempunyai Standar Pengembangan Aplikasi Agar bisa di dikelola dengan mudah oleh pemerintah daerah - Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE Adapun usulan jadwal program kerja Tim Koordinasi Pemerintah selama setahun dijelaskan pada lampiran 1.
Indikator Pencapaian	:	Adanya Evaluasi Terkait Tata Kelola SPBE
Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Tahun Pelaksanaan	:	2026-2029
Keterangan	:	Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

2.2. Manajemen SPBE

2.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (PR-M-001)

Tabel 2.2.1.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi	:	Manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah, Pedoman yang dapat mengacu pada Permenpan-RB 05/2020.
Spesifikasi	:	- Pembentukan komite manajemen risiko - Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE

	3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko 5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat 6. Penetapan konteks risiko SPBE 7. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak 8. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE 9. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya 10. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental
Indikator Pencapaian	1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE. 2. SOP Manajemen Risiko SPBE. 3. Penerapan Manajemen Risiko SPBE. 4. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Pelaksana	Inspektorat
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	Dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait Manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permenpan-RB 05/2020) Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 21.

2.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (PR-M-002)

Tabel 2.2.2.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	Manajemen keamanan informasi dalam SPBE bertujuan untuk melindungi informasi pemerintahan yang sensitif dan penting dari serangan siber, kebocoran data, atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi yang mungkin timbul dalam operasi SPBE. Manajemen Keamanan Informasi penetapan ruang lingkup meliputi: Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE di setiap Perangkat Daerah.
Spesifikasi	1. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 2. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE

	3. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi
Indikator Pencapaian	1. Penilaian Audit Keamanan SPBE 2. SOP Keamanan Informasi
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	Pada penyusunan Manajemen Keamanan Informasi mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 22.

2.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data (PR-M-003)

Tabel 2.2.3.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Deskripsi	Manajemen data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sangat penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
Spesifikasi	1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data
Indikator Pencapaian	Penerapan Manajemen Data
Pelaksana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	Dalam penyusunan Manajemen Data mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Permen PPN/ Bappenas 16/2020).

	Manajemen Data SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 23.

2.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK (PR-M-004)

Tabel 2.2.4. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Deskripsi	:	Manajemen aset dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah proses pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan publik secara efektif dan efisien. Aset TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan publik. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Spesifikasi	:	1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK 4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK
Indikator Pencapaian	:	1. Penerapan Manajemen Aset TIK 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK
Pelaksana	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Pelaksanaan	:	2026-2029
Keterangan	:	Pada penyusunan Manajemen Aset TIK SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Aset TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 24.

2.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK (PR-M-005)

Tabel 2.2.5.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM

Deskripsi	:	Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan yang ada. Manajemen SDM TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
Spesifikasi	:	1. Pengadaan SDM TIK (Project Manager, System Analyst, Data Scientist/Engineer, UI/UX Designer, Front-End Web Developer, Front-End Mobile Developer, Back-End Developer, Network Engineer, DevOps, Security Analyst, Application Support)

	:	2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK 3. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK 4. Pelatihan SDM TIK 5. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK																																																
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen SDM TIK																																																
Pelaksana	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																																																
Tahun Pelaksanaan		2026-2029																																																
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen SDM TIK mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen SDM TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25. Penyelenggaraan Training SDM SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 25.																																																
<table><tr><th>#</th><th>Domain</th><th>Jenis Pelatihan</th><th>Peran</th><th>Tingkat Jabatan</th><th>Waktu Pelaksanaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Tata Kelola & Manajemen SPBE</td><td>Project Management Professional</td><td>Project Manager</td><td>ahli utama / ahli madya</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>COBIT 2019</td><td>Project Manager & Enterprise Architect</td><td>ahli utama / ahli madya</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan</td><td>Umum</td><td>ahli utama / ahli madya / ahli muda</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Peta Proses Bisnis dengan BPMN</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Transformasi Digital Framework</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli utama / ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli utama / ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)</td><td>Enterprise Architect & System Analyst</td><td>ahli madya / ahli pratama</td><td>Menyesuaikan</td></tr></table>			#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan	1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	Project Management Professional	Project Manager	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan			COBIT 2019	Project Manager & Enterprise Architect	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan			Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	ahli utama / ahli madya / ahli muda	Menyesuaikan			Peta Proses Bisnis dengan BPMN	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan			Transformasi Digital Framework	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan			Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan			Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Tingkat Jabatan	Waktu Pelaksanaan																																													
1	Tata Kelola & Manajemen SPBE	Project Management Professional	Project Manager	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan																																													
		COBIT 2019	Project Manager & Enterprise Architect	ahli utama / ahli madya	Menyesuaikan																																													
		Manajemen SPBE meliputi : - Manajemen risiko SPBE - Manajemen keamanan informasi SPBE - Manajemen data - Manajemen SDM TIK - Manajemen aset TIK - Manajemen pengetahuan - Manajemen perubahan - Manajemen layanan	Umum	ahli utama / ahli madya / ahli muda	Menyesuaikan																																													
		Peta Proses Bisnis dengan BPMN	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													
		Transformasi Digital Framework	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													
		Enterprise Architecture Foundation (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli utama / ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													
		Enterprise Architecture Advanced (TOGAF)	Enterprise Architect & System Analyst	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan																																													

		<i>Scrum Master</i>	<i>Enterprise Architect & System Analyst</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
2	Data	<i>Data Management With DMBOK</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		<i>Database Administrator (MCDBA)</i>	<i>Programmer</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan <i>Business Intelligence</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan <i>Python & R Programming</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Data Analytic With Machine Learning</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Big Data Analytic In Practice</i>	<i>Data Scientist</i>	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
3	Aplikasi	<i>Backend Web API Programming</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Frontend Web Development</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Mobile Frontend With PWA</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Back-end Web Programming With Laravel</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Front-end Web Development With Vue JS</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Android Secure Programming</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Mobile Programming With Flutter</i>	<i>Programmer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>IT Service Management</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>IT Quality Assurance</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Implementation</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Software Testing Plan</i>	<i>Application Support</i>	ahli muda	Menyesuaikan
4	Layanan	<i>IT Service Management</i>	<i>Enterprise Architect</i>	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
5	Infrastruktur	<i>Network Security with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Traffic Management with Mikrotik</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Fundamental</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Linux Network Services</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>DevOps Introduction & Docker</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan
		<i>Docker Administration With Kubernetes</i>	<i>Network Engineer</i>	ahli muda	Menyesuaikan

		Microservices In Development	Network Engineer	ahli muda	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	Network Engineer	ahli muda	Menyesuaikan
		Penetration Testing Method	Application Support	ahli muda	Menyesuaikan
		CompTIA ITF	Teknisi IT	ahli muda	Menyesuaikan
6	Keamanan Informasi	Ethical Hacking (CECH)	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		IT Auditor Fundamental	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		ISO 31000 (IT Risk And Controls)	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		ISO 27001 (Information Security Management)	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
		Certified Information System Auditor	Auditor	ahli madya / ahli pratama	Menyesuaikan
7	Komunikasi Publik	Etika Komunikasi / Public Speaking	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Penulisan Artikel (Storytelling)	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Fotografi dan Videografi	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Teknik Publikasi Social Media	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan
		Search Engine Optimization	Digital Media Specialist	ahli pratama / ahli muda	Menyesuaikan

2.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan (PR-M-006)

Tabel 2.2.6.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Deskripsi	:	Manajemen Pengetahuan yaitu pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam sebuah sistem pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan pengetahuan yang telah didapatkan dari pengalaman operasional instansi pemerintahan.
Spesifikasi	:	1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan
Indikator Pencapaian	:	1. Penerapan Manajemen Pengetahuan 2. Aplikasi <i>Knowledge Management System</i> (SIMPAN-SPBE) digunakan secara optimal.
Pelaksana	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Pelaksanaan	:	2026-2029

Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Pengetahuan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku seperti (Peraturan BRIN No 2 Tahun 2024) Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 26.

2.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan (PR-M-007)

Tabel 2.2.7.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Deskripsi	: Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	: 1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan
Indikator Pencapaian	: 1. Penerapan Manajemen Perubahan. 2. Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan.
Pelaksana	: Bagian Organisasi
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Perubahan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Perubahan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 27.

2.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK (PR-M-008)

Tabel 2.2.8.1. Program Kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan TIK

Deskripsi	: Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
Spesifikasi	: 1. Pemetaan kondisi terkini penyelenggaraan manajemen layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Perumusan cakupan Manajemen Layanan sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE pasal 54. 3. Verifikasi data dan informasi eksisting pelaksanaan manajemen layanan di Pemerintah Daerah

		- Analisis kebutuhan proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pada peraturan yang berlaku. - Analisis penyelenggara, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Peningkatan Kompetensi SPBE. - Penyusunan pedoman manajemen layanan sesuai dengan cakupan yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE pasal 54.
Indikator Pencapaian	:	Indikator keberhasilan manajemen layanan TIK meliputi - Kepuasan Pengguna Layanan TIK - Ketersediaan Layanan Setiap Saat - Efisiensi Penggunaan Layanan - Keamanan Data Pengguna Layanan
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen Layanan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku. Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 28.

2.3. Layanan SPBE

2.3.1. Pengembangan Layanan RB Tematik (PR-L-001)

Tabel 2.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Layanan RB Tematik

Deskripsi	:	Pengembangan layanan Reformasi Birokrasi (RB) tematik pada pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pendekatan tematik ini menekankan pada penanganan isu-isu spesifik yang menjadi prioritas, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Investasi, dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang ada, dan juga bertujuan dalam percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan terkait RB Tematik
Spesifikasi	:	- Identifikasi Isu Tematik: Menentukan isu-isu spesifik yang menjadi fokus, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan Investasi. - Perencanaan dan Implementasi: Membuat rencana strategis dan tindakan konkret untuk mengatasi isu-isu tersebut, termasuk penetapan tujuan, indikator kinerja, dan timeline. - Pelatihan dan Pengembangan SDM: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur

		sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pengembangan profesional. 4. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan, seperti e-governance dan digitalisasi dokumen. 5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan.
Detail	:	1. Pengembangan Layanan Kemiskinan 2. Pengembangan Layanan Pendidikan 3. Pengembangan Layanan Kesehatan 4. Pengembangan Layanan Investasi
Fitur		1. Dashboard Pemantauan Layanan RB Tematik 2. Sistem Pengaduan atau Komunikasi antara Pemilik Layanan (Pemerintah Daerah) dan Pengguna Layanan 3. Portal Informasi Terpadu
Indikator Pencapaian	:	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Efisiensi dan Efektivitas: Mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat proses administrasi. 3. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya. 4. Inovasi Pelayanan: Mengembangkan metode dan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pelaksana	:	Perangkat Daerah Terkait Layanan RB Tematik
Tahun Pelaksanaan		2026-2027
Keterangan	:	Tantangan dalam Pengembangan Layanan RB Tematik 1. Resistensi terhadap Perubahan: Adanya hambatan dari pihak-pihak yang kurang mendukung perubahan. 2. Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten. 3. Koordinasi Antar Lembaga: Tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan program antar berbagai lembaga pemerintah..

2.3.2. Pengembangan Layanan Prioritas SPBE (PR-L-002)

Tabel 2.3.2.1. Program Kerja Pengembangan Layanan Prioritas SPBE

Deskripsi	: Terkait Pengembangan Layanan Prioritas harus sejalan dengan Perpres 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Indonesia, dimana pemerintah pusat berfokus pada 9 Layanan Prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan Percepatan dan Keberlanjutan Transformasi Digital Pemerintah Indonesia.
Spesifikasi	: Layanan yang menjadi prioritas Pusat antara lain : 1. Infrastruktur Publik Digital (DPI) a. Identitas Digital Dasar b. Platform Pertukaran Data c. Pembayaran Digital 2. Portal Layanan Publik a. Portal Layanan Publik b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah c. SSO (Single Sign On) d. Pusat Data Nasional 3. Portal Administrasi Pemerintah 4. Layanan Publik Terintegrasi a. SIM Online b. Bantuan Sosial c. Kesehatan d. Pendidikan
Detail	: a. perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas; b. pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas; c. pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas; d. pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas; e. keamanan Aplikasi SPBE Prioritas; f. distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE Prioritas; g. pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau h. pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung Aplikasi SPBE Prioritas.
Fitur	: 1. Single Sign-On (SSO), yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi dengan satu set kredensial 2. API untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang berbeda; 3. Data Synchronization, yang menjaga konsistensi data di seluruh aplikasi dengan memastikan data diperbarui secara otomatis di semua sistem terkait
Indikator	: Dalam Percepatan Transformasi Digital dengan Pengembangan Portal Aplikasi ada

Pencapaian	beberapa tahapan yang harus diperhatikan antara lain : 1. Menyatukan Layanan menjadi 1 Portal Layanan Publik dan 1 Portal Layanan Administrasi Pemerintah 2. Percepatan Pembangunan Layanan dan Sistem Digital Prioritas 3. Memperkuat Tim Transformasi Digital 4. Fokus pada kemudahan pengguna layanan
Pelaksana	: Seluruh Perangkat Daerah Terkait Layanan SPBE Prioritas
Tahun Pelaksanaan	2026-2027
Keterangan	: Tantangan dalam Pengembangan Layanan Prioritas SPBE 1. Infrastruktur Teknologi: Memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur TI dan jaringan. 2. Keamanan dan Privasi: Menjaga keamanan data dan privasi pengguna menjadi prioritas utama. 3. Sumber Daya Manusia: Membutuhkan tenaga ahli dalam bidang TI dan manajemen proyek. 4. Resistensi terhadap Perubahan: Menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang kurang mendukung perubahan menuju sistem elektronik. 5. Regulasi dan Kebijakan: Memerlukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi SPBE.

2.3.3. Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi (PR-L-003)

Tabel 2.3.3.1. Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Terintegrasi

Deskripsi	: Aplikasi Portal Layanan Terintegrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform dan juga bertujuan dalam percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan di layanan publik dan Layanan Internal pemerintah.
Spesifikasi	: 1. Identifikasi Sistem Informasi Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Internal di setiap Perangkat Daerah 2. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Portal Layanan 3. Proses Konsolidasi dan Integrasi Portal Layanan 4. Evaluasi Portal Layanan Terintegrasi
Detail	: Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On

Fitur :

#	Layanan	Sub Layanan	Aplikasi
Layanan Publik			
1	Berita dan Informasi		Website Bojonegoro Kab Chatbot Kecerdasan Artifisial (AI)
2	CCTV		CCTV Bojonegoro
3	Titik Wifi publik		-
4	Telekomunikasi		-
5	Event		-
6	Profil Perangkat Daerah		-
7	Kependudukan	Data Penduduk dan Pencatatan Sipil	PANAH SRIKANDI
8	Ketenagakerjaan	Lowongan Pekerjaan	Siti Worobejo
		Tenaga Kerja Asing	TKA Daerah
9	Pendidikan	Data Pokok Pendidikan	DAPODIK
		Beasiswa	PIP
		PPDB	-
10	Perpustakaan	Perpustakaan Digital	e-Maos Bojonegoro
11	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	SIMPUS
		Stunting	-
12	Hukum	Diseminasi Kebijakan	JDIH Bojonegoro
13	Perizinan	Peluang Investasi	SAMIN
		Perizinan Berusaha	OSS
14	Pembangunan Daerah	Perencanaan Daerah	E-MONEV
		Evaluasi Pembangunan Daerah	E-MONEV
15	Pajak Daerah	Pajak	SIMPATDU eMAP
		Retribusi	-
		Pembayaran Digital	QRIS
16	Marketplace	Data Koperasi	ODS
		Harga Pangan	Siska Perbapo SP2KP
		UMKM	-
17	Pariwisata	Destinasi Wisata	ETNIK WISATA BOJONEGORO
18	Sosial	Data Sosial	SIKS DJ
19	Satu Data	Data Statistik	Satu Data Bojonegoro
20	Aduan Masyarakat	Aduan Umum	Sapa Bupati SP4N Laporan
		Aduan WBS	-
21	PPID	PPID	PPID Bojonegoro
22	Pengadaan Barang dan Jasa		SPSE
23	Transportasi	Informasi Transportasi	-
24	Social Media	Youtube	-
		Instagram	-
		Twitter	-
25	Televisi	TV Streaming	-
26	Radio	Radio Streaming	-
27	Kontak		-

	28	Survei Kepuasan Masyarakat		e-SIM IKM
	Layanan Internal Pemerintahan			
	29	Pengumuman ASN		-
	30	Persuratan	Persuratan	SRIKANDI
			TTE	Tanda Tangan Elektronik (TTE)
	31	Kepegawaian	Profil Kepegawaian	-
			Presensi	SIKEPO
			Cuti dan Izin	SIMANTAP
			Tunjangan	-
			Mutasi	-
			Promosi	-
			Formasi	-
			Kinerja Harian	-
			KGB	-
			Kenaikan Pangkat	-
			Manajemen Talenta	-
			Penataan Jabatan	-
	32	Layanan TIK	Helpdesk TIK	-
			Keamanan Sistem Elektronik	Jagasiber
	33	Dashboard Pimpinan		-
	34	Knowledge Management System		-
	35	Push Notification		Firebase
	36	Login Page		Keycloak
	37	About		-
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasikannya portal layanan publik dan Portal Layanan Pemerintah Daerah yang saling terintegrasi		
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika serta Perangkat Daerah Terkait		
Tahun Pelaksanaan		2026-2029		
Keterangan	:	Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik maupun layanan internal pemerintah Daerah dan menjadikan API Kependudukan dan API Kepegawaian sebagai primary key di seluruh aplikasi layanan yang ada.		

2.3.4. Pengembangan Platform Helpdesk TIK (PR-L-004)

Tabel 2.3.4.1. Program Kerja Pengembangan Platform Helpdesk TIK

Deskripsi	Semakin berkembangnya layanan Diskominfo kepada perangkat daerah/UPT perlu didukung layanan bantuan penanganan masalah secara cepat, tepat, dan terdokumentasi. Untuk melaksanakan layanan penanganan masalah diperlukan tata kelola dan alat bantu (<i>tools</i>).
Spesifikasi	- Tata Kelola Layanan Penanganan Masalah (<i>Helpdesk</i>) TIK - <i>Tools</i> atau aplikasi pendukung untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan (<i>knowledge management</i>) - Petugas <i>helpdesk</i>
Indikator Pencapaian	- Tersedianya pedoman, standar, dan prosedur layanan penanganan gangguan/masalah (<i>helpdesk</i>) TIK - Tersedianya aplikasi untuk pencatatan dan sebagai manajemen pengetahuan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan - Tersedianya petugas <i>helpdesk</i> yang menerima, mencatatkan, dan melakukan penanganan masalah pada tingkat pertama
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2027
Keterangan	

2.3.5. Survey Pengguna Layanan (PR-L-004)

Tabel 2.3.5.1. Program Kerja Survey Penggunaan Layanan

Deskripsi	:	Melakukan survey kepada ASN dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE.
Spesifikasi		1. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Pemerintahan 2. Survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Layanan Publik
Detail	:	Melakukan survei dengan metode pengukuran efektivitas layanan SPBE
Indikator Pencapaian	:	Telah dilakukannya pengukuran layanan SPBE dan melakukan perbaikan atas masukan yang ada.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi
Tahun		2026-2029

Pelaksanaan	
Keterangan	: Survey kepuasan pengguna SPBE juga perlu disandingkan dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing jika diperlukan.

2.4. Aplikasi SPBE

2.4.1. Pengembangan Aplikasi (PR-A-001)

Tabel 2.4.1.1. Program Kerja Pengembangan Aplikasi

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: Daftar aplikasi usulan perangkat daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Tahap 1 (Tahun 2025): 1. Pengembangan Aplikasi BANG TIGOR 2. Pemeliharaan Aplikasi GIS-EL 3. Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDU 4. Pengembangan SILAPDIK 5. Pengembangan Aplikasi LeMinHo 6. Pengembangan Aplikasi SIMANTAP 7. Pengembangan Aplikasi Si-Kepo 8. Pengembangan Aplikasi Si Mental Baja 9. Pengembangan Aplikasi Gatramas 10. Pengembangan Aplikasi Satu Data 11. Pembuatan Website PPID 12. Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro 13. Pembuatan Website Bojonegoro Single Window (GAMPIL) 14. Pembuatan Aplikasi Sapa Bupati 15. Pembuatan Website Streaming Radio Malowopati 16. Pembuatan Aplikasi Gayatri 17. Pembuatan Aplikasi e-TPP 18. Pembuatan Aplikasi e-Pasar 19. Pengembangan Aplikasi Bojonegoro Innovation Awards (BIA) 20. Pembuatan Website RSUD Kepohbaru 21. Pembuatan Dashboard Bupati 22. Pengembangan SIMPKB 23. Pengembangan SIMPKB 24. Pengembangan Aplikasi SIAP DESA 25. Pengadaan Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online “SiKado” 26. Pengembangan Aplikasi RKBMD 27. Pengembangan Aplikasi Lelang Elektronik

28. Pengembangan Aplikasi Penyusunan Sewa Elektronik
29. Pengembangan Aplikasi Manajemen Penghapusan Aset
30. Pengembangan Aplikasi SI-Asmara
31. Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro
32. Pengembangan Aplikasi Si-pinter
33. Pengembangan Aplikasi SIAP BANSOS
34. Pengembangan SIMRS
35. Pengembangan Website JDIH
36. Pembuatan Aplikasi Pelayanan Kesehatan (Customize)
37. Pengembangan Modul Kefarmasian
38. Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kesehatan (Customize)
39. Pembuatan Aplikasi Software Berbasis Web
40. Pengembangan Aplikasi BESTARI
41. Pengembangan Aplikasi Gatramas
42. Pengembangan Aplikasi SiBatara
43. Pembuatan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik
44. Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro
45. Pengembangan Aplikasi SinJab
46. Pengembangan Aplikasi e-Bakul
47. Pengembangan SIMANIZ
48. Pengembangan Aplikasi eMAP
49. Pengembangan Aplikasi Situs Web Pemkab
50. Pengembangan Aplikasi Website Perangkat Daerah
51. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kartu Kendali
52. Pengembangan Aplikasi SIM-RS
53. Pengembangan Aplikasi SINTESA
54. Pengembangan Aplikasi SINTESA EMAS (RME)
55. Pengembangan Aplikasi e-BMD
56. Pengembangan Aplikasi SAJI PANGAN
57. Pengembangan Aplikasi SIDIK PERISA
58. Pengembangan Aplikasi SIGAP PSC 119
59. Pembuatan Aplikasi SIPIK
60. Pengembangan Aplikasi E-RM

Tahap 2 (Tahun 2026):

61. Pengembangan Aplikasi LeMinHo
62. Pengembangan Aplikasi SSO Kepegawaian
63. Pengembangan Super Apps Kepegawaian
64. Pengembangan SIMPKB
65. Pengembangan Aplikasi SIAP DESA
66. Pembuatan Website Bhakti Ormasku
67. Integrasi Modul SIPD Penatausahaan
68. Pengembangan Aplikasi SPM-RS
69. Pengembangan Aplikasi E-Arsip

70. Pengembangan Integrasi Perisai dan Sihapsari
71. Pengembangan Aplikasi Si-pinter
72. Pengembangan Aplikasi JDIH
73. Pengembangan Aplikasi SIAP PRAJA (Sistem Informasi Administrasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
74. Pengembangan Aplikasi Gatramas
75. Pengembangan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik
76. Pengembangan Aplikasi SIMPONI
77. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Kabupaten
78. Pengembangan SIMANIZ
79. Pengembangan SAMIN
80. Pembuatan Aplikasi SmartPJU
81. Pengembangan Aplikasi Emergency Button Bojonegoro
82. Pembuatan Aplikasi SIPATAS
83. Pengembangan Aplikasi APEL GRATIS
84. Pengembangan Aplikasi Bojonegoro TIC
85. Pengembangan Aplikasi E-MONEV
86. Pengembangan Aplikasi SIBUMBO
87. Pengembangan Aplikasi Manajemen Pengembangan Aplikasi

Tahap 3 (Tahun 2027):

88. Pengembangan Aplikasi SIPP DOKLING
89. Pengembangan Aplikasi LeMinHo
90. Pengembangan Aplikasi SSO Layanan Publik
91. Pengembangan Super Apps Layanan Publik
92. Pengembangan SIMPKB
93. Pengembangan SIMPKB
94. Pengembangan Aplikasi SIAP DESA
95. Integrasi Modul SIPD Penatausahaan
96. Pembuatan Aplikasi Software Berbasis Web
97. Pengembangan Aplikasi PANAHA SRIKANDI
98. Pengembangan Aplikasi Gatramas
99. Pengembangan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik
100. Pengembangan SIMANIZ

Tahap 4 (Tahun 2028):

101. Pengembangan Aplikasi LeMinHo
102. Pengembangan Super Apps Layanan Publik
103. Pengembangan SIMPKB
104. Pengembangan SIMPKB
105. Pengembangan Aplikasi SIAP DESA
106. Integrasi Modul SIPD Penatausahaan
107. Pembuatan Aplikasi Software Berbasis Web
108. Pengembangan Aplikasi Gatramas
109. Pengembangan SIMANIZ

	110. Pengembangan SAMIN Tahap 5 (Tahun 2029): 111. Pengembangan Aplikasi LeMinHo 112. Pengembangan Super Apps Layanan Publik 113. Pengembangan SIMPKB 114. Pengembangan Aplikasi SIAP DESA 115. Integrasi Modul SIPD Penatausahaan 116. Pembuatan Aplikasi Software Berbasis Web 117. Pengembangan Aplikasi Gatramas 118. Pengembangan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik 119. Pengembangan SIMANIZ 120. Pengembangan SIMPKB Tahap 6 (Tahun 2030): 121. Pengembangan Aplikasi LeMinHo
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan.
Pelaksana	: Perangkat Daerah terkait dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2025-2030
Keterangan	Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan DISKOMINFO, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor) sesuai kebijakan pada pemerintah daerah. Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan dan juga dari sisi pengguna apakah aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk layanan publik atau layanan di internal pemerintah daerah sendiri Pengembangan aplikasi seyogyanya berkoordinasi dengan DISKOMINFO dan mengikuti standar pengembangan teknologi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk menghindari lock-in vendor.

2.4.2. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (API Gateway)
(PR-A-002)

Tabel 2.4.2.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (api gateway)

Deskripsi	: Sistem penghubung layanan pemerintah untuk memfasilitasi Integrasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memudahkan penyelenggaraan layanan publik.
Spesifikasi	: 1. Identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan penggunaan API Gateway. 2. Penyusunan Desain API Gateway 3. Pengembangan dan Konfigurasi API Gateway

		4. Pengujian API Gateway 5. Implementasi API Gateway 6. Dokumentasi API Gateway 7. Pemeliharaan API Gateway
Indikator Pencapaian	:	Integrasi antar aplikasi sudah menggunakan API dan telah didokumentasikan dengan baik.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	

2.4.3. Pengembangan Portal Data dan *Dashboard (Big Data)* (PR-A-003)

Tabel 2.4.3.1. Pengembangan Portal Data dan *Dashboard Analytics (Big Data)*

Deskripsi	:	Guna mendukung pemanfaatan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maka perlu <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard Analytics</i> .
Spesifikasi	:	Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur: 1. <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan. 2. <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary data</i>. 3. Integrasi <i>back office application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>back office</i> yang berjalan. 4. Aplikasi <i>dashboard</i> harus memiliki kualitas yang baik/<i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC.
Indikator Pencapaian	:	Implementasi aplikasi <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard</i>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi. Layanan Data Terbuka diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 43

2.4.4. Pemeliharaan Aplikasi (PR-A-004)

Tabel 2.4.4.1. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	: Pemeliharaan aplikasi untuk memastikan kinerja, keamanan, dan fungsionalitas berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Aktivitas pemeliharaan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembaruan perangkat lunak, penambahan fitur baru, perbaikan bug, pemantauan kinerja, dan penanganan perubahan kebutuhan pengguna
Spesifikasi	: Aktivitas pemeliharaan/ <i>upgrade</i> terdiri atas: 1. Perbaikan Bug (Bug Fixing) 2. Pembaruan dan Penambahan Fitur (Feature Updates) 3. Pembaruan Keamanan (Security Updates) 4. Optimasi Kinerja (Performance Optimization) 5. Pemantauan dan Analisis (Monitoring and Analytics) 6. Pemeliharaan Database 7. Manajemen Konfigurasi dan Versi 8. Penanganan Perubahan Kebutuhan Pengguna (Change Management)
Indikator Pencapaian	: Aplikasi berjalan lancar secara <i>realtime</i> dan juga berjalan secara maksimal
Pelaksana	: Perangkat Daerah Terkait dan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Pemeliharaan Aplikasi dilakukan ketika terjadi perubahan pada proses bisnis, fitur atau regulasi yang ada.

2.5. Infrastruktur SPBE

2.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Fasilitas Pendukung Pusat Data (PR-I-001)

Tabel 2.5.1.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Fasilitas Pendukung Pusat Data

Deskripsi	: Pusat data merupakan lokasi penempatan perangkat <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. <i>Server-server</i> aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berada di pusat data. Pusat Data Diskominfo perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan (<i>availability</i>), dan kinerja (<i>performance</i>) dari layanan infrastruktur <i>server</i> , dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu fasilitas pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (Genset, dan UPS), sistem pendingin udara (AC), sistem penanganan kebakaran (APAR), kelistrikan, dan lain-lain.

Spesifikasi	: 1. Letak Pusat Data berada gedung Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2. Pembagian ruangan area ruang <i>server, staging</i>, kelistrikan, UPS dan <i>Battery</i>, AC Presisi dan <i>Fire Suppression System</i>. 3. Sistem Kelistrikan. 4. Sistem Pendingin. 5. Sistem Jaringan Data. 6. Sistem Penanganan Kebakaran. 7. Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan. 8. Sistem Keamanan Fisik. 9. Pemeliharaan perangkat utama seperti <i>server, storage</i>, perangkat jaringan, dan keamanan meliputi Sistem Operasi, <i>firmware, patch</i>, dan suku cadang.
Indikator Pencapaian	: 1. Pembagian ruangan pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data atau standar ANSI/TIA-942. 2. Fasilitas pendukung pusat data mengikuti standar dari SNI Pusat Data seperti adanya sistem pendingin ruangan terpusat, sistem pemadam kebakaran, dan lainnya. 3. Perlunya jalur khusus kabel data yang terpisah dengan kabel daya listrik dengan jarak minimal 40 - 60 cm. Kabel data perlu diberikan penanda (<i>labelling</i>). 4. Fasilitas utama dan fasilitas pendukung Pusat Data Diskominfo dipelihara secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. 5. Sistem operasi, <i>firmware, patch</i> perangkat <i>server, storage</i>, jaringan, dan keamanan jaringan adalah versi yang stabil atau direkomendasikan oleh pabrikan dan tidak ada celah keamanan. 6. Laporan pemeliharaan perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Diskominfo secara periodik. 7. Tersedianya ruangan untuk gudang perangkat TIK.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Pusat Data diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 16.

2.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (*Capacity Plan*) Infrastruktur Utama *Server* dan *Storage* (PR-I-002)

Tabel 2.5.2.1. Program Kerja Rencana Kapasitas Infrastruktur Utama *Server* dan *Storage*

Deskripsi	: Peningkatan rencana kapasitas (<i>Capacity Plan</i>) dilakukan untuk menjaga agar perangkat infrastruktur utama dan fasilitas pendukung pusat data dapat tetap beroperasi dengan

		normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis <i>server</i>, <i>storage</i>, infrastruktur jaringan, perangkat keamanan jaringan, dan fasilitas pendukung (sistem kelistrikan, luar ruangan, sistem pendingin).
Spesifikasi	:	Kegiatan penyusunan rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi: - perangkat utama <i>server untuk virtualisasi</i>; <i>server colocation</i>; <i>lisensi OS dan manajemen virtualisasi</i>; <i>storage</i>; - perangkat jaringan; dan - perangkat keamanan jaringan. - fasilitas pendukung - sistem kelistrikan (<i>UPS, Genset</i>); - sistem pendingin ruangan (<i>AC</i>); - sistem pemadam kebakaran (<i>Fire Suppression, APAR</i>); dan - pengendali keamanan (<i>access door, CCTV</i>).
Indikator Pencapaian	:	Dokumen hasil rencana kapasitas infrastruktur utama <i>server</i> dan <i>storage</i> meliputi kondisi utilisasi perangkat minimal tiga bulan terakhir berdasarkan alat pemantau (<i>monitoring tools</i>), rencana pengembangan aplikasi/sistem, dan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2026
Keterangan	:	-

2.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana (PR-I-003)

Tabel 2.5.3.1. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Deskripsi	:	Untuk menjaga tingkat ketersediaan dan kinerja layanan sistem informasi maka diperlukan lokasi cadangan penempatan server dan lainnya di Pusat Pemulihan Bencana. Sehingga jika terjadi kegagalan pada sistem informasi di pusat data maka operasionalisasi sistem aplikasi dipindah ke Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, jaringan, dan keamanan di Pusat Pemulihan Bencana harus sama dengan yang ada di pusat data.

Spesifikasi	: 1. Jarak fisik lokasi Pusat Pemulihan Bencana minimal lebih dari 40 km dari Pusat Data Diskominfo. 2. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan replikasi/<i>backup</i> ke Pusat Pemulihan Bencana. 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis.
Indikator Pencapaian	: 1. Pemilihan lokasi pusat pemulihan bencana minimal dengan jarak 40 km dari pusat data saat ini; 2. Lokasi pusat pemulihan bencana bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga (provider); 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di pusat data khususnya untuk <i>server</i> aplikasi yang tergolong kritis. 4. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i>/replikasi ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: -

2.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik (PR-I-004)

Tabel 2.5.4.1. Program Kerja Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Deskripsi	: Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Rencana Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Plan - DRP</i>) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan <i>backup</i> dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.
Spesifikasi	: 1. Tersedianya Pusat Pemulihan Bencana (DRC). 2. Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data. 3. Aplikasi/Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> dan replikasi <i>real time</i> ke Pusat Pemulihan Bencana.
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya dokumen Kebijakan, Standar, dan Prosedur Rencana Pemulihan Bencana (DRP). 2. Status <i>backup</i> dan replikasi aplikasi, file, dan <i>database</i> dari pusat data ke Pusat Pemulihan Bencana berjalan normal.

		- File <i>backup</i> dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhir. - Infrastruktur dan layanan aplikasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu. - Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2026-2029
Keterangan	:	-

2.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (PR-I-005)

Tabel 2.5.5.1. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	:	Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi jaringan internet, jaringan antar pusat data, jaringan di perangkat daerah/UPT, dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur JIP perlu dipelihara untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan JIP kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat).
Spesifikasi	:	Infrastruktur JIP terdiri dari perangkat jaringan (<i>router, switch, access point</i>), perangkat keamanan jaringan (<i>next-generation firewall</i>), koneksi internet dari <i>provider</i> internet, jaringan kabel <i>fiber optic</i>, dan radio link yang menghubungkan ke perangkat daerah/UPT dan lokasi lainnya, kabel UTP, dan lainnya. Perangkat - perangkat yang tergolong kritis seperti <i>router internet</i> dan <i>switch core</i> terdiri dari 2 (dua) unit (<i>redundant</i>), dengan konfigurasi <i>High Availability (HA)</i>. Perangkat lainnya seperti <i>switch access</i> menggunakan <i>manageable switch</i> sehingga dapat dipantau, dan dikonfigurasi.
Indikator Pencapaian	:	- Tersedianya koneksi jaringan internet lebih dari satu penyedia jasa layanan internet (ISP), dan dikonfigurasi aktif semua; - Tersedianya perangkat jaringan inti, seperti: <i>router, switch</i> inti, <i>next generation firewall</i> yang redundan. - Perangkat jaringan menggunakan yang <i>manageable</i> sehingga dapat dipantau melalui alat pemantau, dan dikonfigurasi secara jarak jauh (<i>remote</i>). - Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet.
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan		2026-2029

Keterangan	: Jaringan Intra Pemerintah Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

2.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT (PR-I-006)

Tabel 2.5.6.1. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kab Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT

Deskripsi	Koneksi jaringan dalam Kab (<i>Metropolitan Area Network</i>) yang menghubungkan <i>Network Operation Center</i> Diskominfo dengan kantor perangkat daerah/UPT di beberapa lokasi perlu terus dipelihara untuk menjaga ketersediaan, keandalan, dan keamanannya.
Spesifikasi	1. Perangkat Daerah/UPT sudah terkoneksi dengan NOC Diskominfo. 2. Akses aplikasi intranet berjalan dengan lancar. 3. Akses internet kantor perangkat daerah/UPT melalui NOC Diskominfo.
Indikator Pencapaian	1. Semua perangkat daerah/UPT sudah terkoneksi dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo. 2. Infrastruktur jaringan koneksi antar perangkat daerah/UPT dalam masa pemeliharaan baik oleh pihak Diskominfo atau menggunakan pihak ketiga. 3. Jika pemeliharaan diserahkan kepada pihak ketiga, Diskominfo dan pihak ketiga menetapkan garansi layanan (SLA) dan waktu tanggap. 4. SLA yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	-

2.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi (PR-I-007)

Tabel 2.5.7.1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi

Deskripsi	Layanan jaringan data nirkabel (WiFi) yang dikelola oleh Diskominfo tersedia di kantor perangkat daerah/UPT, dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya. Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.

Spesifikasi	1. Keamanan wifi menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise (Wireless Fidelity Protected Access 2-Enterprise)</i>. Protokol ini menggunakan autentikasi 802.1X atau <i>EAP (Extensible Authentication Protocol)</i>. EAP merupakan protokol <i>layer 2</i> yang menggantikan PAP dan CHAP. 2. <i>Setting security WPA enterprise/corporate</i> ini membutuhkan sebuah server khusus yang berfungsi sebagai pusat autentikasi seperti <i>Server RADIUS (Remote Authentication Dial-In Service)</i>. Dengan adanya radius server ini, otentikasi akan dilakukan per-client sehingga tidak perlu lagi memasukkan <i>passphrase</i> atau <i>network key</i> yang sama untuk setiap <i>client</i>. 3. <i>Server RADIUS</i> dapat menggunakan <i>Active Directory</i> atau <i>LDAP</i>. 4. <i>Acces Point</i> mendukung mode <i>roaming</i> yakni jika pengguna berpindah tempat maka koneksi ke <i>Access Point</i> akan menyesuaikan dengan yang terdekat tanpa perlu melakukan otentikasi lagi. 5. Terdapat perangkat <i>WiFi Controller</i> untuk pengelolaan dan operasional (manajemen) <i>Access Point</i> dan lainnya.
Indikator Pencapaian	1. Terdapat perangkat <i>Wireless LAN Controller (WLC)</i> melakukan <i>setting</i> dan konfigurasi beberapa perangkat <i>access point</i> pada satu perangkat <i>controller</i>. 2. Otentikasi pengguna <i>WiFi</i> sudah menggunakan protokol keamanan <i>WPA2-Enterprise</i> berdasarkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang tersimpan di <i>Server LDAP</i> atau <i>Active Directory</i>. 3. Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2027
Keterangan	-

2.5.8. Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (PR-I-008)

Tabel 2.5.8.1. Pembangunan SPLP

Deskripsi	Sistem penghubung layanan pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari: a. Integrasi Data Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi atau <i>business logic</i> ketika membuat integrasi. b. Integrasi Presentasi Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna (<i>user interface</i>) yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi. c. Integrasi Fungsional Diskominfo telah memiliki salah satu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yakni integrasi data dengan menggunakan teknologi API dan telah memiliki infrastruktur API <i>Management</i>. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah perlu diamankan untuk menjaga integritas dari data yang dipertukarkan serta untuk menjaga ketersediaan dari layanan.
Spesifikasi	1. API Gateway Intranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi internal dengan koneksi intranet. 2. API Gateway Ekstranet untuk layanan <i>service</i> aplikasi Kementerian/Lembaga dengan koneksi internet. 3. Pengembangan portal dengan basis <i>Single Sign On</i> (SSO). 4. Perangkat perlindungan keamanan API Gateway.
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya perangkat atau aplikasi untuk pengamanan SPL (API Gateway, SSO) yakni <i>Web Application Firewall</i> (WAF). 2. API Gateway, dan Sistem SSO terlindungi oleh WAF.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2027
Keterangan	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

2.6. Keamanan Informasi

2.6.1. Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE (PR-K-001)

Tabel 2.6.1.1 Program Kerja Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Keamanan SPBE

Deskripsi	Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
Spesifikasi	Penyusunan Kebijakan Keamanan dan Manajemen SPBE meliputi: - Penetapan ruang lingkup - penanggung jawab - perencanaan: penyusunan program, pendokumentasian, manajemen resiko - dukungan pengoperasian: penganggaran - evaluasi keamanan - perbaikan berkelanjutan Referensi yang dapat digunakan yakni Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya dokumen kebijakan dan manajemen keamanan SPBE sesuai dengan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021. 2. Pelaksanaan sertifikasi ISO 27001:2022 pada layanan yang mengelola data penting Pemda dan data kependudukan.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026
Keterangan	-

2.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi (PR-K-002)

Tabel 2.6.2.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi: 1. Kerahasiaan; 2. Keaslian; 3. Keutuhan; 4. Kenirsangkalan; dan 5. Ketersediaan.
Spesifikasi	Daftar SOP mengacu pada Standar Teknis pada Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SOP Klasifikasi Informasi; 1. SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi); 2. SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi; 3. SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi; 4. SOP Implementasi <i>Hash Function</i>; 5. SOP Pendeteksian Modifikasi; 6. SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi; 7. SOP Sistem Pencadangan (<i>backup</i>); dan 8. SOP Sistem Pemulihan (<i>recovery</i>).
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan. 2. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026
Keterangan	-

2.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE (PR-K-003)

Tabel 2.6.3.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

Deskripsi	Standar teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>web</i> meliputi: 1. Autentikasi. 2. Manajemen sesi. 3. Persyaratan kontrol akses. 4. Validasi <i>input</i>. 5. Kriptografi pada verifikasi statis. 6. Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>. 7. Proteksi data. 8. Keamanan komunikasi. 9. Pengendalian kode berbahaya. 10. Logika bisnis. 11. File. 12. Keamanan API dan <i>web service</i>, dan 13. Keamanan konfigurasi. Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>mobile</i> meliputi: 1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi; 2. Kriptografi; 3. Autentikasi dan manajemen sesi; 4. Komunikasi jaringan; 5. Interaksi <i>platform</i>; 6. Kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan 7. Ketahanan.
Spesifikasi	Standar dan prosedur keamanan aplikasi berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: 1. Standar kata sandi (<i>password</i>) meliputi jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi; 2. SOP Klasifikasi Data, untuk data tergolong rahasia seperti kata sandi maka penyimpanannya dengan mekanisme kriptografi; 3. SOP Jalur Komunikasi Aplikasi yang Aman; 4. SOP Kontrol Akses Aplikasi; 5. SOP Kriptografi; 6. SOP Rekam Jejak; 7. SOP <i>Error Handling</i> Aplikasi; 8. SOP Pertukaran, Penghapusan, dan Audit Informasi; 9. SOP Sertifikat Elektronik; dan 10. SOP Konfigurasi <i>Server</i>;

Indikator Pencapaian	a. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi <i>web</i> meliputi: - o Autentikasi, - o Manajemen sesi; - o Persyaratan kontrol akses; - o Validasi <i>input</i>; - o Kriptografi pada verifikasi statis; - o Penanganan <i>error</i> dan pencatatan <i>log</i>; - o Proteksi data; - o Keamanan komunikasi; - o Pengendalian kode berbahaya; - o Logika bisnis; - o File; - o Keamanan API dan <i>web service</i>; dan - o Keamanan konfigurasi. b. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi; c. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi: - o penyimpanan data dan persyaratan privasi; - o kriptografi; - o autentikasi dan manajemen sesi; - o komunikasi jaringan; - o interaksi <i>platform</i>; - o kualitas kode dan pengaturan <i>build</i>; dan - o ketahanan. d. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026
Keterangan	-

2.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (PR-K-004)

Tabel 2.6.4.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi: 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data
Spesifikasi	Standar dan prosedur Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: 1. SOP Dokumen dan Surat Elektronik 2. SOP <i>Update</i> Sistem Operasi dan Perangkat Lunak 3. SOP Sistem <i>Recovery</i> dan <i>Restore</i> pada perangkat integrator 4. SOP Migrasi Data 5. SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data 6. SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai
Indikator Pencapaian	Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah meliputi: 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan <i>web service</i> 5. keamanan migrasi data Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026
Keterangan	SOP SPLP Daerah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 18.

2.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah (PR-K-005)

Tabel 2.6.5.1. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi: 1. Aspek administrasi keamanan jaringan intra; 2. Kontrol akses dan autentikasi; 3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra; 4. Kontrol keamanan <i>gateway</i>; 5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel; dan 6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel.
Spesifikasi	1. Dokumen arsitektur jaringan intra 2. Dokumen aset infrastruktur jaringan 3. SOP Pemeliharaan keamanan jaringan intra 4. Laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik 5. SOP akses perangkat jaringan 6. SOP konfigurasi perangkat jaringan 7. SOP layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) 8. SOP akses <i>server database</i> 9. Aplikasi <i>security information and event management</i> untuk <i>network logging, monitoring, dan analytics</i> 10. Perangkat <i>next generation firewall</i> (termasuk IPS atau IDS) 11. SOP pembaruan sistem operasi, <i>firmware</i>, dan <i>patch</i> perangkat jaringan 12. Perangkat <i>load balancer</i> koneksi jaringan dan aplikasi <i>web</i> 13. Perangkat <i>Web Application Firewall</i> (WAF) 14. Pemasangan sertifikat elektronik 15. Penerapan <i>content filtering</i> 16. SOP akses jarak jauh 17. SOP layanan akses <i>WiFi</i> 18. Implementasi SSID untuk jaringan nirkabel

Indikator Pencapaian	Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah meliputi: 1. Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra 2. Kontrol akses dan autentikasi 3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra 4. Kontrol keamanan <i>gateway</i> 5. Kontrol keamanan <i>access point</i> pada jaringan nirkabel 6. Kontrol konfigurasi <i>access point</i> pada jaringan nirkabel Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi. Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi: 1. <i>Next Generation Firewall</i> termasuk didalamnya fitur IPS/IDS 2. <i>Web Application Firewall (WAF)</i> 3. <i>Load Balancer</i> untuk koneksi jaringan 4. <i>Load Balancer</i> untuk aplikasi <i>web</i> 5. Perangkat <i>Content Filtering</i> 6. Sertifikat SSL
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2027
Keterangan	SOP Jaringan Intra Pemerintah diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 17.

2.6.6. Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001) (PR-K-006)

Tabel 2.6.6.1. Program Kerja Sertifikasi Standar Keamanan Informasi (Indeks KAMI/ ISO 27001)

Deskripsi	Layanan TIK SPBE (Aplikasi, Jaringan, <i>Data Center</i>) perlu disertifikasi keamanannya untuk menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan dari pengguna. Standar sertifikasi dapat mengacu pada standar internasional keamanan informasi yakni ISO 27001.
Spesifikasi	- Ruang Lingkup Sertifikasi - Asesmen awal menggunakan Indeks KAMI - Pendampingan Sertifikasi - Sertifikasi ISO 27001 oleh lembaga yang sudah tersertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Indikator Pencapaian	- Identifikasi ruang lingkup untuk standar keamanan informasi (indeks KAMI/ISO 27001) - Pendampingan sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI - Sertifikasi ISO 27001 atau indeks KAMI
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2027
Keterangan	-

2.6.7. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (PR-K-007)

Tabel 2.6.7.1. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Deskripsi	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (<i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i>) terhadap jaringan, <i>server</i> , dan aplikasi yang dikelola oleh DISKOMINFO.
Spesifikasi	1. Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i>) jaringan, <i>server</i>, dan aplikasi <i>web</i> 2. <i>Penetration Testing</i> terhadap jaringan, <i>server</i>, dan aplikasi <i>web</i> menggunakan metode <i>black box</i> 3. Dokumen hasil asesmen dan <i>penetration testing</i> beserta rekomendasinya
Indikator Pencapaian	1. Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi 2. Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi 3. Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	-

2.6.8. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan SPBE (PR-K-008)

Tabel 2.6.9.1. Program Kerja Edukasi Keamanan SPBE

Deskripsi	Serangan siber akan terus meningkat frekuensinya dan tekniknya. Objek yang paling rentan terhadap serangan keamanan siber adalah manusianya. Oleh karena itu kesadaran keamanan informasi harus selalu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi.
Spesifikasi	1. Penentuan strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Pembentukan tim pelaksana 3. Implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 4. Evaluasi hasil implementasi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 5. Tindak lanjut dari hasil evaluasi
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya dokumen strategi edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE 2. Tersedianya tim pelaksana 3. Implementasi edukasi keamanan SPBE melalui kegiatan webinar, <i>focus group discussion</i> (FGD), simulasi, dan lain - lain 4. Implementasi sosialisasi keamanan SPBE melalui sosial media (instagram, WA Group, Facebook, dll) secara periodik 5. Tersedianya dokumentasi evaluasi 6. Tersedianya dokumentasi tindak lanjut
Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Pelaksanaan	2026
Keterangan	-

2.7. **Audit SPBE**

2.7.1. Pelaksanaan Audit TIK (PR-AT-001)

Tabel 2.7.1.1. Program kerja Audit TIK

Deskripsi	: Melakukan Audit TIK secara berkala
Spesifikasi	: Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit TIK terdiri atas : 1. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. a. Pembentukan tim audit aplikasi SPBE b. Pelaksanaan audit internal aplikasi SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal aplikasi SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit aplikasi SPBE e. Perbaikan aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil audit

	2. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. a. Pembentukan tim audit infrastruktur SPBE b. Pelaksanaan audit internal infrastruktur SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal infrastruktur SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit infrastruktur SPBE e. Perbaikan infrastruktur SPBE sesuai rekomendasi hasil audit 3. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE a. Pembentukan tim audit keamanan SPBE b. Pelaksanaan audit internal keamanan SPBE c. Pelaksanaan audit eksternal keamanan SPBE d. Evaluasi hasil pelaksanaan audit keamanan SPBE e. Perbaikan keamanan SPBE sesuai rekomendasi hasil audit
Indikator Pencapaian	: Terlaksananya Audit SPBE secara periodik
Pelaksana	: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat
Tahun Pelaksanaan	2026-2029
Keterangan	: Audit TIK diterapkan dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 29-31.

Bab III Peta Rencana SPBE

3.1. Penyelarasan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2026-2029

Sasaran dalam Peta Rencana SPBE 2026 - 2029 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2029 dan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, inisiatif strategis dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Bojonegoro disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, dimana setiap aspek telah diselaraskan dengan prinsip integrasi, interoperabilitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan SPBE. Adapun aktivitas yang menjadi bagian dari peta rencana SPBE juga disusun secara *inline* dengan arsitektur SPBE kondisi target (*to-be*) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang juga telah sesuai dengan program Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait, sehingga setiap inisiatif yang dikembangkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Dengan demikian diharapkan penyusunan Peta Rencana SPBE ini dapat memperkuat pelaksanaan gerakan SPBE dalam meningkatkan indeks maturitas atau kematangan pelaksanaan indikator-indikator yang terdapat di evaluasi SPBE. Selain itu, transformasi digital Peta Rencana di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya selaras dengan kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian visi nasional dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tabel 3.1.1 Peta Rencana SPBE

No.	Proyek/Aktivitas	Status	Baseline	Target					UIC
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Menguatnya sektor ekonomi non migas									
Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)			1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	
Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non-Migas (Persen)			5,5	5,6	6,4	6,7	6,8	
Indikator	PDRB sektor pertanian			12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	
Indikator	PDRB industri pengolahan			7,0	7,0	7,2	7,4	7,6	
Indikator	PDRB sektor pariwisata			2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Digital Pertanian									
1	Aplikasi								

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		A.1	Pengembangan Aplikasi SIMPONI	Planned			1 Aplikasi				
2 Infrastruktur											
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Peternakan dan Perikanan
		A.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		4 Unit					
		A.2	Pengadaan PC	Dalam Proses		3 Unit					
		A.3	Pengadaan PC	Planned			2 Unit				
		A.4	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					
		A.5	Pengadaan Printer	Planned		2 Unit					
		A.6	Pengadaan SAN Storage	Planned			1 Unit				
		A.7	Pengadaan Scanner	Dalam Proses		1 Unit					
		A.8	Pengadaan Tablet	Dalam Proses		6 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Investasi Terintegrasi											
1 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		A.1	Pengembangan SAMIN	Planned			1 Aplikasi		1 Aplikasi		
		A.2	Pengembangan SIMANIZ	Dalam Proses		1 Aplikasi					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A.3	Pengembangan SIMANIZ		Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
2 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	A.1	Pemeliharaan Perangkat TIK		Dalam Proses		1 Unit					
	B	Penyediaan Perangkat Lunak									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	B.1	Pengadaan Software		Dalam Proses		1 Kegiatan					
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	C.1	Pengadaan Baterai Kamera		Planned				1 Unit			
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal Terintegrasi											
1 Aplikasi											
	A	Pembuatan Aplikasi									Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	A.1	Pembuatan Aplikasi SmartPJU		Planned			1 Aplikasi				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perdagangan Terintegrasi											
1 Infrastruktur											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		A.1	Pemeliharaan Printer	Executed		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		B.1	Pengadaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit					
		B.2	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		7 Unit					
		B.3	Pengadaan Printer	Dalam Proses		5 Unit					
		B.4	Pengadaan Tablet	Dalam Proses		1 Unit					
		B.5	Pengadaan TV LED	Dalam Proses		3 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perikanan Terintegrasi											
1	Infrastruktur										
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Peternakan dan Perikanan
		A.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		4 Unit					
		A.2	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			6 Unit				
		A.3	Pengadaan Printer	Executed		3 Unit					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Peternakan Terintegrasi											
1	Aplikasi										
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Peternakan dan Perikanan
		A.1	Pengembangan Aplikasi BESTARI	Executed		1 Aplikasi					
2	Infrastruktur										
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Peternakan dan Perikanan
		A.1	Pengadaan CCTV	Executed		6 Unit					
		A.2	Pengadaan Hard Disk	Dalam Proses		4 Unit					
		A.3	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					
		A.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		8 Unit					
		A.5	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		1 Unit					
		A.6	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			2 Unit				
		A.7	Pengadaan Printer	Dalam Proses		4 Unit					
		A.8	Pengadaan Printer	Executed		1 Unit					
		A.9	Pengadaan Scanner	Dalam Proses		1 Unit					
		A.10	Pengadaan Smartphone	Planned			3 Unit				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Transportasi Terintegrasi											
1	Manajemen										

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Data									Dinas Perhubungan
		A.1	Backup Data Berkala	Dalam Proses		1 Kegiatan					
2 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Perhubungan
		A.1	Pengembangan Aplikasi APEL GRATIS	Planned			1 Aplikasi				
		A.2	Pengembangan Aplikasi Bojonegoro TIC	Planned			1 Aplikasi				
		A.3	Pengembangan SIMPKB	Dalam Proses		1 Aplikasi					
		A.4	Pengembangan SIMPKB	Dalam Proses			1 Aplikasi				
		A.5	Pengembangan SIMPKB	Executed		1 Aplikasi					
		A.6	Pengembangan SIMPKB	Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
3 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Perhubungan
		A.1	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Perangkat Keamanan									Dinas Perhubungan
		B.1	Pengadaan CCTV	Planned			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Perhubungan
		C.1	Pengadaan Mesin Presensi	Planned		1 Unit					
		C.2	Pengadaan PC	Planned		1 Unit					
		C.3	Pengadaan PC	Planned		5 Unit					
		C.4	Pengadaan Printer	Executed		1 Unit					
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga											
Indikator	Indeks Pembangunan Olahraga (Nilai)					0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	
Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)					59,96	60,47	60,95	61,46	62,11	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pemuda dan Olahraga Terintegrasi											
1	Layanan										
	A	Penerapan Layanan TIK									Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		A.1	Belanja Jasa Dokumentasi	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.2	Belanja Jasa Dokumentasi	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.3	Belanja Jasa Publikasi	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.4	Belanja Jasa Publikasi	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Aplikasi										
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		A.1	Pengembangan Aplikasi BANG TIGOR	Dalam Proses		1 Aplikasi					
		A.2	Pengembangan Aplikasi SIPSO	Dibatalkan	1 Aplikasi						
3	Infrastruktur										
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		A.1	Sewa LED Screen/Videotron	Planned						1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		B.1	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Planned				1 Unit		1 Unit	
		B.2	Sewa Laptop	Planned			1 Kegiatan				
		B.3	Sewa LED Screen/Videotron	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		B.4	Sewa LED Screen/Videotron	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Indikator	Penurunan emisi GRK Kumulatif (TonCO2Eq)				268.476,0	273.845,5	279.322,5	284.908,9	290.607,1		
Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)				75,59	75,67	75,75	75,83	75,91		
Indikator	Indeks Risiko Bencana (Nilai)				78,82	74,51	70,19	65,88	61,56		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Lingkungan Hidup Terintegrasi											
1	Aplikasi										
	A	Pengembangan Aplikasi								Dinas Lingkungan Hidup	
		A.1	Pengembangan Aplikasi SIPP DOKLING	Planned			1 Aplikasi				
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya SDM yang cerdas, sehat dan setara											
Indikator	Indeks Pembanguna n Manusia (Nilai)				73,54	74,21	74,88	75,55	76,21		
Indikator	Indeks Pendidikan (Nilai)				0,63	0,63	0,64	0,65	0,66		
Indikator	Usia Harapan Hidup (Tahun)				75,06	75,22	75,31	75,56	75,82		
Indikator	Indeks Pembanguna n Gender (Nilai)				92,64	93,04	93,44	93,84	94,24		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Administrasi Pemerintahan											
1	Infrastruktur										
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral								Kecamatan Ngraho	
		A.1	Pengadaan TV LED	Planned			1 Unit				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kesehatan untuk Semua											
1	Tata Kelola										

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	SOP Penggunaan Aplikasi									RSUD Kepohbaru
		A.1	SOP Penggunaan Aplikasi	Planned			1 Kegiatan				
2	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									
		A.1	Bimtek/Sosialisasi SDM TIK	Executed		1 Kegiatan					RSUD Padangan
		A.2	Bimtek/Sosialisasi SDM TIK	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Kepohbaru
		A.3	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned				1 Kegiatan			RSUD Kepohbaru
		A.4	Pengadaan Tenaga Ahli IT	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Padangan
		A.5	Pengadaan Tenaga Ahli IT	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Padangan
		A.6	Peningkatan Kompetensi SDM K	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Sumberrejo
3	Layanan										
	A	Penerapan Layanan TIK									RSUD Sumberrejo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.1	Pengadaan Jasa Konsultansi Digitalisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Sumberrejo	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
4	Aplikasi										
	A	Pembuatan Aplikasi									Dinas Kesehatan
		A.1	Pembuatan Aplikasi Pelayanan Kesehatan (Customize)	Planned		1 Aplikasi					
		A.2	Pembuatan Aplikasi SIPATAS	Planned			1 Aplikasi				
		A.3	Pembuatan Aplikasi Software Berbasis Web	Planned		1 Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
	B	Pembuatan Aplikasi									
		B.1	Pengembangan Aplikasi E-Arsip	Planned			1 Aplikasi				RSUD Kepohbaru
		B.2	Pengembangan Aplikasi E-RM	Planned		1 Aplikasi					RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo
		B.3	Pengembangan Aplikasi Emergency Button Bojonegoro	Planned			1 Aplikasi				Dinas Kesehatan
		B.4	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kesehatan (Customize)	Executed		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
		B.5	Pengembangan Aplikasi SAJI PANGAN	Planned		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
		B.6	Pengembangan Aplikasi SIDIK PERISA	Planned		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.7	Pengembangan Aplikasi SIGAP PSC 119	Planned		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
		B.8	Pengembangan Aplikasi SIM-RS	Planned		1 Aplikasi					RSUD Sumberrejo
		B.9	Pengembangan Aplikasi SINTESA	Planned		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
		B.10	Pengembangan Aplikasi SINTESA EMAS (RME)	Planned		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
		B.11	Pengembangan Aplikasi SPM-RS	Planned			1 Aplikasi				RSUD Kepohbaru
		B.12	Pengembangan Modul Kefarmasian	Planned		1 Aplikasi					Dinas Kesehatan
		B.13	Pengembangan SIMRS	Dalam Proses		1 Aplikasi					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
5 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Jaringan									
		A.1	Pemeliharaan Jaringan	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		A.2	Pemeliharaan Jaringan	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan
		A.3	Pemeliharaan Jaringan	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B	Pemeliharaan Perangkat Keamanan									
		B.1	Pemeliharaan CCTV	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
	C	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		C.1	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		C.2	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD Sumberrejo
		C.3	Pemeliharaan Komputer	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		C.4	Pemeliharaan Komputer	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		C.5	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		C.6	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Kepohbaru
		C.7	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Padangan
		C.8	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.9	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Kepohbaru
		C.10	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Padangan
		C.11	Pemeliharaan Perangkat Lunak	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		C.12	Pemeliharaan Perangkat Lunak	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		C.13	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Kepohbaru
		C.14	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Padangan
		C.15	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD Sumberrejo
		C.16	Pemeliharaan Printer	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		C.17	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Kepohbaru
		C.18	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Padangan
	D	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		D.1	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned			1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Kepohbaru
		D.2	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Padangan
	E	Penyediaan Jaringan Internet									
		E.1	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan
		E.2	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Kepohbaru
		E.3	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Padangan
		E.4	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					RSUD Sumberrejo
		E.5	Berlangganan Internet	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Kesehatan
		E.6	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Kepohbaru
		E.7	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Padangan
		E.8	Berlangganan Internet	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Sumberrejo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	F	Penyediaan Jaringan Internet									
		F.1	Pengadaan Access Point	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		F.2	Pengadaan Jaringan LAN	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		F.3	Pengadaan Managed Switch	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		F.4	Pengadaan Peralatan Jaringan IT Rumah Sakit	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		F.5	Pengadaan Print Server	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		F.6	Pengadaan Router	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
	G	Penyediaan Perangkat Keamanan									
		G.1	Pengadaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		G.2	Pengadaan CCTV	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
	H	Penyediaan Jaringan Internet									
		H.1	Pengadaan Rak Server	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		H.2	Pengadaan Server	Planned			1 Kegiatan				RSUD Kepohbaru
		H.3	Pengadaan UPS Server	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
	I	Penyediaan Jaringan Internet									

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		I.1	Pengadaan Hardisk	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		I.2	Pengadaan Hardisk	Planned		1 Unit	1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo
		I.3	Pengadaan SAN Storage Server	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		I.4	Pengadaan SSD	Planned		1 Unit					RSUD Sumberrejo
		I.5	Pengadaan Storage	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		I.6	Pengadaan Storage	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
	J	Penyediaan Perangkat Lunak									
		J.1	License Proxy Server	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		J.2	Pengadaan Layanan WhatsApp API	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		J.3	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		J.4	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		J.5	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		J.6	Pengadaan Software	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan
		J.7	Penyediaan Lisensi	Dibatalkan		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
		J.8	Penyediaan Lisensi	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kesehatan
	K	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		K.1	Media Informasi Kantor	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		K.2	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned		1 Unit	1 Unit				Dinas Kesehatan
		K.3	Pengadaan CCTV	Planned			1 Unit				RSUD Kepohbaru
		K.4	Pengadaan Desktop PC	Planned		1 Unit					RSUD Padangan
		K.5	Pengadaan Flash Disk	Planned			1 Unit				Dinas Kesehatan
		K.6	Pengadaan Komputer	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		K.7	Pengadaan Komputer	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		K.8	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD Sumberrejo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		K.9	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		K.10	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		1 Unit					RSUD Padangan
		K.11	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit	1 Unit				Dinas Kesehatan
		K.12	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		K.13	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit	1 Unit		1 Unit		RSUD Kepohbaru
		K.14	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	RSUD Padangan
		K.15	Pengadaan LCD Proyektor	Planned			1 Unit				Dinas Kesehatan
		K.16	Pengadaan Mesin Absensi	Planned			1 Unit				Dinas Kesehatan
		K.17	Pengadaan Monitor	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		K.18	Pengadaan PC	Executed		1 Unit					RSUD Padangan
		K.19	Pengadaan PC	Planned		1 Unit					Dinas Kesehatan
		K.20	Pengadaan PC	Planned		1 Unit	1 Unit		1 Unit		RSUD Kepohbaru
		K.21	Pengadaan PC	Planned			1 Unit	1 Unit		1 Unit	RSUD Padangan
		K.22	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	K.23	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit					RSUD Sumberrejo
	K.24	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					RSUD Padangan
	K.25	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit	1 Unit				Dinas Kesehatan
	K.26	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD Kepohbaru
	K.27	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit	1 Unit				RSUD Padangan
	K.28	Pengadaan Proyektor	Planned			1 Unit					Dinas Kesehatan
	K.29	Pengadaan Raspberry Pi / Mini PC	Planned					1 Unit			Dinas Kesehatan
	K.30	Pengadaan Router	Executed			1 Unit					RSUD Padangan
	K.31	Pengadaan Router	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD Kepohbaru
	K.32	Pengadaan Scanner	Planned			1 Unit	1 Unit				RSUD Kepohbaru
	K.33	Pengadaan Server	Planned				1 Unit				RSUD Padangan
	K.34	Pengadaan Smartphone	Executed			1 Unit					RSUD Padangan
	K.35	Pengadaan Smartphone	Planned			1 Unit	1 Unit				RSUD Kepohbaru
	K.36	Pengadaan Tablet	Dalam Proses			1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
	K.37	Pengadaan Tablet	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	RSUD Kepohbaru
	K.38	Pengadaan UPS	Dalam Proses			1 Unit					RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		K.39	Pengadaan UPS	Planned			1 Unit				RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
		K.40	Sewa LED Screen/Videotron	Planned		1 Kegiatan					Dinas Kesehatan
6 Keamanan											
	A	Pemeliharaan Perangkat Keamanan									
		A.1	Pemeliharaan Firewall	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Kepohbaru
		A.2	Pemeliharaan Firewall	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	RSUD Padangan
	B	Penyediaan Perangkat Keamanan									
		B.1	Pengadaan Firewall	Planned			1 Kegiatan				RSUD Kepohbaru
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, melayani dan inklusif											
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi					85,09	87,43	89,77	92,11	94,45	
Indikator	Nilai SAKIP (Nilai)					78,00	80,01	80,50	81,02	82,62	
Indikator	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Nilai)					4,58	4,60	4,62	4,64	4,66	
Indikator	Indeks SPI KPK (Nilai)					75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	
Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)					74,99	80,35	83,64	86,93	90,22	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Keamanan, Siber, Sandi dan Sinyal											
1	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi ISO 27001:2022	Planned		1 Kegiatan					
2	Keamanan										
	A	Identifikasi Kerentanan Aplikasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pengadaan Pen Test Tools	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.1	Sewa Secure Socket Layer (SSL)	Executed		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Perangkat Keamanan									Dinas Komunikasi dan Informatika
		C.1	Pengadaan Lisensi Firewall	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Baseline	Target					UIC
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3	Audit TI									
	A	Audit Aplikasi								Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1 Optimalisasi penerapan Audit Aplikasi	Dalam Proses		1 Kegiatan					
	B	Audit Infrastruktur								Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.1 Optimalisasi penerapan Audit Infrastruktur	Dalam Proses		1 Kegiatan					
	C	Audit Keamanan								Dinas Komunikasi dan Informatika
		C.1 Optimalisasi penerapan Audit Keamanan	Dalam Proses		1 Kegiatan					
	D	Standar Keamanan TIK								Dinas Komunikasi dan Informatika
		D.1 Pengadaan Jasa Konsultansi Re-Implementasi ISO 27001:2022	Planned						1 Kegiatan	
		D.2 Pengadaan Jasa Konsultansi Re-Sertifikasi ISO 27001:2022	Planned						1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		D.3	Pengadaan Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 27001:2022	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Koordinasi Penerapan SPBE											
1 Tata Kelola											
	A	Tata Kelola Pemerintahan									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Kajian/Penelitian (Dokumentasi Arsitektur SPBE pada SIA-SPBE)	Planned			1 Kegiatan				
		A.2	Kajian/Penelitian (Reviu Arsitektur SPBE/Pemerintah Digital)	Planned			1 Kegiatan				
		A.3	Kajian/Penelitian (Reviu Peta Rencana SPBE/Pemerintah Digital)	Planned			1 Kegiatan				
		A.4	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan dan Dokumentasi Arsitektur SPBE pada SIA-SPBE	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.5	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Smart City	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.6	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Arsitektur SPBE	Executed		1 Kegiatan					
		A.7	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Arsitektur SPBE	Planned			1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.8	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Peta Rencana SPBE	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.9	Pengadaan Jasa Konsultansi Reviu Peta Rencana SPBE	Planned			1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil											
1	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		A.1	Penyediaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Dalam Proses			1 Kegiatan				
2 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		A.1	Pengembangan Aplikasi PANAHA SRIKANDI	Planned				1 Aplikasi			
3 Infrastruktur											
	A	Penyediaan Jaringan Internet									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		A.1	Penyediaan Jaringan	Executed		1 Aplikasi					
		A.2	Penyediaan Jaringan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B	Penyediaan Perangkat Jaringan									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		B.1	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					
		B.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Perangkat Keamanan									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		C.1	Pengadaan Alat Perekaman	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	D	Penyediaan Perangkat Keras Server									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		D.1	Pengadaan Harddisk Server	Planned			1 Unit		1 Unit		
		D.2	Pengadaan Perangkat Keras Server	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		D.3	Pengadaan Synology	Planned				1 Unit			
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		E.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned				1 Unit			
		E.2	Pengadaan Perangkat Mobile	Executed		1 Unit					
		E.3	Pengadaan Perangkat Mobile	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Administrasi Pemerintahan											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tata Kelola										
	A	SOP Penggunaan Aplikasi									
		A.1	Manual Book Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online “SiKado”	Planned			1 Kegiatan				Bagian Pemerintahan
		A.2	Manual Book/Petunjuk Aplikasi SIAP PRAJA	Planned			1 Kegiatan				Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		A.3	Penyusunan SOP Aplikasi e-Bakul	Planned		1 Kegiatan					Bagian Organisasi
		A.4	Penyusunan SOP Aplikasi e-Kinerja Kabupaten	Planned			1 Kegiatan				Bagian Organisasi
		A.5	Penyusunan SOP Aplikasi e-SAKIP	Planned		1 Kegiatan					Bagian Organisasi
		A.6	Penyusunan SOP Aplikasi SinJab	Planned		1 Kegiatan					Bagian Organisasi
2	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan									Bagian Pemerintahan
		A.1	Sosialisasi Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online “SiKado”	Planned			1 Kegiatan				

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									
		B.1	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi DAMISDA		Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.2	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi E-WALIDATA		Executed		1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.3	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi IGA		Executed		1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.4	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi SIPD E-WALIDATA		Planned		1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.5	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi SIPD-RI		Executed		1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.6	Bimtek/Sosialisasi Aplikasi SIPD-RI		Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.7	Bimtek/Sosialisasi DAMISDA		Executed		1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.8	Bimtek/Sosialisasi DAMISDA		Planned		1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.9	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Bakul		Planned		1 Kegiatan				Bagian Organisasi

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.10	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Kinerja	Planned			1 Kegiatan				Bagian Organisasi
		B.11	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-SAKIP	Planned		1 Kegiatan					Bagian Organisasi
		B.12	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAP PRAJA	Planned			1 Kegiatan				Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		B.13	Bimtek/Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SinJab	Planned		1 Kegiatan					Bagian Organisasi
		B.14	Bimtek/Sosialisasi SIPD E-WALIDATA	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.12	Pengadaan Web Admin	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Bubulan
		B.13	Pengadaan Web Admin	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Bubulan
3 Aplikasi											
	A	Pembuatan Aplikasi									
		A.1	Pembuatan Aplikasi e-TPP	Executed		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.2	Pembuatan Aplikasi SIPIK	Planned		1 Aplikasi					Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.3	Pembuatan Dashboard Bupati	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.4	Pengadaan Aplikasi Sistem Kerjasama Daerah Online “SiKado”	Dalam Proses		1 Aplikasi					Bagian Pemerintahan
		A.5	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kartu Kendali	Planned		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	B	Pengembangan Aplikasi									
		B.1	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Executed		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.2	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.3	Integrasi Modul SIPD Penatausahaan	Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.4	Pengembangan Aplikasi Bojonegoro Innovation Awards (BIA)	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.5	Pengembangan Aplikasi e-Bakul	Planned		1 Aplikasi					Bagian Organisasi

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.6	Pengembangan Aplikasi e-BMD	Planned		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.7	Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Kabupaten	Planned			1 Aplikasi				Bagian Organisasi
		B.8	Pengembangan Aplikasi E-MONEV	Planned			1 Aplikasi				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.9	Pengembangan Aplikasi Lelang Elektronik	Dalam Proses		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.10	Pengembangan Aplikasi LeMinHo	Executed		1 Aplikasi					Kecamatan Ngraho
		B.11	Pengembangan Aplikasi LeMinHo	Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kecamatan Ngraho
		B.12	Pengembangan Aplikasi Manajemen Penghapusan Aset	Planned		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.13	Pengembangan Aplikasi Penyusunan Sewa Elektronik	Dalam Proses		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.14	Pengembangan Aplikasi RKBMD	Dalam Proses		1 Aplikasi					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		B.12	Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.13	Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro	Planned		1 Aplikasi					Bagian Organisasi
		B.14	Pengembangan Aplikasi Si Mental Baja	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.15	Pengembangan Aplikasi Si-Kepo	Executed		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.16	Pengembangan Aplikasi SIAP PRAJA (Sistem Informasi Administrasi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa)	Planned			1 Aplikasi				Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		B.17	Pengembangan Aplikasi SIMANTAP	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.18	Pengembangan Aplikasi SinJab	Planned		1 Aplikasi					Bagian Organisasi
4 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah									Kecamatan Tambakrejo
		A.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses				1 Kegiatan	1 Kegiatan		

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		B.1	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Banjarejo
		B.2	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Jetak
		B.3	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Kadipaten
		B.4	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Ledok kulon
		B.5	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Ledok Wetan
		B.6	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Mojokampung
		B.7	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Ngrowo
		B.8	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Sumbang
		B.9	Pemeliharaan CCTV	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Margomulyo
		B.10	Pemeliharaan CCTV	Planned			1 Kegiatan				Kelurahan Ledok Kulon

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B.11	Pemeliharaan CCTV	Planned				1 Kegiatan				Kelurahan Ledok Wetan
	B.12	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses			1 Kegiatan					Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	B.13	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses			6 Unit					Kecamatan Kasiman
	B.14	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses			1 Kegiatan					Kelurahan Jetak
	B.15	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses			1 Kegiatan					Kelurahan Ledok Kulon
	B.16	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses			1 Kegiatan					Kelurahan Ledok Wetan
	B.17	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses			1 Kegiatan					Kelurahan Ngrowo
	B.18	Pemeliharaan Komputer	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	B.19	Pemeliharaan Komputer	Planned				1 Kegiatan				Kelurahan Kapatihan
	B.20	Pemeliharaan Komputer	Planned				1 Kegiatan				Kelurahan Ledok Kulon
	B.21	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses			1 Kegiatan					Kelurahan Jetak

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B.22	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan						Kelurahan Kepatihan
	B.23	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan						Kelurahan Sumbang
	B.24	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dibatalkan		1 Kegiatan						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	B.25	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Executed		1 Kegiatan						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	B.26	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Executed		1 Kegiatan						Kecamatan Kanor
	B.27	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	B.28	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Baureno
	B.29	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kanor
	B.30	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Ngambon
	B.31	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sugihwaras
	B.32	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Trucuk

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.33	Pemeliharaan Komputer/PC	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Kadipaten
		B.34	Pemeliharaan Komputer/PC	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Karangpacar
		B.35	Pemeliharaan Komputer/PC	Planned			1 Kegiatan				kelurahan Banjarejo
		B.36	Pemeliharaan Laptop	Dalam Proses		4 Unit					Kecamatan Gondang
		B.37	Pemeliharaan Laptop	Dalam Proses			1 Kegiatan	1 Kegiatan			Kecamatan Tambakrejo
		B.38	Pemeliharaan Laptop	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Mojokampung
		B.39	Pemeliharaan Laptop	Planned			6 Unit	6 Unit		6 Unit	Kecamatan Kasiman
		B.40	Pemeliharaan Laptop, PC, dan Printer	Planned		1 Unit					Kecamatan Sekar
		B.41	Pemeliharaan Laptop/PC	Dalam Proses		1 Kegiatan					Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		B.42	Pemeliharaan Laptop/PC	Planned			1 Kegiatan				Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		B.43	Pemeliharaan Laptop/PC	Planned		1 Kegiatan					Bagian Umum
		B.44	Pemeliharaan Laptop/PC	Planned			4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Kecamatan Gondang

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.45	Pemeliharaan PC/Laptop	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Sumberrejo
		B.46	Pemeliharaan PC/Laptop	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sumberrejo
		B.47	Pemeliharaan PC/Laptop/Printer	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Ngraho
		B.48	Pemeliharaan PC/Laptop/Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Ngraho
		B.49	Pemeliharaan Perangkat IIK	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Kedewan
		B.50	Pemeliharaan Perangkat IIK	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Kedewan
		B.51	Pemeliharaan Perangkat TIK	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Bubulan
		B.52	Pemeliharaan Perangkat TIK	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Kedungadem
		B.53	Pemeliharaan Perangkat TIK	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Malo
		B.54	Pemeliharaan Perangkat TIK	Dalam Proses		1 Unit	1 Unit				Kecamatan Padangan
		B.55	Pemeliharaan Perangkat TIK	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Sukosewu

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.56	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan					Dinas Peternakan dan Perikanan
		B.57	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Kalitidu
		B.58	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Kapas
		B.59	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Temayang
		B.60	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		B.61	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned		1 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
		B.62	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Bubulan
		B.63	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kalitidu
		B.64	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kapas
		B.65	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kedungadem
		B.66	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan				Kecamatan Malo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	B.67	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Purwosari
	B.68	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sukosewu
	B.69	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Temayang
	B.70	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan						Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	B.71	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan						Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
	B.72	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan				1 Kegiatan		Kecamatan Dander
	B.73	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		3 Unit						Kecamatan Gondang
	B.74	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan						Kecamatan Sumberrejo
	B.75	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan						Kecamatan Trucuk
	B.76	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan						Kelurahan Banjarejo
	B.77	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan						Kelurahan Jetak

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.78	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Kadipaten
		B.79	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Karangpacar
		B.80	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Kepatihan
		B.81	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Ledok Kulon
		B.82	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Ledok Wetan
		B.83	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Mojokampung
		B.84	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Ngrowo
		B.85	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kelurahan Sumbang
		B.86	Pemeliharaan Printer	Executed		1 Kegiatan					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.87	Pemeliharaan Printer	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Kanor

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.88	Pemeliharaan Printer	Executed		1 Kegiatan			1 Kegiatan		Kecamatan Sugihwaras
		B.89	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		B.90	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		B.91	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan				Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		B.92	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Baureno
		B.93	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	Kecamatan Dander
		B.94	Pemeliharaan Printer	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Gayam
		B.95	Pemeliharaan Printer	Planned			3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Kecamatan Gondang
		B.96	Pemeliharaan Printer	Planned			5 Unit		5 Unit		Kecamatan Kasiman
		B.97	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sugihwaras
		B.98	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sumberrejo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.99	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Trucuk
		B.100	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	kelurahan Banjarejo
		B.101	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan				Kelurahan Kepatihan
		B.102	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan				Kelurahan Ledok Kulon
		B.103	Pemeliharaan Sarana Kantor	Planned				1 Paket	1 Paket	1 Paket	Kecamatan Kepohbaru
		B.104	Pemeliharaan Videotron	Planned		1 Kegiatan			1 Kegiatan		Bagian Umum
		B.105	Pengadaan CCTV	Executed		1 Unit					Kecamatan Dander
		B.106	Pengadaan CCTV	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Dander
		B.107	Pengadaan CCTV	Planned			1 Unit				Kelurahan Kepatihan
		B.108	Pengadaan PC	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Dander

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.10 9	Pengadaan PC	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Dander
	C	Penyediaan Jaringan Internet									
		C.1	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		C.2	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Bubulan
		C.3	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kecamatan Dander
		C.4	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Gondang
		C.5	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Kanor
		C.6	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Kasiman
		C.7	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Kedungadem
		C.8	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Malo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.9	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Margomulyo
		C.10	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Sekar
		C.11	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Sukosewu
		C.12	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Kecamatan Trucuk
		C.13	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Balen
		C.14	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Baureno
		C.15	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Kedewan
		C.16	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Ngambon
		C.17	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Ngraho
		C.18	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Padangan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.19	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Purwosari
		C.20	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Sugihwaras
		C.21	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Sumberrejo
		C.22	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Temayang
		C.23	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		C.24	Berlangganan Internet	Planned		1 Kegiatan					Bagian Umum
		C.25	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan				Kecamatan Balen
		C.26	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Baureno
		C.27	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Bubulan
		C.28	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Gondang

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.29	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kalitidu
		C.30	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kanor
		C.31	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kasiman
		C.32	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kedewan
		C.33	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Kedungadem
		C.34	Berlangganan Internet	Planned				1 Paket			Kecamatan Kepohbaru
		C.35	Berlangganan Internet	Planned				24 paket			Kecamatan Kepohbaru
		C.36	Berlangganan Internet	Planned					1 Paket		Kecamatan Kepohbaru
		C.37	Berlangganan Internet	Planned					24 paket		Kecamatan Kepohbaru
		C.38	Berlangganan Internet	Planned						1 Paket	Kecamatan Kepohbaru
		C.39	Berlangganan Internet	Planned						24 paket	Kecamatan Kepohbaru
		C.40	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Malo
		C.41	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Margomulyo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.42	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Ngambon
		C.43	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Ngraho
		C.44	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Padangan
		C.45	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Purwosari
		C.46	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sugihwaras
		C.47	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sukosewu
		C.48	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Sumberrejo
		C.49	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Temayang
		C.50	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Trucuk
		C.51	Langganan Paket Data	Executed		1 Kegiatan					Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.52	Langganan Paket Data	Executed		1 Kegiatan					Kecamatan Temayang
		C.53	Langganan Paket Data	Planned		1 Kegiatan					Bagian Umum
		C.54	Langganan Paket Data	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		C.55	Langganan Paket Data	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Temayang
		C.56	Penyediaan Jaringan	Executed		1 Paket					Kecamatan Kepohbaru
	D	Penyediaan Perangkat Jaringan									
		D.1	Belanja Sewa Komputer Jaringan	Executed		1 Kegiatan					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		D.2	Belanja Sewa Komputer Jaringan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		D.3	Berlangganan Internet	Dalam Proses			1 Kegiatan				Kecamatan Tambakrejo
	E	Penyediaan Perangkat Keamanan									
		E.1	Pengadaan CCTV	Planned		1 Unit					Bagian Umum

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	F	Penyediaan Perangkat Keras Server									
		F.1	Penyediaan Perangkat Keras	Dalam Proses		1 Kegiatan					Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
		F.2	Penyediaan Perangkat Keras	Planned			1 Kegiatan				Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
	G	Penyediaan Perangkat Keras Storage									
		G.1	Penyediaan Perangkat Keras Storage	Dalam Proses		1 Kegiatan					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		G.2	Penyediaan Perangkat Keras Storage	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	H	Penyediaan Perangkat Lunak									
		H.1	Belanja Software	Planned		1 Kegiatan					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		H.2	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Dalam Proses		1 Kegiatan					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		H.3	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		H.4	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace	Executed		1 Kegiatan					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		H.5	Pengadaan Microsoft Office	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		H.6	Pengadaan Software	Executed		1 Kegiatan					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		H.7	Pengadaan Software	Planned			1 Kegiatan				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		H.8	Pengadaan Software	Planned		1 Kegiatan					Kecamatan Bojonegoro
		D.9	Penyediaan Lisensi	Dibatalkan					1 Kegiatan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		D.10	Penyediaan Lisensi	Planned				1 Kegiatan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		I.1	Belanja Peralatan Komputer/Printer	Planned			1 Unit				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		I.2	Langganan Paket Data	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kecamatan Purwosari
		I.3	Pengadaan Adaptor	Dalam Proses		1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		I.4	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Trucuk

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.5	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Sumberrejo
	I.6	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned				1 Unit				Kecamatan Trucuk
	I.7	Pengadaan CCTV	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Gondang
	I.8	Pengadaan CCTV	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kanor
	I.9	Pengadaan CCTV	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Malo
	I.10	Pengadaan CCTV	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Sekar
	I.11	Pengadaan CCTV	Dalam Proses			1 Unit	1 Unit				Kecamatan Tambakrejo
	I.12	Pengadaan CCTV	Planned					8 Unit			Kecamatan Balen
	I.13	Pengadaan CCTV	Planned				1 Unit				Kecamatan Baureno
	I.14	Pengadaan CCTV	Planned			1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.15	Pengadaan CCTV	Planned			5 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
	I.16	Pengadaan CCTV	Planned					1 Unit			Kecamatan Gondang
	I.17	Pengadaan CCTV	Planned					1 Unit			Kecamatan Ngraho
	I.18	Pengadaan CCTV	Planned				1 Unit				Kecamatan Sekar
	I.19	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned				1 Unit				kelurahan Banjarejo
	I.20	Langganan Paket Data	Planned			1 Unit	1 Unit				Kelurahan Jetak
	I.21	Pengadaan Adaptor	Planned			1 Unit					Kelurahan Karangpacar
	I.22	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit					Kelurahan ledok Wetan
	I.23	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit					Kelurahan Mojokampung
	I.24	Langganan Paket Data	Planned				1 Unit				kelurahan Sumbang

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.25	Pengadaan Converter Adaptor	Planned				1 Unit	1 Unit			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.26	Pengadaan Desktop PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Ngraho
	I.27	Pengadaan Desktop PC	Executed			1 Unit					Kecamatan Ngraho
	I.28	Pengadaan Desktop PC	Planned			1 Unit					Bagian Umum
	I.29	Pengadaan Desktop PC	Planned					1 Unit	1 Unit		Kecamatan Baureno
	I.30	Pengadaan Desktop PC	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit		Kecamatan Ngraho
	I.31	Pengadaan Drone Camera	Planned				1 Unit				Kecamatan Gayam
	I.32	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses			4 Unit					Kecamatan Sumberrejo
	I.33	Pengadaan Flash Disk	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	I.34	Pengadaan Flash Disk	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.35	Pengadaan Flash Disk	Planned				4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Kecamatan Sumberrejo
	I.36	Pengadaan Handphone	Dalam Proses			1 Unit					Kelurahan Ledok Kulon
	I.37	Pengadaan Handphone	Executed			1 Unit					Kelurahan Jetak
	I.38	Pengadaan Handphone	Executed			1 Unit					Kelurahan Ledok Kulon
	I.39	Pengadaan Handphone	Executed			1 Unit					Kelurahan Mojokampung
	I.40	Pengadaan Handphone	Executed			1 Unit					Kelurahan Sumbang
	I.41	Pengadaan Handphone	Planned			1 Unit					Kelurahan Klangon

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.42	Pengadaan Handphone	Planned			1 Unit					Kelurahan ledok Wetan
	I.43	Pengadaan Hard Disk	Planned				1 Unit				Kecamatan Baureno
	I.44	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.45	Pengadaan Keyboard	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Trucuk
	I.46	Pengadaan Keyboard	Planned			1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.47	Pengadaan Keyboard	Planned			1 Unit					Kelurahan Sumbang
	I.48	Pengadaan Komputer	Executed			1 Unit					Kecamatan Ngambon
	I.49	Pengadaan Komputer	Planned				1 Unit				Kecamatan Ngambon
	I.50	Pengadaan Komputer	Planned				1 Unit				Kelurahan Jetak
	I.51	Pengadaan Komputer	Planned				1 Unit				Kelurahan Ledok Wetan
	I.52	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Bagian Umum
	I.53	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			6 Unit					Dinas Peternakan dan Perikanan
	I.54	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Bubulan
	I.55	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			2 Unit					Kecamatan Bubulan
	I.56	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Gayam
	I.57	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kanor
	I.58	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			2 Unit					Kecamatan Kapas
	I.59	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			3 Unit					Kecamatan Kasiman

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.60	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses				1 Unit				Kecamatan Kedewan
	I.61	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses				3 Unit				Kecamatan Kedewan
	I.62	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			4 Unit					Kecamatan Kedungadem
	I.63	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kepohbaru
	I.64	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Malo
	I.65	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Ngraho
	I.66	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Sekar
	I.67	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			2 Unit					Kecamatan Sukosewu
	I.68	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			3 Unit					Kecamatan Sumberrejo
	I.69	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses				1 Unit			1 Unit	Kecamatan Tambakrejo
	I.70	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses			2 Unit					Kecamatan Temayang
	I.71	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.72	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			4 Unit					Kecamatan Gondang
	I.73	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Kecamatan Margomulyo
	I.74	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Kecamatan Ngraho
	I.75	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Kecamatan Padangan
	I.76	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Kecamatan Tambakrejo
	I.77	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Kelurahan Banjarejo
	I.78	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Kelurahan Klangon

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		I.79	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		I.80	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit			1 Unit	Dinas Peternakan dan Perikanan
		I.81	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Baureno
		I.82	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
		I.83	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		2 Unit					Kecamatan Bojonegoro
		I.84	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		5 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
		I.85	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit				Kecamatan Bubulan
		I.86	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit					Kecamatan Gayam
		I.87	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			4 Unit	2 Unit			Kecamatan Gondang
		I.88	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit			Kecamatan Kanor
		I.89	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Kasiman
		I.90	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Kepohbaru
		I.91	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit				Kecamatan Malo
		I.92	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit		1 Unit		Kecamatan Margomulyo
		I.93	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Ngambon
		I.94	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit		Kecamatan Ngraho
		I.95	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit				Kecamatan Padangan
		I.96	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Kecamatan Purwosari

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.97	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				Kecamatan Sekar
	I.98	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit				Kecamatan Sugihwaras
	I.99	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				Kecamatan Sukosewu
	I.100	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Kecamatan Sumberrejo
	I.101	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Temayang
	I.102	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				kelurahan Banjarejo
	I.103	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				Kelurahan Jetak
	I.104	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit				Kelurahan Kadipaten
	I.105	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit					Kelurahan Karangpacar
	I.106	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				Kelurahan Ledok Kulon
	I.107	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				Kelurahan Ledok Wetan
	I.108	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit				Kelurahan Ngrowo
	I.89	Pengadaan LCD Proyektor	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kanor
	I.90	Pengadaan LCD Proyektor	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Malo
	I.91	Pengadaan LCD Proyektor	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Temayang
	I.92	Pengadaan LCD Proyektor	Planned				1 Unit				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	I.93	Pengadaan LCD Proyektor	Planned					1 Unit	1 Unit		Kecamatan Ngraho
	I.94	Pengadaan LCD Proyektor	Planned			1 Unit					Kelurahan Sumbang
	I.95	Pengadaan Mouse	Dalam Proses			4 Unit					Kecamatan Sumberrejo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.96	Pengadaan Mouse	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Trucuk
	I.97	Pengadaan Mouse	Planned			1 Unit					Bagian Umum
	I.98	Pengadaan Mouse	Planned			1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.99	Pengadaan Mouse	Planned				8 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Kecamatan Sumberrejo
	I.100	Pengadaan Mouse	Planned			1 Unit					Kelurahan Sumbang
	I.101	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Kegiatan					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	I.102	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Bubulan
	I.103	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Gayam
	I.104	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kalitidu
	I.105	Pengadaan PC	Dalam Proses			2 Unit					Kecamatan Kalitidu
	I.106	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kanor
	I.107	Pengadaan PC	Dalam Proses			2 Unit					Kecamatan Kedungadem
	I.108	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Malo
	I.109	Pengadaan PC	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Temayang
	I.110	Pengadaan PC	Executed			1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.111	Pengadaan PC	Executed			1 Unit					Kecamatan Balen
	I.112	Pengadaan PC	Executed			1 Unit					Kecamatan Padangan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.113	Pengadaan PC	Executed			1 Unit					Kelurahan Mojokampung
	I.114	Pengadaan PC	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	I.115	Pengadaan PC	Planned			1 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
	I.116	Pengadaan PC	Planned			1 Unit	1 Unit				Kecamatan Gayam
	I.117	Pengadaan PC	Planned				1 Unit				Kecamatan Kapas
	I.118	Pengadaan PC	Planned			1 Unit					Kecamatan Kasiman
	I.119	Pengadaan PC	Planned			1 Unit					Kecamatan Kedewan
	I.120	Pengadaan PC	Planned					1 Unit		1 Unit	Kecamatan Margomulyo
	I.121	Pengadaan PC	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Purwosari
	I.122	Pengadaan PC	Planned				1 Unit				Kecamatan Sugihwaras
	I.123	Pengadaan PC	Planned				4 Unit				Kecamatan Sukosewu
	I.124	Pengadaan PC	Planned				1 Unit				Kecamatan Temayang
	I.125	Pengadaan PC	Planned			1 Unit					Kelurahan Kadipaten
	I.126	Pengadaan PC	Planned				1 Unit				Kelurahan Ledok Kulon
	I.127	Pengadaan Print Server	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.128	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit					Bagian Umum

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		I.129	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Peternakan dan Perikanan
		I.130	Pengadaan Printer	Dalam Proses		8 Unit					Dinas Peternakan dan Perikanan
		I.131	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Balen
		I.132	Pengadaan Printer	Dalam Proses		2 Unit					Kecamatan Balen
		I.133	Pengadaan Printer	Dalam Proses		2 Unit					Kecamatan Bubulan
		I.134	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Gayam
		I.135	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Kalitidu
		I.136	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Kanor
		I.137	Pengadaan Printer	Dalam Proses		2 Unit					Kecamatan Kapas
		I.138	Pengadaan Printer	Dalam Proses		3 Unit					Kecamatan Kedungadem
		I.139	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Kepohbaru
		I.140	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Malo
		I.141	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Sekar
		I.142	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Sukosewu
		I.143	Pengadaan Printer	Dalam Proses		2 Unit					Kecamatan Sukosewu
		I.144	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Sumberrejo
		I.145	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Tambakrejo
		I.146	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Temayang

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.147	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Trucuk
	I.148	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.149	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kecamatan Baureno
	I.150	Pengadaan Printer	Executed			4 Unit					Kecamatan Gondang
	I.151	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kecamatan Margomulyo
	I.152	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kecamatan Ngraho
	I.153	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kecamatan Padangan
	I.154	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kelurahan Kadipaten
	I.155	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kelurahan Karangpacar
	I.156	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Kelurahan Kepatihan
	I.157	Pengadaan Printer	Planned				1 Unit		1 Unit		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	I.158	Pengadaan Printer	Dalam Proses				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.159	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit					Bagian Organisasi
	I.160	Pengadaan Printer	Dalam Proses						4 Unit		Dinas Peternakan dan Perikanan
	I.161	Pengadaan Printer	Dalam Proses				2 Unit				Kecamatan Balen
	I.162	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	Kecamatan Baureno

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.163	Pengadaan Printer		Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.164	Pengadaan Printer		Dalam Proses		5 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
	I.165	Pengadaan Printer		Dalam Proses			3 Unit				Kecamatan Bubulan
	I.166	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit				Kecamatan Gayam
	I.167	Pengadaan Printer		Dalam Proses			3 Unit			2 Unit	Kecamatan Gondang
	I.168	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit	1 Unit			Kecamatan Kanor
	I.169	Pengadaan Printer		Dalam Proses			2 Unit				Kecamatan Kapas
	I.170	Pengadaan Printer		Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Kasiman
	I.171	Pengadaan Printer		Dalam Proses				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Kepohbaru
	I.172	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit				Kecamatan Malo
	I.173	Pengadaan Printer		Dalam Proses				1 Unit		1 Unit	Kecamatan Margomulyo
	I.174	Pengadaan Printer		Dalam Proses		1 Unit					Kecamatan Ngambon
	I.175	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit	1 Unit			Kecamatan Ngraho
	I.176	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit				Kecamatan Padangan
	I.177	Pengadaan Printer		Dalam Proses		2 Unit		5 Unit	5 Unit	2 Unit	Kecamatan Purwosari
	I.178	Pengadaan Printer		Dalam Proses			4 Unit				Kecamatan Sukosewu
	I.179	Pengadaan Printer		Dalam Proses		1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Kecamatan Sumberrejo
	I.180	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Temayang
	I.181	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit				Kecamatan Trucuk
	I.182	Pengadaan Printer		Dalam Proses			1 Unit				kelurahan Banjarejo

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.183	Pengadaan Printer	Dalam Proses				1 Unit				Kelurahan Jetak
	I.184	Pengadaan Printer	Dalam Proses				1 Unit				Kelurahan Ledok Wetan
	I.185	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit					Kelurahan Ngrowo
	I.186	Pengadaan Proyektor	Planned			2 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.187	Pengadaan Proyektor	Planned			1 Unit					Kelurahan Klangon
	I.188	Pengadaan Router	Planned				1 Unit				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	I.189	Pengadaan SAN Storage	Planned					1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Peternakan dan Perikanan
	I.190	Pengadaan Scanner	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kalitidu
	I.191	Pengadaan Proyektor	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Temayang
	I.192	Pengadaan Proyektor	Executed			1 Unit					Kecamatan Gondang
	I.193	Pengadaan Proyektor	Executed			1 Unit					Kecamatan Padangan
	I.194	Pengadaan Proyektor	Executed			1 Unit					Kelurahan Klangon
	I.195	Pengadaan Proyektor	Planned				1 Unit				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	I.196	Pengadaan Proyektor	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.197	Pengadaan Router	Planned					4 Unit			Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.198	Pengadaan SAN Storage	Planned				2 Unit				Kecamatan Balen
	I.199	Pengadaan Scanner	Planned					1 Unit			Kecamatan Baureno
	I.200	Pengadaan Proyektor	Planned			2 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
	I.201	Pengadaan Proyektor	Planned					1 Unit			Kecamatan Kanor
	I.202	Pengadaan Proyektor	Planned				1 Unit				Kecamatan Kepohbaru
	I.203	Pengadaan Proyektor	Planned				1 Unit				Kelurahan Ledok Kulon
	I.204	Pengadaan Screen Proyektor	Dalam Proses					1 Unit			Kecamatan Temayang
	I.205	Pengadaan Screen Proyektor	Planned				1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
	I.206	Pengadaan Screen Proyektor	Planned				1 Unit				kelurahan Banjarejo
	I.207	Pengadaan Smart TV	Planned			1 Unit					Bagian Umum
	I.208	Pengadaan Smart TV	Planned			1 Unit			1 Unit		Kecamatan Temayang
	I.209	Pengadaan Smartboard Interactive Display	Executed			1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.210	Pengadaan Smartboard Interactive Display	Planned							1 Unit	Kecamatan Ngraho
	I.211	Pengadaan Smartphone	Planned			1 Unit					Bagian Umum
	I.212	Pengadaan Smartphone	Planned			1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.213	Pengadaan Smartphone	Planned				1 Unit				Kecamatan Kepohbaru
	I.214	Pengadaan Standing Bracket	Planned			1 Unit					Kelurahan Kepatihan
	I.215	Pengadaan Tablet	Dalam Proses			1 Unit					Bagian Umum

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.216	Pengadaan Tablet	Dalam Proses			1 Unit					Dinas Peternakan dan Perikanan
	I.217	Pengadaan Tablet	Executed			1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.218	Pengadaan Tablet	Executed			1 Unit					Kelurahan Kadipaten
	I.219	Pengadaan Tablet	Executed			1 Unit					Kelurahan Sumbang
	I.220	Pengadaan Tablet	Planned				1 Unit				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	I.221	Pengadaan Tablet	Planned			1 Unit					Kecamatan Bojonegoro
	I.222	Pengadaan Televisi	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Gayam
	I.223	Pengadaan TV LED	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Kalitidu
	I.224	Pengadaan TV LED	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Sekar
	I.225	Pengadaan TV LED	Dalam Proses			1 Unit					Kecamatan Tambakrejo
	I.226	Pengadaan TV LED	Planned				1 Unit	1 Unit			Kecamatan Baureno
	I.227	Pengadaan TV LED	Planned			1 Unit	1 Unit				Kecamatan Bojonegoro
	I.228	Pengadaan TV LED	Planned			1 Unit					Kecamatan Kasiman
	I.229	Pengadaan TV LED	Planned				1 Unit				Kecamatan Margomulyo
	I.230	Pengadaan TV LED	Planned				1 Unit				Kelurahan Jetak
	I.231	Pengadaan Proyektor	Planned			1 Unit					Kelurahan Karangpacar
	I.232	Pengadaan Screen Proyektor	Planned			1 Unit		1 Unit			Kelurahan Kepatihan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.233	Pengadaan Screen Proyektor		Planned		1 Unit					Kelurahan ledok Wetan
	I.234	Pengadaan UPS		Dalam Proses				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kecamatan Tambakrejo
	I.235	Pengadaan UPS		Planned					4 Unit	4 Unit	Kecamatan Gondang
	I.236	Pengadaan UPS		Planned		1 Unit					Kecamatan Margomulyo
	I.237	Pengadaan USB Hub		Dalam Proses		1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.238	Pengadaan USB Hub		Planned			1 Unit				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.239	Penyediaan Lisensi		Planned			1 Kegiatan			1 Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	I.240	Penyediaan Perangkat Mobile		Planned		1 Kegiatan					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Digital Data Terbuka Pemerintahan											
1 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.1	Pengembangan Aplikasi Satu Data		Executed		1 Aplikasi					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Digital Pertanian											
1 Infrastruktur											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		A.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit					
		A.2	Pengadaan PC	Planned		1 Unit					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		A.3	Pengadaan Perangkat TIK	Planned		1 Unit					Kelurahan Kadipaten
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Hukum Masyarakat											
1 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Bagian Hukum
		A.1	Pengembangan Aplikasi JDIH	Planned			1 Aplikasi				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Industri Terintegrasi											
1 Manajemen											
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		A.1	Pengadaan Tenaga Ahli IT	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
2 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.1	Pengembangan Aplikasi Siti Worobejo	Dalam Proses	1 Kegiatan						
3 Infastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		A.1	Pemeliharaan Perangkat TIK	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Jaringan Internet									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		B.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		B.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		C.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
		C.2	Pengadaan PC	Planned			1 Kegiatan		1 Kegiatan		

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.3	Pengadaan Printer	Dalam Proses		2 Unit					
		C.4	Pengadaan Printer	Planned			6 Unit		5 Unit		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Informasi dan Deteksi Dini Bencana Berbasis Geospasial											
1	Infrastruktur										
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		A.1	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.3	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.4	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									
		B.1	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Jaringan Internet									
		C.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		C.3	Berlangganan Internet	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Pemadam Kebakaran
	D	Penyediaan Perangkat Lunak									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		D.1	Pengadaan Lisensi Canva Pro	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		E.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Executed		1 Unit					
		E.2	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned				1 Unit		1 Unit	
		E.3	Pengadaan Baterai Laptop	Dalam Proses		1 Unit					
		E.4	Pengadaan Bracket TV LED	Planned		1 Unit					
		E.5	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses		1 Unit					
		E.6	Pengadaan Flash Disk	Planned			1 Unit		1 Unit		
		E.7	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Planned		1 Unit		1 Unit		1 Unit	
		E.8	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		1 Unit					
		E.9	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit		1 Unit	
		E.10	Pengadaan Mesin Absensi	Executed		1 Unit					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	E.11	Pengadaan Mouse	Dalam Proses			1 Unit					
	E.12	Pengadaan Mouse	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	E.13	Pengadaan PC	Dalam Proses			7 Unit					Dinas Pemadam Kebakaran
	E.14	Pengadaan Printer	Dalam Proses			1 Unit					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	E.15	Pengadaan Printer	Dalam Proses			5 Unit					Dinas Pemadam Kebakaran
	E.16	Pengadaan Printer	Planned					1 Unit		1 Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	E.17	Pengadaan Printhead Printer	Dalam Proses			1 Unit					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	E.18	Pengadaan Smartphone	Planned				10 Unit				Dinas Pemadam Kebakaran
	E.19	Pengadaan SSD	Planned			1 Unit		1 Unit		1 Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Informasi Terintegrasi											
1	Aplikasi										
	A	Pembuatan Aplikasi									Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Pembuatan Website PPID		Dalam Proses		1 Aplikasi					
	A.2	Pembuatan Website Streaming Radio Malowopati		Executed		1 Aplikasi					
	B	Pengembangan Aplikasi									
	B.1	Pengembangan Aplikasi Situs Web Pemkab		Planned		1 Aplikasi					
	B.2	Pengembangan Aplikasi Website Perangkat Daerah		Planned		1 Aplikasi					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Infrastruktur TIK											
1 Manajemen											
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.1	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli		Planned		1 Unit					
	A.2	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli IT		Planned		1 Unit					
	A.3	Pengadaan Pelatihan Statistik Sektoral		Dalam Proses		1 Unit					
2 Layanan											
	A	Penerapan Layanan TIK									Dinas Komunikasi dan Informatika
	A.1	Pengadaan Pemeliharaan Layanan Mail Server		Planned						1 Kegiatan	
3 Infrastruktur											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pemeliharaan Command Center	Dalam Proses		1 Unit					
		A.2	Pemeliharaan Command Center	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		A.3	Pengadaan Pemeliharaan Layanan Mail Server	Planned			1 Unit	1 Unit			
	B	Pemeliharaan Perangkat Jaringan									
		B.1	Pemeliharaan Jaringan Kecamatan	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		B.2	Pemeliharaan Jaringan Komputer	Executed		1 Unit					
		B.3	Pemeliharaan Jaringan Komputer	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		B.4	Pemeliharaan Jaringan Wireless	Executed		1 Unit					
		B.5	Pemeliharaan NOC	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		B.6	Pemeliharaan PAC	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		B.7	Pemeliharaan PAC	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Pemeliharaan Perangkat Keras Server									
		C.1	Pemeliharaan Data Center	Dalam Proses		1 Kegiatan					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.2	Pemeliharaan Data Center	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									
		D.1	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned		1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	
		D.2	Pengadaan Sewa Domain Desa	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		D.3	Pengadaan Virtual Machine	Executed		1 Unit					
		D.4	Pengadaan Virtual Machine Server	Executed		1 Unit					
		D.5	Pengadaan Virtual Machine Server	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	E	Penyediaan Jaringan Internet									
		E.1	Pengadaan Bandwidth	Executed		1 Unit					
		E.2	Pengadaan Bandwidth	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.3	Pengadaan Bandwidth IP Transit I	Executed		1 Unit					
		E.4	Pengadaan Bandwidth IP Transit I	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.5	Pengadaan Bandwidth IP Transit II	Executed		1 Unit					
		E.6	Pengadaan Bandwidth IP Transit II	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.7	Pengadaan Bandwidth Metro	Executed		1 Unit					
		E.8	Pengadaan Bandwidth Metro	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.9	Pengadaan Iuran Keanggotaan APJII	Executed		1 Unit					
		E.10	Pengadaan Iuran Keanggotaan APJII	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	F	Penyediaan Perangkat Jaringan									

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	F.1	Pengadaan Core Router	Planned					1 Unit			
	F.2	Pengadaan Core Switch	Planned						1 Unit		
	F.3	Pengadaan Managed Switch	Executed			1 Unit					
	F.4	Pengadaan Managed Switch	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	F.5	Pengadaan Wireless Access Point Indoor	Executed			1 Unit					
	F.6	Pengadaan Wireless Access Point Indoor	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	G	Penyediaan Perangkat Keras Server									
	G.1	Pengadaan Garansi Server	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	G.2	Pengadaan Server	Executed			1 Unit					
	G.3	Pengadaan Server	Planned				1 Unit			1 Unit	
	G.3	Pengadaan Server HCI	Planned					1 Kegiatan			
	H	Penyediaan Perangkat Keras Storage									
	H.1	Pengadaan SSD	Planned					1 Unit			
	H.2	Pengadaan Storage	Planned						1 Unit		
	I	Penyediaan Perangkat Lunak									
	I.1	Pengadaan Layanan WhatsApp API	Executed			1 Unit					
	I.2	Pengadaan Layanan WhatsApp API	Planned			1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	
	I.3	Pengadaan Lisensi Appstore Apple	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	I.4	Pengadaan Lisensi Canva Pro	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	I.5	Pengadaan Lisensi Capcut	Planned				1 Unit				
	I.6	Pengadaan Lisensi Github Co Pilot Pro +	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	I.7	Pengadaan Lisensi Google AI Ultra 2	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	I.8	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace	Executed			1 Unit					
	I.9	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	I.10	Pengadaan Pemeliharaan Layanan Mail Server	Planned						1 Unit		
	I.11	Pengadaan Sewa Domain Desa	Planned			1 Unit					
	I.12	Pengadaan Sewa Layanan DNS Management	Planned				1 Unit		1 Unit	1 Unit	
	I.13	Penyediaan Hosting Domain	Planned			1 Unit					
	J	Penyediaan Perangkat Peripheral									
	J.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit	1 Unit		1 Unit		
	J.2	Pengadaan Baterai Kamera	Planned						1 Unit		
	J.3	Pengadaan Bracket Monitor	Planned				1 Unit				
	J.4	Pengadaan Camera Video Conference	Planned			1 Unit					
	J.5	Pengadaan DJI Osmo Pocket 3	Planned				1 Unit				
	J.6	Pengadaan Drone Camera	Planned			1 Unit					
	J.7	Pengadaan Kabel HDMI	Planned			1 Unit					
	J.8	Pengadaan Keyboard	Planned			1 Unit					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		J.9	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		J.10	Pengadaan Lensa Kamera	Planned				1 Unit			
		J.11	Pengadaan Monitor	Planned		1 Unit					
		J.12	Pengadaan Monitor Portable	Planned			1 Unit				
		J.13	Pengadaan Mouse	Planned		1 Unit					
		J.14	Pengadaan PC	Planned		1 Unit	1 Unit				
		J.15	Pengadaan Perangkat Zoom	Planned						1 Unit	
		J.16	Pengadaan Printer	Planned					1 Unit	1 Unit	
		J.17	Pengadaan Smart TV	Planned		1 Unit		1 Unit			
		J.18	Pengadaan Sony NP-FV70A V-Series	Planned						1 Unit	
		J.19	Pengadaan Standing Bracket	Planned		1 Unit					
		J.20	Pengadaan TV LED	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		J.21	Pengadaan Video Conference System	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		J.22	Pengadaan Webcam	Planned		1 Unit					
	K	Penyediaan SPLP									
		K.1	Pembuatan SPLP Daerah	Planned			1 Kegiatan				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Investasi Terintegrasi											
1	Infrastruktur										

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		A.1	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	B	Penyediaan Perangkat Keamanan									
		B.1	Pengadaan CCTV	Planned			2 Unit	4 Unit		2 Unit	
	C	Penyediaan Perangkat Keras Server									
		C.1	Pengadaan Server/Data Storage	Planned			1 Unit	1 Unit			
	D	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		D.1	Pengadaan Digital Information Display	Planned				3 Unit			
		D.2	Pengadaan Drone Camera	Planned				1 Unit			
		D.3	Pengadaan Flash Disk	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		D.4	Pengadaan Genset	Planned			1 Unit				
		D.5	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Planned			2 Unit				
		D.6	Pengadaan Keyboard	Planned					1 Unit	1 Unit	
		D.7	Pengadaan Komputer	Planned			15 Unit	5 Unit			
		D.8	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			5 unit	5 unit			
		D.9	Pengadaan Mesin Antrian	Planned				1 Unit			
		D.10	Pengadaan Monitor LCD	Planned				3 Unit			
		D.11	Pengadaan Mouse	Planned					1 Unit	1 Unit	
		D.12	Pengadaan PC	Planned			1 Unit				

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		D.13	Pengadaan Printer	Planned			4 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	
		D.14	Pengadaan Proyektor	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit		
		D.15	Pengadaan Scanner	Planned			3 Unit	3 Unit			
		D.16	Pengadaan Smart TV	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit		
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Investasi Terintegrasi, Layanan Administrasi Pemerintahan											
1		Infrastruktur									
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Kecamatan Ngasem
		A.1	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan Perangkat TIK	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Jaringan Internet									Kecamatan Ngasem
		B.1	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					
		B.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									Kecamatan Ngasem
		C.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		1 Unit					
		C.2	Pengadaan PC	Executed		4 Unit					
		C.3	Pengadaan Printer	Executed		2 Unit					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.4	Pengadaan Smart TV	Executed		1 Unit					
2	Keamanan										
	A	Penyediaan Perangkat Keamanan									Kecamatan Ngasem
		A.1	Pengadaan CCTV	Executed		5 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Keberlangsungan Layanan Digital											
1	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Layanan									
		A.1	Pengadaan Penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk layanan IT	Dalam proses Total							
2	Aplikasi										
	A	Pembuatan Aplikasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pembuatan Aplikasi Sapa Bupati	Executed		1 Aplikasi					
		A.2	Pembuatan Website Bojonegoro Single Window (GAMPIL)	Executed		1 Aplikasi					
	B	Pengembangan Aplikasi									
		B.1	Pengembangan Aplikasi Manajemen Pengembangan Aplikasi	Planned			1 Aplikasi				
		B.2	Pengembangan Aplikasi SSO Kepegawaian	Planned			1 Aplikasi				

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.3	Pengembangan Aplikasi SSO Layanan Publik	Planned				1 Aplikasi			
		B.4	Pengembangan Super Apps Kepegawaian	Planned			1 Aplikasi				
		B.5	Pengembangan Super Apps Layanan Publik	Planned				1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
3 Infrastruktur											
	A	Penyediaan Perangkat Lunak									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pengadaan Layanan WhatsApp API	Executed		1 Kegiatan					
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		B.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Executed		1 Aplikasi					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kebudayaan Pariwisata Terintegrasi											
1 Infrastruktur											
	A	Penyediaan Jaringan Internet									Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		A.1	Langganan Paket Data	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.2	Penyediaan Jaringan	Dalam Proses		1 Kegiatan					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A.3	Penyediaan Jaringan	Planned				1 Kegiatan				
	B	Penyediaan Perangkat Keamanan									Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	B.1	Pengadaan Network Video Recorder (NVR)	Dalam Proses		1 Unit						
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	C.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Dalam Proses		1 Unit						
	C.2	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit					
	C.3	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses		1 Unit						
	C.4	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Dalam Proses		1 Unit						
	C.5	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		1 Unit						
	C.6	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit						
	C.7	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi											
1 Aplikasi											
	A	Pembuatan Aplikasi									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	A.1	Pembuatan Website Bhakti Ormasku	Dalam Proses			1 Aplikasi					
2 Infrastruktur											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		A.1	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.3	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		A.4	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		B.1	Penyediaan Hosting Domain	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Jaringan Internet									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		C.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		C.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	D	Penyediaan Perangkat Lunak									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		D.1	Pengadaan Lisensi Adobe Photoshop	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		D.2	Pengadaan Lisensi Capcut	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		E.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Dalam Proses		1 Unit					
		E.2	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses		1 Unit					
		E.3	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Planned			1 Unit				
		E.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					
		E.5	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit				
		E.6	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi											
1 Aplikasi											
	A	Pembuatan Aplikasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pembuatan Website RSUD Kepohbaru	Executed		1 Aplikasi					
2 Infrastruktur											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pemeliharaan Perangkat Keamanan									Dinas Kesehatan
		A.1	Pemeliharaan CCTV	Executed		1 Kegiatan					
		A.2	Pemeliharaan CCTV	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Dinas Kesehatan
		B.1	Pemeliharaan Komputer	Executed		1 Kegiatan					
		B.2	Pemeliharaan Komputer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		B.3	Pemeliharaan Printer	Executed		1 Kegiatan					
		B.4	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Jaringan Internet									Dinas Kesehatan
		C.1	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		C.2	Berlangganan Internet	Executed		1 Kegiatan					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.3	Berlangganan Internet	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		C.4	Langganan Paket Data	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Penyediaan Perangkat Jaringan									Dinas Kesehatan
		D.1	Pengadaan Kabel HDMI	Planned			1 Unit				
	E	Penyediaan Perangkat Lunak									Dinas Kesehatan
		E.1	Langganan Domain Aplikasi PAS	Planned		1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		E.2	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace	Planned		1 Kegiatan					
	F	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Kesehatan
		F.1	Pengadaan Conference Camera	Planned			1 Unit				
		F.2	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		1 Unit					
		F.3	Pengadaan Layar Monitor Display	Planned			1 Unit				
		F.4	Pengadaan Printer	Planned		1 Unit					
		F.5	Pengadaan Soundcard	Planned		1 Unit					
		F.6	Pengadaan Videotron PPM	Planned		1 Unit					
		F.7	Sewa LED Screen/Videotron	Planned		1 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Ketertiban Masyarakat Terintegrasi											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tata Kelola										
	A	SOP Penggunaan Aplikasi									Satuan Polisi Pamong Praja
		A.1	SOP Penggunaan Aplikasi	Executed		1 Kegiatan					
2	Aplikasi										
	A	Pengembangan Aplikasi									
		A.1	Pengembangan Aplikasi Gatramas	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.2	Pengembangan Aplikasi Gatramas	Dalam Proses		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Infrastruktur										
	A	Pemeliharaan Perangkat Keamanan									Satuan Polisi Pamong Praja
		A.1	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit					
		A.2	Pemeliharaan CCTV	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	B	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									Satuan Polisi Pamong Praja
		B.1	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					
		B.2	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		B.3	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					
		B.4	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	C	Penyediaan Jaringan Internet									Satuan Polisi Pamong Praja
		C.1	Langganan Paket Data	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		C.2	Langganan Paket Data	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Penyediaan Perangkat Lunak									Satuan Polisi Pamong Praja
		D.1	Pengadaan Microsoft Office	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									Satuan Polisi Pamong Praja
		E.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Dalam Proses		1 Unit					
		E.2	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.3	Pengadaan Conference Camera	Planned				1 Unit			
		E.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					
		E.5	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.6	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Ketertiban Masyarakat Terintegrasi											

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Baseline	Target					UIC
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Infrastruktur									
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral								Dinas Lingkungan Hidup
		A.1 Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					
		A.2 Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit		
		A.3 Pemeliharaan Mainframe	Dalam Proses		1 Unit					
		A.4 Pemeliharaan Printer	Planned					1 Unit		
	B	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server								Dinas Lingkungan Hidup
		B.1 Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned				1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
	C	Penyediaan Jaringan Internet								Dinas Lingkungan Hidup
		C.1 Penyediaan Jaringan	Dalam Proses		1 Kegiatan					
		C.2 Penyediaan Jaringan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Penyediaan Perangkat Keamanan								Dinas Lingkungan Hidup
		D.1 Pengadaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit					
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral								Dinas Lingkungan Hidup
		E.1 Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Dalam Proses		1 Unit					
		E.2 Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit			1 Unit	
		E.3 Pengadaan Baterai Laptop	Dalam Proses		1 Unit					
		E.4 Pengadaan Baterai Laptop	Planned			1 Unit				

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	E.5	Pengadaan Desktop PC		Dalam Proses		1 Unit					
	E.6	Pengadaan Drone Camera		Dalam Proses		1 Unit					
	E.7	Pengadaan Flash Disk		Dalam Proses		1 Unit					
	E.8	Pengadaan Flash Disk		Planned			1 Unit				
	E.9	Pengadaan Hard Disk Eksternal		Dalam Proses		1 Unit					
	E.10	Pengadaan Hard Disk Eksternal		Planned			1 Unit				
	E.11	Pengadaan Laptop/Notebook		Dalam Proses		1 Unit					
	E.12	Pengadaan Laptop/Notebook		Planned			1 Unit	1 Unit			
	E.13	Pengadaan Lensa Kamera		Dalam Proses		1 Unit					
	E.14	Pengadaan Mouse		Dalam Proses		1 Unit					
	E.15	Pengadaan Mouse		Planned			1 Unit		1 Unit		
	E.16	Pengadaan PC		Dalam Proses		1 Unit					
	E.17	Pengadaan Printer		Dalam Proses		1 Unit					
	E.18	Pengadaan Printer		Planned			1 Unit	1 Unit		1 Unit	
	E.19	Pengadaan Stabilizer		Dalam Proses		1 Unit					
	E.20	Pengadaan Tablet		Dalam Proses		1 Unit					
	E.21	Pengadaan UPS		Dalam Proses		1 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Manajemen ASN											
1	Manajemen										

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Kursus Singkat/Pelatihan (SDM Digital)	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.2	Optimalisasi penerapan Manajemen SPBE	Dalam Proses		1 Kegiatan					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
1		Tata Kelola									
	A	SOP Penggunaan Aplikasi									Bagian Administrasi Pembangunan
		A.1	Penyusunan SOP Aplikasi	Planned		1 Kegiatan					
2		Manajemen									
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									Bagian Administrasi Pembangunan
		A.1	Training Aplikasi	Planned		1 Kegiatan					
3		Aplikasi									
	A	Pembuatan Aplikasi									Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.1	Pembuatan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik	Planned		1 Aplikasi					
		A.2	Pengembangan Aplikasi Monitoring Fisik dan Non Fisik	Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi		1 Aplikasi	
4 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Jaringan									
		A.1	Pemeliharaan Jaringan	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		A.2	Pemeliharaan Jaringan Komputer	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	B	Pemeliharaan Perangkat Keamanan									
		B.1	Pemeliharaan CCTV	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	C	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		C.1	Pemeliharaan Komputer	Planned			1 Unit			1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		C.2	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.3	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		C.4	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned				1 Unit	1 Unit		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		C.5	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		C.6	Pemeliharaan Printer	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		C.7	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		C.8	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	D	Penyediaan Jaringan Internet									
		D.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		D.2	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		D.3	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		D.4	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	E	Penyediaan Perangkat Jaringan									
		E.1	Pengadaan Router	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		E.2	Pengadaan Wireless Gateway	Planned		1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	F	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		F.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		F.2	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		F.3	Pengadaan Charge Laptop	Planned		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.4	Pengadaan Flash Disk	Executed		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.5	Pengadaan Flash Disk	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.6	Pengadaan Keyboard	Executed		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.7	Pengadaan Keyboard	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.8	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.9	Pengadaan LCD Proyektor	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		F.10	Pengadaan Mouse	Executed		1 Unit					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.11	Pengadaan Mouse	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.12	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		F.13	Pengadaan Printer	Planned		1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		F.14	Pengadaan Printer	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		F.15	Pengadaan Scanner	Planned		1 Unit					Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal Terintegrasi											
1	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		A.1	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi	Executed		1 Kegiatan					

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.2	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.3	Pelatihan Aplikasi SIPADES	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.4	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli IT	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		B.1	Pengadaan Jasa Tenaga Ahli IT	Planned					1 Kegiatan		
2 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		A.1	Pengembangan Aplikasi SIAP DESA	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		A.2	Pengembangan Aplikasi SIBUMBO	Planned			1 Aplikasi				
3 Infrastruktur											
	A	Penyediaan Jaringan Internet									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A.1	Berlangganan Internet	Planned					1 Kegiatan			
	B	Penyediaan Perangkat Keras Server									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	B.1	Penyediaan Perangkat Keras Server	Executed			1 Unit					
	C	Penyediaan Perangkat Lunak									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	C.1	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	D.1	Berlangganan Internet	Planned				1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	D.2	Pengadaan Hard Disk	Planned					8 Unit			
	D.3	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			2 Unit					
	D.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			1 Unit	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	
	D.5	Pengadaan LCD Proyektor	Planned				1 Unit				
	D.6	Pengadaan PC	Executed			1 Unit					
	D.7	Pengadaan PC	Planned				1 Unit				
	D.8	Pengadaan PC	Planned				2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		D.9	Pengadaan Printer	Planned		1 Unit					
		D.10	Pengadaan Printer	Planned		2 Unit					
		D.11	Pengadaan Printer	Planned			1 Unit				
		D.12	Pengadaan Printer	Planned			2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		D.13	Pengadaan Scanner	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		D.14	Pengadaan TV LED	Planned			1 Unit	2 Unit			
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pemuda dan Olahraga Terintegrasi											
1	Layanan										
	A	Penerapan Layanan TIK									
		A.1	Belanja Jasa Dokumentasi	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		A.2	Belanja Jasa Dokumentasi	Planned			1 Kegiatan				Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		A.3	Belanja Jasa Publikasi	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Infrastruktur										
	A	Pemeliharaan Perangkat Keras Server									
		A.1	Pemeliharaan Komputer/PC	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.2	Pemeliharaan Komputer/PC	Planned			1 Kegiatan				Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	B	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		B.1	Pemeliharaan CCTV	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		B.2	Pemeliharaan CCTV	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		B.3	Pemeliharaan Komputer/PC	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		B.4	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		B.5	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	C	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									
		C.1	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned			1 Kegiatan				Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	D	Penyediaan Perangkat Keamanan									
		D.1	Pengadaan NVR	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		E.1	Pengadaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit			1 Unit		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.2	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses		1 Unit			1 Unit		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.3	Pengadaan Flash Disk	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.4	Pengadaan Hard Disk Eksternal	Planned				1 Unit			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.5	Pengadaan Keyboard	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.6	Pengadaan Keyboard	Planned			1 Unit	1 Unit			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.7	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.8	Pengadaan Memori Card	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.9	Pengadaan Memori Card	Planned				1 Unit			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.10	Pengadaan Mouse	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		E.11	Pengadaan Mouse	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.12	Pengadaan PC	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.13	Pengadaan Penyimpanan Cloud	Planned				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.14	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		E.15	Pengadaan Remot Drone	Dalam Proses		1 Unit					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pendidikan Berkualitas											
1 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		A.1	Pemeliharaan Printer, PC dan Laptop	Planned		28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	Dinas Pendidikan
	B	Penyediaan Jaringan Internet									
		B.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan	1 Kegiatan				Dinas Pendidikan
		B.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Pendidikan
	C	Penyediaan Perangkat Jaringan									

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.1	Pengadaan Konektor Kabel UTP	Dalam Proses		333 Unit					Dinas Pendidikan
	D	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		D.1	Pengadaan LCD Proyektor	Dalam Proses		333 Unit					Dinas Pendidikan
		D.2	Pengadaan PC	Dalam Proses		4395 Unit	2 Unit				Dinas Pendidikan
		D.3	Pengadaan PC	Executed		8 Unit					Dinas Pendidikan
		D.4	Pengadaan Printer	Dalam Proses		1 Unit	5 Unit				Dinas Pendidikan
		D.5	Pengadaan Smart TV	Planned			3 Unit				Dinas Pendidikan
		D.6	Pengadaan Videotron	Planned		65 Unit					Dinas Pendidikan
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pengawasan Internal Terintegrasi											
1 Manajemen											
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									
		A.1	Bimtek Teknik Audit Berbantuan Komputer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Inspektorat
		A.2	Bimtek Teknik Audit Berbantuan Komputer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
2 Aplikasi											
	A	Pengembangan Aplikasi									
		A.1	Pengembangan Aplikasi SAKIP Bojonegoro	Dalam Proses		1 Aplikasi					Inspektorat
		A.2	Pengembangan Aplikasi Si-pinter	Planned		1 Aplikasi	1 Aplikasi				Inspektorat

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A.3	Pengembangan Integrasi Perisai dan Sihapsari		Planned			1 Aplikasi				Inspektorat
3 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
	A.1	Pemeliharaan Komputer dan Printer		Dalam Proses		1 Unit					Inspektorat
	A.2	Pemeliharaan Komputer dan Printer		Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Inspektorat
	B	Pengadaan Cloud Computing / Hosting Server									
	B.1	Pengadaan Penyimpanan Cloud		Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Inspektorat
	B.2	Penyediaan Hosting Domain		Planned		1 Kegiatan					Inspektorat
	C	Penyediaan Jaringan Internet									
	C.1	Berlangganan Internet		Dalam Proses		1 Kegiatan					Inspektorat
	C.2	Berlangganan Internet		Executed			1 Kegiatan				Inspektorat
	C.3	Berlangganan Internet		Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Inspektorat
	D	Penyediaan Perangkat Lunak									
	D.1	Pengadaan Software		Dalam Proses		1 Unit					Inspektorat
	D.2	Pengadaan Software		Planned			1 Unit				Inspektorat

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		E.1	Pengadaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit					Inspektorat
		E.2	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses		1 Unit					Inspektorat
		E.3	Pengadaan Hardisk	Planned				1 Unit		1 Unit	Inspektorat
		E.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		1 Unit					Inspektorat
		E.5	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Inspektorat
		E.6	Pengadaan Monitor	Planned			1 Unit				Inspektorat
		E.7	Pengadaan Printer	Executed		1 Unit					Inspektorat
		E.8	Pengadaan Printer	Planned				1 Unit	1 Unit	1 Unit	Inspektorat
		E.9	Pengadaan Scanner	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Inspektorat
		E.10	Pengadaan Smart TV	Planned			1 Unit			1 Unit	Inspektorat
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terintegrasi											
1 Infrastruktur											
	A	Penyediaan Jaringan Internet									
		A.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		A.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
											Anak dan Keluarga Berencana
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		B.1	Pengadaan PC	Executed		10 Unit					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		B.2	Pengadaan PC	Planned			5 Unit				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		B.3	Pengadaan Printer	Executed		6 Unit					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		B.4	Pengadaan Printer	Planned			5 Unit				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Peraturan Perundangan Terintegrasi											
1	Aplikasi										

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pengembangan Aplikasi									
		A.1	Pengembangan Aplikasi SI-Asmara	Dalam Proses		1 Aplikasi					Sekretaris DPRD
		A.2	Pengembangan Website JDIH	Planned		1 Aplikasi					Sekretaris DPRD
2		Infrastruktur									
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		A.1	Pemeliharaan Komputer	Executed		56 Unit					Sekretaris DPRD
		A.2	Pemeliharaan Komputer	Planned			56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	Sekretaris DPRD
		A.3	Pemeliharaan Printer	Executed		72 Unit					Sekretaris DPRD
		A.4	Pemeliharaan Printer	Planned			72 Unit	72 Unit	72 Unit	72 Unit	Sekretaris DPRD
	B	Penyediaan Jaringan Internet									
		B.1	Penyediaan Jaringan	Dalam Proses		1 Kegiatan					Sekretaris DPRD
		B.2	Penyediaan Jaringan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Sekretaris DPRD
	C	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		C.1	Pengadaan Access Point	Executed		56 Unit					Sekretaris DPRD
		C.2	Pengadaan Access Point	Planned			56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	Sekretaris DPRD
		C.3	Pengadaan Flash Disk	Executed		24 Unit					Sekretaris DPRD
		C.4	Pengadaan Flash Disk	Planned			24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	Sekretaris DPRD
		C.3	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed		3 Unit					Sekretaris DPRD

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		C.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Sekretaris DPRD
		C.3	Pengadaan Tablet	Executed		54 Unit					Sekretaris DPRD
		C.4	Pengadaan Tablet	Planned			54 Unit	54 Unit	54 Unit	54 Unit	Sekretaris DPRD
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perdagangan Terintegrasi											
1 Aplikasi											
	A	Pembuatan Aplikasi									
		A.1	Pembuatan Aplikasi e-Pasar	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Infrastruktur											
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		A.1	Pemeliharaan Komputer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.2	Pemeliharaan Komputer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.3	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.4	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.5	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		A.6	Pemeliharaan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	B	Penyediaan Jaringan Internet									
		B.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan					Dinas Komunikasi dan Informatika
		B.2	Berlangganan Internet	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		C.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		2 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
		C.2	Pengadaan PC	Planned		5 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
		C.3	Pengadaan Printer	Dalam Proses		2 Unit					Dinas Komunikasi dan Informatika
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif											
1	Manajemen										
	A	Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia									
		A.1	Pengadaan Tenaga Ahli IT	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Sosial

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Aplikasi										
	A	Pengembangan Aplikasi									
		A.1	Pengembangan Aplikasi SIAP BANSOS	Dalam Proses		1 Aplikasi					Dinas Sosial
3	Infrastruktur										
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		A.1	Pemeliharaan Laptop, PC, dan Printer	Executed		1 Kegiatan					Dinas Sosial
		A.2	Pemeliharaan Laptop, PC, dan Printer	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Sosial
	B	Penyediaan Jaringan Internet									
		B.1	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Executed		1 Kegiatan					Dinas Sosial
		B.2	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Sosial
	C	Penyediaan Perangkat Jaringan									
		C.1	Langganan Paket Data	Executed		1 Kegiatan					Dinas Sosial
		C.2	Langganan Paket Data	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Sosial
	D	Penyediaan Perangkat Lunak									

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	D.1	Pengadaan Lisensi Antivirus	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Unit	1 Kegiatan	Dinas Sosial
	D.2	Pengadaan Lisensi Canva	Planned				1 Kegiatan				Bagian Kesejahteraan Rakyat
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									
	E.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Executed			1 Unit					Dinas Sosial
	E.2	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned				1 Unit				Dinas Sosial
	E.3	Pengadaan Flash Disk	Planned			1 Unit					Dinas Sosial
	E.4	Pengadaan Konektor Converter	Planned			1 Unit					Dinas Sosial
	E.5	Pengadaan Laptop/Notebook	Executed			1 Unit					Dinas Sosial
	E.6	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned				1 Unit	1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	Dinas Sosial
	E.7	Pengadaan Mesin Antrian	Dalam Proses			1 Unit					Dinas Sosial
	E.8	Pengadaan PC	Planned					1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	Dinas Sosial
	E.9	Pengadaan Printer	Executed			1 Unit					Dinas Sosial
	E.10	Pengadaan Printer	Planned				1 Unit	1 Kegiatan	1 Unit	1 Unit	Dinas Sosial
	E.11	Pengadaan USB Hub	Planned			1 Unit					Dinas Sosial
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perpajakan											

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Aplikasi										
	A	Pengembangan aplikasi									Badan Pendapatan Daerah
		A.1	Pemeliharaan Aplikasi	Planned			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
		A.2	Pemeliharaan Aplikasi GIS-EL	Planned		1 Aplikasi					
		A.3	Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDU	Planned		1 Aplikasi					
		B.3	Pemeliharaan Aplikasi eMAP	Planned		1 Aplikasi					
2	Infrastruktur										
	A	Pemeliharaan Perangkat Lunak									Badan Pendapatan Daerah
		A.1	Pemeliharaan Software / Proxy Server	Planned		1 Unit					
	B	Pemeliharaan Perangkat Peripheral									
		B.1	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	Planned	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		B.2	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Planned		1 Unit					
		B.3	Pemeliharaan Printer	Planned		1 Unit					
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		C.1	Pengadaan PC	Planned			1 Unit				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perpustakaan Kearsipan Terintegrasi											
1	Manajemen										

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Baseline	Target					UIC
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Penerapan Layanan TIK								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	A.1	Pembinaan Aplikasi SRIKANDI	Executed	1 Kegiatan						
2		Infrastruktur								
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	A.1	Pemeliharaan Laptop/PC	Executed		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Jaringan Internet								
	B.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B.2	Penyediaan Jaringan	Executed		1 Kegiatan	1 Kegiatan				
	C	Penyediaan Perangkat Jaringan								
	C.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Unit					
	C.2	Pengadaan LED Monitor	Dalam Proses		1 Unit					
	C.3	Pengadaan Router	Dalam Proses		1 Unit					
	D	Penyediaan Perangkat Lunak								
	D.1	Pengadaan Lisensi Aplikasi	Dalam Proses		1 Kegitan	1 Kegitan	1 Kegitan	1 Kegitan	1 Kegitan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		D.2	Pengadaan Lisensi Canva	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		D.3	Pengadaan Lisensi Capcut	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		D.4	Pengadaan Lisensi Zoom Workspace	Dibatalkan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	E	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		E.1	Pengadaan CCTV	Dalam Proses		1 Unit	6 Unit				
		E.2	Pengadaan Flash Disk	Dalam Proses		7 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
		E.3	Pengadaan Hard Disk	Planned				1 Unit			
		E.4	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		4 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		E.5	Pengadaan Mouse	Planned				10 Unit		10 Unit	
		E.6	Pengadaan PC	Dalam Proses		1 Unit	1 Unit				
		E.7	Pengadaan Printer	Dalam Proses		6 Unit		1 Unit			
		E.8	Pengadaan Scanner	Dalam Proses		2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Peternakan Terintegrasi											
1	Aplikasi										
	A	Pembuatan Aplikasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
		A.1	Pembuatan Aplikasi Gayatri	Planned		1 Aplikasi					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:Layanan Tata Ruang Terintegrasi											
1	Infrastruktur										

No.	Proyek/Aktivitas		Status	Baseline	Target					UIC
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral								Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
	A.1	Pemeliharaan PC/Laptop	Dalam Proses		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	A.2	Pemeliharaan Printer	Dalam Proses		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	B	Penyediaan Jaringan Internet								
	B.1	Berlangganan Internet	Dalam Proses		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyediaan Perangkat Peripheral								
	C.1	Pengadaan All in One (AIO) Desktop PC	Planned		3 Unit					
	C.2	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned		12 Unit					
	C.3	Pengadaan Printer	Planned		10 Unit					
	C.4	Pengadaan Smart TV	Planned			4 Unit				
	C.5	Pengadaan UPS	Planned		3 Unit					
	C.6	Pengadaan Videowall	Executed		1 Unit					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD:Layanan Transportasi Terintegrasi										
1	Infrastruktur									
	A	Pemeliharaan Perangkat Peripheral								Dinas Perhubungan
	A.1	Pemeliharaan Perangkat TIK	Executed		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Jaringan Internet								
	B.1	Berlangganan Internet	Planned		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	C	Penyediaan Perangkat Keamanan									
		C.1	Pengadaan CCTV	Planned		1 Unit	1 Unit	1 Unit			
		C.2	Pengadaan Laptop/Notebook	Planned			5 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	
		C.3	Pengadaan PC	Planned			10 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	
		C.4	Pengadaan Videowall CCTV	Planned				1 Unit			
	D	Penyediaan Perangkat Keras Server									
		D.1	Pengadaan Server Streaming	Planned			1 Unit	1 Unit			
	E	Penyediaan Perangkat Keras Storage									
		E.1	Pengadaan Hard Disk	Planned			1 Unit	1 Unit			
	F	Penyediaan Perangkat Lunak									
		F.1	Pengadaan Software	Planned			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	G	Penyediaan Perangkat Peripheral									
		G.1	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses		2 Unit					
		G.2	Pengadaan Printer	Planned			10 unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	
		G.3	Pengadaan Video Wall Processor	Planned			1 Unit				
		G.4	Penyediaan Perangkat Desktop	Planned			1 Unit	1 Unit	1 Unit		
		G.5	Penyediaan Perangkat Mobile	Planned				1 Kegiatan	1 kegiatan	1 Unit	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Menurunnya Kemiskinan											
Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)					10,95	10,55	9,80	9,05	8,55	

No.	Proyek/Aktivitas			Status	Baseline	Target					UIC
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif											
1	Infrastruktur										
	A	Penyediaan Jaringan Internet									Dinas Sosial
		A.1	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Planned	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	B	Penyediaan Perangkat Peripheral									Dlnas Sosial
		B.1	Pengadaan Flash Disk	Executed	1 Unit						
		B.2	Pengadaan Laptop/Notebook	Dalam Proses							
		B.3	Pengadaan PC	Planned		1 Unit					
		B.4	Pengadaan Printer	Dalam Proses							

Bab IV Penutup

Laporan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kondisi target yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana program kerja terkait SPBE.

Laporan Peta Rencana SPBE ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro selama 5 (lima) tahun mendatang dan juga substansi yang terdapat dalam peta rencana ini perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

■ ■ ■

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Penyusunan Perubahan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE													
2	Rapat Persiapan Evaluasi SPBE (Penilaian Mandiri)													
3	Koordinasi Pemantauan Penilaian Mandiri SPBE dengan seluruh OPD													
4	Rapat Finalisasi Hasil Penilaian Mandiri SPBE dengan seluruh OPD													
5	Koordinasi Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SPBE kepada Kementerian PAN RB													
6	Koordinasi Pemantauan Hasil Penilaian Interviu dan Kementerian PAN RB													
7	Koordinasi Pemantauan Hasil Penilaian Visitasi dan Kementerian PAN RB													
8	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi SPBE													
9	Kelompok kerja Transformasi Manajemen													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Sumber Daya Manusia														
		Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK													
		Analisis Peta Jabatan													
		Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK													
		Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK													
10	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Perubahan														
		Evaluasi dan Penyesuaian Peta Proses Bisnis													
		Evaluasi Digitalisasi Layanan													
		Penyusunan Log Manajemen Perubahan													
		Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE													
		Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
11	Kelompok Kerja Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Evaluasi Substansi Peta Rencana SPBE dalam RKA													
	Monitoring dan Clearance Usulan Pengadaan SPBE													
12	Kelompok Kerja Manajemen Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur SPBE													
	Pembentukan SK Tim Helpdesk													
	Pemanfaatan Ticketing System													
	Evaluasi & Perbaikan Kinerja Tim Helpdesk													
	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data													
	Penyusunan Daftar Data													
	Pengumpulan data sektoral dimasing-masing OPD													
	Pemeriksaan pemenuhan data sektoral													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyebarluasan data sektoral													
	Pembaruan Data Sektoral secara berkala													
	Penyimpanan data pada Portal Open Data													
	Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data													
	Evaluasi Penerapan Aplikasi													
	Optimalisasi Penerapan Aplikasi													
	Evaluasi Kapabilitas Infrastruktur													
	Penyusunan Capacity Plan Infrastruktur													
	Pengembangan Kapasitas Infrastruktur													
13	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Penyusunan SK Tim Audit Internal													
	Penyusunan Kebijakan Audit TIK													
	Pelaksanaan Audit Internal													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Pelaksanaan Audit Eksternal													
	Penyusunan SK dan Pembentukan SK Tim Manajemen Risiko													
	Penyusunan dokumen pedoman Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE													
	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko													
	Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD													
	Penetapan konteks risiko SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak													
	Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & Penyusunan evaluasi Risiko SPBE													
	Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya													
	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental													
	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE													
	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan,													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE TAHUN 2026 														
NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	bimbingan, dan supervisi risiko SPBE													
14	Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan													
	Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan (Kebijakan dan SOP)													
	Penyusunan SK dan Pembentukan Tim Komite Manajemen Pengetahuan													
	Optimalisasi Aplikasi Manajemen Pengetahuan													
	Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan													
	Evaluasi dan Perbaikan Manajemen Pengetahuan													
15	Kelompok Kerja Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik													
	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur)													
	Penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyesuaian dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE													
16	Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi													
	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi													
	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya													
	Menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh OPD dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE													

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE

TAHUN 2026



NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE													
	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE													

BUPATI BOJONEGORO,



SETYO WAHONO



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO